PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959

Pergumulan Menegakkan Demokrasi

Buku ini memaparkan tentang sepuluh orang Bapak Bangsa yang pernah menduduki posisi sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan Indonesia. Bagi sebagian orang keberadaan Perdana Menteri dalam pemerintahan Indonesia mungkin terdengar asing, mengingat negara kita saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil.

Dalam sejarah pemerintah Republik Indonesia, meskipun bangsa Indonesia mempunyai UUD 1945 dan sistem pemerintahan menganut sistem presidensil, namun dalam peristiwa perjalanan sejarah negara Indonesia pernah mempunyai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang unik dan terjadi pada kurun waktu 1945-1959 ini, patut diketahui pembaca dan masyarakat Indonesia.

Buku ini berusaha memberikan narasi kesejarahan mengenai keberadaan perdana menteri dalam pemerintahan Indonesia. Keadaan pemerintahan yang kurang stabil dalam upaya memperoleh kedaulatan penuh dan usaha untuk menegakkan demokrasi menjadi latar belakang keputusan unik ini dikeluarkan. Kesepuluh Perdana Menteri Indonesia bekerja dalam pemerintahan dengan karakter pribadi masing-masing. Beragam kisah unik yang hadir, tidak hanya menarik untuk diikuti, tetapi juga pantas untuk dijadikan teladan dan inspirasi.

ISBN 978-623-7092-49-0

TIDAK UNTUK DIJUAL

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959 Pergumulan Menegakkan Demokrasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959

Pergumulan Menegakkan Demokrasi

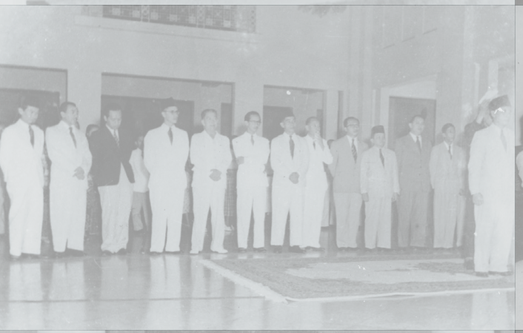

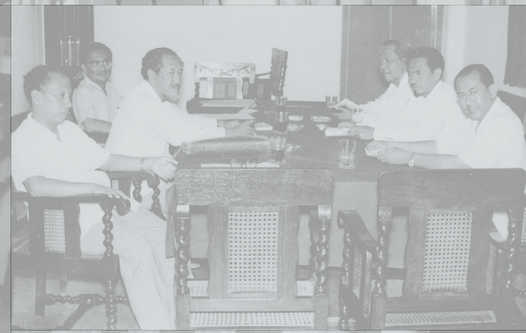

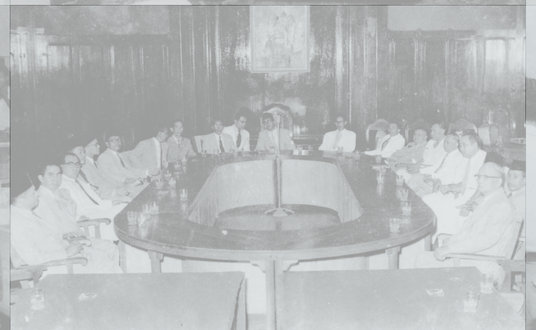

Penasihat
Muhadjir Effendy
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah
Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan

Penanggung Jawab
Triana Wulandari
Direktur Sejarah

Penulis
Farabi Fakih
Uji Nugroho Winardi
Wildan Sena Utama

Editor
Anhar Gonggong
Sri Margana

Tata Letak
Bimo Trisaksono

Tim Produksi:

Pengarah Produksi
Agus Widiatmoko

Penanggung Jawab
Tirmizi
Fider Tendiardi

Penyusun Program Penulisan
Budi Harjo Sayoga
Bimo Adriawan

Analis Sumber Sejarah
Nina Wonsela
Annisa Mardiani

Pengumpul Sumber Sejarah
Krida Amalia Husna
Surya Agung

Pengolah Data
Bariyo
Dwi Artiningsih
Esti Warastika
Oti Murdiyati Lestari

Penerbit
Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270
Telp/Fax: +62-21-5725044

@2019

Hak Cipta dimiliki oleh Penerbit dan dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis pemegang Hak Cipta.

ISBN : 9-786237-092490

PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 1945 - 1959

Pergumulan Menegakkan Demokrasi

SAMBUTAN

Direktur Sejarah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Keberadaan Perdana Menteri dalam pemerintahan Presidensil Indonesia merupakan dinamika pemerintah yang cukup unik. Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno pada tahun 1945 tentang pengangkatan Perdana Menteri merupakan realita sejarah pemerintah Indonesia. Pada satu sisi dalam konstitusi UUD 1945 Pemerintah Indonesia tidak mengenal sistem parlemen, namun pada sisi lain menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Penulisan buku sejarah Perdana Menteri Republik Indonesia mengangkat bagaimana masa-masa awal berdirinya negara RI yang diwarnai dengan berbagai upaya untuk mencapai keseimbangan, yakni memperkuat kedaulatan di dalam negeri, sekaligus perjuangan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Keberadaan Perdana Menteri dalam pemerintahan Indonesia merupakan usaha untuk menghadapi tantangan dan dinamika pada waktu itu.

Penulisan buku *Perdana Menteri Republik Indonesia 1945-1959: Pergumulan Menegakkan Demokrasi* bertujuan untuk merekam dinamika dan capaian Perdana Menteri di Indonesia dalam rangka membangun bangsa yang sejahtera. Pergeseran sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial ke parlementer merupakan fakta sejarah pemerintahan Indonesia. Bagaimana ikhtiar bangsa Indonesia dalam mewujudkan bangsa yang demokratis dari masa ke masa. Penulisan sejarah tokoh Perdana Menteri Indonesia dapat menjadi inspirasi dan aspirasi dalam menguatkan dan menegakkan demokrasi yang saat ini sedang berlangsung, dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam pembangunan dan pemajuan bangsa.

Apresiasi dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para penulis, editor, narasumber, dan tim penulisan yang telah mendukung tersusunnya buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus bekerja dan berkarya bagi bangsa. Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direktur Sejarah

Triana Wulandari

SAMBUTAN
Direktur Jenderal Kebudayaan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Nawacita telah mengamanatkan pelaksanaan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Agenda pendidikan nasional ini haruslah menempatkan secara proporsional aspek pendidikan seperti sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Dalam rangka menjalankan amanat Nawacita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat pendidikan karakter melalui berbagai wahana. Pendidikan karakter pada intinya adalah proses internalisasi nilai-nilai kebaikan dalam diri setiap warganegara. Nilai-nilai ini telah teruji dan terwariskan dari generasi ke generasi dan telah pula menjadi kekayaan umat manusia. Nilai-nilai inilah yang membawa masyarakat pada kemajuan peradaban yang memartabatkan dirinya. Penguatan Pendidikan Karakter melalui sejarah terutama dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, dan cinta tanah air sangat penting dilakukan untuk memperkuat sendi ideologis dari kurikulum pendidikan Indonesia.

Oleh karena itu, kami menyambut gembira inisiatif Direktorat Sejarah dalam penulisan tokoh sejarah Indonesia sebagai bagian dari gerakan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan menjunjung tinggi semangat kebangsaan. Kisah-kisah para tokoh sejarah dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi masyarakat khususnya generasi muda dan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semagat patriotisme.

Buku sejarah tokoh Indonesia dengan judul *Perdana Menteri Republik Indonesia 1945-1959: Pergumulan Menegakkan Demokrasi* kiranya dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi generasi sekarang dan masa depan, bagaimana para tokoh bangsa melalui masa-masa sulit perjuangan mendapatkan pengakuan kemerdekaan, dan bagaimana dalam bersikap menghadapi perbedaan pendapat dalam penyelenggaraan negara.

Rasa bangga dan syukur kami sampaikan atas terbitnya buku ini, semoga menambah cakrawala dalam mensukseskan dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bertanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direktur Jenderal Kebudayaan
Hilmar Farid

DAFTAR ISI

Sambutan
Direktur Sejarah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia II

Sambutan
Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia IV

Pendahuluan 1

Sutan Sjahrir 11

Amir Sjarifuddin 55

Mohammad Hatta 97

Abdul Halim 171

Mohammad Natsir 209

Sukiman Wirjosandjojo 249

Wilopo 287

Ali Sastroamidjojo 327

Burhanuddin Harahap 381

Djuanda Kartawidjaja 421

Penutup 459

Daftar Pustaka 468

Indeks 481

Penulis 492

Editor 494

PENDAHULUAN

Perdana Menteri Dalam Tata Negara Indonesia

Di dalam dunia hukum, dikenal istilah *das sein* dan *das sollen*. *Das Sein* merujuk kepada hukum sebagaimana tertulis sementara *das sollen* mengacu kepada hukum sebagaimana diterapkan di dalam masyarakat. Kedua istilah tersebut diciptakan untuk menggambarkan bahwa dalam banyak kesempatan dan konteks, hukum ideal dan hukum kontekstual dapat berbeda bentuk.

UUD 1945 sebagai produk hukum tertinggi di Republik Indonesia tidak sekalipun menyebut perdana menteri dalam semua pasal dan ayatnya. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa presiden hanya dibantu oleh wakil presiden. Kemudian pada pasal 17 ayat (1) dinyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Jika tidak pernah tertulis dalam produk hukum manapun, mengapa di dalam sejarah politik, Indonesia pernah memiliki hingga dua belas perdana menteri?

Buku yang hadir di hadapan para pembaca ini tidak dimaksudkan untuk menggugat keputusan para pendiri bangsa dan membenturkannya dengan produk hukum tertulis. Melainkan untuk memberikan konteks historis yang melatarbelakangi "keputusan unik" ini. Tidak pula berlebihan jika dikatakan bahwa pengangkatan perdana menteri pertama pada 15 November 1945[1], kurang dari empat bulan sejak proklamasi, adalah tindakan inkonstitusional pertama yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.

DWITUNGGAL ATAU TRITUNGGAL?

Berbicara tentang bapak bangsa, memori masyarakat seringkali tertuju pada Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta yang memang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun, upaya menegakkan kedaulatan republik ini tidak berhenti pada hari yang hingga sekarang diperingati sebagai hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu dan konteks yang bersamaan dengan akhir Perang Dunia II membuat peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari perhatian pemenang perang; negara-negara sekutu.

Indonesia di tahun kemerdekaannya, mau tidak mau, harus menerima kedatangan pasukan sekutu.[2] Setidaknya sejak April 1945, di pulau-pulau utara Kalimantan telah terjadi pertempuran antara pasukan Australia dengan Jepang. Pada bulan September 1945, elemen-elemen kecil tentara Inggris sebagai elemen utama dari pasukan sekutu yang akan menghadapi Jepang telah mendarat di Jawa. Pada 8 September 1945, *Force 136* dari tentara Inggris yang sebelumnya beroperasi di Malaya telah diterjunkan secara rahasia di Batavia. Pasukan ini ditugaskan untuk mengambil data sementara dari tahanan perang (*interniran*) Eropa yang ditahan Jepang di kota tersebut. Baru pada tanggal 15 September, kapal perang Inggris HMS Cumberland di bawah pimpinan Laksamana Muda W.R. Patterson mendarat di pelabuhan Batavia.[3]

Pada kurun waktu yang sama, setelah proklamasi dibacakan, Sukarno ditunjuk sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Keputusan ini didasari oleh pemahaman bahwa kedua tokoh inilah yang paling tepat untuk menghadapi Jepang yang tak otomatis meninggalkan Indonesia setelah kekalahannya. Di sisi lain, kenyataan bahwa tokoh-tokoh ini dekat dengan Jepang membuat sekutu amat berhati-hati dalam berhubungan dengan para pemimpin republik.[4]

Kedatangan sekutu terjadi pada situasi ketika republik dipimpin oleh tokoh-tokoh yang mendapat label sebagai pihak pro-Jepang. Label ini didasari oleh sikap mereka selama tiga tahun sebelumnya yang cenderung bekerjasama dengan pasukan pendudukan Jepang. Di antara tokoh-tokoh yang dimaksud adalah Sukarno. Sembari menunggu pemilihan umum (yang baru dilaksanakan pada tahun 1955), dibentuk pula Komite Nasional Indonesia Pusat atau dikenal sebagai KNIP yang beranggotakan 137 orang. Sejak awal, komite ini telah melihat Sutan Sjahrir sebagai tokoh paling potensial sebagai pemimpin.[5]

Setelah terbentuk, anggota KNIP berdebat mengenai bentuk ideal dari komite ini. Beberapa anggota menyetujui fungsinya sebagai pembantu presiden sementara terdapat pula sebuah faksi yang mendorong perubahan fungsi KNIP menjadi badan legislatif. Pada 7 Oktober 1945, beberapa tokoh yang tidak sejalan dengan Sukarno antara lain Sukarni, Chaerul Saleh, dan Adam Malik disinyalir mendorong lahirnya sebuah petisi supaya KNIP bertindak seperti badan perwakilan rakyat. Selain itu, menteri-menteri kabinet harus bertanggungjawab kepada KNIP dan bukan semata-mata pada presiden.[6]

Pendukung independensi KNIP ternyata lebih kuat dibandingkan pihak yang merasa bahwa komite ini seyogyanya hanya berperan sebagai "pembantu presiden". KNIP mendapatkan independensinya untuk berperan sebagai badan legislatif dengan salah satu argumen bahwa dewan perwakilan rakyat dan majelis permusyawaratan rakyat tidak bisa dibentuk dengan segera. Pada momen yang sama ketika diambil keputusan bahwa KNIP adalah badan legislatif, dibentuk pula badan pelaksana dari komite ini yang disebut dengan Badan pekerja KNIP. Kepala Badan Pekerja ini adalah Sutan Sjahrir.

Sutan Sjahrir diangkat pula sebagai tokoh yang bertanggungjawab untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 14 November 1945. [7] Sesuai dengan aspirasi KNIP, kabinet (yang beranggotakan menteri-menteri) bertanggungjawab kepada KNIP dan bukan kepada Presiden Sukarno. Karena Sjahrir memimpin komite legislatif dan kabinet yang beranggotakan para menteri, maka posisi yang disematkan padanya adalah perdana menteri. Maka sejak pengangkatan Sjahrir ini pula, Republik Indonesia yang bahkan belum genap berusia tiga bulan telah memiliki pejabat perdana menteri yang tak pernah tertulis dalam UUD 1945 dengan kekuatan serta kekuasaan yang tak kalah besarnya dengan presiden dan wakil presiden.

Sjahrir jelas bukan satu-satunya perdana menteri yang pernah dimiliki oleh republik ini. Jabatan ini bertahan hingga tahun 1959 dan pernah diduduki oleh sebelas orang di antaranya adalah Ali Sastroamidjojo yang menjabat dua kali dan Susanto Tirtoprodjo yang hanya bertindak sebagai pejabat sementara. Mengapa mereka terpilih sebagai perdana menteri dan apakah mereka mewakili golongan tertentu? Berikut adalah ringkasan profil dari semua pejabat perdana menteri sejak tahun 1945 hingga 1959.

PARA PIONER HUKUM DAN TATA NEGARA: PERDANA MENTERI INDONESIA

Lahir di Padang Panjang pada tahun 1909, **Sutan Sjahrir** adalah salah satu tokoh sosialis yang terkenal di awal pendirian Republik Indonesia. Menyandang sebutan ini, posisi Sjahrir berjarak tidak hanya dengan tokoh nasionalis seperti Sukarno namun juga dengan tokoh komunis seperti Tan Malaka. Sjahrir termasuk dalam sedikit putra pribumi yang mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Universitas Amsterdam dalam studi ilmu hukum.

Sjahrir pernah menjadi ketua PNI (Pendidikan Nasional Indonesia) meskipun ia lebih sering diafiliasikan dengan Partai Sosialis Indonesia. Sjahrir adalah satu dari tiga pejabat perdana menteri yang memimpin kabinet ketika periode revolusi berlangsung antara 1945-1949. Kenyataan ini tak hanya menyebabkan Sjahrir harus berhadapan dengan Belanda di meja perundingan sebagaimana yang ia lakukan pada akhir tahun 1949. Sjahrir (dan para pemimpin republik lainnya) betul-betul dijadikan sasaran tembak secara harfiah oleh pihak NICA yang kembali ke Indonesia.[8] Ia beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan secara brutal dengan cara ditembak ke arah mobil yang ia kendarai. Rosihan Anwar, jurnalis maestro sekaligus saksi dari periode ini, menuturkan bahwa Ia sebenarnya sudah akan ditembak dari dekat. Namun, pistol yang digunakan oleh tentara Belanda macet dan kemudian seorang anggota *Royal Military Police* (Polisi Militer Inggris) memergoki tindakan tersebut.[9]

Ahli sejarah seperti Rudolph Mrazek melihat alasan utama di balik pengangkatan Sjahrir dan pembentukan jabatan perdana menteri kala itu adalah kebutuhan Republik Indonesia atas seorang diplomat ulung.[10] Sjahrir terkenal sangat kritis dan kerap kali menunjukkan sikap non-kolaboratif terhadap Jepang, Belanda, dan tokoh-tokoh Indonesia yang dianggap lunak terhadap dua kekuatan tersebut. Masih menurut Mrazek, sikap Sjahrir yang anti-Jepang (dan dalam banyak hal bahkan sangat antipati terhadap karakter ningrat dan ketimuran[11]) membuat Belanda yakin untuk memulai perundingan dengan Republik Indonesia.[12]

Di bawah pemerintahannya, Sjahrir berhasil menyelenggarakan Konferensi Linggarjati. Di mata faksi-faksi yang mendukung "kemerdekaan total" seperti Tan Malaka dan pendukung Bung Tomo, konferensi ini hanya merupakan sebuah langkah mundur. Namun, pada persetujuan tersebut Sjahrir mengajukan satu pasal berkenaan dengan arbitrase. Dalam istilah yang lebih sederhana, Republik Indonesia dapat mempersoalkan tindak-tanduk Belanda dalam menjalani perjanjian tersebut ke Dewan Keamanan PBB.[13] Pasal ini kemudian menolong Republik ketika menghadapi Belanda setelah aksi Agresi Militer I.[14]

Perjuangan dalam menegakkan kedaulatan dianggap mengalami kemunduran di masa Sjahrir, setelah perjanjian Linggarjati, Sjahrir mendapatkan mosi tidak percaya. Salah satunya dilontarkan oleh anggota delegasinya sendiri yang kemudian menggantikan jabatannya sebagai perdana menteri; **Amir Sjarifuddin**. Tokoh asal Sumatera Utara yang sebelumnya bergabung dengan Jong Batak ini pula tidak dapat mempertahankan jabatannya dalam waktu yang lama. Amir Sjarifudin terperosok masuk ke lubang yang sama dengan Sjahrir; ia membawa Republik ke perjanjian Renville yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan perjanjian Linggarjati.[15]

Komunikasi antara Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dengan dua partai politik terbesar; Masyumi dan PNI tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Sjahrir. Menyusul perjanjian Renville, pihak PNI dan Masyumi dalam kabinet Amir Sjarifuddin I mengundurkan diri. Sebagai dua kekuatan utama dalam perpolitikan Indonesia pada hari itu, kemunduran Masyumi dan PNI melumpuhkan kabinet Amir Sjarifuddin.[16]

Dalam menyikapi kegentingan tersebut, Amir Sjarifuddin tiba-tiba menyingkir dari panggung politik di Jakarta. Kekosongan posisi ini menuntut Presiden Sukarno untuk menunjuk **Mohammad Hatta** sebagai perdana menteri ke-3 menggantikan Amir Sjarifuddin. Ketika diminta untuk menggantikan Amir Sjarifuddin, Hatta masih menduduki jabatan sebagai wakil presiden. Jabatan yang ia emban sejak tahun 1945 berdampingan dengan Ir. Sukarno.

Seperti Sjahrir, Hatta juga memiliki pengalaman dalam mengenyam pendidikan barat di

Universitas Leiden, Belanda. Keduanya pula dapat mengakses pendidikan tersebut atas jasa keluarga angkat mereka masing-masing yang mengantarkan mereka ke Batavia lalu ke negeri Belanda. Selain menjadi mahasiswa yang tekun dalam studi ilmu hukum, Hatta pula aktif dalam organisasi politik di Belanda. Organisasi yang awalnya bernama *Indische Vereniging*[17] inilah kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia dan kemudian dikenal sebagai cikal bakal dari organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri yang dikenal sebagai Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI).

Tak pula berbeda dengan Sjahrir, Hatta adalah advokat faham sosialisme meskipun tidak pernah secara struktural terlibat dalam PSI. Sosialisme Hatta banyak terwujud dalam bidang sosial-ekonomi; salah satunya diwujudkan melalui ide perkoperasian.[18] Hatta pula mengajukan tiga karakter utama sosialisme Indonesia; *pertama,* sosialisme Indonesia berdiri di atas etika agama untuk menjamin semua umat beragama hidup dalam semangat tolong menolong antar sesama. *Kedua*, sosialisme adalah perwujudan sikap anti-kolonialisme (dalam bahasa Hatta adalah "jiwa berontak) bangsa Indonesia yang telah diperlakukan sangat tidak adil oleh penjajah. *Ketiga*, Hatta percaya bahwa sosialisme Indonesia berakar tidak hanya pada ide-ide tentang sosialisme yang datang dari kebudayaan lain melainkan dari kebudayaan pedesaan di Indonesia.[19]

Mohammad Hatta menjadi perdana menteri selama dua periode; periode pertama berlangsung pada 29 Januari 1948 hingga Agustus 1949. Akhir periode pertama atau yang dikenal sebagai Kabinet Hatta I ditandai dengan Agresi Militer II Belanda ke Yogyakarta. Keberhasilan Belanda merebut ibukota republik kala itu dengan kilat memaksa para pemimpin republik untuk diungsikan ke Muntok, Bangka Barat. Oleh karena itu, Kabinet Hatta II diawali setelah pembebasan para pemimpin Republik dari pengasingan di Bangka. Kabinet Hatta II mendapat tugas amat berat karena harus menakhodai republik dalam menghadapi Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada bulan Desember 1949.[20]

Kabinet Hatta II berakhir pada tahun 1950 dan dilanjutkan oleh seorang pemangku jabatan sementara bernama **Soesanto Tirtoprodjo**. Sebagaimana banyak negarawan Indonesia di awal pembentukan bangsa, Soesanto Tirtoprodjo memiliki latar belakang pendidikan hukum. Sebelum menjadi perdana menteri, lelaki kelahiran Solo ini adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan menduduki dua posisi menteri pada periode perdana menteri sebelumnya. Ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sekaligus Menteri Kehakiman sejak tahun 1946 hingga sesaat sebelum pengangkatannya sebagai Perdana Menteri. Sebab bersifat hanya sebagai kabinet peralihan, Soesanto Tirtoprodjo hanya menjabat sebagai perdana menteri selama kurang lebih satu bulan (Desember 1949-Januari 1950)[21].

Jabatan perdana menteri berikutnya dijabat oleh **dr. Abdul Halim**, seorang dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).[22] Karier perpolitikannya dimulai sejak ia mendaftarkan diri pada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, badan yang kemudian mendukung kinerja perdana menteri pertama Sutan Sjahrir. Sebab berasal dari kalangan non-partai, dr. Abdul Halim mencoba untuk menjaga solidaritas kabinetnya dengan pendekatan-pendekatan personal kepada para menterinya. Ia pula merintis kebijakan pendelegasian tokoh-tokoh kepercayaannya untuk menangani persoalan-persoalan di daerah. Tantangan terbesar pada periode kepemimpinan Perdana Menteri Abdul Halim adalah menjaga eksistensi Republik Indonesia di bawah kerangka Republik Indonesia Serikat.dr. Abdul Halim turun dari jabatan perdana menteri pada 6 September 1950 dan menjadi perdana menteri non-partisan (tidak berasal dari partai politik) terakhir di dalam sejarah keperdanamenterian di Indonesia.[23]

Dokter Abdul Halim kemudian digantikan oleh seorang tokoh dari Partai Masyumi bernama

Mohammad Natsir. Ia adalah aktivis Islam yang sejak usia 18 tahun telah banyak menulis dan telah merebut perhatian Sukarno sejak pengasingan sang proklamator di Ende. Meskipun pada akhir tahun 1950an, partai tempat Ia memperjuangkan idealismenya, Partai Masyumi, ditutup oleh Sukarno, beberapa tokoh nasional kala itu salah satunya adalah Bung Hatta mengatakan bahwa Natsir adalah "anak kesayangan Sukarno".[24]

Menjabat sebagai perdana menteri pada periode Republik Indonesia Serikat, Natsir dikenal dengan keberhasilannya mengajukan Mosi Integral. Mosi ini mengakhiri Republik Indonesia Serikat di mana Republik Indonesia hanya menjadi satu bagiannya. Natsir mendapat banyak sanjungan atas keberhasilannya dalam meyakinkan kolega-kolega politiknya dari "kiri" ke "kanan".[25] Namun, mengapa Sukarno memilih tokoh yang kerap berpolemik dengannya sebagai perdana menteri yang mengawal proses transisi bersejarah republik ini?

Terpilihnya Mohammad Natsir sebagai perdana menteri adalah sebuah kesepakatan dari dua faksi politik yang tak jarang bersitegang yaitu PNI mewakili kubu nasionalis dan Masyumi mewakili kubu Islam. Menurut sejarawan Prancis, Remy Madinier yang menulis sebuah buku mengenai Partai Masyumi, terdapat kesepakatan tidak tertulis bahwa perdana menteri dan *formateur*[26] kabinet yang bertugas sebelumnya harus berasal dari partai yang sama. Sebelum Natsir menjabat, *formateur* kabinet adalah Mr. Sartono wakil dari PNI yang ditunjuk oleh Sukarno.[27]

Mr. Sartono tidak dapat mencapai persetujuan dengan Masyumi mengenai siapa yang harus dipilih sebagai Perdana Menteri meskipun sudah berforum selama 18 hari. Kemudian Presiden Sukarno menyikapi kebuntuan ini dengan mengangkat *formateur* baru yaitu Sidik Djojosukarto dari PNI dan Sukiman dari Masyumi. Diangkatnya Sukiman membuka ruang dialog yang lebih efektif di antara kedua partai tersebut. Salah satu hasilnya adalah menyetujui utusan Masyumi untuk diangkat sebagai perdana menteri yaitu M. Natsir dengan syarat hanya boleh memerintah selama satu periode. Meskipun pengangkatan Natsir didorong oleh kehadiran Sukiman, sesungguhnya M. Natsir dan Sukiman berada pada faksi yang berbeda di dalam Masyumi.[28]

Pria kelahiran Solok, Sumatera Barat pada tahun 1908 ini menjabat sebagai perdana menteri Republik Indonesia sejak bulan September 1950 hingga April 1951. Kemudian Ia digantikan oleh rivalnya dalam partai politik yang sama; **Sukiman Wirjosandjojo**. Sukiman Wirjosandjojo adalah seorang tokoh nasional yang dilahirkan di Surakarta dan sebagaimana Hatta serta Sjahrir, Ia juga sempat mengenyam pendidikan di Belanda. Di Belanda, Sukiman pula bergabung dengan Perhimpunan Indonesia yang antara lain dimotori oleh Hatta dan Sjahrir. Sebelum merantau ke negeri Belanda, Sukiman pernah duduk di bangku sekolah dokter hindia atau dikenal dengan nama STOVIA di Batavia.[29]

Sukiman mengawali periode kepemimpinannya dengan perdebatan sengit antara, sekali lagi, PNI dan Masyumi. Setelah mengalami kabinet Natsir, PNI bersikukuh menolak pengangkatan perdana menteri dari Masyumi untuk kedua kalinya. Namun, berkat negosiasi antara keduanya; PNI melunak dan berubah sikap. Siapapun dari Masyumi boleh menjadi perdana menteri selain M. Natsir. Jawaban dari sikap keras itu adalah terpilihnya Sukiman yang sejak awal berseberangan dengan Natsir dan menurut Natsir secara pribadi; lebih dekat dengan tokoh-tokoh sekuler.[30]

Keputusan Sukiman yang menyetujui penunjukkannya sebagai perdana menteri menciptakan konflik lebih dalam pada tubuh Masyumi. Beberapa jam sebelum pelantikannya, faksi Natsir dalam tubuh Masyumi bahkan memboikot Sukiman dengan menyatakan bahwa segala tindak-tanduknya tidak mewakili Masyumi.[31] Salah satu karakteristik utama dari kabinet Sukiman adalah sikap antikomunis yang pula diiringi oleh pro-Amerika Serikat yang nampak dengan jelas. Oleh karena itu,

pada tahun 1952, kabinet ini digulingkan atas keputusan Sukiman menerima bantuan luar negeri (*mutual security aid*) dari Amerika Serikat.[32] Selain itu, di tahun yang sama, kekuatan Islam pada percaturan politik nasional terbelah setelah keputusan Nahdlatul Ulama meninggalkan Masyumi dan membentuk partai sendiri.[33]

Sukiman kemudian digantikan oleh **Wilopo** seorang tokoh PNI yang digadang-gadang akan membawa pembaharuan pada posisi perdana menteri setelah dua kali berturut-turut dipimpin oleh tokoh Masyumi. Tidak hanya berkenaan dengan latar belakang politik pendahulunya, kedua tokoh Masyumi tersebut terbukti tidak cakap dalam memimpin dan tidak mampu menghadapi faksionalisme di dalam partainya sendiri.[34]

Pada 3 April 1952, Wilopo, diangkat menjadi perdana menteri secara langsung oleh Presiden Sukarno. Pengangkatan langsung ini dilakukan oleh presiden setelah *formateur* yang seharusnya menjadi tim transisi dari kabinet Sukiman kepada kabinet Wilopo menyerah setelah hampir sembilan belas hari berdebat untuk mencari perdana menteri baru. Sedianya, *formateur* kabinet ini adalah Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi). Sidik Djojosukarto tetap pada pendirian awal bahwa dirinya tak akan menunjuk diri sendiri menjadi perdana menteri namun tak pula menginginkan perwakilan Masyumi terpilih kembali.[35]

Wilopo berhasil memimpin kabinetnya relatif lebih lama dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Salah satu prestasi kabinet ini adalah perbaikan di bidang ekonomi yang dibuktikan dengan keberhasilannya dalam membujuk kementerian-kementerian untuk mampu menghadapi pemotongan anggaran. Beberapa menteri di dalam kabinet Wilopo yang berasal dari kalangan praktisi (non-partai dan disebut sebagai *zaken kabinet*) berhasil membuat rencana-rencana jangka panjang dalam menyelesaikan masalah negara.[36]

Wilopo lahir dan dibesarkan di Purworejo dengan latar belakang pendidikan pada dua sekolah ternama; *Rechts Hoge School* (kemudian menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan *Technische Hoge School* (kemudian menjadi Institut Teknologi Bandung).[37] Sejak muda, Wilopo aktif dalam beberapa organisasi seperti Partindo dan PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia).

Kejatuhan kabinet Wilopo salah satunya disebabkan oleh meruncingnya konflik antara kabinetnya dengan pemimpin angkatan darat. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober 1952. Diawali dengan konflik internal di dalam tubuh angkatan darat antara ex-prajurit KNIL dengan ex-prajurit PETA, peristiwa 17 Oktober 1952 berujung pada penolakan keras para perwira atas intervensi pemimpin sipil yang dianggap terlalu jauh. Puncak konflik tersebut adalah pengepungan Istana Negara Jakarta oleh meriam-meriam dan panzer-panzer yang dimobilisasi oleh Jenderal A.H. Nasution atas bantuan Mayor Kemal Idris dan Letnan Kolonel D.I. Panjaitan.[38]

Pengganti Wilopo, **Ali Sastroamidjojo** adalah pejabat perdana menteri dengan *portfolio* di bidang politik luar negeri terbanyak. Selain pernah menjabat duta besar RI di Perserikatan Bangsa Bangsa New York dan duta besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, pemikiran-pemikirannya turut mendorong terlaksananya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955.

Ali Sastroamidjojo adalah rekan satu almamater dari Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan M. Natsir di Universitas Leiden, Den Haag, Belanda. Semasa perkuliahannya, Ali Sastroamidjojo tidak hanya aktif dalam Perhimpunan Indonesia sebagaimana tiga rekannya. Ia juga kerap menghadiri konferensi-konferensi di bidang perdamaian atau solidaritas negara-negara terjajah.[39]

Sejak bergabung dalam Dewan Pertahanan Negara di Yogyakarta sebagai delegasi PNI, Ali Sastroamidjojo telah berperan aktif pada persoalan-persoalan politik luar negeri. Meskipun begitu, Ali Sastroamidjojo diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran di bawah kabinet Amir Syarifudin. Meski tidak menjabat sebagai menteri luar negeri, Ali Sastroamidjojo dipercaya oleh pemerintah RI untuk menjadi juru runding pada pertemuan Lake Success yang diadakan atas prakarsa PBB di New York.[40]

Ali Sastroamidjojo yang menaruh perhatian luar biasa terhadap isu-isu luar negeri ternyata justru "diuji" dengan isu-isu keamanan dalam negeri. Ketika Ia menjabat, isu keamanan di Aceh mulai menyeruak, PKI menguat, dan kekuatan politik tentara justru tak menunjukkan titik lesu setelah peristiwa Oktober 1952. Kemampuan Ali Sastroamidjojo dalam mengundang negara-negara korban kolonialisme di Asia dan Afrika dalam Konferensi Asia-Afrika Bandung dianggap tak mampu memperbaiki reputasinya.[41]

Meskipun Ali Sastroamidjojo banyak mendapatkan banyak tantangan di era kepemimpinannya, Ia adalah satu-satunya tokoh yang dapat duduk di posisi perdana menteri sebanyak dua kali. Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama dapat bertahan selama kurang lebih dua tahun (1953-1955) dan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua berlangsung pada tahun 1956-1957. Tak dapat dipungkiri bahwa kepemimpinan Ali Sastroamidjojo termasuk bertahan lama jika dibandingkan dengan pendahulu-pendahulunya.

Di antara dua kabinet Ali Sastroamidjojo, terdapat kabinet yang dipimpin oleh tokoh Batak-Muslim bernama **Burhanuddin Harahap**. Burhanuddin Harahap adalah seorang tokoh Masyumi dengan latar belakang pendidikan ilmu hukum di universitas pertama yang dimiliki oleh Republik Indonesia yang merdeka; Universitas Gadjah Mada. Pada kabinet Burhanuddin Harahap, terdapat suatu peristiwa amat penting yaitu pemilihan umum berskala nasional pertama.[42]

Setelah pelaksanaan pemilu 1949 di Yogyakarta, Pemerintah RI mengadakan pemilu berskala nasional pertama pada 1955 di bawah kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu ini melibatkan enam belas wilayah pemilihan dan dapat dikatakan unik karena mempertimbangkan untuk memberikan posisi tetap untuk perwakilan minoritas; tiga kursi untuk komunitas Arab, tiga kursi untuk komunitas Eropa, dan enam kursi untuk komunitas Tionghoa/China. Pada pemilihan umum ini diketahui pola preferensi pilihan masyarakat Indonesia yang mementingkan aliran (sebagai contoh; kesesuaian asal-usul dan golongan) dibandingkan pertimbangan politik lainnya. Pemilu 1955 menghasilkan PNI sebagai pemenang diikuti oleh Partai Masyumi, Partai NU, dan PKI berurutan setelahnya.[43]

Meskipun berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, kemenangan PNI dan keberhasilan PKI berada di urutan ke-4 menjadi "tamparan" keras ke wajah kabinet ini. Para pemenang pemilu, PNI dan PKI memutuskan untuk tidak berada di dalam kabinet dan menjadi oposisi bersama dengan satu faksi PIR. Kabinet Burhanuddin juga dianggap tidak dapat menyelesaikan beberapa persoalan politik dan ekonomi seperti menangani pergolakan Darul Islam di Aceh yang awalnya dijanjikan akan selesai dengan *djalan lain*. Kabinet Burhanuddin juga tidak mampu menyelesaikan persoalan ekonomi berupa keterbatasan pangan meskipun telah mengusahakan import beras.[44]

Kabinet Burhanuddin kemudian digantikan oleh Ali Sastroamidjojo untuk kedua kalinya. Pada periode ke-2 ini, kabinet kembali disusun atas kekuatan partai-partai besar yaitu PNI, Masyumi, dan partai baru yang langsung mendapatkan perolehan suara cukup tinggi dalam pemilu 1955, yaitu: Partai NU. Kabinet ini bertahan selama kurang lebih satu tahun dan kemudian digantikan oleh menteri perencanaan negara sekaligus satu-satunya orang Sunda yang pernah menjabat; **Djuanda Kartawidjaja**.

Djuanda Kartawidjaja atau Djuanda telah bergabung dalam pemerintahan RI sejak awal kemerdekaan yaitu tahun 1946. Raden Djuanda Kartawidjaja yang merupakan anggota keluarga

berdarah biru dari keluarga bangsawan Cirebon pernah menjadi menteri keuangan, menteri pekerjaan umum, menteri penerangan, hingga menteri pertahanan. Djuanda terpilih menjadi perdana menteri ke-11 sekaligus perdana menteri terakhir setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II tumbang setelah tak mampu menahan gejolak pergolakan daerah-daerah.

Djuanda paling dikenal karena keberhasilannya menghasilkan deklarasi yang mengokohkan posisi Republik Indonesia sebagai negara kelautan. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa perairan di antara wilayah Republik Indonesia bukan perairan bebas melainkan milik Republik Indonesia. Deklarasi ini secara tersurat menunjukkan keengganan Republik Indonesia untuk patuh pada peraturan (*ordonantie*) Belanda mengenai wilayah kepulauan. Setelah Perdana Menteri Djuanda turun dari jabatannya, deklarasi ini dituangkan dalam Undang Undang No.4/PRP/1960 yang salah satunya berkonsekuensi dalam perluasan wilayah Republik Indonesia hingga dua kali lipat.[45] Deklarasi ini kemudian diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1982 dengan keputusan yang dikenal dengan UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea*).[46]

Berhasil menghasilkan peraturan yang menguntungkan wilayah Republik Indonesia, Djuanda sebagaimana perdana menteri pendahulunya belum berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Bahkan persoalan ini tidak dapat diselesaikan hingga tahun 1963 ketika Sukarno menempuh jalan konfrontatif dalam menyelesaikan persoalan ini.

PERDANA MENTERI TERAKHIR: MENUJU DEMOKRASI TERPIMPIN

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, Presiden Sukarno atas dorongan PNI mengeluarkan dekrit presiden 1959. Dekrit ini dikeluarkan atas masalah yang telah terjadi sejak awal tahun 1950an ketika Republik Indonesia mencanangkan UUD 1950 sebagai pengganti UUD 1945. Badan yang bertanggungjawab atas pembentukan UUD 1950 adalah Badan Konstituante yang berperan sebagaimana lembaga legislatif yang dapat menyusun undang-undang.

Konstituante dibentuk pasca pemilu 1955 dengan tugas menyusun UUD 1950. Lokasi inti dari persidangan Konstituante bertempat di Bandung dan menggunakan gedung konferensi yang sama dengan Konferensi Asia Afrika. Dalam perjalananya, kinerja konstituante tidak selalu efektif. Sejak bulan Desember 1955 hingga November 1956, sebagai contoh, majelis ini tidak pernah bersidang.[47]

Pembubaran Badan Konstituante ini hanya sebuah bentuk pelaksanaan dari Dekrit Presiden yang disampaikan pada Juli 1959 atas desakan A.H. Nasution. Dekrit ini adalah deklarasi awal dari Demokrasi Terpimpin yang secara masif memperbesar kekuasaan Sukarno dalam urusan politik. Sukarno tidak hanya menjadi kepala negara (Presiden) melainkan menjadi kepala pemerintahan (Perdana Menteri) pada Kabinet Kerja yang dibentuk setelah pembubaran Kabinet Djuanda. Dalam kabinet ini, Djuanda "diturunkan" menjadi menteri utama yang sesungguhnya tidak lebih dari jabatan politik.[48]

Sukarno yang merangkap jabatan (meskipun sebagai perdana menteri) secara institusional mengakhiri periode ke-perdanamenteri-an di Indonesia. Sukarno bertahan sebagai pejabat perdana menteri selama tujuh periode kabinet (Kabinet Kerja I hingga Kabinet Dwikora) yang hanya dibedakan oleh *reshuffle* menteri-menteri yang bekerja di bawahnya. Konsep pemimpin tunggal di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh tokoh yang sama bahkan berlanjut pasca kejatuhan Sukarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto. Memasuki periode Orde Baru, konsep perdana menteri sudah tidak digunakan.

ENDNOTES

1 Rosihan Anwar. *Mengenang Sjahrir: Seorang Negarawan dan Pejuang Kemerdekaan yang Tersisih dan Terlupakan*. (Jakarta, Gramedia; 2010). Hlm. 204.

2 Peter Stanley. *Tarakan: An Australian Tragedy.* (New South Wales, Allen & Unwin Pty Ltd; 1997). hlm. 15-17.

3 David Jardine. *Foreign Fields Forever: British Involvement in Indonesia Between 1945-1946* (Jakarta, Fellview Publications; 2002). hlm. 14-15.

4 M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta, Serambi; 2010). hlm. 449.

5 Gilang Rahadian, *et al. Seri Buku Tempo Sjahrir.* (Jakarta, KPG; 2010). hlm. 68.

6 *Ibid*.

7 Sutrisno Kutoyo. *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 1997). hlm. 336.

8 Rosihan Anwar. *Sejarah Kecil Petite Historie Indonesia Jilid 7: Kisah-Kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan* (Jakarta, Kompas; 2015). Hlm. 99.

9 Rosihan Anwar. *Ibid.*

10 Rudolf Mrazek. *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*. (Jakarta, Obor; 1996) Hlm. 121.

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*

13 Gilang Rahadian, *et al. Seri Buku Tempo Sjahrir. Ibid.* hlm. 92-93.

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

16 Iin Nur Insaniwati. *Mohamad Roem: karier politik dan perjuangannya, 1924-1968.* (Jakarta, Indonesiatera; 2002). Hlm. 72.

17 Harry Poeze, Cornelis Dijk, & Inge van Der Meulen. *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. (Jakarta, Gramedia; 2008). Hlm. 133.

18 Y. Harsoyo. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. (Tangerang, Widyatama; 2006). Hlm. 12.

19 Y. Harsoyo. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan. Ibid.* Hlm.

20 Deliar Noer. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. (Jakarta, LPES; 1980). Hlm. 359.

21 Yudi Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. (Jakarta, Gramedia; 2015). Hlm. 10 & M.B.P. Manus. *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI; 1993). Hlm. 118-120.

22 Abdul Halim. *Di Antara Hempasan dan Benturan: Kenang-Kenangan Dr. Abdul Halim 1942-1950.* (Jakarta, ANRI; 1981). Hlm. 1-3.

23 *Ibid.*

24 Lukman Hakim (Ed.). *M. Natsir Di Panggung Sejarah Republik.* (Jakarta, Republika; 2008). Hlm. 6-7.

25 Agus Basri. "Pahlawan NKRI yang Terlupakan" dalam Lukman Hakiem (Ed.). *100 Tahun Mohammad Natsir Berdamai dengan Sejarah.* (Jakarta, Republika; 2008). Hlm. 153.

26 Istilah dalam Bahasa Prancis yang berarti *pembentuk*

27 Remy Madinier. *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism.* (Singapore, NUS Press; 2015). hlm. 111.

28 *Ibid.*hlm.112.

29 Remy Madinier. *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism. ibid.* hlm. 49.

30 *ibid.* hlm. 112.

31 Herbert Feith. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. (Jakarta, Equinox; 2007). Hlm. 180.

32 *ibid.*

33 Martin Van Bruinessen. NU: Tradisi, Relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru. (Jakarta, LKiS; 2004). Hlm. 58.

34 Remy Madinier. *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism. ibid.* hlm. 49.

35 Herbert Feith. The Wilopo Cabinet 1952-1953 Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia. (Jakarta, Equinox; 2007). Hlm. 85.

36 *Ibid.* Hlm.

37 Zulfikar Ghazali, *et.al.* Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo. (Jakarta, Depdikbud; 1998). Hlm. 44-46.

38 Hario Kecik. *Pemikiran Militer 2 Sepanjang Masa Bangsa Indonesia*. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia; 2009). Hlm. 77.

39 Yanto Bashri & Retno Suffatni. *Sejarah Tokoh Bangsa*. (Yogyakarta, LKiS; 2004). Hlm. 184.

40 Yanto Bashri & Retno Suffatni. *Sejarah Tokoh Bangsa. Ibid.* Hlm. 185.

41 J.Th. Linblad. *Bridges to New Business: The Economic Decolonization of Indonesia*. (Leiden, KITLV;2008). Hlm. 45-46.

42 Hans Antlov. "Introduction". dalam Hans Antlov & Sven Cederroth (Ed.). *Elections in Indonesia: New Order and Beyond.* (London, RoutledgeCurzon; 2004). Hlm.2-3.

43 Leo Suryadinata. *Elections and Politics in Indonesia*. (Singapore, ISEAS; 2002). Hlm.21-22.

44 Herbert Feith. *The Decline of Constitutional Democracy. Ibid.* Hlm. 460-461.

45 John G. Butcher & Robert E. Elson. *Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State.* (Singapore, NUS Press; 2017). Hlm. 55-56.

46 R. Haller Trost. *Boundary and Territory Briefing: The Territorial Dispute Between Indonesia and Malaysia over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan in the Celebes Sea: A Study in International Law.* (Durham, University of Durham; 1995). Hlm. 16.

47 M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Ibid. Hlm. 521.

48 *Ibid*. Hlm. 553.

SUTAN SJAHRIR

SUTAN SJAHRIR:

Seni Diplomasi Mempertahankan Republik

"Hidup yang tidak dipertaruhkan takkan mungkin dimenangkan"

Sutan Sjahrir

PENGANTAR

Sutan Sjahrir atau akrab disapa dengan bung kecil merupakan perdana menteri pertama Indonesia. Ia merupakan tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang. Kesadaran politiknya terhadap pentingnya gagasan kebangsaan dan kesatuan nasional daripada gagasan sempit provinsialisme tumbuh sejak masa sekolahnya di Bandung. Orientasi tersebut telah tercermin dalam penamaan organisasi yang turut didirikannya, Jong Indonesie–bertransformasi menjadi Pemuda Indonesia–yang menurut salah satu kolega Sjahrir, telah dimaksudkan sebagai modal dalam menampung kelompok-kelompok kedaerahan pada waktunya. Sejak aktif dalam Pemuda Indonesia inilah secara kritis Sjahrir telah melihat pendudukan Belanda sebagai sebuah ketidakadilan, sebab kolonialisme lebih mengutamakan kekuasaan atas koloni daripada menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap bangsa Indonesia. Salah satu warisan Sjahrir dalam masa aktivisme mudanya di Bandung adalah mendirikan Tjahja Universiteit suatu inisiatif menyebarluaskan pendidikan kepada rakyat dengan tujuan mendidik masyarakat dan mencerahkan pemikiran mereka. Fundamentalnya peran pendidikan sebagai basis pendorong perubahan sosial telah disadari oleh Sjahrir sejak dini dan ini diaplikasikan lebih lanjut olehnya ketika membangun Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-baru) bersama kompatriotnya sekaligus mentor berpolitiknya Moh. Hatta selepas ia pulang dari studinya yang belum selesai di Belanda.

Meskipun dikenal sebagai murid yang cerdas, pengetahuan Sjahrir yang luas tentang politik, hukum, filsafat, kebudayaan, dan sejarah tidak didapatkannya melalui jalur "sekolah formal", tapi lebih dibentuk oleh "pengalaman informalnya" bergaul, ikut, dan berpetualang dalam aktivisme organisasi-organisasi politik. Dalam fase studi di Belanda, misalnya, Sjahrir lebih sering mengembara meraih pengetahuan di "kelas-kelas jalanan" daripada duduk manis mendengar ceramah di universitas. Di masa petualangan politiknya di Belanda, Sjahrir terpikat dengan

Sjahrir bersama Sukarno dan Mohammad Hatta. Reputasi dan pengaruh Sjahrir di kalangan pemuda meningkat setelah ia pulang dari pengasingannya di Digul dan Banda Neira.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

ide-ide sosialisme. Dalam pandangannya, sosialisme yang merupakan representasi dari pemikiran progresif di kalangan intelektual Indonesia merupakan antitesis dari kapitalisme yang merupakan induk dari kolonialisme. Kecenderungannya adalah orang yang menolak kolonialisme juga akan menolak kapitalisme, dan memilih sosialisme sebagai sistem tandingan yang menawarkan jalan kemakmuran dan kesejahteraan. Bagi Sjahrir sosialisme adalah syarat untuk mendorong revolusi sosial di Indonesia untuk menghancurkan feodalisme dan fasisme, dua musuh yang dianggapnya paling berbahaya bagi kemerdekaan dan kemanusiaan. Sejak masa pergerakan nasional, Sjahrir adalah tokoh yang aktif menyuarakan pentingnya gagasan dalam menghapuskan feodalisme dan membangun demokrasi. Gagasannya ini dengan teguh konsisten diperjuangkannya walau masa berganti: zaman okupasi Jepang, Revolusi, sampai kemudian mengembrio dalam pokok-pokok pikiran utama partai yang didirikannya di tahun 1950-an, Partai Sosialis Indonesia (PSI)

Pesona dan kebesaran Sjahrir sebagai tokoh kemerdekaan Indonesia semakin terasa ketika ia pulang dari pengasingannya di Digul dan Banda Neira di awal tahun 1940-an. Statusnya sebagai tahanan politik yang sama dengan tokoh-tokoh yang besar lebih dahulu darinya, seperti Sukarno dan Hatta, meningkatkan reputasi dan pengaruhnya di kalangan pemuda. Apalagi, Sjahrir memilih untuk tidak mau tunduk bekerja di bawah pemerintahan Jepang dan mengambil jalan gerakan bawah tanah bersama para pemuda. Kekuatan dari jaringan politik yang dibangun Sjahrir, berisi tokoh-tokoh intelektual muda dari kelompok mahasiswa dan eks PNI-baru, adalah pada kemampuannya mendapatkan informasi terbaru mengenai politik internasional. Kelompok Sjahrir adalah yang paling awal

menyadari kekalahan Jepang dari Sekutu dan mendorong kemerdekaan Indonesia segera. Meskipun Sjahrir tidak mendapatkan posisi apa-apa dalam struktur pemerintahan Indonesia yang baru–karena menolaknya, reputasinya di masa Jepang telah mengangkatnya setara dengan dwitunggal Sukarno-Hatta. Bahkan bila dicermati, Republik di awal masa Revolusi amat bergantung pada poros Sukarno-Hatta-Sjahrir untuk terus meneguhkan eksistensinya di tengah ketidakpastian politik akibat situasi politik dalam negeri yang tidak menentu dan tekanan politik internasional yang besar terhadap kemampuan Indonesia. Selama menuju proses untuk menjadi perdana menteri, Sjahrir merealisasikan impiannya mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis. Warisannya sebagai perdana menteri antara lain mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda melalui penetapan jalur diplomasi, mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia yang sah, dan membangun jembatan demokratisasi republik muda.

TAHUN-TAHUN KESADARAN

ARISTOKRAT EGALITER

Sutan Sjahrir dilahirkan di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada tanggal 5 Maret 1909. Ibunya adalah Siti Rabiah dan ayahnya bernama Moh. Rasad gelar Maharaja Soetan merupakan jaksa kepala pada landraad di Medan. Ia bersaudara dengan Siti Rohana yang merupakan wanita pelopor pers bumiputera di Indonesia. Dengan latar belakang yang berasal dari keluarga terpandang, Sjahrir bisa masuk ke sekolah terbaik di Medan, Europeesche Lagere School (ELS). Setelah menamatkan pendidikannya di ELS, Sjahrir melanjutkan sekolahnya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Medan selama tiga tahun. Sejak kecil, sama seperti dengan Hatta, Sjahrir dibesarkan dalam dua dunia: Islam dan modernisasi Barat. Ia mendapatkan pendidikan dasar Islam dari ayahnya, namun di rumahnya ia terpapar dengan modernisasi melalui majalah-majalah Hindia dalam bahasa Belanda dan Melayu.[1]

Setelah menyelesaikan studinya di MULO, Sjahrir dihadapkan pada dua pilihan yang umumnya ditemui oleh anak-anak elite Minangkabau yang merantau untuk sekolah: menjadi *handelaar* (pedagang) atau *ambtenaar* (pegawai).[2] Akhirnya, Sjahrir memutuskan pilihannya pada jalur menjadi ambtenaar. Ia melanjutkan sekolah di AMS Bandung tahun 1926 dalam Jurusan Budaya Barat Klasik atau Jurusan A yang khusus mengajarkan bahasa Latin dan budaya Yunani. Sekolah ini mempersiapkan siswanya untuk memasuki perguruan tinggi hukum. Dengan pilihannya ini kemungkinan Sjahrir dikirim orangtuanya ke Bandung untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi jaksa.[3]

Meskipun dibesarkan dalam kehidupan aristokrasi Minangkabau, Sjahrir justru tumbuh sebagai pemuda yang tidak menyukai kultur kebangsawanan. Ia tumbuh menjadi intelektual yang keras terhadap gagasan dan perilaku feodalisme, yang menurutnya merupakan salah satu problem besar yang menghantui Indonesia. Sjahrir tidak pernah minta dihormati sebagai elite karena latar belakang keluarganya. Di masa depan, ia lebih memilih untuk mendorong ide-ide demokrasi dan egalitarian di dalam masyarakat Indonesia.

MEKARNYA KESADARAN POLITIK

Di masa studinya di Bandung, Sjahrir masih menekuni hobi lamanya bermain sepakbola sebagai pemain tengah.[4] Ia pun masih sering menyempatkan diri untuk menonton pertandingan antara tim sepakbola yang dianggap penting, baik dari dalam maupun luar negeri.[5] Selain itu, Sjahrir ikut bergabung dengan grup teater mahasiswa Batovis (Bandoengse Toneel Vereeniging van Indonesische Studenten) yang acap pentas di Bandung dan sekitarnya tiap bulan.[6] Dalam himpunan ini, Sjahrir berkontribusi sebagai sutradara, penulis, dan pernah menjadi pemain dalam peran-peran tokoh intelektual. Banyak orang Belanda yang datang dalam pementasan Batovis sebab tidak hanya menggunakan bahasa Belanda, tetapi pementasannya juga menarik. Sjahrir pun masih bermain biola dan berdansa waltz, fox trot, dan charleston. Di Bandung, Sjahrir lebih banyak "mengunjungi *soirées dansantes* yang lebih bergaya dan multiras".[7]

Meskipun Sjahrir adalah pelajar yang flamboyan, ia merupakan murid yang cerdas. Sjahrir bukanlah siswa yang rajin dan tekun belajar mempersiapkan segalanya seperti Hatta. Namun, di kelas, Sjahrir dikenal suka mendebat dan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terpikirkan oleh kawan-kawan sekelasnya. Hamdani, rekan sekelasnya yang kelak menjadi residen Cirebon di waktu perundingan Linggarjati, menyatakan bahwa Sjahrir jarang belajar menyiapkan pelajaran sekolah untuk esok, namun ia mampu menerjemahkan pelajaran dalam bahasa Inggris, Jerman, Perancis, maupun Latin. Selain itu, Sjahrir mampu menjawab pertanyaan dari guru-gurunya dan bertanya hal yang sulit kepada

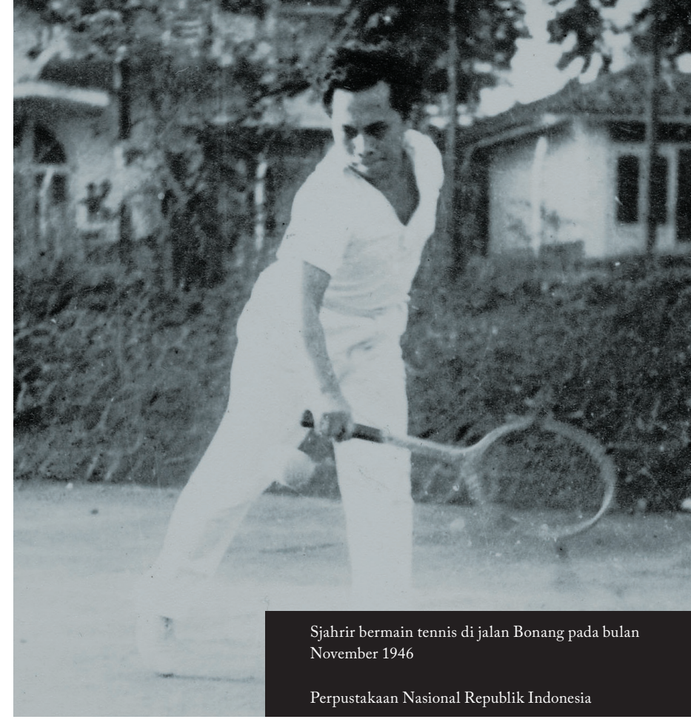

Sjahrir bermain tennis di jalan Bonang pada bulan November 1946

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

guru sejarahnya, Dr. de Haan, dan guru bahasa Latinnya, Dr. Katwijk dalam hal filosofi dan ketatanegaraan Yunani dan Romawi kuno.[8]

Dalam usia yang masih sangat muda, Sjahrir telah mentautkan antara ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat.[9] Ia mendirikan klub belajar bersama kawan-kawan AMS bernama Patriae Scientiaeque (PSQ) atau "Untuk Tanah Air dan Ilmu Pengetahuan" yang mendiskusikan persoalan-persoalan politik, sosial, dan pendidikan.[10] Kesadaran Sjahrir terhadap persoalan di tanah air dibentuk oleh intensitasnya membaca berita-berita tentang situasi di Indonesia dalam buletin berita Algemene Indische Dagblad (AID). Hampir setiap sore Sjahrir dan beberapa pelajar sekolah berkumpul di depan percetakan Vorkink di pusat kota Bandung, di jalan yang kini disebut jalan Asia-Afrika, untuk membaca surat kabar AID yang ditempelkan pada papan agar dapat

dibaca masyarakat umum.[11] Sewaktu Sjahrir tiba di Bandung, buletin AID menurunkan laporan tentang percobaan pemberontakan komunis di Batavia, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, kepada pemerintah kolonial. Para pelajar Bandung rupanya ingin tahu berita pemberontakan PKI yang gagal tersebut.

Kesadaran berpolitik Sjahrir mekar pertama kalinya di Bandung. Pada tahun 1927, Sjahrir bersama sepuluh orang temannya membentuk himpunan pemuda nasionalis yang berasaskan persatuan bangsa: Jong Indonesie. Dalam statuta Jong Indonesie di tahun 1927 disebutkan bahwa tujuan organisasi ini adalah mendorong kesatuan nasional Indonesia melalui gerakan pramuka, olahraga, jurnal, selebaran, dan pertemuan atau rapat-rapat.[12] Di bulan Desember 1927 nama organisasi ini berubah menjadi Pemuda Indonesia. Organisasi ini tidak hanya berpusat di Bandung, namun di penghujung tahun 1928 Pemuda Indonesia telah menyebar sampai Batavia, Yogyakarta, dan Surabaya. Bagian pemudi organisasi ini, Putri Indonesia, memiliki cabang di Bandung, Surabaya, dan Batavia.[13] Untuk menyebarkan gagasan-gagasannya kepada masyarakat luas, Pemuda Indonesia menerbitkan tiga majalah dalam cabang-cabangnya: *Jong Indonesie* di Bandung, *Kabar Kita* di Surabaya, *Soeara Kita* di Yogyakarta.[14] Di awal tahun 1929, anggota Pemuda Indonesia sudah mencapai 300 orang di Bandung.[15] Untuk memperkuat organisasi dan kegiatan-kegiatannya, Pemuda Indonesia memiliki toko koperasi yang menjual cinderamata kerajinan tradisional, di samping iuran yang didapatkan dari para anggota dan juga sumbangan dari pendapatan yang didapatkan dari pertunjukkan Batovis.

Salah satu inisiatif Sjahrir bersama Pemuda Indonesia yang penting adalah pendirian sekolah rakyat untuk memberantas buta huruf bernama Tjahja Volksuniversiteit. Dari nama sekolah ini "cahaya" dan "universitas rakyat" (Volksuniversiteit) tercermin upaya dari Pemuda Indonesia membangun pendidikan rakyat agar mereka terdidik dan mendapatkan pencerahan. Universitas ini dibangun tidak hanya untuk mengajar membaca dan menulis, namun juga mengajarkan pelajaran bahasa asing, ekonomi, matematika, fisika, serta pelajaran lainnya.[16] Di antara enam ratus orang yang terdaftar sebagai murid, terdapat kuli, petani, pekerja, beberapa puluh wanita, dan orang tua berusia di atas empat puluh tahun. Meskipun sekolah ini cukup populer, bagi para petani atau kuli yang tidak menguasai bahasa asing dan hanya menguasai bahasa Sunda, mereka sulit untuk mendapatkan manfaat dari mempelajari bahasa asing dalam aktivitas keseharian mereka. Orang-orang kotalah yang bertahan pada lembaga pendidikan ini dan kuliah diberikan dalam bahasa Belanda atau Melayu.[17]

Tjahja Volksuniversiteit ini didirikan di beberapa tempat di sekeliling Bandung, seperti di Cimindi, Ujungberung, di kampung Badjanegara jurusan Lembang dan di Regentsweg yang menjadi jalan Kabupaten.[18] Pemuda Indonesia mampu memperluas cabang-cabang Tjahja Volksuniversiteit sampai ke Batavia dan Yogyakarta, meskipun pendidikan di Bandung merupakan yang paling maju dan menjadi acuan.[19] Guru-guru sekolah ini merupakan aktivis-aktivis cabang yang mengajar secara sukerala setiap sore hari. Para orang tua tidak diminta membayar uang sekolah, hanya secara sukarela diminta tiap bulan mengirim satu piring nasi ditambah sedikit lauk pauk untuk makanan para pengajar.[20] Sekolah ini mampu bertahan sampai tahun 1938. Namun, karena kesukaran teknis, seperti kesulitan mendapatkan pengajar dan mahalnya biaya pemeliharaan sekolah, disamping ketatnya pengawasan dinas intelijen Belanda terhadap sekolah-sekolah nasional seperti Tjahja menyebabkan sekolah ini tidak dapat bertahan. Meskipun demikian, pendirian sekolah Tjahja ini merupakan awal terbentuknya keyakinan Sjahrir bahwa pendidikan merupakan pondasi yang paling vital dalam menggerakkan perubahan. Hal ini kelak diaplikasikan olehnya bersama dengan Hatta ketika membangun organisasi Pendidikan Nasional Indonesia atau yang populer disebut sebagai PNI baru.

Di masa sekolah AMS ini, menurut Subadio Sastrosatomo, Sjahrir telah melihat secara kritis kolonialisme Belanda lebih mengutamakan kekuasaan daripada menegakkan keadilan dan kebenaran untuk bangsa Indonesia.[21] Ia merasa bahwa kolonialisme Belanda memperlakukan rakyat Indonesia secara tidak adil, menipu, dan tidak terhormat. Meskipun begitu, Sjahrir tidak mengembangkan rasa benci dan permusuhan terhadap Belanda atau Barat, sebaliknya ia lebih mementingkan pengertian.[22] Ia berani dan mau bertukar gagasan atau menyatakan pendapatnya mengenai kolonialisme dengan orang-orang Belanda yang kenal dengan dirinya. Misalnya, Sjahrir terkenal di kalangan siswa AMS karena ia berani berdebat dengan kepala sekolah dan guru-guru Belanda tentang penjajahan Belanda. Bahkan kepala sekolah AMS Bandung, Dr. Bessem, dengan jengkel mengolok-olok Sjahrir dengan bertekuk lutut di depannya dan mengatakan "*Ik geef my gewonnen, o wyze heer*" (saya menyerah, ya tuan yang amat tahu).[23]

MENDEBAT BUNG KARNO

Bandung merupakan salah satu pusat dari pergerakan antikolonial Indonesia di awal abad ke-20. Di kota ini, banyak dari tokoh pergerakan penting menamatkan studi atau sekolahnya. Di AMS, misalnya, Sjahrir satu sekolah dengan tokoh-tokoh masa depan Indonesia, seperti Moh. Natsir (menteri penerangan dalam kabinet pertama Sjahrir), Burhanuddin (menteri penerangan negara Indonesia Timur), dan Hamdani (residen Cirebon waktu perundingan di Linggarjati).[24] Organisasi nasionalis penting di tahun 1920-an, Partai Nasional Indonesia (PNI), juga lahir di kota metropolitan ini. PNI nyaris mendominasi politik nasional Indonesia pasca penumpasan PKI di tahun 1927. Sebagai partai yang mengedepankan agitasi massa, PNI berhasil dalam memobilisasi rakyat kecil untuk bersama-sama bergerak melawan pemerintah kolonial.

Di akhir tahun 1920-an inilah awal melambungnya nama Sukarno sebagai pemimpin kharismatis yang sangat populer di kalangan pergerakan dan rakyat kebanyakan. Para tokoh pelajar dan pemuda yang berada di Bandung banyak pula yang mengagumi ketokohan Sukarno. Meskipun Sjahrir tidak masuk ke dalam PNI seperti yang banyak dilakukan oleh kawan-kawannya, namun ia bersama teman-temannya di AMS sering menjumpai tokoh pergerakan nasionalis kiri yang bermukim di Bandung, termasuk di antaranya Sukarno, Tjiptomangunkusumo, Dr. Samsi, dan Ir. Anwari.[25] Sjahrir beberapa kali menghadiri

rapat umum PNI dan sesekali mengikuti perdebatan di dalam lingkaran politik Sukarno. Sementara itu, Sukarno sendiri ada kalanya diminta untuk berbicara dalam pertemuan Pemuda Indonesia.[26] Kolega Sukarno di PNI, Mr. Soenarjo, diminta sebagai penasihat bagi Pemuda Indonesia. Studi klub Sjahrir, Patriae Scientiaeque, acap kali menggunakan paviliun taman Iskaq Tjokrohadisurjo, tokoh PNI dan teman dekat Sukarno.[27] Pemuda Indonesia disebutkan dalam laporan kepolisian Belanda merupakan laboratorium penggemblengan calon pemimpin bagi PNI. Sukarno berpidato dalam pertemuan Pemuda Indonesia di bulan Maret 1928 bahwa organisasi ini dan PNI merupakan "satu kesatuan yang tak terpisahkan".[28]

Sukarno dan Sjahrir memiliki perbedaan usia sembilan tahun. Meskipun begitu, keduanya memiliki banyak kesamaan–dan juga perbedaan tentunya. Latar belakang keluarganya dan pendidikannya sama: berasal dari keluarga terpandang dan berpendidikan Barat. Keduanya dikenal flamboyan, meskipun bakat flamboyan Sjahrir lebih tampak sejak dini dibanding Sukarno. Keduanya memiliki ketertarikan secara mendalam pada soal-soal kebudayaan: sastra, musik, dan teater. Baik Sjahrir dan Sukarno sama-sama dikenal tukang debat sejak masih muda. Dua-duanya berani dan tegas menyampaikan pendapatnya di tengah-tengah rapat umum.

Dalam sebuah rapat yang diadakan oleh Pemuda Indonesia, Sukarno yang menghadiri rapat tersebut untuk memberikan pendapatnya pernah didebat oleh Sjahrir yang jauh lebih junior dalam dunia pergerakan. Rapat tersebut membicarakan tentang watak provinsialis dari gerakan pemuda dan perlunya gerakan pemuda kedaerahan bergabung ke dalam satu wadah perkumpulan pemuda yang berasas kebangsaan.[29] Dalam sebuah sesi, Sukarno terlibat dalam perdebatan dengan Suwarni, ketua Putri Indonesia yang juga teman dekat Sjahrir (nantinya istri Mr. Karim Pringgodigdo, Sekretaris Negara). Sukarno dikritik oleh Suwarni, yang dijuluki "Madam Sun Yat Sen" karena tidak mau kalah dalam berdebat, karena terlalu membanggakan partainya.[30] Kritikan Suwarni membuat suasana pertemuan menjadi panas. Sukarno yang agak hilang kesabaran kemudian membentak Suwarni dalam bahasa Belanda dengan sikap yang canggung.[31]

Melihat hal tersebut, Sjahrir segera mengambil sikap dengan mengetukkan palu ke maja dan memperingatkan Sukarno agar tidak banyak menggunakan bahasa Belanda dalam rapat nasional dan tidak berbicara kasar terhadap kaum perempuan yang hadir.[32] Sukarno yang terpandang di kalangan pemuda sebagai tokoh nasionalis terkemuka terkejut dengan tindakan yang diambil Sjahrir. Namun, Sukarno menyadari kekeliruannya dan mengucapkan permintaan maaf. Kemungkinan kultur Medan dan Minangkabau yang lebih terbuka dan terus terang membuat Sjahrir tidak segan mengkritik Sukarno. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Sjahrir membuat suasana pertemuan menjadi canggung. Sebabnya bagi para pemuda yang berusia 19 dan 20 tahunan yang hadir dalam rapat itu, Sukarno adalah pemimpin bangsa, ketua umum PNI yang beranggotakan puluhan ribu orang.[33] Sementara itu, popularitas Sjahrir sebagai pemimpin pergerakan belum bisa dibandingkan dengan "sang putera fajar".

Konflik di Bandung merupakan awal dari persitegangan Sukarno dan Sjahrir yang memiliki riwayat panjang di masa pergerakan, penjajahan Jepang, Revolusi, sampai Demokrasi Terpimpin. Hubungan politik Sukarno dan Sjahrir bila diibaratkan memang seperti air dan api. Keduanya sulit bersatu dalam waktu lama dan sering berbeda pandangan, meskipun sama-sama berjasa dalam membangun bangsa. Terlepas dari itu, meskipun sempat bersitegang dalam rapat Pemuda Indonesia, setamatnya dari AMS Sjahrir sempat bertemu dengan Sukarno untuk memberitahukan kelanjutan studinya di Belanda. Sukarno memberi nasehat kepada Sjahrir agar menyelesaikan studinya di Belanda dengan baik sebelum ikut berkecimpung dalam pentas pergerakan di tanah air. Namun, krisis pergerakan nasional dan juga keaktifan Sjahrir di dalam pergerakan sosialisme dan perburuhan di Belanda daripada berkuliah terpaksa membuatnya meninggalkan kuliahnya di Belanda.

SJAHRIR DAN SUMPAH PEMUDA

Ketika Sjahrir membentuk Jong Indonesie sebagai wadah pergerakan pemuda di Bandung, kesadarannya tentang kebangsaan telah matang. Penamaan organisasi Jong Indonesie telah mencerminkan keyakinan para anak muda organisasi tersebut atas kesadaran itu. Bahkan nama organisasi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Pemuda Indonesia, setahun sebelum Kongres Pemuda Kedua di bulan Desember 1928. Dengan penamaan organisasi Pemuda Indonesia dan Pemudi Indonesia, menurut Hamdani, Sjahrir dan kawan-kawan telah bermaksud menjadikan organisasi ini sebagai "modal menampung dan mempersatukan segenap perkumpulan-perkumpulan kedaerahan pada waktunya".[34] Dalam tahun-tahun ini, menyitir pendapat Gerry van Klinken, telah timbul kesadaran di kalangan pemuda bahwa gagasan provinsialisme sebagai konsepsi yang cocok bagi Indonesia masa depan telah kadaluwarsa.[35] Selain menggunakan nama Pemuda Indonesia yang lebih mencerminkan gagasan kebangsaan daripada kedaerahan, organisasi ini juga memilih "merah putih" sebagai bendera lambang dan seringkali dalam pertemuannya menggunakan bahasa Indonesia.[36]

Dalam sebuah pementasan Pemuda Indonesia di bulan April 1928, tema-tema seperti "tanah air", "ibu pertiwi", "anti-feodalisme", ditampilkan. Ceritanya tentang seorang putri priyayi yang sangat progresif mendukung gagasan kemerdekaan tanah air, sementara ayahnya yang merupakan priyayi menolak gagasan kemajuan semacam itu. Sandiwara tersebut menampilkan Dr. Tjiptomangunkusumo sebagai lambang priyayi progresif yang menolak feodalisme dan mendukung gagasan kemerdekaan. Cerita ditutup dengan orangtua sang putri dan para priyayi yang membenarkan perjuangan kaum muda dan pemimpin rakyat Dr. Tjipto.[37]

Kesadaran kebangsaan yang semakin matang di kalangan pemuda mencapai klimaksnya dalam Kongres Pemuda Kedua di Batavia pada bulan Desember 1928. Semangat kebangsaan yang menyala-nyala di kalangan pemuda mendorong munculnya fusi di antara organisasi-organisasi kepemudaan yang provinsialis. Yang terpenting adalah di antara para pemuda ini sepakat untuk

mengangkat ide dari Yamin mengenai "satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa". Mereka percaya bahwa hanyalah negeri Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia yang dapat menyatukan kenyataan etnografis, antropologis, dan demografis Indonesia yang beraneka ragam. Penyatuan dalam perjuangan memang diperlukan untuk memperkuat pergerakan nasional dalam melawan Belanda dan mendirikan suatu negeri yang merdeka. Di dalam kongres tersebut, untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu "Indonesia Raya", yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia, diiringi dengan instrumen biola, gitar, dan ukulele.[38]

Sjahrir hadir dalam kongres tersebut mewakili delegasi Bandung. Keterangan ini diperkuat dengan kesaksian Idham, sanak Sjahrir yang tinggal di Batavia, yang mengatakan bahwa Sjahrir memang hadir di kongres itu dan sempat mampir mengunjungi keluarga Idham.[39] Ide-ide yang diangkat dalam Kongres Pemuda memang bukanlah sebuah ide yang baru bagi Sjahrir dan Pemuda Indonesia. Gagasan persatuan dalam kebangsaan telah mereka dorong di kalangan pergerakan, terutama di Bandung. Bagi Sjahrir pula, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu merupakan komponen yang penting bila konsepsi persatuan atau integrasi yang dipilih.[40] Bahasa Indonesia jelas menarik para pemuda karena ia dibangun dalam tradisi yang lebih egaliter dari bahasa daerah lain dan oleh karenanya bebas dari tradisi feodal. Bahasa Indonesia pula adalah "bahasa yang tanpa memori dan konotasi sejarah yang luas … ia menatap ke masa depan karenanya bahasa ini secara sempurna menjadi bahasa kaum muda dan pemberontakan".[41]

Karena keegaliteran dan kenetralitasannya, bahasa Indonesia memikat kaum muda seperti Sjahrir. Maka tidak aneh jika dalam rapat-rapat Jong Indonesie, Sjahrir mendorong para anggota untuk menggunakan bahasa Indonesia daripada berbahasa Belanda. Ataupun apabila menggunakan bahasa Belanda, sebaiknya pembukaan pidato dimulai dengan berbahasa Indonesia. Dalam kurikulum Tjahja Volksuniversiteit, bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan. Bahasa Indonesia pun merupakan bahasa pertama setelah bahasa Belanda di sekolah tersebut. Bagi banyak anggota Pemuda Indonesia hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi mereka dibesarkan dalam tradisi berbahasa Belanda ataupun bahasa ibu mereka, yaitu Sunda atau Jawa.

BERGERAK MELAWAN

"KULIAH JALANAN" DI BELANDA

Selepas menyelesaikan sekolahnya di AMS Bandung, Sjahrir meneruskan studinya di Belanda. Mengikuti cita-cita dari keluarganya, Sjahrir diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Meskipun kemudian, Sjahrir pindah dan mendaftar di Universitas Leiden. Ia menyusul kakak perempuannya Sjahrizal Djoehana, istri dokter Djoehana Wiradikarta, yang sedang mendalami studi pascasarjana di bidang kedokteran di Universitas Amsterdam.[42] Menurut pengakuan kakaknya, Sjahrir ternyata hanya berpetualang selama di Belanda, "hanya berkeliling-keliling" dan jarang berkuliah.[43] Pergaulan Sjahrir di Belanda memang luas, ia sering tak pulang semalaman atau bahkan seminggu.

Tidak lama setelah datang di Belanda, pendukung dana utama Sjahrir, yakni ayahnya, meninggal dunia. Di awal tahun 1931 Dr. Djoehana pun menyelesaikan studinya dan kembali ke tanah air. Sjahrir hidup sendirian dan kekurangan uang. Namun, Sjahrir menyiasatinya dengan tinggal di rumah karibnya Salomon Tas, ketua dari Sociaal Democratische Studenten Club (Klub Mahasiswa Demokrat Sosial), bersama istri Tas, Maria Duchâteau dan kedua anak kecilnya. Maria Duchâteau kelak menjadi istri Sjahrir, dinikahkan di Medan sekembalinya dari Belanda. Namun, pernikahan tersebut hanya seumur jagung. Orang-orang Belanda tidak menyukai pribumi seperti Sjahrir menikahi wanita Belanda.[44] Akhirnya, Maria dipaksa kembali ke negeri penjajah.

Di Belanda, seperti kebanyakan tokoh muda antikolonial, Sjahrir dengan serius menekuni sosialisme dan Marxisme. Dalam teropong konteks sejarah, pilihan ini merupakan sebuah kewajaran sebab sosialisme merupakan "gagasan politik kiri pada masa itu yang menjadi representasi pemikiran progresif di kalangan kaum terpelajar Indonesia dalam menghadapi kolonialisme yang dianggap sebagai perkembangan lanjut dari kapitalisme".[45] Jiwa zaman pada masa itu menganggap bahwa kolonialisme dan kapitalisme mendorong terciptanya eksploitasi manusia oleh kelompok manusia lainnya dan hanya akan menghasilkan kekayaan hanya pada para pemilik modal dan kesengsaraan pada kelompok yang tereksploitasi yakni tenaga kerja.[46] Daya tarik teori Marxis bagi Sjahrir adalah koherensi dan kekuatannya untuk menemukan diagnosis yang meyakinkan mengenai hakekat dari imperialisme dan kapitalisme. Ia meyakini mengenai evolusi historis dalam perspektif Marxis dari tahapan feodal, kapitalis, sampai menuju masyarakat yang sosialis. Meskipun begitu, penerimaan Sjahrir terhadap konsepsi sejarah yang materialis tersebut tidak kaku dan dogmatis.[47] Ia tampaknya tidak percaya mentah-mentah terhadap model hukum sejarah yang evolusionis tersebut dan yang pasti tidak percaya akan adanya partai atau kelompok yang memiliki otoritas untuk menafsirkan apalagi menerapkan teori itu pada situasi yang spesifik.[48] Dengan hati-hati Sjahrir juga menganalisa bahwa pergerakan dalam alam kolonialisme cenderung berdasarkan kebangsaan daripada kelas, sebab tidak seluruh kelas pekerja diorganisasikan dengan model marxis, di samping model kebangsaan lebih menyatukan dan kuat daya tariknya.

Alasan lainnya Sjahrir tertarik sedemikian kuatnya dengan ide-ide Marxis dan kelompok kiri karena nampaknya mereka satu-satunya kelompok orang Belanda yang memiliki simpati terhadap aspirasi kemerdekaan di Indonesia.[49] Dalam memulai mempelajari sosialisme, perkumpulan mahasiswa sosialis menjadi salah satu tempat berlabuh bagi Sjahrir. Perkumpulan ini bukanlah *underbow* dari Sociaal Democrasiche Arbeiders Partij (SDAP), meskipun keduanya saling berhubungan. Gagasan sosialis Sjahrir pada mulanya begitu kuat dipengaruhi oleh karibnya Sol Tas. Menurut Mrazek, "gagasan-gagasan sosial Sjahrir yang kabur berubah menjadi keyakinan yang bersifat sosialis" ketika berdiskusi intens dengan Sol Tas.[50] Umumnya, mahasiswa sosialis menentang pandangan yang kabur, etis, dan sentimentil di kalangan sosial demokrat Belanda yang di belakangnya tersimpan

kedok sosialisme religius.[51] Kelompok mahasiswa ini lebih radikal, mereka mendukung Indonesia merdeka sesegera mungkin dari Belanda.[52] Di dalam perkumpulan mahasiswa, barangkali Sjahrir adalah sedikit orang yang mempelajari sosialisme secara sungguh-sungguh.[53] Bacaannya merentang dari Karl Marx dan Fredriech Engels, Rosa Luxemburg, Hilferding, Karl Kautsky, Otto Bauer, sampai Hendrik de Man.

Bahkan, untuk memperdalam pengetahuannya tentang sosialisme, Sjahrir bergabung langsung dengan serikat buruh, sambil bekerja di sana mencari pendapatan. Ia bekerja pada sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Meskipun, sebetulnya tidak ada pekerjaan rutin harian di serikat tersebut.[54] Namun, Sjahrir memiliki keyakinan bahwa "kehidupan sosialisme yang sesungguhnya dapat ditemukan pada kelas pekerja".[55] Seperti yang dikatakan Tas bahwa Sjahrir melakukan "ziarah murni", suatu penyelaman spiritual ke dalam kalangan proletariat. Sjahrir memang tidak mau setengah-tengah. Dalam mendalami pemikiran sosialisme, ia berkelana ke kiri, berkawan dengan aktivis-aktivis radikal, sampai masuk ke pergaulan kaum anarkis yang menolak segala hal berbau kapitalisme.[56]

PARTAI KADER SEBAGAI KUNCI PERLAWANAN

Meskipun berkelana ke sana ke mari mempelajari sosialisme, Sjahrir tidak lupa perjuangan negerinya melawan penjajahan Belanda. Ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia (PI) yang memiliki reputasi sebagai pembangkang pemerintah kolonial. Sjahrir masuk ke dalam organisasi itu dibimbing dan bahkan dipersiapkan menjadi bibit pemimpin PI selanjutnya oleh Moh. Hatta, yang sama-sama berasal dari Minangkabau. Dalam lingkungan pergerakan antikolonial, nama Hatta telah diakui kebesaran namanya. Bahkan, Sukarno dan para tokoh-tokoh penting pergerakan tanah air setia mengikuti kabar mengenai sepak terjang PI dan terbitannya *Indonesia Merdeka*. Pengaruh Hatta tidak diragukan besar di dalam mendorong gagasan kemerdekaan Indonesia, kesatuan, dan kebangsaan. Ia dianggap musuh utama pemerintah Belanda akibat aktivitas-aktivitas radikalnya dalam mempropagandakan kemerdekaan Indonesia, tidak hanya di tanah air tetapi juga di lingkaran antiimperialisme Eropa. Karena keterlibatannya yang semakin mengkhawatirkan dalam gerakan antikolonialisme di Eropa, Hatta dituduh melakukan kegiatan subversi menggulingkan pemerintah kolonial. Ia ditahan selama beberapa bulan di penjara, namun diputuskan tidak bersalah setelah pembelaan tim pengacaranya berhasil.

Menurut Hatta, Sjahrir sebagai salah satu mahasiswa Indonesia baru di Belanda gembira mendengar kemenangan PI di pengadilan. Pasca pembebasannya, Hatta semakin gelisah memikirkan sekolahnya dan mencari pengganti dirinya sebagai pemimpin PI. Di tahun 1929, Hatta mengatakan bahwa ia akan segera berhenti sebagai pemimpin PI dan akan mendidik kader baru untuk menggantikannya. Ia menyebutkan beberapa nama, seperti Abdullah Sukur, mahasiswa hukum yang berasal dari Ambon, Rusbandi, mahasiswa hukum di Universitas Leiden, dan Sutan Sjahrir.[57] Ketika Hatta meletakkan kursi pimpinan PI di tahun 1929, Abdullah Sukur diangkat menjadi ketua atas usulan dari Hatta. Setahun berikutnya, Sjahrir dengan cepat meroket di organisasi ini dan terpilih menjadi sekretaris PI, kedudukan tertinggi ketiga dalam organisasi dan bahkan menjadi orang kedua setelah ketua.

Namun, berita di tanah air mengabarkan suatu kemunduran dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sukarno, pemimpin utama kaum nasionalis, ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial di akhir Desember 1929. Dengan ditangkapnya Sukarno dan para pemimpinnya, PNI kemudian dibubarkan oleh Mr. Sartono. Sjahrir menulis bahwa "dengan dipenjarakannya Sukarno, satu babak dari pergerakan rakyat telah berakhir".[58] Namun, ia menambahkan bahwa "kasus Sukarno adalah pelajaran bagi rakyat Indonesia … Kita sekarang menyonsong babak baru di depan kita".[59] Kekosongan kepemimpinan dalam pergerakan pasca pembubaran PNI segera direspons oleh Hatta dan Sjahrir. PNI yang dibubarkan kemudian digantikan oleh Partindo yang didirikan pula oleh Mr. Sartono sebagai wadah menghimpun orang-orang eks PNI dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Namun, Hatta dan Sjahrir tidak setuju dengan langkah-langkah itu dan menganggap model organisasi yang dibangun oleh Partindo tidak menawarkan sesuatu yang baru di dalam pergerakan.

Akhirnya, disepakati bahwa Sjahrir diminta oleh rekan-rekannya untuk pulang sementara ke tanah air melanjutkan pergerakan nasional sambil menunggu Hatta pulang menyelesaikan studinya di Rotterdam. Dalam perpisahannya dengan keluarga Sol Tas, Sjahrir berpamitan sambil mengucapkan bahwa kepulangannya "untuk mendidik bangsanya dan sekaligus untuk mendapatkan pengaruh politik".[60] Di tahun 1931, Sjahrir pulang untuk membantu "Golongan Merdeka" yang atas usul Hatta kepada rekannya di tanah air, Sudjadi, telah merintis penerbitan majalah bernama *Daulat Ra'jat*. Majalah ini sesuai namanya akan mewujudkan kedaulatan rakyat "Karena rakyat itu yang utama dan rakyat itu yang mempunyai kedaulatan kekuasaan … Hidup dan matinya rakyat Indonesia tergantung kepada semangat rakyat".[61] Hatta dan Sjahrir juga meminta kader-kader dari Golongan Merdeka dari berbagai kota untuk berkumpul dan mengadakan pertemuan untuk membicarakan satu pendirian wadah organisasi baru. Akhirnya, pertemuan itu memunculkan satu organisasi bukan partai bernama Pendidikan Nasional Indonesia, disingkat sebagai PNI-pendidikan atau PNI-baru.

Setibanya di Indonesia, Sjahrir segera memimpin PNI-baru dan membangun organisasi ini. Model organisasi PNI-baru memiliki kontras yang signifikan dengan model yang dibangun oleh PNI atau Partindo. Bila PNI atau Partindo menekankan pada penggalangan massa dan pertemuan massa besar yang diisi oleh orasi berapi-api para pemimpinnya untuk membangun semangat rakyat[62], sebaliknya PNI-baru mengembangkan kaderisasi anggota untuk dididik menjadi calon-calon pemimpin di tengah rakyat.[63] Kunci utama dalam pergerakan ketika itu (untuk menyiapkan masa depan) bagi PNI-baru adalah pendidikan. PNI-baru meyakini bahwa dalam mendorong kemerdekaan hal mutlak yang diperlukan adalah rakyat Indonesia

mesti memiliki sarana penyiapan diri baik secara intelektual maupun organisasional untuk mengambil alih kekuasaan Belanda.[64] Tugas paling mendesak adalah mengembangkan suatu kader kepemimpinan yang disiplin, intelek, jelas secara ideologi, apabila perlu bekerja dari bawah tanah.[65] Sjahrir dan Hatta menolak model penggalangan massa ala Partindo dan Sukarno karena apabila pemimpinnya ditangkap maka massa yang tidak dididik secara ideologis dan hanya dibakar semangatnya akan kehilangan arah dan pergerakan akan tumpul segera akibat hilangnya pemimpin.[66] Kejengkelan Sjahrir terhadap cara yang dikembangkan oleh Sukarno dan Partindo pernah dikeluhkan kepada Sol Tas. Sjahrir mengatakan "Jika Sukarno terus dengan cara ini segera tidak ada kemungkinan sama sekali untuk pembentukan kader".[67]

Dipengaruhi secara kuat oleh ide Marxist, PNI-baru juga mengkritik ide Partindo membentuk front kesatuan nasional melawan Belanda. Alasannya, menurut Benedict Anderson "tidak ada basis sosial yang riil untuk aksi bersama para aristokrat feodal, pekerja industri, penduduk desa, dan borjuis perkotaan".[68] Oleh sebab itu, Hatta menyebut ide ini hanya akan mengarahkan pada "persatean" bukannya "persatuan".[69] Persaingan dan ketegangan antara Partindo dan PNI-baru dianalisis oleh Bernhard Dahm dari perspektif antara partai-partai "Eropa" dan "Indonesia".[70] PNI-baru kental dipengaruhi tradisi sosial-demokrasi Eropa dari pengutamannya terhadap teori sosial sebagai pedoman aksi. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendirinya yang kuat mendapatkan pengaruh ini dari didikan dan pengalamannya di Belanda. Menurut Dahm, Sjahrir membawa pengalaman dari Belanda berupa kebiasaan membangun analisis yang tajam, menggunakan logika daripada sentimen, dan berani melakukan kritik terhadap hal-hal yang dianggap tidak benar.[71]

Konflik akhirnya tidak terelakkan antara PNI-baru dan Partindo. Mereka memutuskan berjalan sendiri-sendiri dengan konsepsi yang diyakininya. Sekembalinya Hatta dari Belanda ke tanah air, Sjahrir menyerahkan kepemimpinannya kepada seniornya tersebut. Namun, Sjahrir mendampingi Hatta dalam mendidik kader-kader potensial PNI-baru. Ia, misalnya, membantu menyiapkan bahan-bahan untuk pendidikan kader di berbagai daerah. Sjahrir menulis bersama Soebagio program baru dari ogranisasi dalam bahasa sederhana dalam bentuk model tanya jawab, berjudul *150 Tanja Djawab*.[72] Isi buku kecil ini seputar pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai asas dan tujuan PNI-baru sampai pertanyaan-pertanyaan dasar tentang politik, ekonomi, demokrasi, dan kenegaraan. Karangan ini dipakai untuk menguji para kader dalam kursus pendidikan PNI-baru.

Bagi Sjahrir, pendidikan dapat berfungsi sebagai *politische aufklärung* (pencerahan politik). Pendidikan membentuk intelektualitas seseorang sekaligus karakternya. Hal ini merupakan dasar yang tidak bisa ditinggalkan dalam menyiapkan para pejuang dan membangun kultur organisasi yang mapan. Dalam surat-suratnya di pengasingan kepada Sol Tas, Sjahrir mengakui betapa pentingnya tugas pendidikan terhadap bangsanya. Sjahrir pernah menulis kepada Tas bahwa "Saya benar-benar menganggap mengajar sebagai pekerjaan yang besar".[73]

PENGASINGAN: KESEPIAN DAN KEBANGKITAN

Di tengah gairah perlawanan yang kembali radikal terhadap Belanda, seorang konservatif "kolonialis yang keras kepala" de Jonge datang ke Indonesia menjadi gubernur jenderal yang baru menggantikan de Graeff yang liberal di bulan September 1932. Kedatangan de Jonge tentu saja dipersiapkan untuk merespons perlawanan yang kian sengit dari pergerakan Indonesia di tengah-tengah depresi ekonomi yang menyulitkan pemerintah kolonial. Dalam sebuah surat kabar, kedatangan de Jonge digambarkan bahwa dengan tindakannya yang keras "gerakan ekstrimis akan dihancurkan".[74] Penunjukkan de Jonge sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda yang baru menandakan satu fase dari pemerintahan yang reaksioner dan paling keras. Ia bersumpah akan menggilas para agitator politik Indonesia yang penuh omong kosong. Gubernur Jenderal de Jonge bahkan pernah mengatakan: "Kami sudah berada 300 tahun di negeri ini, kami akan tetap di sini 300 tahun lagi".[75]

Perubahan yang cepat terjadi kemudian. Kegiatan partai-partai politik di tanah air diawasi dengan ketat. Gubernur Jenderal de Jonge mengeluarkan keputusan khusus yang memperingatkan bahwa debat terbuka yang bersifat politik tidak diinginkan. Pidato-pidato para tokoh politik sering distop karena mengucapkan kata-kata bernada perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Akhirnya, penangkapan mulai dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh politik yang dianggap berbahaya. Dimulai dari Sukarno yang ditangkap di bulan November 1933. Penangkapan kemudian menjalar kepada para tokoh-tokoh PNI-baru di Bandung dan Jakarta pada bulan Februari 1934. Di Bandung ditangkap 13 orang tokoh, antara lain Burhanuddin, Murwoto, Hamdani, sementara di Jakarta ditangkap antara lain, Hatta, Sjahrir, dan Bondan.[76] De Jonge adalah orang yang tidak melakukan kebijakan setengah-setengah ketika ia memutuskan untuk "memurninkan" gerakan nasionalis maka dengan cepat dan efisien ia melumpuhkan seluruh gerakan nonkooperasi.[77] Ia bertekad untuk sekali dan selamanya menghindarkan Hindia Belanda dari infeksi kaum nasionalis revolusiner dan mendirikan *rust en orde*.[78]

Hatta kemudian dibawa ke penjara di Glodok, sementara Sjahrir dipindah ke penjara Cipinang. Setelah beberapa bulan dalam tahanan, keluarlah keputusan bahwa Sjahrir bersama dengan Hatta dan beberapa tokoh PNI-baru akan dibuang ke Boven Digul. Hukuman yang paling berat dijatuhkan kepada para tokoh PNI-baru sebab mereka dianggap paling berbahaya dengan membangun model partai kader yang mempersiapkan para ideolog radikal yang militan. Kedua, latar belakang Hatta dan Sjahrir yang pernah bergaul dan berjejaring dengan kaum sosialis revolusioner di Eropa dianggap sebagai potensi yang membahayakan. Bulan Januari 1935 Sjahrir yang berusia 24 tahun bersama Hatta, Bondan, Maskoen, Murwoto, dan Burhanuddin berangkat ke Boven Digul meninggalkan pelabuhan Tanjung Priok. Digul adalah kamp pembuangan yang dikenal "angker" bagi para pejuang antikolonialisme. Kamp ini dibangun di awal tahun 1927 untuk menampung para pemberontak komunis yang gagal di tahun 1926-7. Secara resminya, Digul bukanlah "kamp konsentrasi", melainkan "koloni isolasi". Hutan

lebat berdiri di wilayah ini, sungai-sungainya masih terdapat banyak buaya, dan penyakit malaria dengan ganasnya memakan banyak korban. Dengan kondisi yang seperti ini, lawan utama dari para tahanan Digul selain penyakit adalah "menjaga kewarasan". Sjahrir dalam upayanya menjaga perasaan dari kesepian di sebuah wilayah terisolir melakukan latihan fisik, berenang, dan keluyuran.[79] Ia juga mulai menulis surat kepada istrinya, Maria, di negeri Belanda. Surat-surat yang ditulis dari Tanah Merah dan Banda Neira berisi curhatan, renungan, pengamatan, dan perkembangan politik dunia internasional tersebut kemudian dibukukan oleh istrinya di tahun 1945 berjudul *Indonesische Overpeinzingen*.

Baik Sjahrir dan Hatta memiliki ketahanan mental yang tangguh selama berada di Digul. Mereka mampu menjaga kestabilan mental selama dalam pengasingan, meskipun jelas mereka mengalami kesepian. Sjahrir bertahan dari malaria lebih lama daripada tahanan lainnya, meskipun setelah 10 bulan ia juga akhirnya terkena malaria. Setelah satu tahun di Digul dari bulan Januari sampai Desember 1935, Sjahrir bersama Hatta akhirnya dipindah ke Banda Neira. Pemindahan ini salah satunya merupakan upaya dari golongan kaum sosialis Belanda yang mengecam tindakan pemerintah kolonial membuang kaum nasionalis di dalam kamp terisolir. Di Banda Neira, situasinya jauh lebih nyaman dan leluasa bagi Sjahrir, seolah-olah "serasa kembali ke peradaban".[80] Sjahrir dapat bertemu dengan tokoh politik kawakan, seperti Tjiptomangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri. Yang paling membahagiakan Sjahrir adalah dirinya terhibur dikelilingi oleh anak-anak. Sjahrir bahkan mengangkat anak beberapa cucu dari keluarga saudagar Arab. Di sela-sela waktunya, bersama Hatta, Sjahrir memberi pelajaran dan pendidikan terhadap anak-anak. Di Banda Neira, menurut Subadio, Sjahrir menemukan "keseimbangan antara rasio di satu pihak, keindahan dan kasih sayang di lain pihak".[81]

Selama di Banda Neira, Sjahrir dengan tekun mengikuti berita mengenai perkembangan politik internasional. Ia menduga bahwa semakin kuatnya rezim fasisme Jerman, Jepang, dan Italia akan mengubah konstelasi politik dunia dengan cepat. Di bulan Mei 1940, Jerman telah menyerbu Belanda. Sementara itu, Jepang terus melakukan ekspansi di Asia dan berhasil menaklukkan China. Serangan Jepang di Pearl Harbor di bulan Desember 1941 kemudian menyebabkan meletusnya Perang Pasifik. Berita serangan Jepang ke Pearl Harbor ini sampai ke telinga Sjahrir di Banda Neira dan orang-orang banyak sekali mendatangi Sjahrir untuk meminta pandangan tentang ancaman perang ini.

Tidak lama kemudian, pasukan Jepang dengan cepat merengsek memasuki wilayah Indonesia. Di akhir Januari 1942, pasukan Jepang telah maju ke Indonesia melalui Filipina dan Malaya Inggris. Pemerintah Belanda kemudian memerintahkan untuk memindahkan Hatta dan Sjahrir segera ke Jawa. Belanda ingin mencegah para tokoh buangan yang populer di mata rakyat dimanfaatkan oleh Jepang sebagai alat propaganda melawan Barat. Dengan tergesa-gesa Sjahrir bersama tiga anak angkatnya, Lily, Mimi, dan Ali diangkut pesawat khusus ke Surabaya. Kemudian mereka dipindahkan ke Sukabumi dengan kereta api dari Surabaya.

MUSUH UTAMA BAYONET JEPANG

PEMIMPIN BAWAH TANAH: JARINGAN KELOMPOK SJAHRIR

"Bangsa Indonesia tidak pernah dilatih Belanda secara militer untuk mampu mempertahankan diri. Hanya diperlakukan sebagai suatu komoditas, barang tidak bernyawa untuk diserahkan tanpa belas kasihan kepada Jepang, penjajah baru bangsa Indonesia yang malang" – Sjahrir

Di masa pendudukan Jepang, Sjahrir muncul sebagai salah satu pemimpin kaum muda yang berpengaruh. Ia memimpin jaringan bawah tanah yang memiliki pengikut pemuda paling banyak. Secara ideologi dan prinsipil, Sjahrir yang dipengaruhi kuat oleh sosialisme-demokrasi jelas merupakan salah satu penentang keras dari fasisme.[82] Berbeda dengan banyak tokoh yang menganggap Jepang akan membebaskan Indonesia dari alam kolonialisme, Sjahrir dengan curiga melihat bahwa kedatangan Jepang merupakan bagian dari ekspansi imperialisnya untuk memenangkan perang. Dengan pemahaman mendalam tentang situasi politik dunia, Sjahrir berkesimpulan bahwa imperialisme Belanda bukan lagi ancaman, antitesa yang lebih mendesak adalah Indonesia melawan fasisme Jepang. Berada di bawah rezim fasis sama saja menyerahkan diri bulat-bulat kepada sebuah rezim yang totaliter. Keprihatinan Sjahrir terhadap bahaya totalitarianisme tidak pernah berubah sejak sekolah di Belanda. Ia sepenuhnya yakin bahwa membebaskan rakyat dari ancaman totalitarianisme merupakan tujuan politik yang sesungguhnya untuk memberi jalan kepada rakyat mencapai kebebasan dan kemandirian.[83] Lagipula, Sjahrir tidak percaya bahwa Jepang akan memenangi perang melawan Sekutu. Kekuatan industri militer dan logistik antara Amerika Serikat (AS) dan Jepang tidak berimbang. Oleh sebab itu, memberi karpet merah kepada Jepang tidak memberikan keuntungan apa-apa, malahan memperburuk situasi.

Alhasil, Sjahrir merupakan bagian dari sedikit kelompok minoritas yang meneriakkan perlawanan terhadap Jepang secara klandestin. Tentang jalan yang Sjahrir pilih ini, ada berbagai cerita yang menyebutkan bahwa ini merupakan hasil kesepakatan antara Sukarno, Hatta, dan Sjahrir. Setelah Sukarno dibawa kembali ke Jakarta dari tempat pembuangannya di Sumatera oleh Jepang, ia segera bertemu dengan Hatta. Di rumah Hatta di jalan Oranje Boulevard, Sukarno, Hatta, dan Sjahrir segera mendiskusikan mengenai kelanjutan dari pergerakan nasional di masa okupasi Jepang. Ketiga tokoh utama yang hadir itu sepakat bahwa Sukarno dan Hatta diperbolehkan bekerja sama dengan Jepang demi kepentingan pergerakan nasionalis.[84] Menurut pengakuan Sukarno dan Hatta, Sjahrir diizinkan atau disepakati oleh pertemuan itu untuk bergerak di bawah tanah dan menggalang gerakan yang lebih militan.[85] Antara kedua model gerakan ini disepakati bahwa keduanya akan membangun komunikasi dan saling memperkuat. Selama di bawah tanah, kontak Sjahrir dengan Sukarno memang tidak baik. Namun Sjahrir masih memelihara kontak dengan Hatta dengan menyampaikan situasi terkini yang didapatkannya melalui siaran radio.

Dalam politik nasional, nama Sjahrir memang kurang dikenal dibandingkan Sukarno dan Hatta sebagai pemimpin. Setelah muncul dari pengasingan, Sjahrir bertemu dengan Amir Sjarifuddin, salah satu tokoh utama dari kelompok minoritas lainnya yang melawan Jepang. Amir mengajak Sjahrir untuk berkerja sama, namun ajakan ini ditolaknya karena ia kurang cocok dengan usulan tersebut. Amir kemudian hari ditangkap oleh Kempetai yang berhasil mengendus jejaring kelompok bawah tanah yang terkoneksi dengan pemerintah kolonial. Dengan tertangkapnya Amir, gerakan pemuda mengalami pukulan telak sebab sebelum munculnya Sjahrir dari pengasingan terdapat dua pemimpin penting dalam kelompok pemuda: Amir Sjarifuddin dan Amir Hamzah Siregar.[86] Sejak penangkapan Amir, daya tarik Sjahrir sebagai pemimpin pemuda semakin bersinar. Sjahrir mulai membangun jaringan kelompok dengan para anggota eks PNI-baru dan kelompok mahasiswa yang memiliki kemampuan intelektualitas yang baik. Beberapa nama penting anggota PNI-baru yang menjadi pengikut Sjahrir adalah Djohan Sjahroezah, Sastra, Soemarno, dr. Soedarsono, Soemartojo, dll. Sementara dari kelompok mahasiswa yang cemerlang di antaranya ada Soedjatmoko, Soedarpo Sastrosatomo, Hamid Algadrie, Subadio Sastrosatomo, T.B. Simatupang, Murdianto, Abu Bakar Lubis, Andi Zainal Abidin, dll. Banyak dari pengikut Sjahrir merupakan pemuda yang aktif dalam organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) dan Unitas Studiosorum Indonesiensis (USI).[87]

Dalam karyanya mengenai peranan jaringan kelompok pemuda pengikut Sjahrir, Legge mengatakan bahwa para pemuda yang mengikuti kepemimpinan Sjahrir banyak berasal dari sejumlah pusat: organisasi-organisasi mahasiswa, asrama, kelompok diskusi, kelompok yang dibentuk berdasarkan tempat kerja yang sama di bawah Jepang.[88] Di masa Jepang, menurut Anderson, basis kelembagaan utama dari gerakan bawah tanah kelompok pemuda di kota besar adalah asrama.[89] Asrama begitu penting karena ia "menyediakan forum diskusi secara tertutup serta fokus bagi solidaritas".[90] Terdapat tiga asrama yang menjadi basis utama gerakan bawah tanah yang berkembang di Jakarta: (1) Asrama Fakultas Kedokteran, Jalan Prapatan 10; (2) Asrama Angkatan Baru Menteng 31 yang didirikan oleh Sendenbu (Badan Propaganda Jepang); (3) Asrama Indonesia Merdeka di Jalan Bungur Besar didirikan oleh Kaigun (Angkatan Laut Jepang).[91] Sjahrir memiliki pengikut kelompok mahasiswa terutama dari Asrama Fakultas Kedokteran dan Asrama Indonesia Merdeka. Menurut Anderson, mahasiswa Asrama Fakultas Kedokteran lebih condong ke Barat dibandingkan kelompok pemuda dari dua asrama lainnya dan banyak di antara mereka yang berada di bawah pengaruh kuat Sjahrir.[92] Sementara itu, Sjahrir mendapatkan pengikut di Asrama Indonesia Merdeka karena ia mengajar di sana. Untuk menyamarkan aktivitasnya sekaligus merepresentasikan diri tidak anti-Jepang, Sjahrir bersedia mengajar di Asrama Indonesia Merdeka yang dikelola oleh Wikana dan Nishijima, asisten pertama Laksamana Pertama Tadashi Maeda.[93]

Kelompok Sjahrir tidak hanya berpusat di Jakarta di mana pemuda dan mahasiswa terkonsentrasi. Hubungan dengan kontak-kontak eks PNI-baru dipelihara pula olehnya, seperti di Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Sastra dan Rusni memberikan kabar dari Priangan, Soedarsono, Sugran dan Soekanda menginformasikan dari Cirebon, sementara Wiyono dan Sugiono Yosodiningrat di Yogyakarta dan di Surabaya dan Jawa Timur keponakan Sjahrir, Djohan Sjahroezah memberi perkembangan terbaru situasi.[94] Kelompok bawah tanah Sjahrir, menurut Legge, bukan merupakan sebuah sel bawah tanah yang terorganisasi dengan ketat, terstruktur, ataupun dikontrol, namun terdapat kesadaran pada anggota kelompok inti terhadap kesamaan pendirian.[95] Sjahrir tidak pernah menganggap dirinya sebagai pemimpin dan tidak pernah memaksakan sebuah keyakinan kepada lingkarannya. Sjahrir tidak pernah mempropagandakan suatu ideologi yang jelas, meskipun ia memilikinya kepada pengikutnya. Ia tidak pernah menguliahi pengikutnya tentang sosialisme. Ia adalah orang dengan tipe lebih banyak bertanya daripada menjawab. Dan Sjahrir lebih suka mendorong anak-anak muda di sekelilingnya untuk mandiri dan mencari jawaban sendiri, tidak bergantung kepada dirinya.[96]

Sejak awal kelompok Sjahrir yakin bahwa Jepang akan kalah dari Sekutu. Sjahrir dan kelompoknya memiliki kesadaran tentang politik internasional dan meng*update* perkembangan situasi terkini melalui radio gelap yang dimiliki Sjahrir. Di masa Jepang, publik hanya dapat mendengar siaran resmi gelombang tertentu di dalam negeri yang disensor oleh pemerintah. Oleh karena itu, informasi tentang situasi dunia terkini tidak diketahui secara luas. Namun, Sjahrir yang memiliki pesawat radio gelap diam-diam mendengarkan siaran radio Sekutu. Kekuatan informasi adalah kekuatan yang dimiliki oleh kelompok Sjahrir dan ini menentukan arah perjuangan kemerdekaan Indonesia ke depan.

INDONESIA MERDEKA SEGERA!

Selama bulan Maret 1945, berita dari radio bawah tanah mengabarkan kemajuan yang diperoleh oleh pihak Sekutu. AS diberitakan telah merebut Iwojima dan menggunakannya sebagai pangkalan pesawat pengebom untuk mebombardir Jepang. Di bulan Mei, Jerman menyerah kepada Sekutu di Belanda. Sebulan kemudian, Okinawa jatuh dan Jepang diserang secara masif oleh Sekutu. Di bulan Juli, telah muncul gagasan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia setelah pihak Sekutu menuntut Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang sudah tidak memikirkan lagi kemenangan ataupun bagaimana caranya mempertahankan wilayah yang diduduki. [97] Yang dipikirkan olehnya apakah Indonesia merdeka dapat mencegah berkuasanya kembali Belanda mengambil wilayah jajahan mereka kembali.

Salah seorang pengikut Sjahrir, Subadio, mengatakan bahwa pada pertengahan Juli "dari percakapan dengan Sjahrir dan Mayor Santoso bisa saya simpulkan bahwa Jepang telah tamat riwayatnya".[98] Tampaknya kelompok Sjahrir telah menangkap gelagat bahwa kekuatan Jepang dan aliansinya semakin melemah digempur Sekutu. Di awal bulan Agustus, keyakinan tersebut semakin kuat ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan ratusan ribu orang. Di hari ketika bom dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus, Sukarno, Hatta, Radjiman dan dua perwira

Jepang pergi ke Saigon menemui Marsekal Terauchi, Panglima Tertinggi Jepang di wilayah Asia Tenggara. Pertemuan ini membicarakan mengenai penyerahan kemerdekaan Indonesia dari Jepang sebagai konsekuensi yang tidak terelakkan dari semakin nyatanya kekalahan Jepang. Sebelum berangkat ke Saigon, Sjahrir menemui Hatta dan menyampaikan bahwa "Saya meminta Hatta agar menekan Jepang untuk menyerahkan kemerdekaan". Dalam pertemuan tersebut, Sjahrir lebih lengkapnya menyampaikan kepada Hatta:

"Sebelum mereka berangkat, saya lama berbicara dengan Hatta. Saya katakan padanya bahwa riwayat Jepang telah berakhir dan bahwa telah tiba waktunya untuk suatu usaha nasional secara menyeluruh. Saya anjurkan kepadanya untuk menarik garis yang jelas antara posisi Jepang dan posisi kita, sehingga kita dipaksa untuk mengambil posisi konflik secara terbuka dengan mereka. Tujuan saya adalah untuk membuat situasi sebisa mungkin menjadi revolusioner, supaya tidak ada perpecahan di kalangan nasionalis".[99]

Setelah jatuhnya bom atom kedua di Jepang, pada tanggal 10 Agustus Sjahrir tahu bahwa Jepang akan segera menyerah. Saat Sukarno dan Hatta kembali dari Saigon pada tanggal 14 Agustus, Sjahrir menemui Hatta memaksa kedua tokoh tersebut untuk bergerak lebih cepat, "saatnya telah tiba (merdeka), atau tidak sama sekali".[100] Sjahrir mengusulkan kepada Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan secepatnya dan menolak proklamasi kemerdekaan yang dirundingkan dari kesepakatan antara Jepang dan Sukarno-Hatta di Saigon. Ia menginginkan proklamasi dapat menggerakkan rakyat untuk melawan Jepang. Sjahrir menyampaikan juga kepada Hatta bahwa ia akan menyebarkan pesan kepada rakyat untuk bersiap mengadakan demonstrasi. Proklamasi itu sendiri adalah tanda untuk berdemonstrasi. Rakyat akan bergerak untuk mendukung proklamasi dan menolak Jepang.

Hatta kaget dengan berita mengenai menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Namun, Sukarno dan Hatta belum percaya dengan berita kekalahan Jepang; mereka mencari konfirmasi pada pembesar Jepang. Ketika sekelompok pemuda mendesak para golongan tua seperti Sukarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, Sukarno dan Hatta menolak dengan alasan khawatir akan timbulnya kekerasan yang dilakukan oleh Jepang. Di samping, Sukarno menginginkan pemindahan kekuasaan terjadi melalui mekanisme politik di dalam PPKI. Akhirnya para pemuda menculik Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok di tanggal 16 Agustus 1945. Kesepakatan untuk memproklamirkan kemerdekaan antara golongan tua dan muda tercapai setelah mereka semua kembali ke Jakarta dan mendengar bahwa Jepang belum sepenuhnya setuju dengan kemerdekaan Indonesia.

Di sekitar proklamasi sendiri, berbagai isu muncul. Sjahrir kabarnya telah menyiapkan teks proklamasi versinya sendiri yang bernada anti-Jepang dan membangkitkan semangat rakyat untuk dibacakan oleh Sukarno dan Hatta, sebagai dwitunggal proklamator. Teks tersebut konon telah disebarkan ke jaringan PNI-baru, seperti di Cirebon, di mana dr. Soedarsono menyatakan bahwa ia menerima salinan teks proklamasi versi Sjahrir dan sempat membacakannya.[101] Meskipun

Sutan Sjahrir, Perdana Menteri pertama di Indonesia.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

sampai saat ini salinan teks tersebut tidak pernah ditemukan dan hanya dikonfirmasi oleh golongan Pendidikan. Pada akhirnya, teks proklamasi yang dibuat Sjahrir ditolak karena terlalu revolusioner dan bernada anti-Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi yang singkat dibacakan oleh Sukarno dan Hatta, diikuti kemudian proses pengibaran bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Prosesi tersebut berlangsung singkat tetapi khidmat dan menciptakan daya magis euforia bagi rakyat di Jawa.

DIPLOMASI SEBAGAI SENJATA MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN

PERDANA MENTERI PERTAMA INDONESIA

Setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang, pemerintah pusat Republik segera dibentuk di Jakarta. Sukarno dan Hatta disepakati secara bulat sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Kemudian ditunjuklah sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu tugas presiden, dan komite serupa akan dibentuk di tingkat provinsi dan karesidenan.[102] Pemerintahan yang baru membentuk struktur kabinet yang umumnya berisi pimpinan departemen atau penasihat pemerintah di masa Jepang. Pemilihan orang-orang yang mengisi kabinet pertama ini dikritik oleh Sjahrir yang menolak masuk di dalam kabinet. Ia menganggap bahwa kabinet diisi oleh "orang-orang tanpa karakter" dan kebanyakan mereka "terbiasa menjilat dan mematuhi perintah Belanda dan Jepang".[103]

Sjahrir mengkritik keras sikap terlalu hati-hati Sukarno dan pemerintahannya. Padahal, di tengah iklim kemerdekaan baru yang menggelora diperlukan suatu sikap dan gagasan yang mampu memobilisasi kegairahan itu. Mungkin refleksi

Para pemuda Tiong Hoa di Cirebon menghadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Para pemuda Tiong Hoa di Cirebon menghadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

inilah yang muncul dalam benak Sjahrir ketika ia berkeliling Jawa merasakan euforia rakyat yang berjuang mendukung revolusi yang dipimpin Sukarno dan mengakui kepopulerannya. Revolusi tidak dapat dipungkiri membangkitkan atmosfer revolusioner terutama di kalangan pemuda yang bersemangat merespons tantanga kemerdekaan dan kegairahannya. Seringkali, kelompok pemuda militan yang sulit dikontrol melakukan aksi-aksi mengambil alih kekuasaan atas jawatan publik, seperti stasiun kereta api, trem listrik, stasiun pemancar radio, telepon dan pembangkit listrik yang dimiliki Jepang.[104] Para pemuda terus bergerak hingga menguasai seluruh instalasi penting yang berada di Yogyakarta, Surakarta, Malang dan Bandung.[105]

Pada tanggal 15 September, Sekutu tiba di Tanjung Priok dipimpin oleh Laksamana Pertama W.R. Patterson dan didampingi oleh Dr. Charles van der Plas, Gubernur Jawa Timur dan anggota Dewan Hindia Belanda sebelum pendudukan Jepang dan wakil pemerintah NICA-Belanda pada markas besar Sekutu di Singapura.[106] Tentara Sekutu datang ke Indonesia untuk mengambil alih wilayah Indonesia dari Jepang yang kalah perang. Sementara itu, pihak Belanda datang kembali karena ingin merestorasi kekuasaan mereka yang telah direbut oleh Jepang. Pihak Belanda maupun Indonesia menganggap masa Revolusi "sebagai suatu zaman yang merupakan kelanjutan di masa lampau".[107] Belanda memiliki tujuan untuk mengacaukan sebuah negara yang dipimpin oleh orang-orang yang berkolaborasi dengan Jepang dan memulihkan rezim kolonial yang telah mereka bangun ratusan tahun. Sedangkan, bagi Indonesia, Revolusi memiliki tujuan untuk menyempurnakan proses kebangkitan nasional dan integrasi yang telah dimulai empat dasawarsa sebelumnya.

Pihak Sekutu dan Belanda tidak mempercayai kepemimpinan Sukarno yang dianggap oleh mereka sebagai penjahat perang atau tidak lebih dari "boneka Jepang". Mereka menggugat noda-noda totalitarian bekas bawaan Jepang dan rekam jejak Sukarno yang mendukung tendensi itu sebagai tanda bahwa pemerintahan baru Indonesia tidak berwajah demokratis. Di kalangan pemuda yang militan tantangan bahwa Sukarno bersikap lunak terhadap Jepang juga muncul, terutama karena sikap Sukarno yang setengah-setengah dalam mengusir Jepang. Suatu orkestrasi massa yang digalang oleh pemuda dari Asrama Fakultas Kedokteran dan Asrama Menteng 31 di Lapangan Ikada menghadirkan kurang lebih 200.000 pemuda dipersiapkan menunjukkan militansi mereka dalam mendukung Republik berusia muda dan kepemimpinan Dwitunggal Sukarno-Hatta. Meskipun, Sukarno dengan tenang dan kharismanya dapat mengendalikan massa, ada ketidakpuasan di kalangan pemuda militan terhadap sikap lembeknya dalam rapat raksasa Ikada. Apalagi para pemuda merasakan bahwa pemerintah bergerak lamban dalam menghadapi Sekutu. Muncul desas-desus bahwa pemerintah juga tidak antusias mendukung aksi-aksi pemuda militan di ibukota-ibukota daerah.[108]

Di awal bulan Oktober timbul kecemasan terhadap kelambanan dan kelesuan pemerintah di kalangan pemuda yang lebih progresif. Masa itu harus diakhiri dengan menghadirkan satu perombakan untuk bisa menjalankan tindakan-tindakan yang bisa mengimbangi

situasi yang berubah cepat.[109] Dalam suasana genting seperti ini, muncullah nama Sjahrir yang dapat diterima oleh golongan tua, muda, dan Belanda sekaligus.[110] Bagi golongan tua, Sjahrir dianggap tokoh yang memiliki reputasi sebagai cendekiawan nasionalis yang kokoh berpendirian. Pamornya diakui karena ia adalah salah satu tokoh yang dibuang ke Digul di masa kolonial. Di kalangan pemuda, namanya lebih populer lagi karena sikapnya yang keras dalam melawan fasisme Jepang. Pendiriannya yang tidak mau terlibat dalam struktur pemerintahan Jepang dan justru bergerak secara klandestin mendukung pembebasan nasional membuat para pemuda menghormati pendapat-pendapatnya. Sementara itu, bagi Belanda dan Sekutu sikap Sjahrir yang tidak mau berkolaborasi dengan Jepang dan gagasannya yang dekat dengan sosial-demokrasi dan pemikiran politik Barat lebih dapat diterima untuk mengadakan suatu hubungan.

Sjahrir sendiri yang merasakan bahwa dirinya diperhitungkan, mulai mengambil sikap yang tidak lagi pasif. Ia mulai melancarkan pembaharuan mengupayakan terbukanya keran demokratisasi di dalam pemerintahan. Sjahrir yang keitis terhadap kekuasaan ekstra peralihan yang menyebabkan munculnya lembaga pembantu kepresidenan, mendorong supaya KNIP berperan sementara sebagai badan legislatif.[111] Langkah ini bagaimanapun sulit ditolak oleh Sukarno dan kabinetnya melihat datangnya penolakan yang terus menerus dari Belanda yang terus menuduh pemerintahan Sukarno sebagai rezim totaliter. Gambaran citra yang demokratis dirasa diperlukan untuk merebut pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia.[112] Hatta pun menyetujui usulan Sjahrir tersebut, ia dari dahulu setuju bahwa kekuasaan perlu dibagi luas dan merata untuk mewujudkan negara demokrasi bukan negara kekuasaan. Keluarlah pada tanggal 16 Oktober 1945 sebuah keputusan yang disebut Maklumat X yang ditandatangani oleh Hatta tentang peralihan KNIP dari sebuah badan pembantu presiden menjadi badan legislatif. Para menteri pun bertanggung jawab kepada parlemen sementara ini. Kemudian untuk mendorong kinerja lembaga tersebut lebih cepat, maka dibentuklah sebuah Badan Pekerja KNIP (BP KNIP) yang beranggotakan lima belas orang, dipimpin oleh Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, yang bertanggung jawab kepada KNIP. Dengan memiliki kedudukan politik yang lebih formil dan kuat, Sjahrir menurut Kahin cepat memperoleh kewibawaan dan "ia menjadi jantung pemerintah yang dinamis".[113]

Setelah langkah ini, perkembangan selanjutnya yang cukup penting adalah usulan BP KNIP untuk mensahkan pembentukan partai politik. Usulan ini meskipun bertentangan dengan keyakinan Sukarno kemudian disahkan oleh keluarnya Maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah proklamasi, Sukarno mengusulkan pembentukan sebuah *staatspartij* atau partai negara yang akan dinamakan PNI, mengacu kepada partai lamanya di masa kolonial. Model partai semacam ini dianggapnya efektif dalam mewakili dan memobilisasi opini rakyat di dalam sebuah negara. Gagasan ini tentu saja dipengaruhi oleh pengalamannya di masa Jepang di mana negara secara teknis memobilisasi rakyat secara tersentral.[114] Namun, yang paling penting, Sukarno takut bahwa multiragamnya partai politik akan mengakibatkan terjadinya konflik antarpartai yang menghancurkan persatuan di Republik yang masih baru. Tapi, Sjahrir menentang gagasan partai negara dan partai yang monolitik. Gagasan ini menurutnya meninggalkan impian menuju suatu masyarakat yang lebih demokratis dan malahan merupakan benih-benih kemunculan suatu rezim yang totaliter. Sjahrir juga yakin bahwa tidak ada kepastian dalam partai itu "menjadi forum yang dapat mengakomodasi dan menyelesaikan perbedaan politik yang penting, dan lebih merupakan alat untuk mengontrol dan mendisiplinkan mereka".[115]

Perubahan-perubahan ini, menurut Legge, merupakan langkah perombakan dari sistem presidensial yang terpusat menuju ke sistem parlementer yang bertanggung jawab kepada parlemen–di mana Sjahrir bertanggung jawab atasnya. Akhirnya, pada tanggal 14 November, Sjahrir dalam usia 36 tahun diangkat menjadi perdana menteri pertama dan dianjurkan membentuk kabinetnya. Menurut Ricklefs, "hanya dalam waktu tiga bulan UUD 1945 dicabut dalam praktik meskipun dalam teori masih tetap berlaku".[116] Kini, Sjahrir, Amir, dan para pengikut mereka dari kelompok pemuda berada di garda depan kekuasaan, sementara itu, Sukarno, Hatta, dan golongan tua yang dimanfaatkan oleh Jepang terdesak ke garis belakang. Naiknya Sjahrir tentu disambut oleh kelompok pemuda yang merasa bahwa Sjahrir dapat menyuarakan kritik dari golongan muda terhadap kaum nasionalis tua yang dicurigai mereka karena bekerjasama dengan Jepang.

Sukarno sendiri meskipun mengalah akhirnya menyetujui perombakan ini dengan alasan bahwa posisi Sjahrir tetap bergantung pada kepemimpinan Sukarno-Hatta sebagai kepala negara.[117] Posisi Sukarno sendiri cukup rawan dalam Republik muda ini dalam kacamata internasional dan nasional. Dengan perombakan ini, di satu sisi Sukarno dapat menghindari tekanan dari kelompok pemuda militan dan kelompok Tan Malaka yang menghendaki pemerintahan Sukarno-Hatta lebih progresif. Di sisi lain, ada pertimbangan praktis terkait perubahan ini untuk menghindarkan stigma bahwa pemerintahan baru Indonesia buatan Jepang seperti tuduhan Belanda. Sjahrir lebih bisa diterima oleh Sekutu dan Belanda. Diplomasi-diplomasi antara Sjahrir dan pihak Belanda yang menentukan jalannya kedaulatan Indonesia dimulai di masa kepemimpinannya.

DIPLOMASI MELAWAN BELANDA

Saat baru dilantik menjadi perdana menteri, Sjahrir segera menghadapi tugas yang tidak ringan. Ia dihadapkan pada masalah bagaimana menegakkan otoritas Republik dalam situasi politik yang sangat sulit: bagaimana mengadakan negoisasi dengan pihak Inggris yang ingin mengambil alih kekuasaan dari Jepang dan memulai diplomasi dari Belanda yang ingin menguasai kembali bekas jajahannya. Terdapat berbagai macam perdebatan tentang jalur politik yang diambil. Kelompok Tan Malaka, misalnya, menegaskan bahwa Indonesia harus merdeka 100% dan konsekuensi dari pilihan politik itu perang dan kekerasan tidak terhindarkan. Sementara itu, Sjahrir mengambil jalan yang

Perdana Menteri Sjahrir menghadiri perundingan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sjahrir menerima kunjungan Lord Killern.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Perundingan Indonesia dan Belanda di Linggarjati tanggal 11 November 1946.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sjahrir bersama Amir Sjarifuddin, Sukarno, dan Mohammad Hatta bertemu dengan Lord Killern, diplomat Inggris yang menjadi penengah dalam perjanjian Linggarjati.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

lebih moderat, praktis, cerdik, dan didasarkan pada kemampuannya membaca realitas politik di dalam dan luar negeri.[118] Dalam kabinet terbaru yang dibentuk oleh Sjahrir, ia berperan tidak hanya sebagai perdana menteri tetapi juga sebagai menteri luar negeri. Posisi ini dipilih Sjahrir bukan tanpa alasan, melainkan memberikan penguatan kepadanya untuk terjun langsung mengurusi masalah urusan luar negeri Indonesia. Politik luar negeri begitu krusial di masa Revolusi ketika Belanda ingin merestorasi kekuasaannya di Indonesia. Bagi Sjahrir yang menyadari kelemahan Republik yang belum kuat angkatan bersenjatanya, perundingan dengan Belanda adalah jalur satu-satunya yang paling rasional dan tidak mengorbankan nyawa manusia dengan percuma.

Secara sadar Sjahrir ingin berhadapan langsung dengan Belanda melalui jalur diplomatik strategis dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sebetulnya sikap ini dipengaruhi pula oleh persepsi politiknya atas situasi internasional di mana perjuangan Indonesia berlangsung. Tindakan revolusioner disadarinya perlu namun ia memang tidak bisa dijalankan tanpa kalkulasi kewaspadaan dan perhitungan politik yang memadai. Sjahrir menyadari bahwa posisi geografis Indonesia dipengaruhi oleh kapitalisme dan imperialisme Anglo-Saxon.[119] Masa depan Indonesia, menurutnya, bergantung pada masa depan kapitalisme dan imperialisme Amerika dan Inggris. Tampilnya Amerika Serikat sebagai kekuatan terbesar di Pasifik setelah kekalahan Jepang, dalam pandangannya menciptakan peluang-peluang bagi negeri seperti Indonesia yang berjuang mempertahankan kemerdekaannya.[120] Indonesia mesti bermain apik dan strategis dalam kondisi geopolitik internasional itu untuk meningkatkan statusnya sebagai negara berdaulat.

Perundingan antara Sjahrir dengan Belanda dimulai di bawah usaha mediasi Inggris yang mengirimkan diplomat seniornya Sir Archibald Clark Kerr. Antara bulan November dan Desember, pembicaraan berlangsung antara Sjahrir dan van Mook yang menjadi wakil Belanda. Dalam pembahasan dengan Van Mook yang dibicarakan adalah mencari suatu jalan penyelesaian untuk merampungkan konflik Indonesia-Belanda.[121] Posisi diplomatik Belanda didasarkan pada keputusan Ratu Wilhelmina sebelum perang di mana Belanda mendorong pembentukan suatu persemakmuran federal Indonesia dalam kesatuan poliitk dengan Belanda.[122] Tawaran yang diajukan ini menyatakan bahwa realitas politik Indonesia tidak diakui, seperti syarat yang diajukan oleh Sjahrir dalam perundingan dengan Belanda. Sjahrir menyetujui bahwa suatu langkah politik akan ditentukan oleh Indonesia dan Belanda, namun syaratnya Indonesia hanya akan diwakili oleh Repulik yang diakui sah berdaulat atas wilayah Hindia Belanda.[123]

Namun, Belanda tetap bersikeras tidak mau mengakui Indonesia atas wilayah yang dimilikinya saat itu. Van Mook mengajukan suatu model Persetujuan Vietnam-Perancis yang baru dibuat di mana terdapat suatu negara merdeka di dalam Federasi Indocina yang tergabung dalam Kesatuan Perancis. Ia mengajukan suatu Federasi Indonesia dalam Kesatuan dengan Belanda di mana posisi Republik hanya mewakili Jawa. Posisi Indonesia terjepit atas tawaran tersebut. Belanda

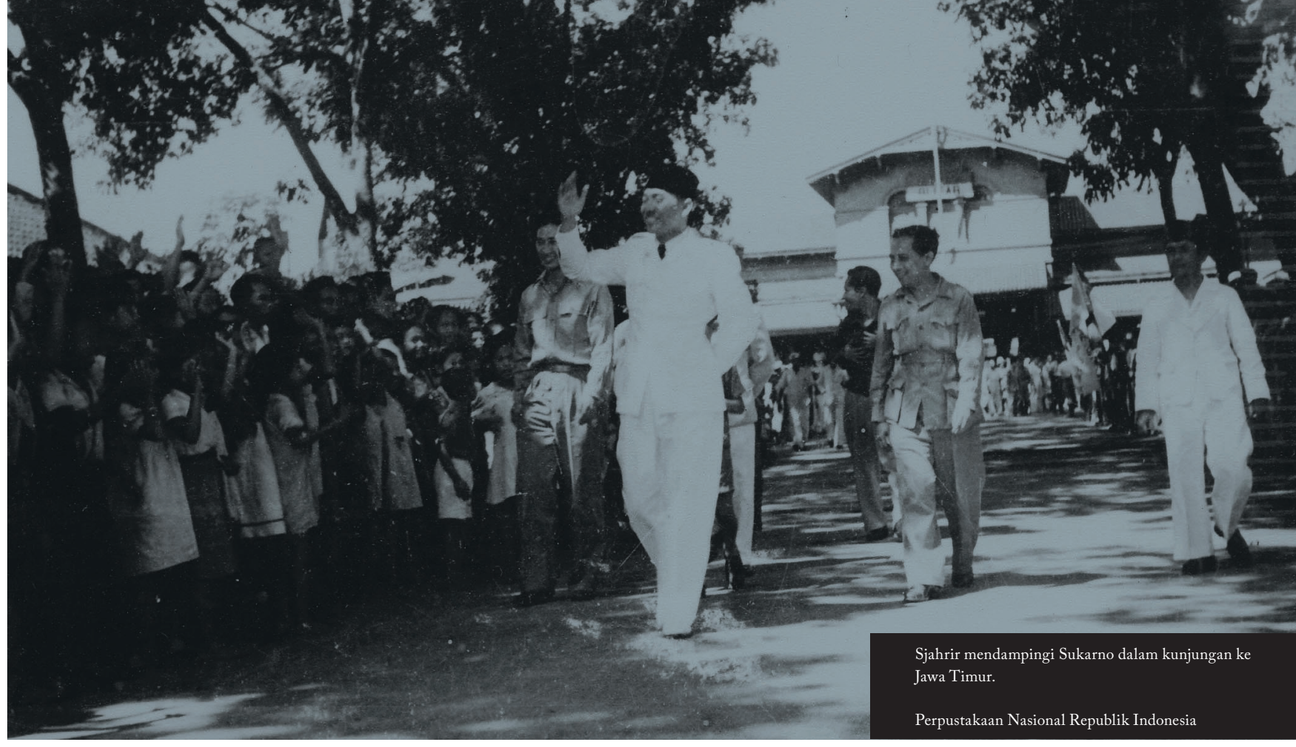

Sjahrir mendampingi Sukarno dalam kunjungan ke Jawa Timur.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

pun terus berupaya melemahkan kekuatan Indonesia dengan mengirimkan tentaranya lebih banyak ke Indonesia. Pada bulan Maret 1946, Sjahrir menjawab tawaran sulit dari van Mook dengan usulan yang menandai dimulainya kemunduran pemerintahan kabinetnya dan juga posisi awal yang diajukan Republik. Ia siap berunding dengan Belanda atas dasar kedaulatan *de facto* Indonesia hanya wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera, pengakuan kedaulatan Belanda di wilayah lainnya, dan upaya bersama Belanda-Indonesia untuk membentuk negara federal dalam sebuah uni Belanda-Indonesia.[124]

Perundingan antara Indonesia dan Belanda kemudian dipindahkan ke Belanda, tepatnya di Hoge Luwe di bulan April. Wakil Indonesia dipimpin oleh Mr. Soewandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan anggotanya dr. Soedarsono. Pertemuan ini sayangnya tidak menghasilkan kesepakatan apapun karena pemerintah Belanda sedang menghadapi pemilihan umum dan tidak berani memberikan konsesi politik kepada Republik. Tapi yang pasti, dalam peristiwa itu terungkap bahwa Belanda masih belum bisa menerima wilayah Indonesia selain Jawa dalam suatu Indonesia Serikat. Hasil perundingan yang tidak menghasilkan apa-apa memberikan ujian terhadap jalan diplomasi yang diambil oleh Sjahrir. Tuduhan bahwa Sjahrir telah mengkhianati Indonesia berkembang secara liar. Apalagi sikap mundur yang diambil Sjahrir dari posisi perundingan awal Republik diumumkan pasca perundingan oleh Wakil Presiden Hatta di bulan Juni.

Ketidakpuasan terhadap jalan yang ditempuh pemerintah berujung kepada penculikan yang dilakukan kelompok Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan (PP) terhadap Sjahrir. Ketika dalam perjalanan pulang dari safari keliling di Jawa Timur, Sjahrir ditangkap oleh tentara simpatisan

Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengadakan konferensi pers setelah mengalami penculikan di Solo.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sidang terakhir Kabinet Sjahrir pada tanggal 27 Juni 1947.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sjahrir mengadakan sidang Istimewa di rumahnya pada bulan Juni 1947.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

PP di Surakarta. Penangkapan ini adalah upaya untuk menaikkan posisi tawar PP yang mendapatkan simpati dari banyak partai politik, organisasi, dan bahkan dari Jenderal Soedirman. Kelompok Tan Malaka tidak setuju dengan perundingan apapun tanpa dasar pengakuan kemerdekaan Indonesia 100 persen dan mendorong nasionalisasi perusahaan asing sebagai jaminan untuk memaksa lawan berunding atas dasar itu.[125] Namun, Sukarno tidak menggubris himbauan yang diminta oleh PP, dan malahan menyatakan bahwa penangkapan terhadap Sjahrir membahayakan kesatuan bangsa.[126] Siaran radio oleh Sukarno ini menggoyahkan keyakinan dari pihak oposisi dan Sjahrir akhirnya dibebaskan dan kembali ke Jakarta.

Peristiwa penculikan tersebut menyadarkan Sjahrir bahwa dukungan terhadapnya kini tidak sebesar apa yang didapatkannya ketika memulai kabinetnya. Sementara itu, Belanda semakin agresif dalam menciptakan fakta-faktanya sendiri dan meruntuhkan pernyataan Republik bahwa mereka mewakili seluruh penduduk Indonesia.[127] Di bulan Juli, Belanda mengadakan suatu konferensi delegasi dari wilayah Timur Indonesia di Malino untuk membicarakan usul pembentukan suatu Negara Indonesia Serikat terdiri atas empat wilayah otonom, antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Timur Besar.[128]

Sjahrir yang terus-terusan dijepit oleh pergerakan yang dibuat oleh Belanda tidak memiliki alternatif yang paling efektif kecuali melanjutkan diplomasi. Pembicaraan terus berlangsung antara Indonesia dan Belanda. Sampai akhirnya, di bulan November 1946 tercapai sebuah kesepakatan politik antara Indonesia dan Belanda dalam sebuah perundingan di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini disepakati bahwa Belanda mengakui

Indonesia sebagai penguasa sah wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Disepakati pula bahwa Indonesia setuju bekerjasama dengan Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Serikat di mana Republik menjadi salah satu di antara negara federal lainnya dan berada di bawah Ratu Belanda yang memimpin uni Belanda-Indonesia tersebut.[129] Hasil perjanjian dari pertemuan tersebut kemudian disepakati rancangannya oleh Sukarno dan Hatta. Pada tanggal 25 Maret 1947, Perjanjian Linggarjati ditandatangi oleh pemimpin dari kedua delegasi (Sjahrir dan Schermerhorn).

Konsekusensi dari Perundingan Linggarjati bagi kedua negara menimbulkan pertikaian politik mengenai konsesi yang telah disepakati. Di Indonesia sendiri, posisi Sjahrir semakin melemah akibat tekanan politik dari lingkungan politik sekitarnya sendiri. Keputusan Sjahrir menjadi bulan-bulanan kelompok sayap kiri yang mendukungnya dalam pemerintahan. Ia dipaksa mundur oleh koalisi sayap kiri yang kini memihak kepada blok Amir Sjarifuddin, meskipun pada awalnya anggota kabinet sayap kirinya, seperti Abdulmadjid, menerima keputusan yang dibuat Sjahrir dalam Linggarjati. Di bulan Juni 1947, Amir dan sebagian besar anggota sayap kiri menarik dukungan terhadap Sjahrir yang sedang ke New York untuk mewakili Republik di PBB. Sjahrir akhirnya menarik mandat dari kursi perdana menteri. Di awal Juli 1947, Amir menjadi perdana menteri yang baru dan hubungannya dengan Sjahrir yang bagaikan "gas dan rem" menjadi memburuk, termasuk merembet kepada konflik internal di dalam tubuh Partai Sosialis. Soe Hok Gie mengatakan bahwa jatuhnya Sjahrir merupakan pengorbanan "kepentingan wajah revolusioner kaum kiri umumnya dan kaum komunis khususnya".[130]

Menurut Leifer, meskipun terbatas, kebijaksanaan diplomasi yang digagas Sjahrir mendapatkan perolehan yang nyata. Kedudukan internasional Indonesia semakin naik akibat hasil pengakuan *de facto* yang didapatkan pasca penandatanganan Perjajian Linggarjati.[131] Setelah perundingan ini sejumlah negara besar, seperti AS, Inggris, Australia dan Cina mengakui secara *de facto* eksistensi Republik. Meskipun demikian, Belanda merusak kesepakatan yang telah dibangun itu beberapa bulan kemudian dengan melancarkan serangan militer dan berupaya menduduki wilayah-wilayah tertentu di Jawa dan Sumatera.[132]

KEMERDEKAAN DAN PENGAKUAN INTERNASIONAL

Menghadapi agresivitas Belanda yang ingin berkuasa kembali, Indonesia di awal masa revolusi, menurut Roeslan Abdulgani, mengadopsi kebijakan luar negeri "*fighting foreign policy*" dengan tujuan utamanya memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. [133] Strategi mengadapi kolonial Belanda tidak hanya dijalankan melalui perlawanan bedil dan gerilya bersenjata, tetapi juga mengandalkan upaya diplomasi, salah satunya adalah upaya mendapatkan dukungan dari dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan pada dasarnya membutuhkan pengakuan internasional atas eksistensi sebuah negara baru. Sebetulnya syarat-syarat minimal untuk mendapatkan pengakuan internasional telah dipenuhi oleh Indonesia, seperti memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang mampu dan menunaikan kewajiban internasional, namun Belanda mengajukan tuntutan terhadap bekas jajahannya.[134]

Sjahrir telah menyadari bahwa posisi Indonesia begitu lemah di dalam geopolitik internasional. Dua kekuatan besar dunia, AS dan Inggris, berada di belakang Belanda. Sementara Indonesia tidak memiliki *back up* yang setara dengan yang dimiliki Belanda. Oleh sebab itu, Sjahrir telah mengupayakan untuk menampilkan wajah Indonesia yang lebih demokratis dan jalan politik luar negeri yang lebih moderat melalui diplomasi. Cara ini, salah satunya, adalah usahanya untuk meredam intervensi politik yang terlalu kuat dari kekuatan adidaya untuk melemahkan posisi Indonesia. Di luar itu, program utama yang dilakukan Sjahrir untuk memperkuat posisi kemerdekaan Indonesia di mata dunia adalah menarik seluas-luasnya dukungan internasional kepada Indonesia. Dukungan ini tidak hanya harus datang dari negara-negara besar, tetapi juga negara-negara yang sama-sama baru berkembang dan merdeka.

Saat memulai kepemimpinannya, Sjahrir langsung mengupayakan terbentuknya jaringan solidaritas politik antara Indonesia dengan negara-negara lainnya demi mendapatkan dukungan terhadap kemerdekaan. Orang-orang kepercayaan Sjahrir, langsung ia kirimkan ke beberapa kota di negara-negara yang memiliki lokasi strategis untuk merajut jaringan atau negara tersebut memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Perwakilan dikirimkan, antara lain dr. Soedarsono di New Delhi, Utoyo Ramelan di Singapura, Idham di Karachi, Rasjidi di Kairo, L.N. Palar di New York, dan dr. Subandrio di

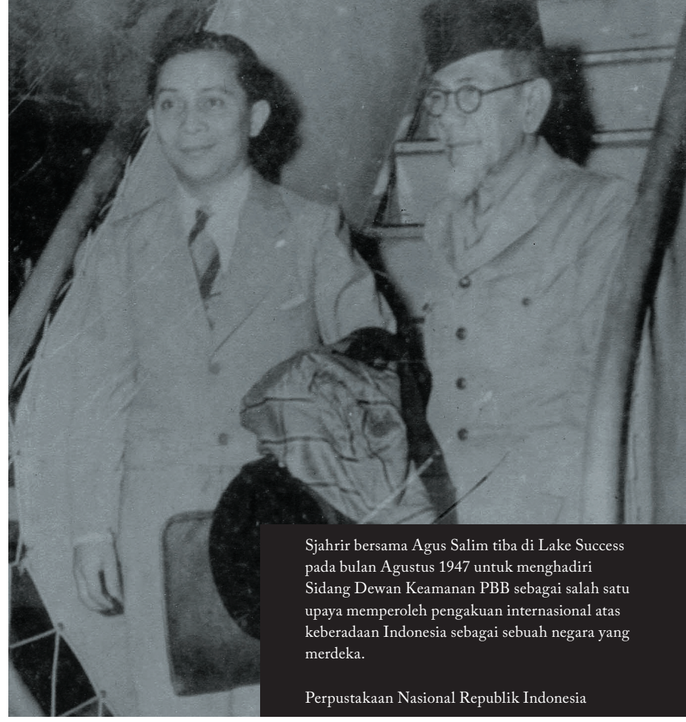

Sjahrir bersama Agus Salim tiba di Lake Success pada bulan Agustus 1947 untuk menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu upaya memperoleh pengakuan internasional atas keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

London. Kegiatan yang dilakukan oleh Sjahrir ini mendapatkan keberatan dari Belanda sebab secara jelas Republik bertindak seperti sebuah negara merdeka. Sedangkan, posisi Belanda adalah belum mengakui kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah hal yang sah. Namun, Sjahrir jalan terus dengan kebijakannya ini meskipun ia tahu tidak semudah itu mendapatkan dukungan yang besar.

Pengakuan awal terhadap kemerdekaan Indonesia datang pertama kali dari jejaring yang dibangun oleh Indonesia di Kairo, Mesir. Kairo adalah pusat aktivitas dari Liga Arab, organisasi Islam berpengaruh di Timur Tengah. Dengan lobi diplomasi ke Mesir, Indonesia memperoleh pengakuan politik atas kemerdekaannya dari Liga Arab. Setelah itu, negara-negara Timur Tengah yang lain mengirimkan simpatinya kepada Indonesia, seperti Suriah, Irak, Lebanon, Arab Saudi, dan Yaman.[135] Demi membalas

pengakuan dan memperat hubungan ke negara-negara Arab tersebut, Sjahrir mengutus sebuah misi diplomatik yang dipimpin oleh Agus Salim, Wakil Menteri Luar Negeri, untuk berkeliling mengunjungi negara-negara Timur Tengah tersebut. Kunjungan dimulai dari Mesir, Suriah, Yordania, Irak, Lebanon, Arab Saudi, dan berakhir di Yaman.[136] Pasca Perundingan Linggarjati pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de jure mengalir deras, dimulai Mesir pada tanggal 10 Juni 1947, Lebanon 29 Juni 1947, Suriah 2 Juli 1947, Arab Saudi 24 November 1947, dan terakhir Yaman pada 5 Mei 1948. Selain, pengakuan kemerdekaan diberikan kepada Republik dari negara-negara Asia, negara-negara besar, seperti AS, Inggris, Australia, dan China juga mengakui *de facto* Republik sebagai sebuah negara yang merdeka.

Beberapa hari setelah Perjanjian Linggarjati ditandatangani, Sjahrir diundang oleh Jawaharlal Nehru ke New Delhi untuk menghadiri Asian Relations Conference. Sjahrir termasuk datang terlambat di konferensi tersebut, meskipun ia telah mengirimkan perwakilan delegasi Indonesia yang dipimpin Abu Hanifah. Dalam konferensi tersebut, Indonesia diberikan kesempatan berbicara dan menyuarakan betapa pentingnya kemerdekaan bagi negara-negara terjajah sebelum Asia kembali bangkit. Konferensi ini begitu penting bagi Indonesia karena ia menjembatani pembangunan solidaritas antara negara-negara Asia yang sedang berjuang merdeka dalam menghadapi era dekolonisasi pascaperang.[137] Solidaritas yang terbangun antara India dan Indonesia ini dan juga dengan negara Asia lainnya berpengaruh signifikan dalam menghadirkan dukungan kepada Indonesia dalam perdebatan-perdebatan yang berlangsung dalam forum internasional. India dan negara Timur Tengah yang mengakui kemerdekaan Indonesia, misalnya, bersikap keras terhadap Belanda ketika terjadi agresi militer yang berlangsung di bulan Juli 1947 dan Desember 1948. Ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua bahkan India bersama negara-negara Asia lainnya dan dua negara Afrika (Mesir dan Eithiopia) menyelenggarakan Konferensi Asia untuk Indonesia. Dalam pidatonya di konferensi tersebut, Nehru mengatakan bahwa kita berkumpul di sini karena kita sadar bahwa kebebasan dan kemerdekaan bangsa serumpun Asia, Indonesia, sedang menghadapi kolonialisme yang kembali menonjolkan kepalanya di sana, menentang usaha dan kekuatan yang berusaha menciptakan tata kehidupan baru di atas dunia sekarang ini.[138]

Setelah turun dari jabatan perdana menteri, Sjahrir diserahi tugas khusus sebagai utusan istimewa Indonesia untuk urusan diplomatik. Sjahrir mengemban misi khusus untuk berupaya membawa masalah kemerdekaan Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, New York. Di dalam sidang Sjahrir membantah ejekan van Kleffens, Menteri Luar Negeri Belanda, bahwa "Republik identik dengan sebuah mikrofon radio".[139] Ia menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki unsur-unsur kelengkapan sebuah negara, seperti pemerintah, wilayah, dan tentara. Pada saat yang sama, Sjahrir berbicara tentang serangan Belanda yang menurutnya lebih hina daripada invasi Jepang ke Indonesia.[140] Pidato Sjahrir memang dipuji oleh *New York Herald Tribune* "salah satu pernyataan yang paling mengharukan yang pernah di dengar di sini, di Lake Success".[141] Dari upaya yang dilakukan Sjahrir tersebut, ada satu hasil penting yang didapatkan oleh Indonesia: konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai kedaulatan menjadi diinternasionalisir dan merupakan masalah dekolonisasi yang paling awal yang dibicarakan di dalam PBB. Di kemudian hari, PBB adalah lembaga internasional penting yang keterlibatannya turut menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda.

Sjahrir bersama Agus Salim tiba di Lake Success pada bulan Agustus 1947 untuk menghadiri Sidang Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu upaya memperoleh pengakuan internasional atas keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

DIPLOMASI BERAS KE INDIA

Salah satu upaya terpenting yang diinisiasi oleh Sjahrir untuk mendapatkan pengakuan internasional bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan eksis adalah diplomasi beras kepada India.[142] Pengiriman beras ini dilakukan pertama-tama untuk membantu India sebagai kawan seperjuangan sebangsa Asia yang sama-sama berjuang dahulu mencapai kemerdekaan dalam mengatasi bencana kelaparan. Setelah Indonesia merdeka, India adalah salah satu negara awal yang pertama kali membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia lewat pendirian perwakilan konsulat jenderal di Jakarta. Serta, saat ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta di awal tahun 1946, Nehru secara langsung mengirimkan utusan India untuk berkantor di sana. Riwayat panjang persaudaraan inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki empati kepada bangsa India ketika mendengar bencana kelaparan yang melanda masyarakatnya. Menurut Hatta, kebijakan pengiriman beras ini merupakan "suatu tanda persaudaraan dari rakyat Indonesia kepada bangsa India".

Sebagai balasannya, Indonesia mendapatkan timbal balik dari India berupa tekstil, bersama dengan ban sepeda dan alat-alat pertanian.[143] Barang-barang, seperti tekstil, begitu bermanfaat bagi Indonesia yang sedang bangkit dari krisis

semasa okupasi Jepang. Diestimasikan bahwa Indonesia menerima tekstil kurang lebih 500.000 yard, dari perhitungan minimal dua pelabuhan di Malang dan Banyuwangi saja menerima 240.000 yard dan 170.000 yard.[144] Sjahrir sendiri sempat melakukan inspeksi ketika menerima kiriman tekstil dari India di Cirebon. Indonesia sendiri di tahun 1947 untuk memenuhi kebutuhan tekstil masih mengupayakan impor dari luar.

Selain alasan persaudaraan India dan Indonesia, kebijakan diplomasi beras juga membuktikan bahwa pernyataan Belanda bahwa Indonesia belum merdeka terbantahkan. Dalam bayangan Sjahrir, dengan pengiriman beras kepada India ini, Indonesia dapat membuktikan kepada dunia bahwa negeri ini dapat menjalankan pemerintahannya. Keberhasilan pengiriman beras ke India juga memperlihatkan keberanian Indonesia dalam menembus blokade Belanda. Sejak awal masa Revolusi, Belanda berniat membatasi hubungan Indonesia dengan dunia luar. Akibat kebijakan ini, pihak Belanda rupanya kelabakan mengantisipasi hasil positif perhatian internasional sementrara yang didapatkan oleh Indonesia. Meskipun, sebetulnya Indonesia gagal mengirimkan beras sesuai rencana 500.000 ton akibat kurangnya penggilingan padi, penjarahan oleh serdadu-serdadu lokal yang tidak paham dengan kebijakan ekspor pemerintah, dan serangan militer Belanda yang menghancurkan pelabuhan. Tapi setidaknya taktik Sjahrir berhasil menggiring perhatian dunia sekilas kepada situasi poliitk yang menimpa Indonesia.

JALAN OPOSISI DAN KONSEKUENSINYA

Jalan diplomasi yang telah dirintis oleh Sjahrir meskipun berliku dan sulit pada akhirnya memperlihatkan hasil yang gemilang bagi Republik. Dengan ditandatanganinya kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di tahun 1949 apa yang telah digagas oleh Sjahrir tidak berujung sia-sia seperti yang dikhawatirkan oleh para pengkritiknya. Perundingan KMB yang mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat memuluskan langkah awal Republik untuk kembali ke bentuk negara kesatuan, suatu format kenegaraan yang telah disepakati oleh para pendiri Indonesia. Di tahun 1950an, datangnya sebuah era baru disambut dengan penuh harapan bahwa Indonesia bisa memulai pembangunannya yang sempat tertunda satu per satu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh garis konstitusi.

Lalu, bagaimana dengan peran Sjahrir? Rosihan Anwar menuliskan bahwa selama memimpin pemerintah dari tahun 1945-7, fokus utama perhatian Sjahrir dikonsentrasikan pada perjuangan menghadapi Belanda berbarengan dengan upaya meletakkan dasar pedoman bagi sebuah negara baru. Di masa ini, hampir tidak ada waktu dan peluang untuk mengaplikasikan pemikiran politiknya, yaitu sosialisme kerakyatan.[145] Setelah Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan di tahun 1949, sebagai warga negara biasa Sjahrir mulai mengembangkan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang didirikan pada 12 Februari 1948. Partai yang berfokus pada pengkaderan intelektualitas anggota seperti PNI-baru ini merupakan partai yang dibentuk Sjahrir setelah berseberangan dengan para tokoh-tokoh Partai Sosialis yang lebih radikal dan pro-komunisme. Di bulan November 1945, dua partai beraliran sosialis, pertama Partasi Sosialis Indonesia (Parsi) dipimpin oleh Amir Sjarifuddin dan kedua Partai Rakjat Sosialis (Paras) yang dipimpin oleh Sjahdir sepakat untuk bergabung dan melahirkan Partai Sosialis. Sjahrir menjabat kemudian sebagai ketua dan Amir sebagai wakil ketua. Bergabungnya duo ini bisa disebut sebagai dwitunggal baru versi yang lebih muda dan radikal.

Meskipun demikian, kolaborasi ini hanya dapat bertahan tiga tahun. Perpecahan awalnya disebabkan oleh penarikan dukungan koalisi sayap kiri dan komunis di dalam tubuh Partai Sosialis yang menilai Sjahrir gagal sebagai perdana menteri pasca Linggarjati. Setahun kemudian, kejatuhan kabinet Amir dengan sebab yang sama seperti Sjahrir, gagal memenuhi ekspetasi akibat disepakatinya Perundingan Renville, menyebabkan hubungan dua faksi politik ini tambah runyam. Amir yang telah kehilangan "gas-nya" memboyong pengikut Partai Sosialis bergerak ke gerbong yang semakin kiri dengan menginkorporasikan mereka ke dalam PKI yang dibentuk kembali pasca kedatangan Muso dari Soviet. Sementara Sjahrir yang merasa tidak sejalan lagi membentuk PSI sebagai saluran aspirasi politiknya.

Di tahun 1950-an Sjahrir sibuk dengan kegiatan partai. Satu hal aktivitas penting Sjahrir yang dilupakan banyak sejarawan adalah ia berinisiatif membangun jaringan internasional dengan tokoh-tokoh sosialis dunia lainnya untuk memajukan cita-cita sosialisme kemanusiaan yang dibayangkannya. Sjahrir berkunjung ke Inggris, Perancis, Belanda, Skandinavia, Polandia, dan Yugoslavia. Di Yugoslavia, Sjahrir bahkan berdiskusi mengenai sosialisme dengan Josip Broz Tito, pemimpin yang memiliki perhatian dengan negara-negara Asia dan Afrika. Upayanya yang lain adalah menginisiasi kongres kaum sosialis se-Asia di Burma. Ia pergi ke New Delhi di tahun 1952 untuk membicarakan itu. Di tahun 1953, diadakanlah Asian Socialist Conference di Rangoon, ibukota Burma. Sebagai pemuka sosialis Indonesia, Sjahrir memberikan pidato kunci dalam konferensi tersebut.

Sjahrir adalah tokoh yang masih diakui reputasinya di masa Demokrasi Parlementer meskipun ia tidak memimpin suatu lembaga pemerintahan. Meskipun demikian, partainya tidak pernah menjadi partai yang benar-benar besar. Dalam pemilu pertama Indonesia tahun 1955, PSI yang dipimpin tokoh sekaliber Sjahrir hanya memperoleh dua persen suara pemilih secara nasional dan mendapatkan lima kursi parlemen. Perolehan suaranya jauh di bawah empat besar partai pemenang pemilu: PNI, Masyumi, PKI, dan NU. Ada berbagai analisa yang berusaha menjelaskan fenomena ini. Pertama, gagasan Sjahrir dinilai banyak orang terlalu elitis atau dalam pendapat Salam

"Bahasa Sjahrir bukanlah bahasa rakyat, melainkan bahasa intelek yang sulit dimengerti rakyat … karenanya pengaruhnya terbatas pada dunia intelegensia semata, demikian pula nasib partai politik yang dipimpinnya".[146]

Kedua, PSI adalah partai kader yang organisasinya terbatas pada kaum urban perkotaan dan sedikit menjangkau daerah pedesaan.[147] Anggotanya hanya 50.000-an orang di seluruh Indonesia tahun 1955. Sjahrir jelas melupakan apa yang

dikatakan Leon Salim–kader lama PNI-baru– "kekuatan emosi, slogan, monumen dan pentas teater" untuk menarik minat massa.[148] Sjahrir dan banyak pemimpin partainya yang lain bukanlah seorang orator, demagog, ataupun pemimpin massa yang cemerlang, seperti Sukarno atau para pemimpin PKI. Sjahrir sendiri merefleksikan sendiri kekalahan PSI dalam pemilu 1955, yang menurutnya disebabkan oleh kekeliruannya dalam memperhitungkan kesadaran politik para pemilih yang masih didominasi oleh otoritas keagamaan dan kepamongprajaan. [149]

Pasca pemilu, PSI lebih banyak berperan sebagai pihak oposisi pemerintah. Pemberontakan PRRI yang didukung oleh para anggota PSI, seperti Sumitro Djojohadikusumo, Rasjid, dan Des Alwi, menyulitkan gerak-geriknya dan membuatnya dituduh ikut-ikutan terlibat dalam aksi tersebut. Setelah gerakan PRRI dapat dipadamkan, Sjahrir menuliskan pandangannya bahwa sentimen dan emosi regionalisme dan kelompok sukunya sendiri yang menghinggapi para pemuda dapat membahayakan kesatuan dan kehidupan umum Indonesia.[150] Dalam bayangan Sjahrir, kondisi politik di tahun-tahun itu dapat digambarkan sebagai "pusat yang statis dan pinggiran yang dinamis". Sesudah diumumkannya, Demokrasi Terpimpin, sikap Sjahrir terhadap Sukarno semakin kritis. Sulit dibantahkan bahwa Sjahrir tidak menyukai model kepemimpinan tersentralisir seperti itu yang cenderung memberikan kesempatan terhadap kemunculan otoritarianisme.

Akhir riwayat Sjahrir berujung tragis. Ia dituduh terlibat konspirasi persekongkolan yang ingin melawan negara setelah diundang oleh Anak Agung Gde Agung (Mantan Menteri Luar Negeri 1955-6) menghadiri upacara ngabenan ayahnya bekas raja Gianyar bersama dengan Hatta, Sultan Hamid, Moh. Roem, Subadio Sastrosatomo, Hamid Algadri.[151] Awalnya laporan rahasia tentang adanya "Bali connection" yang merencanakan aksi subversif diterima oleh Soebandrio selaku Kepala Pusat Intelijen merangkap Menteri Luar Negeri. Laporan kemudian diteruskan kepada Sukarno yang segera memerintahkan investigasi. Pada tanggal 7 Januari 1962, Sukarno dalam perjalanan berpidato di Makassar untuk kampanye Irian Barat dilempar sebuah granat yang diarahkan pada iring-iringan presiden. Segera aksi itu kembali dikait-kaitkan dengan desas-desus adanya persekongkolan subversif di Bali. Korban dari tuduhan yang semakin liar ini adalah kelompok oposisi pemerintah, yaitu PSI dan Masyumi. Pada tanggal 16 Januari 1962 Sjahrir beserta tokoh-tokoh PSI ditangkap. Penangkapan juga menimpa tokoh-tokoh Masyumi, di antaranya Moh. Roem, Prawoto Mangkusasmito, dan Isa Anshary.

Sjahrir awalnya diisolasi di sebuah rumah di Kebayoran Baru. Kemudian ia dipindahkan ke penjara di Madiun setelah tiga bulan. Untuk mengatasi pergolakan batinnya akibat rindu keluarganya, Sjahrir sering membaca buku dan menuliskan pikiran-pikirannya. Tapi, di akhir tahun 1962 kondisi kesehatannya memburuk setelah menderita tekanan darah tinggi. Akibat sakitnya ini, Sjahrir dipindahkan ke Jakarta untuk dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Namun, seiring kondisinya yang membaik ia dipindahkan ke penjara di Jalan Keagungan dari tahun 1963 sampai 1964.

Di bulan Februari 1965 Sjahrir dipindahkan ke Rumah Tahanan Militer di Jalan Budi Utomo. Di tempat ini, kondisi kesehatan Sjahrir tidak pernah pulih seperti semula, ia malahan terkena serangan stroke. Setelah serangan stroke ini Sjahrir tidak bisa lagi berbicara. Istrinya, Poppy Sjahrir, kemudian meminta kepada Sukarno agar suaminya mendapatkan pengobatan di luar negeri. Permintaan tersebut diterima oleh Sukarno, meskipun statusnya Sjahrir tetap sebagai tahanan.

Sjahrir dirawat di Swiss dan dilarang pergi berobat ke Belanda. Semua biaya ditanggung negara. Dalam pengobatannya di Zurich, Sjahrir beberapa kali dikunjungi para pengikutnya dari PSI yang sedang melawat ke Eropa berbisnis atau konferensi. Di tahun 1966, Sjahrir didiagnosis oleh dokter di Zurich menderita pendarahan otak. Ia koma selama tujuh hari dan wafat pada tanggal 9 April 1966 di usia 57 tahun. Wafatnya Sjahrir disiarkan oleh radio dan media massa. Presiden Sukarno menganugerahinya gelar pahlawan nasional melalui dekrit yang ditandatanganinya dan menyetujui penyelenggaraan pemakaman negara dengan penghormatan penuh. Dalam pemakamannya, Hatta membacakan euloginya kepada kawannya yang telah jatuh bangun bersama sejak masa pergerakan.

"Sutan Sjahrir yang mengandung dalam kalbunya cita-cita besar itu, hidupnya hanya berjuang, menderita dan berkorban untuk menciptakan, supaya rakyat Indonesia merdeka dari segala tindasan. Ia meninggal dengan tiada mencapainya. Ia berjuang untuk Indonesia Merdeka, melarat dalam perjuangan Indonesia Merdeka, ikut serta membina Indonesia Merdeka, tetapi ia sakit dan meninggal dalam tahanan Republik Indonesia yang merdeka … Saudaraku Sutan Sjahrir, sampai di sinilah kami mengantarkan engkau dalam perjalananmu pulang kampung ke akhirat … Sejarah akan membuktikan bahwa hidupmu di dunia tidak sia-sia. Dalam sejarah, namamu akan tercatat sebagai pejuang kemerdekaan bangsa dan sebagai Perdana Menteri yang pertama daripada Republik Indonesia yang baru merdeka dan berjuang".[152]

PENUTUP

Salah satu kontribusi besar Sjahrir dalam mempertahankan Republik yang masih berusia muda adalah strategi dan kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Sjahrir menyadari bahwa Indonesia memiliki posisi yang masih lemah, baik secara internal dalam negeri maupun dalam geopolitik internasional. Di dalam negeri, angkatan bersenjata Indonesia masih belum kuat dan masih membutuhkan waktu untuk siap menghadapi gempuran militer dari Belanda. Oleh sebab itu, diplomasi bagi Sjahrir adalah jalan politik yang paling rasional menghadapi Belanda yang didukung oleh Inggris dan AS dan mencegah korban dari pihak Republik berjatuhan dengan percuma. Tindakan revolusioner memang diperlukan namun hal itu memerlukan kalkulasi rasional dan perhitungan politik yang memadai. Sjahrir waspada bahwa secara geopolitik internasional kapitalisme dan imperialisme Anglo-Saxon begitu kuat

mempengaruhi posisi politik Indonesia. Indonesia harus berhati-hati, bermain apik dan cerdik dalam situasi politik internasional yang tidak memihak untuk meningkatkan status politik Indonesia, diakui sebagai negara berdaulat oleh dunia internasional.

Oleh karena itu, Sjahrir yang telah menghitung matang-matang resiko politik dalam setiap jalan yang diambilnya memilih setapak demi setapak mencari dukungan internasional seluas-luasnya dari negara-negara Asia tetangganya. Tidak mengemis dan menjilat-jilat kekuatan negara adidaya, seperti AS dan Inggris, untuk mendapat restu dukungan pertahanan dalam menghadapi tekanan Belanda. Pelan-pelan tapi pasti jejaring politik yang ditanam oleh Sjahrir di Kairo membuahkan hasil. Diplomasi politiknya kepada Liga Arab yang begitu berpengaruh di Timur Tengah membuat Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Arab Saudi, dan Yaman mengirim sinyal pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain Kairo, salah satu pusat dari pembangunan jaringan politik internasional Indonesia adalah New Delhi. Melalui kerjasama diplomatik dengan India, Indonesia mengirimkan beras untuk ditukar dengan tekstil dan kebutuhan lainnya. Diplomasi beras ke India bukan hanya misi kemanusiaan dari Indonesia yang empati terhadap India yang diserang bencana kelaparan, tapi juga memiliki misi politik untuk membuktikan kepada Belanda bahwa Indonesia mampu menembus blokade yang disusun Belanda mengepung Indonesia. Melalui diplomasi beras tersebut, Indonesia membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu mengelola negara dan membantah asumsi bahwa Indonesia adalah negara tidak berdaya yang lebih pantas dikembalikan kepada Belanda seperti di masa kolonial.

Hidup yang tidak dipertaruhkan takkan mungkin dimenangkan. Sjahrir telah mempertaruhkan hidupnya dengan mengambil jalan politik tidak populer yang telah ditempuhnya–tentu dengan menghitung resiko-resiko dari keputusan tersebut. Sejarah membuktikan bahwa apa yang telah dipertaruhkan oleh Sjahrir lewat seni diplomatiknya bukanlah sebuah kegagalan seperti yang dituduhkan oleh lawan-lawan politiknya di masa lalu. Pertaruhan diplomatiknya membuahkan hasil Republik yang kita nikmati hari ini sehingga kita dapat membantah ejekan van Kleffens di sidang Dewan Keamanan PBB bahwa Republik bukanlah dibentuk hanya melalui siaran radio, melainkan melalui kepercayaan diri, strategi yang hati-hati, dan ketajaman intelektual yang telah terasah dari para pendiri bangsa.

ENDNOTES

1 Rudolf Mrazek, *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 1996), hlm. 40-1.

2 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 52.

3 Ibid.

4 Hamdani, "Sutan Sjahrir di Masa Mudanya", dalam Rosihan Anwar (ed.). *Mengenang Sjahrir* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 72.

5 Ibid.

6 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 61.

7 Ibid., hlm. 62.

8 Hamdani, "Sutan Sjahrir", hlm. 71.

9 Subadio Sastrosatomo, "Sjahrir: Suatu Perspektif Manusia dan Sejarah", dalam Rosihan Anwar (ed.). *Mengenang Sjahrir* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. xi.

10 Solichin Salam, *Sjahrir: Wajah Seorang Diplomat* (Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam, 1990), hlm. 13.

11 Burhanuddin, "Sjahrir yang Saya Kenal", dalam Rosihan Anwar (ed.). *Mengenang Sjahrir* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 48.

12 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 69.

13 Ibid., hlm. 65.

14 Ibid.

15 Ibid.

16 Ibid., hlm. 68.

17 Ibid., hlm. 69.

18 Hamdani, "Sutan Sjahrir", hlm. 75.

19 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 67.

20 Hamdani, "Sutan Sjahrir", hlm. 75.

21 Sastrosatomo, "Sjahrir", hlm. xii-xiii.

22 Ibid., hlm. xiii.

23 Ibid.

24 Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 35.

25 Hamdani, "Sutan Sjahrir", hlm. 73.

26 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 80.

27 Ibid., hlm. 81.

28 Ibid.

29 Burhanuddin, "Sjahrir", hlm. 49.

30 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 83.

31 Burhanuddin, "Sjahrir", hlm. 49.

32 Ibid.

33 Ibid., hlm. 50.

34 Hamdani, "Sutan Sjahrir", hlm. 74.

35 Gerry van Klinken, *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen* (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. 173.

36 Sastra, "Makna Sjahrir untuk Sastra dan Sastra untuk Sjahrir", dalam Rosihan Anwar (ed.). *Mengenang Sjahrir* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 83. Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 73.

37 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 72.

38 Abu Hanifah, *Bunga Rampai Soempah Pemoeda* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978), hlm. 340.

39 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 73.

40 Benedict Anderson, "The Language of Indonesian Politics", *Indonesia* 1 (1966), hlm. 89-116.

41 Ibid.

42 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 36.

43 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 94.

44 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 37.

45 Ignas Kleden, "Sutan Sjahrir: Etos Politik dan Jiwa Klasik", dalam Rosihan Anwar, *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 18.

46 Ibid., hlm. 18-9.

47 J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir* (Jakarta: Grafiti, 1993), hlm. 47.

48 Ibid.

49 Benedict Anderson, "Pendahuluan", dalam Sjahrir, *Perjuangan Kita* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49, 1994) hlm. 6. Sol Tas, "Kenangan pada Sjahrir", dalam Rosihan Anwar (ed.). *Mengenang Sjahrir* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 236-7.

50 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 98.

51 Sastrosatomo, "Sjahrir", hlm. xiv.

52 Tas, "Kenangan", hlm. 237.

53 Ibid., hlm. 238.

54 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 101.

55 Tas, "Kenangan", hlm. 238. Sastrosatomo, "Sjahrir", hlm. xiv.

56 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 37.

57 Mohammad Hatta, "Kenang-Kenangan Masa Lampau dengan Sjahrir", dalam Rosihan Anwar (ed.). *Mengenang Sjahrir* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 11.

58 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 119.

59 Ibid.

60 Ibid., hlm. 136.

61 Hatta, "Kenang-Kenangan", hlm. 13.

62 Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta. Jilid 1: Mohammad Hatta dan Pemikirannya* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), hlm. 115.

63 Lihat, Moh. Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid II Berjuang dan Dibuang* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm. 26-31. Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 38.

64 Anderson, "Pendahuluan", hlm. 7.

65 Ibid.

66 Onghokham, "Sukarno: Mitos dan Realitas", dalam Onghokham, *Sukarno, Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 16. Noer, *Biografi Politik*, hlm. 115.

67 Tas, "Kenangan", hlm. 243.

68 Anderson, "Pendahuluan", hlm. 8.

69 Lihat, Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid II.*

70 Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: LP3ES, 1987).

71 Ibid.

72 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 172.

73 Legge, *Kaum Intelektual*, hlm. 56.

74 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 186.

75 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 40.

76 Sastrosatomo, "Sjahrir", hlm. xxii.

77 John Ingleson, *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 249.

78 Ibid., hlm. 251.

79 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 253.

80 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 42.

81 Sastrosatomo, "Sjahrir", hlm. xxiii.

82 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 47.

83 Sutan Sjahrir, *Sosialisme Indonesia, Pembangunan: Kumpulan Karangan* (Jakarta: Leppenas, 1982), hlm. 22

84 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 390.

85 Ibid., hlm 391. Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 46.

86 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 404.

87 Legge, *Kaum Intelektual*, hlm. 78.

88 Ibid., hlm. 77-8.

89 Benedict Anderson. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* (Tangerang Selatan, Marjin Kiri, 2018), hlm. 43.

90 Ibid.

91 Ibid., hlm. 43-8.

92 Ibid., hlm. 44.

93 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 50.

94 Legge, *Kaum Intelektual*, hlm. 105-6.

95 Ibid., hlm. 105.

96 Ibid., hlm 104.

97 M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), hlm 425.

98 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 450.

99 Ibid., hlm. 458-9.

100 Ibid., hlm. 461.

101 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 53. Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 468.

102 Ricklefs, *Sejarah IndonesiaI*, hlm. 430.

103 *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 211.

104 Ricklefs, *Sejarah IndonesiaI*, hlm. 433.

105 Ibid.

106 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 59.

107 Ricklefs, *Sejarah IndonesiaI*, hlm. 429.

108 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 197.

109 Ibid.

110 Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 12. Lihat pula Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 197-8.

111 Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 217.

112 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 199.

113 George McT. Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013).

114 Legge, *Kaum Intelektual*, hlm. 181.

115 Ibid.

116 Ricklefs, *Sejarah IndonesiaI*, hlm. 440.

117 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 219.

118 Legge, *Kaum Intelektual*, hlm. 187.

119 Sjahrir, *Perjuangan Kita*, hlm. 43.

120 Ibid., hlm. 192.

121 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 74.

122 Leifer, *Politik Luar Negeri*, hlm. 14.

123 Ibid., hlm. 15.

124 Ricklefs, *Sejarah IndonesiaI*, hlm. 449.

125 Soe Hok Gie, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948* (Yogyakarta: Bentang, 1997), hlm. 75.

126 Ibid.

127 Leifer, *Politik Luar Negeri*, hlm. 18.

128 Ibid.

129 Ricklefs, *Sejarah IndonesiaI,* hlm. 451.

130 Gie, *Orang-Orang*, hlm. 122.

131 Leifer, *Politik Luar Negeri*, hlm. 23.

132 Solichin Salam, *Sjahrir: Wajah Seorang Diplomat* (Jakarta: Centre for Islamic Studies and Research, 1990), hlm. 29.

133 Roeslan Abdulgani, *Mendajung dalam Taufan. Ichtisar dan Ichtiar Politik Luar Negeri Indonesia 1956* (Jakarta: Penerbit Endang, 1956), hlm. 53.

134 Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa ke Masa. Buku I Periode 1945-1949* (Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2004), hlm. 145-6.

135 Suranta Abd. Rahman, "Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab pada Tahun 1947", *Wacana*, 9, 2, (2007), hlm. 154-172.

136 Rizal Sukma, *Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity* (London: RoutledgeCurzon, 2003), hlm. 27. Rahman, "Diplomasi RI", hlm. 168-170.

137 Wildan Sena Utama, *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2017).

138 Panitia Penulisan, *Sejarah Diplomasi*, hlm. 199.

139 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 75.

140 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 623.

141 Ibid., hlm. 625.

142 Salam, *Sjahrir*, hlm. 15.

143 Robert Cribb, "The External Rice Trade of Indonesian Republic, 1946-47", dalam Alicia Schrikker dan Jeroen Touwen (eds.). *Promises and Predicaments: Trade and Entrepreneurship in Colonial and Independent Indonesia in 19th and 20th Century* (Singapore: NUS Press, 2015), hlm. 186.

144 *Merdeka*, 23 November 1946. *Soeloeh Ra'jat*, 25 November 1946.

145 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 101.

146 Salam, *Sjahrir*, hlm. 17.

147 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 109.

148 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 769.

149 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 111.

150 Mrazek, *Sjahrir*, hlm. 802.

151 Anwar, *Sutan Sjahrir*, hlm. 132.

152 Ibid., hlm. 149.

AMIR SJARIFUDDIN

AMIR SJARIFUDDIN:

Sosialisme Kiri dan Polemik Pertahanan Nasional

"Dan bagi kita hanya ada satu jalan mempertahankan kemerdekaan kita. Mempertahankan hak untuk terus memajukan negara kita. Marilah, rakyat Indonesia bersama-sama menggunakan segala tenaga, segala usaha seluruh rakyat mempertahankan kemerdekaan kita. Kita berjuang, kita berjuang terus, seluruh rakyat mengadakan pertahanan nasional, menyelenggarakan pertahanan rakyat"

Amir Sjarifuddin

PENGANTAR

Amir Sjarifuddin adalah Menteri Penerangan pertama, Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri kedua Indonesia. Bersama Sukarno, Hatta, dan Sjahrir, Amir adalah empat tokoh pertama yang memimpin Republik di awal masa berdiri. Di masa pergerakan melawan kolonialisme Belanda duet Sukarno-Amir dari Partindo merupakan tandem dari sebuah corak model pemimpin massa yang kharismatis, ditopang kemampuannya berorasi menghipnotis pentas-pentas politik. Duo ini seringkali berseberangan dengan duet Hatta-Sjahrir dari PNI-baru yang lebih mengandalkan kepemimpinan kaderisasi dengan membentuk simpul jaringan ideologis yang terstruktur dan ramping daripada memprioritaskan agitasi massa. Di masa Jepang yang singkat dan di awal Republik tandem-tandem ini mengalami pergeseran. Sukarno dan Hatta yang dikenal sebagai dwitunggal memimpin pergerakan dalam jabatan-jabatan resmi yang diberikan oleh Jepang sehingga berujung kepada konsekuensi dituduh sebagai boneka Jepang oleh Sekutu dan Belanda. Sedangkan, Amir dan Sjahrir mengambil jalan bawah tanah yang penuh resiko dan pengawasan dari pemerintah Jepang. Dan meskipun riwayat klandestin Amir berakhir penyiksaan dan hukuman seumur hidup, Amir mendapatkan reputasi di kalangan pemuda yang lebih militan sebagai pahlawan di zaman baru Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, sosoknya diperlukan oleh Republik, di samping memang kapasitas dan kharismanya diakui luas representasi Amir diperlukan untuk membantah asumsi bahwa Republik adalah bentukan Jepang.

Bab ini akan membahas mengenai riwayat Amir Sjarifuddin dalam tiga babak: jalan pergerakan, jalan pemerintahan, dan jalan konfrontasi. Jalan politik pergerakan Amir telah dirintis sejak menjadi mahasiswa sekolah hukum di Batavia. Dipengaruhi oleh Moh. Yamin, senior di sekolahnya sekaligus menjadi patron politik awalnya, Amir telah mendukung gagasan yang menjadi cita-cita Indonesia di masa depan, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yang diproklamirkan dalam Kongres Pemuda Kedua di tahun 1928. Amir telah memiliki perhatian khusus dalam bahasa nasional, sebab bahasa persatuan diperlukan untuk membentuk sebuah bangsa yang berlandaskan unsur-unsur yang beranekaragam. Lewat bahasa nasional Amir menemukan kewarganegaraan dan identitasnya sebagai bagian dari sebuah negara-bangsa Indonesia. Karirnya semakin bersinar sejak ia menempa pengalaman politik bersama Sukarno di PNI dan Partindo. Menurut laporan-laporan disebutkan bahwa Amir merupakan pemimpin muda kharismatis yang kemampuan orasinya disebut-sebut hanya kalah oleh Sukarno. Sinarnya sebagai pemimpin muda yang radikal di partai yang memiliki massa yang besar dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Belanda. Penahanannya oleh pemerintah Belanda dan juga pengasingan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap tokoh-tokoh politik ternama Indonesia ke luar Jawa mendorong Amir untuk mengubah format pergerakan dari metode nonkooperasi menjadi kooperasi dengan mendirikan Gerindo pasca ia keluar dari penjara. Meskipun Gerindo berada di dalam, namun suara-suara bernada radikal masih terasa dari organisasi yang melabelkan dirinya sebagai partai "kaum susah".

Yang menarik adalah sejak pertengahan tahun 1930-an, Amir memiliki perhatian lebih pada demokrasi. Bagi Amir, demokrasi bukan hanya sebatas mekanisme yang ditempuh oleh organisasi atau individu untuk mencapai tujuan politiknya, tetapi terciptanya masyarakat ideal demokratis bagi Indonesia yang lebih penting. Perhatiannya pada demokrasi dipengaruhi oleh ketakutannya terhadap fasisme yang semakin ekspansif mempengaruhi politik internasional dan juga kekhawatirannya terhadap belum selesainya masalah kebangsaan, tentang siapa yang disebut "orang Indonesia". Ketakutan Amir yang besar terhadap ancaman fasisme global akhirnya menemui kenyataan ketika militer Jepang melakukan ekspansi dan menduduki Indonesia demi menyokong kepentingannya dalam Perang Dunia ke-2. Amir mengorganisir jaringan bawah tanahnya yang berisi para aktivis sayap kiri Gerindo dan PKI ilegal yang berbasis di Surabaya. Penentangannya yang keras terhadap Jepang bersama Sjahrir menaikkan pamornya di kalangan pemuda menjadi dwitunggal baru membayang-bayangi dwitunggal Sukarno-Hatta. Bab ini akan memberikan perhatian pada perjalanan Amir Sjarifuddin menjadi perdana menteri kedua. Meskipun jabatan yang diemban Amir hanya berlangsung beberapa bulan, namun setidaknya ada dua kecenderungan warna yang berbeda yang hadir di masa kabinet Amir dibandingkan kepemimpinan sebelumnya: Amir membangun garis politik sosialisme kiri yang direpresentasikan secara jelas dalam kabinetnya dan Amir mengkonstruksi model pertahanan nasional yang menimbulkan pro dan kontra di masa kepemimpinannya dan setelahnya. Menariknya, meskipun kabinet Amir diisi oleh eksponen kiri, Amir tidak menempuh jalan yang

lebih radikal dalam bernegoisasi dengan Belanda dan tetap mempertahankan jalur diplomatik yang telah dirintis oleh Sjahrir. Akibat keputusannya mempertahankan jalan diplomatik berujung Perundingan Renville inilah Amir menemui akhir yang tragis, sama dengan yang dialami oleh Sjahrir yang jatuh oleh tekanan pendukung Amir akibat hasil Perundingan Linggarjati yang tidak memuaskan bagi Republik.

AKTIVISME POLITIK DI MASA MUDA

MENGECAP PENDIDIKAN EROPA, TERPIKAT REVOLUSI PERANCIS

Amir Sjarifuddin lahir di Medan pada tanggal 27 Mei 1907. Ia lahir dari keluarga aristokrat Batak: ayahnya Djamin bergelar Baginda Soripada Harahap adalah jaksa publik senior dan ibunya Basunu Siregar adalah anak saudagar muslim kaya di Tapanuli Utara. Todoeng gelar Soetan Goenoeng Moelia merupakan sepupu Amir Sjarifuddin karena mereka memiliki kakek yang sama dari sisi ayah, Soetan Goenoeng Toea. Klan Harahap yang merupakan marganya adalah klan "penguasa" utama di wilayah Tapanuli Selatan–kampung halaman Amir.[1] Meskipun lahir dari keluarga bangsawan, Amir Sjarifuddin menolak menggunakan gelar kebangsawanannya Soetan Goenoeng Soaloon dan memilih menempuh jalur menjadi "bangsawan pikiran"–suatu praktik yang mulai jamak ditemui oleh elit intelektual di awal masa pergerakan Indonesia. Menurut Abdul Rivai, bangsawan pikiran, sebagai antitesis dari bangsawan usul, adalah kebangsawanan dan kehormatan yang dicapai melalui ilmu pengetahuan dan pikiran bukannya warisan asal-usul.[2]

Ibunda Amir mendidik Amir dengan pengajaran Islam yang mendalam. Ibunya memiliki harapan bahwa Amir kelak menjadi seorang pemimpin agama seperti makna nama yang diberikan kepadanya. Amir kecil bersekolah di Europese Lagere School (ELS), sekolah elit Eropa berbahasa Belanda, di Medan kemudian pindah ke Sibolga. Sejak kecil, telah tampak bahwa ia merupakan siswa yang cerdas di antara teman-temannya. Karena prestasinya yang menonjol dan ditopang kemampuan finansial keluarganya, Amir melanjutkan pendidikan SMA-nya di Harlem. Setahun setelah dari Harlem, ia pindah sekolah ke Gymnasium Leiden, salah satu lokasi utama dari aktivitas Perhimpunan Indonesia. Ketika di Belanda ini, Amir tinggal di sebuah keluarga Calvinis dan kemudian dengan janda mantan misionaris. Sebagai anak muda, Amir pun mulai merasakan jatuh cinta singkat pada seorang gadis Belanda.

Di Belanda, Amir terpukau dengan kesusasteraan, filsafat, dan mulai berkenalan dengan politik pemuda. Amir adalah seorang poliglot, fasih berbahasa Yunani klasik, Latin, Perancis, dan Inggris. Ia mampu membaca sastra-sastra Eropa dari bahasa aslinya berkat kemampuan bahasanya yang baik. Amir sempat tertarik dengan hal-hal orientalis-tradisionalis selama di Belanda, tercatat ia pernah datang ke kuliah filsafat timur dan barat yang diselenggarakan oleh Theosophical Society.[3] Sama seperti pemuda Indonesia seangkatan dan sepergaulannya, Amir terpikat dengan Revolusi Perancis, bukan Revolusi Amerika atau Revolusi Rusia. Ia disadarkan tentang arti kata dan makna revolusi dari peristiwa monumental Revolusi Perancis yang ia pelajari dari guru-guru Belandanya di sekolah menengah dan sekolah tinggi hukum.[4] Amir mengagumi tokoh Comte de Mirabeau (1749-1791), seorang orator hebat, diplomat, dan negarawan yang mendukung monarki konstitusional dan mendorong Revolusi Perancis lewat pemikirannya.[5] Seorang sahabatnya yang juga tokoh pemuda, Abu Hanifah, mengatakan bahwa Amir Sjarifuddin juga mengagumi tokoh Revolusi Perancis, Maximillien Roberspierre.[6] Pengaruh kedua tokoh itu dalam diri Amir terlihat dari pemikiran, profesi, maupun revolusi yang ia impikan.

Perkenalan dengan politik pemuda dimulai di Belanda ketika ia berorganisasi dan mengikuti pemilihan eksekutif masyarakat sekolah Amicitia.[7] Namun, karena usianya yang terlalu muda dan belum mahasiswa, Amir tidak aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh tokoh muda yang juga dari Sumatera, Moh. Hatta. Namun, ia mengamati aktivitas dari PI, terbukti dari tulisan pertamanya tentang politik nasional di Indonesia yang mengutip bekas anggota PI, Noto Soeroto, disamping mengutip Gandhi dan Sun Yat Sen.

Amir lulus dari Gymnasium Leiden di tahun 1927. Namun, ia tidak melanjutkan studi universitasnya di Belanda karena kesulitan finansial yang menimpa keluarganya. Akhirnya, Amir memutuskan kembali ke Indonesia untuk menempuh pendidikan yang secara finansial lebih murah dibandingkan tetap ngotot bertahan di Belanda. Amir mendaftar ke Rechts Hoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) yang baru didirikan tiga tahun di Batavia dengan beasiswa dari pemerintah Belanda.

SATU NUSA, SATU BANGSA, SATU BAHASA

Kembali ke Batavia, Amir menempati rumah sepupunya Soetan Goenoeng Moelia, yang telah menjadi kepala sekolah menengah prestisius di Batavia dan anggota Volksraad.[8] Namun, ia tidak betah dan memilih untuk tinggal bersama teman seniornya sesama mahasiswa hukum, Muhammad Yamin, di asrama kelompok debat di Jalan Kramat 106 (Indonesisch Clubgebouw). Yamin adalah sahabat sekaligus patron politik awal Amir Sjarifuddin. Ia dikagumi Amir karena mereka sama-sama memiliki minat yang mendalam pada musik, sastra, agama, dan politik. Di dalam asrama Kramat 106 ini berkumpul mahasiswa hukum dan mahasiswa kedokteran yang melek politik dan progresif. Di antara mereka yang tinggal adalah Abu Hanifah, Moh. Yamin, Assaat, Abas, Surjadi, dan Mangaraja Pintor. Para mahasiswa ini sering membicarakan dan memperdebatkan soal-soal politik, kebudayaan, masyarakat, kolonialisme Belanda, teori politik yang sulit dan hal-hal lainnya.[9] Perdebatan yang mereka lakukan terkadang berlangsung sengit dan mengundang perhatian mahasiswa lainnya untuk bergabung. Sering pula para pemimpin muda, seperti Wongsonegoro, Jusupadi, atau Zainudin, mampir ke dalam perdebatan-perdebatan tersebut. Bahkan, apabila sedang mampir ke Jakarta, Sukarno mampir dan ikut serta dalam diskusi yang diadakan oleh mahasiswa Kramat 106.[10] Tidak berlebihan menyebutkan bahwa ketika bersekolah di Rechts Hoogeschool Amir mulai berkenalan dengan politik secara intensif.

Pengalaman politiknya berkembang saat ia bergabung dengan Perhimpunan Pelajar-

Pelajar Indonesia (PPPI) dan menjadi redaktur majalahnya *Indonesia Raya*.[11] Ia bergabung dalam PPPI melalui dua organisasi kepemudaan etnis yang terhubung dengan asal-usulnya sebagai orang Sumatera: Jong Sumatranen Bond dan Jong Batak. Di paruh waktunya, Amir juga mengajar di perguruan rakyat yang didirikan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Di sekolah yang terletak di sebuah pabrik es di Gang Kenari milik Husni Thamrin, Amir berkenalan dengan banyak aktivis masa depan Indonesia, salah satunya Arnold Mononutu. Di sinilah Amir mulai terlibat dengan kegiatan-kegiatan politik PNI, meskipun lebih aktif nantinya di Partindo–partai lanjutan PNI.

Ketika Amir bergabung dengan PPPI telah timbul suatu kesadaran di antara generasi baru mahasiswa Indonesia bahwa gagasan federasi di antara berbagai kelompok etnis sebagai konsepsi masa depan Indonesia adalah suatu konsepsi yang kadaluwarsa.[12] Mereka cenderung lebih yakin bahwa konsepsi yang lebih sesuai terhadap bentuk masa depan Indonesia adalah kesatuan yang dapat menampung segala macam diversitas etnik, agama, tradisi dan bahasa di Indonesia. Hal inilah yang dibuktikan pada saat Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1928. Pada hajatan ini banyak mahasiswa Sekolah Hukum yang terlibat. Amir sendiri merupakan salah satu organisator dari Sumpah Pemuda 1928 di mana dia berposisi sebagai bendahara.

Menurut Leclerc, "bagi Amir, prinsip harapan (meminjam istilah Ernest Bloch) untuk Indonesia pertama-tama memperoleh bentuknya pada manifestasi tiga gabungan kata: satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa".[13] Rumusan Yamin ini mendapatkan inspirasi dari gagasan akademis Belanda mengenai *taal-, land-, en volkenkunde* yang intisarinya diambil dan dirumuskan kembali menjadi sebuah cita-cita bangsa di masa depan. Khusus untuk masalah bahasa nasional, bagi Amir, hal ini merupakan suatu hal yang mendasar bagi terbentuknya sebuah bangsa dari unsur-unsur yang heterogen. Ia menyadari "pentingnya suatu bahasa yang dapat dipergunakan dan dimengerti di seluruh Indonesia dan menjadi alat pertukaran ide dan informasi".[14] Masalah bahasa nasional adalah masalah paling mendasar dari problem nasional itu sendiri. Amir mempelajari bahasa Indonesia dan "menemukan dirinya sebagai warga negara Indonesia dan identitasnya sebagai bangsa Indonesia".[15]

Para pemuda di balik Sumpah Pemuda inilah, bersama dengan sebuah kelompok kecil di Bandung yang dipimpin oleh Sukarno, menyatakan diri sebagai "Angkatan 28". Setahun setelah Kongres Pemuda kedua, Oktober 1929, Sukarno mengajukan sebuah rencana mengejutkan kepada Angkatan 28 di Kramat 106. Ia dengan berani mengajukan usulan untuk mempersiapkan aksi massa yang menghadapkan antara kapitalisme dan komunisme selama Perang Dunia yang pasti segera akan meledak.[16] Namun, usulan itu tidak sempat terealisasi, Sukarno ditahan oleh pemerintah Belanda dua bulan kemudian karena menjalankan aktivitas politik dan menyebarkan pemikiran radikal yang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial. Tidak jauh berbeda, Amir pun terlibat ke dalam konfrontasi-konfrontasi dengan negara seperti Sukarno, dalam gerakan politik radikal dan gerakan propaganda menentang kolonialisme.

DALAM PUSARAN PERGERAKAN ANTIKOLONIAL

BINTANG YANG BERSINAR

Penangkapan Sukarno oleh pemerintah Belanda membuat nafas organisasi PNI harus berhenti. Para mantan anggota dan simpatisan PNI tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka, termasuk Amir Sjarifuddin, kemudian mendirikan Partai Indonesia (Partindo) di Jakarta tahun 1931 untuk melanjutkan cita-cita PNI yang terputus: kemerdekaan Indonesia. Partindo menolak perjuangan kelas dan mereka memilih perjuangan rasial dalam mencapai kemerdekaan penuh.[17] Meskipun demikian, anggota partai ini fasih dalam membicarakan dan mendiskusikan pemikiran-pemikiran marxisme. Partai ini mengumumkan bahwa mereka menganut asas demokratis, non-kooperasi, dan radikal dalam kegiatan politik dan ekonominya. Partindo pada awalnya menyerukan persatuan nasional dengan mengajak orang-orang mantan anggota Perhimpunan Indonesia yang tergabung dalam PNI baru.

Nama Amir Sjarifuddin mulai bersinar terang dalam gerakan antikolonialisme ketika tergabung dalam Partindo. Amir awalnya menjadi wakil ketua Partindo cabang Jakarta bagian penerbitan. Ia mulai naik daun dalam lingkaran aktivis saat intensif terlibat mengurusi pendidikan dalam universitas rakyat milik PNI. Di tahun 1933, dalam Kongres Partindo ke-2 ia mengemban tugas sebagai wakil ketua dua di bawah Sukarno (ketua) dan Sartono (wakil ketua satu), sekaligus diserahi tugas untuk memimpin bagian sekolah dan pendidikan. Dalam posisi ini, Amir berpartisipasi dalam membentuk wacana mengenai imperialisme dan kapitalisme yang dibentuk oleh Sukarno dan Yamin. Amir meyakini jalur perjuangan Partindo bahwa diperlukan aksi penggalangan massa untuk mencapai kebebasan. Ia juga bertanggung jawab mengorganisasikan propaganda melawan kebijakan pemerintah yang melarang "sekolah liar". Pengalamannya mengurusi buletin organisasi mendorongnya terlibat dalam buletin *Banteng* yang diterbitkan oleh Partindo cabang Batavia. Amir menyebarkan pendapat partai mengenai isu sekolah liar, feodalisme yang berkompromi dengan imperialisme, tekanan polisi pada pertemuan umum, dan rencana ekonomi Rusia yang patut dipertimbangkan.[18] Nada-nada dalam terbitan ini nasionalis radikal dan menolak kompromi dengan pemerintah.

Sikap nonkooperasinya ditunjukkan dengan kritik kerasnya terhadap pemimpin PNI baru, Moh. Hatta, yang diduga akan menerima tawaran kursi di Tweede Kamer dari Onafhandelijke Socialistische Partij (OPS). Bersama dengan Sukarno, Amir mencela Hatta karena telah meninggalkan prinsip nonkooperasi dan front persatuan *sini* dan *sana* yang telah dianutnya sejak masa PI.[19] Kemerdekaan Indonesia, menurut seruan para pemimpin Partindo, tidak dapat dicapai melalui partisipasi dalam dewan-dewan "mereka", tetapi melalui aksi massa oleh rakyat Indonesia itu sendiri.[20] Amir mengungkapkan kritikannya kepada Hatta dalam tulisannya bahwa: "Anda harus meninggalkan parlemen Belanda, bukan hanya karena perbudakan kita ditempa, tetapi demi menempa senjata spiritual anda sendiri, satu-satunya senjata yang dapat memutuskan rantai ketundukan kita".[21]

Dibandingkan dengan Sukarno, Hatta, dan Sjahrir, Amir lebih sedikit menulis di masa pergerakan. Panggung utamanya bukanlah dunia tulis menulis, tetapi podium pidato atau rapat umum. Amir merupakan pemimpin kharismatis yang kemampuan orasinya disebut-sebut mendekati reputasi Sukarno. Namun, terdapat perbedaan yang khas antara Amir dengan Sukarno. Menurut Surjono, yang berkerja dalam pers Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), bila kemampuan orasi Sukarno terletak pada irama bahasa dan dampak suaranya, gaya pidato Amir terletak pada kemampuannya memainkan citra-citra: Surabaya diganti kota kemelaratan atau kota Tanjung Perak.[22] Pidatonya tidak membakar massa seperti Sukarno, tetapi Amir berbicara apa adanya dengan lugas dan tajam. Terlepas dari itu, kemampuan orasi dan kharisma duet Sukarno dan Amir di Partindo efektif dalam menggalang massa, dibandingkan dengan kemampuan tulisan dan intelektualias duet Hatta dan Sjahrir di PNI baru yang mengandalkan kaderisasi pemimpin.

Di awal tahun 1930-an, nama Amir mulai dibicarakan dalam laporan-laporan pemerintah sebagai seorang orator berbakat yang akan membahayakan pemerintah kolonial. Laporan ini, menurut Klinken, merupakan "petunjuk terbaik yang kita miliki mengenai pengaruh politik yang dia timbulkan … pada perannya sebagai pemimpin kharismatik".[23] Dalam laporan Asisten Penasihat untuk Urusan Pribumi G. F. Pijper kepada Gubernur Jenderal De Jonge, disebutkan bahwa Amir Sjarifuddin adalah:

"Seorang orator berbakat. Dia mengekspresikan diri dengan jelas dan mengkaji tema-tema yang diuraikannya secara menyeluruh. Dengan temperamen revolusionernya, dia menguasai publik dan memukau audiensnya".[24]

kemampuan orasi dan tingkah laku Amir seringkali dibandingkan dengan kompatriotnya, Moh. Yamin, dalam laporan-laporan tersebut. Baik Yamin dan Amir dipandang sebagai seorang "ekstrimis". Meskipun demikian, potensi Amir diyakini lebih serius dibandingkan dengan Yamin. Dalam pandangan Gubernur Jawa Barat, misalnya, Yamin digambarkan sebagai "anak panggung yang hingar bingar dan demagog, ekstrimis di gedung kesenian, pribadi yang tak berwatak, tak berpengaruh … yang bisa ditinggal sendirian tanpa khawatir".[25] Sementara, Amir digambarkan "memiliki karakter dan berani menanggung konsekuensi karena mempertahankan posisinya … dia jujur dalam keyakinannya. Oleh karena itu, orang-orang terdorong untuk menghormatinya … selain itu, dia memang terlahir sebagai seorang pemimpin, seorang agitator yang berbahaya; pendeknya seorang tokoh papan atas yang tidak mudah ditundukkan".[26] Gubernur tersebut memberikan pendapat agar pemerintah pusat mewaspadainya: "Dalam pandangan saya, Amir Sjarifuddin, pada tahun yang akan datang akan muncul sebagai salah satu tokoh yang paling penting di antara tokoh utama dalam aksi-aksi ekstrimis". Bahkan gubernur tersebut merekomendasikan pemerintah kolonial untuk menahannya agar pengaruhnya yang besar di masyarakat bisa terputus.[27]

Reputasi Amir yang menanjak semakin membuatnya diawasi radar pemerintah kolonial. Pernah ketika ia tengah berpidato menyerang pemerintah kolonial yang mengakibatkan penderitaan rakyat karena pajak tanah dan pajak lainnya di masa depresi, pidatonya dihentikan oleh polisi dan Amir dipaksa turun dari podium oleh polisi.[28] Pidato-pidato yang berbau dan menggunakan kata-kata anti-pemerintah, anti-kolonial, anti-kapitalisme dengan jelas dianggap sebagai bibit-bibit subversif kepada pemerintah. Tidak hanya Amir, beberapa tokoh pergerakan yang berpidato menggunakan kata-kata tersebut dihentikan pidatonya oleh intelijen polisi kolonial. Puncaknya adalah pemerintah kolonial mulai menangkapi tokoh-tokoh Partindo yang dianggap membahayakan. Amir Sjarifuddin termasuk salah satu di antaranya.

DITAHAN TAPI TIDAK DIASINGKAN

Menurut Ingleson, pukulan pertama dari serangkaian pukulan terhadap para aktivis nonkooperator datang pada tanggal 27 Juni 1933 ketika pelarangan pegawai pemerintah untuk menjadi anggota PNI baru dan Partindo mulai diberlakukan pemerintah kolonial.[29] Setelah itu, penangkapan terhadap para tokoh-tokoh utama pergerakan dari Partindo, PNI baru, PSII, dan Partai Islam Sumatera, Permi, dilakukan atas perintah Gubernur De Jonge. Sukarno, Hatta, Sjahrir, ditangkap dengan dasar *exorbitante rechten* gubernur jenderal. Dalam gelombang penangkapan para pemimpin kebangsaan di tahun 1933-4 tersebut, Amir termasuk di dalamnya. Ia merupakan salah satu tokoh pemuda mahasiswa yang paling dikenali polisi dan juga merupakan seorang pembantu terdekat Sukarno.[30]

Amir didakwa bersalah karena pelanggaran undang-undang pers. Ia dituduh menerbitkan sebuah artikel provokatif di *Banteng* berjudul "Aksi Massa", yang sebenarnya Yamin merupakan penulisnya. Oditur Jenderal sebetulnya telah menyiapkan tuntutan pengasingan dalam negeri ketika ia diputuskan hukuman tahanan 18 bulan penjara. Meskipun demikian, Amir tidak pernah diasingkan di tempat yang jauh dari Jakarta, seperti Sukarno ke Endeh atau Hatta dan Sjahrir ke Boven Digul. Amir terselamatkan dari pengasingan di luar Jawa dan dipenjara di Sukamiskin. Selama 18 bulan di penjara dari Desember 1933 sampai Juni 1935, perilakunya yang "tanpa cacat" membuatnya tidak ditahan lebih lama. Sesudah Amir dibebaskan malahan terdengar kabar bahwa ia akan diasingkan jauh-jauh. Namun, Scheper, bekas guru Amir di Sekolah Hukum dan pejabat di departemen kehakiman, yang sering membawakan Bibel kepada Amir di penjara memohon pengampunan atasnya dengan menjamin bahwa Amir akan bertingkah laku baik. Sepupu Amir, Soetan Goenoeng Moelia juga memohon pengampunan saudaranya tersebut kepada gubernur jenderal. Pengaruh kedua tokoh Kristen ini akhirnya membuatnya tidak ditahan lagi.

MENCARI FORMAT BARU PERGERAKAN

Setelah bebas dari tahanan, Amir menghadapi kesulitan-kesulitan dalam menjalankan aktivitas politiknya seperti masa-masa sebelum dipenjara. Pemerintah kolonial semakin represif membatasi gerak-gerik perlawanan antikolonial. Partindo pun kini telah habis sisa-sisa kekuatannya akibat penangkapan besar-besaran terhadap pemimpinnya. Pemenjaraan Amir memang telah meningkatkan reputasinya sebagai pahlawan dalam pergerakan. Namun, tanpa panggung dan ruang yang cukup untuk beraktivitas politik

bagaimana Amir menyalurkan bakat-bakat potensialnya sebagai pemimpin kharismatik.

Sekeluarnya Amir dari penjara, ia berhasil menggondol gelar sarjana hukum. Kesulitan finansial kini mulai dihadapinya karena langkanya pekerjaan akibat sisa-sisa depresi ekonomi. Pada awalnya Amir diajak bergabung oleh Yamin di firma hukumnya yang beroperasi di Jakarta. Kantornya di Sawah Besar merupakan salah satu pusat diskusi politik yang penting. Para pemimpin PI yang baru datang dari Belanda, seperti Tanzil yang ikut membangun Indonesia Muda tahun 1930, pimpinan PPPI seperti Surjono, Wilopo, dan Djohan Sjahroezah, acap kali mampir mendiskusikan situasi politik di tanah air bersama Amir dan Yamin.[31] Mereka lebih lanjut membahas secara intens bagaimana format pergerakan nasionalis selanjutnya pasca melempemnya Partindo dan PNI baru.

Bulan November 1936, Partindo akhirnya dibubarkan oleh para pemimpinnya. Pembubaran ini merupakan pengakuan bahwa partai ini sudah tidak lagi memiliki energi politik untuk melawan tembok kolonial yang kian represif. Tapi yang paling penting adalah muncul semacam refleksi bahwa taktik nonkooperasi yang dikembangkan oleh Partindo dan organisasi sezamannya sudah tidak efektif lagi digunakan untuk melawan pemerintah kolonial. Strategi konfrontasi yang dipilih Partindo nyatanya telah mengubur kehidupan partai itu sendiri, sehingga sarana politik perlu dibangun kembali dan strategi baru pun perlu dirancang.[32] Selama musim pancaroba aktivisme politik nasional ini, muncul seruan-seruan untuk melahirkan "partai baru" atau "reorientasi" gerakan.

Setahun sebelum kematian Partindo, kelompok-kelompok yang bersedia ikut serta dalam lembaga-lembaga negara kolonial telah membangun satu partai baru bernama Parindra (Partai Indonesia Raya), di bawah kepemimpinan Dr. Soetomo. Melihat berkembangnya Parindra di sekitar tahun 1936 dan 1937 dan kegagalan metode politik Partindo menerbitkan semacam asa bahwa aksi-aksi politik pergerakan perlu mengurangi aksi massa dan *vergadering* besar ala Partindo.[33] Perdebatan dalam membicarakan format baru gerakan politik ini muncul di kalangan eks Partindo. Ada beberapa opsi: (1) kader-kader Partindo dapar menyebrang ke Parindra (2) kader-kader yang lebih muda menyarankan untuk melanjutkan aksi klandestin daripada legal dengan kelompok sisa-sisa PKI yang dilarang tahun 1927 (3) mengikuti cara kooperatif Parindra namun dengan penekanan orientasi dan visi baru. Dipilihlah cara yang ketiga oleh Amir Sjarifuddin dan eks-Partindo, serta para pemuda radikal lainnya. Di tahun 1937, mereka mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau disingkat Gerindo.

PEMBELAAN TERHADAP DEMOKRASI

Pada era transisi dari Gubernur Jenderal De Jonge yang represif kepada Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer di bulan Mei 1937, Gerindo didirikan oleh sejumlah aktivis eks-Partindo. Partai ini sering diidentikkan sebagai partainya Amir dan Yamin, meskipun hal ini dibantah oleh Asmara Hadi, murid tulen Sukarno. Tampak di permukaan memang Gerindo digerakkan oleh generasi baru, seperti A.K. Gani, Wikana, dan Asmara Hadi. Namun, di belakang layar ide dan visi dari partai ini sebetulnya digerakkan oleh Yamin dan Amir.[34] Gerindo merupakan tempat di mana seluruh kaum kiri dan beragam sayap dan jaringannya berkumpul. Partai ini membangun hubungan dengan beberapa serikat buruh dan kelompok mahasiswa.

Cara perjuangan yang ditempuh oleh Gerindo sama dengan metode kooperatif yang dilakukan oleh Parindra. Namun, terdapat beberapa perbedaan fundamental yang jelas antara kedua partai ini. Yang pertama, menurut Yamin, Parindra adalah partai yang diisi oleh kaum birokrat priyayi dan kelas menengah yang memiliki orientasi yang lebih elitis dari Gerindo. Sementara itu, Gerindo menurutnya adalah partai "kaum susah" yang melawan "kaum senang".[35] Meskipun demikian, perbedaan yang lebih fundamental adalah Gerindo memiliki tujuan berbeda dari Parindra, yang sebetulnya didasarkan oleh pemikiran Amir Sjarifuddin, yaitu demokratisasi dan anti-fasisme. Tujuan Gerindo adalah terbentuknya parlemen penuh bagi Indonesia, tetapi atas dasar kerja sama dengan Belanda, dalam melawan ancaman bersama, khususnya fasisme.[36] Dalam bayangan Gerindo saat ini "independensi" gerakan sudah tidak lagi relevan dikembangkan, namun "demokrasi" yang menjadi tujuan dari gerakan ini dan hal ini memungkinkan partisipasi dalam institusi koloni. Lebih lanjut, demokrasi dalam bayangan Amir bukan hanya berkaitan dengan cara-cara ataupun mekanisme yang ditempuh oleh Gerindo dalam mencapai misi-misi politiknya, tetapi terciptanya masyarakat ideal yang demokratis bagi Indonesia merdeka masa depan adalah tujuan dari Gerindo itu sendiri.

Mengapa Amir Sjarifuddin tiba-tiba beralih ke arah pemikiran demokrasi di pertengahan tahun 1930-an? Setidaknya ada dua faktor yang mendasari pemikirannya ini: (1) analisisnya atas perkembangan internasional dan sistem politik global mengerucut pada pertarungan antara demokrasi dan fasisme (2) problem politik kebangsaan dalam negeri yang belum selesai hingga masa itu: siapakah dan apa definisi dari "orang Indonesia" itu sendiri. Perhatian Amir terhadap demokrasi telah dimulainya sejak mendirikan majalah *Kebangoenan* di tahun 1936 bersama Yamin, Sanusi Pane, dan tokoh Tionghoa Liem Koen Hian. Dalam tulisan-tulisannya di majalah tersebut, Amir menyoroti dengan jeli bahwa Indonesia sedang menghadapi potensi ancaman baru dalam bentuk ekspansi fasisme Jepang di Asia. Dimulai dari penyerbuan ke China tahun 1931, Jepang terus bergerak ke arah selatan Asia. Bagi Amir, kekuatan imperium Jepang yang semakin membesar di Asia bukanlah bertujuan untuk membebaskan Asia, melainkan akan menjadi penyerang baru, penjajah baru, yang akan mendirikan suatu rezim teror di tanah yang dikuasainya.[37] Dengan nada sinis, *Kebangoenan* melihat bahwa "Asia untuk bangsa Asia" yang menjadi slogan propaganda Jepang berarti "Asia untuk bangsa Jepang" dan hal ini berarti "Asia di bawah rezim fasis".[38] Menurut Amir, tidak ada kemerdekaan melalui fasisme. Amir berbicara bahwa politik dunia hari ini bukan lagi diwarnai oleh pertarungan antara Timur dan Barat, melainkan "pertentangan antara demokrasi dan fasisme": demokrasi adalah kemerdekaan dan fasis adalah penindas.[39]

Parinda dan pemimpinya Soetomo memiliki cara pandang yang bertolak belakang melihat

ekspansionisme Jepang dibandingkan Gerindo-Amir Sjarifuddin. Setelah kembali dari perjalanan studinya ke Jepang, Soetomo menuliskan pengalamannya ke Jepang dengan antusias di dalam koran *Parindra*. Menurut Soetomo, konflik Jepang dan China merupakan konflik antar negara dan tidak memiliki relasi dengan Indonesia dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sistem politik Jepang.[40] Pandangan ini kemudian dikritik oleh Liem Koen Hian di dalam *Kebangoenan*. Soetomo kemudian menuduh bahwa pandangan Koen Hian lebih didasari sentimennya sebagai orang Tionghoa bukannya sebagai bangsa Indonesia.

Titik pijak Parinda mengenai "orang Indonesia", "bangsa Indonesia", ataupun kewarganegaraan Indonesia menjadi dorongan Amir mengenai pentingnya demokrasi dalam suatu negara yang merdeka. Dalam pendirian Parindra-Soetomo, orang Tionghoa, Arab, atau kelompok lain yang oleh Belanda digolongkan sebagai *vreemde oosterlingen* (bangsa Timur asing) tidak dapat dikatakan sebagai orang Indonesia. Kategori orang Indonesia sejati hanya dapat diberikan kepada orang-orang pribumi. Pandangan Parindra yang anti-Cina, baik secara internasional maupun nasional ini, ditentang oleh Gerindo dan Amir Sjarifuddin. Masalah rasisme, yang juga terdapat kuat dalam paham fasisme, telah mendorong diskusi yang mendalam pada kata "bangsa" dan perjuangan "nasional" secara lebih luas. Dalam pandangan Amir, sebagai sebuah partai "pioner", Gerindo harus mendefinisikan ulang istilah bangsa Indonesia secara lebih dinamis tidak kaku seperti definisi yang dikemukakan Parindra. Amir berpendapat bahwa pengertian "bangsa Indonesia" bukan ditentukan oleh darah, melainkan "cita-cita bersama dan keinginan bersama mengejar cita-cita itu".[41] Bangsa terdiri atas orang-orang yang berjuang dan berkorban mati-matian untuknya.[42] Itulah dasar mengapa Gerindo menerima keanggotaan secara terbuka bagi siapapun yang mau berjuang untuk demokrasi dan kedaulatan Indonesia. Gagasan ini yang menarik banyak kalangan nasionalis Tionghoa, di antaranya Liem Koen Hian, untuk bergabung ke Gerindo.

Sadar bahwa bahaya fasisme tidak bisa dihadapi sendirian, Gerindo mengajukan usul untuk membentuk suatu front bersama Indonesia-Belanda untuk menahan gempuran fasisme. Di Asia, fasisme Jepang telah meluas mengancam wilayah Indonesia sebagaimana ia mengancam China. Sementara itu, di Eropa, fasisme Jerman juga mengancam Belanda sebagaimana ia mengancam Austria. Secara geopolitik, baik Belanda dan Indonesia sama-sama menghadapi ancaman fasisme secara nyata. Oleh sebab itu, untuk menangkal potensi aneksasi Jepang, Amir tidak berkeberatan berjuang bersama orang-orang Belanda menghalau fasisme untuk demokrasi. Bersatunya kekuatan anti-fasis dalam sebuah front persatuan merupakan suatu cara yang dapat digunakan. Pembentukan ini, menurut Leclerc meniru "front rakyat" yang dibentuk oleh partai-partai kiri yang berkoalisi, seperti di Spanyol dan Perancis. Kata-kata front rakyat dalam bahasa Belanda "Volksfront" ini sering muncul dalam terbitan-terbitan publikasi oleh Gerindo.

Langkah pertama yang penting bagi Amir dalam mengampanyekan demokrasi adalah meminta Belanda mendemokratisasi lembaga-lembaga dan dibentuknya Dewan Perwakilan yang sesungguhnya.[43] Ketika Amir terpilih sebagai pucuk pimpinan Gerindo ia ikut mendukung kampanye "Indonesia Berparlemen" dengan mengikusertakan Gerindo dalam sebuah gerakan bernama Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia (GAPI). Dalam GAPI terdapat tiga tokoh pemimpin yang merepresentasikan tiga kelompok dari latar belakang yang berbeda: Thamrin (Parindra) mewakili kelompok kanan sekuler, Amir (Gerindo) mewakili kelompok kiri, dan Abikusno (PSII) mewakili kelompok Islam. Pers Indonesia menyebut trio pemimpin ini sebagai "para pemimpin gerakan nasional".[44]

REDUPNYA "TAHUN AMIR SJARIFUDDIN"

Dalam tulisannya di *Prisma*, Leclerc memberikan pendapat yang menarik bahwa tahun 1936-1940 merupakan "tahun-tahun Amir Sjarifuddin". Pendapat ini tidak berlebihan mengingat epos kepahlawanan Amir tidak menujukkan sisi surut pasca penahanannya. Ia bahkan mampu meraih gemerlap panggung politik ketika terjadi kekosongan kepemimpinan nasional setelah penangkapan besar-besaran pemimpin utama pergerakan di awal tahun 1930-an. Meskipun demikian, tahun 1940 cerita manis itu menunjukkan tanda-tanda berakhir. Amir menghadapi kesulitan karena kemesraan GAPI tidak berlangsung lama akibat konflik yang terjadi di dalamnya dan juga faktor eksternal invasi Jerman terhadap Belanda. Penyerangan Jerman ke Belanda berimbas secara langsung memperburuk situasi politik di Indonesia. Polisi intelijen mulai bereaksi terhadap protes-protes keras yang dianggap sebagai ancaman dari kalangan aktivis Indonesia. Meskipun menunjukkan sikap kooperatif, Gerindo tidak lepas dari mata-mata polisi Belanda. Di kalangan gerakan nasionalis, pandangan-pandangan Gerindo dianggap lebih populer dan mewakili suara umum daripada Parindra. Dalam sebuah laporan pemerintah kolonial disebutkan bahwa para pemimpin Gerindo dianggap berbahaya daripada Parindra, sebab Gerindo berusaha menjalin kontak dengan massa sementara Parindra merupakan partai kelas menengah dan moderat.[45]

Penangkapan mulai dilakukan oleh pemerintah Belanda terhadap tokoh-tokoh yang dicurigai komunis, simpatisan Jerman, ataupun pro-Jepang. Di bulan Juni, Amir dan Wikana ditangkap atas tuduhan komunisme. Dalam penggeledahan yang dilakukan oleh polisi didapatkan satu kopi surat kabar PKI bawah tanah, *Menara Merah*, yang ditemukan di rumah Amir.[46] Penemuan ini memperkuat desas-desus yang berkembang bahwa Amir telah membangun kontak dengan kalangan komunis bawah tanah sejak pertengahan tahun 1930-an di mana veteran komunis Muso sempat mampir membangun hubungan dengan sisa-sisa gerakan komunis di tanah air. Namun, polisi tidak memiliki cukup bukti untuk membuat tuntutan memenjarakan Amir dalam waktu yang lama.

Kesukaran yang dihadapi Amir tidak hanya melalui intimidasi eksternal dari pemerintah kolonial, melainkan juga dari ketegangan internal di dalam Gerindo. Tampaknya dalam tubuh partai muncul perpecahan antara pendukung aktivisme dan pendukung sikap hati-hati.[47] Amir yang digolongkan sebagai pembela aktivisme karena mendesak agar GAPI melakukan aksi

antifasis yang besar ternyata kurang mendapat sokongan. Dalam Gerindo sendiri pengaruhnya mulai luntur karena kepanikan yang melanda internal partai akibat ancaman penahanannya kembali memaksanya untuk menarik diri dari hingar bingar politik untuk sementara waktu. Meskipun di bulan Juni 1940 Amir masih ketua Gerindo, namun sebulan kemudian ia tidak lebih dari anggota biasa. Ini adalah pilihan yang sulit diambil olehnya daripada ia menghadapi kemungkinan untuk dibuang ke Digul seperti yang diancamkan padanya di awal tahun 1930-an tidak lama setelah ia bebas dari penjara.

Di bulan September 1940, ia meninggalkan profesinya sebagai pengacara dan malahan bekerja sebagai pegawai pemerintah. Menurut Abu Hanifah, Amir diberikan kesempatan oleh pemerintah kolonial, setelah Schepper menemuinya, untuk memilih apakah ia mau diasingkan ke Digul atau bekerja dalam pemerintahan.[48] Dalam spekulasinya, Hanifah berpendapat bahwa Amir akhirnya memilih taktik bekerjasama apalagi Perang Dunia II telah berkobar dan Jepang sedang bersiap-siap melebarkan sayapnya di Asia.[49] Tentu bagi Amir yang menolak keras fasisme dan diktatorialisme, pilihan untuk nonkooperasi hanya mengasingkan dirinya dari perjuangan melawan fasisme. Amir bekerja pada bagian ekspor departemen perekonomian yang dipimpin oleh H.J. van Mook. Terhadap keputusannya ini, Amir bersikukuh bahwa tidak ada asas Gerindo yang melarang anggotanya bekerja sebagai pegawai negeri. Pekerjaan ini menurutnya akan menambah pengetahuannya terhadap perekonomian kolonial dan hubungannya dengan dunia internasional.[50] Namun, sulit terbantahkan keputusannya ini tentu saja mengecewakan para pengagumnya. Sinar kharisma Amir untuk sementara waktu redup dalam panggung politik antikolonial.

DALAM LABIRIN BAWAH TANAH MELAWAN FASISME

PERMINTAAN BELANDA MENGGALANG KEKUATAN ANTIFASIS

Dalam bayang-bayang kekalahan, Belanda mengambil keputusan untuk mengumpulkan sisa-sisa perlawanan antifasis bawah tanah Indonesia untuk membantunya melawan fasisme Jepang. Misi itu pada awalnya diserahkan pemerintah Belanda kepada Gubernur Jawa Timur Charles van der Plas. Namun, karena jaringan van der Plas terhadap tokoh-tokoh nasionalis Indonesia sangat terbatas, maka ia meminta P.J.A. Idenburg, Direktur Jenderal Departemen Pendidikan, untuk mengusulkan nama yang cocok. Akhirnya, Idenburg menghubungi Amir Sjarifuddin dan menanyakan apakah ia bersedia untuk membangun organisasi bawah tanah apabila terjadi okupasi Jepang. Keputusan Idenburg untuk memilih Amir jelas didasari oleh kepopulerannya dibandingkan tokoh lain di kalangan para pemuda. Meskipun pemerintah kolonial tahu bahwa Amir memiliki koneksi dengan organisasi PKI ilegal.

Menurut Anderson, Amir menerima tawaran Belanda tersebut sebab sama halnya dengan para nasionalis Asia sayap kiri waktu itu, bekerja sama dengan negara kolonial demokratis-borjuis untuk melawan kebangkitan fasisme adalah pilihan yang rasional.[51] Belanda memberikan dana sebanyak 25.000 gulden kepada Amir sebagai bekal dalam membangun jaring-jaring bawah tanahnya. Soe Hok Gie berpendapat barangkali modal membangun gerakan bawah tanah Amir hanyalah dua: (1) mengandalkan hubungan yang luas dengan pemimpin-pemimpin rakyat Indonesia (2) mengandalkan pengikut-pengikut yang setia dari Gerindo.[52] Amir mempercayakan jaringan bawah tanahnya kepada para pengikut sayap kiri Gerindo dan kepada anggota PKI ilegal yang disusun kembali diam-diam oleh Muso dalam kunjungan singkatnya tahun 1935 di Indonesia. Kekuatan PKI ilegal itu kuat di Surabaya, barangkali karena itulah pusat gravitasi dari jaringan bawah tanah Amir berada di ibukota Jawa Timur itu.[53] Untuk memperkuat kekuatan jaringan klandestinnya, Amir mengontak pemimpin golongan muda yang tidak kalah populer darinya, Sjahrir. Ia menemui Sjahrir, mencoba meyakinkannya bahwa perlawanan kelompoknya akan efektif menggerogoti Jepang. Namun, Sjahrir tidak memberikan jawaban yang pasti karena ia telah memiliki rencananya sendiri. Selain kelompok Amir, menurut Kahin, kelompok Sjahrir memang adalah kelompok utama gerakan bawah tanah melawan Jepang yang memiliki pengikut di Jakarta, Cirebon, Garut, Semarang, dan Surabaya.[54]

Amir segera memulai propaganda-progandanya melawan Jepang. Impian membangun masyarakat demokratis di masa depan kini menghadapi ancaman besar dari Jepang. Setelah penyerangan Pearl Harbour diserang, Amir mendeklarasikan perang terhadap Jepang: pesannya adalah lawan![55] Amir kelihatannya tidak takut dengan ancaman Jepang. Saat tentara Jepang sudah mulai menduduki pulau-pulau terluar Indonesia, berbeda dengan kebanyakan tokoh Indonesia yang mencari aman, Amir masih mengkritik keras Jepang dalam edisi terakhir *Pelopor Gerindo* di tahun 1942. Amir menyatakan bahwa kedatangan Jepang tidak membawa semangat pembebasan, tetapi eksploitatif, dan menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk angkat tangan mempertahankan "negara kita" melawan musuh.[56]

DITANGKAP DAN DISIKSA JEPANG

Meskipun reputasi tinggi Amir dalam pergerakan bawah tanah dipercayai oleh Idenburg, tetapi kemampuan Amir ternyata belum dapat mengimbangi jaringan mata-mata Kempeitai yang luas.[57] Tak lama setelah Jepang mendudukui Indonesia, segera aparat kepolisian Belanda diambil alih oleh Jepang, termasuk PID. Jepang dengan cepat memetakan aliran dan jaringan politik yang ada di Indonesia dan responsnya terhadap Jepang. Mereka segera mengidentifikasi siapa saja tokoh-tokoh yang melawan fasisme Jepang dan siapa saja tokoh-tokoh yang berpotensi mengancam kedudukan mereka di Indonesia nantinya. Oleh sebab itu, orang-orang yang bersikap keras terhadap Jepang di masa kolonial, seperti Amir Sjarifuddin dan para anggota Gerindo, segera masuk dalam daftar mereka, termasuk Moh. Hatta dan kelompok komunis ilegal.

Jepang kemudian merusak sel-sel jaringan bawah tanah yang mengadakan hubungan dengan pemerintah Belanda. Penangkapan mulai dilakukan di akhir tahun 1942. Pada bulan Februari 1943, Amir bersama dengan 54 orang-orang yang dicurigai melakukan aktivitas subversif terhadap fasisme ditangkap oleh Jepang. Amir lalu dibawa ke Surabaya dan tinggal di sana

sampai vonis hukuman dijatuhkan kepadanya bulan Februari 1944. Amir beserta Pamudji, Sukajat, Abdulrachim, dan Abdulasis dijatuhi hukuman mati. Namun, ia diselamatkan oleh Sukarno dan Hatta yang meminta pengampunan kepada pemerintah Jepang dengan beralasan bahwa kematiannya akan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan rakyat Indonesia.[58] Atas desakan dan saran dari Sukarno dan Hatta maka hukuman Amir diubah menjadi hukuman seumur hidup.

Hatta sendiri mengetahui bahwa Amir memimpin gerakan bawah tanah. Sebab, Amir pernah menemui Hatta dan Sjahrir dan memintanya untuk mengungsi ke Australia apabila Belanda ditaklukkan oleh Jepang. Dalam pengasingan di luar negeri, diharapkan Hatta dan Sjahrir mengobarkan perlawanan melalui siaran radio. Namun, Hatta menolaknya ketika mengetahui bahwa Indonesia mesti bekerja sama mengorganisir perlawanan dengan Belanda dan biaya dari perjalanan itu sendiri akan dibiayai oleh pemerintah kolonial. Namun, Hatta menyetujui usulan Amir Sjarifuddin yang mengusulkan adanya himbauan kepada rakyat untuk tetap tenang.[59]

Dalam penjara Lowokwaru di daerah Malang Amir disiksa habis-habisan selama ditahan oleh tentara Jepang. Amir menceritakan bahwa ia disiksa agar mengaku sebagai seorang komunis. Kekristenannya dipertanyakan oleh interogator yang menyiksanya. Namun, Amir berusaha meyakinkan bahwa ia tetap adalah seorang Kristen. Tentara yang menyiksanya bilang bahwa apabila Kristus bersedia berkorban dengan digantung kepada salib dalam memperjuangkan keyakinannya apakah kamu bersedia melakukan hal yang sama (digantung) demi membela kepercayaan dan bangsamu.[60] Amir pun digantung dengan kepala di bawah berbeda dengan yang dialami oleh Kristus. "Sebab setiap murid harus bersedia berkorban lebih berat daripada sang guru", menurut penyiksanya.[61]

Wikana, salah seorang pengikut Gerindo, yang tahu bahwa Amir dipenjara di Malang kemudian memberitahu pemuda di sana untuk membebaskannya.[62] Para pemuda yang merupakan penggerak utama perlawanan terhadap Jepang lalu melakukan penyergapan ke penjara Lowokwaru. Amir Sjarifuddin yang diselamatkan oleh para pemuda dibawa ke markas pemuda di dekat penjara Lowokwaru. Di markas pemuda Lowokwaru, banyak pemuda dan rakyat yang ingin melihat dan berkenalan dengan Bung Amir. Amir di depan mereka sering berseru: "Hidup rakyat Indonesia", "hidup revolusi Indonesia", "hidup pemuda harapan bangsa", "merdeka atau mati".[63]

WAKIL KAUM MUDA DALAM REPUBLIK

REPUBLIK BUKAN BONEKA JEPANG: REPRESENTASI AMIR

Segalanya bergerak cepat di tahun 1945. Kekalahan Jepang dari Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, segera diikuti dengan langkah cepat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tiga hari setelahnya. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil konsensus dari golongan tua dan golongan muda mengenai langkah yang perlu diambil Indonesia dalam situasi internasional dan nasional yang pelik. Golongan tua, seperti Sukarno dan Hatta, akhirnya mengikuti desakan kaum muda agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah mengetahui bahwa Jepang diserahi mandat oleh Sekutu untuk menjaga *status quo* dan hal itu berarti Jepang menolak upaya kemerdekaan apapun dari Indonesia. Sekutu sendiri yang ternyata diboncengi oleh Belanda di dalamnya menolak kenyataan adanya Indonesia yang merdeka. Bagi pihak Belanda, Indonesia belum merdeka karena sebelum kedatangan Jepang mereka adalah penguasa dari wilayah ini. Pihak Belanda malahan mendelegitmasi pemerintahan Sukarno dan Hatta sebagai tidak lebih dari "pemerintahan boneka Jepang".

Sementara itu, tuduhan yang sama dilekatkan oleh para pemuda yang radikal terhadap Sukarno-Hatta yang kompromis terhadap Jepang. Meskipun mereka telah menyetujui usulan pemuda mengenai urgensi kemerdekaan segera dari Jepang, masih ada keraguan dalam benak pemuda terhadap ketidakrevolusioneran pemerintah. Untuk membantah narasi-narasi negatif yang dituduhkan dari pihak Belanda dan pemuda, adalah penting bagi Sukarno dan Hatta untuk memberi ruang representasi elemen anti-Jepang di dalam pemerintahannya. Oleh sebab itu, meskipun mayoritas anggota kabinet pertama Republik Indonesia merupakan mantan *bucho* (kepala departemen) ataupun *sanyo* (penasihat) di masa Jepang, Sukarno-Hatta menunjuk Amir Sjarifuddin sebagai menteri penerangan pertama. Dalam membentuk kabinet, Sukarno dengan sengaja mengangkat seorang pahlawan perjuangan melawan Jepang.[64] Posisi Amir dalam kabinet menjadi jaminan bahwa pemerintahan Indonesia yang baru itu bukan bikinan Jepang.[65] Di sisi lain, penujukkan Amir diharapkan dapat menyebarkan citra bahwa Sukarno dan Hatta merupakan pelindung gerakan bawah tanah.[66] Citra tersebut penting ditampilkan dalam situasi militansi pemuda yang tidak puas terhadap pemerintah.

Walaupun Amir sudah diangkat menjadi menteri pada awal September, ia baru dibebaskan dari penjara 1 Oktober, enam minggu setelah proklamasi kemerdekaan. Pemenjaraan tersebut dan terutama penyiksaannya yang parah kembali lagi menaikkan pamor Amir di kalangan pemuda. Ketika mulai berkiprah di pemerintahan ini, menurut Klinken, Amir kini "memasuki fase baru yang paling publik dan paling dramatis dalam hidupnya".[67] Saat tiba di Jakarta, Amir segera menyelengarakan konferensi pers dengan para wartawan asing untuk menampilkan citra bahwa Republik yang baru ini bukanlah bentukan Jepang. Ia mengatakan:

> *"Saya adalah seorang demokrat sampai ke tulang sumsum saya. Perjuangan kemerdekaan di zaman pemerintahan Jepang saya lanjutkan dengan ratusan kawan saya dengan cara underground. Pada tanggal 30 Januari 1943 saya dan 54 kawan seperjuangan ditangkap. Tiga orang di antaranya sudah ditembak mati … Semua itu menunjukkan bahwa cerita-cerita orang di luar bahwa pemerintah RI adalah boneka Jepang, tidak benar sama sekali".*[68]

Masuknya Amir dalam pemerintahan dibutuhkan tidak hanya untuk membangun citra anti-Jepang. Sukarno telah lama mengenalnya berpengalaman dalam bidang publikasi, pers,

dan propaganda sejak bersama-sama mengurus Partindo. Sebagai Menteri Penerangan Indonesia Amir Sjarifuddin ditugaskan oleh Sukarno untuk berhubungan dengan media massa. Menurut Leclerc, Amir diserahi peran dalam mengorganisasi pertahanan Republik di bidang kata-kata dan pemikiran.[69] Sementara itu, menurut Klinken, Sukarno memberikan posisi menteri penerangan kepada Amir kemungkinan karena bakat orasi dan komitmen ideologisnya.[70] Tugas ini sangat berat sebetulnya sebab Indonesia menghadapi gempuran tuduhan-tuduhan negatif dari pihak Belanda. Posisi kementerian informasi krusial pula dalam membangun semangat rakyat menghadapi Belanda dan juga menyuplai informasi mengenai keberlangsungan pemerintah Indonesia.

DWITUNGGAL BARU: SJAHRIR-AMIR

Meskipun nama Sukarno-Hatta secara aklamasi diakui sebagai dwitungal pemimpin Indonesia, tidak lama kepemimpinannya semakin turun pamor akibat tekanan kelompok pemuda dan politisi yang lebih revolusioner dan juga pihak Sekutu dan Belanda. Kelompok pemuda yang militan merasakan bahwa pemerintah tidak antusias mendukung semangat militansi mereka di ibukota dan di daerah-daerah.[71] Bahkan, dirasakan bahwa pemerintah menghadapi Sekutu dengan bergerak lamban dan cenderung berhati-hati. Sebaliknya, pemerintah Sekutu dan Belanda tidak mau mengadakan perundingan diplomatik dengan Indonesia karena menganggap pucuk pemerintahannya sebagai penjahat perang atau kolaborator fasisme. Alternatif tokoh yang lebih bisa diterima karena lebih progresif, berusia muda, memiliki citra sebagai pahlawan anti-fasis, tapi juga diakui memiliki kemampuan kemudian diberikan kepada dua nama yang pamornya semakin naik di Republik yang baru: Sjahrir dan Amir Sjarifuddin.

Amir Sjarifuddin dan Sjahrir dengan cepat menggantikan dwitunggal proklamator memegang kendali urusan-urusan eksekutif Republik. Naiknya mereka di atas kursi kepemimpinan pada mulanya berpijak pada upaya mereka mendorong demokratisasi dalam sebuah negara yang baru merdeka ini. Sejak masa kolonial, baik Sjahrir dan Amir Sjarifuddin telah memiliki perhatian besar pada gagasan demokrasi yang perlu diterapkan dalam sebuah negara yang memang memiliki cita-cita mengutamakan kedaulatan rakyat. Citra demokrasi pun memang diperlukan untuk menarik minat Sekutu dan Belanda memulai perundingan dan membantah asumsi bahwa Indonesia adalah proyek buatan fasisme Jepang. Usulan dari Sjahrir dan Amir terhadap proyeksi tersebut dimulai dari perlunya mengubah tugas KNIP dari lembaga pembantu presiden menjadi badan legislatif sementara sampai proses pemilihan umum berlangsung. Keputusan ini kemudian disetujui dan dikukuhkan oleh sebuah keputusan yang dikenal sebagai Maklumat X oleh wakil presiden Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945.

Untuk mempercepat kinerja dari KNIP maka dibentuklah sebuah Badan Pekerja (BP) yang dipimpin oleh Sjahrir sebagai ketua dan Amir sebagai wakil ketua. Posisi Sjahrir dan Amir semakin kuat di dalam institusi tersebut berkat dukungan yang semakin luas dari koalisi sayap kiri yang makin membesar. Menyadari bahwa keduanya menguasai dukungan sekaligus memiliki kesempatan untuk lebih aktif terlibat dalam kekuasaan, Sjahrir dan Amir mendorong perombakan terhadap sistem presidensial menuju sebuah sistem parlementer yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sukarno tidak dapat berbuat banyak untuk menentang usulan yang dikemukakan oleh Sjahrir. Jatuhnya kabinet Sukarno merupakan sebuah fenomena yang sedang berlangsung umum di seluruh Jawa di mana struktur kepemimpinan masa lampau dari zaman Belanda dan zaman Jepang sedang disingkirkan.[72] Bila orang melihat ini sebagai upaya dorongan demokratisasi, tetapi menurut Anderson hal ini "lebih banyak berkaitan dengan suatu revolusi pemuda ketimbang demokratisasi".

Pamor Amir dan Sjahrir semasa perang dan kekuatan bahasa radikal dan sosialis mereka membuat para pemuda ibukota dapat menerima suatu kepemimpinan intelektual mereka untuk sementara karena paling tidak para pemuda lebih mudah mengasosiasikan kemiripannya dengan kedua tokoh tersebut.[73] Para politisi senior pun tidak resisten dengan naiknya nama Sjahrir dan Amir karena keduanya memiliki riwayat panjang perlawanan terhadap Belanda dan Jepang, apalagi mereka berdua pernah mengalami penderitaan dalam bentuk pengasingan dan penyiksaan. Kapasitasnya dalam berpolitik pun tidak diragukan lagi oleh para tokoh-tokoh tua dan dianggap siap dalam menghadapi Belanda yang juga menganggap mereka bukan antek-antek Jepang. Akhirnya, di pertengahan November Sjahrir diangkat sebagai perdana menteri sekaligus merangkap menteri luar dan dalam negeri. Sementara itu, Amir memegang suatu jabatan prestise yang dianggap memiliki kewenangan terkuat di bawah perdana menteri, yakni menteri pertahanan. Dalam kabinet Sjahrir yang baru tersebut, sesungguhnya hanya ada dua nama yang memainkan peran sebagai dalang, yaitu Sjahrir sendiri dan Amir Sjarifuddin.[74]

Kolaborasi antara Amir dan Sjahrir berlanjut dalam pembentukan suatu partai politik progresif. Pada 1 November Amir mendirikan sebuah partai baru yang bernama Partai Sosialis Indonesia (Parsi). Dari penggunaan nama sosialis terdapat cita-cita masyarakat yang diharapkan oleh partai ini dalam sebuah Republik baru. Partai ini "memperjuangkan keadilan sosial dan persamaan hak dan kewajiban, melawan pemikiran suatu masyarakat yang statis dan hierarkis".[75] Parsi tidaklah merupakan transformasi dari Gerindo, konsepsi partai rakyat Gerindo yang terbuka bagi golongan kiri, anti-fasis, dan menentang kekuasaan individu tetap dipertahankan.[76] Pada tanggal 12 November partai ini mengadakan kongres pendahuluan di Yogyakarta yang diwakili oleh wakil dari 51 daerah, 34 badan, dan juga 750 peninjau.[77] Kongres memutuskan untuk mendesak pembentukan *volksfront* (front rakyat) yang bertujuan memperkuat dan mempertahankan Republik. Front rakyat ini harus menjadi tempat yang dapat mempersatukan kaum buruh, petani, tentara, dan pemuda sebagai tulang punggungnya. Kongres menyepakati Amir Sjarifuddin sebagai ketua Parsi. Di kongres ini pula terbentulah Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) atas inisiatif dari Wikana.

Tidak lama setelah pembentukan Parsi, seolah menerapkan apa yang disampaikannya dalam *Perdjoeangan Kita* dalam mendorong pembentukan partai revolusioner, Sjahrir juga membentuk sebuah partai sosialis bernama Partai

Rakyat Sosialis (Paras) yang dibentuk di Cirebon pada 19 November. Sama seperti Parsi yang masih terpengaruh Gerindo, Paras masih melanjutkan warisan dari PNI-baru yang dipimpin oleh Hatta dan Sjahrir. Tujuan dari Paras tidak jauh sekali berbeda dengan apa yang diimpikan oleh Parsi-Amir Sjarifuddin: menyerang kapitalis, ningrat, dan feodal; melenyapkan birokrasi dan otokrasi; memperjuangkan suatu masyarakat yang adil; memperkaya jiwa orang Indonesia dengan pandangan demokrasi; dan mendesak pemerintah supaya bekerja sama dengan semua organisasi di dalam dan luar negeri untuk melenyapkan kapitalisme.[78]

Kedua partai ini berupaya menarik kader-kader di kalangan pemuda revolusioner.[79] Namun, di saat yang sama karena kekuasaan atas kabinet dipegang oleh Sjahrir dan Amir maka apabila kedua partai ini berjalan sendiri-sendiri tampak tidak masuk akal.[80] Di antara Sjahrir dan Amir waktu itu belum ada perbedaan-perbedaan yang prinsipil, sehingga mereka memutuskan kedua partai untuk digabung. Usulan ini disetujui sebab waktu itu Sjahrir juga telah sibuk sebagai perdana menteri dan hampir tidak ada waktu untuk mengurus organisasi. Dalam suatu "kongres fusi" yang diselenggarakan di Cirebon pada tanggal 16 dan 17 Desember kemudian disepakati bahwa kedua partai bergabung menjadi satu partai bernama Partai Sosialis (PS). Dalam kongres tersebut juga disepakati suatu komposisi organisasi yang tersusun atas:

Dewan Pimpinan Pusat: Amir Sjarifuddin, Hindromartono, dr. Soedarsono, Oei Gie Hwat, dan Supeno

Badan Politik: Abdulmadjid, M. Tamzil, Moewaladi, Subadio Sastrosatomo, Soegondo Djojopoespito, Soemitro Reksodiputro

Sekretariat: Abdulmadjid, Goenara, Soetrisno, Usman Sastroamidjojo, Sitorus, Wijono, Sumartojo.

Badan Penerangan: Djohan Sjahroezah, Soebagio, Wangsawidjaja, Soewondo, Soedjono, Tan Ling Djie, Soenarno Siswohardjo

Badan Pendidikan: Soekindar, Soekemi, Soekadi, Koesnaeni, Soegra, Djawoto

Badan Keuangan: Moenodo, Soekanda, dan Djunaedi

Badan Komunikasi: Soebianto Koesoemo, Pramono, A. Fatah, Noeroelah, Tauchid, Soehadi, Roeslan, Sardjono, Soedjoed.

Di dalam PS terdapat lima kelompok yang berfusi menjadi satu. Grup Surabaya yang terdiri dari kelompok PKI ilegal dan para pengikut Amir; Kelompok Yogya yang terdiri dari Wijono dan Tauchid yang terlibat dalam pendirian Parsi; Kelompok Cirebon yang akar-akarnya dari PNI-baru dan gerakan bawah tanah Sjahrir; Kelompok Jakarta yang terdiri dari para pemuda dari asrama-asrama progresif; dan terakhir sekelompok kecil orang yang baru pulang dari Belanda yang sebagian besarnya terlibat dalam gerakan anti-NAZI.[81] Meskipun demikian, sebetulnya mayoritas dari mereka terbagi antara dua kelompok besar yaitu kelompok Sjahrir dan Amir.

Benedict Anderson memberikan penilaian yang menarik terhadap kelompok Amir dan karakteristiknya. Golongan Amir terbentuk oleh gerakan bahwa tanah Surabaya yang begitu menderita di zaman Jepang. Asal usul dari pembentukan jaringannya berasal dari jalan politik Amir sendiri yang bergabung dalam keluarga partai-partai berorientasi massa pada masa kolonial: PKI 1920-an, PNI, Partindo, dan Gerindo. Anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang yang lebih sederhana dan kurang berpendidikan Barat dibandingkan para pengikut Sjahrir. Paham Marxismenya diwarnai dengan romantisme penuh harapan dan bersifat kerakyatan, tapi kurang akademis dan teoritis. Sementara itu, radikalismenya tumbuh dari pengalaman daripada pelajaran. Rasa keterikatan kelompok itu lebih berasal dari kepribadian pemimpinnya daripada pengalaman dan pandangan bersama. Amir adalah orang yang sukar dibenci bahkan oleh musuh-musuh politiknya sekalipun. Ia terlibat dalam gerakan meruntuhkan legitimasi kabinet Sukarno, tetapi tetap banyak berhubungan dan bersahabat dengan anggota kabinet itu dan tidak pernah membangkitkan kebencian di tengah-tengah mereka seperti yang dilakukan Sjahrir. Amir adalah pribadi yang kompleks: sangat cerdas, rajin, ambisius, ramah, emosional, tapi pernuh humor juga. Bakat sebagai orator, nomor dua setelah Sukarno kata sebagian orang, mampu memperluas pengaruhnya di luar kelompoknya sendiri. Ia mampu berkomunikasi dengan baik dan memikat jauh lebih baik dari pemuda Jawa, meskipun ia seorang Batak dan beragama Kristen Protestan. Penyiksaan yang dialaminya semasa okupasi Jepang memberikan basis kepercayaan diri baginya untuk menjalankan kepemimpinan atas unsur-unsur sayap kiri radikal yang sempat bertahan dan selamat pada masa pendudukan Jepang.[82]

Meskipun pertentangan internal yang sulit tidak meletup dalam tubuh PS ketika duet Sjahrir-Amir berjibaku menjalankan kabinet, tetapi sejak awal kelompok Amir dan Sjahrir memiliki rencana-rencana sendiri untuk mencapai tujuan masing-masing. Persatuan mereka hanya diikat oleh sikap antifasis, demokratis, dan kepentingan bersama menghadapi kelompok Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan.[83] Selain itu, secara karakter kedua kelompok memiliki perbedaan yang menonjol. Bila kalangan Sjahrir merasa bahwa para pengikut Amir bersifat ndeso, romantik, dan secara intelektual tak teroganisir, maka kelompok Amir menganggap bahwa pendukung Sjahrir sombong secara intelektual dan menghindari kesulitan dan resiko kerja politik praktis di tengah massa.[84] Perbedaan-perbedaan di antara kedua kelompok ini nantinya menjadi soal ketika kabinet Sjahrir ditimpa kesulitan akibat Perundingan Linggarjati yang merugikan pihak Indonesia. Situasi Indonesia yang semakin kacau dan perbedaan masing-masing kelompok untuk menanggulangi keadaan menjadikan perbedaan di antara keduanya semakin tampak nyata.[85]

PERDANA MENTERI DAN ANCAMAN MILITER BELANDA

REVOLUSI ATAU DIPLOMASI

Situasi sulit yang dihadapi Republik atas hasil keputusan Linggarjati disadari oleh Sjahrir dapat melemahkan posisinya. Dikarenakan Linggarjati, Indonesia mesti merubah posisi diplomatik awal yang mengakui seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sebagai milik Indonesia menjadi hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, yang menjadi soal adalah timbulnya

perbedaan penafsiran dari pihak Belanda dan Indonesia mengenai kesepakatan yang mereka tanda tangani dalam Linggarjati. Belanda tetap pada tafsirannya pada pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 bahwa Indonesia akan dijadikan anggota persemakmuran dan akan berbentuk federasi, sementara hubungan luar negerinya diurus Belanda. Belanda juga menuntut untuk diadakan *gendarmerie* bersama. Di tanggal 27 Mei 1947, wakil Belanda menyerahkan nota ultimatum yang berisi poin-poin: kedaulatan *de jure* Belanda sampai 1 Januari 1949, membentuk pemerintahan bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama, selama peralihan Indonesia diperintah pemerintah sementara dan wakil mahkota Belanda memiliki keputusan akhir dalam memutuskan persoalan, menyelenggarakan bersama soal ekspor-impor dan hubungan luar negeri, menyelenggarakan keamanan bersama, dan Republik harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah yang diduduki Belanda.[86]

Dalam nota ultimatum tersebut disebutkan bahwa Republik akan kehilangan kedaulatannya karena keputusan akhir berada di tangan wakil mahkota Belanda. Van Mook menegaskan pula bahwa konsekuensi tidak menerima ultimatum ini adalah perang.[87] Terjepit oleh situasi yang pelik, Sjahrir akhirnya menerima prinsip pemerintahan darurat pada 8 Juni 1947 dan tanggal 20 Juni 1947 mengakui wakil mahkota Belanda secara *de jure*. Hanya usulan untuk membentuk pasukan bersama ditolak. Konsesi yang dikeluarkan Sjahrir ini sebelum diusulkannya telah didiskusikan terlebih dahulu dengan anggota kabinetnya dan disetujui mereka, antara lain A.K. Gani (PNI), Natsir (Masyumi), dan Abdulmadjid (PS). Amir juga menyetujui kesepakatan yang telah dibuat Sjahrir tersebut.

Untuk menjelaskan keputusan yang telah dibuat Sjahrir tersebut, Abdulmadjid dikirimkan ke Yogyakarta untuk menjelaskannya di dalam rapat kabinet. Namun, di Yogyakarta Abdulmadjid malahan menyerang habis-habisan kesepakatan ini di depan kabinet, bukan mendukungnya seperti semula. Keputusan Sjahrir ini ditentang juga oleh sejumlah tokoh sayap kiri, seperti Tan Ling Djie dan Wikana. Menyadari bahwa beberapa tokoh sayap kiri menolak konsesi Sjahrir, Amir yang tiba belakangan di Yogyakarta lalu ikut-ikutan menyerangnya. Dalam usaha mengkonsolidasikan dukungan terhadapnya, Sjahrir datang ke Yogyakarta pada tanggal 26 Juni untuk menjelaskan segala situasi dan permasalahannya. Namun, Sjahrir diserang habis-habisan oleh Tan Ling Djie, Abdulmadjid, dan Amir. Dukungan terhadap Sjahrir kini hanya tersisa dari partai Masyumi dan semua partai besar telah menarik dukungan kepadanya. Akhirnya Sjahrir yang merasa tidak dipercaya lagi menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Inilah awal dari perpecahan yang terjadi di dalam internal kubu PS.

Ironisnya adalah setelah Sjahrir menyerahkan pengunduran dirinya, koalisi sayap kiri sadar bahwa mereka telah keliru dan meminta Sjahrir kembali meminta memimpin kabinet.[88] Sukarno juga mendesak Sjahrir untuk kembali memegang jabatannya. Tapi, Sjahrir yang telah merasa ditikam oleh teman-teman dari partainya sendiri menolaknya. Selain, ia juga merasa yakin bahwa sikap Belanda yang keras kepala terhadap ultimatum menyebabkan perundingan lebih

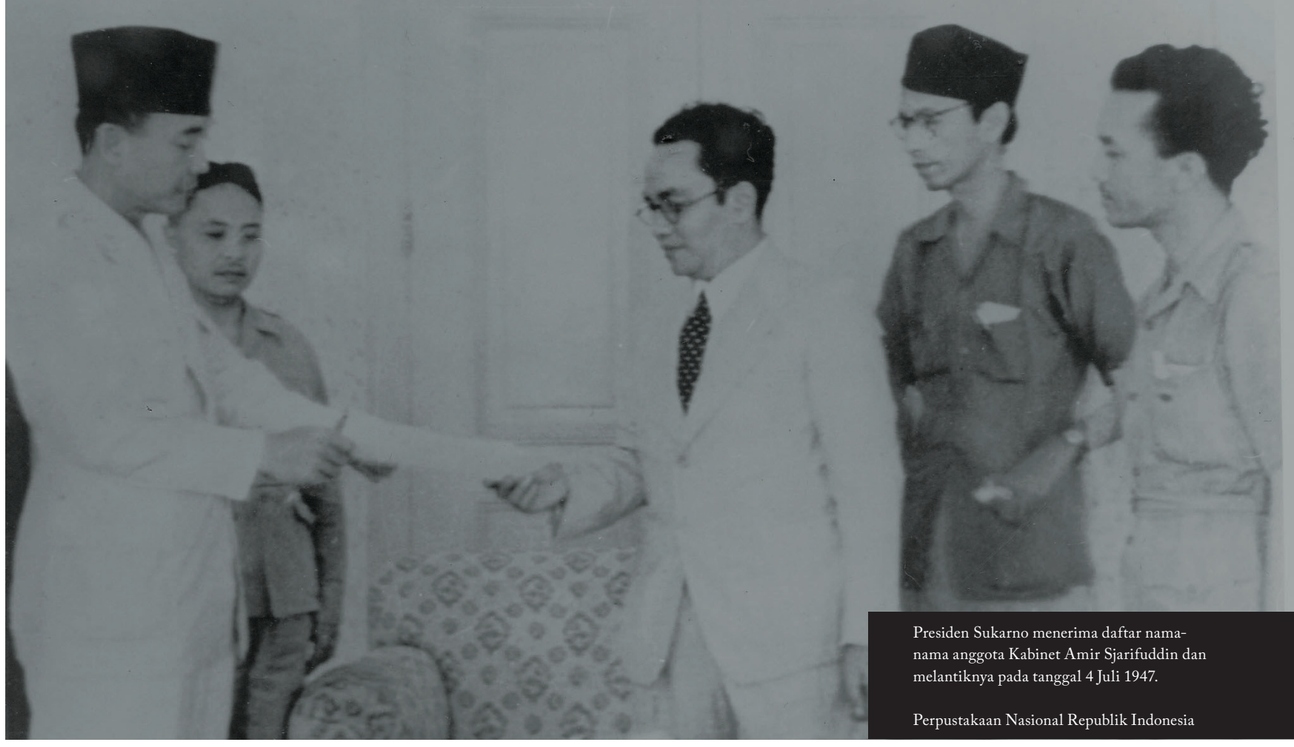

Presiden Sukarno menerima daftar nama-nama anggota Kabinet Amir Sjarifuddin dan melantiknya pada tanggal 4 Juli 1947.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

lanjut mustahil dilakukan.[89] Pada tanggal 30 Juni akhirnya Sukarno meminta kepada pemimpin empat partai terbesar untuk menyusun kabinet koalisi: Gani (PNI), Sukiman (Masyumi), Amir Sjarifuddin (PS), dan Setiadjid (Partai Buruh). Namun, kesepakatan di antara mereka gagal tercapai karena Masyumi menuntut kursi perdana menteri, menteri pertahanan, menteri luar negeri dan dalam negeri.[90] Akhirnya, Sukarno menunjuk kembali Amir, Gani, dan Setiadjid untuk membentuk kabinet nasional yang harus selesai sebelum tanggal 3 Juli. Amir akhirnya berhasil membentuk formatur kabinetnya, kali ini dengan bantuan dari PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), partai kecil yang baru muncul pecahan dari Masyumi.

Kabinet yang dibentuk oleh Amir Sjarifuddin ini disebut oleh Gie sebagai "kabinet kiri jauh" karena anggota kabinetnya rata-rata berasal dari partai-partai kiri yang radikal. Setiadjid yang merupakan kader komunis di negeri Belanda dan pimpinan Partai Buruh menjadi wakil perdana menteri menemani Gani dari PNI. Pengikut Amir dari Partai Sosialis juga diberikan kursi menteri, di antaranya Abdulmadjid (Menteri Muda Dalam Negeri), Tamzil (Menteri Muda Luar Negeri), Tjokronegoro (Menteri Muda Perekonomian), dan Ong Eng Die (Menteri Muda Keuangan). Dari Partai Buruh, Dr. Satrio diberikan kursi Menteri Muda Kesehatan, eks Digulis Suprodjo diberikan kursi Menteri Sosial, S.K. Trimutri sebagai Menteri Perburuhan. Sisanya tiga orang dari berbagai perwakilan sayap kiri menerima satu kursi Menteri Negara, Wikana (Badan Kongres Pemuda), Maruto Darusman (PKI), Sujas (BTI). Kursi Menteri Pertahanan tetap dipegang oleh Amir dan Soeripno dijadikan duta keliling Indonesia di luar negeri.[91] Naiknya koalisi kiri jauh dalam kabinet Amir mendapatkan respons yang antusias dari

Presiden Sukarno melantik anggota Kabinet Amir Sjarifuddin.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pertemuan antara Kabinet Amir Sjarifuddin dengan para pemimpin partai.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Presiden Sukarno bersama anggota Kabinet Amir Sjarifuddin.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Presiden Sukarno berbicara dalam pertemuan Kabinet Amir Sjarifuddin dengan para pemimpin partai.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

media massa progresif yang menggambarkan ke "revolusioneran" pemerintah sekarang. *Penghela Rakyat* memuji orang-orang yang ditunjuk Amir dalam kabinet, sementara itu *Boeroeh* menyerukan kelas pekerja untuk mendukung kabinet Amir dan bahkan biografi Amir muncul di koran tersebut.[92] Di luar kelompok sayap kiri, dalam kabinet ini PSII diberikan lima menteri, namun Kartosuwiryo dan Surowijono menolak ditunjuk menjadi Menteri Muda Pertahanan II dan Menteri Muda Pengajaran. Masyumi pada awalnya tidak terlibat karena meminta pos-pos menteri yang paling penting. Namun, setelah diadakan *reshuffle* kabinet pada 11 November, Amir meminta Masyumi untuk masuk ke dalam kabinet demi memperkuat kedudukan kabinetnya dalam menghadapi Belanda.[93]

Tidak lama setelah dilantik, kabinet Amir segera menghadapi kesulitan karena serangan militer yang dilancarkan oleh Belanda di berbagai daerah. Belanda terus menuntut kekuasaan bersama dan pembentukan pasukan bersama yang beroperasi di wilayah Republik. Amir dan pemimpin Republik tetap menolak dan tidak mau menyerah menghadapi paksaan tersebut. Penolakan-penolakan atau tidak adanya itikad untuk menyanggupi permintaan Belanda, membuat Perdana Menteri Belanda Louis Beel mempertimbangkan untuk menambah eskalasi serangan kepada Republik. Amir yang gelisah dengan pertempuran yang berlangsung meminta bantuan Amerika Serikat (AS) sebagai kekuatan adidaya untuk mendesak Belanda mengadakan perdamaian.[94]

Tawaran-tawaran yang diajukan Republik dalam perundingan menemui jalan buntu. Pada tanggal 20 Juli 1947, pihak Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama untuk menghancurkan Republik. Pasukan bersenjata Belanda dengan pasukan angkatan udara mereka yang kuat menyebar ke daratan dan pangkalan laut di Jawa dan Sumatera.[95] Pasukan militer Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur.[96] Semarang kemudian ditaklukkan oleh pasukan yang lebih kecil. Pelabuhan-pelabuhan strategis di utara melalui serangan militer ini telah dikuasai oleh Belanda. Bahkan, para pejabat Belanda termasuk van Mook, merencanakan untuk melanjutkan gempuran sampai ke Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak. Namun, pihak Inggris dan AS yang tidak menyukai aksi militer yang dilakukan Belanda tersebut, memaksa Belanda untuk menghentikan serangan total seperti itu.

PBB akhirnya mengintervensi konflik antara Indonesia dan Belanda. Lembaga ini menjadi forum umum untuk membahas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Belanda. Protes beberapa negara, di antaranya India dan Australia, terhadap Agresi Militer pertama menyulitkan posisi diplomatik Belanda. Akhirnya, PBB menghimbau Belanda dan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata, dan keduanya akhirnya sepakat untuk mengumumkan gencatan senjata pada 4 Agustus 1947. Pada tanggal 14 Agustus 1947, utusan khusus Indonesia, Sjahrir, berbicara di sidang Dewan Keamanan PBB mempermasalahkan serangan militer Belanda ke Indonesia dan juga meminta dibentuk sebuah arbitrase yang tidak memihak. Di bulan Oktober, PBB membentuk

Amir Sjarifuddin menjelang perjanjian Indonesia dan Belanda.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

sebuah lembaga bernama Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan AS, Belgia, dan Australia. Tugas KTN adalah membantu perundingan-perundingan antara Belanda dan Indonesia dalam menyelesaikan konflik.[97]

Amir Sjarifuddin tetap bersikukuh melanjutkan jalan diplomasi meskipun kabinet dan pendukungnya diisi oleh kalangan kiri radikal. Mereka memilih tetap melanjutkan jalur perundingan yang telah digagas Sjahrir–dan dikritiknya habis-habisan–daripada menempuh jalur revolusi habis-habisan. Pimpinan sayap kiri melakukan evaluasi bahwa jalan perundingan adalah yang terbaik dan pada tanggal 7 November 1947, kabinet Amir membuka perundingan resmi di atas kapal USS Renville milik Amerika. Pihak Indonesia menuntut agar Belanda menarik pasukan militernya dari posisi semula sebelum mereka menyerbu. Sebaliknya, Belanda memaksa agar garis "van Mook" diakui oleh Republik secara sah.[98] Perdebatan lainnya adalah mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat di mana Republik menjadi salah satu negara bagian yang kedudukannya sederajat dengan negara bagian yang lain (Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dll).[99] Hal ini tentu kemunduran bagi Republik, padahal dalam Linggarjati telah disepakati bahwa Republik dan Belanda bersama-sama membentuk RIS.

Atas tuntutan Belanda itu, Perdana Menteri Amir berada dalam situasi yang sulit. Apalagi Belanda menyatakan secara halus bahwa jika permintaan mereka tidak diterima maka mereka tidak segan-segan untuk melakukan serangan militer lagi. Belanda juga mengancam bahwa kalau Indonesia menolak maka Amerika tidak akan bersimpati lagi dengan Republik. Terdesak oleh tekanan yang berat, Amir akhirnya menandatangani Perjanjian Renville pada 17

Presiden Sukarno dan Amir Sjarifuddin tiba dari Perundingan Renville.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Presiden Sukarno bersama Amir Sjarifuddin mengadakan konferensi pers setibanya dari perundingan Renville.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Januari 1948. Perjanjian Renville menempatkan Republik pada kedudukan yang semakin sulit. Dalam perjanjian ini wilayah Indonesia makin sempit, dikurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda sewaktu Agresi Militer I.[100] Sementara itu, posisi Belanda semakin kuat karena Amir menyetujui garis van Mook yang menyebabkan terjadinya eksodus militer dan gerilyawan di daerah kantong gerilya di balik garis tersebut.

Mohammad Roem berpendapat bahwa "Renville adalah titik kekalahan dalam perjuangan".[101] Perjanjian Renville merupakan kemenangan besar bagi Belanda dan kekalahan telak bagi Amir Sjarifuddin. Masyumi yang awalnya mendukung kabinet Amir kemudian mencabut dukungan dan mendesak Amir mundur. Aksi Masyumi kemudian diikuti oleh PNI sehingga dukungan kepada Amir hanya tersisa dari golongan sayap kiri. Amir Sjarifuddin akhirnya menyatakan mundur dari kursi PM pada tanggal 23 Januari 1948. Angkatan muda Masyumi di depan kantor pemerintah menyerukan yel-yel "allahu akbar, kabinet Amir bubar".[102] Apa yang dialami oleh Amir sama seperti Sjahrir dulu yang ditusuk dari belakang oleh kawan-kawannya. Sejarah seperti seolah berulang.

TENTARA DAN PERTAHANAN NASIONAL: PRO DAN KONTRA

Dalam kabinet Sjahrir, Amir adalah tokoh kedua setelah Sjahrir yang memegang peranan kunci dalam pemerintahan. Posisinya sebagai menteri pertahanan menggarisbawahi bahwa Amir diserahi tanggung jawab penting untuk membawa kapal Republik selamat menghadapi badai revolusi, baik dari terpaan gelombang dari dalam maupun dari luar. Amir mempertahankan posisinya sebagai menteri pertahanan sampai dirinya menjadi perdana menteri di bulan Juli 1947. Hal ini memperlihatkan bahwa hanya dia dan Sjahrir yang merupakan tokoh politik riil dalam kabinet itu, menjalankan peran sebagai dwitunggal yang saling menopang satu sama lain.[103] Meskipun demikian, naiknya Amir menjadi menteri pertahanan menimbulkan polemik. Dua hari sebelum pembentukan kabinet Sjahrir pertama, militer memilih Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) sebagai menteri keamanan rakyat (pertahanan). Pemilihan ini merupakan tantangan langsung yang ditunjukkan kepada kewenangan Sjahrir sebagai pemimpin eksekutif yang lebih memilih untuk mengangkat kompatriotnya, Amir Sjarifuddin dengan alasan menolak apa yang dianggap suatu pola Jepang yang militeristis.[104]

Dalam tradisi Jepang mulai dari periode Meiji sampai seterusnya, menteri angkatan bersenjata dalam kabinet Jepang harus dari orang-orang militer, antara 1900 hingga 1913, dan sekali lagi setelah 1936, menteri-menteri tersebut haruslah perwira aktif.[105] Cara ini memberikan suatu penguasaan efektif terhadap sumber daya dalam kementerian dan juga penguasaan secara tidak langsung terhadap kabinet itu sendiri. Jadi tidak aneh bagi para bekas perwira Peta, mereka membahas kedudukan menteri pertahanan. Dan mereka secara penuh mendukung penunjukkan Sultan HB IX dalam konferensi di markas besar barisan kelaskaran di Yogyakarta dengan alasan bahwa Sultan dianggap sebagai perwira tinggi yang memiliki peran dan keberanian selama pendudukan Jepang dan berperan dalam gerakan kemerdekaan.[106]

Meskipun begitu, Sjahrir menolak desakan dari barisan militer dan tetap teguh dengan keputusannya. Tentara akhirnya mundur setelah melalui perdebatan, tapi mengenai kedudukan Soedirman sebagai panglima besar tentara mereka tidak mau mundur. Akhirnya, meskipun Amir naik menjadi menteri pertahanan, ia tidak pernah populer dan diterima sepenuhnya oleh kalangan tentara. Amir sangat sadar tahu adanya penolakan sekaligus kemampuan otonom tentara bergerak tanpa arahan pemerintah. Ia menyadari bahwa posisi tentara adalah vital dalam negara, namun pada saat yang sama sadar bahwa tentara merupakan batu alang utama kekuasaannya– dan persaingan tersebut merupakan penyebab kejatuhan Amir secara politik sebagai perdana menteri.

Dalam visi Amir mengenai watak tentara (saat itu Tentara Keamanan Rakyat, TKR), ia melihat perlunya revisi organisasional militer agar dapat menjadi kekuatan efektif dalam menghadapi Revolusi. Amir lalu menekankan perbedaan yang ia analisis antara dua Angkatan Darat pra-kemerdekaan, yaitu KNIL dan Peta, dan Angkatan Darat baru yang ia idealisasikan di TKR. Amir menyerang KNIL sebagai "tentara bayaran yang anggota-anggotanya rela digunakan oleh pemerintah Belanda untuk menindas bangsanya sendiri, sementara Peta hanya sekedar alat Jepang untuk mencapai tujuan-tujuan kolonialnya".[107] Terhadap laskar-laskar pemuda yang banyak muncul di era Jepang, Amir justru mengapresiasi nilai politis milisi-milisi rakyat tersebut.[108] Dari titik ini kelihatan bahwa Amir berupaya memberi jiwa politik kepada tentara, menanamkan ide "kemasyarakatan", membuang model korporatisme, patronase, dan faksionalisme.[109] Oleh sebab itu, sejak awal Amir mendidik korps perwira Angkatan Darat secara politik untuk "mendemokratiskan" maupun untuk "mensosialiskan" pandangan mereka. Hal ini penting dilakukan untuk membangun hubungan antara militer dan pemerintah yang berkuasa sekaligus untuk memberi mereka suatu orientasi ideologis yang akan membuat mereka berada dalam jangkauan golongan-golongan sosialis.[110]

Kontrol sipil terpusat terhadap angkatan bersenjata dan indoktrinasi tanggung jawab ideologis di kalangan perwiranya, menurut Klinken, "merupakan konsep Clausewitzian konvensional di negara-negara modern".[111] Amir menyinggung perbedaan kontras antara pemuda NAZI dan pemuda Rusia selama perang di mana keberhasilan Rusia menurutnya berkaitan dengan peleburan keyakinan politik yang teguh dari Tentara Merah. Tapi Simatupang, salah seorang kolonel Republik yang terbaratkan, menolak kesan bahwa Amir ingin mereproduksi Tentara Merah Soviet di Indonesia, sebab model seperti itu telah ada jauh di dalam tentara Cromwell di Inggris. Dalam memastikan model tentara yang memiliki dasar-dasar pemahaman ideologis negara yang kuat ini, slogan Cromwellian adalah "tiap kali anda berevolusi, anda harus meyakinkan bahwa tentara akan mengadopsi filosofi revolusi".[112] Untuk menanamkan idenya mengenai angkatan bersenjata yang berkomitmen dan disiplin, Amir melakukan tiga langkah besar: (1) berusaha menarik antusiasme pemuda ke dalam sebuah organisasi tunggal bernama Pesindo; (2) mengintegrasikan kelompok ini dan kelompok pejuang lainnya ke dalam tentara Republik; (3) berusaha menanamkan ideal-ideal disiplin dengan menggunakan Pendidikan politik (Pepolit) yang bercorak sosialis.[113] Dengan upaya yang dilakukannya ini Amir ingin menarik pengalaman revolusi Perancis, ketika suatu amalgam antara antusiasme pemuda dengan kemampuan pasukan kerajaan melebur dalam "*levee en masse*".[114]

Intervensi Amir dalam angkatan bersenjata membuat friksi muncul antara pemerintah dan angkatan bersenjata. Para perwira reguler menolak tunduk kepada perintah otoritas sipil dan pertikaian terus menerus di antara mereka mengenai pengangkatan perwira senior nantinya merupakan faktor penting yang memantik peristiwa Madiun di tahun 1948.[115] Tuduhan-tuduhan dari banyak pendukung Sjahrir dan Amir bahwa Soedirman dan para pengikutnya dari Peta berwatak fasis, ditentang mentah-mentah oleh mereka. Tidak bisa dipungkiri keahlian militer yang mereka dapatkan memang berasal dari Jepang, tetapi semangat dan teladan dalam pikiran Soedirman dan pengikutnya berasal dari para pemberontak sebelumnya melawan penjajahan Belanda. Mereka menuduh, sebaliknya, apabila ada kelompok yang dipengaruhi oleh konsep-konsep asing, justru golongan sipil cendekiawan berbahasa Belanda dan ibukota yang terdampak itu. Dibuktikan oleh sikap mereka yang terus menerus mau berkompromi dengan musuh melalui perundingan-perundingan, berkebalikan dengan patriot-patriot tentara yang mengangkat senjata untuk melawan Belanda.[116]

Soedirman sendiri memiliki keyakinan terhadap peran dan watak tentara nasional yang didasarkan pada pengalaman dan latar belakangnya. Berasal dari rakyat biasa dengan pendidikan formal yang terbatas, Soedirman melihat bahwa tentara bukanlah instrumen pusat yang bersifat Barat, tetapi merupakan ekspresi yang teroganisir dari kehendak rakyat.[117] Soedirman sadar bahwa karir yang dicapainya lebih merupakan proses pemilihan berjenjang informal yang posisinya bergantung kepada kemampuannya untuk memperoleh kesetiaan dan keyakinan dari unit-unit elektoral yang terdiri dari kelompok-kelompok militer setempat. Oleh sebab itu, dapat dipahami bila Soedirman mencita-citakan tentara nasional sebagai tentara rakyat yang egaliter dibanding partai-partai politik. Bila tentara harus dibayangkan sebagai suatu kekuatan revolusioner, maka revolusioner di sini harus diartikan sebagai "mengabdikan secara tulus kepada perjuangan untuk merdeka".[118]

Saat Amir menjadi perdana menteri keyakinan tentang "Tentara Masyarakat" ini terus dipertahankan. Pada akhirnya dalam tubuh militer terpecah dua kubu antara TNI yang yang bersifat otonom dan mencari dana sendiri dan Tentara Masyarakat yang bersifat ideologis dan organisasional bertanggung jawab kepada pemerintah dan Kementerian Pertahanan (PS) atau langsung kepada Amir Sjarifuddin.[119] Jumlah Tentara Masyarakat sendiri menurut pengakuan A.H Nasution berjumlah 470.000 sedangkan TNI hanya 350.000 tentara. Sekitar 100.000 pasukan Tentara Masyarakat berasal dari Pesindo yang merupakan elemen utama dalam kelompok ini. Dualisme model dalam angkatan bersenjata di dalam pemerintahan Amir ini ternyata menimbulkan kesulitan. Pertama, kebijakan ini kenyataannya menghadapi resistensi dari kalangan militer

yang menganggap bahwa semangat Amir hanya dilandasi ingin membentuk milisi pribadi. Kedua, perlawanan kalangan militer ditambah dengan patrimonialisme milisi bersenjata kepada Amir menimbulkan posisi sulit yang berkembang menjadi benih perang sipil.[120]

Apa yang dipikirkan Amir melalui pembentukan model Tentara Masyarakat ini menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana. Terlepas dari ia ingin menciptakan sebuah tentara dan milisi bersenjata yang ideologis dan militan sesuai dengan garis pemerintah yang berkuasa, ada sebuah kekhawatiran dalam dirinya mengenai kemampuan pertahanan Indonesia dalam berhadapan dengan Belanda di tengah situasi Revolusi yang serba tidak menentu. Apa yang dikhawatirkan Amir ini nampaknya terjadi pasca terjadinya serangan militer Belanda pertama di bulan Juli 1947. Agresi yang dimulai pada tanggal 20 Juli di berbagai wilayah Indonesia ini baru berakhir pada 4 Agustus dan menimbulkan kesulitan dan tantangan bagi kabinet Amir. Beberapa hari sebelum Belanda melakukan penyerangan, Amir telah mengamati bahwa tidak ada niat baik dari Belanda untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat bersama Indonesia dalam perundingan-perundingan yang telah berlangsung. Amir mengatakan bahwa:

"Kita mencari penyelesaian politik dengan damai, tapi dalam usaha ini dipersukar oleh pihak Belanda dengan tuntutan-tuntutan yang tidak berarti penyelesaian politik dan tidak adil pula, sebab seolah-olah hanya pihak Republik yang bersalah". Rakyat Indonesia! Sekali lagi saya ucapkan: insyaflah, bahwa keadaan sekarang ini sangat genting. Sikap pihak Belanda menunjukkan bahwa mereka akan melupakan jalan damai. Pemerintah Belanda telah mengucapkan kata-kata kekerasan. Marilah kita bersatu dalam menghadapi kekerasan Belanda itu. Marilah kita tetap waspada dan aman. Marilah kita menyusun tenaga kita. Kita tidak akan melupakan jalan lain."[121]

Pidato Amir tidak dipedulikan oleh Belanda. Menurut Purba, sikap Belanda yang ingin menguasai Indonesia mematahkan keteguhan Amir dalam berdiplomasi.[122] Amir yang sebelumnya cenderung berhati-hati dalam memanas-manasi suasana untuk melakukan revolusi, mulai meminta keterlibatan rakyat dalam usaha meredakan perang yang terjadi di daerah-daerah. Dalam pidato yang diucapkannya pada tanggal 21 Juli 1947

"Dan kita sudah mengetahui resep perang kolonial. Pertama, jelekkan nama rakyat daerah yang dilawan. Kedua, pecah belah rakyat itu. Ketiga, pisahkan pemimpinnya dari rakyat. Demikian pula resep pihak Belanda sampai sekarang… Pengalaman pahit di zaman jajahan Belanda dan Jepang sudah cukup. Kita rakyat merdeka dan bersatu. Kita rakyat bernegara dan berpemerintah. Dan sebab itu, kita tidak mengakui dan mengetahui tindakan polisi dan negara lain di daerah kita. Kita hanya mengetahui, bahwa ada pertahanan nasional, kalau yang disebut polisi Belanda itu memasuki daerah kita… Dan bagi kita hanya ada satu jalan mempertahankan kemerdekaan kita. Mempertahankan hak untuk terus memajukan negara kita. Marilah, rakyat Indonesia bersama-sama menggunakan segala tenaga, segala usaha seluruh rakyat mempertahankan kemerdekaan kita. Kita berjuang, kita berjuang terus, seluruh rakyat mengadakan pertahanan nasional, menyelenggarakan pertahanan rakyat. Segala lapisan, segala partai, pemudanya, wanitanya, tentaranya, seluruh rakyat saya menjalankan kewajiban kita: pertahanan nasional … Kita akan melawan terus, sehingga Belanda merasa bosan dan tidak kuat memikul biaya lagi, sehingga dengan sendirinya mengangkat kakinya dari Indonesia. Lebih baik Belanda sedia lengkap barisan pemadam api".[123]

Dari pidato yang Amir sampaikan itu, dapat digambarkan bahwa ia menyerukan "perlawanan total" yang melibatkan seluruh rakyat, baik perempuan maupun laki-laki, tua maupun muda, tentara maupun sipil, untuk membentuk benteng pertahanan nasional melawan keinginan berkuasa kembali Belanda.[124] Rakyat harus melawan imperialisme dan kolonialisme yang, dalam memori rakyat Indonesia, sangat buruk dan penuh penderitaan. Suka atau tidak suka, melawan adalah satu-satunya cara bertahan diri dari penindasan. Dalam bayangan Amir, perlawanan yang hanya dalam bentuk kata-kata dan dilakukan oleh sebagian orang akan membuat Belanda di atas angin. Sehinggga, Amir menyatakan strategi perjuangan melibatkan seluruh kekuatan masyarakat dalam pertahanan nasional. Mungkin dalam tahap inilah Amir menyadari bahwa di samping jalan diplomasi damai yang dilakukan pemerintah, kekuatan pertahanan nasional yang melibatkan seluruh masyarakat untuk berperang melawan pemerintah dirasakan perlu. Keduanya dapat dikombinasikan menjadi sebuah strategi yang saling melengkapi dan tidak berdiri sendiri-sendiri dan saling berkompetisi. Di masa Revolusi, sayangnya pandangan yang serba hitam putih seperti inilah yang sering terjadi dan hal ini malahan memisahkan bukannya menyatukan kekuatan.

JALAN KONFRONTASI DAN TRAGEDI AMIR SJARIFUDDIN

Setelah Amir jatuh, Sukarno memerintahkan Hatta untuk membentuk kabinet yang baru. Hatta yang diembani amanah untuk menjadi PM memutuskan untuk membangun kabinet tanpa memasukkan unsur sayap kiri. Golongan sayap kiri meminta pos-pos menteri strategis seperti pertahanan dan dalam negeri namun permintaan ini ditolak Hatta karena Masyumi dan PNI tidak mau apabila kabinet didominasi oleh sayap kiri.[125] Sjahrir yang mendukung pemerintahan Hatta lalu memutuskan pecah kongsi dengan Amir. Sjahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia Februari 1948. Amir lalu memutuskan untuk membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang berisi gabungan dari Pesindo, PKI, Partai Buruh, Partai Sosialis dan federasi buruh SOBSI.

Pada 1948, ada tiga persoalan struktur yang penting dihadapi oleh pemerintahan Hatta (1) rasionalisasi organisasi TNI (2) keadaan ekonomi yang memburuk (3) pengaruh perkembangan politik nasional dan internasional.[126] FDR melakukan demonstrasi menuntut agar

kabinet memasukkan golongan kiri dengan tetap mempertahankan Amir sebagai Menteri Pertahanan. FDR menganggap bahwa kabinet sekarang bukan kabinet ahli tapi kabinet Masyumi yang ditutupi oleh Hatta.[127] Program-program FDR ditekankan pada kepentingan buruh dan tani, Amir dalam sebuah pidato menyerukan bahwa dasar persatuan revolusi Indonesia adalah buruh, tani, dan kelas menengah yang anti imperialis. Maka dari itu saat terjadi pemogokan buruh di Delanggu yang menuntut gaji selain uang, yaitu kain 3 m dan beras 20 kg sekeluarga per bulan kepada pemerintah Hatta. FDR mendukung upaya mogok ini.

Dalam perjanjian Renville, Indonesia akan menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat dengan tentara federal. Hatta menginginkan postur TNI tidak terlalu gemuk namun diisi oleh prajurit profesional dan berpengalaman untuk mendukung keputusan Renville. Kebijakan ini dianggap oleh FDR sebagai jalan untuk menyingkirkan para simpatisan FDR di tubuh tentara. Sejumlah besar perwira-perwira militer di daerah basis FDR, Jawa Tengah (Solo) dan Timur (Madiun-Kediri), gelisah mendengar berita ini. Rasionalisasi akan dilakukan pada 350.000 tentara di Jawa dan Sumatera, lalu 470.000 anggota laskar di Jawa akan dikurangi sehingga menjadi 160.000 orang pada taraf pertama.[128]

Reorganisasi tentara melingkupi tiga jenis kesatuan, batalyon mobil, batalyon teritorial dan kesatuan bantuan teritorial.[129] Tujuh divisi militer akan dikurangi menjadi tiga divisi militer. Siliwangi dipertahankan menjadi Kesatuan Reverse Umum dengan markas di Solo. Dengan reorganisasi ini Divisi IV Senopati yang berada di Solo merasa terancam karena akan dijadikan satu dengan Divisi I Siliwangi dan panglimanya Jenderal Mayor Soetarto akan dijadikan "perwira bemper". Dalam divisi ini setengah dari pasukannya sekitar 2.500 orang berasal dari Pesindo yang merupakan organ dari FDR. Terhadap rencana reorganisasi ini Divisi Senopati menolak dan melakukan parade berkeliling kota. Soedirman kemudian berdebat dengan Sukarno dan Hatta untuk membatalkan reorganisasi.

Di samping itu tidak lama setelah pemerintahan sayap kiri bubar, situasi politik dikejutkan dengan berita kembalinya Muso, seorang tokoh PKI legendaris yang melarikan diri setelah pemberontakan PKI 1927. Muso atas bantuan Soeripno, yang ditemuinya di Praha meminta tolong untuk kembali ke Indonesia. Menyamar sebagai Soeparto yang mengaku sebagai sekretaris Soeripno, Muso yang dikenal sebagai tukang ngamuk, "mudik" ke Indonesia. Baliknya Muso ke Indonesia menurut beberapa sejarawan, seperti Arnold Brackman, Ruth McVey, dan Justus van der Kroef akibat kekecewaan Soviet atas ambruknya pemerintahan kiri Amir Sjarifuddin yang diganti pemerintahan nasionalis borjuis.

Larissa Efimova mengemukakan, berdasarkan arsip-arsip Soviet, setidaknya terdapat dua alasan kembalinya Muso: (1) kurangnya hubungan teratur antara Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) dengan PKI dan terisolasinya PKI dari gerakan komunis internasional (2) frustasi dari Soviet atas naiknya Hatta tanpa membawa elemen kiri di pentas politik.[130]. Meskipun Muso membela strategi kabinet Amir Sjarifuddin yang menurutnya "menjalankan strategi komunisme secara taktis", tapi Soviet tetap mengkritiknya habis-habisan. Soviet mempermasalahkan mengapa doktrin Zhadnov yang menggambarkan politik dunia dalam pertentangan dua kubu, imperialis dipimpin AS dan anti imperialis dipimpin Soviet, tidak diterbitkan dan dipopulerkan oleh PKI.

Sekembalinya Muso di Indonesia, koran-koran memuat berita kepulangannya, salah satunya mengibaratkan seperti "ratu adil yang diturunkan dari langit". Muso lalu menemui Sukarno tanggal 13 Agustus 1948 dan pertemuan ini diberitakan oleh Soepeno, pimpinan redaksi *Revolusioner*. Dalam pertemuan itu diceritakan "sungguh mengharukan pertemuan antara Bung Karno dan Pak Muso, Bung Karno memeluk Muso dan Muso memeluk Sukarno. Mata berlinang dan kegembiraan tidak dapat dikatakan dengan kata-kata. Bung Karno lalu berkata "Iho kok masih awet muda?" Muso menjawab "tentu saja, ini memang semangat Moskow, semangat Moskow selamanya muda". Sukarno lalu menceritakan pada Soeripno bahwa Muso paling jago berkelahi, ia memang jago pencak. Kalau berpidato ia akan menyingsingkan lengan bajunya. Sebelum berpisah Sukarno meminta Muso untuk suka membantu memperkuat negara dan melancarkan revolusi, Muso lalu menjawab "itu memang kewajiban saya, *ik kom hier om orde te scheppen*" (saya datang disini untuk menciptakan ketertiban).[131]

Berita yang tidak kalah mengagetkan adalah pengakuan bahwa Amir adalah komunis. Ia membuat pernyataan bahwa sejak 1935 dirinya telah bergabung dengan PKI ilegal binaan Muso. Pada saat Muso menyelinap diam-diam ke Indonesia tahun 1935 dirinya membentuk kembali susunan CC PKI di Surabaya yang terdiri dari Muso, Pamudji, Azis, Sukajat, Djokosoejono dan Amir termasuk orang yang dibina Muso di Surabaya. Mendengar pengakuan Amir ini beberapa kerabat dekat seolah tidak percaya. Abu Hanifah, kawan debatnya di asrama Kramat 106 mengatakan bahwa kedatangan Muso di Indonesia begitu membebani Amir, ini cocok dengan pribadi Amir yang brilian dan sangat ambisius, juga emosinya yang tidak sabar dan gampang goyah.[132] F.K.N Harahap mengatakan bahwa Amir "resminya" adalah komunis namun tidak bisa disebut komunis sejati. Pendeta protestan J. Verkuyl yang kenal dengan Amir berpendapat bahwa Amir begitu menyesal dengan keputusan Renville dan ia menganggap bahwa satu-satunya jalan adalah Soviet, dan Muso secara halus mendesaknya agar tampil kembali mendayagunakan kekuasaan.[133] Setidaknya pendapat John Coast yang mewawancarai Amir tiga minggu sebelum membuat pengumuman itu menegaskan hal tersebut. Ia berpendapat bahwa "keyakinan saya adalah bahwa Sjarifuddin (Amir), seperti Soeripno, Maruto Darusman, dan banyak lainnya di lingkungan komunis, menjadi komunis karena mereka kehilangan kepercayaan terhadap Barat di dalam perpecahan Indonesia".[134] Amir memang telah merasakan pahitnya pengkhianatan Barat setelah delegasi AS di KTN, Dr. Frank Graham, tidak mampu mewujudkan janji Amir bahwa AS akan mendukung Indonesia di Perundingan Renville.

Dalam sebuah konferensi PKI, Muso mengumumkan sebuah tesis program yang

berjudul *Jalan baru untuk Republik Indonesia*. *Jalan Baru* mengkritik tentang kesalahan kaum marxis Indonesia yang tidak mendirikan partai komunis legal untuk memimpin revolusi. Maka yang terjadi muncul PKI palsu (Mr Jusuf), PBI yang diisi oleh avonturir Trotskis dan kesalahan PS yang telah menjadi kendaraan politiknya Sjahrir. Munculnya tiga partai buruh (PKI ilegal, PBI dan PS) meruwetkan pergerakan buruh sehingga segera mungkin harus diadakan fusi untuk mengembalikan PKI sebagai satu-satunya partai pelopor kelas buruh. Fusi antara tiga partai FDR harus secepat mungkin menuju terbentuknya "satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah yaitu Partai Komunis Indonesia". Menurut Gie, ide paling penting Muso dalam rangka "grand strategi" PKI adalah ide tentang front nasional.[135] Front nasional dibutuhkan untuk menghimpun segala kekuatan progresif dan anti imperialis yang terdiri dari tokoh-tokoh perorangan, anggota-anggota partai dan tokoh-tokoh tak berpartai. Dengan terbentuknya front nasional maka akan dibentuk suatu pemerintahan baru yang bertanggung jawab kepada parlemen.[136]

Jalan Baru kemudian dilaksanakan dalam konferensi PKI tanggal 26-27 Agustus yang menggabungkan elemen kiri ke dalam wadah PKI dengan Muso sebagai sekretaris jenderalnya bersama Tan Ling Djie, Maruto Darusman dan Ngadiman. Sekretariat buruh diisi oleh Harjono, Setiadjit, Ahmad Sumadi, Abdulmadjid. Soeripno dan Wikana pada bagian pemuda. Aidit bertanggung jawab untuk urusan tani dan Lukman, Alimin, dan Sardjono pada bagian agitasi. Amir Sjarifuddin diberi tanggung jawab untuk mengurusi departemen pertahanan karena dia merupakan satu-satunya orang yang dinilai berpengalaman mengurusi pertahanan. Amir pada awalnya tidak banyak berkomentar mengenai rencana Muso, namun kemudian mengakui bahwa ia melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk itu mungkin dengan PKI dia bisa kembali menebus kesalahan itu.

Hatta berkomentar terhadap gerakan oposisi yang diluncurkan oleh FDR, ia mengatakan bahwa sikap FDR ambigu: dulu FDR yang mengadakan Renville namun sekarang menentangnya. Hatta juga menolak jika harus memilih salah satu dari dua kekuatan antara AS dan Soviet. Menurutnya "kita harus tetap menjadi objek yang mandiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seutuhnya".[137] Pada tanggal 3 September, Muso di depan pembukaan kongres BTI menanggapi penjelasan Hatta. Muso mengatakan bahwa netralitas tidak mungkin di tengah pertentangan internasional dan dalam situasi ini republik harus memilih Soviet. Muso bersama Amir, Wikana dan Harjono kemudian merencanakan safari politik keliling Jawa Tengah dan Timur untuk menggalang dukungan. Tanggal 7 September mereka berpidato di Solo, 8 September di Madiun, 10-11 September berpidato di Kediri, 13 September di Jombang, 14 September di Bojonegoro, 16 September di Cepu dan tanggal 17 September di Purwodadi.[138]

Akibat pembunuhan Kol. Soetarto di Solo–dari Divisi IV Senopati–saat ia sedang menuju rumahnya pada petang hari, situasi di Solo menjadi keruh. Divisi Senopati mencurigai bahwa Siliwangi berada dibalik aksi ini. Aksi-aksi besar kemudian terjadi dipicu oleh intrik-intrik kecil dan besar dimulai dari peristiwa Tasikmadu, di mana prajurit Siliwangi batalyon Rukman sering makan di warung tidak bayar, melakukan perampasan besar-besaran barang-barang milik negara untuk hadiah lebaran dan aksi perampokan. Terjadilah *clash* akibat masalah ini karena perundingan menemui jalan buntu. Masalah bertambah pelik ketika terjadi penculikan lima perwira Divisi Senopati yang sedang mencari dua anggota PKI Solo yang hilang. Akhirnya terjadi perang antara dua divisi ini yang membuat Soedirman dan Nasution berdebat untuk mencari jalan keluar. Soedirman kemudian mengadakan diskusi dengan Nasution dan Gatot Subroto dan diputuskan untuk meminta Sukarno mengangkat Kol. Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer. Gatot Subroto kemudian pergi ke Solo tanggal 18 September 1948. Dengan keras ia menginstruksikan untuk penghentian tembak menembak dan semua komandan yang bermusuhan harus melaporkan diri, jika tidak maka akan dicap sebagai pemberontak.

Situasi panas juga terjadi di daerah Madiun, yang akan terkena dampak rasionalisasi tapi para tentara di sana menolaknya karena daerah tersebut merupakan basis FDR yang paling besar. Di Madiun Amir Sjarifuddin memerintahkan dilaksanakannya *land reform* di desa-desa dan sudah 260 desa melaksanakan kebijakan ini. FDR mendapatkan banyak massa di Madiun karena tertarik dengan pembagian sawah dan hak milik yang dilakukan FDR. FDR di Madiun dipimpin oleh Soemarsono, pemimpin Pesindo dan Ketua BKPRI (Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia). Oleh FDR, ia ditunjuk sebagai Ketua Comite van Actie Madiun Situasi di Madiun gampang panas karena di sinilah konflik antara tentara dan golongan kiri sering terjadi. Pada tanggal 23 Juli, Wirusudarno seorang buruh kereta api ditembak oleh seorang tentara. Kemudian pada tanggal 10 September terjadi insiden seorang anggota CPM menempeleng seorang buruh balai kota. Aksi ini menyebabkan SOBSI melakukan demonstrasi menuntut kepada CPM yang membuat CPM marah dan melepaskan tembakan ke udara.

Konflik yang terjadi di Solo menyebabkan situasi di Madiun bertambah panas. Soemarsono mendapat kabar bahwa Divisi Senopati mengalami kekalahan dari pihak pemerintah dan ini pukulan berat bagi FDR. Soemarsono juga mendapat laporan bahwa Siliwangi akan merengsek ke Madiun dan melucuti barisan FDR. Beberapa sejarawan seperti Kahin dan Swift mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan Soemarsono, ini seperti *fait accompli* tapi menurut Poeze inisiatif tetap berada pada PKI yang melakukan aksi.[139] Pada tanggal 18 September pagi-pagi sekali pasukan FDR bergerak dengan tentara 1.500 orang, mereka lalu melucuti basis-basis pemerintah seperti CPM dan Siliwangi, tidak ada perlawanan yang berarti. FDR lalu mengumumkan pembentukan front nasional dan menyebar formulir pendaftaran kepada masyarakat untuk menjaring anggota dengan iuran Rp. 10.[140]

Front nasional diumumkan sesuai anjuran Muso dengan Abdulmutalib sebagai Residen Madiun dan Soemarsono sebagai Gubernur Militer serta Djokosoejono menjadi Komandan Militer. Saat pembentukan front nasional para pejabat teras PKI tidak berada di Madiun.

Muso, Amir dan Setiadjit sedang melakukan safari politik. Saat mendengar telah terbentuk pemerintahan front nasional, Muso datang ke Madiun tanggal 19 September. Pemerintah yang mendengar terbentuknya pemerintahan front nasional di Madiun mengecam tindakan keras tersebut. Sukarno mengatakan bahwa telah terbentuk pemerintahan Soviet di Madiun dan Muso membalasnya dengan berapi-api bahwa "Sukarno-Hatta seperti Chiang Kai Sek telah mengadu dombakan tentara revolusioner dan tentara reaksioner, Sukarno-Hatta adalah serupa dengan kaum imperialis Inggris-AS dan Sukarno-Hatta adalah budak Jepang sehingga banyak rakyat menderita karenanya".[141] Sukarno mengecam tindakan PKI/FDR Madiun sebagai ancaman terhadap eksistensi negara Indonesia, ia lalu menyeru "pilih Muso dengan PKI yang akan membangkrutkan cita-cita Indonesia merdeka atau Sukarno-Hatta yang insyallah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Republik Indonesia merdeka dan tidak dijajah oleh negara apapun juga". Muso membalasnya dengan pernyatan serupa ikut Sukarno-Hatta atau Muso!

Sejarah membuktikan bahwa rakyat lebih memilih Sukarno daripada Muso. Inilah yang membuat Pemberontakan Madiun gagal karena ia tidak didukung rakyat. Serta menurut Poeze bahwa "belum saatnya bagi PKI melibatkan diri dalam aksi karena partai masih di tengah proses fusi yang berbelit-belit".[142] Muso akhirnya ditembak mati. Para pejabat teras PKI seperti Amir Sjarifuddin, Maruto Darusman, Soeripno, Harjono, Oei Gee Hwat ditangkap dan kemudian dieksekusi. Dalam pengakuannya terhadap harian Katolik *Hidup* Amir Sjarifuddin membantah bahwa Madiun adalah pemberontakan dan ia menolak itu kup, "tapi kami mengkhawatirkan ditahan dan karena itu tamparan pertama dibagikan, bahkan seandainya ada kup, saat untuk melakukan aksi itu masih terlalu dini, karena tidak mungkin melakukan aksi jika belum ada kesatuan politik untuk itu". Sementara itu, Gie memberikan pandangannya bahwa aksi Madiun merupakan "puncak dari roda-roda harapan yang tidak terpenuhi, tekanan ekonomi, frustasi yang mendalam di masa Revolusi yang akhirnya saling bersinggungan dan dari percikan-percikan api inilah semuanya akan dibakar".[143] Kematian Amir adalah tragedi sebab sampai akhir hayatnya Amir si "kharismatis revolusioner" tetap dicap sebagai pemberontak walaupun ia punya jasa dalam membangun republik.

PENUTUP

Rakyat berjejalan di stasiun Yogyakarta, berkerumun menunggu karena ingin melihat wajah Amir Sjarifuddin dari dekat. Di dalam kereta yang berjalan ke arah Yogyakarta, mantan Perdana Menteri Indonesia itu dengan tenang membaca *Romeo and Juliet*, buku terakhirnya, karangan sastrawan besar Shakespeare. Amir lebih banyak diam ketika berusaha diwawancarai oleh seorang wartawan. Ketika melihat kumpulan rakyat yang menunggunya, Amir mungkin tahu bahwa hari-harinya kemungkinan bisa berakhir tidak lama lagi. Revolusi dapat berputar dengan cepat tak menentu. Perubahan politik di masa Revolusi sangat dinamis dan dapat berubah arah dengan drastis, kawan bisa menjadi lawan dan lawan bisa menjadi kawan. Soe Hok Gie barangkali adalah sedikit sejarawan yang melihat Peristiwa Madiun dalam gambaran besar Revolusi yang *chaos* dan tidak jelas ujungnya. Gie mengatakan bahwa:

"Persoalan ini hendaknya dilihat daripada persoalan-persoalan ketegangan masyarakat Indonesia (di Jawa) dalam revolusi nasionalnya. Harapan-harapan yang tidak terpenuhi, dan tekanan-tekanan ekonomi membawa frustasi-frustasi yang mendalam pada seluruh lapisan masyarakat. Di dalam keadaan seperti ini tendensi radikalisme dari segala pihak akan bertambah, lebih lebih penyaluran politik dan ekonomi tidak (atau kurang) diberikan waktu itu. Radikalisme ini seperti perlombaan mobil di lereng gunung yang makin lama makin menyempit. Pastilah suatu hari roda-roda yang berputar ini akan saling bersinggungan dan dari percikan-percikan api ini semuanya akan dibakar."[144]

Perpisahan dwitunggal Sjahrir dan Amir, kejatuhan kabinet Amir, dan kedatangan Muso merupakan episode-episode yang merubah orientasi dan sikap Amir Sjarifuddin lebih radikal. T.B. Simatupang seorang yang akrab baik dengan Sjahrir dan Amir menggambarkan hubungan antara Sjahrir dan Amir seperti "motor dan kemudi". Simatupang mengatakan: "Bung Amir adalah motor dan bahwa Bung Sjahrir adalah adalah kemudi dari bahtera Negara kita. Setelah perpisahan antara mereka itu, maka tinggalah motor tanpa kemudi pada satu pihak, dan kemudi tanpa motor pada pihak lain. Gambaran ini tentu adalah sangat berlebih-lebihan, akan tetapi barangkali tidak sama sekali tanpa kebenaran". Barangkali pernyataan Simatupang ada benarnya, karena pasca kejatuhan kabinetnya, Amir melangkah maju dengan gas penuh tanpa rem berbeda dengan episode-episode sebelumnya di mana ia penuh pertimbangan dan hati-hati dalam memutuskan kebijakan dan tindakan. Sepanjang 20 tahun hidup berpolitik, 1928-1948, Amir membaktikan separuh hidupnya kepada politik, dan untuk itu, menurut Leclerc, "ia pun harus menempuh sepanjang labirin, untuk menemukan jalan keluar daripadanya, namun tidak jarang harus menemui jalan buntu".[145] Jacques Mallet du Pan, seorang jurnalis di masa Revolusi Perancis, menulis "*la révolution dévore ses enfants*" atau revolusi memakan anak kandungnya sendiri. Barangkali, inilah perumpamaan yang dapat menggambarkan akhir riwayat tragis dari seorang Amir Sjarifuddin.

ENDNOTES

1 Gerry van Klinken, 5 *Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen* (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. 170.

2 Taufik Abdullah, *Indonesia: Towards Democracy* (Singapore: ISEAS, 2009), hlm. 8.

3 Adrican Vickers, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), hlm. 132.

4 Jacques Leclerc, "Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi" dalam Jacques Leclerc. *Mencari Kiri: Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi Mereka* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2011), hlm. 41.

5 Yema Siska Purba, *Amir Sjarifoeddin: Nasionalis yang Tersisih* (Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2013), hlm. 4.

6 Abu Hanifah, "Revolusi Memakan Anak Sendiri: Tragedi Amir Sjarifudin", dalam *Prisma* No. 8 (1977), hlm. 87.

7 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 171.

8 Ibid., hlm. 172.

9 Hanifah, "Revolusi Memakan", hlm. 87.

10 Ibid.

11 Jacques Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", dalam *Prisma*, No. 12 (1982), hlm. 53.

12 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 173.

13 Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 41.

14 Ibid., hlm. 61.

15 Ibid.

16 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 175.

17 John Ingleson, *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 194.

18 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 185.

19 Ingleson, *Jalan ke Pengasingan*, hlm. 220.

20 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 185.

21 Ibid., hlm. 186.

22 Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 73-4.

23 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 186.

24 Ibid., hlm. 186-7.

25 Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 74.

26 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 188.

27 Ibid. Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 74.

28 Ingleson, *Jalan ke Pengasingan*, hlm. 237.

29 Ibid., hlm. 239.

30 Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 50.

31 Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", hlm. 62.

32 Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 52.

33 Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", hlm. 62.

34 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 193.

35 Ibid., hlm. 196.

36 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 395-6.

37 Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", hlm. 63.

38 Ibid.

39 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 194. Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", hlm. 63.

40 Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", hlm. 64.

41 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 195.

42 Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", hlm. 64.

43 Jacques Leclerc, "Aliran Komunis: Sejarah dan Penjara", dalam Jacques Leclerc. *Mencari Kiri: Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi Mereka* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2011), hlm. 27.

44 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 197.

45 Ibid., hlm. 198.

46 Ibid., hlm. 200.

47 Ibid.

48 Abu Hanifah, "Revolusi Memakan", hlm. 94.

49 Ibid.

50 Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 60.

51 Benedict Anderson, *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2018), hlm. 40.

52 Soe Hok Gie, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948* (Yogyakarta: Bentang, 1997), hlm. 42.

53 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 41.

54 George McT. Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 141.

55 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 207.

56 Ibid.

57 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 41.

58 Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 176.

59 Ibid., hlm. 150.

60 Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", hlm. 55.

61 Ibid.

62 Ibid., hlm. 56.

63 Ibid.

64 Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", hlm. 57.

65 Ibid.

66 Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 48.

67 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 285.

68 Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", hlm. 57.

69 Ibid.

70 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 289.

71 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 217-8.

72 Ibid., hlm. 217.

73 Ibid., hlm. 218.

74 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 289.

75 Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", hlm. 73.

76 Ibid.

77 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 236.

78 Ibid., hlm. 237.

79 Gie, *Orang-Orang*, hlm. 77.

80 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 237.

81 Ibid., hlm 239.

82 Ibid., hlm. 240-1.

83 Gie, *Orang-Orang*, hlm. 79.

84 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 243.

85 Leclerc, "Amir Sjarifuddin 75 Tahun", hlm. 74.

86 P.N.H. Simanjuntak, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 48. Gie, *Orang-Orang*, hlm. 118-9.

87 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 290.

88 Gie, *Orang-Orang*, hlm. 120.

89 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 292.

90 Simanjuntak, *Kabinet-Kabinet*, hlm. 51.

91 Gie, *Orang-Orang*, hlm. 123.

92 Lihat Gie, *Orang-Orang*, hlm. 124.

93 Purba, *Amir Sjarifoeddin*, hlm. 49.

94 Ibid., hlm. 50.

95 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 296.

96 Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hlm. 453.

97 Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 51-6.

98 Gie, *Orang-Orang*, hlm. 125.

99 Ibid.

100 Simanjuntak, *Kabinet-Kabinet*, hlm. 60.

101 Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 244.

102 Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 70.

103 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 289.

104 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 289.

105 Ibid., hlm. 288.

106 Ibid., hlm. 289.

107 Ibid., hlm. 290.

108 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 294.

109 Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 70.

110 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 291.

111 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 294.

112 Ibid.

113 Ibid., hlm. 295.

114 Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 69.

115 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 295.

116 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 292.

117 Ibid.

118 Ibid., hlm. 292-3.

119 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 295.

120 Ibid., hlm. 296.

121 Purba, *Amir Sjarifoeddin*, hlm. 111-2.

122 Ibid., hlm. 112.

123 Ibid., hlm. 112-4.

124 Ibid., hlm. 114.

125 Gie, *Orang-Orang*, hlm. 163.

126 Onghokham, "Pemberontakan Madiun 1948: Drama Manusia dalam Revolusi", dalam Onghokham, *Sukarno, Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 121-2

127 Gie, *Orang-Orang*, hlm. 185.

128 Harry Poeze, *Madiun 1948: PKI Bergerak* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor & KITLV-Indonesia, 2011), hlm. 96.

129 Ibid., hlm. 97.

130 Larisa Efimova, *Dari Moskow ke Madiun?: Stalin-PKI dan Hubungan Diplomatik Uni Soviet-Indonesia, 1947-1953* (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2010), hlm. 42.

131 Poeze, *Madiun 1948,* hlm. 28-9.

132 Ibid., hlm. 64.

133 Ibid., hlm. 67.

134 Klinken, *5 Penggerak Bangsa*, hlm. 301.

135 Gie, *Orang-Orang*, hlm. 218.

136 Poeze, *Madiun 1948*, hlm. 37.

137 Ibid., hlm. 80.

138 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 401.

139 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*. Ann Swift, *The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948* (Singapore: Equinox, 2010). Poeze, *Madiun 1948*.

140 Gie, *Orang-Orang*, hlm. 236.

141 Poeze, *Madiun 1948*, hlm. 191.

142 Ibid., hlm. 383.

143 Gie, *Orang-Orang*, hlm. 273.

144 Ibid.

145 Leclerc, "Amir Sjarifuddin", hlm. 42.

MOHAMMAD HATTA

MOHAMMAD HATTA:

Mendayung Republik di Tengah Krisis

"Hanya ada satu negeri yang pantas menjadi negeriku, ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku"

Moh. Hatta

PENGANTAR

Mohammad Hatta adalah salah satu tokoh penting yang merumuskan gagasan kebangsaan, demokrasi, dan ekonomi kerakyatan Indonesia serta negarawan yang berkontribusi besar dalam mengemudikan Republik di fase awal pendirian dan pertumbuhannya. Sosoknya menjadi besar dan sulit dicari bandingannya hari ini karena ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk memikirkan dan mengabdikan jiwa raganya untuk bangsanya. Dari masa muda hingga akhir hayatnya, Hatta terus memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan. Dalam perjuangannya tersebut hasilnya tidak selamanya selalu berhasil; terkadang pemikirannya diadopsi dalam politik ketatanegaraan dan kebijakan-kebijakan publik, terkadang ia harus rela frustasi dan kecewa melihat negerinya melenceng dari tujuan awal berdirinya.

Di masa pergerakan, Hatta adalah tokoh utama dalam narasi perlawanan antikolonial Indonesia. Ia merupakan satu tipe pemimpin pergerakan yang langka, menggabungkan kecerdasan dan ketekunan intelektual di atas rata-rata aktivis nasionalis di masa itu dan juga memiliki karakter yang teguh dan konsisten mempertahankan prinsip-prinsip ideal. Mungkin karena itu, hidupnya sangat lurus, kurang berwarna, tidak seperti elite-elite Indonesia lainnya yang memiliki latar belakang dan peran politik yang serupa dengan Hatta. Di dalam dirinya mengalir dua pandangan hidup dunia yang saling mengisi, yang satu Hatta yang agamis karena latar belakang didikan keluarganya yang berasal dari keluarga ulama terpandang, yang lain Hatta yang asketik revolusioner karena dibentuk oleh pengaruh pemikiran-pemikiran nasionalis, sosialis, dan Marxis. Ia membaca teks-teks keagamaan, tentang Islam dan ajarannya, sekaligus di saat yang sama juga membaca teks-teks ekonomi, politik, filsafat, dan sejarah. Pengetahuannya yang luas begitu memukau tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tapi juga diakui oleh rekan-rekan aktivisme politiknya. Hatta selalu menuliskan argumen dalam tulisan-tulisannya berbasiskan informasi, data, atau pendapat yang didapatnya dari karya-karya akademis.

Eksploitasi kolonial yang disadarinya mendorongnya untuk belajar ekonomi, suatu ilmu yang jarang diambil oleh aktivis pergerakan di masa itu yang umumnya mengambil sekolah birokrasi, hukum, dan kedokteran. Melalui ekonomi Hatta menajamkan pikiran-pikirannya untuk menelanjangi ketidakadilan yang terjadi di tanah airnya. Kesadaran kebangsaannya yang tumbuh sejak muda dipengaruhi oleh bacaannya dan pertemuannya dengan tokoh-tokoh nasionalis awal Indonesia, di antaranya Agus Salim, Abdul Muis, dan Nazir Pamuntjak. Ketika bersekolah di Belanda, sama seperti pemuda tercerahkan yang lain, Hatta memutuskan terlibat dalam Perhimpunan Indonesia dan bahkan berada sebagai salah satu orang di balik layar yang mengubah organisasi ini menjadi lebih radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan dan memformulasikan gagasan kebangsaan yang inklusif. Salah satu kontribusi besar Hatta dalam PI yang berimbas besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah merubah orientasi pergerakan organisasi ini tidak hanya fokus dalam membangun kesatuan di dalam negeri tetapi juga meluaskan kerjasama internasional dengan organisasi-organisasi antikolonial di Eropa. Melalui upayanya itu, gaung perjuangan kemerdekaan Indonesia lebih luas tersebar secara internasional. Hatta membangun relasi dengan tokoh-tokoh antikolonial dan antiimperialisme penting dan oleh karena itu namanya berjejer dengan tokoh-tokoh pembebas dunia. Akibat aktivitasnya ini, maka pemerintah kolonial mencapnya sebagai tokoh yang berbahaya bagi masa depan tanah jajahan.

Kemampuan Hatta dalam memformulasikan ide tidak hanya tercermin dalam tulisan-tulisannya tetapi juga rekam jejak kemampuannya mengorganisasikan partai atau organ. Hatta memang bukan sosok seperti Sukarno yang bisa dalam singkat membangun partai memiliki beribu-ribu pengikut. Ia bukanlah penggalang massa seperti Sukarno, bahkan mengkritik cara itu. Hatta menekankan pendidikan politik yang terstruktur dan sistematis dengan cara mendidik secara ketat kader partai melalui bacaan dan surat kabar partai. Melalui cara ini, Hatta memang tidak berhasil membangun pengikut partai yang besar tetapi jaringan politik kecil yang efektif, ideologis, dan dapat bekerja sebagai pemimpin ketika situasi darurat terjadi. Para pengikutnya paling besar memang dibentuk dari pembacaan terhadap analisis-analisis dan mengikuti sepak terjangnya daripada hadir dalam pidato-pidatonya yang kaku dengan gaya akademik yang membosankan.

Dua hal yang akan selalu diingat dari Hatta adalah peran besarnya sebagai penggagas Indonesia yang ujungnya ditandai dengan aklamasinya sebagai orang yang memproklamasikan kemerdekaan bersama Sukarno dan kedua, orang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar. Namun, apakah orang mengingat bahwa posisi Hatta di dalam memimpin KMB terkait dengan posisinya sebagai pemimpin eksekutif Perdana Menteri Indonesia, di samping memang secara kemampuan Hatta adalah diplomat Indonesia yang paling diakui reputasinya. Sebagai Perdana Menteri, Hatta mengemban tugas yang sulit mengemudikan setir Republik agar tidak karam di tengah krisis. Hatta dijepit situasi yang tidak

menyenangkan ketika menerima kursi dari Amir: Indonesia hanya menjadi bagian dari Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk dan dikepalai Ratu Belanda dan yang paling berat adalah melaksanakan keabsahan garis van Mook. Hatta juga menghadapi krisis di internal militer akibat kebijakan Tentara Masyarakat dari Amir. Kebijakannya melakukan rasionalisasi untuk mengatasi dampak dari berlebihnya personel militer pun tidak berakhir mulus dan berdampak pada krisis lain yang muncul selanjutnya, termasuk di antaranya Peristiwa Madiun 1948. Tantangan pun seakan tidak habis, di akhir tahun 1948, Indonesia menerima serangan militer kedua dari Belanda yang memaksa pemerintahan pusat di Yogyakarta vakum untuk sementara karena para pemimpinnya, termasuk Hatta, diasingkan.

Tetapi, Hatta berhasil mendayung Indonesia di tengah krisis dengan memimpin delegasi Indonesia dalam KMB yang mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda. Di Den Haag, Hatta mewakili Indonesa menerima pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dari Ratu Belanda Juliana pada tanggal 27 Desember 1949. Yang tidak kalah pentingnya adalah Hatta menutup jabatan Perdana Menteri di masa RIS dengan memuluskan langkah Indonesia kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Hatta lebih condong kepada gagasan federasi, namun ia memilih diam dan membiarkan bagaimana suara terbanyak dari publik dan pemimpin yang lain memilih model negara yang cocok. Hatta tidak menggunakan jabatan kekuasaan dan nama besarnya untuk memaksakan kehendaknya, ia percaya bahwa kehendak terbanyak mengupayakan negara kesatuan adalah jalan terbaik bagi Indonesia.

TUMBUHNYA KESADARAN POLITIK

DI ANTARA DUA DUNIA

Mohammad Hatta dilahirkan di Bukittinggi, pada tanggal 12 Agustus 1902. Di masa penjajahan Belanda, kota ini disebut oleh penguasa sebagai Fort de Kock, meskipun rakyat Agam selalu menyebutnya sebagai Bukittinggi.[1] Ayah kandung Hatta bernama Haji Muhammad Djamil, seorang ulama yang mengajar di surau sekaligus pedagang, meninggal dunia dalam usia 30 tahun saat Hatta masih berumur delapan bulan.[2] Ayahnya adalah keturunan ulama besar sebab surau ayah dari kakeknya di Batuhampar, dekat Payakumbuh, adalah salah satu pusat pendidikan Islam yang terkenal di Minangkabau.[3] Batuhampar menarik perhatian orang-orang Siak (santri) dan bahkan dari Semenanjung Malaya pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk mendalami ilmu agama.[4] Surau Batuhampar menjadi salah satu pusat pendidikan Islam berkat peran dari datuk (kakek) Hatta yang bernama Syekh Abdurrahman, ulama besar yang terkenal dengan sebutan *syekh nan tuo*.[5] Sebagai anak lelaki seorang ulama dan cucu seorang pemimpin Tarekat yang terkenal, menurut Mavis Rose, tidak diragukan lagi tertanam dalam diri Hatta pengaruh yang mendalam untuk memegang teguh tradisi keagamaan keluarga.[6]

Karena sudah ditinggalkan ayahnya sejak kecil, Hatta dekat dengan ibunya yang bernama Siti Saleha. Keluarga besar ibunya berasal dari kalangan pedagang yang sukses, memiliki banyak usaha dalam bidang ekspor kayu, bisnis angkutan, dan kontrak pos dengan pemerintah.[7] Kakek Hatta dari pihak ibu yang bernama Ilyas gelar Bagindo Marah, sering dipanggil oleh Hatta sebagai Pak Gaek, adalah pedagang besar. Setelah kematian ayahnya, ibu Hatta menikah lagi dengan Haji Ning, seorang pedagang asal Palembang yang memiliki hubungan dagang erat dengan Ilyas Bagindo Marah.

Hatta kecil dididik dalam pelajaran Islam yang kuat oleh keluarga besar ayahnya. Ia bercerita bahwa sudah ada kesepakatan di antara kedua orang tuanya bahwa setelah menyelesaikan sekolah rakyat selama lima tahun, Hatta akan melanjutkan studinya ke sekolah agama di Mekkah dan setelah selesai akan melanjutkan kuliah ke Kairo.[8] Namun, jalan hidupnya berkata lain. Ibu dan pamannya mendesak agar Hatta tidak jadi dibawa ke Mekkah dan malahan ia dipindahkan dari sekolah rakyat ke sekolah dasar Belanda Europeesche Lagere School (ELS) di Bukittinggi kemudian dilanjutkan di ELS Padang mulai kelas V.[9] Sekolah tersebut hanya sedikit menerima anak-anak dari Minangkabau, menandakan bagaimana status sosial-ekonomi dari keluarga Hatta. Terhadap pilihannya ini, keluarga dari pihak ibu Hatta, yang merupakan kalangan pedagang, melihat secara visioner bahwa pendidikan merupakan suatu jalan yang dapat mengantarkan kepada profesi baru, sekaligus sarana untuk mempelajari teknik moneter Eropa.[10] Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS Padang, Hatta dapat melanjutkan studinya langsung ke Hogere Burger School (HBS), sekolah setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) di Batavia, ibukota kolonial Hindia Belanda. Namun, karena usianya yang terlampau muda, ibunya menolak permintaan Hatta untuk tinggal jauh dari keluarganya dengan merantau ke Jakarta. Akhirnya, Hatta melanjutkan pendidikan di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), sekolah setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), masih di kota Padang. Keputusan untuk bersekolah di MULO, meskipun awalnya Hatta menentang, merupakan keputusan yang bijaksana karena "di tahun-tahun sekolahnya di MULO adalah masa-masa di mana tumbuhnya minat dan kebangkitan nasional" dalam diri Hatta.[11]

PEMUDA DAN KESADARAN NASIONAL

Sejak kecil, Hatta telah bersentuhan dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dalam memorinya, ia mengingat dengan jernih bagaimana seorang teman akrab kakeknya dari pihak ibu, bernama Rais, ditangkap oleh pemerintah kolonial karena mengkritik perbuatan tidak senonoh salah seorang pembesar kolonial di Bukittinggi.[12] Kecaman dari Rais tersebut kemudian ditanggapi dengan tuduhan fitnah dari pembesar kolonial itu dengan mengatakan bahwa Rais terlibat dalam menyulut Perang Kamang, pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk Nagari Kamang melawan rencana pemerintah kolonial menerapkan *belasting* (pajak).[13] Namun, kesadaran politiknya benar-benar tumbuh ditempa ketika Hatta bersekolah di MULO. Ketika bersekolah di MULO inilah, pada bulan Januari 1918, ia mengikuti kampanye siswa di Padang di mana seorang pelajar lulusan HBS Batavia asal Sumatera Barat, Nazir Pamuntjak, memperkenalkan Jong Sumatranen Bond (JSB) kepada murid-murid sekolah menengah yang ada di Padang.[14] Nazir Pamuntjak sebagai utusan JSB pusat diminta untuk menjadi propagandis

mendirikan cabang-cabang perkumpulan di Padang dan Bukittinggi.[15] Atas upayanya tersebut, dibentulah JSB cabang Padang di mana dalam kepengurusan organisasi itu Hatta bergabung sebagai bendahara, Bahder Djohan sebagai sekretaris, dan Anas Munaf duduk sebagai ketua. Ketika aktif di JSB, Hatta terlibat mengikuti ceramah-ceramah yang diadakan oleh tokoh lokal, seperti Sutan Said Ali, guru sekolah adabiah yang kemudian dibuang ke Digul.[16] Namun, peristiwa yang berkesan bagi dirinya adalah kedatangan tokoh pergerakan, Abdul Muis, di Sumatera Barat pada bulan September 1918. Abdul Muis merupakan salah seorang pemimpin Sarekat Islam (SI) yang terpandang dan penduduk asli Bukittinggi yang sering "pulang kampung" dengan maksud "membangkitkan semangat rakyat".[17] Ia datang sebagai anggota Volksraad yang baru dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Pidato-pidato Abdul Muis menanamkan kesadaran nasional dan menggugah benak Hatta dalam memperjuangkan rakyat. Ia ingat dengan jelas ucapan Abdul Muis yang memberikan dorongan kepadanya "Anak-anak muda ini adalah harapan bangsa dan akan menjadi pemimpin rakyat pada masa datang."[18]

Selain aktif di JSB, pengalaman organisasi penting di masa MULO adalah keterlibatan Hatta dalam Serikat Usaha, semacam kamar dagang lokal tempat pedagang bumiputera berkumpul untuk memperkuat usaha mereka. Di organisasi ini, Hatta berhubungan dekat dengan sekretaris lembaga ini Engku Taher Marah Sutan, seorang pengusaha berpikiran modernis yang juga menjadi donatur bagi JSB. Di kantor Serikat Usaha, saban sore hari Hatta datang untuk membaca artikel dalam surat kabar, yang bukan saja terbitan Padang, tetapi juga terbitan Jakarta. Ia membaca tulisan-tulisan dalam koran *Neratja* yang dipimpin oleh Abdul Muis dan *Utusan Hindia*, surat kabar resmi SI yang dipimpin Tjokroaminoto. Ia juga mulai membaca *Verhandelingen van de Volksraad*, mengikuti perdebatan para pemimpin rakyat yang bersidang di sana. Perdebatan yang menarik perhatian Hatta adalah polemik antara Agus Salim dan Sosrokardono mengenai relevansi peran Volksraad bagi kemajuan rakyat.[19] Dari perdebatan dalam artikel itu, di situlah ia mengenal metode pergerakan politik antara kooperasi dan nonkooperasi.

Selesai sekolah dari MULO, Hatta melanjutkan sekolah ke Jakarta di Prins Hendrik Handels School (PHS), sebuah SMA yang memfokuskan pendidikannya pada pelajaran dagang. Hatta mengaku bahwa ia memilih sekolah ini bukan atas dasar kepentingan pribadi belajar menjadi pedagang, tetapi untuk menambah sentimen kebangsaan. Saat itu, ia menyadari bahwa penjajahan kolonial ke alam Minangkabau menyebabkan kerugian ekonomi diderita oleh rakyat.[20] Meskipun demikian, tidak bisa dinafikan bahwa Hatta memang berbakat dalam masalah keuangan. Hal ini dibuktikan dengan jalannya proses studinya yang lancar dan permintaan dari organisasi JSB pusat untuk mengangkatnya sebagai bendahara di tahun 1919. Hatta bersedia menjadi bendahara hanya dalam waktu satu tahun karena di tahun 1921 ia bersiap menghadapi ujian akhir di sekolah.[21] Meskipun hanya dalam waktu singkat di organisasi itu, Hatta berhasil menertibkan administrasi keuangan perkumpulan.[22] Bahkan ketika ia

Gambar dari kiri ke kanan: Duduk: A. Soebardjo, Sukiman (Dr.), Nazir Pamontjak. Berdiri: Djoenaedi, Moh. Hatta, Moh. Ichsan dan Dahlan Abdullah.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

meletakkan jabatan bendahara pada akhir tahun 1920, uang kas yang bermula dengan defisit dan utang kurang lebih f 800 meningkat jumlahnya kira-kira satu setengah kali.[23]

Sebagai pengurus JSB, Hatta memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh terkemuka yang berasal dari Sumatera, yaitu Agus Salim, Abdul Muis, Sutan Muhammad Zain, dan Engku Landjumin. Sudah lama Agus Salim, yang dijuluki oleh kalangan nasionalis sebagai "*the grand old man*", menjadi tokoh panutan Hatta, meskipun nanti Hatta dalam banyak hal tidak setuju dengannya.[24] Pertemuan pertama Hatta dengan Agus Salim berlangsung pada pertengahan Februari 1920 ditemani oleh ketua dan sekretaris JSB, Amir dan Bahder Djohan. Dalam pertemuan dengan Agus Salim, topik yang dibicarakan berkisar tentang politik dan ekonomi, khususnya mengenai sosialisme dan Islam.[25] Hatta dapat berdiskusi mengenai topik ini dengan lancar karena ia telah mempelajari soal sosialisme dari buku-buku tentang topik itu yang dibelikan oleh pamannya, Ayub Rais, seorang pebisnis yang ingin sekali keponakannya ini maju.[26] Ucapan yang penting pada pertemuan itu menurut Hatta adalah kritik Salim terhadap kaum terpelajar yang "tergantung di awang-awang". Agus Salim mengkritik bahwa gerakan pemuda terkurung dalam ide kedaerahan, asalnya masing-masing, dan lupa akan tanah airnya yang sebenarnya, yaitu Hindia.[27] Dalam kata Hindia Belanda, kata Agus Salim, "kita harus melenyapkan Belandanya, agar tinggal Hindia-nya bagi kita".[28]

Pasca menyelesaikan studinya di PHS, Hatta memenuhi syarat untuk masuk ke Rotterdam Handelshogeschool, sekarang menjadi Erasmus University Rotterdam, salah satu sekolah ekonomi terbaik di Belanda. Meskipun awalnya ragu karena masalah pembiayaan studi, desakan

dari pamannya untuk mencari beasiswas swasta akhirnya membuat Hatta bertekad untuk melanjutkan kuliahnya di Belanda. Hatta akhirnya memilih mengambil gelar ekonomi di Eropa bukannya belajar agama di Kairo. Pilihannya ini akhirnya berpengaruh besar dalam mematangkan perjalanan politiknya dan pemahamannya mengenai nasionalisme dan kebangsaan: mengantarkannya menjadi salah satu figur utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.

PERHIMPUNAN INDONESIA, NASIONALISME, DAN KEBANGSAAN

PERHIMPUNAN INDONESIA DAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN DI BELANDA

Setelah berlayar sebulan dari Teluk Bayur, akhirnya Hatta tiba di Rotterdam pada tanggal 5 September 1921. Hatta merupakan bagian dari generasi gelombang pelajar Indonesia yang datang ke Belanda pasca Perang Dunia I di mana jumlah pelajar Indonesia yang belajar ke Belanda meningkat drastis. Menjelang meletusnya Perang Dunia I jumlah pelajar Indonesia yang studi ke Belanda hanya berjumlah 50 orang, meningkat drastis menjadi 115 di tahun 1922 dan 130 di tahun 1924.[29] Gelombang baru kedatangan pelajar Indonesia ke Belanda tidak lagi didominasi oleh keluarga kerajaan Jawa pasca berakhirnya Perang Dunia I. Anak-anak yang orangtuanya berlatar belakang birokrat dan kelas menengah atas mulai mengirimkan anak-anaknya studi ke Belanda.[30] Peningkatan jumlah pelajar Indonesia ke Belanda, menurut Ingleson, disebabkan oleh akses lebih besar keluarga menengah atas untuk mengirimkan anak-anaknya ke sekolah tingkat dasar sampai menengah berbahasa Belanda yang dimungkinkan akibat kebijakan politik etis.[31] Sementara itu, Poeze berpendapat bahwa anak-anak Indonesia yang lulus dari sekolah menengah berbahasa Belanda bisa melanjutkan pendidikan ke Belanda tanpa ujian masuk dan tersedia banyak beasiswa pendidikan dengan syarat setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran atau hukumnya mesti bekerja pada pemerintah Belanda.[32]

Berbeda dengan generasi sebelumnya, kelompok mahasiswa yang datang setelah Perang Dunia I memiliki kesadaran politik yang lebih kuat daripada generasi mahasiswa sebelumnya.[33] Hal ini disebabkan oleh sebelum belajar di Belanda, para pemuda ini umumnya telah melibatkan dirinya dalam organisasi politik kepemudaan ketika masih berada di Indonesia.[34] Generasi baru inilah yang nantinya akan memberikan pengaruh besar dalam perubahan orientasi politik Perhimpunan Indonesia menjadi lebih radikal di pertengahan tahun 1920-an.

Pengalaman politik pertama yang Hatta rasakan setelah berkeliling di Belanda adalah menyangkut relasi stasusnya sebagai anak jajahan dan perlakuan sosial dari pemerintah dan masyarakat terhadap orang-orang dari negeri jajahan. Di Indonesia, ia merasakan diskriminasi yang kuat terhadap bangsanya, sebaliknya di Belanda, Hatta melihat hak rakyat diakui dan ditegakkan, bahkan orang-orang Indonesia diperlakukan sama dengan orang lain, tanpa adanya diskriminasi.[35] Menurut Noer, orang-orang Indonesia yang dibuang ke Belanda di tahun 1913, seperti Soewardi Soerjaningrat Tjiptomangunkusumo, akibat tulisan Soewardi

Indonesische Vereeniging di Den Haag 1923 di bawah pimpinan (Mr.) Iwa Kusumasumantri.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Soerjaningrat yang mengkritik keras pemerintah Belanda *Als ik Nederlander Was* bisa dengan tenang berlalu lalang di negeri Belanda.[36] Selain itu, ia merasakan bahwa orang-orang Indonesia tidak perlu inferior di hadapan orang kulit putih. Akibat dari penjajahan salah satunya adalah tertanamnya mental inlander, perasaan rendah diri sebagai kalangan terjajah terhadap orang Eropa yang lebih terdidik. Hatta bukanlah orang seperti ini, pengetahuannya selama di Belanda memperkuat keyakinannya yang telah terbentuk selama studi di sekolah Eropa di Hindia Belanda bahwa orang-orang Indonesia tidak kalah dari orang kulit putih dalam hal apapun.[37]

Di Belanda, Hatta tidak hanya menghabiskan waktunya menjadi mahasiswa "kutu buku". Ia sering mengesampingkan studi akademiknya demi kegiatan politik. Rasa kebangsaan dan pemahaman yang mendalam terhadap tanah airnya memang tumbuh ketika studinya di Eropa.

Hatta adalah tipe "patriot ekspatriat", sebuah terminologi yang dibuat oleh Sugata Bose untuk menyebut fenomena tokoh-tokoh antikolonial yang mekar kecintaan dan pengetahuan terhadap tanah airnya meskipun ia terpisah jauh dari tanah kelahirannya.[38] Ketika studi di Belanda, Hatta segera bergabung dengan perhimpunan pelajar Indonesia di Belanda, Indische Vereeniging. Pada awalnya, waktu didirikan tahun 1908 organisasi ini merupakan kelompok sosial yang non-politis, hanya sebagai wadah untuk "memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda dan menjaga hubungan dengan Hindia Timur Belanda".[39] Namun, semenjak kedatangan trio eksil Indische Partij, Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat, dan Tjiptomangunkusumo, yang memberikan pengaruh kepada organisasi ini, perlahan Indische Vereeniging berubah menjadi lebih melek politik: menaruh perhatian terhadap perkembangan sosial-politik di tanah air.[40]

Hatta bergabung di dalam organisasi ini ketika organisasi ini sedang menuju transformasi kematangan dalam berpolitik. Di tahun 1922, keputusan diambil oleh pengurus organisasi ini dengan mengubah nama Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging dan kelanjutannya mengganti nama Nederlands-Indië menjadi Indonesia. Menurut Hatta, pada waktu itu kata-kata Indonesiër dan adjektiva Indonesisch baru dikenal dari buku ahli hukum adat Indonesia, Prof. Van Vollenhoven, tetapi kata "Indonesia" sebagai sebutan nama tanah air adalah upaya Indonesische Vereeniging untuk mempopulerkan dan menyebarkannya.[41] Meskipun belakangan baru diketahui bahwa perkataan itu telah dipakai oleh etnolog yang beranama Logan dalam karangannya di tahun 1850 berjudul *The Ethnology of the Indian Archipelago*. Hatta bergabung menjadi bendahara di Indonesische Vereeniging di tahun 1922 dan menjadi anggota redaksi dari jurnal organisasi ini, *Hindia Poetra*.

Tahun 1923, Indonesische Vereeniging, menurut Poeze, telah meninggalkan masa lalunya sebagai "perhimpunan untuk bersenang-senang".[42] Di bawah kepemimpinan baru, Iwa Kusuma Sumantri, organisasi ini mengeluarkan tiga prinsip perjuangan yang menjadi dasar pegangan bagi Indonesische Vereeniging untuk masa yang akan datang: kemerdekaan, self-help, dan perjuangan menuju ke arah kesatuan.[43] Perubahan yang lebih radikal ini tercermin dalam jurnal mereka yang ikut berganti nama dari *Hindia Poetra* menjadi *Indonesia Merdeka*. Pergantian nama ini mengandung maksud untuk lebih menekankan lagi tujuan dari organisasi ini, yang tercantum dalam dua kata nama terbitan mereka. Dengan kata Indonesia Merdeka, Indonesische mengharapkan bahwa kata ini dapat menjadi semboyan propaganda yang menarik kalangan pemuda untuk bergerak menuju kemerdekaan.[44]

Pengalaman politik Hatta ditempa secara signifikan pada medio pertengahan tahun 1920-an ini. Setelah berganti kepemimpinan ke pengurusan baru di bawah Nazir Pamuntjak, Indonesische mengumumkan manifesto baru bahwa "hanya Indonesia yang bersatu yang dapat menyingkirkan perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuasaan penjajahan" dan "tujuan bersama, memerdekakan Indonesia, menghendaki adanya suatu aksi massa nasional yang insaf dan berdasar kepada tenaga sendiri".[45] Pamuntjak juga menegaskan politik nonkooperasi sebagai dasar dari perjuangan rakyat Indonesia. Hatta begitu terpengaruh dan pendukung dari konsep nonkooperasi dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia mempelajari bahwa gerakan ini dianut juga oleh pergerakan nasionalis di Turki dan India.[46] Hatta menyatakan bahwa "kooperasi hanya mungkin terjadi antara dua kelompok yang memiliki kewajiban yang sama, dan lebih jauh lagi, kepentingan yang sama".[47] Apabila kondisi ini tidak terpenuhi maka "kerja sama berarti mempermainkan yang lemah oleh yang kuat, memperlakukan ia sebagai alat untuk kepentingannya sendiri".[48]

Komitmen Hatta terhadap gerakan antikolonial semakin mendalam, dibuktikan dengan tulisan-tulisannya yang semakin tajam dan revolusioner. Terdapat ciri kuat dalam tulisan-tulisannya, yaitu tidak hanya didasari oleh riset ilmiah dan kaya akan data, tetapi pandangan-pandangan yang dikemukakannya dilandasi oleh situasi pergerakan antikolonial yang terjadi dalam skala global, tidak saja dalam *scope* nasional. Ini tergambarkan dalam dua tulisannya ("Indonesië in de Wereldgemeenschap" dan "Indonesia di Tengah-Tengah Revolusi Asia") di buku menyambut peringatan 15 tahun berdirinya Indonesische Vereeniging, *Gedenkboek Indonesische Vereeniging 1908–1923* yang memuat tulisan-tulisan dari para pengurusnya mengenai berbagai masalah nasional Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Hatta sendiri semakin menjadi seorang yang revolusioner. Ia adalah orang yang dapat "mendisiplinkan diri sendiri untuk menekan nafsu dan emosi alamiah dengan memusatkan seluruh jati dirinya pada pencapaian kemerdekaan Indonesia".[49] Sifat puritanisme dalam dirinya menjadi pendorong dukungan moral bagi asketisme revolusionernya.[50] Orientasi politik Hatta yang semakin politis dan revolusioner paralel dengan perubahan yang terjadi di Indonesische Vereeniging. Di tahun 1925, organisasi ini mengubah namanya, menggunakan terjemahan bahasa Melayu, Perhimpunan Indonesia (PI). Hatta menyatakan perubahan ini dengan meminjam ungkapan Multatuli "diam-diam, tanpa bersuara, padi tumbuh".[51] Ia mengakui bahwa PI bukan lagi merupakan organisasi sosial, melainkan telah menjadi "pusat kemajuan bagi gerakan nasional Indonesia".[52] Hatta sendiri ditunjuk menjadi bendahara lagi, suatu posisi yang sudah identik dengan dirinya, dalam kepengurusan PI baru di bawah Sukiman Wirjosandjojo. Meskipun, pada awalnya Hatta sempat ragu dengan keterlibatannnya dalam kepengurusan baru ini karena ia hendak menempuh ujian doktoral dan sudah terlibat telalu intens dalam organisasi dan terbitan jurnalnya, ia akhirnya menerima tugas ini.

Di tahun 1926, Hatta ditunjuk sebagai ketua PI menggantikan Sukiman. Saat terpilih sebagai ketua, Hatta mengatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan keterangan baru bagi perhimpunan, yang menurutnya sudah tepat. Namun, ia meminta bahwa dalam rapat yang akan datang ia diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang kedudukan Indonesia dalam dunia internasional. Dalam pidato itu akan dijelaskan politik yang dianut dan dijalankan oleh organisasi ini.[53] Penyampaian pidato akademik ini merupakan cara baru karena sebelumnya ketua baru hanya menyampaikan keterangan mengenai dasar-dasar dari perjuangan organisasi.[54] Dengan pidato ini (berjudul "Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen") Hatta ingin memberikan suatu model baru bahwa perjuangan memerlukan wawasan yang luas dan berlandaskan dengan semangat pengetahuan.

Dalam pidatonya ia mengunakan pendekatan filsafat, sejarah, dan ekonomi-poliitk dalam menjelaskan motif-motif ekonomi di balik kolonialisme. Merujuk pada pendapat Heraclitus, Hegel, dan Marx, Hatta berpendapat bahwa pada dasarnya pertentangan begitu mendominasi kehidupan manusia di dalam sejarah.[55] Ia kemudian mempertanyakan, apabila diakui bahwa pertentangan anasir yang menentukan dalam penghidupan masyarakat, maka faktor apakah yang menjadi penyebab pertentangan antara si penjajah dan si terjajah? Hatta menolak tesis bahwa penjajahan disebabkan oleh adanya bangsa yang aktif dan adanya bangsa yang

pasif, seperti yang dikemukakan oleh seorang cendekiawan Jerman Gustav Kremm.[56] Ia mengatakan bahwa penyebab penjajahan adalah dorongan pada kebutuhan material yang lebih banyak dari negara penjajah.[57] Untuk memutus rantai penjajahan ini, hanya satu jalan, yaitu memerdekakan diri dengan politik nonkooperasi, berdasarkan percaya kepada diri sendiri dan secara teratur mengerjakan "pembentukan negara dalam negara".[58]

Dalam analisisnya, Hatta mengungkapkan pernyataan yang menarik bahwa perjuangan Indonesia berkaitan dengan masalah Pasifik. Negeri kita, menurut Hatta, "mau tidak mau akan tertarik ke dalam drama yang akan datang … kita tahu bahwa drama itu adalah putusan terakhir daripada pertentangan ras. Propaganda luar negeri kita sebagai bagian penting daripada perjuangan politik kita, tujuannya hendaklah persatuan bangsa-bangsa Timur. Semakin tajam pertentangan ras, semakin dekat kita pada pertentangan penghabisan … dan pertentangan ini akan terjadi sepenuhnya apabila bangsa Timur mendirikan sarikat bangsa-bangsanya sendiri sebagai tantangan terhadap Liga Bangsa-Bangsa di Geneva".[59] Saat mengucapkan pidatonya itu, Hatta tentu tidak menduga bahwa analisisnya tentang Perang Pasifik akan terjadi dalam kurun 20 tahun kemudian dan akibat dari benturan konflik itu Indonesia akan meraih kemerdekaannya.[60]

MEMPELAJARI KOPERASI DI SKANDINAVIA

Minat Hatta yang besar untuk mempelajari koperasi tumbuh dengan cepat ketika ia sedang studi di Belanda. Pilihan untuk memahami koperasi didasari bahwa koperasi adalah alternatif model ekonomi yang sesuai dengan prinsip yang dianut oleh PI. Prinsip nonkooperasi, berdiri di atas kaki sendiri, dan solidaritas PI harus diterapkan dalam bidang kehidupan tidak hanya sosial, politik, tapi juga ekonomi. Menurut Hatta, di dalam PI "sudah lama dirasakan bahwa Indonesia tidak saja harus mencapai kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi".[61] Bila dalam politik, partai atau organisasi dianjurkan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Belanda atau pemimpin-pemimpinnya tidak boleh bekerja di dalam birokrasi pemerintah. Maka, di dalam bidang ekonomi, Hatta menganjurkan bahwa koperasi dengan kekuatan solidaritas rakyat dapat mendorong potensi ekonomi masyarakat Indonesia.[62] Lebih dari itu, ekonomi rakyat yang bersendi pada koperasi, menurut Hatta, akan mendorong rakyat untuk belajar berdiri sendiri, berdasarkan kemampuan kapasitas dirinya sendiri.[63] Kebersamaan dan gotong royong yang merupakan inti kehidupan bersama masyarakat Indonesia terkandung dalam gerakan koperasi.[64] Koperasi mengajarkan bahwa dengan semangat tolong menolong dan kebersamaan, anggota yang tergabung di dalamnya diajarkan untuk membicarakan masalah bersama secara demokratis dan memutuskan keputusan bersama secara musyawarah. Jadi bagi Hatta terdapat "kesejajaran fungsi dalam lembaga perwakilan politik dengan fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi, yaitu fungsinya mengembangkan kehidupan demokrasi".[65]

Kelemahan ekonomi rakyat adalah kondisi nyata bahwa rakyat Indonesia hanya mengerjakan segala usaha ekonomi yang kecil, seperti pertanian dan perdagangan kecil. Segala hal yang besar ada di tangan orang Eropa, seperti pertanian besar, impor dan ekspor, perdagangan besar, pelayaran besar, dan bank.[66] Ekonomi yang berskala menengah mayoritasnya didominasi oleh orang-orang Tonghoa dan India yang termasuk kategori *vreemde oosterlingen*. Dalam ekonomi skala menengah orang bumiputera hanyalah sekitar 10 persen dan orang yang sanggup berada dalam posisi ini adalah yang giat berusaha dan mempunyai model sendiri sebagai pokoknya, yang diperoleh dari warisan keluarganya. Menurut Hatta, itu sudah bagus apabila mereka dapat mempertahankan posisi tersebut, sebab dalam sistem kapitalisme dengan dasar kompetisi yang bebas tidak dapat diharapkan orang Indonesia yang hanya fokus pada ekonomi kecil, dapat naik ke atas.[67] Koperasi adalah model ekonomi yang merupakan alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme sebab koperasi mendorong partisipasi rakyat secara demokratis. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk membangun sistem ekonomi daripada hanya segelintir pihak saja yang menentukan keputusan ekonomi seperti dalam perusahaan multinasional.

Keyakinan terhadap koperasi diperdalam oleh Hatta melihat contoh-contoh yang terdapat di Inggris dan beberapa negara Skandinavia yang sukses dalam mengembangkan koperasi. Untuk mempelajari koperasi secara langsung Hatta bersama Samsi, dua orang ekonom dalam PI, diutus oleh kawan-kawannya agar melakukan kunjungan langsung ke Denmark, Swedia, dan Norwegia untuk belajar langsung melihat koperasi dipraktikkan di negara-negara tersebut. Denmark terkenal dengan koperasi pertaniannya yang melalui koperasi hasil pertanian, seperti mentega, keju, dan telur, diekspor sampai ke Amerika Serikat.[68] Sementara itu, Norwegia terkenal sebagai negara dengan koperasi konsumsi dan Norwegia terkenal dengan koperasi perikanan. Di Denmark, Hatta menunjungi koperasi pertanian dan dijamu oleh seorang petani setelah berkunjung ke koperasi tersebut. Di Swedia, Hatta menunjungi koperasi konsumsi di kota Stockholm dengan dijamu oleh seorang pegawai kantor pusat koperasi itu. Ia melihat koperasi konsumsi bertingkat tiga lantai, berjalan-jalan mengelilingi koperasi tersebut mengamati berbagai barang keperluan rumah tangga yang dijual di sana, mulai dari barang keperluan dapur, pakaian anak-anak, sampai perhiasan.[69] Di Norwegia, Hatta mengunjungi Bergen untuk mengunjungi koperasi perikanan. Hatta dan Samsi pergi langsung ke pelabuhan untuk melihat dengan matanya sendiri bagaimana cara mengolah ikan yang dibawa dari laut oleh para nelayan dan bagaimana mengirimkannya ke pasar-pasar di pedalaman.[70]

Berkeliling ke ketiga negara tersebut, Hatta melihat sendiri perkembangan koperasi di sana yang dapat bersaing menggalang kekuatan golongan ekonomi yang lebih bawah menghadapi perusahaan-perusahaan kapitalis yang lebih besar. Perekenomian nasional dapat disusun dengan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Dengan kehidupan koperatif, dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan kembali ekonomi dapat diletakkan. Dalam mencapai kemerdekaan nasional, kemerekaan ekonomi mesti beriringan dengan perjuangan politik. Pemikiran koperasi kemudian dikembangkan oleh Hatta dalam pembuangannya di Banda Neira dan kemudian ia

rumuskan ketika menyusun dasar-dasar ekonomi untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Pemikiran ekonomi Hatta inilah yang kemudian terumuskan ke dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

MEMPROPAGANDAKAN KEMERDEKAAN DI EROPA

Salah satu perubahan fundamental dalam organisasi ini semenjak tahun 1925 dan terutama setelah kepengurusan Hatta adalah strategi PI untuk mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di Eropa. Tujuan kemerdekaan Indonesia yang diperoleh dengan strategi solidaritas, swadaya, dan nonkooperasi tidak hanya difokuskan kepada aspek "kesatuan nasional" tetapi juga "kesetiakawanan internasional".[71] Melakukan penyebaran ide pembebasan nasional dan situasi penjajahan di Indonesia penting dilakukan untuk menarik perhatian dunia terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia. Hatta mengatakan bahwa propaganda luar negeri penting bagi gerakan kemerdekaan Indonesia sebab "dunia luar sampai sekarang tidak tahu tentang apa yang terjadi di tanah air kita, sebagai konsekuensinya secara keliru dipercayai bahwa Indonesia benar-benar mendapat berkah pemerintah Belanda".[72]

Dalam program baru PI di tahun 1925 disebutkan bahwa PI akan mengintensifkan propaganda asas-asas organisasi ini di Indonesia, selain itu program kerja tersebut mengumumkan bahwa propaganda internasional kemerdekaan Indonesia akan lebih ditingkatkan.[73] Cara yang dilakukan untuk meningkatkan penyebaran ide kemerdekaan Indonesia di Eropa adalah melalui ceramah di pertermuan-pertemuan internasional, bepergian ke negara lain, perjalanan studi, dan membangun kontak lebih luas.[74] Pembukaaan kontak dan jaringan internasional sangat diperlukan sebagai jembatan pembuka untuk mempublikasikan bagaimana situasi penjajahan yang terjadi di Indonesia dan bagaimana reaksi dunia internasional terhadapnya. Inisiatif internasionalisasi jaringan yang dilakukan PI, menurut Ali Sastroamidjojo, "mencerminkan kesadaran PI bahwa nasionalisme Indonesia tidak berdiri sendiri, faktor internasionalisme disadari sebagai unsur penting di dalam perjuangan kemerdekaan nasional".[75]

Ketika Hatta memegang tampuk kepemimpinan PI di tahun 1926, ia langsung berpikir strategis mengenai taktik PI meluaskan pengaruhnya di dunia internasional dengan membangun kontak dan jaringan dengan gerakan antiimperialisme Asia dan Afrika di Eropa. Paris kemudian dipilih sebagai tujuan dari PI untuk memperkuat jaringan pergerakan antikolonial Indonesia. Alasan pemilihan Paris adalah karena ibukota Perancis ini dikenal sebagai "anti-imperial metropolis", meminjam istilah Michael Goebel, di mana mulai dari mahasiswa, aktivis, migran, intelektual, eksil dari mancanegara Asia, Afrika, Amerika Latin berkumpul membangun gerakan antiimperialisme.[76] Selain itu, para mahasiswa Indonesia di Belanda telah familiar dengan atmosfer antiimperialisme internasional Paris karena mereka basanya pergi ke sana untuk liburan, studi, atau bertemu dengan aktivis antikolonial lainnya dari Asia

Jaringan politik internasional PI mulai terbuka ketika mereka berhasil bergabung dengan organisasi Association pour l' étude des Civilisations Orientales (AECO) di Paris lewat bantuan perwakilan mereka di sana, Arnold Mononuntu. Organisasi ini memiliki misi untuk menyatukan mahasiswa dan intelektual dari berbagai koloni di Asia agar mengenal kebudayaannya satu sama lain dan memperkenalkan peradaban Timur yang kaya kepada publik Barat melalui sejarah, seni, dan pertunjukkan kebudayaan.[77] Menurut Hatta, meskipun perhimpunan ini menunjukkan minatnya pada studi budaya Timur, tetapi tidak kurang unsur politik di dalamnya.[78] Melalui lobi dari AECO kepada Marc Sangnier, bekas pimpinan parlemen Perancis, PI mendapatkan kesempatan untuk diundang dalam Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian (Congrès Démocratique International pour la Paix) di Bierville, sebuah desa kecil 120 kilometer Barat laut Paris. Hatta kemudian berangkat mewakili PI ke Bierville. Kedatangannya ke sana, dilukiskan dalam memoirnya, terutama "untuk memperkenalkan nama negeriku Indonesia kepada dunia internasional".[79] Dalam konferensi di Bierville tersebut, delegasi Asia dipersilakan untuk menyampaikan pandangannya secara kolektif, kemudian secara individu mewakili negeri mereka. Hatta mengungkapkan dalam pidatonya mengenai lokasi geografis Indonesia dan berbicara bahwa dirinya mewakili Indonesia yang mungkin banyak orang dalam kongres tersebut baru dengar pertama kali. Setelah pidato Hatta, orang-orang Belanda yang pada permulaan masih menyebut "Hindia Belanda" tidak menggunakan lagi kata itu, apalagi setelah mereka berdiskusi dengan Hatta tentang istilah itu.[80] Hatta lebih jauh mengungkapkan bahwa "masalah perdamaian dunia adalah masalah kemerdekaan bangsa-bangsa. Siapa pun yang menghendaki perdamaian menginginkan kemerdekaan setiap bangsa".[81] Hatta menutup pidatonya dengan pernyataan bahwa perdamaian dunia hanya bisa diselematkan hanya pertama-tama dengan cara melawan rezim kolonial yang tidak adil.[82]

Pasca konferensi demokrasi internasional yang sukses itu, kontak yang terbangun antara PI dengan jaringan antiimperialisme internasional semakin intensif. Puncaknya adalah ketika mereka mendapat undangan untuk menghadiri satu konferensi antikolonial yang mahapenting di masa *interwar*: Kongres Melawan Penindasan Kolonial dan Imperialisme (Congress Against Colonial Oppression and Imperialism). Konferensi ini begitu penting karena untuk pertama kalinya tokoh-tokoh utama gerakan antikolonial bertemu. Di sinilah Hatta yang mewakili PI bertemu dengan Jawaharlal Nehru (India), Lamine Senghor (Senegal), Hansin Liu (Cina), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), Messali Hadj (Aljazair), dll.[83] Hatta dalam konferensi ini diberi kehormatan menduduki kursi presidium kongres.[84] Semaun yang hadir mewakili Sarekat Rakyat juga mewakili presidium kongres. Dalam Kongres Melawan Penindasan Kolonial terdapat 174 delegasi mewakili 134 organisasi, asosiasi, dan partai politik dari 34 negara. Presiden kehormatan dari konferensi ini adalah peraih nobel Albert Einstein dan Romain Rolland, bersama dengan janda dari Sun Yat Sen, yaitu Soong Ching-Ling, dan pemimpin Partai Buruh Inggris, George Lansbury.[85]

Hatta mengatakan dalam *Indonesia Merdeka* bahwa kongres ini merupakan "peristiwa terpenting yang disaksikan dalam abad kita, itulah

kongres pertama melawan tekanan imperialisme dan kolonial!"[86] Dalam Konferensi Brussels setiap perwakilan delegasi diberikan kesempatan untuk membicarakan persoalan penjajahan di negeri mereka dan bagaimana perkembangan situasi pergerakan antikolonial. Konferensi mendukung penuh perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia dan akan membantu dengan sekuat tenaga pergerakan itu dan juga menuntut pemerintah Belanda memberikan kemerdekaan sepenuhnya bagi Indonesia, menghapuskan pembuangan dan hukuman mati, serta memberikan amnesti umum.[87]

Keterlibatan PI di Brussels bermanfaat secara mendalam bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia karena organisasi ini mampu meluaskan pesan propaganda kemerdekaan kepada dunia internasional dan membangun jaringan dengan para tokoh nasionalis ternama. Melalui konferensi ini, misalnya, dimulailah hubungan antara Hatta dengan Nehru yang berlanjut akrab sampai masing-masing negeri mereka merdeka dan keduanya menjadi negarawan yang berpengaruh. Konferensi Brussels menjadi momen di mana mereka tidak hanya berkenalan, tetapi juga membangun jaringan yang akan bermanfaat di masa depan.

Konferensi Brussels menyepakati usulan untuk mendirikan sebuah organisasi bernama Liga Melawan Imperialisme di mana Hatta duduk di dalam komite eksekutifnya bersama Nehru, Messali Hadj, Senghor, dan juga Semaun. Bergabungnya PI di Liga Melawan Imperialisme dan juga ikut sertanya mereka di Kongres Melawan Penindasan Kolonial dianggap sebagai upaya semakin radikalnya mahasiswa Indonesia melawan pemerintah Belanda. Apalagi di dalam kongres dan organisasi internasional tersebut berisikan aktivis dan organisasi antikolonial berpengaruh dan juga terdapat elemen komunis sehingga membuat ketakutan dari pihak Kerajaan Belanda. Salah seorang pemimpin PI, Ali Sastroamidjojo, mengatakan bahwa pemerintah Belanda marah dengan opini-opini yang disampaikan oleh delegasi Indonesia di Brussels, dihadiri oleh berbagai tokoh politik, budaya, dan akademik dari berbagai penjuru dunia, yang membalikkan argumentasi yang selama ini dipercayai bahwa kebijakan kolonialisme Belanda di Indonesia adalah yang paling baik dan paling manusiawi.[88] Di bulan Juni 1927, polisi Belanda melakukan penggeledahan di markas Perhimpunan Indonesia dan beberapa rumah anggotanya. Banyak dokumen yang disita dari penggeladahan ini. Pemberitaan mengenai penggeledahan dan penyitaan tersebut menjadi berita di surat kabar-surat kabar Belanda.

Dalam salah satu berita diungkapkan bahwa pemimpin organisasi tersebut, Moh. Hatta, dikabarkan lari ke luar Belanda. Padahal ketika peristiwa itu terjadi, Hatta sedang berada di Samaden, Swiss, menjenguk salah seorang mantan anggota PI yang dirawat akibat penyakit TBC. Saat membaca sebuah koran Jerman, *Vorwärts*, di Swiss tersebut, ia tertawa membaca berita tentang pelarian ketua PI ke luar Belanda.[89] Setelah kembali ke Den Haag, Hatta mendapatkan cerita bahwa tidak ada anggota PI yang ditahan, namun tulisan-tulisan, arsip, dan beberapa seri *Indonesia Merdeka* disita oleh polisi Belanda. Pada bulan September 1927, akhirnya pemerintah Belanda menahan aktivis-aktivis PI, seperti Ali Sastroamidjojo, Abdul Madjid Djojodiningrat, Nazir Pamontjak, dan termasuk Moh. Hatta.

Hatta ditangkap oleh polisi Belanda beberapa hari setelah pulang dari Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan di Gland, Swiss. Ia memberikan pidato berjudul "*L'Indonésie et sôn Problèm de l'Indépendence*". Setelah kembali ke Belanda, via Paris, datang dua polisi ke rumahnya di Den Haag membawa surat perintah penangkapan untuk menahan Hatta. Ia kemudian dibawa ke penjara di Casiusstraat untuk menunggu diadili atas tuduhan (1) menjadi anggota perkumpulan terlarang (2) terlibat dalam pemberontakan di Indonesia (3) menghasut untuk menentang Kerajaan Belanda.[90]

PLEDOI INDONESIA MERDEKA

Dalam tahanan, Hatta mempersiapkan pledoinya dengan menyusun pembelaan yang sistematis dan ilmiah. Sewaktu di penjara ini, ia meminta untuk dibawakan buku-buku mengenai hukum konstitusi dan ilmu politik, khususnya buku-buku Krabbe dan Kranenburg, beserta satu set lengkap majalah *Indonesia Merdeka*, untuk membantu menyusun pembelaan.[91] Hatta menyusun pidato pembelaannya, yang nantinya berpengaruh terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia, berjudul *Indonesia Vrij* (Indonesia Merdeka). Teks pembelaannya tersebut jika dibacakan seluruhnya akan berlangsung selama tiga setengah jam. Hatta memulai pembelaan politisnya dengan mengeksplorasi perkembangan Indonesia dari masa sebelum kedatangan penjajah ke masa penjajahan. Ia mengatakan bahwa suatu kewajaran jika bangsa-bangsa di Asia Tenggara melawan penjajahan bangsa Barat sama seperti yang pernah dialami oleh rakyat Belanda kepada Spanyol yang pernah menguasai negerinya selama 80 tahun.[92] Hatta melanjutkan bahwa lewat analisis hubungan kolonialisme dan negeri jajahan, PI memperoleh sebuah realitas bahwa perhubungan itu dikuasai oleh dua tenaga yang bertentangan tujuannya, yaitu pendirian Belanda yang akan mempertahankan wilayah jajahannya apapun yang terjadi dan Indonesia yang meyakini perjuangannya ke arah kemerdekaan.[93]

Hatta menolak pendapat jaksa bahwa PI yang dipimpinnya akan menggunakan jalur kekerasan untuk meraih kemerdekaan. Ia menyatakan bahwa yang menggunakan cara-cara kekerasan justru adalah pemerintah kolonial dengan menindak pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui jalur kekerasan. Namun, Hatta juga tidak membantah bahwa kekerasan tidak akan terjadi dalam pertentangan antara penjajah dan yang dijajah. Hal itu dapat terjadi apabila pihak penjajah tidak mau mengubah sikap, pendirian, dan kekerasannya.[94] Penggunaan cara kekerasan yang dilakukan oleh pihak penjajah hanya akan memperkuat keyakinan pihak terjajah bahwa "kemerdekaan hanya dapat diperoleh dengan kekerasan".[95] Hatta menyanyangkan penangkapan mahasiswa Indonesia di Belanda ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Belanda, di mana hak asasi manusia dijunjung tinggi. Ia juga mengemukakan bahwa para orangtua pelajar Indonesia ini di tanah air diancam akan dikeluarkan dari jabatannya di pemerintahan dan dilarang untuk mengirimkan uang kepada anaknya di Belanda selama ia masih menjadi anggota PI.[96] Hatta mengatakan "cara mengadakan provokasi, cara menekan para

pelajar Indonesia di sini supaya hidup sengsara dan menderita, bertentangan dengan hukum dan berdosa".[97]

Dalam menutup pledoinya, Hatta percaya bahwa "Sinar merah masa datang sudah mulai menyingsing sekarang. Kami menghormati itu sebagai datangnya hari baru". Para pemuda Indonesia memiliki tugas untuk mengemudikan ke jurusan yang benar agar dapat mempercepat datangnya hari baru itu. Ia menambahkan "mudah-mudahan rakyat Indonesia merasa merdeka di bawah langitnya dan mudah-mudahan mereka menjadi tuan sendiri di dalam negara yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka".[98] Ia menutup pidato pembelaannya tersebut dengan mengutip kata-kata seorang penyair Perancis, René de Clerq: "*Daar is maar een land, dat mijn land kan zijn, het groeit naar de daad, en die daad is mijn*" (Hanya satu tanah yang dapat disebut Tanah Airku, ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu adalah usahaku).[99]

Pembelaan para advokat dan para anggota PI akhirnya berhasil. Pengadilan memutuskan bahwa Hatta dan kawan-kawannya dinyatakan tidak bersalah dari semua tuduhan. Keputusan ini diterima dengan meriah oleh berbagai kalangan di Belanda, terutama oleh SDAP, yang merupakan partai politik kedua terbesar di Belanda waktu itu. Beberapa orang anggota PI sering diminta berpidato dalam rapat-rapat umum, Hatta sendiri diminta berbicara di Amsterdam. Pledoi Hatta yang panjang itu akhirnya diterbitkan menjadi buku dan menjadi bacaan standar bagi kelompok pemuda pergerakan dan kelompok studi di Indonesia.[100]

MEMIMPIN PERGERAKAN DI INDONESIA

PNI BARU DAN PENDIDIKAN POLITIK

Akibat aktivitas politiknya di negeri Belanda, studi Hatta di Rotterdam terpaksa mundur hingga sebelas tahun dari waktu normal yang biasanya selesai lima tahun. Dalam proses penyelesaian doktornya, Hatta masih memikirkan situasi politik di tanah air, terutama bagaimana nasib pergerakan nasional pasca penggembosan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) dan para penggeraknya. Membaca situasi politik pergerakan di tanah air yang muram, Hatta meminta Sjahrir, mahasiswa hukum di Universitas Amsterdam, untuk pulang mendirikan sebuah organisasi Golongan Merdeka yang kemudian diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Hatta mempercayai Sjahrir sebab anak muda cerdas itu memiliki pemikiran yang sama dengannya. Ditambah, Sjahrir adalah seorang pemimpin muda yang memiliki pengikut di Bandung saat menjabat sebagai ketua Pemuda Indonesia dan ia punya pengalaman di serikat buruh Belanda ketika bekerja paruh waktu di bawah Edo Fimmen, di sekretariat Serikat Buruh Angkutan Internasional.[101] Hatta dan Sjahrir melihat urgensi pembuatan organisasi baru yang dapat melanjutkan masa depan pergerakan nasional. Selain itu, organisasi baru ini dalam bayangan keduanya memiliki konsep, tujuan, dan model pengorganisasian politik yang berbeda dari PNI.

Hatta kembali ke Indonesia tanggal 20 Juli 1932 dari Rotterdam, melewati Paris dan Genoa. Dari Genoa, ia menumpang kapal Jerman ke Singapura. Di Singapura, Hatta merasakan bahwa sikap nonkooperatifnya menimbulkan masalah untuknya. Ia merasakan bahwa ketika ia berkeliling di Singapura, polisi rahasia membuntuti dirinya. Sesampainya di Tanjung Priok, polisi memeriksa barang bawaannya, terutama 16 peti besi berisi buku-buku koleksinya selama di Belanda. Karena buku-buku yang dibawa Hatta begitu banyak, polisi pelabuhan membutuhkan waktu tiga hari untuk memeriksa barang bawaannya. Semua bukunya bisa lolos kecuali koleksi majalah *Indonesia Merdeka* yang disita oleh mereka. Untungnya, majalah itu sudah diselundupkan sebelumnya kepada kenalan Hatta tukang minyak yang bekerja di kapal Rotterdamse Llyod sehingga dapat masuk dengan selamat di Jakarta.[102]

Di Jakarta, Hatta beruntung memiliki famili yang kaya dan mendukung aktivitas pergerakannya. Ia tinggal dengan kakak iparnya dan buku-bukunya ditempatkan di rumah pamannya yang juga menjadi ruangan kerjanya. Hatta mulanya diminta menjadi sekretaris direksi oleh Etek Ayub, Etek Djohan, dan Etek Djohor untuk mengurus bisnisnya, tetapi ia menolak karena waktunya akan dihabiskan sepenuhnya dalam pergerakan kemerdekaan. Hatta segera aktif dalam mencurahkan waktunya di politik dengan membagi waktunya tiap minggu, empat hari di Jakarta dan tiga hari di Bandung karena Bandung adalah markas utama dari PNI baru.[103] Di Jakarta, Hatta membagi waktu antara membaca, mempersiapkan tulisan, bertemu dengan rekan-rekannya di PNI baru, dan mampir ke kantor administrasi dan redaksi *Daulat Ra'jat*, majalah dari PNI baru. Meskipun pada awalnya, Sjahrir yang terpilih memimpin PNI baru, menurut Burhanuddin, salah seorang pengurus partai, di mata anggota Bung Hatta yang menjadi "semangat pembimbing" partai baru itu.[104]

Dalam karangannya di *Daulat Ra'jat* no. 36, tanggal 10 September 1932 berjudul "Pendirian Kita", Hatta menuliskan sebabnya masuk ke PNI baru dan menjelaskan dasar dari organisasi tersebut. Menurut Hatta, PNI baru belumlah sebuah partai, tapi sebuah organisasi bagi kaum daulat rakyat: "Pendidikan! Bukan atau belum lagi partai, bukan karena khilaf atau curiga diambil nama "pendidikan", melainkan dengan sengaja".[105] Beberapa pihak menertawakan perkumpulan tersebut, sebagai "sekolah-sekolahan". Meskipun begitu, Hatta mengatakan bahwa memang orang-orang di dalam PNI baru ingin "bersekolah" dahulu, bersekolah untuk membentuk budi dan pekerja, bersekolah untuk memperkuat iman, bersekolah untuk memperkuat pengetahuan. Sifat dari organisasi baru ini memang pendidikan, karena memang tujuan dari didirikan organisasi ini adalah mendidik diri kita.[106] Politik, bagi Hatta, adalah terutama mengenai pendidikan, sebab kalau rakyat tidak memiliki pemahaman, politik dalam pengertian biasa tidak dapat dijalankan. Oleh sebab itu, pendidikan yang jelas dengan kurikulum yang sistematis dan bahan-bahan yang jelas diperlukan untuk memberikan didikan yang sempurna.

Dasar dari pendidikan PNI baru adalah kedaulatan rakyat. Pesan-pesan mengenai kedaulatan rakyat itu berusaha disampaikan melalui jurnal mereka *Daulat Ra'jat* semenjak ia berdiri. Kedaulatan rakyat menjadi inti tujuan dari PNI baru karena nasib rakyat sampai saat itu belum ditentukan oleh diri mereka sendiri,

baik secara sosial-politik maupun ekonomi. Oleh sebab itu, melalui pendidikan diharapkan rakyat mengetahui situasi dan kondisi yang mereka hadapi dan mengapa mereka harus berjuang menegakkan kedaulatan mereka. Menurut Hatta, "kemerdekaan Indonesia tidak dapat dicapai oleh pemimpin-pemimpin saja, melainkan oleh usaha dan keyakinan rakyat yang banyak. Nasib rakyat Indonesia tergenggam di dalam tangan rakyat sendiri".[107] Mendidik rakyat agar dalam diri mereka timbul semangat merdeka adalah pekerjaan PNI baru yang utama. Namun, pekerjaan itu tidak mudah dan lekas tercapai.

Demokrasi dan agitasi, menurut Hatta, adalah mudah karena tidak bekerja dan usaha terus menerus. Agitasi mampu membangkitkan semangat orang banyak, namun ia alpa dalam membentuk pikiran orang banyak. Agitasi baik sebagai pembuka jalan, namun menurut Hatta "didikan membimbing rakyat ke organisasi! Sebab itu usaha kita sekarang: pendidikan!".[108] Hatta turun langsung berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia untuk memberikan kursus kepada kader-kader PNI baru. Kader-kader yang dididik dalam kursus-kursus ini diharapkan agar dapat menjadi penghubung antara pemimpin pusat dan rakyat.[109] Untuk membentuk kader-kader yang memiliki basis pengetahuan yang cukup maka para pendidik wajib membaca beberapa bacaan pokok, yakni *Daulat Ra'jat*, Moh. Hatta *Indonesia Vrij* dan *Tujuan dan Politik Pergerakan Nasional di Indonesia*, serta Sukarno *Indonesia Menggugat*.[110] Selain itu, para kader harus melalui serangkaian ujian yang diselenggarakan oleh organisasi untuk membentuk pemahaman yang cukup mengenai kedaulatan rakyat. Pokok-pokok ujian adalah (1) sejarah umum Indonesia, terutama mengetahui perbedaan antara politik kooperasi dan nonkooperasi (2) imperialisme dan pertumbuhannya (3) kapitalisme dan perkembangannya (4) kolonialisme (5) kedaulatan rakyat.[111]

Dalam daftar bacaan yang diberikan oleh PNI baru, meskipun Hatta dan Sukarno berbeda orientasi dan pengorganisasian dalam membangun pergerakan politik, namun Hatta mendorong para kader membaca tulisan Sukarno *Indonesia Menggugat*. Sebabnya adalah tulisan tersebut memang mendeskripsikan mengenai situasi penjajahan yang dialami oleh Indonesia dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hatta menyadari bahwa teks itu adalah teks yang penting yang lahir dari pembelaan seorang tokoh pergerakan nasional utama Indonesia mengenai dasar Indonesia untuk merdeka. Oleh sebab itu, Hatta mendorong teks tersebut menjadi bacaan wajib bagi kader-kader baru organisasi PNI baru.

Di bulan Oktober 1932, Hatta mengunjungi kampung halamannya di Sumatera Barat. Tujuan Hatta pulang kampung adalah selain menemui keluarga, ia akan mengunjungi beberapa cabang PNI baru di Sumatera Barat, yaitu di Bukittinggi, Padang Panjang, dan Padang, serta mempersiapkan cabang baru di Maninjau. Dalam tiap kunjungan ke cabang-cabang PNI baru ini, Hatta selalu memberikan sedikit pandangan mengenai organisasinya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam mudiknya ini ia mempersiapkan brosur "Ke Arah Indonesia Merdeka", yang pokok-pokok gagasannya sebetulnya sudah Hatta sampaikan dalam kursus-kursus sebelumnya kepada kader-kader PNI baru. Menurut Hatta dalam brosur tersebut, ada tiga alternatif yang dapat dipilih Indonesia untuk sistem pemerintahannya di masa depan: pemerintahan oleh aristokrasi, pemerintahan oleh kaum terdidik, dan pemerintahan oleh rakyat.[112] Ia berpendapat bahwa kaum aristokrat jelas mendukung Belanda dan ingin mempertahankan *status quo* mereka sebagai penguasa. Sementara itu, kaum terpelajar merasa bahwa mereka memiliki hak untuk memerintah Indonesia merdeka karena kapasitas dan keahlian mereka. PNI baru mendorong pemerintahan ke arah pemerintahan kedaulatan rakyat. Menurutnya, pemerintahan ini dapat dicapai dengan menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Indonesia harus mendahulukan semangat kerja sama rakyat untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Tak lama kemudian setelah terbit brosus Hatta tersebut, Sukarno tak mau kalah menerbitkan makalah "Mencapai Indonesia Merdeka".

Kedatangan Hatta di Minangkabau dalam mempopulerkan PNI baru tidak seluruhnya berjalan lancar. Selain memang aktivitas politiknya dimata-matai oleh pemerintah, organisasi barunya dikritik oleh pihak Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) dan PSII yang memiliki hubungan erat dengan PNI Sukarno dan Partindo (Partai Indonesia). Permi, misalnya, mengkritik dalam harian *Tjaja Sumatera* bahwa PNI baru adalah partai kecil yang tiap cabangnya hanya memiliki delapan anggota.[113] Selain itu, para pendiri dan penggerak organisasi tersebut, seperti Hatta, Darwis Thaib, dan Datuk Medan Labih adalah pecatan (royer) dari organisasi mereka sebelumnya sehingga partai Hatta sebaiknya dinamakan PRI (Partai Royeran Indonesia). Namun, editorial *Daulat Ra'jat* menyanggahnya dengan menyatakan bahwa PNI baru tidak pernah meremehkan partai-partai Islam di Minangkabau, seperti Permi dan PSII, tetapi PNI baru berhak memiliki pandangannya sendiri mengenai gerakan yang dijalankan. PNI baru tidak menjelek-jelekkan dasar PSII, yaitu Islam, dan dasar Permi, yaitu Islam dan nasionalisme. PNI baru memiliki keyakinan terhadap prinsipnya sendiri, yaitu nasionalisme dan kedaulatan rakyat.

Perbedaan pandangan antara PNI baru dan PNI lama, yang kemudian banyak anggotanya hijrah bergabung ke Partindo setelah PNI dibubarkan, merupakan warna dari pergerakan kemerdekaan di awal tahun 1930-an. Meskipun Hatta dan Sukarno dikenal sebagai dwitunggal, namun hubungan mereka diwarnai oleh persahabatan dan perdebatan. Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut dalam membangun gerakan, misalnya, mempengaruhi cara organisasi mereka bekerja dan bagaimana membangun pergerakan. Ditambah lagi, di awal tahun 1930-an, keduanya berdebat dengan hebat mengenai konsepsi partai kader atau partai massa juga mengenai nonkooperasi dalam pergerakan nasional. Meskipun Hatta mengaggumi ketokohan Sukarno dan Sukarno mengakui kecerdasan Hatta, kedua tokoh itu tidak segan saling bertukar kritik dan pendapat dalam membangun politik pergerakan. Inilah yang membuat pergerakan politik Indonesia menjadi dinamis.

SUKARNO DAN HATTA: PERSAHABATAN DAN PERDEBATAN

Meskipun sama-sama berjuang untuk memerdekakan Indonesia, keyakinan Sukarno dan Hatta dalam membangun organisasi dan cara-cara yang ditempuh organisasi seringkali berseberangan. Perbedaan pendapat di antara mereka dalam membangun pergerakan pertama kali mengemuka di tahun 1920-an. Ketika Hatta masih menjadi pemimpin dari PI, ia mengusulkan pergerakan di tanah air untuk membentuk suatu partai nasional yang radikal, berpegangan kepada kebangsaan, dan bisa menggerakkan massa untuk mendorong kemerdekaan.[114] Hatta mengharapkan kawan-kawannya di PI yang telah kembali ke Indonesia untuk mendorong cita-cita tersebut. Namun, para anggota PI yang telah pulang ke tanah air kurang memegang peran garis depan galam pergerakan nasional. Penghubung Hatta dengan tanah air adalah Sudjadi, seorang pegawai kantor keuangan pemerintah di Jakarta. Sudjadi lah yang memberikan laporan kepada Hatta bahwa beberapa organisasi, seperti Budi Utomo, Jong Java, dan Jong Sumatranen Bond, tidak bisa didorong untuk menjadi organisasi yang lebih radikal.

Hatta dalam suratnya kepada Sudjadi menyarankan agar partai yang menghimpun kekuatan pergerakan politik nasional diberi nama Sarekat Rakyat Nasional Indonesia (Nationaal Indonesische Volkspartij). Ia memilih kata *volk* yang berarti rakyat atau bisa juga bangsa agar dapat menarik dukungan gerakan yang lebih besar. Namun, Hatta mengakui bahwa ia pesimis bahwa banyak dari anggota PI yang ikut serta mendorong gerakan ini, sebab menurutnya "mereka sebagian besar orang turut-turutan saja dahulu".[115] Hanya beberapa orang yang dapat diharapkan untuk mendukung gerakan ini, seperti Iskaq Tjokroadisurjo, Sartono, dan Darmawan, serta Soebardjo nanti ketika ia kembali. Meskipun demikian, ide Hatta ini tidak disetujui oleh kelompok Algemeene Studieclub (AS), sebuah perkumpulan politik pemuda di Bandung yang didirikan oleh Sukarno, Anwari, Iskaq, dan Tjiptomangunkusumo di tahun 1925. Rencana mendirikan Sarekat Rakyat Nasional Indonesia (SRNI) didukung oleh Iskaq dan Budhyarto yang merupakan bekas anggota PI, namun mereka gagal mengangkat ide itu di Algemeene Studieclub. Malahan, Sukarno dan kawan-kawannya mendirikan dua tahun kemudian Partai Nasional Indonesia.

Gagalnya ide Hatta tersebut menimbulkan berbagai analisis yang mencoba menganalisis mengapa gagasannya tersebut tidak didukung oleh Algemeene Studieclub. Seorang sejarawan Australia, John Ingleson, mengatakan bahwa terjadi perbedaan pandangan mengenai siapa yang lebih memahami situasi Indonesia antara pengurus PI yang berada di Belanda dan AS yang berada di Bandung.[116] Sementara itu, Deliar Noer menuliskan bahwa dari segi psikologi apa yang diungkapkan oleh Hatta kurang perhitungan sebab mereka yang berada di Bandung tidak pernah berdiskusi dengan Hatta dan tentu memiliki pertimbangannya sendiri.[117] Terlepas dari itu, Hatta memiliki dugaannya sendiri. Ia merasa bahwa rencana SRNI dianggap terlalu moderat karena didalamnya ada rencana mengenai pemilihan umum dan ini dianggap berseberangan dengan politik nonkooperasi yang menolak sama sekali model dewan rakyat.[118]

Hatta juga mengungkapkan dalam konferensi International Association of Asian Historian di Yogyakarta tahun 1974, bahwa partai tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip PI, meskipun nonkooperasi tapi mengutamakan pembinaan organisasi dan bukannya mengembangkan politik agitasi.[119] Lebih dari itu, kongres nasional yang diadakan setiap tahun mesti menyediakan forum bagi wakil yang dipilih rakyat, termasuk para wakil yang berasal dari partai kooperasi namun dipilih rakyat. Kongres tersebut akan menjadi badan perwakilan rakyat yang sesungguhnya yang akan membahas segala apapun problem rakyat. Hal inilah, sebagai badan perwakilan rakyat dan forum yang membicarakan masalah rakyat, akan membedakannya dari dewan rakyat.[120]

Namun, di luar perbedaan keyakinan politik tentang pembangunan pergerakan, Hatta mengakui kapasitas Sukarno dan pentingnya PNI dalam mempercepat tercapainya cita-cita kemerdekaan. PNI adalah salah satu garda depan pergerakan Indonesia yang paling keras mengecam penjajahan Belanda. Hatta merasa bahwa PNI adalah kebangkitan kembali gerakan di Indonesia yang telah jauh mundur akibat dipukulnya PKI oleh pemerintah kolonial.[121] Prinsip politik PNI sama dengan PI, yaitu kemerdekaan, persatuan, berdikari, dan nonkooperasi. Namun, Hatta mengakui bahwa PNI adalah partai besar yang berhasil menggalang partisipasi massa untuk bergerak mendukung kemerdekaan Indonesia.[122] Kekuatan PNI bukan hanya pada prinsip-prinsip yang dipopulerkannya, melainkan kemampuan orasi Sukarno dan agitasi partai yang berhasil menarik massa dalam jumlah besar. Kepopuleran PNI yang tersebar luas di kota-kota di Indonesia membuat *Indische Courant* menamakan periode pergerakan kebangsaan di akhir tahun 1920-an sebagai "*de moesim PNI*".[123]

Ketika pemerintah kolonial mulai bersikap represif terhadap PNI, Hatta dengan keras menentang tindakan tersebut. Hatta berpendapat bahwa polisi kolonial melakukan penyalagunaan wewenang dengan melarang Sukarno dalam rapat PNI di Solo menggunakan kata-kata kemerdekaan dan pemerasan, serta berbicara terlalu lama di muka publik.[124] Hatta juga bersikap keras terhadap penggeledahan rumah-rumah anggota dan kegiatan PNI yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di 400 rumah di Jawa, 50 di Sumatera, 28 di Sulawesi, dan beberapa lainnya di Kalimantan. Puncaknya ketika para pemimpin PNI, Sukarno, Gatot Mangkupradja, Maskun, dan Supriadinata, ditangkapi, Hatta menulis artikel mengenai "De Vernietiging der PNI" pada bulan Januari 1931. Ia mengatakan bahwa penangkapan tersebut merupakan suatu "penegakkan terhadap prestise kekuasaan pemerintahan kolonial" dan memang bermaksud menghancurkan PNI agar tidak melakukan perlawanan lagi kepada pemerintah. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa pengadilan terhadap keempat tokoh PNI itu adalah sebuah komedi sebab banyak saksi yang diatur oleh mereka untuk memperkuat argumen pemerintah. Namun, Hatta yakin bahwa meskipun para pemimpin politik ini dihukum, perjuangan kemerdekaan tidak akan hancur karena itu, sebab massa akan mencari jalannya sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaannya.

Ketika Hatta kembali dari masa studinya yang panjang di Belanda, salah satu tokoh yang ditemuinya sebulan sejak kepulangannya adalah Sukarno di Bandung. Ia belum pernah bertemu langsung dengan Sukarno, hanya mengenal kemasyhuran namanya melalui surat kabar dan korespondensi dengan kawan-kawannya di tanah air. Hatta diajak bertemu Sukarno di Bandung oleh Haji Usman, saudara jauh dari Mak Eteb Ayub yang merupakan saudagar muda di toko Padang di Kramat, yang tahu bahwa kedua tokoh muda ini belum pernah bertatap muka. Hatta tiba di Bandung tanggal 25 September 1932. Awalnya Hatta datang ke kediaman Sukarno di Astana Anyar, namun Sukarno sedang tidak ada. Sukarno kemudian menemui Hatta di penginapan Hatta di hotel di Jalan Pos Timur pada malam hari. Sukarno datang bersama Maskoen, kawan lamanya di PNI yang berpindah ke PNI baru. Sambil minum kopi dan teh, kedua tokoh ini bertukar cerita. Sukarno menceritakan pengalamannya di Sukamiskin kepada Hatta. Namun, tidak ada pembicaraan mengenai persatuan antara Partindo dan PNI baru.

Sebetulnya usaha untuk mempersatukan PNI baru dan Partindo telah diusahakan Sukarno melalui Maskoen. Maskoen adalah orang yang pernah tinggal bersama Sukarno dan istrinya Inggit di Bandung dan sangat mengenal tokoh PNI tersebut. Ia termasuk tokoh awal PNI yang langsung dimentori oleh Sukarno. Mengetahui setelah keluar dari penjara Sukamiskin Maskoen masuk ke PNI baru, Sukarno menyuruhnya untuk menyelenggarakan rapat-rapat umum bersama antara PNI baru dan Partindo untuk mengupayakan persatuan.[125] Dua bulan kurang lebih rapat bersama dilakukan antara kedua organisasi ini dan mendatangkan para pengikut PNI baru dan Partindo. Namun, pendirian kedua belah pihak tidak pernah bertemu. Sukarno akhirnya memutuskan memilih Partindo yang mengembangkan cara-cara yang sama dengan PNI: mengadakan *vergadering* besar dan diisi oleh orasi berapi-api.[126] Inilah titik tolak perbedaan antara Sukarno dan Hatta di mana Hatta lebih mendorong pendidikan kader daripada penggalangan massa dan mengutamakan kader terdidik daripada menggantungkan nasib kepada pemimpin. Kritik dari Hatta dan Sjahrir mengenai *machtsvorming* (penggalangan kekuatan) massa adalah bahwa kekuatan massa yang sebenarnya tidak akan terwujud, sedangkan pemimpinnya rentan untuk ditangkap.[127] Apabila para pemimpinnya ditangkap, maka massa yang hanya sekedar dibangkitkan semangatnya akan mati seketika ketika kehilangan pemimpin. Alasannya adalah para anggota tidak memiliki pemahaman mengenai dasar dan cita-cita perjuangan dan juga tidak didik untuk menjadi propagandis, menjelaskan sendiri kepada orang sekitarnya mengenai partai yang dibelanya.[128] Sebaliknya, Sukarno mengatakan bahwa pembentukan kader-kader yang ketat bermasalah. Kemauan yang datang dari visi harus segera dibangkitkan di tengah-tengah rakyat.[129] Lagipula, penekanan terhadap pendidikan kader hanya mendorong partai menjadi elitis.

Akhirnya Sukarno dan Hatta jalan sendiri-sendiri, masing-masing kukuh dengan pendiriannya. Hatta mengatakan bahwa lebih baik meskipun kedua partai berbeda pandangan namun jangan saling menyerang. Pada kenyataannya hal itu tidak terjadi. Kedua partai dan kedua tokoh itu saling kritik mengkritik. Terutama mengenai masalah usul pencalonan Hatta di tweede kamer. Kantor berita Hindia Belanda, *Aneta*, secara keliru menginformasikan bahwa Hatta telah menerima tawaran untuk duduk di parlemen Belanda mewakili Onafhankelijke Socialistisch Partij (OSP). Sukarno dan Partindo kemudian membahas masalah ini dengan menyerang Hatta dan PNI baru telah mengubur dalam-dalam prinsip nonkooperasi yang selama ini dipengangnya. Disebutkan dalam sebuah artikel di *Persatuan Indonesia* berjudul "Topengnya Drs. Moh. Hatta Terbuka! Pemimpin PNI Mau Djadi Lid Tweede Kamer! Awas Ra'yat Indonesia!" bahwa pendiri PNI baru sudah diminta menjadi anggota Tweede Kamer, badan perwakilan bangsa imperialis Belanda dan koran ini memberitakan bahwa Hatta telah menerima usulan itu.[130] Padahal sebetulnya Hatta sama sekali belum menjawab undangan tersebut. Namun, polemik mengenai relasi antara nonkooperasi dan duduk di parlemen Belanda menjadi panjang antara PNI baru dan Partindo.

Partindo menuduh bahwa apabila bergabung dengan parlemen Belanda tersebut, Hatta telah melanggar nonkooperasi. Sebabnya, ia mau untuk duduk bersama-sama di dalam sebuah badan imperialis Belanda. Hatta lalu membalas tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tidak hanya menolak usulan dari OSP, bahkan ia menulis secara analitis bahwa duduk di parlemen Belanda tidak bertentangan dengan nonkooperasi. Alasannya adalah Hatta mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mengajarkan bahwa nonkooperasi adalah anti-parlementer. Nonkooperasi tidak menghendaki kooperasi dengan pemerintah kolonial dalam sebuah parlemen palsu yang dibentuk untuk menipu rakyat. Tweede kamer tidak bertentangan dengan dasar nonkooperasi karena ia adalah sebuah parlemen sah yang dipilih oleh rakyat, bukan dewan jajahan.[131] Dalam parlemen tersebut, pemerintah dan oposisi sama derajatnya dan oposisi bisa mengkritik dan menentang imperialisme penguasa. Sedangkan, di tanah jajahan, parlemen buatan itu tidak dapat mengusik kedudukan dari pemerintah. Oleh sebab itu, maka masuk ke tweede kamer sebetulnya tidak melanggar prinsip dari nonkooperasi.

DITANGKAP PEMERINTAH KOLONIAL

Depresi ekonomi dan semakin ekspresifnya politik pergerakan Indonesia membuat pemerintah kolonial semakin intens dalam mengawasi situasi politik nasional. Gerak-gerik para pemimpin partai atau organisasi diawasi secara ketat oleh polisi kolonial atau intelijen Belanda. Hatta sendiri merasakan bahwa lawatannya di Minangkabau diawasi gerak-geriknya oleh polisi kolonial. Pemerintah kolonial semakin keras terhadap politik pergerakan, terutama bila partai atau pemimpinnya menggunakan kata-kata yang dianggap berbahaya oleh mereka. Pada bulan Januari 1933, pengurus cabang PNI baru Surabaya ditangkap oleh pemerintah kolonial karena mengeluarkan edaran yang memuat kata-kata: "Rakyat Indonesia harus memiliki semangat revolusioner – dari perbudakan menuju kemerdekaan".[132]

Sepulangnya dari kunjungan ke Jepang, Hatta merasakan bahwa perlakuan pemerintah kolonial Belanda terhadap pergerakan rakyat semakin represif. Ketua PNI baru cabang

Makassar ditangkap tanpa alasan yang jelas. PNI baru yang telah bertumbuh dengan pesat di Indonesia, memiliki lebih dari 60 cabang, merupakan target dari Politieke Inlichtingen Dienst (PID), dinas intelijen polisi. Di bulan Juni sampai Agustus 1933, Hatta mengadakan lawatan ke Jawa Tengah untuk memberikan kursus politik kepada PNI baru. Ia memulai tur tersebut dari Bandung di mana di tempat berlangsungnya acara para intelijen PID mengawasi pertemuan. Namun, pidatonya tidak diintervensi oleh orang-orang PID. Justru ketika ia berpidato di Yogyakarta pidatonya distop ketika membicarakan mengenai tahapan perkembangan kapitalisme dari kapitalisme muda sampai tingkat kapitalisme penghabisan.[133] Wedana PID yang hadir menginterupsi mimbar dengan menanyakan apa itu kapitalisme? Pidato yang sempat terhenti dilanjutkan namun wedana PID tadi terus memukul meja dan melarang pidato Hatta diteruskan. Besoknya, ketika Hatta melanjutkan safari politiknya ke Solo, hal yang sama ditemui. Wedana PID melarang Hatta untuk mengadakan ceramah dan polisi membubarkan acara. Selanjutnya, Hatta berpidato di acara serikat buruh kereta api di Semarang. Namun, pemerintah Belanda melarang pegawai negeri untuk menjadi anggota PNI baru atau Partindo. Apabila mereka tidak menaati maka perusahaan akan melalukan pemecatan terhadap karyawannya.

Di Semarang, Hatta menerima berita yang mengejutkan tentang penangkapan Sukarno. Penangkapan tersebut disusul oleh larangan untuk mengadakan rapat bagi partai-partai yang berhaluan nonkooperasi: PNI baru, Partindo, PSII, dan Permi.[134] Tidak lama setelah itu, penangkapan meluas kepada tokoh-tokoh dari partai yang berhaluan nonkooperasi. Di mulai dengan penangkapan para tokoh PSII dan Permi di Minangkabau, dan kemudian PNI baru. Hatta ditangkap bersama dengan Bondan dan Sjahrir. Hatta dan Bondan dimasukkan ke penjara Glodok, sementara Sjahrir ditempatkan di penjara Cipinang.[135] Sebetulnya Hatta telah menduga bahwa akan terjadi kemungkinan penangkapan terhadap dirinya. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu menderita dalam melawan kolonialisme.[136] Menurutnya, pengorbanan pribadi seorang pemimpin akan membuka jalan bagi aksi massa.[137]

Tampaknya keyakinan Hatta untuk menekankan pada pentingnya kaderisasi membuktikan bahwa jalan yang ditempuhnya memang tidak keliru. Ia mengatakan bahwa "kalau gerakan hanya menjadi gerakan pemimpin dan anggota biasa tidak ikut menanggung beban maka gerakan itu tidak dapat mencapai tujuannya".[138] Terbukti setelah para pimpinan pusat PNI baru ditahan maka pada Maret 1934 dengan segera tersusun pimpinan pusat sementara. Dalam tahanan di Glodok, Hatta masih menyempatkan untuk menulis karangan berjudul "Krisis Ekonomi dan Kapitalisme". Ia juga mengungkapkan kondisinya selama di penjara kepada T.A. Murad, sekretaris PNI baru sementara:

"Penghidupan di sini biasa saja saban hari dan tidak berubah-ubah. Malam tidur, siang mandi, makan, berjalan-jalan di atas kebun rumput dalam blok saya, sehabisnya studi. Dan kitab-kitablah yang menjadi teman saya sehari-hari … Perasaan saya biasa, tidak berubah. Di mana saja saya bisa hidup asalkan ada buku-buku".[139]

Pada bulan September 1934 Hatta diminta datang ke kantor pemerintah urusan dalam negeri. Ia menduga bahwa ia akan dibuang ke Boven Digul, tempat pengasingan tahanan politik yang dianggap paling berbahaya bagi pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial menganggap Hatta adalah orang yang sangat berbahaya. Riwayat politik radikalnya bersama PI dan Liga Anti Imperialisme serta dukungan dari OSP dan juga cara Hatta mengorganisasikan PNI baru dengan mendidik kesadaran rakyat dianggap sangat membahayakan eksistensi pemerintah kolonial di Indonesia.[140] Akhirnya pemerintah kolonial memutuskan bahwa para pemimpin PNI baru, seperti Hatta, Sjahrir, Maskoen, Burhanuddin, Moerwoto, dan Suka, dibuang ke Boven Digul.

PENGASINGAN: BERUMAH DI BUKU DAN TERUS MENULIS

Yang dilakukan oleh Hatta dalam persiapan diasingkan ke Digul adalah mengepak buku-bukunya sampai dimasukkan ke dalam 16 peti besi. Hatta, yang bolak-balik penjara Glodok ke rumah, bersama saudara-saudaranya membutuhkan waktu tiga hari untuk membereskan pengepakan seluruh bukunya tersebut. Di bulan Januari 1935, Hatta, Sjahrir, dan Bondan berangkat dengan kapal KPM Melchior Treub ke jurusan Boven Digul. Sementara itu, pemerintah kolonial membuang Sukarno ke tempat yang relatif lebih enak di Flores. Berhembus kabar bahwa Sukarno meminta pengurangan hukuman dengan berjanji akan menarik diri dari pergerakan dan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda.[141] Hatta menyanyangkan sikap yang dipilih Sukarno. Ia mengatakan "tertutuplah buku seorang pemimpin yang banyak menggoncangkan udara politik Indonesia, yang selama ini dipuji-puji sebagai pahlawan bangsa dan "bapa" Indonesia".[142] Ada yang menduga bahwa Sukarno tidak siap dengan bayangan Digul yang suram karena bukan saja ia akan menghadapi banyak kesulitan dan berbagai macam penyakit, melainkan ia juga akan terpisah dengan orang yang dicintai dan pengikutnya. Menurut Noer, berdasarkan kalangan yang dekat Sukarno, berpisah dengan rakyat dirasakan oleh pemimpin ini "bagai halilintar membelah bumi" sebab ia terbiasa dengan sambutan sorak sorai massa rakyat yang terkagum-kagum dengan orasinya yang berapi-api.[143] Sebagian pendapat menyatakan bahwa sikap Sukarno dipengaruhi oleh ketidaktegaannya terhadap nasib istrinya. Namun, Hatta menegaskan bahwa bukan istrinya yang bersalah melainkan memang Sukarno sendiri yang tidak teguh memegang prinsip. Lagipula, apabila sikapnya yang berbalik dipegaruhi oleh istrinya, Hatta mengatakan: "bukan pemimpin kalau masih terpengaruh oleh air mata istri yang tak tahan hidup melarat".[144]

Pemberitaan koran asing melukiskan bahwa Digul seperti "neraka" di mana malaria dan demam berdarah merajelala.[145] Di Digul, kaum interniran dibagi menjadi dua golongan: (1) golongan naturalis, kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan diberi jatah makan pas-pasan (2) golongan *werkwillig*, kaum kooperator yang mau bekerja sama dengan pemerintah, biasanya pekerjaannya mencangkul

parit, menggali selokan, dan pekerjaan kasar lainnya.[146] Hatta ditawari untuk bekerja sama dengan Belanda sehingga ia bisa memperoleh bantuan sebanyak 7,50 gulden sebulan dan tidak melakukan kerja kuli seperti tahanan *werkwillig* lainnya. Namun, tawaran itu ditolaknya karena kalau ia ingin menjadi kooperator hal itu bisa dilakukannya semenjak Hatta di Jakarta dan ia pasti sudah menerima berbagai jabatan penting daripada bekerja 40 sen sehari. Akhirnya, Hatta memilih menjadi golongan naturalis yang setiap bulan mendapatkan makanan secara natura dari pemerintah setempat berupa: 18 kg beras, 2 kg ikan asin, 300 gram teh, 300 gram kacang hijau, 2/3 limonade minyak kelapa.[147]

Hatta benar-benar harus menjaga mentalnya dari kehidupan Digul yang sunyi dan banyak penyakit. Ia membagi waktunya dengan bangun pagi jam 04.30 lalu menyiapkan sarapan pagi (biasanya telur dan kopi) dan sembahyang subuh. Biasanya aktivitas ini selesai jam 07.00 pagi lalu dilanjutkan jalan-jalan keliling kampung jam 07.30. Setelah berkeliling sekitar 30-40 menit ia kembali ke rumah untuk membaca buku. Ia bisa menghabiskan waktu hingga jam 11.00 sampai 11.30. Meskipun hidup dalam pengasingan Digul yang keras, Hatta berusaha menjaga kewarasannya dengan membaca buku dan menulis. Ia sering meminjamkan koleksi bukunya kepada para interniran lain agar tetap merawat kesehatan mentalnya. Namun, rutinitas membaca buku dan menulis ini menimbulkan masalah sebab Hatta ketika menghabiskan waktunya membaca dengan khusyuk tidak bisa diganggu oleh kunjungan orang lain.[148] Hal ini sudah berlangsung sejak ia menjadi mahasiswa di Belanda. Kebiasaan inilah yang menyebabkan muncul rasa tidak senang dari beberapa kawan-kawannya di Digul karena para interniran sering menghabiskan waktu dengan mengobrol dan diskusi.

Untuk menambah uang sakunya, Hatta mengirimkan tulisannya untuk berbagai surat kabar, di antaranya adalah *Pemandangan* (Jakarta), *Panji Islam* dan *Pedoman Masyarakat* (Medan), dan *Adil* (Solo).[149] Beruntungya adalah ketika Hatta bersiap ke Digul ia ditemui oleh Saerun, redaktur kepala *Pemandangan*, yang menawarkan dirinya untuk menulis sekali atau dua kali sebulan untuk *Pemandangan* dengan honorarium sebesar f 5 per kolom.[150] Hatta juga rutin untuk memberikan kursus tentang berbagai hal, seperti politik, ekonomi, sosiologi, sampai filsafat. Dalam pengantarnya di buku *Alam Pikiran Yunani*, Hatta mengatakan bahwa dalam kondisi yang begitu menindas rohani di Digul belajar filsafat merupakan hal penting karena "siapa yang hidup dalam dunia pikiran dapat melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari itu".[151] Namun, kursus ini mengalami hambatan berat akibat serangan malaria yang menggerogoti kesehatan para siswa yang mengikuti.

Kesukaran yang dihadapi di Digul ternyata tidak berlangsung lama. Setahun setelah pembuangan di Digul, Hatta dipindahkan bersama Sjahrir ke Banda Neira di Kepulauan Maluku, suatu tempat yang jauh lebih baik dari Digul. Alasan pemindahan ini barangkali diakibatkan dari reaksi protes yang muncul baik di Indonesia maupun Belanda saat surat Hatta kepada kakak iparnya mengenai situasi Digul dimuat dalam surat kabar Indonesia dan Belanda.[152] Perdana menteri Colijn membela diri di parlemen Belanda dari kecaman kaum sosialis dengan menyatakan bahwa pembuangan Hatta di Digul bukanlah untuk menghancurkannya, tetapi untuk menjauhkannya dari masyarakat dan aktivitas politik.[153] Pemindahan ke Banda membuat Hatta berkesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya, seperti Tjiptomangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri. Keadaan Hatta lebih baik di Banda karena ia mendapat 75 gulden sebulan dan dengan uang saku ini ia dapat memperkerjakan pembantu. Di Banda Neira, Hatta masih mengadakan kursus mengajar pemuda-pemuda setempat dua kali seminggu. Ia juga tetap rutin menulis bagi surat kabar, antara lain *Sin Tit Po*, di bawah pimpinan tokoh Tionghoa Liem Koen Hian, dan *Nationale Commentaren*, pimpinan Sam Ratulangi.

Pada tahun 1941 Perang Pasifik pecah – Hatta telah memprediksi mengenai hal ini sejak tahun 1920-an – dan Belanda tampaknya bingung dalam menghadapi perubahan politik di Pasifik ini. Pada tanggal 1 Februari 1942 Hatta dan Sjahrir dipindahkan dari Banda Neira ke Jawa atas desakan penguasa kolonial. Pada awalnya, Hatta mendarat di Surabaya kemudian ia dipindahkan ke Sukabumi. Pemerintah kolonial mengharapkan bahwa para pemimpin nasionalis melakukan pengorganisasian untuk melawan intervensi Jepang, terutama melalui siaran radio.[154] Namun, Hatta menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Baginya pemerintah kolonial dan pasukan Jepang sama-sama berwatak imperialis. Yang harus diperjuangkan oleh Indonesia adalah kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Belanda menyerah kepada pasukan militer Jepang. Keruntuhan Belanda berlangsung dengan cepat, tidak ada pertempuran yang lama dan habis-habisan. Menurut Hatta, Indonesia tidak perlu terlalu gembira menyambut kemenangan Jepang. Ia menyadari bahwa Indonesia akan kembali berada di bawah kekuasaan asing, perbedaannya adalah bila sebelumnya penjajah berasal dari Barat sekarang berasal dari Timur.[155] Hatta belum jelas memutuskan sejauh manakah ia akan bekerja sama dengan Jepang atau tidak sama sekali, dan apakah akan ada hukuman baginya apabila memutuskan tidak mau bekerja sama dengan Jepang.

MERUMUSKAN KONSEP NEGARA-BANGSA DI BAWAH BAYANG-BAYANG JEPANG

MELAWAN DARI DALAM

Perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang di Indonesia tidak serta merta membawa kegembiraan dalam benak Hatta. Kekagumannya terhadap penentangan Jepang atas Barat serta kemampuan ekonominya yang kuat perlahan turun seketika saat ia melihat ambisi imperial Jepang yang ekspansif di Asia, terutama okupasinya terhadap China.[156] Di tahun 1930-an, Hatta telah mengkritik proyek Pan-Asianisme Jepang "Asia untuk rakyat Asia" yang menurutnya dibangun dengan melanggar dua prinsip dasar gerakan kerjasama Asia: tidak ada perdamaian antara China dan Jepang dan tidak ada jaminan kesetaraan antara negara-negara di dalamnya. Hatta jelas menolak fasisme Jepang sebab bertentangan dengan negara yang demokratis sesuai dengan cita-citanya. Melihat

apa yang dilakukan oleh militer fasis Jepang di Asia, Hatta telah siap dengan konsekuensi terburuknya di Indonesia, apalagi tidak lama setelah Jepang datang ke Indonesia mereka melarang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu "Indonesia Raya".[157]

Jepang menyadari apabila mereka ingin mengambil simpati rakyat Jawa, maka mereka harus dapat menampilkan tokoh utama pergerakan Indonesia sebelum perang sebagai sekutu mereka.[158] Tokoh nasionalis terkemuka ini dapat dimanfaatkan oleh Jepang untuk memobilisasi rakyat demi mendukung Jepang menghadapi perang. Kebijakan ini dimanfaatkan oleh tokoh pergerakan Indonesia untuk membangun strategi perjuangan kemerdekaan Indonesia ke depan dengan dua cara: melalui jalur resmi bekerja sama dengan Jepang dan secara rahasia melalui gerakan bawah tanah. Secara diam-diam Sukarno dan Hatta akan berjuang melalui jalur resmi dan menjalin kontak dengan Jepang dan di sisi lain Sjahrir dan Amir Sjarifuddin akan membangun perlawanan bawah tanah dengan para pemuda.[159] Antara gerakan bawah tanah dan gerakan resmi saling mendukung dan berhubungan. Hatta dan Sjahrir, misalnya, saling berhubungan secara intensif selama okupasi Jepang.[160]

Sjahrir mengatakan bahwa baik Hatta dan Sukarno menyetujui "apa pun yang sah untuk melebarkan cakupan perjuangan kaum nasionalis di ranah resmi, dan pada waktu yang bersamaan diam-diam mendukung perlawanan revolusioner".[161] Sjahrir yakin bahwa Jepang akan memanfaatkan popularitas Sukarno untuk tujuan propaganda dan sebaliknya baik Sukarno, Hatta, dan juga Sjahrir sepakat bahwa konsesi politik untuk Jepang harus ditekan.[162] Hatta bertugas untuk mengamankan dana dan membantu kegiatan atau perjalanan kelompok pemuda. Sementara itu, Hatta tidak menutup diri dari pengarahan dan nasehat kelompok gerilya Sjahrir. Ketika salah satu pemimpin gerilya bawah tanah, Amir Sjarifuddin, ditangkap oleh Jepang karena dituding mendapatkan dana dari Belanda dalam mengorganisasikan gerakannya melawan Jepang, Hatta berusaha untuk menolong Amir. Akhirnya pihak Jepang tidak jadi menghukum mati Amir dan menggantinya dengan hukuman seumur hidup.

Pada mulanya setelah Jepang menduduki Indonesia, Hatta mendapatkan penawaran dari pemerintah Jepang sebagai penasihat, mendapatkan kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Oranje Boulevard (Jalan Diponegoro sekarang). Dalam kantor ini, pemerintah Jepang juga mengajak tokoh pergerakan antikolonial maupun kooperatif dengan Belanda, di antaranya adalah A. Karim Pringgodigdo, Surachman, Sujitno Mangunkusumo, Supomo, Sunario Kolopaking, dan Margono Djojohadikusumo. Hatta juga mendapatkan tenaga-tenaga baru, seperti Assaat, Suwirjo, Datuk Djamin, dan Wilopo. Di dalam pekerjaannya, Hatta berfungsi sebagai penghubung antara pihak Jepang dan para pemimpin Indonesia. Jepang menginginkan bahwa kepentingannya dapat disalurkan melalui kantor penasihat ini, sementara itu kantor tersebut memberikan bahan-bahan yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, adat, dan agama.[163] Dari keluh kesah yang diterimanya dari rakyat, Hatta menyampaikan dua hal kepada pemerintah Jepang. Pertama, *saikerai*, penghormatan membungkukkan badan sampai 90 derajat dengan menghadap ke arah Tokyo, melukai perasaan orang Islam yang menganggap bahwa itu melebihtinggikan Tenno Heika daripada Allah.[164] Kedua, orang-orang Jepang diminta untuk menghentikan penempelengan atau penamparan di kepala seseorang apabila melakukan kesalahan atau tidak disukai oleh pihak Jepang.[165]

Cita-cita kemerdekaan masih hidup dan diusahakan untuk tercipta perlahan oleh para pemimpin Indonesia. Hatta berpidato di Lapangan Ikada pada 8 Desember 1942, memperingati pecahnya perang Pasifik, untuk mengingatkan masih hidupnya cita-cita ini. Ia mengatakan bahwa terlepasnya Indonesia dari penjajahan Belanda membuatnya tidak ingin merasakan menjadi jajahan kembali.[166] Pidato ini tidak melalui sensor terlebih dahulu, sehingga menyebabkan kecurigaan pihak Jepang bertambah kepada Hatta yang sejak tahun 1930-an telah mengecam fasisme Jepang. Perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan kemudian dipusatkan kepada organisasi bernama Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di bulan Maret 1943 untuk menjanjikan pemerintahan mandiri yang akan diberikan kepada Indonesia di masa depan.[167] Gagasan ini lahir dari desakan Sukarno dan kawan-kawan yang menginginkan terciptanya gerakan rakyat untuk mencapai tujuan nasional.[168] Dalam organisasi ini berkumpul empat orang tokoh nasional yang disebut sebagai "empat serangkai", yaitu Sukarno (ketua), Hatta (wakil ketua), Ki Hadjar Dewantara (kepala pengajaran), dan K.H. Mas Mansur (kepala bagian keselamatan masyarakat). Melihat komposisi para pemimpinnya muncul anggapan bahwa organisasi ini adalah organisasi nasionalis murni sehingga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, bahkan dari banyak organisasi bawah tanah.

Ketika Menteri Asia Timur Raya, Aoki, berkunjung ke Jakarta bertemu dengan Hatta sebagai wakil dari empat serangkai, ia menyampaikan bahwa sebaiknya Jepang tidak mengesampingkan keinginan rakyat Indonesia untuk memiliki pemerintahan sendiri. Hal ini nantinya akan menyebabkan hubungan buruk antara pemerintah militer Jepang dan Indonesia. Di bulan Agustus dan Oktober 1943 Jepang memberikan kemerdekaan kepada Birma dan Filipina, namun Indonesia tidak disebutkan kapan akan diberikan kebebasannya.[169] Hatta juga menuntut bahwa pemerintah Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu "Indonesia Raya". Namun, pemerintah Jepang menolak hal ini karena akan menimbulkan kerepotan terhadap pemerintahannya. Meskipun demikian, beberapa dewan dibentuk untuk memberikan kesan adanya dukungan terhadap partisipasi. Orang-orang Indonesia diangkat lebih banyak lagi untuk menjadi penasihat pemerintah Jepang. Dewan Penasihat Pusat (Chuo Sangiin) kemudian dibentuk di Jakarta dan diketuai oleh Sukarno. Hatta mulanya terpilih menjadi wakil ketua bersama Ki Hadjar Dewantara, tetapi pemerintah menunjuk tokoh lain, Buntaran Martoatmodjo dan Kusumo Utoyo. Pada bulan Januari 1944, Putera digantikan oleh Jawa Hokokai (Persatuan Kebaktian Jawa). Pemerintah Jepang membutuhkan organisasi persaudaraan

antara segala golongan penduduk di tanah Jawa untuk menggerakkan rakyat membantu Jepang dalam peperangan. Pihak Jepang dengan jelas memanfaatkan para pemimpin para pemimpin Indonesia untuk mencapai tujuan mereka, tetapi para pemimpin Indonesia juga mengambil keuntungan dari Jepang.[170] Sukarno, misalnya, berhasil memanfaatkan safari propaganda bagi Hokokai untuk memperkokoh posisinya sebagai pemimpin utama gerakan rakyat.[171]

Di bulan November 1943, Hatta bersama dengan Sukarno dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah diundang ke Tokyo untuk menghadap kaisar dan pemimpin pemerintahan Jepang. Diundangnya Sukarno dan Ki Bagus ke Jepang untuk memberikan penghormatan kepada Jepang dan sebaliknya mereka akan diberikan tanda kehormatan oleh kaisar. Sementara itu, kedatangan Hatta diinginkan oleh Kempetai (polisi militer Jepang) untuk mempelajari *Nippon Sheishin* (semangat Jepang) dari kalangan Jepang. Hatta dinilai orang yang kesetiannya diragukan kepada Jepang dan dianggap berbahaya bagi pemerintah Jepang.[172] Letnan Kolonen Murase, Kepala Urusan Umum Kempeitai, sampai melakukan interogasi terhadap Hatta untuk menanyakan apakah memang ia anti kepada Jepang. Hatta menerangkan bahwa ia tidak anti-Jepang, namun anti-imperialisme, termasuk imperialisme yang dilakukan oleh Jepang.[173] Ia dengan jujur mengatakan bahwa ia tidak dipaksa oleh Belanda ketika menuliskan tulisan-tulisan yang bernada anti-imperialisme Jepang di tahun 1930-an. Untuk mengikis pemikiran Hatta yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan Jepang, Kempeitai merasa bahwa Hatta wajib dididik selama 6 bulan sampai 1 tahun untuk mempelajari *Nippon Sheishin*. Terdengar kabar pula bahwa ia akan ditahan di Tokyo. Namun, sesampainya di Tokyo, Hatta tidak mendapatkan ancaman dari pemerintahan Jepang. Markas besar angkatan darat Jepang tidak tahu apa-apa rencana untuk mengasingkan Hatta dan tidak setuju dengan mengawasi kegiatan Hatta di Tokyo dengan ketat. Sukarno, atas nama Hatta, memohon pengampunan kepada Tojo dan mengatakan bahwa ia sangat memerlukan bantuan dari Hatta.[174] Tojo mengetujui usulan Sukarno, dan memberikan bintang kelas III dari kaisar kepada Hatta dan Ki Bagus, sedangkan Sukarno mendapatkan bintang kelas II. Pemberian bintang itu melegakan Hatta karena Kempeitai tidak dapat menyakiti orang yang diberikan penghargaan tinggi oleh kaisar.

Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, meskipun tidak menentukan secara resmi kapan itu akan diberikan. Janji ini diberikan untuk mengharapkan balasan dari pihak Indonesia untuk mendukung Jepang dalam Perang Dunia II. Kemudian, Koiso juga memperbolehkan pemasangan bendera merah putih di kantor-kantor Jawa Hokokai dan lagu "Indonesia Raya" sudah mulai boleh diperdengarkan. Posisi Jepang semakin melemah dalam perang, pasukan Amerika Serikat (AS) berhasil mengalahkan Jepang di Kepulauan Marshall di bulan Februari 1944. Di bulan Juli 1944, Jepang mengalami kekalahan di pangkalan angkatan laut mereka di Saipan (Kepualauan Mariana). Lalu, di bulan September pasukan Amerika semakin mendekat ke wilayah Indonesia. Tentara AS telah mendarat di Morotai dan mulai gencar mengebom Manila.[175] Akhirnya pada bulan Februari 1945, Manila berhasil direbut AS dan kekalahan ini menyebabkan Jepang berada di posisi yang sulit untuk menahan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia.

Sadar bahwa posisi mereka semakin terancam dalam Perang Dunia II, Jepang memutuskan untuk menghapuskan kekangan-kekangan yang ada terhadap kekuatan rakyat Indonesia.[176] Pada 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang dapat selesai pada bulan Juli 1945. Keanggotaan dari organisasi ini mewakili para pemimpin Indonesia dari berbagai daerah dan aliran. Pimpinannya adalah Radjiman Wediodiningrat dari Boedi Utomo dan di dalamnya terdapat Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, Agus Salim, Soetardjo, Ki Bagus Hadikusumo, Yamin, Wachid Hasjim, dan Abikusno Tjokrosoejoso. Pihak Jepang menginginkan bahwa apabila kemerdekaan Indonesia tercapai pada akhirnya maka kemerdekaan itu harus diproklamirkan oleh generasi tua yang dianggap lebih muda diajak bekerja sama daripada generasi muda yang lebih radikal.[177]

PEMIKIRAN HATTA UNTUK INDONESIA: DESENTRALISASI, DEMOKRASI DAN KEDAULATAN EKONOMI

BPUPKI menjadi wadah bagi para pemimpin Indonesia mendiskusikan bagaimana bentuk, konsep, dan sistem politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang menjadi dasar dari adanya Indonesia di masa depan. Dalam sidang BPUPKI inilah untuk pertama kalinya Sukarno berpidato mengenai dasar, filosofis, dan tujuan dari adanya negara Indonesia yang ia sebut sebagai Pancasila. Dalam pembicaraan penyusunan UUD, Hatta setidaknya berperan dalam tiga hal (1) soal bentuk negara (2) demokrasi dan hak asasi (3) dan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan ekonomi.

Pada pembahasan mengenai bentuk negara Indonesia mendatang, perdebatan yang mengemuka adalah mengenai dua hal: apakah Indonesia berbentuk federasi atau kesatuan dan apakah Indonesia menjadi negara Islam atau bukan. Dalam soal bentuk negara, Hatta lebih mendorong konsep negara federasi, meskipun ia tidak mengemukakannya di dalam sidang. Namun, Hatta memiliki perhatian khusus terhadap perlunya otonomi bagi daerah atau desentralisasi daripada sentralisasi kekuasaan.[178] Sebab, menurutnya dengan geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, serta secara antropologis Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, budaya, dan adat yang beranekaragam, desentralisasi diperlukan untuk menjaga keunikan dan kekhasan masing-masing daerah. Hatta meyakini bahwa Indonesia harus mempunyai sistem yang memungkinkan daerah memiliki hak untuk mengatur urusan mereka sendiri.[179] Untuk mencapai kedaulatan rakyat maka suatu sistem yang menekankan desentralisasi diperlukan. Selain itu, selama persidangan berlangsung, perdebatan yang mengemuka adalah mengenai apakah Indonesia harus menjadi negara Islam atau tidak. Hatta adalah salah satu pemimpin nasionalis yang menolak konsepsi negara Islam. Ia mengusulkan dibentuk negara yang memisahkan urusan pemerintahan dari urusan keagamaan.[180]

Mengenai hak asasi manusia, pada umumnya anggota BPUPKI, terutama Sukarno dan Soepomo, tidak menyetujui mengenai hak asasi manusia ditekankan dalam UUD. Hal ini dikarenakan keduanya menolak tumbuhnya paham individualisme dan liberalisme yang dapat dibawa oleh pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Tokoh-tokoh pergerakan nasional umumnya, termasuk Hatta, menolak individualisme Barat diterapkan di Indonesia sebab negara ini berdiri di atas prinsip kekeluargaan atau gotong royong. Namun, apabila hak individu benar-benar dihapuskan sama sekali hal ini juga tidak baik karena bisa menumpulkan demokrasi yang baru dibangun dan merangsang munculnya otoritarianisme. Menurut Hatta, meskipun ia telah menentang individualisme selama 20 tahun, tetapi masalah hak asasi manusia yang penting perlu dicantumkan dalam UUD sebab apabila hal itu diabaikan maka negara bisa menjadi "negara kekuasaan".[181] Atas dasar ini, Hatta perlu memasukkan dalam UUD hak bagi warga negara untuk berkumpul dan bersidang, serta mengeluarkan pendapatnya. Gagasan Hatta ini kemudian mewujud dalam pasal 28 UUD 1945 bahwa kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapatnya dijamin oleh undang-undang.

Pemikiran Hatta yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ekonomi negara harus dibangun atas dasar kedaulatan rakyat. Negara harus membangun sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada koperasi dan kekeluargaan. Koperasi penting baik sebagai konsep ekonomi maupun untuk membangun kekuatan ekonomi rakyat bawah. Hatta mengusulkan bahwa perekonomian Indonesia sebaiknya disusun berdasarkan usaha koperasi yang berdasarkan prinsip kemanusiaan.[182] Sejarah sebagai sebuah koloni mempengaruhi landasan ekonomi Indonesia di masa mendatang untuk menghindari prinsip individualisme dan sedekat mungkin mengupayakan kolektivisme. Sebabnya adalah selama dijajah Belanda tanah Indonesia yang kaya, mampu menghasilkan ratusan ribu produk bagi dunia luar, tidak mampu mensejahteran rakyatnya yang hidup di bawah kemiskinan dan kesengsaraan di tengah kaum kaya yang hidup berlebihan.[183] Lebih dari itu, Hatta juga mengusulkan bahwa "cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan "bumi dan air serta segala macam hasil bumi di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Hatta merasa bahwa negara Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam dan oleh sebab itu merupakan tugas dari pemerintah untuk menjaga dan mendistribusikan kekayaan ini untuk kepentingan kemakmuran rakyat bukan kepentingan segelintir golongan. Argumentasi Hatta inilah yang kemudian ditransformasikan menjadi pasal 33 UUD 1945. Dengan dasar ini tidaklah berarti bahwa pihak swasta tidak boleh berpartisipasi dalam lapangan ekonomi. Namun, pemerintah perlu membuat peraturan yang menempatkan kepentingan swasta pada kepentingan orang banyak. Hatta mengakui bahwa swasta memiliki motivasi meraih laba dalam berbisnis dan karenanya pemeintah perlu membatasi monopoli swasta untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya agar tidak menghancurkan tujuan mencapai kemakmuran rakyat.

INDONESIA MERDEKA, WAKIL PRESIDEN PERTAMA, DAN GEMURUH REVOLUSI

DWITUNGGAL DAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Dalam situasi semakin terdesaknya Jepang oleh tekanan dari militer Sekutu, tugas dari BPUPKI dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang pada awal bulan Agustus 1945. Anggota dari panitia ini diisi oleh berbagai wakil terkemuka Indonesia yang mewakili berbagai macam agama, etnis, daerah, dan ideologi. Sukarno didapuk sebagai ketua, sedangkan Hatta diangkat sebagai wakil ketuanya. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Sukarno, Hatta, dan Radjiman diminta datang oleh Jenderal Terauchi ke Dalat di Indochina. Dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa negara baru Indonesia akan mencakup seluruh wilayah Hindia Belanda, tapi tidak mencakup wilayah jajahan negara lain.[184] Kemudian, kemerdekaan Indonesia akan ditetapkan dengan jadwal bertahap, dimulai dengan Jawa.

Ketiga tokoh tersebut kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agusuts 1945. Ide mengenai pemberian kemerdekaan oleh Jepang ditentang oleh kelompok bawah tanah apabila kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang. Desas-desus bahwa Jepang akan menyerah terhadap Sekutu memicu beberapa organisasi bawah tanah untuk bersiap-siap melawan Jepang dalam momentum ketika Sekutu mendarat di Indonesia.[185] Saat Sukarno dan Hatta pulang ke Indonesia, Sjahrir memberitahukan bahwa Jepang telah meminta gencatan senjata. Ia mendesak Sukarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sebagai wakil dari rakyat Indonesia. Para pemimpin muda menginginkan proklamasi kemerdekaan disampaikan dalam bentuk deklarasi yang bernada anti-Jepang. Indonesia yang merdeka harus menyatakan diri bebas dari rencana campur tangan Jepang karena kalau tidak ia akan dicap sebagai *made in Japan*. Dengan posisi seperti itu maka Indonesia akan dihapuskan oleh Sekutu dan sebagai gantinya Indonesia akan diserahkan kembali kepada pihak Belanda untuk melanjutkan statusnya sebagai Hindia Belanda.[186] Namun, Sukarno dan Hatta ragu-ragu dengan ide tersebut karena terikat dengan kedudukannya dalam PPKI. Mereka tidak ingin mengesampingkan PPKI begitu saja sebab meskipun panitia ini didirikan oleh Jepang, orang-orangnya mereka pilih sendiri dari golongan yang dianggap nasionalis.[187] Lebih dari itu, Sukarno dan Hatta ingin menghindari pertumpahan darah yang mungkin muncul karena Jepang masih memegang senjata.

Pada tanggal 16 Agustus, kelompok pemuda yang tidak puas membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Kelompok pemuda pimpinan Sukarni ini meyakinkan Sukarno bahwa Jepang sudah benar-benar menyerah dan inilah momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun, Sukarno dan Hatta tetap bersikukuh pada pendiriannya. Ahmad Soebardjo yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok Sukarni lalu membujuknya untuk mengembalikan Sukarno dan Hatta ke Jakarta. Ketika kembali ke Jakarta tanggal 16 Agustus tengah malam, Hatta bersama Sukarno ditemani oleh Maeda berkunjung ke kediaman resmi Jenderal Nishimura yang ditemani oleh para penasihat politik utamanya. Hatta diberitahu bahwa yang dimaksud dengan menyerahnya

Jepang adalah bahwa Jepang hanya menjadi agen sekutu dan Jepang tidak menyetujui usaha apapun untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia karena pejabat militer memiliki tanggung jawab untuk memelihara *status quo*.[188] Atas dasar inilah menjadi jelas bahwa bagi Hatta dan Sukarno, mempersiapkan kemerdekaan melalui revolusi damai tidak mungkin terjadi dan cara-cara proklamasi kemerdekaan yang disarankan oleh kelompok pemuda lebih baik dilakukan untuk mencapai kemerdekaan.[189]

Setelah itu diadakanlah pertemuan di tempat yang bebas dari mata-mata Kempeitai, di rumah Laksamana Maeda. Berkumpullah tokoh-tokoh nasional, di antaranya Sukarno, Hatta, Soebardjo, Sukarni, Sudiro, B.M. Diah, dan Sayuti Melik, membicarakan mengenai penyusunan teks proklamasi. Sukarno dan Hatta menolak teks proklamasi yang terlalu provokatif, sebaliknya mereka setuju untuk menggunakan kalimat dari preambule rancangan UUD: "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Hatta menekankan bahwa pernyataan kemerdekaan sebaiknya dilengkapi dengan pelaksanaanya.[190] Maka, kemudian ditambahkan: "Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya akan dilakukan dengan cara yang seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya". Setelah teks selesai, Hatta menyarankan seluruh yang hadir untuk menandatangi teks proklamasi tersebut seperti proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat. Namun, Sukarni menolak karena tanda tangan yang berada di dalam teks sebaiknya dibubuhi oleh orang-orang yang memang telah berkorban panjang merintis kemerdekaan dan bukan sebaiknya orang yang kebetulan hadir di tempat itu. Akhirnya disepakati bahwa Sukarno dan Hatta yang menandatangi naskah tersebut mewakili bangsa Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi dibacakan oleh Sukarno di halaman ruamahnya di Pegangsaan Timur 56. Hatta hadir di sisi Sukarno menyaksikan pembacaan teks tersebut. Hatta dan Sukarno menolak saran supaya Lapangan Ikada dijadikan tempat untuk membacakan proklamasi karena ditakutkan akan menimbulkan bentrokan dengan militer Jepang. Prosesi proklamasi dilakukan dengan sederhana, setelah pembacaan teks bendera merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dinyanyikan. Hatta menyadari bahwa inilah bukan akhir dari kemenangan perjuangan bangsanya, namun hanyalah permulaan dari tugas besar menjalankan sebuah negara yang mereka idam-idamkan.

Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI masih menghadapi tugas, antara lain menetapkan konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden Indonesia, menetapkan jumlah provinsi, dan beberapa hal penting lainnya. Dalam pembukaan UUD masih terdapat polemik yang belum selesai mengenai kata-kata tentang syariat Islam dalam pembukaan UUD. Hatta diberitahu oleh perwira Angkatan Laut Jepang bahwa Indonesia Timur mungkin akan berdiri di luar Indonesia apabila kata-kata tersebut masih dipertahankan.[191] Maka, Hatta berdiskusi dengan anggota PPKI yang merupakan wakil umat Islam untuk membicarakan masalah ini. Mereka adalah Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Mohammad Hasan, dan Kasman Singodimedjo. Kasman merasa bahwa permasalahan ini janganlah menghalangi kemerdekaan Indonesia apalagi situasi masih tegang di Jakarta dan banyak wilayah Indonesia.[192] Ia sadar bahwa Sekutu akan datang ke Indonesia, termasuk Belanda, dan tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Kasman berpendapat bahwa soal syariat Islam jangan sampai merusak persatuan dan kekuatan Indonesia menghadapi masa depannya. Wachid Hasjim setuju dengan usulan Hatta untuk menghapuskan kalimat tersebut. Sementara itu, Ki Bagus diminta oleh Kasman tidak bereaksi terhadap usulan itu, meskipun di kemudian hari terungkap bahwa hati kecilnya menolak usulan itu. Teuku Hasan memilih diam atas diskusi tersebut. Akhirnya dimufakati bahwa agar tidak pecah sebagai bangsa kalimat tersebut dihilangkan dan diganti dengan "Ke Tuhanan Yang Maha Esa".

Sidang PPKI kemudian juga memutuskan bahwa sidang menyepakati bahwa Sukarno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Soekardjo Wirjopranoto mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden, Sukarno dan Hatta, merupakan suatu dwitunggal.[193] Dalam istilah ini jelas terkandung sebuah harapan bahwa kedua pemimpin bisa saling melengkapi membangun kesatuan dan siap menyelesaikan perbedaan di belakang layar.[194] Kedua orang ini memiliki satu kesamaan karakteristik yang kuat, yaitu dedikasi penuh kepada tercapainya kemerdekaan Indonesia.[195] Di masa Jepang, mereka berdua harus menerima kecaman sebagai kolaborator dan harus menjelaskan posisinya kepada kelompok pemuda militan dengan saling membela bukannya menjatuhkan seperti yang terjadi di tahun 1930-an. Ketika Indonesia telah merdeka, keduanya diharapkan dapat menyatukan bakat mereka untuk membangun kepemimpinan yang utuh dan stabil. Kepemimpinan yang mampu mendorong Indonesia merdeka mencapai cita-cita yang telah mereka gariskan dan susun untuk ditransformasikan ke dalam kondisi riil.

BERBAGI TUGAS MEMPERTAHANKAN REPUBLIK

Sukarno dan Hatta di masa revolusi 1945-1949 menjalankan tantangan untuk berperan sebagai dwitunggal. Apapun dilakukan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya dilakukan dengan saling berkonsultasi, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah turut dipertanggungjawabkan satu sama lain.[196] Sukarno memiliki kemampuan menggalang dan menguasai massa dan membangkitkan semangat mereka untuk berjuang bersama-sama. Sementara itu, Hatta mampu berpikir tenang menguasai keadaan, memperhatikan sesuatu dengan detail dan hati-hati, dan lebih terampil dalam merencanakan dan menyajikan rincian administratif. Oleh sebab itu, sejarawan Australia Herbert Feith mengkategorisasi Sukarno sebagai tipe *solidarity maker* dan Hatta sebagai tipe *administrator*.

Salah satu tugas awal sebagai wakil presiden adalah menyusun kabinet. Sukarno dan Hatta sama-sama memainkan peranan dalam menyusun kabinet presidensil yang pertama. Pembentukan kabinet dan struktur administratif yang menyertainya penting dilakukan untuk menempatkan tokoh-tokoh terbaik bangsa dan dari kalangan nasionalis agar tidak mudah pemerintahan direbut oleh pihak Jepang dan diserahkan kepada Sekutu, lalu ke pihak Belanda.[197] Lebih dari itu, untuk memperpecepat

perebutan kekuasaan dari Jepang, menurut Hatta, maka penting untuk ditunjuk sebagian besar menteri yang telah duduk pada pucuk pimpinan departemen sebagai *butjo* (kepala) atau *sanjo* (penasihat).[198] Dengan cara itu maka saluran administratif ke bawah yang dikuasi Jepang dapat segera direbut dan orang-orang Jepang dengan mudah disingkirkan. Dari 16 orang menteri yang diangkat, beberapa di antaranya pernah bergerak di Perhimpunan Indonesia, seperti Ahmad Soebardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Sartono, dan Samsi, dan jelas merupakan orang-orang yang keahliannya telah dikenal oleh Hatta dengan baik. Sjahrir menolak masuk dalam kabinet dengan mengecam bahwa kabinet berisi orang-orang yang memiliki karakter tidak kuat dan terbiasa mematuhi perintah Belanda dan Jepang. Disepakati pula bahwa wilayah Republik Indonesia terbagi atas delapan provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Sukarno dan Hatta dalam hal ini juga mengeluarkan maklumat kepada seluruh lapisan rakyat Indonesia untuk bersama-sama berpartisipasi membangun negara Indonesia merdeka. Menurut Deliar Noer, "memproklamasikan kemerdekaan lebih mudah daripada mempertahankannya, apalagi buat pemerintah dan rakyat Indonesia yang dalam bulan Agustus 1945 lebih banyak berdasar semangat dan kemauan".[199]

Di antara Sukarno dan Hatta ada semacam perjanjian, bahwa jika seorang di antara mereka berada di luar kota, yang lain harus siap menghadapi persoalan dan mengambil keputusan. Ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dari kemungkinan penangkapan yang menghantui keduanya akibat kedatangan Sekutu, yang diboncengi Belanda, ke Indonesia. Belanda yang ingin kembali berkuasa merasa bahwa merekalah penguasa yang *legitimate* atas wilayah Indonesia, meskipun faktanya Indonesia telah memerdekakan diri. Untuk mengantisipasi potensi adanya kekosongan kekuasaan akibat Sukarno dan Hatta ditangkap sewaktu-waktu, maka pernah dibuat sebuah testamen politik yang mengantisipasi kemungkinan seperti itu. Sukarno menyetujui bahwa apabila ia dan Hatta ditangkap maka Tan Malaka akan ditunjuk untuk melanjutkan kepemimpinan mempertahankan kemerdekaan. Pandangan sang legenda Tan Malaka yang tiba-tiba muncul dan bertemu Sukarno, mampu meyakinkan Sukarno bahwa roda revolusi harus terus berputar dengan kepemimpinan yang berlanjut. Sejak masa pergerakan, karya dan pemikiran Tan Malaka begitu mempengaruhi Sukarno muda, oleh sebab itu ia tidak berpikir panjang membuat wasiat seperti itu.

Namun, ketika Sukarno membicarakannya dengan Hatta, terjadi perubahan dalam testamen tersebut. Hatta melihat bahwa ditunjuknya Tan Malaka belum tentu menjamin kesatuan perjuangan. Justru Hatta melihat bahwa golongan komunis tentu tidak akan mendukung Tan Malaka dan ini akan melemahkan perjuangan.[200] Hatta lalu mengusulkan agar pewaris kepemimpinan diperbanyak untuk dibuat menjadi perwakilan yang lebih representatif menampilkan berbagai golongan. Ditunjukklah empat orang yang terdiri dari Tan Malaka (mewakili golongan kiri ekstrim), Sjahrir (mewakili kalangan sosialis moderat), Wongsonegoro (mewakili pegawai negeri dan ningrat), serta Iwa Kusuma Sumantri (mewakili golongan Islam).[201]

Pihak Sekutu menganggap bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah semata-mata tipu muslihat Jepang. Meskipun demikian, ketika pada tanggal 15 September 1945 Laksamana Muda Patterson, wakil dari Lord Mountbatten, komandan Inggris wilayah Asia Tenggara, menerima saran dari Jepang untuk tidak memperlakukan Sukarno dan Hatta sebagai penjahat perang karena akan memancing kerusuhan dalam skala luas di Indonesia. Patterson menyarankan kepada Mountbatten untuk menahan pasukan Sekutu di wilayah kota-kota pantai yang merupakan kunci dan memberikan kesempatan kepada Belanda untuk melakukan penetrasi lebih ke dalam nantinya.[202] Mounbatten menerima advis dari Patterson dan memerintah Jenderal Christison, panglima sekutu baru di wilayah Indonesia, untuk membiarkan pemerintahan Indonesia berjalan di wilayah Sumatera dan Jawa, kecuali di wilayah kota pantai.

Kekecewaan terhadap Sekutu dikemukakan oleh Sukarno dan Hatta muncul karena siaran radio Belanda dari Australia yang menyatakan bahwa NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang membonceng Sekutu akan mengambil alih Indonesia kembali. Hatta menulis surat kepada Christison bahwa agar tidak terjadi pertumpahan darah maka (1) tidak ada lagi tentara Belanda yang datang ke Indonesia, (2) semua tentara Belanda keluar dari Indonesia dan tidak beroperasi di bawah Sekutu, (3) NICA nonaktif, (4) mengakui de facto pemerintah Republik Indonesia, dan (5) tentara Sekutu dan tentara Belanda membatasi kegiatan mereka untuk membebaskan, merawat, dan mengevakuasi tahanan pasukan Sekutu dan melucuti tentara Jepang.[203] Tapi pihak Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dengan menganggap bahwa Indonesia merupakan boneka Jepang. Pada pertemuan tanggal 23 Oktober 1945, Christison mempertemukan antara Van der Plas dan Van Mook dengan Sukarno, Hatta, Subardjo, dan Agus Salim. Van Mook mengungkapkan bahwa Belanda ingin Indonesia berada di bawah Belanda dalam model pemerintahan persemakmuran. Namun, Hatta berkomentar: "Mengapa kami harus menekukkan lutut kami kepada seorang ratu asing?"[204] Menurut Hatta, Ratu Wilhemina tentu ingin mempertahankan luas kerajaannya "sama dengan kesungguhan keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka, bebas dari bentuk apa pun dari dominasi asing. Keinginan untuk merdeka sesuai dengan detak jantung sejarah bangsa-bangsa dan sesuai dengan prinsip semua bangsa, pada saatnya, mengatur persoalan mereka sendiri".[205]

Instabilitas yang menghantui republik muda mendorong Hatta menerima saran dari banyak pihak, terutama Didi Kartasasmita dan Urip Sumohardjo, keduanya aktif dalam ketentaraan Hindia Belanda di masa sebelum perang.[206] Urip mengungkapkan pendapatnya tentang perlunya pendirian tentara republik. Keputusan dari PPKI untuk membubarkan Peta dan Heiho, pasukan milisi yang paling sporadik di Jawa, diterima dengan kekecewaan oleh para pemuda. Salah seorang tokoh pemuda, Wikana, mendesak agar pemerintah membentuk tentara nasional yang mempersatukan milisi Peta dan Heiho. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

oleh PPKI sebagai semacam badan keamanan nasional kemudian dianggap sebagai kompromi. Meskipun demikian, kedudukan badan ini di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI) dan bukan kementerian pertahanan menimbulkan ketidakjelasan. KNI pada awalnya adalah badan pendamping pemerintah untuk memobilisasi rakyat bukan sebagai badan perwakilan. Sehingga kedudukan BKR menimbulkan pertanyaan, ia bukan alat untuk mengamankan kebijakan pemerintah dalam bidang pertahanan, bukan pula merupakan tentara rakyat.[207] Mayor Urip menemui Hatta dan mengatakan bahwa bekas opsir KNIL sepakat untuk menyerahkan tenaga mereka kepada TKR (Tenaga Keamanan Rakyat). Hatta mengatakan kepada Urip bahwa pemerintah sedang membentuk TKR yang diambil dari tentara Peta.[208] Hatta meminta Urip untuk bersedia menjadi Kepala TKR dan meminta sarannya mengenai lokasi markas besar TKR, yang kemudian berdasar usul Urip diputuskan berlokasi di Purwokerto.

Meskipun Christinson melarang Sekutu untuk menyerang Sukarno dan Hatta dan sebetulnya telah memberikan semacam pengakuan *de facto* terhadap pemerintah Republik, kedatangan Inggris memang mendorong kesukaran baru bagi kabinet.[209] Kedudukan kabinet yang relatif kuat sebenarnya didasarkan pada hubungan dengan Jepang. Inggris bersedia berurusan dengan kabinet itu untuk memenuhi tujuan-tujuannya sendiri dengan berusaha memanfaatkan otoritas mereka. Meskipun demikian, Belanda begitu memusuhi Sukarno dan "menganggap bahwa pemerintahannya dibayangi oleh awan hitam kolaborasi".[210] Belanda menganggap bahwa pemerintah Indonesia tidak lebih dari pemerintah boneka Jepang yang bersifat totaliter, yang bergantung kepada organisasi militer Jepang.[211] Selain itu, tantangan tidak hanya datang dari pihak Belanda, kelompok pemuda merasakan bahwa pemerintah tidak mampu untuk memenuhi tuntutan yang diminta oleh mereka. Kelompok pemuda, misalnya, tidak puas dengan ketidakrevolusioneran pemerintah dalam rapat massa di Ikada dan kelambanannya yang makin nyata setelah Sekutu datang. Muncul perasaan bahwa pemerintah tidak semangat melihat militansi pemuda di ibukota-ibukota daerah. Timbul suatu keyakinan bahwa kelesuan dan kelambanan itu perlu diakhiri dan hal itu hanya dapat dilakukan dengan merombak pemerintah agar bisa menjalankan langkah-langkah yang bisa mengikuti gerak laju perubahan yang berlangsung cepat.[212] Menurut Anderson, ketidakmampuan untuk diterima oleh dunia luar juga oleh kekuatan revolusioner yang diwakili oleh pemuda di daerah adalah kenyataan yang semakin jelas menggerogoti semangat juang kabinet.[213]

Perubahan untuk beralih kepada sistem yang lebih demokratis dinyatakan oleh Sjahrir, tokoh yang lebih dipercaya oleh kelompok pemuda karena sikapnya yang keras terhadap fasisme Jepang. Sjahrir, yang kritis terhadap kekuasaan ekstra peralihan yang menyebabkan munculnya lembaga kepresidenan, menyarankan KNIP dapat berfungsi secara sementara sebagai badan legislatif. Sukarno dan Hatta menerima usulan ini. Lagipula Sukarno merasakan bahwa ia perlu menimbulkan kesan yang lebih liberal kepada Sekutu. Meskipun, sebetulnya ia sendiri ragu untuk menyatukan diri sepenuhnya dengan peraturan yang akan mengurangi

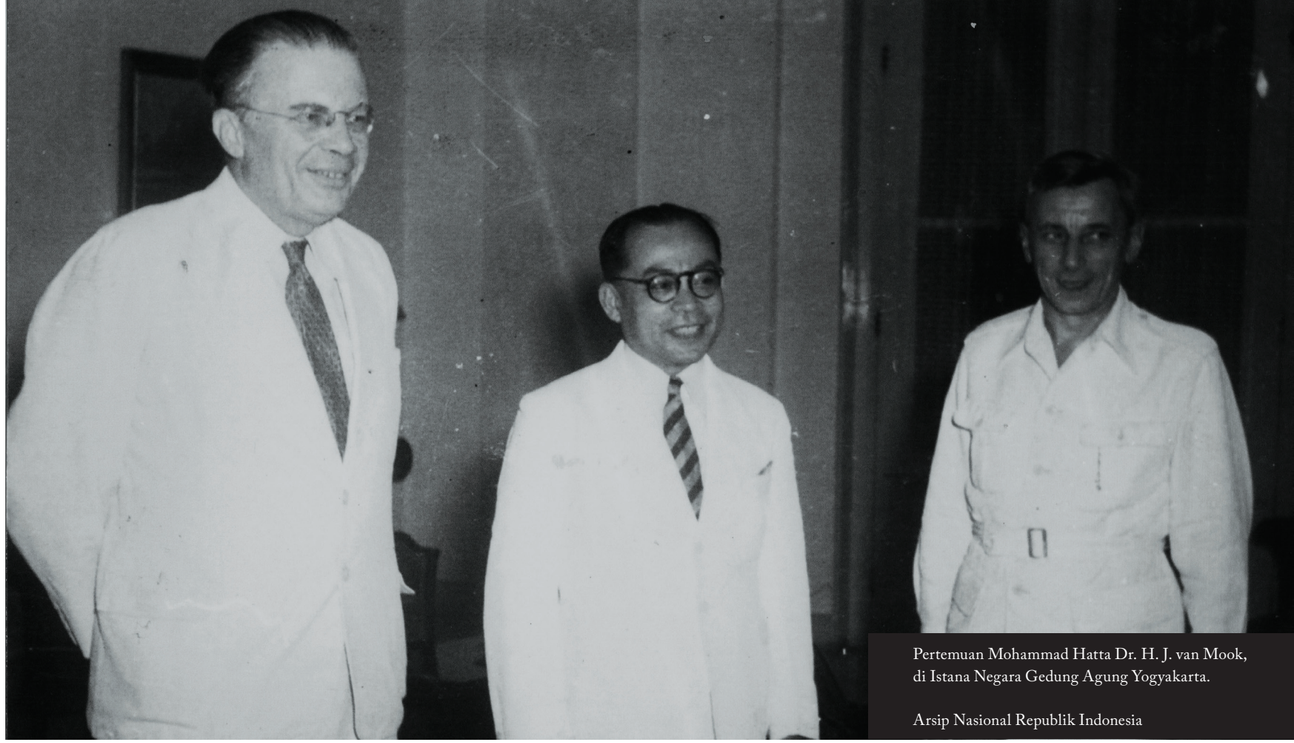

Pertemuan Mohammad Hatta Dr. H. J. van Mook, di Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta.

Arsip Nasional Republik Indonesia

kekuasaannya dan didesakkan kepadanya oleh tekanan eksternal agar sikap Belanda lebih lunak terhadap Indonesia.[214] Sukarno menugasi Hatta untuk mengeluarkan dekrit yang memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP. Hatta menyetujuinya dan mengeluarkan sebuah keputusan yang dikenal sebagai Maklumat Wakil Presiden No. X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang mengumumkan bahwa KNIP sebelum terbentuk Majelis Permusyarawatan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi tugas sebagai badan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Untuk pekerjaan sehari-hari maka dibentuklah Badan Pekerja KNIP di mana Sjahrir dan Amir Sjarifuddin menjadi ketua dan wakil ketua. Dengan perubahan ini maka sistem pemerintahan Indonesia telah sesuai dengan rancangan UUD, yaitu kabinet presidensial yang diimbangi oleh suatu majelis rakyat. Hatta sendiri meyakini bahwa kekuasan demokratis seharusnya terjadi pembagian kekuasaan secara jelas dan merata untuk menghindari munculnya kekuasaan pemimpin yang tidak terkontrol.

Tidak lama setelah Hatta mengumumkan Maklumat No. X, ia mengeluarkan lagi Maklumat Wakil Presiden pada 3 November tentang kesempatan bagi rakyat untuk mendirikan partai politik. Maklumat ini dikeluarkan atas usul BP KNIP yang memang menginginkan terbentuknya partai-partai politik untuk mencegah konsepsi sistem satu partai negara (*staatspartij*) yang lebih disukai oleh Sukarno. Munculnya maklumat tersebut selain memang untuk mendorong proses demokratisasi dengan pemberian hak-hak yang lebih luas kepada rakyat untuk berserikat dan berpolitik, juga dikeluarkan untuk mempersiapkan pemilu pertama pasca kemerdekaan yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Januari 1946. Pada dasarnya, Hatta memang setuju dengan

Presiden Sukarno melantik Kabinet Hatta pada tanggal 20 Februari 1948.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Presiden Sukarno menghadiri sidang kabinet Hatta yang pertama pada tanggal 20 Februari 1948.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

penegakan hak-hak rakyat untuk berpolitik, namun ia tidak setuju dengan sistem multipartai yang melibatkan jumlah partai yang terlalu banyak. Partai-partai politik dalam bayangannya sebaiknya tidak hanya sekedar berdiri saja untuk menyemarakkan politik tapi turut memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

MEMIMPIN DI TENGAH KRISIS SEBAGAI PERDANA MENTERI

KABINET PRESIDENTIL DARURAT

Apabila Sjahrir jatuh dari kursi perdana menteri akibat perundingan Linggarjati, Amir Sjarifuddin jatuh dengan cara yang kurang lebih sama akibat ketidakpuasan partai-partai politik dan rakyat setelah perundingan Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Berdasarkan perjanjian Renville, Republik Indonesia hanya akan menjadi bagian dari Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk dan dikepalai oleh Ratu Belanda. Wilayah Indonesia hanya akan terdiri atas Jawa Tengah dan daerah-daerah di Sumatera. Yang paling merugikan bagi Indonesia adalah kabinet Amir menyetujui keabsahan "garis van Mook" yang membuat wilayah RI semakin berkurang sebab para gerilyawan terpaksa meninggalkan wilayah kantong gerilya di balik garis itu untuk diduduki oleh tentara Belanda.[215] Situasi politik begitu kacau ketika itu karena sulit membayangkan siapa tokoh pemimpin yang mau menerima tekanan yang besar untuk menerapkan hasil dari perundingan Renville, terutama dalam memerintahkan unit militer Indonesia agar mau menarik diri dari wilayah Republik yang semakin menyempit.[216] Pembentukan kabinet yang dapat menyatukan seluruh partai-partai politik, menurut Kahin, merupakan satu-satunya jalan pintas untuk menciptakan kepemimpinan yang kuat.[217] Pilihan siapa tokoh yang dapat menanggulangi kemelut krisis kemudian jatuh kepada Hatta yang dianggap oleh Sukarno sebagai orang yang tepat, dari luar partai, untuk mengemban tugas berat itu.

Tahun 1948 adalah "salah satu tahun yang paling kritis dan menantang dalam kehidupan Hatta".[218] Moh. Roem mengenang bahwa "Renville adalah titik kekalahan dalam perjuangan dan orang merasa adanya kebutuhan kabinet yang kuat dan Hatta tampak sebagai pemimpin yang terkuat". Tugas yang menanti perdana menteri selanjutnya begitu berat yaitu mengembalikan kepercayaan barisan bersenjata, termasuk laskar, di dalam negeri dan menjaga kepercayaan luar negeri dengan tetap memprioritaskan perjuangan diplomatik sebagai ujung tombak mempertahankan kedaulatan Republik.[219] Pada tanggal 29 Januari 1948 "kabinet presidentil"darurat Hatta dikukuhkan oleh Sukarno. Kabinet ini langsung bertanggung jawab kepada Sukarno sebagai presiden bukan kepada KNIP. Kabinet ini didukung oleh "golongan tengah" Masyumi dan PNI, serta tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Masyumi adalah partai yang begitu mempercayai Hatta, sementara itu PNI dikenal memiliki hubungan dekat dengan Hatta. Meskipun begitu, Hatta tidak mampu mendamaikan sayap kiri yang kini terpecah belah. Tuntutan sayap kiri dari kelompok Front Demokrasi Rakyat (FDR) Amir Sjarifuddin adalah mulanya 10 kursi kabinet, kemudian 8 kursi dengan Amir Sjarifuddin duduk sebagai menteri pertahanan.[220] Sementara itu, Hatta hanya bersedia memberikan 2 kursi karena ingin membangun kabinet persatuan nasional dari

berbagai macam golongan. Masyumi menentang penunjukkan Amir sebagai menteri pertahanan karena sebelumnya mereka yakin Amir menggunakan dana jabatannya untuk membina kelompok pengikut dari kalangan militer. Hatta meminta Sultan Hamengkubuwono IX sebagai menteri pertahanan, namun Sultan menyatakan ketidaksanggupannya. Masalah pertahanan memang salah satu masalah yang paling krusial dalam krisis di tahun 1948. Akhirnya Hatta sendiri yang memegang kursi menteri pertahanan sekaligus sebagai perdana menteri.

SUSUNAN KABINET HATTA I

- Perdana Menteri
  Mohammad Hatta
- Menteri Luar Negeri
  H. Agus Salim
- Menteri Dalam Negeri
  Sukiman Wirjosandjojo
- Menteri Pertahanan
  Mohammad Hatta
- Menteri Keuangan
  A.A. Maramis
- Menteri Perhubungan
  Ir. Djuanda
- Menteri Penerangan
  Mohammad Natsir
- Menteri Kesehatan
  Johannes Leimena
- Menteri Perburuhan dan Sosial
  Kusnan
- Menteri Kehakiman
  Susanto Tirtoprodjo
- Menteri PP dan K
  Ali Sastroamidjojo
- Menteri Pekerjaan Umum
  Ir. Laoh
- Menteri Kemakmuran
  Sjafruddin Prawiranegara
- Menteri Pembagian Makanan Rakyat
  I.J. Kasimo
- Menteri Agama
  K.H. Maskur
- Menteri Negara
  Sultan Hamengkubuwono IX
- Menteri Pembangunan dan Pemuda
  Supeno

Program Kabinet Hatta diumumkan pada tanggal 16 Februari 1948, mencakup empat program, yakni:

1. Pelaksanaan perjanjian gencatan senjata Renville dan prinsip-prinsip politik serta kelanjutan negoisasi-negoisasi dengan Belanda melalui Komisi Jasa Baik Dewan Keamanan PBB (KTN).
2. Mempercepat pembentukan Negara Indonesia Serikat (NIS) yang demokratis dan berdaulat.
3. Rasionalisasi ekonomi dan angkatan darat Republik.
4. Perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh perang dan pendudukan Jepang.[221]

Program tersebut dan proses pelaksanaannya ini disampaikan oleh Hatta kepada BP KNIP secara berkala. Menurut Hatta, tugas yang menanti segera pada saat itu adalah melaksanakan persetujuan Renville dengan perantaraan KTN.[222] Perundingan akan diadakan berganti-ganti, tiga minggu di Jakarta dan tiga minggu di Kaliurang, Yogyakarta.

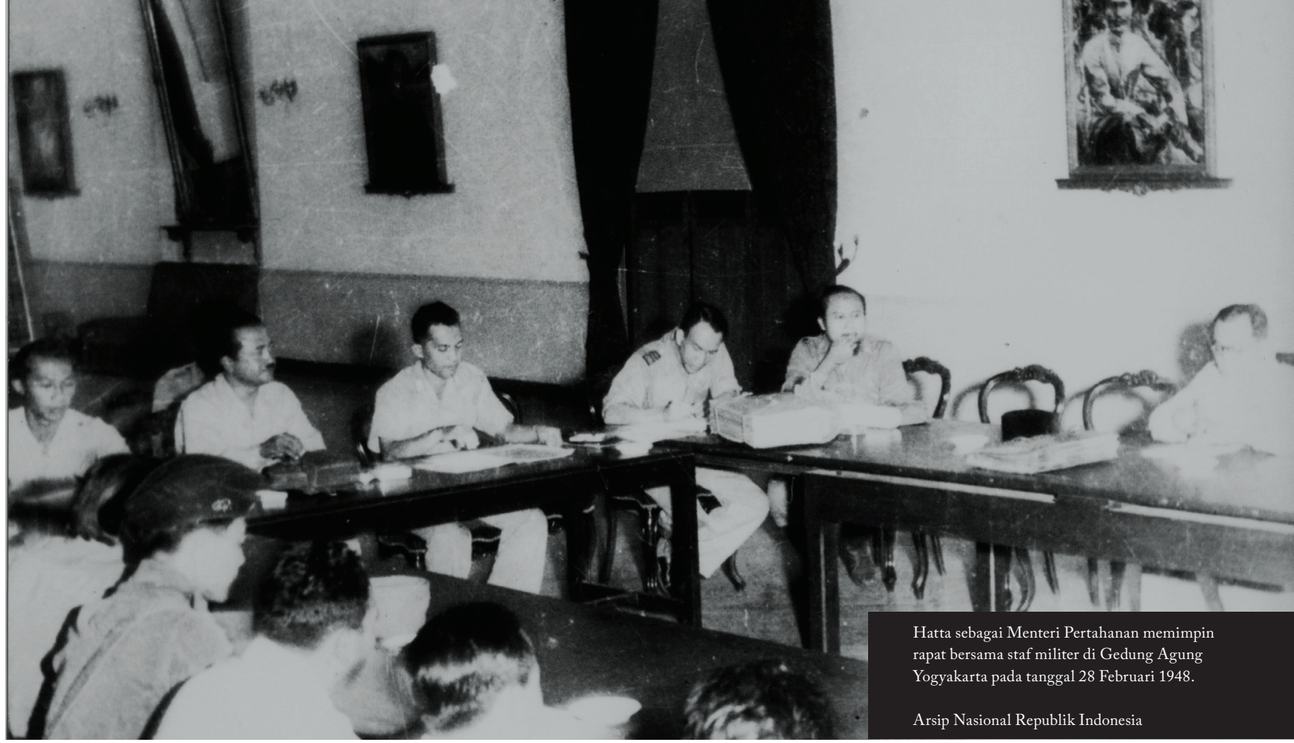

Hatta sebagai Menteri Pertahanan memimpin rapat bersama staf militer di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 1948.

Arsip Nasional Republik Indonesia

MENJALANKAN KEPUTUSAN SULIT DI TENGAH KRISIS

Untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda atas dasar Perundingan Renville, Hatta mengangkat Moh. Roem sebagai ketua delegasi yang mewakili Republik. Mereka berdua berada di posisi yang sulit dan tidak menyenangkan untuk melaksanakan perjanjian ini. Dalam pidatonya, Hatta berpendapat bahwa "dengan menerima persetujuan Renville ini, kita banyak mengalami kerugian dalam kenyataan dan dalam perasaan, tetapi toh kita terima untuk menyatakan kepada dunia, bahwa kita bersedia menyelesaikan persengketaan kita dengan Belanda dengan jalan damai, asal satu hak diakui oleh Belanda, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia".[223] Hatta mulai melaksanakan syarat perjanjian Renville yang paling kontroversial, yakni pengakuan terhadap garis van Mook. Pasukan militer milik Republik terpaksa ditarik meninggalkan banyak kantong gerilya dan pindah ke wilayah terkepung yang dikuasai oleh Republik. Kondisinya waktu itu sangat sulit untuk membujuk pasukan militer menarik diri dari pangkalan gerilya yang telah diperjuangkan tersebut. Namun, pemerintah dapat meyakinkan tentara dengan mengatakan bahwa jaminan plebisit yang diawasi PBB akan dilaksanakan di daerah tersebut.[224] Maka, pasukan militer Indonesia sekitar 35.000 orang meninggalkan kantong gerilya dan hanya tinggal sekitar 4.000 orang yang tidak mau dievakuasi, mayoritasnya adalah anggota laskar Hizbullah.[225]

Dalam melaksanakan perundingan dengan Belanda, Hatta mendasarkan kebijakannya atas kondisi riil situasi internasional dan dalam negeri yang dihadapi oleh Indonesia.[226] Keadaan politik dalam negeri tidak bisa diabaikan, tidak hanya di wilayah Republik yang sah, tetapi juga wilayah lain di Indonesia yang diduduki Belanda

Hatta dan delegasi Indonesia beramah tamah dengan delegasi KTN dan Belanda di Kepatihan Yogyakarta tanggal 11 Juni 1948.

Arsip Nasional Republik Indonesia

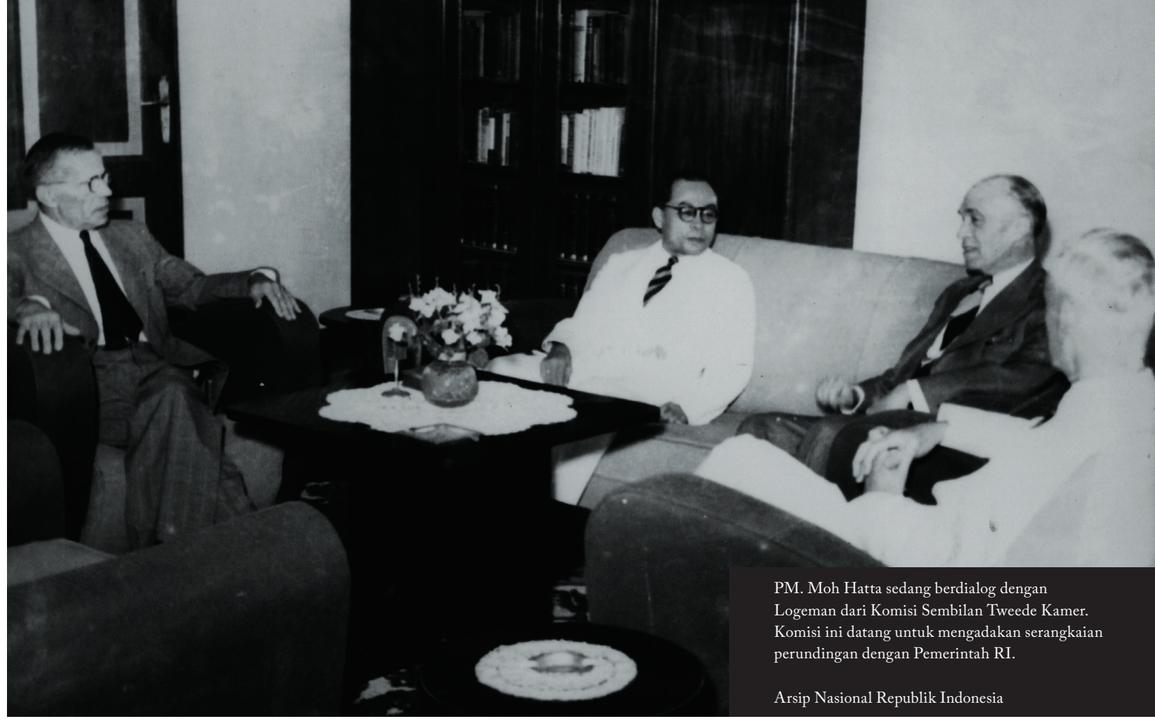

PM. Moh Hatta sedang berdialog dengan Logeman dari Komisi Sembilan Tweede Kamer. Komisi ini datang untuk mengadakan serangkaian perundingan dengan Pemerintah RI.

Arsip Nasional Republik Indonesia

Moh Hatta mengadakan pertemuan dengan anggota delegasi RI di Jakarta.

Arsip Nasional Republik Indonesia

PM. Mohammad Hatta berbincang-bincang dengan Merle H. Cochran, wakil Amerika Serikat dalam KTN.

Arsip Nasional Republik Indonesia

dan di beberapa wilayah lain yang telah disulap menjadi negara buatan Belanda. Meskipun Kabinet Hatta mendapat tekanan yang kuat terhadap jalan diplomatik yang ditempuhnya, ia tetap menekankan sikap politik realis yang mengutamakan perdamaian dalam usaha menyelesaikan persengketaan dengan Belanda. Dengan penandatanganan perjanjian Renville, pemerintah Indonesia akan melekaskan pembentukan NIS yang merdeka dan berdaulat (program kedua Kabinet Hatta). Menurut Hatta, Republik Indonesia menyetujui pembentukan NIS bukan karena bentuk baginya yang menjadi pokok, melainkan kemerdekaan bangsa.[227] Bentuk boleh dipilih menurut kehendak rakyat, yang dapat dinyatakannya melalui kemerdekaan berpendapat. Namun, yang tidak boleh diabaikan dalam NIS yang akan datang itu adalah hak demokratis yang melekat pada setiap penduduk. Itulah mengapa, pembentukan NIS yang demokratis menjadi pokok tujuan utama dalam program pemerintahan Republik. Pemerintah Indonesia bersedia ikut aktif mendorong pembentukan NIS yang demokratis oleh pemerintah sementara asalkan memenuhi syarat, sebagai berikut:

a. Perwakilan bagi Republik yang adil (fair representation)
b. Yang duduk dalam pemerintahan sementara hendaklah orang-orang yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab
c. Pemerintah sementara itu berdasar kepada demokrasi dan menghargai tumbuhnya demokrasi di kalangan rakyat
d. Ada ketentuan yang nyata tentang kekuasaan pemerintah sementara itu.[228]

Belanda terus menekan pihak Republik dengan membentuk negara-negara federal di wilayah yang telah direbutnya, tetapi mereka memperoleh sedikit keberhasilan karena dukungan yang mereka dapatkan tidak bertahan lama.[229] Pada bulan Februari dibentuk negara Madura dan negara Jawa Barat yang dinamakan Pasundan. Di bulan September 1948 dibentuk negara Sumatera Selatan dan kemudian November 1948 negara Jawa Timur. Upaya ini terus berlanjut sampai terbentuk lima belas negara federal di wilayah yang telah Belanda rebut. Pada tanggal 9 Maret 1948, van Mook mengumumkan pemerintahan sementara untuk Indonesia yang berbentuk federal dan ia akan menjadi presiden dari pemerintahan tersebut dibantu dengan sekretariat kunci yang dikepalai oleh orang-orang Belanda. Hatta tidak dilibatkan ke dalam perencanaan pemerintahan federal sementara, meskipun ia menawarkan untuk berpartisipasi. Alasan penolakan tersebut ialah bagi pihak Belanda belum terjadi penyelesaian politik yang final pengakuan Republik atas kekuasaan Belanda. Tanpa persetujuan ataupun dengan persetujuan Republik, Belanda bermaksud membentuk Negara Indonesia Serikat yang akan diresmikan pada akhir tahun itu. Namun, perasaan pro-Republik di kalangan elite dan dukungan yang tidak terlalu besar terhadap federalisme di kalangan rakyat muncul di dalam negara-negara federal tersebut.[230] Atas dasar inilah, pihak Belanda mempertimbangkan dipakainya kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik dengan Indonesia.

Problem berat yang dihadapi Hatta tidak hanya mengenai bagaimana sulitnya ia menjalankan keputusan Renville, tapi juga bagaimana serangan

Kabinet Hatta mengadakan sidang untuk menentukan sikap pemerintah terhadap pemberontakan PKI/Madiun.

Arsip Nasional Republik Indonesia

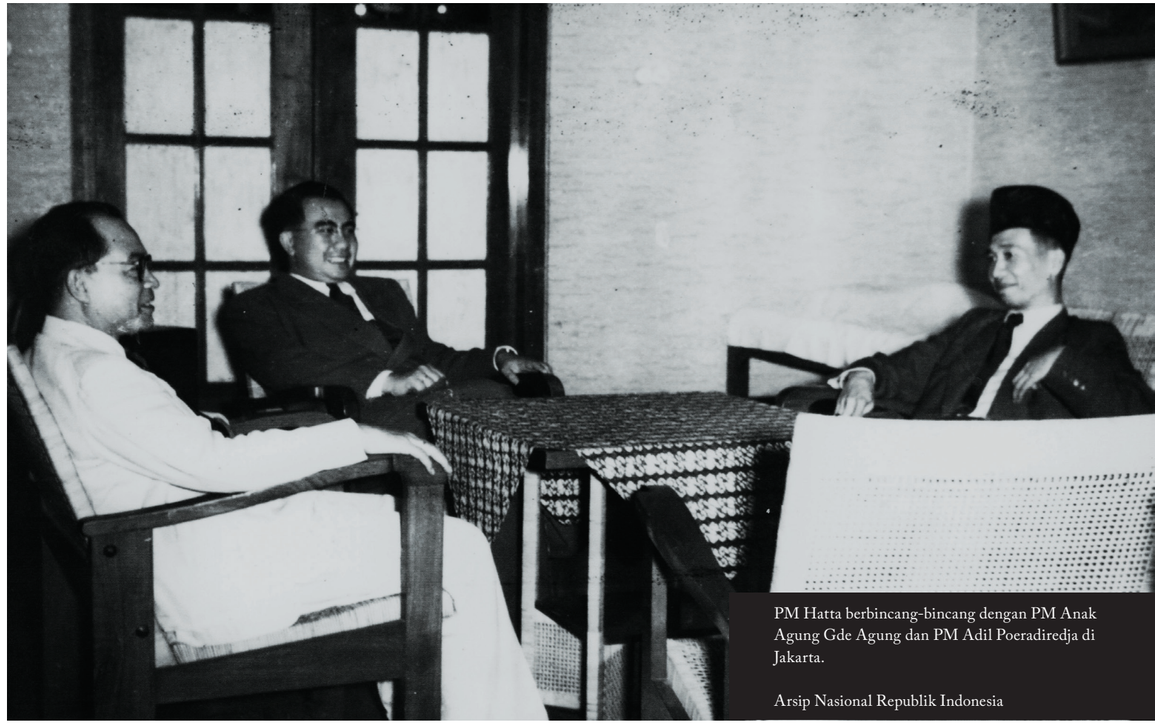

PM Hatta berbincang-bincang dengan PM Anak Agung Gde Agung dan PM Adil Poeradiredja di Jakarta.

Arsip Nasional Republik Indonesia

dari sayap kiri FDR semakin besar. Secara paradoksal, meskipun para punggawa FDR adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan perjanjian Renville, namun dalam pelaksanaannya mereka menolak dan mencelanya. Hatta mengatakan hal ini sebagai "perputaran pendirian" yang merupakan keganjilan politik.[231] Kewaspadaan terhadap kemungkinan meningkatnya konfrontasi segera dipikirkan Hatta ketika veteran PKI, Muso, kembali dari Rusia secara tiba-tiba pada bulan Agustus 1948. Ia mengumumkan rumusan perjuangannya "Jalan Baru"untuk meleburkan seluruh elemen kiri, termasuk FDR, ke dalam satu partai kelas pekerja, PKI, untuk merebut kepemimpinan nasional dari kelompok borjuis.[232] Dengan bergabungnya kelompok sosialis FDR Amir yang memiliki dukungan luas, pemerintah menyadari kekuatan signifikan dari PKI. Maka pada ulang tahun ketiga proklamasi, Sukarno membebaskan pemimpin Persatuan Perjuangan yang juga merupakan tokoh komunis awal Indonesia, Tan Malaka, dengan harapan bahwa ia mampu menarik dukungan kaum kiri dari Muso.

Pada bulan September 1948 terjadi konflik terbuka antara kekuatan bersenjata yang pro-PKI dan pro pemerintah di Surakarta. Konflik ini terjadi akibat timbulnya pertentangan antara Divisi Siliwangi yang terpaksa harus ditarik ke wilayah Jawa Tengah dan tentara setempat yang cenderung mengikuti kepemimpinan Amir Sjarifuddin atau Soedirman. Rasionalisasi tentara yang menyingkirkan banyak serdadu menambah runyam situasi dengan banyaknya serdadu yang berubah haluan mendukung lawan-lawan pemerintah. Pada tanggal 17 September Divisi Siliwangi memukul mundur pada pendukung FDR dari Surakarta. Mereka kemudian pergi ke Madiun, satu-satunya basis kekuatan PKI yang solid di mana mereka ingin menjalankan program radikal yang dikomandoi oleh Front Nasional. Pada tanggal 18 September, para pendukung PKI merebut lokasi-lokasi strategis di wilayah Madiun, menangkap sekitar ratusan lawan pro-pemerintah, mengancam pembunuhan terhadap orang-orang berbahasa Sunda (diduga Siliwangi), dan mengumumkan melalui radio bahwa sebuah pemerintahan Front Nasional telah terbentuk.[233] Para pemimpin PKI, seperti Muso dan Amir, segera pergi ke Madiun untuk menangani upaya pemberontakan yang prematur ini.[234] Kerusuhan ini menimbulkan krisis bagi Kabinet Hatta. Sukarno lalu maju ke depan, menghimbau rakyat melalui siaran radio untuk memilih Muso dan rencannya membentuk pemerintahan gaya Soviet atau bergabung dengan Sukarno dan Hatta dan mendukung Republik. Muso kemudian membalas dengan pengumuman di radio, mengajak rakyat untuk menggulingkan Sukarno dan Hatta dan mengecam revolusi yang dipimpin oleh kaum borjuis nasional yang tidak memiliki pandangan jelas dalam menghadapi kaum imperialis dan Amerika.[235] Ricklefs mengatakan bahwa kurangnya pengalaman Muso di Indonesia selama dasawarsa terakhir membuatnya mungkin tidak tahu betapa besarnya pengaruh Sukarno di tengah-tengah rakyat. Ketika dihadapkan para pilihan yang mentok antara Sukarno dan Muso, banyak satuan militer yang bersimpati pada oposisi pemerintah memutuskan menjauhkan diri.

Peristiwa Madiun merupakan titik balik yang mengubah pandangan sumir AS terhadap upaya dekolonisasi Indonesia menjadi dukungan diplomatik sesuai dengan strategi global mereka menghadapi Perang Dingin. Di wilayah Asia Tenggara, pada tahun 1948 terjadi serangkaian pemberontakan komunisme di Birma, Malaya, dan Filipina. Sementara itu, partai komunis China menunjukkan kemajuan yang pesat dalam membangun gerakan revolusioner yang berpuncak di tahun 1949 ketika Mao Zedong berhasil menjadi penguasa baru. Dalam perspektif AS, upaya Indonesia dalam melawan gerakan komunisme dianggap sebagai perwujudan dari pemerintahan yang moderat dan antikomunis. Meskipun AS tidak langsung memberikan dukungan secara jelas kepada Republik, namun Washington yakin bahwa pemerintahan Hatta dapat menjadi benteng untuk melawan komunisme di Indonesia.[236] Belanda yang frustasi dengan sikap AS yang berubah perlahan kemudian menuduh Hatta sebagai seorang marxis dengan menunjuk pembebasan terhadap Tan Malaka yang memungkinkan ia mendirikan Partai Murba.

Perundingan Indonesia-Belanda berjalan alot dan akhirnya jalan di tempat tanpa keputusan yang jelas. Hatta tidak ingin menerima permintaan Belanda agar Indonesia bertanggung jawab dalam hal keamanan dalam negeri selama peralihan menuju kemerdekaan atau tentara Republik digabungkan ke dalam barisan tentara federal.[237] Pertempuran kecil di belakang garis van Mook masih terjadi terutama ketika Divisi Siliwangi kembali masuk ke Jawa Barat pasca peristiwa Madiun. Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan melancarkan agresi militer kedua pada bulan Desember 1948 sebagai serangan pamungkas untuk melumpuhkan Republik.

RASIONALISASI

Program ketiga Kabinet Hatta adalah melakukan rasionalisasi pegawai negeri dan angkatan darat. Kebijakan ini dilakukan atas dasar perbaikan dalam susunan negara dan alat negara serta mencapai perimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.[238] Banyak tenaga yang jumlahnya terlalu banyak dan tidak pada tempatnya. Kelebihan pengeluaran belanja daripada pendapatan negara perlu dilakukan dengan mengaplikasikan rasionalisasi yang tepat, dengan memindahkan tenaga kerja yang tidak produktif ke daerah yang produktif. Pemindahan ini mungkin tidak langsung mengurangi angka belanja dalam negeri malahan sebaliknya karena membangun usaha produktif perlu penanaman kapital terlebih dahulu. Namun, jika prosesnya telah selesai maka usaha produktif itu akan menghasilkan pendapatan bagi negara yang banyak. Rasionalisasi, menurut Hatta, bukan semata-mata mengenai pemindahan tenaga dari usaha yang tidak produktif ke usaha produktif tetapi juga memperbaiki efektifivitas struktur dan bentuk tata usaha dan administrasi negara.[239]

Rasionalisasi dalam birokrasi negara dilakukan dengan mempelajari dasar normalisasi untuk susunan kementerian. Pemberantasan korupsi selanjutnya dilaksanakan dengan menyingkirkan dan menindak pegawai-pegawai yang terbukti korup. Problem yang ditemukan adalah masih sedikit tenaga yang berposisi sebagai pengawas yang melakukan konrol. Memperkuat kontrol merupakan fokus dari Kabinet Hatta untuk menekan kecurangan korupsi dalam administrasi. Hal ini dilakukan sebab merasionalisasi perusahaan negara tidaklah mudah sebab sulit membangun perusahaan yang seimbang untuk

menerima jumlah buruh dan pegawai yang berlebih.

Rasionalisasi yang paling urgen adalah menyasar angkatan perang Republik. Di masa Amir Sjarifuddin ketika menjadi perdana menteri dan menteri pertahanan, dibentuk tentara rakyat, semacam serdadu di samping tentara resmi, yang didanai oleh kementerian pertahanan. Amir juga mendanai laskar-laskar tertentu, salah satunya adalah laskar Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang memiliki basis massa yang kuat. Korps marinir oleh Amir dijadikan divisi penting dari sayap kiri di dalam angkatan perang Republik dengan terdapat sembilan admiral dan hampir seluruhnya berada di bawah kendali Amir. Belum lagi terdapat 463.000 jumlah angkatan perang yang tidak bisa seluruhnya mendapatkan dana dari negara.

Dalam perspektif Hatta, mengurangi jumlah tentara itu tidak bermaksud untuk melemahkan pertahanan negara malahan memperkuatnya. Menurut Hatta, "kekuatan tentara tidak bergantung kepada banyak jumlahnya, malahan kepada efektif susunannya, baik morilnya dan disiplinnya, cukup perlengkapannya".[240] Semua hal tersebut bisa dicapai apabila mengurangkan jumlah angkatan perang kepada susunan yang rasional sebab angkatan perang yang terlalu besar yang tidak terbelanjai oleh negara menimbulkan semangat yang buruk, merusak moril, dan mengurangkan kekuatan pertempurannya. Hatta berpendapat bahwa "suatu tentara yang kecil dan efektif yang mendapatkan sokongan dana negara dapat memelihara disiplin dan moril yang baik dan dapat pula diperlengkapi sebaik-baiknya keadaan". Serentak dengan mengecilkan angka pasukan, Hatta setuju bahwa politik pertahanan bergantung pada tentara dan pertahanan rakyat. Namun, menurut Hatta sebaiknya sistem pertahanan rakyat tidak menarik orang dari pekerjaannya yang biasa dan karena itu tidak mengurangi usaha produktif di dalam masyarakat. Hatta juga menolak bahwa sistem pertahanan rakyat disamakan dengan tentara rakyat-nya Amir yang mendapatkan pendanaan dari kementerian pertahanan. Ia yakin bahwa sistem pertahanan rakyat harus ditopang oleh biaya masyarakat dan berpusat dalam tiap desa.[241]

Pelaksanaan rasionalisasi dilaksanakan melalui tiga cara: (1) melepaskan mereka yang sukarela mau meninggalkan tentara, di antaranya ada yang ingin kembali kepada pekerjaannya yang lama sebagai guru, sebagai partikelir, dan lain-lain (2) menyerahkan mereka kepada kementerian pembangunan dan pemuda yang akan menyiapkan objek usaha bagi mereka (3) mengembalikan seratus ribu kembali ke dalam masyarakat desa. Rencana rasionalisasi ini tidak mudah untuk dilaksanakan.[242] Meskipun Hatta seorang ekonom yang menerapkan prinsip manajemen bisnis pada pemerintahannya, situasi revolusioner yang tak menentu merupakan problem yang tidak mudah untuk dihadapi meskipun perencanaan yang baik telah dipersiapkan. Secara geopolitik Indonesia menghadapi kesukaran karena blokade Belanda menyebabkan kesulitan proses ekspor dan impor serta kurangnya alat-alat untuk menggarap pekerjaan yang besar. Selain itu, problem selanjutnya adalah situasi perang dan revolusi menyebabkan munculnya problem psikologis: orang masih hidup dalam *psychose* perang dan perasaan terbuang dan tidak dihargai jasa-jasanya karena dipindahkan pekerjaannya.

PM Mohammad Hatta memberikan amanat pada acara Parade Angkatan Perang RI.

Arsip Nasional Republik Indonesia

Hatta memahami bahwa satu kesulitan yang objektif adalah di seluruh dunia ditemukan tidak mudah memindahkan prajurit yang sekian lama bertempur di medan peperangan kembali ke masyarakat.[243]

Upaya rasionalisasi Hatta didukung oleh Nasution, perwira muda dari Sumatera Utara yang merupakan Panglima Divisi Siliwangi. Perwira lainnya yang mendukung kebijakan rasionalisasi Hatta adalah T.B. Simatupang yang dikenal dekat dengan Sjahrir. Meskipun demikian, Jenderal Sudirman dan Urip merasakan bahwa terdapat situasi kritis di dalam tubuh angkatan bersenjata. Mereka berpendapat bahwa pemangkasan secara drastis dalam situasi yang tidak tepat harus ditunda meskipun anggaran dana untuk menjamin keberlangsungan tentara secara keseluruhan sebetulnya tidak mencukupi. Kekecewaan di kalangan militer tampak jelas dalam pertentangan yang terjadi di Surakarta antara Divisi Siliwangi yang dianggap mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah dan tentara oposisi yang berkiblat kepada Amir Sjarifuddin. Di Surakarta, beberapa perwira tidak mau menyerahkan jabatan mereka dan merasa bahwa Divisi Siliwangi mendapatkan status anak emas. Kebijakan rasionalisasi Hatta, meskipun menghadapi berbagai hambatan, dianggap tepat oleh Nasution dan Simatupang karena menempatkan pertimbangan ekonomi sebagai dasar perumusan keputusan

MENGUPAYAKAN PEMBANGUNAN DI TENGAH KRISIS

Kebijakan Kabinet Hatta yang keempat adalah masalah pembangunan yang dilakukan negara menghadapi krisis. Meskipun menghadapi berbagai kesukaran, terutama kesulitan keuangan, pembangunan mesti dijalankan dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk menjalankan

pembangunan, Hatta membentuk kementerian baru, yaitu kementerian pembangunan dan pemuda. Gabungan pembangunan dan pemuda merupakan simbol bahwa pembangunan negara akan disemangati oleh jiwa pemuda yang penuh semangat dan cekatan dalam bertindak. Kementerian ini mendapat tugas untuk menampung sebagian pemuda-pemudi yang dikeluarkan dari tentara dan mengusahakan supaya mereka dapat melakukan pekerjaan kreatif.[244] Dalam hal memilih pekerjaan, diutamakan ke dalam bidang pekerjaan yang membuat perusahaan, menghasilkan makanan, dan membuat pakaian.

Titik berat dari usaha kementerian pemuda dan pembangunan adalah menjalankan program transmigrasi secara besar-besaran yang dirancang oleh pemerintah atas dasar memperbesar kemakmuran rakyat dan menyebarkan kemakmuran seluruh rakyat.[245] Namun, kebijakan ini belum dapat dilakukan sepenuhnya dan masih terbatas kepada penyelidikan tentang daerah transmigrasi, memikirkan dan merencanakan cara bagaimana transmigrasi diselenggarakan. Di samping itu, pada masa Kabinet Hatta, Republik kehilangan daerah-daerah makmur dan subur yang menyebabkan kelancaran produksi menjadi terhambat, terutama pada bidang pertanian, perikanan, dan perhewanan. Hatta merencanakan tiga kebijakan untuk memperbanyak produksi dengan cara:

a. Menanami tanah pertanian yang sudah ada lebih kerap kali daripada yang telah sudah dalam setahunnya.
b. Memperbesar hasil tiap-tiap hektar tanah pada tiap-tiap kali panenan.
c. Menanami tanah baru yang belum ditanami.[246]

Meskipun pertanian di Jawa telah dikerjakan dengan baik, pengalaman selama enam bulan terakhir menyatakan bahwa pertanian masih dapat diintensifkan. Penanaman baru yang berasal dari tanah hutan, perkebunan, bekas *erfpacht klein landbouw*, yang ditanami dengan padi dan palawija kurang lebih 75.000 hektar luasnya. Tanah sawah yang diusahakan ditanami luasnya lebih kurang 138.000 hektar, sedangkan tanah yang dicoba ditanami jenis padi yang bagus luasnya kurang lebih 566.000 hektar.[247] Sementara itu, untuk memajukan kerajinan dan industri rakyat, pertukangan rakyat, perikanan dan perhewanan, Hatta menjalankan latihan koperasi pada tiap-tiap keresidenan. Latihan koperasi yang diberikan kepada rakyat di desa-desa tidak saja mengenai kepandaian mengatur pembukuan dan administrasi koperasi, melainkan mendidik semangat cinta kepada masyarakat atas dasar usaha bersama.[248]

Tanah memang menjadi salah satu *concern* dari Kabinet Hatta. Dalam Keterangan Pemerintah kepada BP KNIP pada 16 Februari, salah seorang anggota mengusulkan dihapuskannya hak konversi. Hatta kemudian membentuk suatu badan agraria untuk menyelidiki hal itu. Berdasarkan laporan panitia tersebut maka Undang-Undang No. 13 Tahun 1948 dihapuskanlah hak konversi di daerah Yogyakarta dan Surakarta yang menyebabkan hilangnya suatu hak tanah yang bersifat feodal, sesuai dengan keinginan petani dalam kedua daerah tersebut.[249] Hatta juga membentuk Panitia Agraria pada tanggal 21 Mei 1948 yang memiliki kewajiban: (1) memberi pertimbangan kepada pemerintah soal hukum tanah secara umum; (2) merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria daripada Negara Republik Indonesia; (3) merancang perubahan, penggantian, dan pencabutan peraturan lama, baik dari sudut legislatif maupun praktik; (4) menyelidiki soal-soal baru yang berhubungan dengan soal tanah. Tugas kewajiban panitia itu termasuk merencanakan cara bagaimana menjalankan pasal-pasal agraria yang tersebut dalam program nasional.

Salah satu program Hatta dalam bidang politik yang belum begitu diketahui banyak orang adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Dasar hukum dari program ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 27 pada tanggal 28 Agustus 1948. Memang pemilu tidak akan diadakan dengan segera, menurut perhitungan persiapannya memakan waktu satu tahun dan pemilihannya akan berlangsung tiga bulan sampai satu tahun lagi. Tujuan diadakan pemilihan umum ini adalah dua pertimbangan: agar terbentuk susunan pemerintahan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam masyarakat dan pemerintah dan agar demokrasi Indonesia dapat tumbuh berkembang.[250] Hatta berpendapat parlemen yang memiliki legitimasi dan kekuatan hanyalah parlemen yang dipilih secara sah dan demokratis oleh rakyat. Di dalam parlemen tersebut perdebatan antar partai mengenai isu-isu penting negara sebaiknya diperdebatkan. Hatta pun melihat bahwa kabinetnya sendiri berfungsi secara sementara. Dan ia mengharapkan setelah suasana politik kembali normal, kesepakatan partai dapat membentuk sebuah kabinet parlementer yang kuat.

KMB DAN PENGAKUAN KEDAULATAN

Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua di ibukota Republik, Yogyakarta. Sehari pasca serangan tersebut, Yogyakarta diduduki oleh militer Belanda dan para pemimpin Republik membiarkan dirinya ditangkap dengan asumsi bahwa perhatian dunia akan tertuju kepada Indonesia sehingga aksi militer Belanda ini tidak mendapat simpati dari dunia internasional. Hampir seluruh anggota kabinet, kecuali beberapa orang yang tidak ada di tempat, ditangkap, termasuk pula Sjahrir. Sukarno, Agus Salim, dan Sjahrir, kemudian diasingkan ke Brastagi dan kemudian Parapat, Sumatera Utara dan Hatta, Ali Sastroamidjojo, dan beberapa pemimpin lainnya diasingkan ke Bangka pada tanggal 22 Desember. Pada tanggal 5 Februari 1949, Sukarno dan Salim kemudian dipindahkan ke tempat tahanan Hatta di Bangka. Dalam penahanan Hatta ditempatkan di villa berkamar tidur dua buah, tetapi dikurung oleh kawat berduri – cara-cara Belanda tidak berubah sejak masa praperang. Ketika salah satu anggota Komite Jasa Baik menengok tempat interniran Hatta, ia terkejut melihat Hatta “tinggal di dalam sangkar”. Hatta mengatakan, “hal ini bertentangan dengan keterangan wakil Belanda di PBB yang mengatakan bahwa mereka dibiarkan bebas bergerak di sekitar Bangka”.[251]

Dewan Keamanan PBB merasa bahwa serangan militer yang dilakukan oleh Belanda sudah terlampau jauh. Ketika Belanda menyerang, Komite Jasa Baik PBB berada hanya beberapa kilometer di Yogyakarta, tepatnya di Kaliurang, dan dengan cara Belanda melakukan penyerangan

ini Komite Jasa Baik merasa tersinggung diperlakukan dengan cara tidak terhormat oleh Belanda. Amerika marah dengan tindakan Belanda. Mereka lalu menghentikan pemberian dana kepada Belanda untuk mendukung pengeluaran di Indonesia. Di dalam kongres Amerika, bahkan suara-suara untuk menyetop semua bantuan ekonomi AS semakin meningkat. Reaksi-reaksi seperti ini tentu saja sesuatu yang diharapkan oleh pemerintah Republik.

Dalam menjaga kontinuitas pemerintahan, sejak para pemimpin Indonesia ditangkap, maka pucuk kepemimpinan berpindah kepada menteri kemakmuran, Syafruddin Prawiranegara, yang berada di Sumatera. Mulai saat itu kekuasaan pemerintah berpindah kepada Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Sementara itu, tentara masih mengadakan perang gerilya yang intensif di Jawa, meskipun kondisi pemimpin mereka Soedirman berada dalam kondisi kritis karena penyakit TBC. Politik Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, menurut Hatta, dibangun melalui dua sendi perjuangan: perjuangan politik internasional melalui jalan damai dan melakukan perang gerilya apabila diserang.[252] Oleh sebab itu, Sukarno menolak tawaran untuk memerintahkan tentara meletakkan senjata dan mendukung gerilya tentara untuk membela kehormatan negara yang dilanggar.

Sorotan internasional kepada agresivitas Belanda semakin kuat setelah serangan militer kedua. Menurut Hatta, ada dua simpati dunia internasional yang begitu penting dalam mengubah situasi konflik yang tengah berlangsung di Indonesia. Pertama, resolusi Konferensi Asia untuk Indonesia di New Delhi pada tanggal 23 Januari 1949 di mana negara-negara Asia dan dua negara Afrika merekomendasikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Belanda. Kedua, resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 di mana keluar keputusan untuk menuntut pembebasan para pemimpin Republik, mengawasi pembentukan Negara Indonesia Serikat yang diusulkan, dengan pengalihan kedaulatan sepenuhnya sebelum 1 Juli 1950. Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB memperlemah legitimasi Belanda untuk bertahan di Indonesia dan sebaliknya memperkuat posisi Indonesia dalam merebut kembali kedaulatan mereka. Komisi Jasa Baik berubah menjadi Komisi PBB untuk Indonesia (United Nations Commission of Indonesia, UNCI). Tugasnya adalah mencari jalan untuk mengadakan penyelesaian konflik berdasarkan jalur kompromistis. UNCI, menurut Hatta, diserahi kewajiban untuk membawa pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia, berunding untuk mencapai persetujuan dalam tiga hal: (1) pengembalian pemerintah Republik ke Yogyakarta (2) mengadakan *order* peletakan senjata (3) mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang merundingkan penyerahan tak bersyarat daripada kedaulatan yang riil dan penuh kepada Indonesia.[253]

Faktor penting yang juga memperlemah posisi Belanda adalah agresi militer kedua mereka tidak hanya menghilangkan dukungan internasional kepadanya, tetapi juga membuat negara-negara BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) justru menentang mereka.[254] Pembelaan terhadap Indonesia muncul di wilayah-wilayah lain di luar

Delegasi Belanda yang diketuai oleh Dr. Van Royen diterima Wakil Presiden Mohammad Hatta, 17 Juli 1949.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jawa. Anak Agung Gde Agung, perdana menteri Bali dari BFO, yang menemui para pemimpin Republik di Bangka mengakui bahwa ia terkesan dengan semangat Hatta. Anak Agung merupakan satu tokoh BFO yang nanti memberi dukungan yang kuat terhadap kepemimpinan dwitunggal dan gagasan kemerdekaan sepenuhnya Indonesia. Dalam menghadapi tekanan internasional dan simpati yang memudar dari mayoritas orang Indonesia, Belanda akhirnya terpaksa setuju untuk mengembalikan pemerintahan Republik ke Yogyakarta.

Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintah Republik kembali beroperasi di Yogyakarta. Sambutan rakyat kepada para pemimpin Republik yang diasingkan hangat dan meriah. Namun, tanggapan yang agak sinis diberikan oleh pihak militer yang enggan mengakui kekuasaan sipil yang dianggap telah meninggalkan Republik.[255] Soedirman menentang perintah genjatan senjata yang dijadwalkan mulai 1 Agustus dan memutuskan untuk mundur menyerahkan surat pengunduran diri. Tapi, ia mencabut kembali pengunduran dirinya karena Sukarno mengancam akan ikut mengundurkan diri juga. Seminggu setelah Sukarno dan Hatta dibebaskan, Syarifuddin Prawiranegara kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 13 Juli 1949, sebagai kepala PDRI ia menyerahkan mandatnya kepada Hatta selaku perdana menteri dan wakil presiden untuk membentuk kabinet yang baru.

Satu peristiwa penting menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah diadakannya inisiatif Konferensi Inter-Indonesia oleh Indonesia dengan mengundang negara-negara BFO. Memang tidak ada satu kebulatan suara dari BFO untuk mendukung pengalihan kedaulatan mutlak kepada Negara Indonesia Serikat. Meskipun demikian, kebanyakan

negara BFO menaruh simpati kepada Republik setelah penolakan Republik untuk mengakui kekalahan setelah serangan militer Belanda kedua. Dalam konferensi Hatta mengingatkan Sumpah Pemuda dalam konferensi mereka yang bersejarah di bulan Oktober 1928: "satu bangsa, satu tanah ait, dan satu bahasa". Dalam Konferensi Inter-Indonesia kemudian muncul keputusan bahwa:

1. Negara Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia Serikat.
2. Bendera merah putih disahkan.
3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan disahkan.
4. Lagu "Indonesia Raya" disahkan.
5. 17 Agustus diakui sebagai hari nasional.[256]

Pada tanggal 4 Agustus Hatta selesai merampungkan susunan kabinetnya yang baru. Kabinet tesebut berisi tokoh-tokoh, sebagai berikut:

- Perdana Menteri
  Moh. Hatta
- Menteri Luar Negeri
  Haji Agus Salim
- Menko Dalam Negeri
  Mr. Wongsonegoro
- Menteri Pertahanan
  Sultan Hamengku Buwono
- Menteri Keuangan
  Mr. Lukman Hakim
- Menteri Penerangan
  Mr. Syamduddin
- Menteri Pekerjaan Umum
  Ir. Laoh
- Menteri Kesehatan
  dr. Soerono
- Menteri Perburuhan & Sosial
  Koesnan
- Menteri Kehakiman
  Mr. Soesanto Tirtoprodjo
- Menteri P dan K
  S. Mangoensarkoro
- Menteri Kemakmuran dan Urusan Makanan
  I. J. Kasimo
- Menteri Agama
  K.H. Masjkur
- Menteri-Menteri Negara:
  1. dr. Leimena
  2. Ir. Djuanda
  3. dr. Sukiman

Dalam persiapannya menuju ke KMB, Hatta meminta Sjahrir untuk membantu sebagai penasihat delegasi. Namun, Sjahrir lagi-lagi menolak dengan alasan Indonesia terlalu menggantungkan posisinya kepada AS yang terlalu dominan dan ia kurang percaya bahwa kembalinya pemerintahan Republik ke Yogyakarta atas desakan PBB. Di samping itu, Sjahrir yakin bahwa Belanda masih belum siap mengadakan perundingan dengan serius. Akhirnya, Hatta berangkat tanpa Sjahrir. Sebagai perdana menteri, Hatta memimpin delegasi Indonesia ke KMB di Den Haag dengan Moh. Roem sebagai wakilnya. Dalam perjalanan ke Belanda, Hatta menyempatkan sejenak untuk singgah bertemu dengan Nehru, menerima beberapa sarannya. Hatta menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan Nehru dan India kepada kedaulatan penuh Republik.

KMB diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November di Den Haag, Belanda. Utusan dari RI adalah Moh. Hatta, dari PMF adalah Sultan Hamid, dan dari Belanda adalah Van Maarseveen, Menteri Wilayah Seberang Lautan. Konferensi dipimpin oleh Perdana Menteri Dress dari Belanda yang didampingi oleh Komisi Tiga Negara. Permasalahan pokok dalam konferensi adalah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Diskusi seputar pengembalian wilayah berlangsung dengan intensif tawar menawar antara Belanda dan Republik. Hanya wilayah Papua yang statusnya masih ditangguhkan dan akan dibicarakan kembali statusnya di masa mendatang. Belanda tahu bahwa Sukarno menginginkan Hatta supaya Papua kembali ke tangan Indonesia. Namun, Hatta dengan kalkulasi tinggi berpikir bahwa penundaan untuk membicarakan status Papua lebih baik dilakukan daripada menghabiskan waktu konferensi untuk membahas satu isu yang *deadlock*. Lagipula, ia yakin bahwa merebut kembali Papua lebih mudah dan realistis setelah Belanda mengalihkan kedaulatan kepada Indonesia.[257] Dalam masalah politik, pelembagaan Uni Indonesia-Belanda kemudian disepakati dengan ratu Belanda sebagai kepalanya. Dalam pidato penutupannya, Hatta mengatakan bahwa uni yang baru berbeda dengan kebijakan persekutuan di masa lalu: Indonesia tidak lagi menjadi "adik", namun memiliki persamaan dan hak yang sama dalam persekutuan tersebut.

Yang memberatkan Indonesia adalah keputusan untuk menerima utang warisan dari Belanda sebesar 4,3 milyar gulden – sebagian besarnya adalah biaya perang Belanda pada masa Revolusi. Hatta sadar bahwa masalah utang ini akan menimbulkan kritik terhadap kepemimpinannya dalam KMB. Namun, ia membela usaha delegasinya dengan mengatakan bahwa "secara historis atau internasional, apa yang dicapai merupakan hasil terbaik yang dapat diperoleh pada saat ini".[258] Meskipun ada ketidakpuasan dijumpai dari kalangan masyarakat Indonesia, kontribusi Hatta dalam KMB diakui merupakan salah satu jerih payah monumentalnya sepanjang hidupnya. Sulit untuk dipercayai bahwa satu tahun sebelumnya Indonesia berada dalam titik kritis akibat penghancuran yang dilakukan oleh Belanda. Satu tahun setelahnya kemenangan berhasil diperoleh oleh Republik yang memutus perang yang ditakutkan berkepanjangan dan memakam banyak korban manusia. Pada tanggal 27 Desember, hasil kerja monumental Hatta dan delegasi Indonesia adalah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dari Ratu Juliana kepada Hatta sendiri di Den Haag. Dalam upacara tersebut dikumandangan lagu kebangsaan Belanda, *Wilhemus*, dan diikuti oleh lagu kebangsaan Indonesia, *Indonesia Raya*. Ratu Juliana membacakan akta penegasan yang berbunyi:

"Kita tak lagi berdiri terpisah untuk saling bermusuhan. Kita sekarang mengambil kedudukan yang sejajar, betapapun mungkin kita sakit dan terluka, dengan meninggalkan goresan dendam dan penyesalan".[259]

MEMULUSKAN TRANSISI DARI RIS KE RI

KEMBALI KE NEGARA KESATUAN

Pada tanggal 15 Desember 1949, Hatta membawa hasil dari keputusan KMB kepada sidang lengkap KNIP. Hasilnya adalah 226 suara setuju dengan hasil KMB dibandingkan hanya 62 yang menolak. Yang paling menyolok sekaligus menyakitkan Hatta ialah hampir seluruh fraksi PSI menolak hasil KMB. Hatta mengungkapkan kekecewan tersebut dalam memoarnya: "banyak orang berpendapat PSI menolak karena bukan Sjahrir yang melaksanakan KMB dengan sukses". Des Alwi namun kali ini mendukung Hatta, dengan mengungkapkan bahwa pandangan Sjahrir terlalu idealistis dan tidak luwes. Abu Hanifah dari Masyumi menyatakan bahwa mayoritas rakyat berterimakasih terhadap Hatta: "Akhirnya masa pertempuran telah usai; semangat rakyat menggelora, segar, dan bergembira".[260]

Pada tanggal 16 Desember 1949 di Kepatihan Yogyakarta dilakukan pemilihan presiden RIS yang pertama oleh wakil-wakil negara bagian. Tanpa pertentangan pilihan presiden dijatuhkan kepada Sukarno. Sementara itu, jabatan wakil presiden dihapuskan dalam rancangan UUD 1949. Kemudian, Hatta dipilih secara aklamasi sebagai perdana menteri, namun kali ini memimpin kabinet parlementer daripada presidensiil. Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS berhasil dibentuk oleh Hatta dan terdiri atas:

- Perdana Menteri
  Moh. Hatta
- Menteri Luar Negeri
  Moh. Hatta
- Menteri Pertahanan
  Sultan Hamengku Buwono IX
- Menteri Dalam Negeri
  Anak Agung Gde Agung
- Menteri Keuangan
  Mr. Sjafruddin Prawiranegara
- Menteri Perekonomian
  Ir. Djuanda
- Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum
  Ir. Laoh
- Menteri Kehakiman
  Prof. Soepomo
- Menteri P dan K
  dr. Abu Hanifah
- Menteri Kesehatan
  dr. J. Leimena
- Menteri Perburuhan
  Mr. Wilopo
- Menteri Sosial
  Mr. Kosasih Purwanegara
- Menteri Agama
  K.H. Wahid Hasyim
- Menteri Penerangan
  A. Mononutu
- Menteri Negara:
  1. Sultan Hamid Algadri
  2. Mr. Moh. Roem
  3. dr. Soeparno

Kabinet ini berisikan orang-orang yang berkompetensi daripada sekedar mempertimbangkan politik praktis semata, misalnya adalah Sjafruddin, Soepomo, Djuanda, Laoh, Wilopo, Abu Hanifah, Leimena, dan Roem. Meskipun demikian, tokoh-tokoh yang memiliki wibawa tinggi di mata rakyat, seperti Hamengku Buwono, Wahid Hasjim, Leimena, Sjafruddin, dan Roem tidak bisa dipinggirkan. Tokoh-tokoh BFO yang semakin lama mendekatkan diri kepada RI juga dimasukkan, salah satunya Anak Agung Gde Agung. Dalam Kabinet RIS yang bersifat sementara ini, Hatta memiliki program, yaitu:

1. Menyelenggarakan pemindahan kekausaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama; mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan angkatan perang RIS dan mengembalikan tentara Belanda ke negaranya dalam waktu yang selekas-lekasnya.
2. Menyelenggarakan kententraman umum supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya terjamin berlakunya hak demokrasi dan terlaksananya dasar-dasar hak asasi manusia dan kemerdekaannya.
3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas-asas UUD RIS dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk konstituante.
4. Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan, dan kesehatan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi rakyat agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.
5. Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional; mempergiat pemberantasan buta huruf di kalangan rakyat.

PM Mohammad Hatta memberikan kata sambutan pada upacara peringatan Hari Polisi Negara di Yogyakarta tahun 1948.

Arsip Nasional Republik Indonesia

Presiden Sukarno, Perdana Menteri Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX turut hadir menyaksikan upacara pembukaan PON I di Stadion Sriwedari Solo pada 9 September 1948.

Arsip Nasional Republik Indonesia

6. Menyelesaikan soal Irian Barat dalam setahun ini juga dengan jalan damai.
7. Menjalankan politik luar negeri yang memperkuat kedudukan RIS dalam dunia internasional dengan memperkuat cita-cita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa.

Meskipun Hatta lebih menyukai federasi, namun ia bersedia mengikuti suara terbanyak dari para pemimpin Republik dan rakyat sekalian untuk mengupayakan negara kesatuan, dengan catatan bahwa desentralisasi daerah dapat dilakukan. Hatta berusaha mendorong terciptanya negara kesatuan dengan seminimal mungkin gesekan dengan negara federal. Ada banyak sentimen pro-Republik di negara-negara federal yang didirikan oleh Belanda. Apalagi federalisme dilihat secara curiga sebagai muslihat Belanda. Namun, untuk mempercepat transisi ke negara kesatuan, muncul oposisi yang kuat dari negara-negara Sumatera Timur dan Indonesia Timur, terlihat dari penentangan yang dilakukan oleh Westerling, Andi Aziz, dan pembentukan Republik Maluku Selatan. Hatta kecewa dengan dukungan yang diberikan oleh Sultan Hamid kepada Westerling, meskipun Sultan Hamid telah diberikan kepercayaan mengemban tugas sebagai menteri pada masa transisi menuju negara kesatuan.

Terhadap pembelotan yang dilakukan oleh Kapten Andi Aziz di Sulawesi, Hatta mengeluarkan pidato tanggal 10 April dengan membedakan pemberontakan yang dilakukan Westerling dan Andi Aziz. Ia mengatakan bahwa "jangan kita lupakan bahwa lawan bukanlah musuh kita, tetapi saudara-saudara kita sendiri, satu bangsa dan satu daerah … karena itu tidak baik kalau perjuangan politik dibarengi dengan kekerasan dengan tangan terkepal atau tindakan seperti itu". Hatta menegaskan oposisi dibenarkan dalam demokrasi, tapi tidak boleh mengancam keamanan sebab "demokrasi bukanlah anarki, di mana setiap orang bisa mengangkat senjata semaunya".[261] Sementara itu, terhadap proklamasi Republik Maluku Selatan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman Indonesia Timur, Dr. Soumokil, Hatta menghimbau "jika saudara benar-benar mencintai bung Karno dan saya sebagai pemimpin saudara, jangan jauhkan nama kami dengan tindakan tak menentu yang bersifat anarkis".

Gerakan-gerakan menolak bergabung kepada negara kesatuan dapat diredam oleh pasukan Republik. Negara-negara federal yang perlahan mulai runtuh, membuat Sumatera Timur mengikuti arus mendukung konsepsi negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan diubah menjadi negara kesatuan kembali dengan nama yang dipakai pada proklamasi kemerdekaan: Republik Indonesia. Jakarta dipilih kembali sebagai ibukota negara. Revolusi politik telah berakhir, pembangunan yang lebih terarah dibutuhkan dalam negara kesatuan yang kembali diusung. Masih banyak masalah sosial, politik, agama, etnisitas, kebudayaan, dll, yang belum terselesaikan oleh Revolusi dan akan dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DARI DWITUNGGAL KE DWITANGGAL

Setelah RIS diubah menjadi bentuk negara kesatuan kembali, Hatta mendapatkan kepercayaan kembali menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Tanpa hambatan berarti, ia dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan mendapatkan 113 suara. Dalam sistem demokrasi parlementer yang baru, Hatta hanya menjadi wakil kepala negara yang konstitusional. Ia tidak aktif dalam pemerintahan sebagai eksekutif, sebab tugas itu diambil alih oleh perdana menteri. Tugasnya sebagai wakil presiden disibukkan oleh keperluan kegiatan politik (seremonial) negara, seperti pada perayaan kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus atau pembukaan kegiatan negara, sidang parlemen, konferensi nasional atau internasional, pameran, atau pembangunan gedung dan sarana/prasarana.[262] Hatta banyak melalukan kunjungan ke daerah-daerah untuk berbicara kepada berbagai tokoh dan kelompok. Ia sering diminta juga untuk mengisi ceramah atau memberikan kuliah umum di universitas atau sekolah kepempinan, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), dan Akademi Dinas Luar Negeri.

Hatta dan Sukarno diberi porsi untuk memainkan peran sebagai penasihat, tempat untuk bertanya pemimpin pemerintahan, partai, universitas, dan masyarakat. Hatta misalnya sering diminta saran dalam pembentukan kabinet baru. Namun, sebagai wakil presiden konstitusional, Hatta hanya bisa mempertanyakan keputusan kabinet apabila ia tidak setuju terhadapnya dan tidak bisa mendesakkan kekuasaannya. Meskipun berperan secara simbolik, Sukarno dan Hatta tidak bisa menghindarkan dirinya untuk terlibat dalam pertentangan terus menerus yang muncul antarkelompok politik, agama, militer, dan kedaerahan yang muncul di masa demokrasi parlementer. Salah satu perhatian Hatta adalah pada masalah partai politik yang menurutnya menciptakan instabilitas dalam demokrasi parlementer dan hanya berjuang untuk kepentingan kelompoknya daripada negaranya sendiri. Hatta berpendapat bahwa "partai politik dimaksudkan untuk menjadi sarana yang teratur dalam menyalurkan pandangan

Upacara dan keberangkatan Perdana RIS Mohammad Hatta dan keluarga ke Jakarta dari Yogyakarta, Januari 1950.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Upacara dan keberangkatan Perdana RIS Mohammad Hatta dan keluarga ke Jakarta dari Yogyakarta, Januari 1950.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

umum tetapi dalam perkembangan kepartaian kita, partai merupakan tujuan dan negara menjadi alatnya".[263] Ia tidak menyarankan sistem kepartaian dibubarkan, namun direformasi dan dirampingkan karena bagaimanapun demokrasi tidak bisa berjalan tanpa partai politik.

Dalam masa awal demokrasi parlementer ini, hubungan antara Sukarno dan Hatta sudah kelihatan mulai renggang. Hal ini disebabkan oleh karena Sukarno yang tidak bisa bertahan berposisi sebagai sekedar presiden simbolik, sama seperti hal yang dilakukannya di masa Revolusi. Sukarno ingin dapat berpartisipasi juga dalam menentukan kebijakan dalam pemerintahan. Sejak pertengahan tahun 1950-an, perpecahan Dwitunggal semakin memburuk akibat ambisi Sukarno yang ingin membubarkan demokrasi parlementer dan memulihkan kekuasaan eksekutif presiden. Setelah kembali dari kunjungan luar negerinya ke AS, Soviet, dan Cina, Sukarno berpidato pada tanggal 28 Oktober 1956, "marilah kita kubur semua partai". Sukarno semakin kuat menunjukkan ketetapan hatinya untuk membangun satu konsepsi demokrasi baru, yang nanti ia namakan sebagai demokrasi terpimpin. Sukarno dan tentara merasakan bahwa Indonesia yang besar dan kuat yang mereka perjuangkan sejak masa revolusi belum terwujud. Pengalaman revolusi dan kekacauan politik di awal 1950-an membentuk keyakinan bahwa kepemimpinan yang kuat diperlukan bagi sistem. Demokrasi membutuhkan kepemimpinan agar dapat mencapai tujuan-tujuannya. Dan hal itu dipercayai oleh Sukarno tidak bisa dicapai dengan "demokrasi pertarungan bebas" ala demokrasi parlementer.

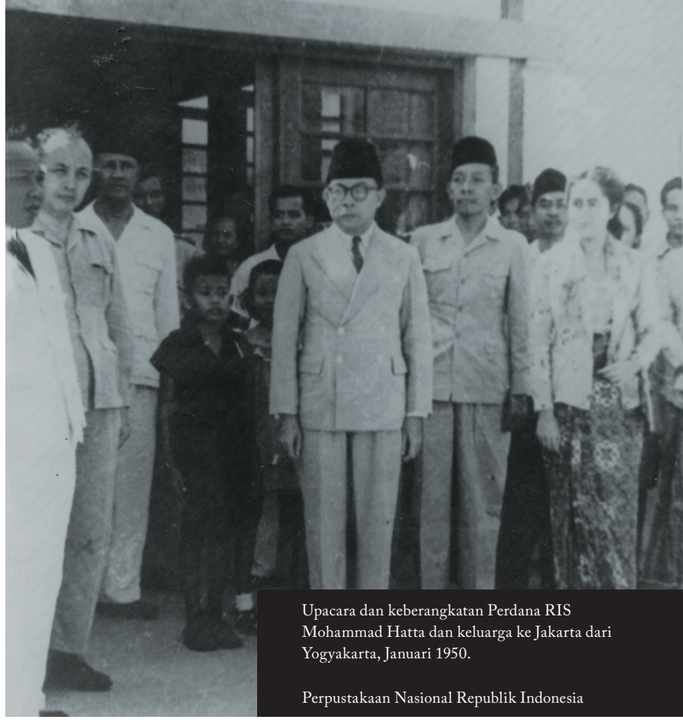

Upacara dan keberangkatan Perdana RIS Mohammad Hatta dan keluarga ke Jakarta dari Yogyakarta, Januari 1950.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sementara itu, Hatta menganggap bahwa keseimbangan kekuasaan akan terganggu apabila pemerintahan yang otoriter sesuai dengan skenario Sukarno dan tentara direalisasikan. Meskipun Hatta tidak setuju dengan demokrasi banyak partai yang kebablasan bukan berarti sistem tersebut harus benar-benar dibongkar dan diganti dengan suatu model yang tidak mencerminkan demokrasi. Hatta setuju bahwa demokrasi parlementer membutuhkan modifikasi dalam periode transisi, tapi bukan sama sekali malah dihapuskan. Dalam pandangan Hatta, menurut Rose, "akar-akar demokrasi harus diasuh, bukan dipatahkan sebelum bisa tegak dan berkembang menjadi matang".[264] Eksperimentasi demokratis setidaknya membutuhkan waktu agar didapatkan pengalaman bagaimana membangun sistem demokratis yang baik bukannya malah digantikan dengan demokrasi kepemimpinan di mana terpimpinnya saja yang ditegakkan sedangkan demokrasinya dihapuskan.

Hatta yang merasa tidak sejalan lagi dengan visi dan kebijakan yang diambil Sukarno kemudian memutuskan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Hatta memilih menjadi seorang warga negara biasa di mana ia bisa bebas berpendapat menyuarakan kegelisahan dan ketidaksetujuannya dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah apabila hal itu mengancam kedaulatan rakyat. Keputusan pengunduran diri Hatta ini tentu saja mengagetkan banyak pihak. Kepemimpinan Dwitunggal yang dipercaya dan didamba oleh banyak pemimpin sipil, militer, nasional, dan daerah harus berakhir. Akhirnya, di penghujung tahun 1950-an, Dwitunggal telah berubah menjadi Dwitanggal.

TERUS MEMIKIRKAN BANGSA

Setelah tidak mengemban jabatan sebagai wakil presiden, Hatta kembali menjadi seseorang yang memperjuangkan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Hatta tidak segan-segan mengkritik Sukarno dalam posisinya sebagai warga biasa, terutama mengingatkan betapa visi dan kepemimpinannya telah melampaui jauh wewenang yang seharusnya dimiliki dan telah melanggar nilai-nilai demokratis yang susah payah dibangun Indonesia sebelumnya. Hatta mengkritik sahabatnya tersebut tentang demokrasi terpimpin yang telah melenceng keluar jauh dari jalurnya dalam tulisannya *Demokrasi Kita*. Akibat tulisannya ini, Sukarno marah besar dan membredel *Panji Masyarakat* yang pertama kali memuat tulisan itu. Hamka yang merupakan pemimpin redaksi terbitan itu kemudian ditahan karena mempublikasikan tulisan itu. Hatta juga bersuara lantang atas penangkapan yang dilakukan oleh Sukarno terhadap musuh-musuh politiknya dari PSI dan Masyumi, seperti Sjahrir, Roem, dan Prawoto, yang dituduh terlibat dalam gerakan teror yang ingin membunuh Sukarno dalam kunjungannya ke Makassar tahun 1962. Hatta lalu berkirim surat ke Sukarno menentang penangkapan ini:

"Kita selalu mengembor-gemborkan bahwa negara kita berdasarkan Pancasila, tetapi di mana keadilan, perikemanusiaan, demokrasi yang sebenarnya. Adakah demokrasi, kalau orang rata-rata merasa takut, harus tutup mulut, kritik tidak diperbolehkan, sehingga berbagai hal yang tidak dipertanggungjawabkan berlaku leluasa?"[265]

Karena kritik dan sikapnya yang keras terhadap Sukarno ini, Hatta seringkali mendapatkan hambatan dalam menjalankan aktivitasnya. Ia dilarang pergi Austria tahun 1962 untuk menghadiri konferensi kerjasama ekonomi negeri-negeri non-komunis. Ia juga sempat dilarang untuk memberi kuliah di universitas dan Sekolah Staf Komando Angkatan Bersenjata di Bandung. Meskipun sering berseberangan dengan Sukarno, Hatta tetap menganggap bahwa Sukarno adalah sahabatnya. Ketika kondisi sakit Sukarno memburuk akibat tahanan rumah yang diberlakukan Orde Baru, Hatta meminta izin untuk menjenguk bung besar. Pertemuan dua proklamator itu berlangsung penuh haru, Hatta menanyakan kabar Sukarno dan Sukarno membalasnya lemah dengan bahasa Belanda, "*Hoe gaat het meet jou*?". Hatta duduk diam sambil memegang tangan Sukarno, pelan-pelan air matanya meleleh melihat kondisi Bung Karno yang memprihatinkan. Sementara, Sukarno

Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta meninjau kapal perang Hang Tuah di Surabaya.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

berusaha mencari kacamatanya supaya ia dapat melihat kawan karibnya itu dengan jelas. Dua hari setelah pertemuan itu Sukarno meninggal dunia.

Transisi kekuasaan dari Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru sempat menimbulkan harapan bagi Hatta untuk membangun Indonesia lebih tertib, damai, dan sejahtera. Hatta menyatakan bahwa penting untuk Indonesia kembali melakukan mekanisme pembagian kekuasaan yang sebelumnya tidak berjalan di masa Sukarno. Meskipun demikian, harapannya tersebut berubah menjadi kekecewaan yang meningkat. Hal ini ditumpahkan Hatta dalam kritik-kritiknya terhadap pemerintahan Soeharto. Di antara kritiknya pada pemerintah Orde Baru adalah mengenai berubahnya jalan ekonomi yang ditempuh rezim dari dasar-dasar ekonomi yang menjadi tujuan *raison d'etre* Indonesia. Mulanya Hatta ikut dilibatkan oleh tim ekonomi pemerintah untuk membahas berbagai masalah ekonomi. Namun, pemikiran ekonomi Hatta yang lebih ke arah sosialisme ekonomi berseberangan dengan politik ekonomi Orde Baru yang condong meneggakkan kapitalisme.

Selain itu, Hatta juga kecewa dengan tidak membaiknya iklim demokrasi di masa Orde Baru dibandingkan masa Demokrasi Terpimpin. Keinginannya untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia bersama dengan para tokoh-tokoh aktivis Islam dilarang oleh pemerintah. Hatta semakin ragu dengan komitmen Soeharto menegakkan demokrasi ketika sepertiga jumlah anggota DPR diangkat pada pemilu 1971, padahal pemilu itu sendiri merupakan mekanisme memilih wakil rakyat. Pemilu yang diadakan pun tidak lepas dari kritik Hatta karena dilakukan dengan penuh intimidasi dan berlangsung dengan tidak transparan dan demokratis. Hatta sempat

Mohammad Hatta memberikan ceramah di atas mimbar di tengah-tengah masyarakat.

Arsip Nasional Republik Indonesia

diminta oleh pemerintah Orde Baru untuk menjadi penasihat komisi yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi. Laporan komisi ini tentang urgensi pemberantasan korupsi memang menghasilkan UU Antikorupsi yang disetujui oleh parlemen. Namun, pemerintah bergeming untuk menindaklanjuti desakan komisi ini untuk mengadili orang-orang yang diduga melakukan tindakan korupsi dan cenderung membiarkan korupsi berkembang masif.

Di akhir tahun 1970-an, kondisi kesehatan Hatta menurun: ia sering pingsan dan jantungnya melemah. Kondisinya terpaksa membatasi kegiatan dan perjalanannya, meskipun ia tetap ngotot untuk dibiarkan pergi ke masjid. Acara terakhir yang dihadirinya adalah Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang diadakan di Bogor bulan Juni 1979. Seolah menyadari bahwa inilah acara penting terakhirnya bertemu dengan ekonom Indonesia, Hatta memaksakan diri untuk hadir bahkan membacakan pidatonya. Ia mengkritik para teknokrat ekonomi pemerintah yang telah menyimpang dari dasar ekonomi yang ditetapkan konstitusi. Hatta menekankan sekali lagi pentingnya koperasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kritik terakhirnya terhadap pemerintah terjadi di tahun 1980 ketika ia mendukung Kelompok Lima Puluh pimpinan Nasution yang ingin melayangkan petisi kepada DPR tentang pengabaian Orde Baru terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Pada tanggal 13 Maret 1980 kondisi kesehatan Hatta semakin kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Sehari setelahnya, tokoh bangsa ini menghembuskan nafas terakhirnya di sisi keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya. Upacara pemakamannya yang mengundang banyak pelayat diberitakan oleh surat kabar *Asia Week*: "Ribuan rakyat biasa berduyun-duyun datang ke pemakaman Tanah Kusir Jakarta untuk menghadiri pemakaman bekas Wakil Presiden Moh. Hatta". [266] Indira Gandhi mengirimkan satu surat belasungkawa yang di dalamnya menyebutkan Hatta sebagai "salah satu raksasa pelopor, yang bersama-sama dengan ayah saya mengambil peran memimpin negeri mereka berjuang demi kemerdekaan … bagi orang yang pernah mengenalnya, Dr. Hatta adalah seorang yang hangat dan ramah, yang sangat menaruh perhatian pada persoalan yang dihadapi oleh negara Anda dan negara kami".[267]

PENUTUP

Sampai menjelang akhir hayatnya, Hatta tidak pernah menutup mata kepada ketidakadilan, ketidakmerdekaan, dan ketidakdemokrasian. Secara konsisten, Hatta teguh membela prinsip-prinsip idealis yang diyakininya akan membawa Indonesia menuju kebahagiaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Tidak pernah ada kata takut dalam dirinya memperjuangkan nilai-nilai itu, meskipun Hatta tidak memegang kekuasaan sama sekali dan berposisi sebagai warga biasa. Semuanya dilakukan karena Hatta mencintai negeri yang ia perjuangkan kehadiraannya ini. Ia tidak rela bila negeri ini jatuh ke dalam kondisi mengecewakan akibat salah urus kepemimpinan. Oleh sebab itu, baik Sukarno dan Soeharto, selalu menerima pendapat dan kritik dari Hatta mengenai persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang menurutnya salah dikelola.

Mengutip seorang penyair Rene de Clercq, Hatta menutup pidato pembelaannya yang terkenal, "Indonesia Merdeka", dengan mengatakan hanya ada satu negeri yang pantas menjadi negeriku, ia tumbuh dengan perbuatanku. Sejarah mencatat bahwa seluruh hidup Hatta sepenuhnya diabadikan untuk kepentingan bangsanya dan menciptakan dunia yang terbebas dari kolonialisme, imperialisme, dan menjunjung perdamaian. Atas riwayat hidupnya, pantas baginya namanya bersanding dengan tokoh-tokoh besar dari Selatan lainnya yang membebaskan dunia kolonial dari belenggu imperium Barat dan membentuk negara-negara baru modern di abad ke-20.

ENDNOTES

1 Moh. Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I Bukitinggi-Rotterdam Lewat Betawi. Sebuah Otobiografi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm. 2.

2 Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta. Jilid 1: Mohammad Hatta dan Pemikirannya* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), hlm. 14.

3 Taufik Abdullah, "Pengantar", dalam Moh. Hatta, *Untuk Negeriku*, hlm. xxiv.

4 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 14.

5 Ibid.

6 Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta* (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 6.

7 Deliar Noer, *Mohammad Hatta. Hati Nurani Bangsa* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 14. Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 7.

8 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 29.

9 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 19.

10 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 8.

11 Ibid., hlm. 14.

12 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 15.

13 Abdullah, "Pengantar", hlm xxix.

14 Ibid., hlm. 57.

15 Ibid.

16 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 22.

17 Noer, *Mohammad Hatta*, hlm. 20.

18 Ibid.

19 Ibid., hlm. 69.

20 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 17.

21 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 24.

22 Ibid.

23 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 109.

24 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 17.

25 Mengenai diskusi antara Agus Salim dan Hatta mengenai relasi sosialisme dan Islam lihat Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 116.

26 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 26.

27 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 117.

28 Ibid.

29 Harry Poeze, *Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 221.

30 Klaas Stutje, "To Maintain Independent Course: Interwar Indonesian Nationalism and International Communism on a Dutch-European Stage", *Dutch Crossing: Journal of Law Countries*, 39, 3 (2015), hlm. 200.

31 John Ingleson, *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 3.

32 Poeze, *Di Negeri Penjajah*, hlm. 155.

33 Ingleson, *Perhimpunan Indonesia*, hlm. 3.

34 Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 290.

35 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 35

36 Ibid.

37 Ibid., hlm. 38.

38 Sugata Bose, *A Hundred of Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global Empire* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

39 Poeze, *Di Negeri Penjajah*, hlm. 68.

40 R.E. Elson, *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan* (Jakarta: Serambi, 2009).

41 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 166.

42 Poeze, *Di Negeri Penjajah*, hlm. 174.

43 Ibid.

44 J.T.H. Blumberger, *De Nationalistische Beweging in Nerderlansch-Indië* (Haarlem: Tjeenk Willink, 1931),

hlm. 187. Poeze, *Di Negeri Penjajah*, hlm. 175

45 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 208.

46 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 36.

47 Ibid.

48 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 208.

49 Ibid., hlm. 36.

50 Ibid.

51 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 58.

52 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 50.

53 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 249.

54 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 45.

55 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 251-2.

56 Ibid., hlm. 253.

57 Ibid., hlm. 257-8.

58 Ibid., hlm. 258.

59 Ibid., hlm. 260-1.

60 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 47.

61 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I, hlm. 228.*

62 Noer, *Biografi Politik, hlm. 54.*

63 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 228.

64 Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 80.

65 Ibid., hlm. 81.

66 Ibid.

67 Ibid., hlm. 229.

68 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 228.

69 Ibid., hlm. 234.

70 Ibid., hlm. 237.

71 Wildan Sena Utama, "Mempropagandakan Kemerdekaan di Eropa: Perhimpunan Indonesia dan Internasionalisasi Gerakan Antikolonial di Paris", *Jurnal Sejarah*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 30.

72 Moh. Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial* (buku 3) (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 314.

73 Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku* (Jakarta: PT. Kinta, 1974), hlm. 48.

74 Blumberger, *De Nationalistische*, hlm. 189.

75 Sastroamidjojo, *Tonggak-Tonggak*, hlm. 48.

76 Michael Goebel, *Anti-Imperial Metropolis: Interwar Paris and the Seeds of Third World Nationalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015).

77 Klaas Stutje, *Behind the Banner of Unity: Nationalism and Anticolonialism among Indonesian Students in Europe, 1917-1931* (Amsterdam: Disertasi University of Amsterdam, 2016), hlm. 94.

78 Hatta, *Karya Lengkap*, hlm. 316.

79 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 263.

80 Utama, "Mempropagandakan Kemerdekaan", hlm. 39.

81 Hatta, *Karya Lengkap*, hlm. 323.

82 Ibid., hlm. 325.

83 Fredrik Petersson. "Hub of the Anti-Imperialist Movement", *Interventions: International Journal of Postcolonial Studies* 16, 1 (2014), hlm. 51-2.

84 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 273.

85 ISSH, League Against Imperialism Archives No. 2; Nataša Mišković, "Introduction", dalam Nataša Mišković, Harald-Fischer Tiné dan Nadda Boškovska (eds.). *The Non-Aligned Movement and the Cold War: Delhi-Bandung-Belgrade* (London & New York: Routledge, 2014), hlm. 2.

86 Hatta, *Karya Lengkap*, hlm. 338.

87 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 274-5.

88 Ali Sastroamidjojo, *Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, Tahun 1927* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1975), hlm. 11.

89 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 284-5.

90 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 92.

91 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 289.

92 Ibid., hlm. 93.

93 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 291.

94 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 93.

95 Ibid.

96 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid I*, hlm. 294.

97 Ibid., hlm. 295.

98 Ibid., hlm 296.

99 Sastroamidjojo, *Empat Mahasiswa*, hlm. 25.

100 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 73.

101 Ibid., hlm. 100.

102 Moh. Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid II Berjuang dan Dibuang* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm. 21.

103 Ibid., hlm. 22.

104 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 108.

105 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid II*, hlm. 26.

106 Ibid., hlm. 27.

107 Ibid., hlm. 28.

108 Ibid., hlm. 29.

109 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 111.

110 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid II*, hlm. 31.

111 Ibid., hlm 31-2.

112 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 112.

113 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 112.

114 Ibid., hlm. 70.

115 Ibid., hlm. 72

116 John Ingleson, *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934* (Jakarta: LP3ES, 1983).

117 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 73.

118 Ibid.

119 Ibid.

120 Ibid.

121 Moh. Hatta, "Perkembangan PNI dan Terorisme Pemerintah di Indonesia", dalam Moh. Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial* (buku 3) (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 191.

122 Ibid., hlm. 193.

123 Ibid.

124 Moh. Hatta, "Gubernur De Graeff dan Gerakan Kemerdekaan Indonesia", dalam Moh. Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial* (buku 3) (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 176.

125 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 115.

126 Ibid.

127 Onghokham, Sukarno: Mitos dan Realitas", dalam Onghokham, *Sukarno, Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 16.

128 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 115.

129 Onghokham, "Sukarno: Mitos", hlm. 16.

130 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid II*, hlm. 47.

131 Ibid., hlm 54.

132 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 113.

133 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid II*, hlm. 98.

134 Ibid., hlm. 100.

135 Ibid., hlm. 136.

136 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 120.

137 Ibid.

138 Ibid.

139 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 123.

140 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 128. Noer, *Biografi Politik*, hlm. 124.

141 Ingleson, *Jalan ke Pengasingan*.

142 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid II*, hlm. 126.

143 Noer, *Biografi Politik*, hlm. 119.

144 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid II*, hlm. 124.

145 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 129.

146 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid II*, hlm. 148.

147 Ibid.

148 Noer, Biografi Politik, hlm. 126.

149 Ibid.

150 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid II*, hlm. 142.

151 Moh. Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. ix.

152 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 134.

153 Ibid.

154 Ibid., hlm. 149.

155 Ibid., hlm. 155.

156 Ibid., hlm. 146.

157 Noer, *Mohammad Hatta*, hlm. 52.

158 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2005), hlm 412.

159 George McT. Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), hlm. 148.

160 Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hlm. 412.

161 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 149.

162 Ibid.

163 Deliar Noer, *Biografi Politik Mohammad Hatta: Jilid II: Mohammad Hatta dan Persatuan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), hlm. 6.

164 Ibid., hlm. 8.

165 Ibid., hlm. 6-8.

166 Noer, *Mohammad Hatta*, hlm. 54.

167 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 150.

168 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 18.

169 Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hlm. 417.

170 Ibid., hlm. 419.

171 Ibid.

172 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 151. Noer, *Mohammad Hatta*, hlm. 59.

173 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 30.

174 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 173.

175 Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hlm. 420.

176 Ibid., hlm. 423.

177 Ibid.

178 Noer, *Mohammad Hatta*, hlm. 62.

179 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 190.

180 Ibid., hlm. 186.

181 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 41.

182 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 191.

183 Ibid., hlm. 192.

184 R.E. Elson, *The Idea of Indonesia*, hlm. 166.

185 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 195.

186 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 57.

187 Ibid.

188 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 197. Benedict Anderson. *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* (Tangerang Selatan, Marjin Kiri, 2018), hlm. 88.

189 Ibid.

190 Moh. Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid III Menuju Gerbang Kemerdekaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), hlm. 92.

191 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid III*, hlm 95. Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 66. Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 208.

192 Noer, *Mohammad Hatta*, hlm. 69.

193 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid III*, hlm. 98-9.

194 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 209.

195 Ibid., hlm. 184

196 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 92.

197 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 201.

198 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 126.

199 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 71.

200 Ibid., hlm. 77.

201 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 197.

202 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 213.

203 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 86.

204 Ibid., hlm. 87.

205 Ibid.

206 Ibid., hlm. 88.

207 Ibid.

208 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid III*, hlm. 112.

209 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 197.

210 Ibid.

211 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 215.

212 Anderson, *Revoloesi Pemoeda*, hlm. 197.

213 Ibid., hlm. 207.

214 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 217.

215 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 114.

216 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 244.

217 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 332.

218 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 244.

219 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 115.

220 Ibid., hlm. 118.

221 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 334.

222 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid III*, hlm. 179.

223 Moh. Hatta, "Kita Terima Persetujuan Renville untuk Menyelesaikan Persengketaan", dalam Moh. Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi* (buku 2) (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 78.

224 Ibid., hlm. 79.

225 Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi*, hlm. 334.

226 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 120.

227 Moh. Hatta, "Tujuan dan Politik Republik Indonesia", dalam Moh. Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi* (buku 2) (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 86.

228 Ibid.

229 Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hlm. 455.

230 Ibid.

231 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 122.

232 Anthony Reid. *Indonesian National Revolution 1945-1950* (Melbourne: Longman, 1974), hlm. 137.

233 Harry Poeze, *Madiun 1948: PKI Bergerak* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor & KITLV-Indonesia, 2011), hlm. 160

234 Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hlm. 460.

235 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 257.

236 Ibid., hlm. 259.

237 Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hlm. 462.

238 Moh. Hatta, "Keterangan Pemerintah tentang Politiknya kepada Badan Pekerja KNIP, dalam Moh. Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi* (buku 2) (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 196.

239 Ibid.

240 Ibid., hlm. 198.

241 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 131.

242 Moh. Hatta, "Keterangan Pemerintah", hlm. 199-200.

243 Ibid., hlm. 199.

244 Ibid., hlm. 201.

245 Ibid.

246 Ibid.

247 Ibid., hlm. 202.

248 Ibid.

249 Ibid., hlm. 205.

250 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 137.

251 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 267.

252 Moh. Hatta, "Politik Keseimbangan antara Kekuatan ke Luar dan ke Dalam", dalam Moh. Hatta. *Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi* (buku 2) (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 251.

253 Ibid., hlm. 252-3.

254 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 270.

255 Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hlm. 465.

256 Hatta, *Untuk Negeriku. Jilid III*, hlm. 216.

257 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 277.

258 Ibid., hlm. 278.

259 Ibid., hlm. 280.

260 Ibid., hlm. 279.

261 Ibid., hlm. 292.

262 Noer, *Biografi Politik: Jilid II,* hlm. 210.

263 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 298.

264 Ibid., hlm. 312.

265 Mochtar Lubis, *Hati Nurani Melawan Kezaliman: Surat-Surat Bung Hatta Kepada Presiden Sukarno* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 71.

266 Rose, *Indonesia Merdeka*, hlm. 384.

267 Ibid., hlm. 384-5.

ABDUL HALIM

ABDUL HALIM:

Perdana Menteri yang Melahirkan Kembali Republik dengan Jiwa Pemuda

"Bagi saya sendiri bentuk negara itu tidaklah prinsipiil. Buat saya yang terpenting adalah buat apa kita mencapai kemerdekaan, buat apa membentuk negara, jika tidak menaikkan kehidupan rakyat. That is the most important thing".[1]

Abdul Halim

PENGANTAR

Abdul Halim adalah sosok yang tidak lazim, seorang Perdana Menteri yang mencapai posisinya secara tidak sengaja, dan sebagai akibatnya, sudah dilupakan oleh bangsa. Dikenal sebagai seorang pejuang tunggal, Halim bukan bagian dari klik-klik pribadi tertentu dan walaupun dekat dengan Sjahrir dan PSI, tidak pernah secara formal menjadi bagian dari partai sosial-demokrat itu. Posisinya yang menyendiri ini menjadikannya sosok yang dapat diterima semua pihak, tetapi pada saat yang bersamaan, ia tidak berhasil membangun basis dan jaringan kenalan untuk bertahan dalam pemerintahan Republik Indonesia, khususnya pasca-penurunan dirinya dari posisi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Mohammad Natsir pada tahun 1951. Halim merupakan orang yang unik di antara pemimpin-pemimpin politik Indonesia. Ia menekankan bahwa posisinya sebagai politisi di BP KNIP ataupun sebagai Perdana Menteri merupakan sebuah ketidak-sengajaan belaka yang diakibatkan karena rasa hormatnya terhadap dua sosok republiken, yaitu Sutan Sjahrir dan Sultan Hamengkubuwono IX, yang telah 'memaksanya' untuk berperan dalam politik nasional Indonesia. "Tetapi saya sendiri tidak pernah mengimpikan dan tidak berkeinginan. Sebab dalam politik terus terang saja saya campur baur dengan (akibat) gaya tarik Sjahrir. Kalau tidak saya kira saya tidak ikut BP KNIP. Karena itu saya kebacut terus."[2] Hubungan pribadinya dengan orang-orang terutama republik ini telah mendorongnya untuk mengambil peran sentral dalam banyak episode revolusi dan proses dekolonisasi Republik, termasuk proses penting pembentukan negara integral. Halim merupakan pahlawan tidak disengaja.

Di antara semua Perdana Menteri Indonesia, ia merupakan sosok yang paling banyak mengemban jiwa kepemudaan yang sembrono tetapi didorong oleh semangat dan prinsip tinggi. "Kan saya selalu main koboi tidak keruan, tidak tahu aturan."[3] Halim aktif dari semenjak zaman kolonial di dua bidang; yang pertama adalah bidang kesehatan dan yang kedua bidang keolahragaan. Keduanya berkaitan dengan raga dan semangat muda. Karirnya sebagai politikus dan pemimpin bagus bahkan bisa dianggap sebagai karir sampingan, yang diterimanya untuk membantu Indonesia dalam proses dekolonisasinya yang sulit dan menyakitkan. Sebagai dokter medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta serta dalam pembinaan olah raga pasca karir politiknya, Halim tetap berpegang teguh pada jiwa independennya. Tak dapat dipungkiri bahwa jiwa independennya dibentuk karena hubungan khususnya dengan Sutan Sjahrir, orang yang mungkin memiliki jiwa pemuda yang lebih kuat daripada Halim. Sebagai sosok pemuda, ia berani, sembrono dan seorang 'koboi.' Tapi pada saat yang bersamaan, jiwa dan semangatnya ada pada perwujudan kemerdekaan Indonesia, serta keikhlasannya dalam menyumbangkan tenaga, dan bahkan jiwa sekalipun.

Sosok ini tidak bisa dilupakan jasanya; bekerja-sama dengan Presiden Assaat, Halim memegang peranan sentral dalam pemerintahan dan penyusunan program kabinet Republik Indonesia di Yogyakarta pada saat Republik Indonesia Serikat didirikan. Program kerja utama yang diusung oleh Kabinet RI-Yogya/ Kabinet Halim adalah membentuk negara kesatuan, dengan kata lain mempersatukan negara-negara bagian federal untuk kembali ke dalam bentuk NKRI. Pokok permasalahannya adalah posisi Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta dalam bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru. Sebagai orang non-partai, Halim harus mendapatkan restu dari BP-KNIP yang didominasi oleh partai-partai politik. Sebagai Perdana Menteri, Halim diwajibkan untuk membawa kepentingan ribuan PNS Republik Indonesia Yogyakarta, tetapi juga untuk mempertahankan semangat, tradisi dan warisan dari pemerintahan Republik revolusioner Yogyakarta tersebut. Hubungan Halim dengan Perdana Menteri RIS, Mohammad Hatta, itu sangat krusial dalam pembahasan posisi RI dan peleburannya dalam Republik Kesatuan yang baru. Tanpa jasanya dalam mengawasi proses in sampai pada kesimpulannya, maka bukan tidak mungkin bahwa proses tersebut gagal. Posisinya sebagai Perdana Menteri RI juga menempatkannya dalam posisi *Primus Inter Pares* dalam hubungan dengan beragam pemerintahan negara bagian federal lainnya. Sifat netralnya yang kuat, serta posisi non-partainya sangat esensial dalam membentuk kepercayaan beragam pemerintahan federal terhadap kepemimpinan Republik Indonesia di Yogyakarta pada waktu itu. Upaya paling signifikan dalam proses ini adalah beragam usaha propaganda dan strategi lainnya untuk menuntun Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

Tulisan ini mengeksplorasi tentang sosok Halim sebagai Perdana Menteri Negara Bagian Republik Indonesia yang sangat jarang disorot dalam Historiografi Indonesia. Menempatkan kembali sosok Halim pada peranan dia dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia ini akan membantu kita memahami betapa rapuhnya proses penciptaan Republik Indonesia kesatuan

dan betapa dipengaruhinya proses ini oleh sosok-sosok yang berperan di dalamnya.

DOKTER DUA JAMAN PENJAJAHAN

Abdul Halim lahir pada 27 Desember 1911 di Bukittinggi. Lahir dari keluarga Minang. Ayahnya bekerja sebagai penyelia praktek di kantor pekerjaan umum. Posisi keluarganya membuka kesempatan dirinya untuk menempuh pendidikan di sekolah Belanda. Umumnya, hanya kelompok masyarakat yang mempunyai status sosial tertentu, seperti bangsawan, yang diperbolehkan untuk menempuh pendidikan di sekolah Belanda.[4] Setelah menamatkan HIS, Mulo dan AMS B di Jakarta, Abdul Halim melanjutkan pendidikannya ke sekolah kedokteran *Geneeskundige Hoge School* di kota yang sama. Halim termasuk pemuda yang aktif dalam organisasi. Pada tahun 1927 Halim turut berperan dalam mendirikan organisasi keolahragaan, *Voetbalbond Indonesia Jakarta* (VIJ) yang kemudian menjadi Persija. Halim turut serta dalam mendirikan kepanduan, Indonesia *National Padvinders Organisatie* (INPO) pada tahun 1928. Dalam kepemimpinannya di INPO, Halim terlibat dalam bersatunya kepanduan Sumatera dan Pandu Kebangsaan yang kemudian berubah menjadi Kepanduan Bangsa Indoenesia (KBI) pada 1932. Disamping itu, Halim juga aktif dalam *Jong Indonesia* yang kemudian menjadi Indonesia Muda.[5]

Pada akhir masa kolonial, Halim bertugas sebagai dokter di RSUP (CBZ)[6] sebagai Asisten Ahli bagian Telinga, Hidung, dan Tenggorokan. Abdul Halim tinggal di Jakarta di Jalan Muria no. 19. Tiga tahun setelahnya, pada 1943, Halim menjadi dokter Ahli bagian THT. Dalam tahun yang sama, Juli 1943, A. Halim diangkat sebagai wakil pimpinan RSUP oleh kementerian kesehatan masa pendudukan. Perlu diketahui bahwa ketua RSUP pada saat itu adalah Dr. Asikin Widjajakoesoema. Meskipun tergolong sebagai dokter junior, tetapi dr. A. Halim mendapat kepercayaan untuk menjadi wakil pimpinan rumah sakit oleh para dokter senior.[7]

Ketika menjabat sebagai wakil pimpinan RSUP, disamping menjalankan tugas sebagai dokter, ia mendapat giliran untuk mengisi kegiatan rapat yang dipergunakan untuk memperdalam pengetahuan medis bergantian dengan Dr. Asikin. Namun, Halim mengakui bahwa ia seringkali menggunakan kesempatan itu tidak hanya untuk memberikan pengetahuan medis, tetapi juga memberikan informasi atau ceramah tentang isu politik yang sedang menjadi tren. Informasi politik diperoleh Halim dari kegiatannya mendengarkan radio *Allied Forces* bersama Prof. Sutomo Tjokronegoro. Berbekal informasi politik inilah, Halim mempunyai keyakinan bahwa ketika perang berakhir pasukan Barat akan datang kembali ke Indonesia.[8]

Halim meneruskan aktivitasnya dalam kegiatan olahraga pada masa pendudukan Jepang dan tergabung dalam organisasi keolahragaan Gelora bersama Otto Iskandar Dinata, aktivis Jong Sunda, dan Azis Saleh, salah satu pendiri dari gerakan Pramuka pada masa Orde Baru. Gelora dikoordinasikan di bawah organisasi bentukan Jepang lainnya, Putera, yang dipimpin oleh Sukarno. Organisasi keolahragaan tersebut pada masa pendudukan disebut sebagai *Takiikukai*. [9]

Dokter Halim bersama Sukarno dan Sutan Sjahrir

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Setelah Jepang mengambil alih pimpinan rumah sakit, Halim dipindah-tugaskan ke Madiun. Ia mengakui bahwa dirinya bukanlah orang yang patuh terhadap perintah Jepang. Baginya perintah *kirei*[10] pada semua orang Jepang bertentangan dengan hati nuraninya. Terlebih, ia mengetahui bahwa sakura-sakura[11] Jepang bertindak sekehendak hatinya ketika ada di Indonesia, khususnya di RSUP.[12] Disini terlihat jiwa Halim yang mandiri dan tidak terlalu peduli dengan konsekuensi. Ia mengemban jiwa pemuda yang kadang agak berbahaya dan pada akhirnya menutup kesempatan karir politiknya pasca posisi Perdana Menteri. Walaupun aktif dalam berbagai organisasi, nasibnya berbeda dengan Azis Saleh, yang akan menjadi Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian dimasa mendatang.

Pemutasian Halim ke Madiun mendapatkan respons dari sebagian besar dokter yang bertugas di RSUP. Pada tanggal 15 September 1943, Para dokter RSUP mengajukan permohonan penangguhan kepada Prof. Itagaki selaku pimpinan baru agar Halim dipertahankan sebagai wakil pimpinan. Surat penangguhan pemindahan tersebut ditanda-tangani oleh sebagian besar dokter RSUP. Meskipun Prof. Itagaki mampu mentolerir pilihan sikap dari Halim yang anti-Jepang, tetapi Halim tidak diikutkan lagi dalam kepemimpinan Rumah Sakit. Tetap berada di RSUP, Halim lebih memilih untuk menarik diri dan menempati Laboratorium.[13]

Meskipun demikian, Halim tetap menjalankan aktivitasnya untuk mendapatkan informasi politik luar negeri melalui radio. Kedekatan Halim dengan Prof. Sutomo kemudian mengantarkan pada perkenalannya dengan Sjahrir, seorang tokoh politik gerakan bawah tanah yang memberi pengaruh besar dalam pemikiran

politik mahasiswa, khususnya pada mahasiswa Ika Daigaku (Sekolah Kedokteran). Dalam pertemuannya dengan Sjahrir, mereka banyak membicarakan tentang politik. Pertemuan Halim di jalan tambak tidak hanya dengan Sjahrir, tetapi juga Prof. Sutomo Tjokronegoro dan Charles Tambu, seorang wartawan dan kenalan Mohammad Hatta. Meskipun tidak lagi menempati posisi pimpinan dalam RSUP, Halim tetap menyampaikan isu dan informasi politik pada dokter-dokter muda dan mahasiswa kedokteran.[14] Keterlibatan mahasiswa kedokteran dalam pergerakan politik bukan merupakan hal yang baru. Dalam periode awal pergerakan awal abad XX telah banyak tercatat keterlibatan mahasiswa kedokteran dari STOVIA yang aktif dalam kegiatan politik.[15]

Halim bersama dokter-dokter lainnya seperti dr. Sutomo Tjokronegoro, dr. suyitno Mangunkusumo, dan dr. Cipto Mangunkusumo merupakan kelompok cendekiawan Jakarta yang dikatakan dekat dengan Sjahrir. Kedekatannya dan interaksi halim dengan Sjahrir mengisi informasi terkait kondisi politik pada saat itu baik kondisi dalam maupun luar negeri.[16] Halim dan dokter-dokter lainnya dianggap sebagai cendekiawan Jakarta oleh para pemuda, serta sebagai dokter yang melibatkan diri pada politik.

BERADA DIANTARA DUA GERAKAN: MENJELANG DAN SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Keterlibatan Halim dalam politik sebenarnya merupakan buah dari pengetahuan politik yang diperolehnya dari kegiatan diskusi dan aktif mendengarkan radio. Jaringan pertemanan yang dibangun antar sesama dokter dan perkenalannya dengan Sjahrir dan tokoh politik lainnya merupakan salah satu penanda bahwa Halim mempunyai banyak sumber informasi yang memungkinkannya untuk mempelajari banyak hal, khusunya politik. Halim juga menjalin hubungan pertemanan yang dekat dengan Hatta. Selain obrolan ringan mengenai aktivitas keseharian, diskusi yang dilakukan dengan Hatta berkaitan dengan perkembangan isu-isu politik.[17]

Halim mempunyai strategi khusus untuk bertukar informasi politik dengan Hatta. Jika tidak datang secara langsung, maka Halim akan mengirim kurir untuk menyampaikan informasi secara lisan tanpa menggunakan kertas atau perantara. Baginya, penggunaan kertas atau perantara untuk memberikan informasi melalui kurir sangat berbahaya karena polisi Jepang akan mempunyai bukti apabila tertangkap. Seperti kejadian yang menimpa Prof. Sutomo yang kemudian ditangkap Jepang karena ditemukan kertas-kertas yang digunakannya untuk bertukar informasi dengan Hatta.[18]

Kedekatannya dengan beberapa tokoh politik ini membuat banyak kalangan mengira bahwa Halim ada dikelompok Sjahrir. Halim menegaskan bahwa ia saat itu tidak berada dalam kelompok manapun. Ia menganggap dirinya sebagai perantara gerakan bawah tanah yang tidak bekerja-sama dengan Jepang, dan kelompok yang bergerak di atas tanah seperti Sukarno dan Mohammad Hatta.[19] Walau begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa Halim ini merasa kagum dengan Sjahrir dan menganggapnya sebagai seorang teman baik. Tidak semua informasi yang disampaikan oleh Halim adalah informasi yang akurat. Contohnya adalah informasi yang disampaikannya kepada Sukarno bahwa pada 14 Agustus 1945 Jepang akan menyerah kepada sekutu, sebuah berita yang didapatkannya dari radio *Allied Forces*. Sukarno menilai bahwa informasi tersebut tidak valid dan masih akan tetap menunggu pengumuman resmi dari Jepang. Halim bersama Sjahrir dan pemuda lainnya menghendaki apabila proklamasi dilakukan sebelum Jepang secara formal memberikan pernyataan kekalahan. Halim bermaksud memberikan informasi tersebut agar kemudian dapat diambil tindakan politik selanjutnya. Halim mempunyai pemikiran bahwa proklamasi kemerdekaan dilakukan sesegera mungkin tanpa harus menunggu instruksi termasuk pengumuman formal dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang disebut sebagai delegasi Jepang. Halim mengatakan bahwa ia tidak terlalu berperan dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Ia hanya menghadiri proklamasi secara singkat sebelum kembali terjun kedalam aktivitasnya di RSUP.[20]

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mulai membentuk badan negara yang turut membantu penyelenggaraan negara. Pada 29 Agustus 1950 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan yang membantu dalam pelaksaan pemerintahan. Kedatangan Halim dalam rapat perdana pembentukan (KNIP) menjadi titik awal keterlibatannya secara langsung sebagai anggota dalam komite tersebut. Ketua KNIP pertama pada saat itu adalah Kasman Singodimedjo. Keterlibatannya sebagai anggota KNIP membawa Halim pada kesibukan untuk melakukan rapat dan pertemuan dengan tokoh-tokoh politik. Kesibukan perpolitikan dalam KNIP yang diwarnai dengan pertemuan dan rapat-rapat dapat terjadi secara lebih leluasa setelah kemerdekaan. Pertemuan antara Halim dengan anggota politik seperti Wilopo, Abdul Muis, dan lainnya banyak membicarakan tentang situasi politik, termasuk ide pembentukan Komite Nasional yang bersifat daerah atau KNID. [21]

Pada awal kemerdekaan, posisi dari Komite Nasional pada saat itu adalah sebagai badan Pembantu Eksekutif. Halim merupakan salah satu penggagas yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan. Halim membuat referendum pada 7 Oktober 1945 untuk mendesak Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan anggota-anggota KNIP sebagai anggotanya. Pergantian sistem pemerintahan dari presidensiil ke parlementer dilakukan untuk mendemokratisir bentuk pemerintahan. Halim menambahkan dengan mengutip pidato presiden soekarno yang menyebutkan bahwa sebelum adanya Majelis perwakilan rakyat, maka kekuasaan adalah ditangan presiden. dengan demikian-lanjut halim- , keadaan tersebut bertentangan dengan pasal 1 dan 2 UUD yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.[22]

KNIP menyelenggarakan rapat pleno pada 16 Oktober 1945. Anggota-anggota KNIP mengajukan mosi yang menuntut pembentukan legislasi. Di rapat itu, Kasman lengser dari jabatannya sebagai ketua KNIP. Halim mengatakan bahwa mosi tersebut digerakkan

oleh para pemuda menteng 31 dan ia tidak turut serta dalam penandatanganan.[23] Motif adanya mosi pembentukan parlemen merupakan strategi untuk membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis dan bukan negara fasis sebagaimana yang sering dituduhkan pada negara-negara bekas pendudukan Jepang. Hal ini didorong oleh kubu Sjahrir yang punya cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara sosial demokrasi. Pembentukkan sistem parlementer membuka posisi Perdana Menteri sebagai pemimpin pemerintahan. Usul perubahan ini juga merupakan salah satu strategi menghadapi perubahan keadaan seiring dengan masuknya tentara sekutu ke Indonesia.[24] Sidang tersebut menghasilkan Maklumat No. 10 yang ditanda-tangani oleh Wakil Presiden Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat tersebut berisi keputusan posisi KNIP yang diserahi kekuasaan legislatif guna menetapkan Garis Besar Haluan Negara dan pembentukan Badan Pekerja yang bertanggung jawab pada KNIP. Maklumat no. 10 merupakan piagam penyerahan kekuasaan kepada KNP dan menjadi dasar pendirian Badan Pekerja. Halim menjadi salah satu anggota badan pekerja tersebut yang diketuai oleh Sjahrir.[25]

Pembentukan parlemen pertama Indonesia, oleh karenanya, tidak melalui pemilu akan tetapi melalui maklumat no. 10. Hal tersebut dikarenakan kondisi perang pasca kemerdekaan tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pemilu.[26] Baru pada tahun 1955, pemilihan pertama nasional berhasil diselenggarakan dengan pemerintahan berdasar pemilihan umum pertama dan terakhir sebelum periode Reformasi, dibawah Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Dengan adanya maklumat no. 10, maka kekuasaan eksekutif tidak berubah dan tetap Kabinet Presidensiil, yang berubah adalah kedudukan KNP yang memiliki kekuasaan legislatif tidak lagi hanya sebagai pembantu presiden. kelahiran maklumat X juga menggeser pekerjaan KNP yang kemudian ditangani oleh badan pekerja.[27]

Badan Pekerja-KNIP (BP-KNIP) beranggotakan 15 orang termasuk Halim. BP-KNIP pertama berlangsung pada periode 17 Oktober 1945 sampai dengan 3 Januari 1946. Pembentukan BP-KNIP dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas harian termasuk pembuatan peraturan dan perundangan yang harus dibuat secara singkat. Maklumat tersebut terdapat peraturan pembentukan partai-partai politik. Pengesahan Maklumat no. 10 mendapat pertentangan dari golongan tua seperti Ahmad Soebardjo, Panji Suroso yang mengkhawatirkan timbulnya perpecahan karena banyaknya partai. Padahal, pengesahan Maklumat no. 10 adalah fondasi awal yang mendasari pembentukan kabinet parlementer yang kemudian dibentuk pada 14 November 1945 dengan Sjahrir sebagai perdana menterinya. Halim menyebutkan bahwa penggagas konsepsi Maklumat no. 10 adalah Sjahrir. Konsepsi tersebut dibicarakan Sjahrir dihadapan Halim, Suwandi sebagai sekretaris, dan Sitompul sebagai stenograf. Gagasan yang telah menjadi maklumat tersebut diajukan pada Wakil Presiden Hatta untuk disahkan.[28]

Pertimbangan lain atas pengesahan Maklumat no. 10, BP-KNIP, pendirian partai dan berujung pada perubahan bentuk pemerintahan dari Presidensil ke Parlementer adalah untuk memberikan bukti pada dunia Internasional bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis. Anggapan sekutu (Inggris dan Amerika Serikat) sebagai negara yang menganut paham demokrasi memberikan anggapan bahwa bentuk pemerintahan presidensiil disebut sebagai bentuk pemerintahan yang kurang demokratis. Halim menegaskan bahwa anggapan ini justru dapat membahayakan Sukarno karena dia akan dituduh sebagai 'criminal war' oleh pihak sekutu. Hal ini tentu akan menghambat dukungan dari dunia Internasional—khususnya sekutu sebagai pemenang perang sekaligus kelompok yang paling besar untuk menghapuskan sisa trauma fasisme pasca perang dunia II, alih-alih hanya mengandalkan kekuatan dalam negeri saja yang tidak akan cukup.[29]

Belanda menutupi upaya dekolonisasi yang diawali kedatangan pasukan sekutu dan NICA dengan berkedok menjaga ketertiban dan keamanan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kedatangan pasukan tersebut hanya menimbulkan kekacauan di Ibukota Jakarta.[30] Akibatnya, Pemindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta diputuskan melalui sidang kabinet yang juga dihadiri oleh Halim. Pemindahan tersebut bukan tanpa alasan, tetapi dilakukan demi keamanan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Halim, Sjahrir mengatakan bahwa, "jika negara sampai kehilangan presiden maka rakyat akan susah, berbeda jika kehilangan perdana menteri yang lebih mudah dicarikan penggantinya". Presiden berangkat beserta rombongan pada 3 Januari 1946 dari Jakarta pada senja hari menuju Yogyakarta.[31]

Pemindahan ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta secara otomatis juga diikuti oleh jawatan-jawatannya. Keadaan ini membuat Halim sering berkunjung ke pedalaman Jawa. Pindahnya pemerintahan ke Yogyakarta diikuti oleh pindahnya BP-KNIP ke pedalaman Jawa. Halim juga bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Petronella, sekarang Bethesda, di ibukota Republik itu. Halim, Wijono dan Susilowati ditugaskan untuk mencari tempat baru bagi BP KNIP hingga memutuskan pilihan pada Purworejo. Dibandingkan dengan tempat lain seperti Yogyakarta dan Solo, pemerintah daerah Purworejo yang paling siap untuk menyediakan tempat baru bagi BP KNIP untuk bekerja yaitu bekas Hotel van Laar yang kosong.[32] Setelah bertempat di Purworejo, anggota BP KNIP kemudian membentuk komisi-komisi. Komisi tersebut antara lain, Komisi Luar Negeri, Komisi Pertahanan, dan Komisi Sospol. Halim merupakan salah satu anggota komisi Luar Negeri dan juga pernah dalam komisi pertahanan.[33]

Selama periode ini, Abdul Halim tetap mempertahankan kedekatannya dengan Sjahrir. Ketika Sjahrir pergi ke Amerika Serikat untuk memperjuangkan posisi Indonesia di PBB, opium dari Jawatan Candu dibawa untuk membiayai perjalanan diplomatik Sjahrir. Pada saat ini, Amir Sjarifuddin baru saja naik menjadi Perdana Menteri menggantikan Sjahrir. Sjahrir mengajak Abdul Halim untuk pergi bersamanya untuk mengelabuhi otoritas dengan mengklaim bahwa candu yang dibawa itu adalah untuk alasan medis. Candu tersebut diberikan kepada seorang kontak Republik.[34] Peran-serta Abdul Halim dalam perjuangan diplomasi Indonesia tampak dalam episode ini walaupun hanya secara tidak langsung.

Sementara itu, aktivitasnya yang intens di Yogyakarta menjadi salah satu faktor kedekatannya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, terutama setelah Agresi Belanda II. Tetapi hubungan personalnya dengan Sri Sultan dimulai dengan pertemuan mereka dalam Kereta Api dalam perjalanan ke Jakarta dari Yogyakarta. Ketika kereta berhenti dan Halim keluar untuk membeli minuman, Sri Sultan mengikutinya dan mereka membeli es serut dari pedagang kaki lima. Halim merasa terkesan akan sosok raja yang merakyat. Hubungan mereka berdua juga diperkuat karena hobi keduanya dalam hal olah raga; Sri Sultan merupakan seorang kiper sepak bola ketika tinggal di Haarlem waktu periode mahasiswanya. Pada tahun 1950an, hubungan Halim dan Sri Sultan berlanjut dalam bentuk pertemuan olah raga ataupun dalam kapasitas mereka sebagai pemangku badan olah raga nasional. Halim menuturkan betapa dekatnya hubungannya dengan Sri Sultan sehingga ia bisa mendatangi kamar tidur Sri Sultan untuk berbincang dengannya.[35] Keduanya memanfaatkan jasa kurir untuk bertukar informasi tentang kondisi politik terkini. Penangkapan para menteri termasuk Sukarno-Hatta untuk dibawa ke luar Yogyakarta membuat koordinasi antara Halim dan Sri Sultan semakin sering dilakukan. Meskipun setelah Agresi II Sultan dilarang untuk melakukan menerima tamu dari luar Kraton, tetapi keduanya seringkali mengadakan pertemuan di dalam lingkungan Kraton.[36]

Setelah Serangan Umum 1 Maret 1949, perwakilan PBB datang ke Indonesia untuk menemui Halim yang pada saat itu berada di Yogyakarta. Pertemuan antara Halim dan utusan PBB berlangsung di Rumah Sakit Bethesda. Dalam pertemuan itu, pihak PBB menyampaikan keinginannya untuk mengembalikan Yogyakarta pada Republik Indonesia dengan satu syarat bahwa Indonesia tidak akan jatuh di tangan komunis. Halim menerima tawaran dengan menawarkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai penjamin mengingat posisinya sebagai penguasa tertinggi dan pelaksana pengembalian Yogya pada Republik.[37]

Pada 4 Juli 1949 Halim bersama Leimena dan Natsir diminta untuk menjemput pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dikepalai oleh Sjafruddin Prawiranegara. PDRI tidak menerima keputusan perjanjian Roem-Royen pada bulan Mei 1949 karena PDRI merasa yang berwenang untuk mewakili Republik Indonesia, bukan para pemimpin yang sedang ditahan di Bangka. Untuk menghindari adanya konfrontasi antara PDRI dan pemerintahan di Jawa maka Hatta meminta bantuan Halim untuk mendampingi Leimena dan Natsir. Kedekatan Halim dengan Sjafruddin merupakan salah satu pertimbangan Hatta untuk memintanya ke Sumatera Barat. Proses kembalinya PDRI pada Republik berjalan dengan lancar dan tanpa paksaan.[38] Peran aktif Halim dalam BP-KNIP, posisinya yang ada di Yogyakarta ketika terjadi Agresi I dan II, serta kedekatannya dengan tokoh politik berpengaruh seperti Hatta, Sjahrir, Sri Sultan maupun kelompok PDRI tanpa disadari menempatkannya di tengah sebagai tokoh penghubung yang berkontribusi dalam diplomasi personal yang banyak membantu mengkondisikan keadaan yang genting saat itu.

'SINGLE FIGHTER': BERPOLITIK TANPA TUNGGANGAN

Halim menyebut dirinya sebagai *a loner* atau seorang penyendiri. Meskipun mempunyai kedekatan dengan Sjahrir, Sjafruddin, Natsir, Roem, Prawoto, Mangunsarkoro dan Lukman Hakim yang masing-masing bergabung dalam partai politik, Halim menganggap dirinya sebagai seorang 'pejuang tunggal.' Sikapnya yang fleksibel dalam berpolitik mengindikasikan mudahnya Halim mendapat simpati dari berbagai golongan partai. Keikutsertaannya dalam rapat partai-partai juga menggambarkan kedekatan Halim dengan beragam tokoh partai. Sebagian tokoh politik lain seperti, Mr. Sartono dari PNI menganggap bahwa Halim merupakan bagian dari klik Sjahrir dilihat dari kedekatan pribadi mereka. Kedekatannya dengan Sjahrir dikarenakan gagasan-gagasan Sjahrir yang dianggapnya sangat rasional begitu memukaunya.[39] Halim juga menyukai pribadi dari *bung kecil*, sebutan banyak kalangan yang dekat dengan Sjahrir, yang berperawakan mungil tetapi memiliki keberanian yang besar dan memegang prinsip kepercayaannya dengan teguh. Bagaimanapun, kedekatan pribadi kedua orang ini membuat banyak kalangan luar PSI untuk mengira Halim sebagai anak buah dari Sjahrir. Posisi ini kadang menyulitkan posisinya, khususnya karena anggapan ini cukup kuat di kalangan orang-orang Masyumi.

KNIP turut ambil suara berhubungan dengan hasil perundingan-perundingan, termasuk Linggarjati yang diadakan pada akhir 1946. Dalam sidang pleno KNIP di Malang tahun 1947, Halim banyak mendengarkan pernyataan

Mr. Susanto Tirtoprodjo, mantan Menteri Kehakiman Kabinet Hatta II yang kemudian menjadi Perdana Menteri peralihan antara Kabinet Hatta dan Abdul Halim

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

ketidak-setujuan atas nama pribadi atau partai dalam menanggapi hasil perjanjian tersebut. Berbeda dengan golongan Masyumi dan PNI, Halim termasuk golongan yang menyetujui perjanjian tersebut dengan pertimbangan bahwa langkah diplomasi bertujuan untuk mendapatkan pengakuan. Pengakuan kedaulatan merupakan salah satu tahapan awal sebuah fase perjuangan yang perlu dilalui.[40]

Dalam tahap ini, strategi politik paling utama pada perang pasca kemerdekaan adalah melakukan internasionalisasi perjuangan kemerdekaan. Pernyataan PBB dan banyak negara yang mengutuk serangan Belanda terhadap Indonesia menandakan keberhasilan diplomasi dan propaganda yang dilancarkan oleh Republik. Berbagai tahapan diplomasi yang melibatkan perwakilan Indonesia untuk merundingkan kedaulatan menjadi pembuka jalan dalam mencapai kedaulatan penuh. Selain

diplomasi, strategi gerilya yang dilakukan angkatan bersenjata menunjukkan adanya eksistensi dan kekuatan Indonesia sebagai negara (baru) yang memiliki daya. Ruslan Abdul Gani, kedua strategi perjuangan tersebut saling melengkapi, apabila perang gerilya adalah tulang punggungnya diplomasi, maka diplomasi adalah tamengnya perang gerilya.[41]

Sebagai golongan non-partai, Halim mempunyai strategi khusus untuk menghadapi anggota BP-KNIP yang berasal dari golongan partai. Halim akan mengkonsultasikan sebuah ide atau usul kepada tokoh partai seperti Mangunsarkoro dan Lukman Hakim. Selanjutnya, usul atau inisiatif yang nantinya akan diajukan dalam rapat atau sidang dan usul yang disampaikan tersebut menjadi usul dari partai. Jika tidak disetujui, bukan lagi Halim secara personal yang mendapatkan respon ketidak-sepakatan. [42]

Pada 7 Juni 1947, Halim menjadi komisaris pemerintah Republik Indonesia untuk wilayah Jakarta yang bertanggung jawab langsung pada menteri. Sebagai komisaris, Halim bertugas untuk mengkoordinir departemen yang ada di Jakarta, seperti Departemen Kemakmuran, Luar Negeri, Perhubungan, Penerangan, dan sebagian dalam Negeri.[43] Posisi Sekutu dan Belanda di Jakarta cukup kuat, karena itu Halim berusaha untuk mengimbangi strategi yang dilakukan oleh Belanda. Halim menentang kebijakan bumi hangus ketika tentara Sekutu dan Belanda menduduki suatu wilayah karena hal tersebut akan memudahkan pihak musuh untuk menguasai wilayah yang kosong. Halim mempunyai strategi untuk mengendalikan mantan ibukota negara, sebagian besar wilayah yang dikuasai tentara NICA menjadi daerah yang tetap berpenghuni. Halim mencoba untuk menjaga aktivitas keseharian masyarakat dengan menggunakan otoritasnya sebagai komisaris dengan memberlakukan ORI sebagai alat pembayaran ketika Belanda memberlakukan uang merah atau uang NICA. Tidak hanya itu, Halim berusaha untuk menjaga nilai ORI dengan mendatangkan beras dari Cikampek yang dapat ditukarkan dengan ORI yang dimiliki masyarakat. Satu hal, Harga beras akan lebih mahal jika dibayar menggunakan uang NICA.[44]

Pasca perjanjian Renville, Belanda menawarkan nota kesepahaman dari Komisi Jenderal (Belanda) yang menawarkan 'joint gendarmerie'-pembentukan pasukan gabungan Indonesia-Belanda pada Indonesia dan pembentukan Indonesia Serikat. Pada 4 Mei 1947, Halim bersama Mr. Ali Budiardjo, dan Mr Suwandhi diangkat sebagai delegasi ke istana Rijswik oleh Sukarno untuk bertemu dengan komisi jenderal (Belanda). Nota tersebut dijawab pada 8 Juni oleh pihak RI yang menolak 'gendarmerie' dan menyetujui kemungkinan pembentukan Negara Indonesia Serikat. Pada 19 Juni, Sjahrir menyampaikan sebuah pidato telah mengakui kedaulatan belanda atas Indonesia pada masa peralihan melalui radio. Pidato Sjahrir yang bermaksud untuk memberikan konsesi pada Belanda disamping adanya jawaban Nota dari utusan yang menemui komisi Jendral justru mendapatkan reaksi negatif dari kelompok kiri yang menolak pidato tersebut. Namun, pidato tersebut membuat kabinetnya tidak lagi mendapatkan dukungan dan digantikan oleh kabinet Amir Syarifudin. Halim mengatakan bahwa pimpinan delegasi saat itu adalah Mr. Suwandi namun perwakilan tersebut tidak mengubah pendirian Belanda yang sejak semula menghendaki pengiriman 'gendarmarie' atas nama keamanan seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, pengiriman gendarmarie justru semakin menegaskan bahwa Belanda tidak mengakui RI sebagai negara berdaulat. Hingga pada 18 Desember Belanda tidak lagi memegang perjanjian Renville dengan melakukan Agresi Militer II. [45]

Aksi Polisionil Belanda II berujung pada penangkapan dan pengasingan Sukarno, Hatta, dan Sjahrir di Bangka. Untuk menjamin tetap berlangsungnya pemerintahan maka dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Pada akhir Januari 1949, Amerika Serikat menuntut Belanda agar segera melakukan penyerahan kedaulatan Indonesia sebelum tanggal 1 Juli 1950. Apabila tidak dilakukan, maka Amerika akan mengehentikan bantuan pemulihan pasca perang pada Belanda. Kemudian pada 27 Desember 1949 Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan pada Indonesia. Selanjutnya, Indonsia berdiri sebagai negara Federal.[46]

Setelah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949, Halim berencana untuk menjalani kembali profesinya sebagai dokter THT di RSUP Jakarta. Namun, Halim tidak menyangka bahwa ia didatangi oleh Natsir (Masyumi) dan Mangunsarkoro (PNI) dan ditawarkan untuk menjadi formateur kabinet. Dipilihnya Halim sebagai salah satu formateur menunjukkan sinyal adanya ketidaksepakatan antara PNI dan Masyumi untuk menunjuk formateur kabinet dan perdana menteri untuk Negara Bagian RI-Yogyakarta. Pejabat Presiden RI dipegang oleh Mr.Assaat yang disumpah pada 27 Desember 1949[47], mantan ketua BP-KNIP, tidak dipermasalahkan. Semula Halim menolak tawaran tersebut, namun Lukman Hakim dan Mangunsarkoro memberikan penjelasan bahwa penunjukkannya sebagai formateur dan perdana menteri belum tentu dapat diterima oleh Dewan Partai. Setelahnya, Halim didatangi kembali oleh Natsir dan Prawoto Mangkusasmito (ketua BP-KNIP pengganti Mr. Assaat) untuk mendesak Halim agar menerima tawaran tersebut.[48] Ketika Halim masuk dalam KNIP dalam salah satu Komite Kerja, ia mewakili Partai Sosialis Indonesia, tetapi ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri, posisinya adalah orang tanpa-partai.[49] Bentuk penyendirian Halim ini merupakan karakternya yang kuat yang mewarnai perjalanan hidupnya.

MENJADI PERDANA MENTERI: MENEGUHKAN KABINET RI

Kecaman Sultan dan rakyat Yogyakarta atas agresi militer kedua menjadikan strategi dekolonisasi Belanda lumpuh. Tidak berhenti disitu, ancaman penghentian bantuan Marshal dari Amerika Serikat juga menjadi salah satu pertimbangan yang penting bagi Belanda untuk mengakhiri agresinya. Hingga kemudian penyerahan kedaulatan terhadap Indonesia berlangsung melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949.[50] Pembentukan Republik Indoensia Serikat (RIS) adalah hasil dari Konferensi

Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember 1949. Presiden RIS dijabat oleh Sukarno dan perdana menterinya adalah Mohammad Hatta. Ibukota negara RIS adalah Jakarta. RIS mempunyai 16 negara bagian yang salah satu negara bagiannya adalah Negara Bagian Republik Indonesia. Kepindahan ibukota ke Jakarta pasca KMB menyebabkan Yogyakarta sebagai negara bagian mengalami kekosongan kekuasaan. Untuk itulah dibentuk kabinet peralihan sejak 20 Desember 1949 hingga 21 Januari 1950 dengan perdana menterinya Mr. Susanto Tirtodiprodjo yang merupakan mantan Menteri Kehakiman Kabinet Hatta II. Kabinet Susanto merupakan kabinet peralihan, jadi kabinet ini tidak mempunyai program kerja.[51]

Selanjutnya, pemerintah RI disibukkan dengan penentuan formatur kabinet dan calon perdana menteri untuk memimpin kabinet RI-Yogya. Halim bukan merupakan calon kuat yang diperhitungkan sebagai perdana menteri. Halim justru diprediksi menempati kursi wakil perdana menteri dibandingkan dengan Mr. Susanto yang dijagokan sebagai calon terkuat perdana menteri kabinet RI-Yogya.[52] Dalam Prediksi berikutnya, Halim akan menduduki jabatan sebagai menteri pertahanan. Disamping kemungkinan Adam Malik sebagai menteri penerangan. pencalonan Adam Malik mendapatkan dukungan dari partai Murba, namun ditentang oleh Partai Masyumi. [53]

Kabinet peralihan *domissioner* setelah kabinet baru terbentuk pada 16 Januari 1950. Pelantikan Kabinet RI-Yogya dilakukan pada 21 Januari 1950, perdana menteri sebelumnya, Mr. Susanto Tirtoprojo menyerahkan jabatannya pada dr. Abdul Halim selaku Perdana Menteri Kabinet dan Mr. Assaat sebagai Pejabat Presiden RI Yogya. [54] Susunan Kabinet Halim:

- Perdana Menteri
  dr. Abdul Halim
- Wakil Perdana Menteri
  Abdul Hakim
- Menteri Dalam Negeri
  Mr. Susanto Tirtoprojo
- Menteri Penerangan
  Wiwoho Purbohadijoyo
- Menteri Keuangan
  Mr. Lukman Hakim
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan
  Ir. Sitompul
- Menteri Kesehatan
  dr. Sutopo
- Menteri Sosial
  Hamdani
- Menteri Perburuhan
  dr. Ma'as
- Menteri Kehakiman
  Mr. A.G. Pringgodigdo
- Menteri PP & K
  Sarmidi Mangunsarkoro
- Menteri Pertanian
  Sujarwo
- Menteri Perdagangan dan Perindustrian
  Mr. Tandiono Menu
- Menteri Pembangunan
  Sugondo Joyopuspito
- Menteri Agama
  K.H. Faqih Usman

Beberapa menteri yang menjabat dari Kabinet Halim adalah menteri yang berasal dari kabinet peralihan. Perdana menteri sebelumnya, Mr. Susanto juga masuk kembali ke dalam kebinet dengan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Mr. Lukman dan Sarmidi Mangunsarkoro masing-masing tetap memegang jabatan yang sama seperti pada kabinet sebelumnya yaitu masing-masing sebagai Menteri Keuangan dan Menteri PP & K.[55] Kalangan yang berasal dari non-partai adalah Halim dan A.G. Pringgodigdo. Kabinet yang telah diumumkan pada 16 Januari tidak terdapat perwakilan dari golongan kiri, FDR dan PKI. Golongan kiri kemudian memutuskan untuk menjadi oposisi dari pemerintah RI. partai PSII akan mengancam menjadi oposisi apabila kabinet yang ada tidak di-*reshuffle*.[56] Sjahrir memberikan tanggapan atas terbentuknya kabinet RI-Yogya. Baginya, kabinet yang terbentuk sudah bersifat Republikeins dan homogen. Mononutu menambahkan bahwa pembentukan kabinet telah berhasil menyertakan semua golongan termasuk golongan kiri yang terwakili oleh PSI, PBI, dan Barisan Tani.[57]

Ditunjuknya Halim sebagai perdana menteri bukan tanpa alasan, Halim mempunyai pengalaman sebagai anggota Badan Pekerja-KNIP pasca kemerdekaan. Dari sinilah, halim mulai lebih intens untuk mengunjungi kawasan pedalaman Jawa dikarenakan kantor Badan Pekerja KNIP yang pindah dari Jakarta ke Purworejo mengikuti kepindahan ibukota RI ke Yogyakarta. Meskipun berasal dari golongan non-partai Halim mampu masuk dan merangkul kedua kekuatan yang mendominasi dalam politik, PNI dan Masyumi. Pengalaman Halim dalam mengahadapi berbagai tekanan dan perselisihan paham dalam Badan Pekerja membuatnya mampu mengatasi permasalahan kepartaian dalam kabinet yang dipimpin olehnya.[58] Pengangkatan Halim sebagai perdana menteri juga tidak lepas dari alasan politik praktis dari kedua partai berkuasak, yaitu Masyumi dan PNI, yang tidak menghendaki salah satu diantaranya memegang jabatan sebagai Perdana Menteri RI-Yogya.

Ketika menunggu diumumkannya program kabinet, masyarakat mengharapkan agar Kabinet Halim tetap mempertahankan Republik sebagai pelopor perjuangan.[59] PNI mengharapkan agar kabinet memperjuangkan bentuk negara kesatuan sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945.[60] Halim mengumumkan program kerja utama dalam kabinetnya, yaitu untuk membentuk negara kesatuan. Programnya mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh politik seperti dari Mangunsarkoro dari PNI dan Sukarni dari Murba, termasuk dukungan dari Natsir dan Prawoto.[61] Halim mengatakan bahwa sebenarnya bentuk negara bukanlah sesuatu hal yang prinsipil, baginya pencapaian kemerdekaan dan pembentukan negara mempunyai tujuan yang paling penting yaitu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam menjalin hubungan dengan orang-orang partai, Halim cenderung melakukan secara pribadi. Cara ini diterapkan pula olehnya ketika menjabat sebagai Perdana Menteri RI. Lobik politik Informal yang

dilakukan oleh Halim juga diterapkan ketika ia menentukan program kerja. [62]

Selain adanya program utama kabinet yaitu untuk membentuk negara kesatuan, kabinet halim juga mempunyai program kerja lain, diantaranya menyelenggarakan program politik buruh tani yang berpedoman pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 33 UUD 1945; mendemokratisir kehidupan politik dan pemerintahan (kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dan penyelenggaraan pemilu); melakukan rehabilitasi korban-korban perjuangan; memajukan pembangunan budi dengan menjamin kebebasan beragama sesuai UUD 1945 pasal 29; serta memperluas pendidikan dan pengajaran rakyat.[63]

Dalam bidang pendidikan, Mangunsarkoro mengadakan program perluasan pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah baru di wilayah Republik dan pengadaan tenaga guru. Kemudian kerjasama pendidikan antara pemerintah RI dan RIS dalam bidang pendidikan tinggi dilakukan dengan kerjasama pendirian fakultas dan persamaan ijazah antara universitas di Republik dan RIS .[64] Adanya demobilisasi pelajar pejuang untuk kembali ke sekolah turut dikedepankan program perluasan pendidikan yang dilakukan oleh menteri P & K. [65]

Kabinet Halim menghadapi berbagai kritik dan usulan untuk me-*reshuffle* kabinet. Usul *reshuffle* tekait dengan pemisahan antara kementerian sosial dan perburuhan yang semula ada dalam satu kementerian yang sama. pemecahan kementerian tersebut dikatakan oleh pihak pemerintah tidak akan menambah biaya belanja negara. selain itu juga terdapat kritik untuk melakukan penghematan dalam lingkungan kementerian pembangunan masyarakat yang dijawab oleh pemerintah bahwa hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan. untuk mengatasi defisit keuangan negara, pemerintah Republik berencana untuk melakukan penghematan dan meningkatkan penghasilan. Disamping itu juga pemerintah Republik akan meminta bantuan keuangan pada pemerintah RIS yang berperan sebagai pemerintah pusat. Halim menanggapi usul perubahan kabinet atau *reshuffle* sebagai bentuk mosi tidak percaya pada pemerintah.[66]

Kabinet Halim mengalami permasalahan lain terkait program kerja menteri. Badan pekerja KNIP mengadakan sidang untuk menentukan mosi percaya/tidak percaya atas permasalahan tersebut. Program kerja yang dipermasalahkan oleh Badan Pekerja berasal dari menteri perburuhan, dr. Ma'as atas program pembagian sepeda untuk para buruh. Pada dasarnya program utama kabinet disusun oleh perdana menteri dan perincian program lainnya dibuat oleh masing-masing menteri. Meskipun demikian, Halim selaku perdana menteri kemudian mempertanggung jawabkan dan mengakui kelalaiannya atas program dari menteri tersebut dihadapan para Badan Pekerja. Pada saat itu pembelaan terhadap PM Halim hanya datang dari Partai Sosialis Indonesia, anggota lainnya hanya melontarkan kritik terkait kebijakan dalam memperjuangakan negara kesatuan, usaha-usaha ekonomi, sosial yang berhubungan dengan perburuhan, dan keuangan negara. Logisnya, para anggota Badan Pekerja akan kehilangan banyak hal ketika kabinet PM Halim harus berhenti dalam kondisi negara yang kritis. Bagaimanapun juga RIS terbentuk dari sendi Republik Indonesia. Prawoto sebagai pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan pada peserta sidang untuk menjawab atau memberikan sanggahan terhadap pertanggungjawaban PM Halim. Jeda waktu yang diberikan untuk sidang pada hari berikutnya tentu saja membuat para anggota Badan Pekerja berfikir dua kali untuk menggulingkan Kabinet Halim yang sedang memperjuangkan negara kesatuan. Dalam sidang berikutnya, Badan Pekerja justru mengeluarkan mosi percaya pada Kabinet Halim untuk melanjutkan program kerjanya.[67]

Kabinet Halim menghadapi permasalahan ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat RIS tentang pemberlakuan Kebijakan Gunting Syarifuddin pada tanggal 19 Maret pukul 08.00 malam. Tindakan moneter Pemerintah RIS melalui menteri keuangan dengan ketentuan pengguntingan uang menjadi dua bagian dan nilainya berlaku setengah dari nilai asli uang kertas tersebut. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan inflasi yang tinggi.[68] sebagai tindak lanjutnya, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru berdasarkan UU DArurat No.12 tahun 1950.[69]

Banyak diantara masyarakat Republik yang tidak menghendaki pengguntingan uang melakukan penukaran uang tersebut dengan nilai yang lebih rendah.[70] Selain itu, penolakan tindakan moneter Pemerintah RIS juga berasal dari pihak Pemerintah RI. Tentangan keras atas kebijakan tersebut berasal dari Menteri P & K, S. Mangunsarkoro yang menganggap kebijakan tersebut telah melangkahi wewenang pemerintah RI karena tidak melilbatkan RI dalam memutuskan kebijakan tersebut. Namun, Halim mempunyai pandangan yang berbeda, ia menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi berupa tindakan moneter sudah seharusnya dirahasiakan terlebih dahulu dari luar lingkaran pembuat kebijakan, jika tidak maka akan terjadi kekacauan dan banyak pihak yang akan mengambil keuntungan. Dari pengalaman politik Halim sebelum menjabat sebagai perdana menteri itulah Halim mampu menghadapi warna (partai politik) dalam kabinetnya. Mempunyai posisi sebagai perdana menteri, tidak lantas membuat Halim merasa berkuasa. Untuk menjaga kesolidan kabinetnya, Halim justru banyak melakukan *personal approach* terhadap para anggota partai termasuk para menteri dalam kabinetnya dengan mendatangi secara langsung untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, berbagai permasalahan kepartaian dan kabinet dapat diatasi. Dalam setiap perundingan penting, Halim seringkali melakukan lobbying terlebih dahulu sebelum melakukan pertemuan atau sidang. Jadi. ketika sidang berlangsung pihaknya sudah mengetahui goal tidaknya maksud tersebut. [71]

PROPAGANDA REPUBLIK: SIMPATI DAN PARTISIPASI MENUJU NEGARA KESATUAN

Konstitusi RIS pada dasarnya mempunyai bentuk pemerintahan yang sama dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 yaitu bersifat republik. hanya saja republik yang dimaksud RIS adalah 'Republik Fusi' atau Republik Penggabungan dari beberapa negara. Sedangkan Republik berdasarkan UUD 1945 adalah Republik dari Negara Kesatuan.[72] Konstitusi RIS ditetapkan pada 31 Januari 1950. Dalam piagam penandatanganan terdapat 16 wakil

dari negara bagian. Pihak Republik Indonesia diwakilkan oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo.[73] Pasal 190 konstitusi RIS[74] dianggap sebagai jalan konstitusional. Keberadaan RIS penting untuk menguntungkan posisi Indonesia dimata internasional. Sejak penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949 RIS telah diakui oleh 62 negara sedangkan pengakuan pada RI hanya dilakukan oleh 10 negara.[75] RIS menjalankan tugas termasuk *lobbying* untuk hubungan internasional.[76]

Pembentukan negara kesatuan tidak hanya menjadi program kerja Kabinet dalam pemerintah, akan tetapi juga menjadi bagian tugas bersama dari masyarakat untuk melibatkan diri untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satu entitas dari gerakan swadaya masyarakat adalah gerakan penggalangan dana untuk Republik dilakukan oleh masyarakat Jakarta. Pengumpulan dana berasal dari komunitas masyarakat Tionghoa, Belanda, Arab, India, Pakistan, dan Indonesia. Bantuan yang mencapai f 230.000 menunjukkan adanya semangat persatuan rakyat untuk memberikan bantuan pada Republik.[77] Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyatuan menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Proses selanjutnya akan ada lebih banyak terlihat sinergitas itu dalam upaya penggabungan dan propaganda demi mencapai tujuan menuju negara kesatuan. Di satu sisi pemerintah melakukan propaganda untuk menyerukan negara kesatuan dan di sisi lain masyarakat menyambutnya dengan permintaan untuk bergabung dalam wilayah RI. Dua upaya tersebut merupakan bagian dari cita-cita untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda.

Untuk mencapai tujuan sebagai negara kesatuan, strategi utama yang dilakukan oleh Halim adalah dengan mengirimkan delegasi ke negara-negara bagian. Beberapa tokoh yang dikirimkan memiliki kedekatan emosional ataupun pengetahuan yang mendalam akan wilayah tersebut; seringkali merupakan pemuda asal dengan beretnis sama dengan mayoritas negara bagian tersebut. Contoh adalah penempatan Ir. Putuhena dan Anak Agung Gde Agung di NIT serta Mr. Assaat ke Negeri Pasundan. Halim sendiri bersama dengan Lukman Hakim dan Sitompul melakukan kunjungan ke wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, Jambi, Lahat, Bengkulu dan Curup. Kunjungan dimaksudkan untuk melihat respons dari masyarakat sekaligus propaganda mengenai pembentukan negara kesatuan.[78]

Perwakilan Republik melakukan penyelidikan di wilayah Sumatera untuk untuk menetapkan batas-batas Provinsi Republik, lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan yang akan diserahkan daerah-daerah otonomi Sumatera. Panitia-panitia yang bertugas diantaranya, Mr. Susanto Tirtoprodjo untuk Propinsi Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur dimpimpin oleh Ir. Sitompul, Sumatera Tengah dipimpin oleh Tandiono Manu, Sumatera Selatan dipimpin oleh dr. Ma'as. komisi tersebut berangkat dari Jakarta ke wilayah Sumatera untuk melakukan penyelidikan selama 10 hari lamanya. [79] Pemerintah RI mendelegasikan Menteri Perburuhan RI dr. Ma'as ke Sumatera Selatan sebagai panitia 4 yang dikirim pemerintah pusat Republik ke Sumatera Utara, Tengah, Tapanuli untuk mengumpulkan bahan guna penetapan batas-batas pelaksanaan undang-undang No.22/ 1948 terkait hak-hak yang harus diberikan pada daerah-daerah otonom.[80] Pendelegasian tersebut tidak hanya membawa misi untuk mengatur wilayah teritorial Republik tetapi juga membawa semangat pembentukan negara kesatuan pada masyarakat setempat.

Tidak hanya para menteri yang melakukan propaganda ke berbagai daerah, akan tetapi juga Pemangku Jabatan presiden RI, Mr. Assaat yang berencana beberapa kunjungan ke daerah yang telah masuk dalam wilayah Republik pada bulan April. Di wilayah Jawa Timur, Mr. Assaat mengunjungi Pondok Gontor, Sumoroto, Ponorogo, Madiun, Dan Surabaya. Dalam kunjungannya, Mr. Assaat melakukan rapat umum mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil partai dan pegawai jawatan-jawatan.[81] Setelahnya, Mr. Assaat melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Perjalanannya dimulai dari Magelang pada awal April, kemudian meneruskan perjalanan ke Banyumas dan Purwokerto. Setelah melakukan peninjauan selama tiga hari di Jawa Tengah kemudian Mr. Assaat melanjutkan ke Jawa Barat dan Banten.[82]

Kunjungan daerah selanjutnya dilakukan oleh Halim ke kota Palembang pada pertengahan April 1950. Kedatangannya disambut oleh Residen Palembang, Sukardi. Dalam kunjungannya kali ini Halim disertai oleh Lukman Hakim. Halim membawa misi untuk mempererat hubungan antara pusat dan daerah.[83] Dukungan rakyat Sumatera Selatan terlihat dari banyaknya spanduk yang berisi tentang dukungan terhadap proklamasi di lapangan Hatta sebagai tempat penyelenggaraan rapat

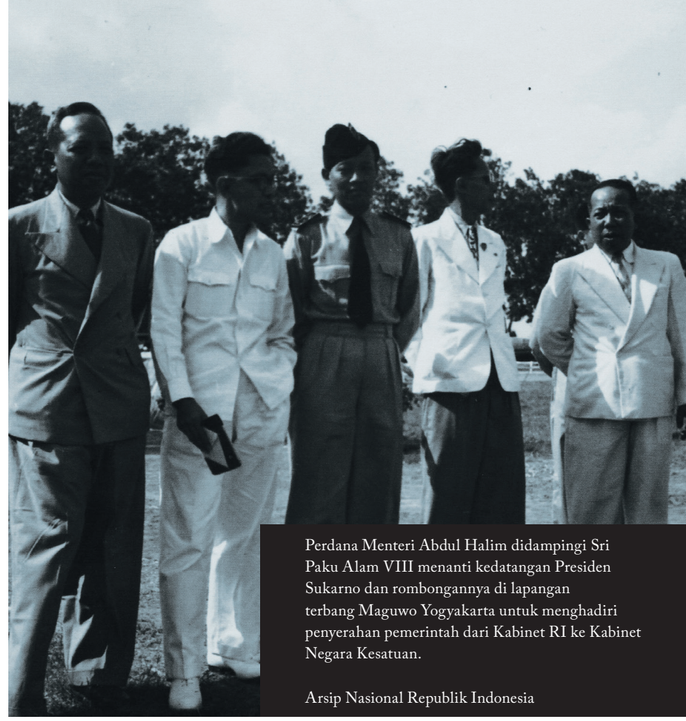

Perdana Menteri Abdul Halim didampingi Sri Paku Alam VIII menanti kedatangan Presiden Sukarno dan rombongannya di lapangan terbang Maguwo Yogyakarta untuk menghadiri penyerahan pemerintah dari Kabinet RI ke Kabinet Negara Kesatuan.

Arsip Nasional Republik Indonesia

terbuka. Dalam rapat tersebut, Lukman Hakim menyampaikan propaganda agar masyarakat mendukung kemerdekaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Hal yang sama disampaikan oleh Halim dengan menambahkan pentingnya melanjutkan cita-cita para pejuang untuk mengisi kemerdekaan demi tercapainya kemakmuran.[84]

Halim melanjutkan kunjungannya ke daerah Sumatera lainnya pada akhir April 1950. Dalam kunjungannya ke Jambi, Halim menyatakan keprihatinannya atas kurangnya sumber daya manusia pemerintahan lokal yang jarang berkualifikasi secara pendidikan. Ia mengusulkan pengabdian wajib bagi para dokter di Jambi. Setelahnya, Halim kembali ke Palembang. Di kota itu, Halim membicarakan situasi politik RI dengan RIS dan posisi dan pandangan beragam negara bagian. Halim lalu melanjutkan perjalanan ke Bangka.[85] Bentuk

Perdana Menteri Abdul Halim berjabat tangan dengan *Acting* Presiden Mr. Asaat untuk menyerahkan kembali mandatnya disaksikan oleh Presiden Sukarno di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta tanggal 12 Agustus 1950

Arsip Nasional Republik Indonesia

Para pejabat negara, antara lain dr. Halim, Wiwoho Poerbohadidjojo, dan Sarmidi Mangoensarkoro, menghadiri upacara penyerahan pemerintahan Kabinet RI kepada Kabinet Negara Kesatuan di Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta tanggal 12 Agustus 1950.

Arsip Nasional Republik Indonesia

kunjungan wilayah ini merupakan sesuatu yang lazim dilakukan oleh berbagai pemimpin Republik dan hal ini dapat dianggap sebagai propaganda pemerintah untuk meyakinkan warga bahwa negara hadir di berbagai pelosok negeri. Kunjungan ini juga penting untuk menilai pandangan elit lokal terhadap Republik serta mengetahui permasalahan-permasalahan pada wilayah-wilayah yang jauh dari ibukota tersebut. Dengan demikian, propaganda yang dilakukan tidak hanya akan memperkuat posisi RI baik itu pemberian dukungan-dukungan terhadap kebijakan, akan tetapi juga strategi menarik daerah lain agar memuluskan penggabungan negara-negara bagian menjadi satu republik.

PENGGABUNGAN

Propaganda pembentukan negara kesatuan menjadi pemicu munculnya dukungan baik dalam bentuk pengambilan keputusan untuk kembali pada Republik atau dalam bentuk organisasi massa. Salah satunya yaitu adanya Gerakan persatuan yang merupakan bentuk perlawanan terhadap bentuk pemerintahan federal. Gerakan ini menuntut dihapuskannya sistem federal dan menggantinya dengan sistem kesatuan. Tidak heran, dalam kurun waktu 7 bulan pertama gerakan ini semakin menguat. Dukungan dari pasal 139[86] UUD RIS sejak 7 Maret 1950 yang mengesahkan peleburan negara-negara bagian untuk bersatu dalam Republik Indonesia semakin memperlebar kesempatan ke arah penyatuan.[87]

Antusiasme masyarakat untuk mendorong wilayahnya agar masuk ke dalam bagian republik terjadi sebelum Halim mengumumkan program kerja kabinet untuk membentuk negara kesatuan. Berbagai wilayah tercatat meneguhkan untuk menggabungkan diri, seperti Banten[88], Bogor[89] dan Cirebon[90] yang menggunakan nama Republik untuk menegaskan dukungannya. Tidak hanya itu, masyarakat membentuk panitia-panitia pada masing-masing negara bagian yang bertugas untuk mempersiapkan rencana undang-undang pembubaran negara federal dan penggabungan dalam wilayah republik seperti di Jawa Tengah,[91] Jawa Timur[92], Padang[93], Pasundan[94] dan lain-lain. Wilayah lain seperti Mojokerto bahkan memutuskan untuk masuk dalam Republik dengan mengabaikan pemerintahan Negara Jawa Timur.[95] Menyusul kemudian wilayah lain seperti Bangkalan,[96] masyarakat Banjar[97]. Dukungan rakyat untuk kembali ke wilayah Republik karena menentang upaya dekolonisasi wilayah Republi Indonesia. Untuk itu, rakyat menggunakan semangat kesatuan yang tercermin direfleksikan dari proklamasi kemerdekaan.

Dukungan terhadap Republik bukan hanya berasal dari keputusan daerah untuk bergabung dalam Republik, akan tetapi juga dukungan di dalam Parlemen RIS. Dalam parlemen tersebut hanya terdapat satu fraksi Republik Indonesia, tetapi keanggotannya terdiri dari gabungan beberapa wakil dari negara-negara bagian. Pernyataan penggabungan anggota dari negara bagian lain dalam fraksi Republik merupakan salah satu bentuk lain dari dukungan terhadap Republik.[98]

Perwakilan negara bagian yang menghendaki penggabungan dengan Republik mengusulkan untuk menggunakan undang-undang darurat pasal 139 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mempercepat proses

penggabungan. Usul tersebut disampaikan melalui mosi yang diajukan oleh para anggota parlemen perwakilan Jawa Tengah,[99] Jawa Timur[100] dan Madura.[101] Mosi penggabungan kemudian disetujui melalui sidang Parlemen RIS. Mosi yang diterima parlemen berjumlah 11 mosi, diantaranya berasal dari Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pasundan, Sumatera Selatan, Bangka, Labuhan Batu, Asahan Selatan, Sabang, Padang, Kalimantan Selatan, Dayak Besar, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tenggara. Dengan demikian seluruh wilayah Linggarjati kecuali Sumatera Timur, Riau dan Belitung, serta seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan Barat telah mengajukan Mosi penggabungan ke dalam Republik Indonesia. [102]

Kembali ke Republik begitu kiranya keinginan dari masyarakat disebagian negara bagian. Hingga satu persatu dari wilayah negara bagian tersebut mengembalikan kekuasaan wilayahnya dan memilih untuk menggabungkan diri dalam Republik. Pada Tanggal 9 Maret 1950, Presiden Sukarno menandatangani keputusan masuknya Jawa Tengah, Madura, Jawa Timur, Sabang , dan Padang untuk masuk dalam Republik. Pasundan menyerahkan kekuasaan pada pemerintah RIS pada 10 Maret 1950.[103] Menyusul kemudian pada Pada 16 April Bangka Belitung yang masuk dalam Provinsi Sumatera Selatan. [104]

Pada tanggal 24 Maret, Jawa Tengah telah resmi bergabung dalam RI. keputusan tersebut berasal dari rapat antara Gubernur Jawa tengah, kepala residen, dan kepala jawatan. Di beberapa daerah bekas *Recomba*[105] (Semarang, Pekalongan, sebagian Banyumas) diadakan upacara pengibaran bendera selama 2 hari berturut-turut.[106] Setelah penggabungan resmi ke dalam wilayah republik, kementerian kesehatan Republik melakukan tinjauan ke Jawa Tengah.[107] Penggabungan Negara Sumatera Selatan ke dalam republik setelah pembubaran NSS beserta DPR Sementara.[108]

Perwakilan NIT, Husain, yang juga merupakan ketua parlemen NIT, menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat NIT mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Sukarno-Hatta. Penggabungan berbagai daerah di Indonesia Timur juga atas kehendak rakyat dan dewan perwakilannya. Daerah yang memproklamasikan penggabungannya pada RI adalah Goa, Takalar, Djeneponto, Bonthain, Polewali, Sumbawa, Bima, Dompu, Luwu dan Gorontalo. Husain menjelaskan bahwa negara kesatuan bukanlah tujuan tetapi jalan untuk mencapai kemakmuran masyarakat.[109]

Pada 1 Mei 1950 Gorontalo mengumumkan atas nama masyarakat bergabung langsung dalam RI dan lepas dari NIT melalui kepala pemerintah Sulawesi Utara. Minahasa juga melakukan hal yang sama dengan mengumumkan untuk keluar dari NIT dan bergabung dengan RI. Namun karena keadaan Minahasa yang genting diadakan Pemerintahan Militer.[110] Beberapa daerah lain NIT juga menggabungkan diri dalam RI dan menyatakan lepas dari NIT, seperti Makassar, Raja-raja Palu, Sidjibalu, Purawi, Tawali dan Balawa (Sulawesi Utara dan Tengah).[111] Selain itu, Dewan Timor dan Dewan Raja-raja yang menyetujui pembentukan negara kesatuan menyerahkan penyelenggaraan dan cara pembentukan negara kesatuan pada kebijaksanaan pemerintah RIS dan NIT.[112]

Selain itu, pernyataan penggabungan dengan RI berasal dari pemerintah Sangihe-Talaud yang memutuskan tidak mengakui dan memutuskan hubungan dengan pemerintah NIT.[113] Dewan rakyat Maluku Utara dan Dewan Raja-raja Maluku Utara memutuskan berdirinya Provinsi Maluku untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia.[114]

Pemerintah mengeluarkan pernyataan terkait adanya mosi yang diajukan untuk penggabungan negara-negara bagian ke dalam Republik Indonesia. Pertama, penggabungan ke dalam Republik Indonesia terjadi atas kehendak rakyat. Kedua, Tetap berlakunya perundangan daerah selama tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan negara Republik Indonesia, dan Ketiga, keberlanjutan jawatan-jawatan dan instansi-instansi yang tetap berjalan sebagaimana mestinya.[115]

Luapan kegembiraan masyarakat menyambut penggabungan Padang ke Sumatera Tengah yang telah masuk ke dalam wilayah Republik. Antusiasme masyarakat ditunjukkan dengan pemasangan bendera merah-putih di berbagai tempat di Padang, dengan Bukit Tinggi dipilih sebagai Ibukota Sumatera Tengah.[116] Setelah proses penggabungan dalam wilayah RI beberapa daerah mendapatkan kunjungan dari Pemerintah Republik. Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik yang mengunjungi wilayah Jawa Tengah setelah menggabungkan diri dalam Republik.[117] Langkah yang sama juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik yang melakukan kunjungan ke Jawa Timur setelah daerah tersebut bergabung dalam Republik Indonesia. Peninjauan juga dilakukan pemerintah di daerah lain yang baru bergabung dalam Republik.[118] Pemerintah RI yang diwakili oleh Kementerian Penerangan melakukan peninjauan ke Kalimantan Timur setelah daerah tersebut masuk menjadi bagian dari RI.[119]

Satu bulan setelah penggabungan Jawa Tengah ke dalam Republik Indonesia, pada tanggal 4-5 April 1950, Presiden Assaat mengunjungi Semarang dan beberapa karesidenan di Jawa Tengah bagian utara. Kedatangan Assaat ke Semarang adalah untuk mensosialisasikan program pemerintah RI yang telah mempunyai undang-undang daerah otonom.. Kemudian pada tanggal 6 April, Assaat melanjutkan kunjungannya ke Pekalongan, Cirebon, dan daerah Jawa Barat lainnya.[120]

Kunjungan dari pemerintah Republik ke wilayah yang telah bergabung dalam RI bertujuan mensosialisasikan pemberlakuan otonomi daerah. Disamping itu, Pemerintah Republik turut memberikan bantuan pada daerah wilayah yang baru bergabung dalam bentuk bantuan kepegawaian atau pengiriman pejabat dan pegawai yang didatangkan dari Republik seperti bantuan pemerintah di daerah Jawa Timur dan Kalimantan Barat.[121] Bantuan juga datang dari Pemerintah RIS yang memutuskan untuk memperbantukan pegawai Federal di wilayah tersebut untuk bekerja bagi Republik mengingat banyaknya negara Federal yang menggabungkan diri ke dalam Republik.[122] Menteri Dalam Negeri Republik, Mr. Susanto menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya penggabungan ke wilayah Republik dalam proses pembentukan negara kesatuan. Baginya, RI mempunyai

makna psycologis-politis dan riwayat perjuangan nasional hal ini dibuktikan degan perjuangan rakyat dalam mempertahankannya.[123]

Pada kenyataannya masyarakat lebih banyak bersimpati pada RI yang dianggapnya sebagai pusat pemerintahan yang sesungguhnya, dibandingkan dengan RIS yang dibayangkan sebagai pemerintahan pusat yang masih ada di bawah payung Belanda. Walaupun pemerintahan RIS itu dipenuhi oleh tokoh-tokoh utama RI, seperti Mohammad Hatta, romantisisme revolusi yang membayangkan perjuangan Republik ketika berpusat di Yogyakarta tetap melekat pada hati sanubari masyarakat Indonesia. Masyarakat untuk mendukung RI sebagai entitas kemerdekaan yang bebas dari kolonialisme, kekacauan dan penderitaan dan digantikan dengan bayangan pusat yang merdeka melalui kebebasan, keamanan, dan kemakmuran.

MENCARI TITIK TEMU MEWUJUDKAN NKRI

Penggabungan negara bagian ke dalam Republik bukan tanpa hambatan. Pihak oposisi dan gerakan separatis menjadi momok yang harus dihadapi oleh pemerintah RI-RIS. Jika tidak, penggabungan menjadi negara kesatuan akan menyisakan permasalahan sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rickleffs bahwa keberhasilan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia menyisakan beberapa pekerjaan rumah terkait dengan permasalahan sosial keagamaan, kemasyarakatan dan kesukuan yang sewaktu-waktu dapat muncul sebagai pemantik adanya gerakan separatis dan pemberontakan pada pemerintah pusat.[124]

Atas kondisi yang tidak kondusif karena adanya gerakan separatis, pemerintah RIS berupaya campur tangan dengan melakukan pengiriman tenaga militer atau pasukan bekas Republiken pada April 1950 ke Makassar. Pasukan bekas Republiken tersebut mendapat perlawanan dari pasukan bekas KNIL dibawah Pimpinan Kapten Andi Aziz yang kemudian justru ditangkap ketika datang ke Jakarta dengan tuduhan sebagai pemberontak. Pemerintah RIS juga melakukan kontrol pada NIT dengan cara mendominasi ranah kabinet parlementer. Jadi, Kabinet lama di NIT diganti dengan kabinet yang pro-Republiken yang diketuai oleh Mr. Putuhena.[125] Dengan kata lain, Pemerintah RIS berusaha melakukan perimbangan kekuatan bahkan mengganti dominasi orang yang menentang Republiken di Negara Indonesia Timur.

Salah satu wilayah Indonesia Timur lainnya yang mendapatkan perlawanan militer dari RIS adalah Ambon. Tidak sama dengan wilayah Sulawesi pada umumnya yang telah mendeklarasikan diri untuk menjadi bagian dari Republik, Ambon yang merupakan tempat pelarian ketua Republik Maluku Selatan (RMS), Soumokil dan pasukan KNIL yang sebagian besar direkrut dari wilayah ini tetap menentang Republik dan menyatakan keinginannya sebagai bagian negara yang merdeka. RIS berupaya meredam gerakan RMS dengan mengirimkan putra Ambon yang pro-Republik yaitu Johannes Leimena. Namun, gagalnya upaya ini mengakibatkan Jakarta menempuh jalan militer untuk menghadapi Ambon. Perlawanan RMS berlangsung sampai pada November 1950 ketika mereka kalah dalam serangan yang dilakukan oleh TNI. Beberapa dari tentara RMS merupakan bekas

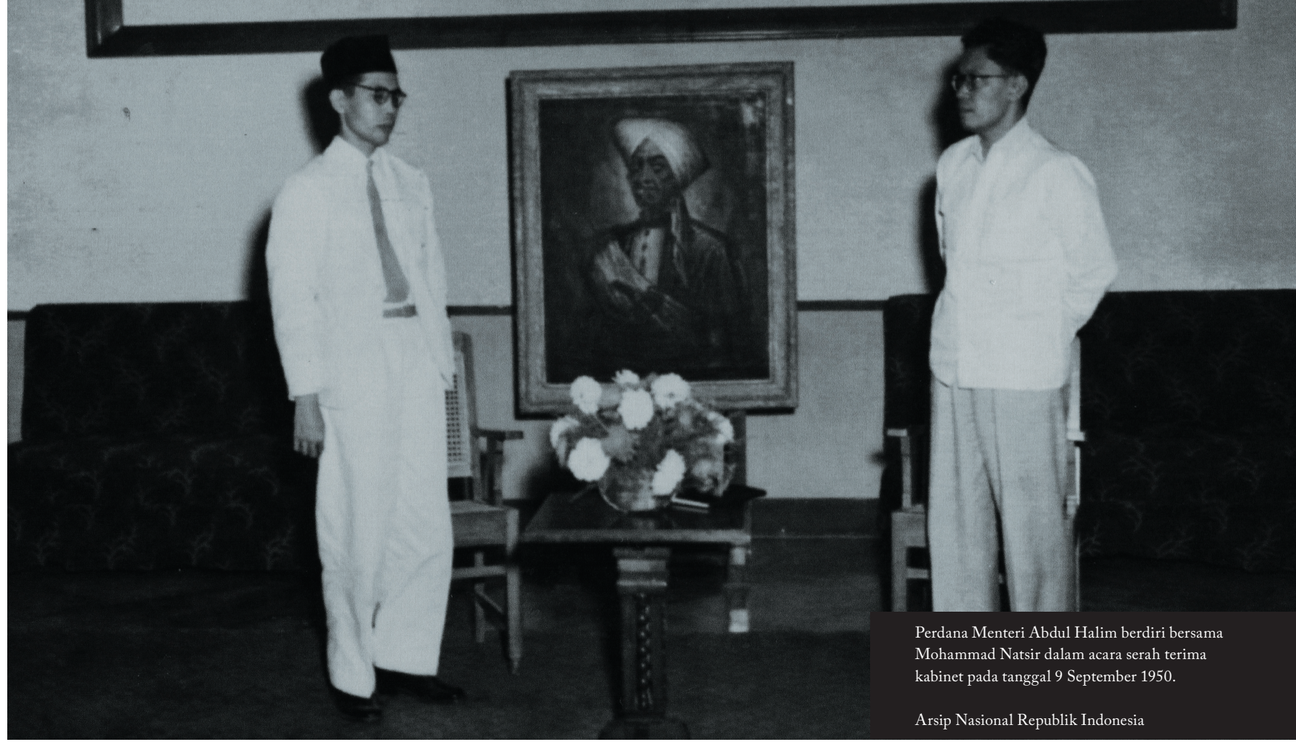

Perdana Menteri Abdul Halim berdiri bersama Mohammad Natsir dalam acara serah terima kabinet pada tanggal 9 September 1950.

Arsip Nasional Republik Indonesia

tentara KNIL yang telah didemobilisasi dan merasa dirinya bukan bagian dari Republik yang telah dimusuhinya dalam peperangan revolusi ketika mereka berjuang dibawah panji Hindia Belanda.[126]

Halim banyak melakukan perundingan dengan pemerintah RIS terkait dengan hambatan yang terjadi dalam proses penggabungan. Kepergian Halim ke Jakarta bertemu dengan Menteri Pertahanan RIS, teman baiknya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan dr. Mansur dari Negara Sumatera Timur (NST) untuk membahas tentang beberapa permasalahan terkait penggabungan beberapa daerah dalam wilayah Republik. PM Halim akan melakukan penyidikan dan peninjauan kembali mengenai Asahan dan Labuhan Batu yang menghendaki bergabung dalam Republik karena pihak NST tidak sepakat dengan rencana penggabungan. Lain lagi halnya dengan unsur feodalisme yang masih kuat, sehingga menyulitkan penggabungan Kalimantan Barat dan NIT. Hal ini jelas berbeda dengan Kalimantan Timur yang dapat diterima dengan baik oleh pemerintah Republik dan perwakilan daerah Kalimantan Timur. [127]

Pada tanggal 3-5 Mei 1950 telah diadakan pertemuan antara Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta, Presiden Negara Indonesia Timur dan Wali Negara Sumatera Timur. Pertemuan tersebut membahas tentang peleburan antara RI dan RIS dalam satu negara kesatuan baru dan mempunyai Undang-undang Sementara yang berbeda dengan undang-undang RIS.[128] Hatta mempunyai pemikiran bahwa negara kesatuan yang terbentuk akan memberikan otonomi seluas-luasnya pada setiap daerah tanpa mengurangi esensi dari demokrasi. Pemikiran ini merupakan salah satu solusi ketika terjadi perpecahan akibat adanya aliran unitarianisme dan federalisme.[129] Konsepsi

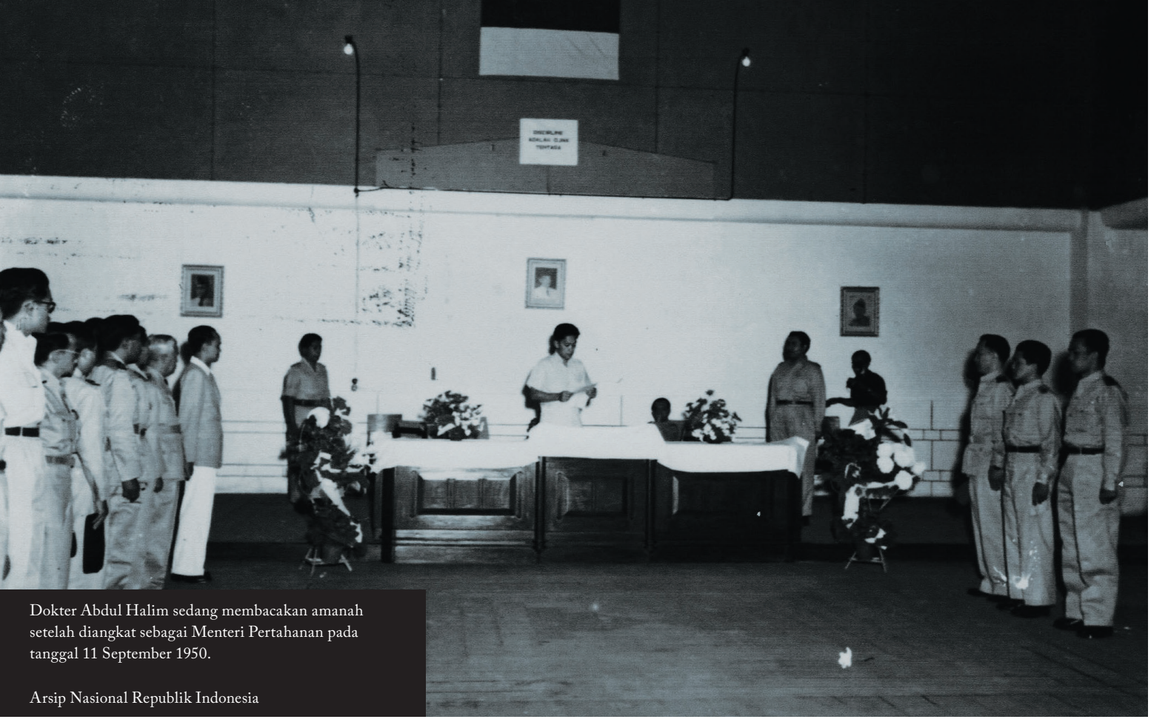

Dokter Abdul Halim sedang membacakan amanah setelah diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada tanggal 11 September 1950.

Arsip Nasional Republik Indonesia

Dokter Abdul Halim berfoto bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kolonel Nasution, Mr. Ali Budiardjo, dan Komodor Udara Soerjadi Suryadarma dalam acara serah terima Menteri Pertahanan.

Arsip Nasional Republik Indonesia

negara kesatuan menghapuskan citra negara federal tanpa menghilangkan kesan kemandirian wilayah dengan pemberian otonomi daerah.

Perdana Menteri RIS, Mohammad Hatta dan Perdana Menteri RI-Yogya, Abdul Halim mengadakan pertemuan pada bulan Mei 1950 untuk membahas tentang format negara kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan juga turut dihadiri oleh perwakilan negera-negara bagian RIS seperti Sumatera Timur dan Indonesia Timur. Perundingan tersebut menghasilkan keputusan yaitu pembentukan negara kesatuan. Dalam piagam kesepakatan tersebut juga menetapkan bahwa undang-undang dasar sementara akan diperoleh dari perbaikan undang-undang dasar sementara RIS yang disesuaikan dengan Undang-undang Republik.[130]Pelaksanaan negara kesatuan berdasarkan asas ke dalam, yaitu menyempurnakan kehidupan rakyat dan persatuan bangsa Indonesia dan asas ke luar, yang diartikan utnuk memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain.[131]

Dalam persiapan perundingan antara RI dan RIS membentuk panitia bersama yang terdiri dari perwakilan pemerintah RI dan RIS. Pemerintah RI diwakili oleh Abdul Hakim mendapat mandat penuh dari pemerintah RI untuk melakukan perundingan dengan perwakilan pemerintah RIS. Sebagai realisasi kesepakatan antara RI-RIS dibentuklah Panitia Persiapan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan yang diketuai oleh Mr. Supomo yang juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman RIS. Halim menjelaskan bahwa baginya perundingan terakhir antara RI dan RIS merupakan bentuk persetujuan bersama yang sudah lama dicita-citakan oleh banyak pihak, sehingga di dalamnya tidak terlihat adanya permasalahan yang berarti.[132] Pengumuman bersama antara PM Halim dan PM Hatta pada 19 Mei 1950 berisi tentang piagam persetujuan antara RI dan RIS yang juga mewakili NIT dan NST untuk melaksanakan negara kesatuan sebagai perwujudan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. [133]

Beberapa pihak- seperti PNI di Sumatera Timur- tidak menyetujui konsep negara kesatuan sebagaimana yang ada dalam Piagam Persetujuan antara RI dan RIS pada tanggal 19 Mei 1950 karena menganggap negara kesatuan merupakan keberlanjutan dari RIS.[134] Pendapat yang berbeda muncul dari Masyumi yang menghendaki konsepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa langkah tersebut merupakan strategi yang rasional untuk kepentingan politik nasional. Sebelum mengadakan pertemuan bersama, RI dan RIS melakukan pertemuan internal di masing-masing pemerintahan. RI melakukan pembahasan tentang tidak perlunya wakil presiden dalam negara kesatuan dan penentuan ibukota negara kesatuan. Sedangkan RIS membicarakan tentang otonomi daerah dalam negara kesatuan.[135]

Persetujuan lain berhubungan dengan pembentukan undang-undang dasar kesatuan yaitu berasal dari konstitusi sementara RIS dengan beberapa perubahan. Perubahan dalam konstitusi RIS antara lain Senat dihapuskan, DPRS terdiri dari perwakilan DPR RIS dan Badan Pekerja KNIP, anggota yang ditunjuk oleh presiden, dan anggota berdasarkan kesepakatan kedua pemerintah. Selanjutnya, DPRS bersama

dengan KNIP dinamakan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar yang mempunyai hak mengadakan perubahan dalam undang-undang baru; konstituante berasal dari anggota yang dipilih melalui pemilu; menetapkan Sukarno sebagai presiden; Dewan Menteri bersifat parelementer; Jabatan wakil presiden akan dibicarakan lebih lanjut; Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan. Pembentukan kepanitiaan lebih lanjut dilakukan secepatnya, kepanitiaan RIS pada DPR dan Senat, Kepanitiaan pemerintah RI pada Badan Pekerja- KNIP.[136]

Pemerintah Federal menggunakan pasal 54 konstitusi RIS dengan mengangkat komisaris-komisaris RIS untuk negara-negara bagian untuk menyelenggarakan seluruh tugas pemerintah negara bagian. Namun dikatakan bahwa bukan hal inilah yang dikehendaki oleh rakyat, sehingga tidak mendorong keadaan keamanan menjadi lebih baik. Natsir dkk. mengajukan amandemen dalam parlemen yang dapat diterima oleh pemerintah dan parlemen. Sehingga mulai disiapkan perundingan-perundingan antara pemerintah RI dan RIS tentang pembentukan negara kesatuan RI. Terdapat cara baru untuk melakukan peleburan dalam Negara Kesatuan RI. Pertama, pencabutan pasal yang federalistis dalam konstitusi RIS. Kedua, RI dilebur dalam RIS sehingga tidak ada lagi negara bagian. Ketiga, Negara kesatuan dibentuk melalui Republik Indonesia – Yogyakarta. Kesepakatan untuk mengubah konstitusi RIS dari federal menjadi persatuan didasarkan pada persetujuan pada tanggal 19 Mei 1950. [137]

Setelah kesepakatan 19 Mei, Pihak RI menginginkan agar pimpinan Kementerian Dalam Negeri RIS yang masih dipegang oleh orang Belanda agar diserahkan pada pimpinan Bangsa Indonesia agar kesepakatan antar kedua pemerintah RI-RIS dapat tercapai dengan baik.[138] Pemerintah berupaya untuk mencari jalan keluar terkait konsepsi penyatuan kementrian penerangan antara RI dan RIS.[139] Disamping itu, jumlah provinsi juga menjadi bahan pertimbangan dalam Pemerintahan Dalam Negeri.[140]

Dalam proses konsepsi kesatuan terdapat perbedaan pendapat dalam perundingan RI-RIS. Mangunsarkoro sebagai delegasi RI mengusulkan agar Yogyakarta menjadi ibukota negara kesatuan. Sebaliknya, pihak RIS menghendaki Jakarta untuk menjadi Ibukota Negara. Bentuk pemerintahan dalam undang-undang juga diusulkan menjadi bentuk parlementer, dari pihak RIS mengusulkan bahwa perlu diberikan opsi bentuk pemerintahan presidensiil. Paling penting dikatakan oleh Mangunsarkoro adalah penyusunan program politik.[141]

Konferensi kembali diadakan antara RI dan RIS yang berlangsung pada 19 Juli 1950. Dalam konferensi tersebut dibicarakan mengenai rencana Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian rencana undang-undang tersebut akan disampaikan pada DPR dan Senat serta Badan Pekerja KNIP.[142] Halim menyatakan bahwa pemerintah RI dan RIS akan saling melengkapi dan bertukar argumen untuk mencapai kesepakatan bersama. Beberapa kesepakatan yang ada dalam konferensi ini diantaranya adalah terkait keanggotaan DPR; Pembagian daerah berdasarkan proklamasi 1945, yakni 10 provinsi[143] yang menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan dan mengadakan sidang DPR NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950 untuk memajukan calon Kabinet Formatur. Dalam bagian ini asas kenegaraan diselaraskan kembali pada asas proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan demikian beberapa konsepsi awal mengenai nama Republik Indonesia tetap dipertahankan. Sedangkan hal yang berhubungan dengan kedaulatan di tangan rakyat, batas negara dan kewarganegaraan juga selanjutnya diatur dalam perundang-undangan.[144]

PM Halim dan PM Hatta melakukan pertemuan tidak resmi untuk membahas penyusunan UUD Negara Kesatuan, sehingga proses penyusunan tidak mendapatkan hambatan yang berarti jika dibandingkan dengan proses pengesahan yang banyak menghadapi perlawanan dari kubu oposisi.[145] Pengesahan UUDS Negara Kesatuan mendapat tentangan dari partai-partai kiri seperti PKI, Murba, Partai Buruh, dan partai kiri lainnya.[146] Faksi nasionalis kiri merasa bahwa kekuasaan pemerintah telah dimonopoli oleh kalangan sosialis kanan dari partai Masyumi dan PSI. Mereka menempatkan dirinya sebagai oposisi pemerintah dan sehingga menolak banyak kebijakan yang diambil oleh Hatta.

Namun demikian, Undang-undang Dasar Sementara Negara Kesatuan diselesaikan pada 20 Juli 1950. Undang-undang tersebut telah mencapai kesepakatan dengan melalui proses perundingan pada 14 Agustus 1950. Sehari setelah kesepakatan tersebut, pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan terakhir antara RI dan RIS sekaligus membicarakan tentang piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari yang sama, Presiden Sukarno mengesahkan Undang-undang tersebut menjadi UUD Sementara RI.[147] Setelah rancangan undang-undang dasar sementara disetujui dan disahkan oleh DPRS dan Senat serta Badan Pekerja KNIP, pada tanggal 15 Agustus 1950 Sukarno memproklamirkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari seluruh wilayah kesatuan Indonesia. pada tanggal yang sama, Presiden menuju Yogyakarta untuk membubarkan negara Republik.[148]

Setelah UUD Sementara Negara Kesatuan diterima, Hatta menyerahkan mandatnya pada presiden, maka sejak saat itulah kabinet RIS demisioner. Sementara itu, kabinet Halim di Yogyakarta juga menyerahkan mandatnya pada Presiden dan *Acting President*, Mr.Assaat. Kabinet Halim telah mencapai tujuan utama dari pemerintahan; yaitu pembentukkan negara kesatuan. Dalam hal ini, pemerintahan Halim dapat dianggap merupakan salah satu pemerintahan parlementer periode ini yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah dicanangkannya. Assaat menyatakan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan anggota BP KNIP dan DPA dari Republik Indonesia Yogyakarta akan masuk menjadi anggota DPR sementara negara kesatuan. Meskipun demikian, kedua kabinet tersebut terus melanjutkan tugasnya sampai dengan terbentuknya kabinet baru pada 6 September 1950 dengan Perdana Menteri Mohammad Natsir dari Masyumi.[149]

Halim tidak ingin melibatkan diri dalam pemerintahan baru. Ia bahkan sudah berencana pergi keluar negeri untuk plesiran setelah

menjalankan tugas berat sebagai Perdana Menteri. Namun, ketika pembentukan kabinet negara kesatuan, Halim diminta menjabat Menteri Pertahanan oleh Natsir.[150] Salah satu alasan mengapa Halim menyetujui mengambil posisi sebagai Perdana Menteri adalah karena hubungan baiknya dengan Sultan Hamengkubuwono IX, yang merupakan Menteri Pertahanan sebelumnya dibawah Kabinet RIS Mohammad Hatta. Hubungan persahabatan Halim dengan Sultanlah yang menyebabkannya menyetujui mengambil beban tugas ini. Hal yang sama ketika Sjahrir meyakinkannya untuk mengambil posisi dalam BP KNIP pada tahun 1945. Hubungan Halim dengan Sultan Hamengkubuwono ini sangat dekat. Ia berkenalan dengan Sultan pertama kalinya ketika dalam perjalanan kereta dari Yogyakarta ke Jakarta pada waktu revolusi kemerdekaan. Halim terpesona dengan Sultan ketika mereka berdua membeli minuman yang dijual pedagang di salah satu stasiun pemberhentian. Sultan tampak seorang yang merakyat dan tidak peduli dengan status ningratnya. Halim merupakan orang yang akan setia mengikuti seorang karena sifat dan nilai pribadi yang mulia. Seperti Sjahrir, Sultan dianggapnya memiliki karakter yang istimewa. Kedekatan Halim dengan Sultan ini akan dilanjutkan dalam kapasitas sebagai anggota panitia olah raga pada tahun 1950an. Keterikatan pribadi ini yang akan mendorongnya untuk ikut dalam avontur terakhir dalam karir politiknya dalam pemerintahan republik, yaitu sebagai Menteri Pertahanan. Dalam satu-satunya wawancara mendalam kesaksian Halim sebagai tokoh sejarah Indonesia oleh J.R. Chaniago, jelas sekali bahwa Halim menganggap dirinya terkecoh masuk ke dalam urusan perpolitikan bangsa. Ia menginginkan kembali ke kehidupan normalnya di dalam bangsal rumah sakit dan lapangan sepak-bola.

Pemerintah membentuk *Panitya penyelenggara upatjara pembentukan negara kesatuan dan upaya proklamasi kemerdekaan khusus untuk Djakarta*'. Panitia tersebut bertugas untuk mengurus perayaan 5 tahun kemerdekaan RI sekaligus perayaan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panitia tersebut terdiri dari beberapa pejabat pemerintah Jakarta, pejabat kementerian dan juga aparat militer (mantan gubernur militer).[151] Pada 17 Agustus 1950, Mr. Putuhena selaku Perdana Menteri Negara Indonesia Timur dan seluruh jajaran kabinet beserta Badan Perwakilan Rakyat Negara Indonesia Timur meletakkan jabatannya. Pada hari yang sama, Presiden Sukarno melantik anggota DPR NKRI dan menyampaikan pidato setelah penyerahan kedaulatan sekaligus mengumumkan pembentukan NKRI.[152] Penyatuan kembali negara-negara bagian ke dalam Republik merupakan wujud dari perjuangan nasionalisme. Di samping itu, pembentukan Republik baru merupakan kehendak dari masyarakat untuk menghilangkan warisan kolonialisme Belanda. Penghapusan negara Federal merupakan kemenangan bagi Proklamasi Agustus 1945 dan pembentukan negara Republik Indonesia.[153]

KARIR ABDUL HALIM PASCA PERDANA MENTERI

Pengangkatan Halim dalam Kabinet Mohammad Natsir sebagai Menteri Pertahanan merupakan sebuah keputusan yang riskan. Sebagai seorang pejabat non-partai yang netral, diharapkan Halim dalam diterima oleh semua pihak. Walau begitu, banyak pihak yang menganggapnya sebagai wakil Sjahrir dalam pemerintahan. Bahkan terdapat suara yang mengkritik bahwa seharusnya Sjahrir sekalian yang dijadikan menteri dan bukan 'anak buahnya'. Tuduhan ini ditolak oleh Halim. Posisi Menteri Pertahanan merupakan posisi politik yang penuh luka-liku. TNI cenderung curiga terhadap motivasi politisi sipil dan merasa mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Perdana Menteri Mohammad Hatta mendapatkan banyak tentangan dari militer ketika melakukan reorganisasi dan rasionalisasi (re dan ra). Kenyataan bahwa tentangan terhadap Re dan Ra tidak menjatuhkan pemerintahannya hampir sepenuhnya diakibatkan karena rasa hormat kalangan militer terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Rasa hormat ini tidak dimiliki oleh Halim.

Butir kelima dari program pemerintahan Natsir menyebutkan kebutuhan penyempurnaan militer, khususnya berkaitan dengan proses peleburan anggota KNIL ke dalam TNI. Pada tanggal 11 September 1950, Halim mendapatkan mandatnya dalam sebuah upacara penyerahan mandat oleh Letnan Kolonel Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Kementerian Pertahanan. Sri Sultan mengatakan kepercayaan sepenuhnya kepada Abdul Halim dalam melakukan stabilisasi dan konsolidasi dari TNI. Serta menyehatkan kembali kondisi pertahanan negara.

Pengangkatan dr. Halim telah menimbulkan banyak suara pedas di pers karena dianggap pemaksaan dari TNI terhadap kemerdekaan kabinet Perdana Menteri. Harian Merdeka mempublikasi artikel yang ditulis oleh BM Diah bahwa pengangkatan dr. Halim mirip dengan cara kerja fasisme Jepang dimana kabinet tidak bisa dibentuk tanpa partisipasi orang militer. Mereka menyebutkan bahaya daripada posisi dr. Halim sebagai anggota TNI karena ini satu langkah lagi ketika TNI yang menentukan siapa kementerian pertahanan.[154] Pengangkatan dr. Halim ini bersifat interim, dan bertujuan untuk mengisi jabatan semasa Natsir mencari Menteri yang lebih dapat diterima oleh TNI.[155] Pilihan dr. Halim dipengaruhi oleh kenyataan bahwa ia merupakan orang non-partai. Di Surabaya dalam perjalanan ke Makassar, Halim mengatakan bahwa kebijakan pertahanan tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan partai.[156] Walau begitu, kabinet Natsir mendapat kepercayaan dari pimpinan TNI karena pengangkatan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil. TNI dan Sultan telah menjalin hubungan yang lama dan sehingga punya kepercayaan satu-sama lain, khususnya ketika Sultan menjabat sebagai menteri pertahanan.[157] Sebagai wakil menteri pertahanan, tugas utama Sultan adalah mengadakan koordinasi dengan aparatus militer, polisi, imigrasi dan lain-lain untuk menjaga keamanan dalam negeri.

Pada awal bulan September, Halim melakukan perjalanan orientasi untuk berkenalan dan mengetahui mengenai keluhan dan permasalahan TNI di beragam wilayah di Indonesia. Dia pertama mengunjungi Makassar bersama Menteri Sosial F.S. Harjadi dan bertemu dengan Pemimpin Militer untuk Indonesia Timur, Kolonel Alex Kawilarang. Pertemuan tersebut membahas permasalahan

pemberontakan di Sulawesi.[158] dr. Halim berharap dapat mengunjungi semua komandan Divisi Indonesia sebagai bagian dari usahanya mendapatkan kepercayaan dari TNI.[159] Hanya sebulan menjelang posisinya dalam kabinet, Halim mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak bisa menghadiri pertemuan-pertemuan kabinet karena sakit. Pada tanggal 19 Desember, dr. Halim meminta pengunduran diri dari Kabinet dengan alasan sakit yang berkelanjutan.[160] Perdana Menteri Natsir mengambil kembali kursi Kementerian Pertahanan dari dr. Halim pada tanggal 23 Desember 1950. Secara teknis, Abdul Halim menjadi Menteri Pertahanan selama sekitar 2.5 bulan. Penganuliran posisi Halim ditakutkan menyebabkan terjadinya perpecahan kabinet karena adanya rumor bahwa Menteri Dalam Negeri Assaat dan Menteri Transportasi Djuanda juga mengajukan pengunduran diri.[161] Pernyataan Dr. Jusuf Wibisono bahwa Halim akan digantikan oleh orang dari partai Masyumi cukup kontroversial. Rumor mengalir bahwa Abdul Hakim dari Masyumi akan diangkat. TNI menolak pengangkatan Dr. Abdul Hakim sebagai Menteri Pertahanan dan mendorong Abdul Halim karena posisi non-partainya.[162] Bagaimanapun, Kabinet Natsir memiliki oposisi yang kuat dari PNI dan PKI di Parlemen. Mundurnya Abdul Halim dapat dilihat sebagai awal dari ambruknya otoritasnya yang pada bulan Maret 1951 dipaksa mengembalikan mandatnya kepada Sukarno. Pada akhirnya, Natsir telah membuat hampir semua elemen bangsa sebagai musuh, baik dari TNI sampai Sukarno yang kecewa dengan penanganannya soal pidato Presiden soal penghapusan Uni Indonesia Belanda akibat Irian Barat yang berlarut-larut.

Setelah pengunduran diri dari Kabinet, Halim kembali ke kehidupan sipil. Sebagai orang non-partai yang tidak memiliki posisi ideologi yang kuat, Halim tidak akan pernah lagi memiliki posisi dalam kehidupan politik Indonesia. Tetapi ia tetap menjalani kehidupan dalam dua bidang yang dari semenjak zaman kolonial sudah diterjuni. Yang pertama adalah karir dia sebagai dokter medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Ini adalah rumah sakit tempat dia bekerja waktu dibawah penjajahan Belanda ketika masih bernama Centrale Burgerlijk Ziekenhuis (CBZ). dr. Halim diangkat sebagai direktur RSCM antara tahun 1951 sampai dengan 1961. Ia lalu menjabat sebagai penasehat dibagian THT dan Inspektur Jenderal RSCM antara tahun 1965-1987. dr. Halim ikut mengajar di Universitas Indonesia dan dinobatkan sebagai salah satu dari 3 tokoh Salemba 6 atau FKUI dengan nilai juang yang pantas diteladani. Abdul Halim memiliki karir yang jauh lebih panjang dan lebih sukses sebagai dokter di RSCM dibandingkan dengan posisi singkatnya dalam Kementerian sebagai Perdana Menteri ataupun Menteri, ataupun dalam Parlemen sebagai anggota dari BP KNIP.

Selain karirnya sebagai dokter THT yang cemerlang dan lama, Abdul Halim punya satu sumbangsih besar lainnya dalam sejarah perkembangan Indonesia, yaitu di dunia olah raga. Seperti karirnya dalam bidang kesehatan, ini adalah sesuatu yang dimulai semenjak periode mudanya sebagai pelajar di Hindia Belanda. Semenjak tahun 1951, dr. Halim menjabat sebagai Wakil Ketua dan kemudian menjadi Ketua dari Komite Olimpiade Indonesia sampai tahun 1955. Ia juga diangkat menjadi Ketua Ikada Foundation yang bertujuan membangun Stadion Ikada sebagai stadion nasional. Pada tanggal 18 Juli 1951, dr. Halim mencangkul pertama situs stadion Ikada di Alun Alun Selatan Lapangan Merdeka. Stadion yang dirancang oleh Arsitek Liem Bwan Tjie itu memiliki kapasitas 30 ribu orang dan menjadi tempat diselenggarakannya Pekan Olah Raga Nasional Ketiga di Jakarta pada tahun 1953. Ini merupakan stadion nasional Indonesia sebelum diganti oleh Stadion Bung Karno pada tahun 1962. dr. Halim juga menjabat sebagai perwakilan Indonesia untuk Dewan Asian Games semenjak tahun 1951. Pada tahun 1958, dr. Halim ikut sebagai bagian dari delegasi yang dipimpin oleh Paku Alam VIII yang menghadiri Asian Games ketiga di Tokyo. Mereka diberi tugas untuk meyakinkan pertemuan Federasi Asian Games guna memilih Jakarta sebagai penyelenggara Asian Games ke IV pada tahun 1962.[163] Misi ini sukses dan Jakarta menjadi kota penyelenggara AG IV, pada waktu ekonomi Indonesia masih sangat buruk dan kondisi infrastruktur Jakarta masih terbatas.

PENUTUP

Abdul Halim meninggal pada bulan Juli 1987 pada usia ke-75 tahun. Ia merupakan seorang yang pada saat itu sudah tiga puluh tahun lebih tidak lagi terlibat dalam perpolitikan Indonesia. Tetapi karirnya sebagai seorang dokter ahli Telinga, Hidung dan Tenggorokan dan keaktifan dia dalam dunia olah-raga Indonesia menjadi karir utamanya. Di antara semua Perdana Menteri Indonesia lainnya, ia yang paling dilupakan. Sumbangsihnya dalam mendorong penyatuan kembali Republik Indonesia dari negara federal ciptaan Konferensi Meja Bundar seringkali dilupakan. Sosoknya hanya dikenang secara sayu-sayu, dalam satu atau dua patah kalimat dalam buku-buku sejarah nasional Indonesia. Seorang penyendiri yang memutuskan untuk mengambil jalan netral, ketiadaan daripada klik ataupun komunitas membuat ingatan orang tentangnya sangat cetek. Hubungannya sangat dekat dengan sosok Sutan Sjahrir, tetapi hal ini tidak pernah membuatnya untuk secara formal masuk menjadi bagian dari PSI. Halim menghormati Sjahrir, dan Sjahrir-pun demikian terhadapnya. Menurut Halim, hanya dia dan beberapa orang PSI dekat lain yang benar-benar memahami Sjahrir. “Saya akan bercerita, sebab saya terpesona oleh orang ini. Tidak ada rasa takut, *personal fear*... Saya alami sendiri pada suatu sore, selesai rapat kami berdua keluar dari sini, di P&K ini. Baru saja keluar, sudah ditodong enam orang NICA Ambon. Ya, saya angkat tangan. Tapi Sjahrir tangannya dimasukkan ke kantongcelana pendeknya. Ambon mau menusuk dia, (Sjahrir) tanya sambil ketawa ‘What time is it?’”[164] Rasa hormat Halim tidak hanya tertuju pada intelektualitas dari Sjahrir, melainkan dari rasa segannya atas prinsip dan keberaniannya yang seolah tanpa rasa takut. Disini letak sosok Abdul Halim terlihat dengan jelas: bahwa semangat dan prinsipnya didorong oleh rasa hormat terhadap keberanian. Posisi inilah yang memungkinkannya mengambil keputusan-keputusan independensi yang akan merugikannya dalam karir politiknya dimasa mendatang.

Dalam hal ini, sosok dan semangat kepemudaan dari Abdul Halim tampak sangat cocok untuk mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Melalui program utama kabinet yang dipimpinnya, Halim telah mengantarkan

bangsa ini kembali pada proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi sebuah Negara Kesatuan. Periode Revolusi ditutup oleh seorang Perdana Menteri pemuda ini menandakan akan selesainya sosok pemuda sebagai pemimpin utama. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah sosok-sosok teknokrat, administrator serta pemimpin politik massa dan umat. Dalam hal itu, tampak bahwa sosok Halim agak tidak cocok dengan zaman baru tersebut. Kemampuan intra-personal dia yang baik, kemampuannya menempatkan diri serta membaca situasi memang merupakan sesuatu yang amat penting dan dihargai pada masa revolusioner, tetapi negara baru membutuhkan kebutuhan-kebutuhan baru. Sementara itu, Halim sendiri siap untuk masuk kembali dalam kehidupan sipil dan bekerja keras mewujudkan mimpinya dalam bidang kesehatan dan olahraga nasional. Sulit untuk mengetahui apakah Halim merasa kecewa bahwa karir politiknya berakhir justeru pada saat Republik Indonesia mulai merasakan kemerdekaan. Tak dapat dipungkiri tapi bahwa Abdul Halim tidak sedikit pun menyesal menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemerdekaan pada masa revolusi Indonesia itu.

ENDNOTES

1 J.R. Chaniago. (1981). *Diantara hembusan dan benturan. Kenang-kenangan dr. Abdul Halim 1942-1950.* dalam "Penerbitan Sejarah Lisan Nomor 1". Arsip Nasional Republik Indonesia: Jakarta. hlm. 97.

2 J.R. Chaniago. (1981). *Kenang-kenangan dr. Abdul Halim 1942-1950.* h. 99.

3 J.R. Chaniago. (1981). *Kenang-kenangan dr. Abdul Halim 1942-1950.* h. 82.

4 Lihat Tim Penyusun, Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman. Jakarta: Depdikbud, 1979, hlm.47.

5 J.R. Chaniago, *Kenang-kenangan dr. Abdul Halim 1942-1950*, , hlm. 118-19

6 *Ibid*., hlm. 20; CBZ: Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting.

7 J.R. Chania*go, Op.cit*., hlm. 12

8 *Ibid*., hlm. 5 & 11

9 *Ibid*., hlm. 4

10 Hormat dengan membungkukkan badan.

11 Sakura Jepang adalah orang-orang jepang yang datang seiiring dengan arus perang pasifik.

12 Halim menjelaskan bahwa sebagian besar dari sakura yang dirawat di RSUP hanya meminta untuk hanya dilayani oleh tenaga medis perempuan. *Ibid.,* hlm. 15-16.

13 J.R. Chania*go, Op.cit*., hlm. 2-7

14 *Ibid.,* hlm. 8.

15 A.B. Lapian,dkk., *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*, Jakarta: Depdikbud RI, 1996), hlm. 9.

16 Aboe Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi: Kenangan, Pelaku, dan Saksi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992, hlm. 73; J.R. Chaniago, *Op.cit.,* hlm. 9-11.

17 J.R. Chaniago, *Op.cit.,* hlm. 23, 118. ketika menjadi mahasiswa kedokteran A.Halim tinggal di Kwitang No.14. Mahasiswa kedokteran yang tinggal di Asrama Fakultas Kedokteran Prapatan 10 dikenal mempunyai jaringan gerakan bawah yang mendapatkan pengaruh dari Sjahrir. Mahasiswa yang tinggal dalam asrama tersebut mempunyai orientasi ke Barat mengingat lembaga pendidikan ini juga merupakan warisan Belanda yang mengalami sedikit perubahan pada masa Jepang. A.B. Lapian,dkk., *Op.cit*, hlm. 9

18 J.R. Chaniago, *Op.cit.,* hlm. 14

19 *Ibid.,* hlm. 12-3.

20 Aboe Bakar Loebis, *Op.cit*., hlm. 89-90; J.R. Chania*go, Op.cit*., hlm. 13&19.

21 J.R. Chania*go, Op.cit*., hlm. 21-3; Nani Mulyani, dkk., *Op.cit*., hlm. 11.

22 A.G. Pringgodigdo, *Perubahan Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlementer*, Yogyakarta: Jajasan Fonds Universitit negeri Gadjah Mada, t.t), hlm. 25.

23 Pemuda menteng 31 seperti Adam Malik, Chairul Saleh, Sukarni dan anggota lainnya. Lihat A.M. Hanafi, Menteng 31: Markas Pemuda Revolusioner Angakatan 45, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996), hlm. 15 ; Nani Mulyani, dkk., *Op.cit.*, hlm. 10.

24 A.G. Pringgodigdo, *Op.cit.,* hlm.24

25 A.G. Pringgodigdo, *Op.cit.,* hlm. 27-30

26 *Ibid.,* hlm. 33

27 *Ibid.,* hlm. 36

28 J.R. Chania*go, Op.cit.*, hlm. 24-27, 33-5

29 J.R. Chania*go, Op.cit.*, hlm. 28-9

30 Nani Mulyani, dkk., *Op.cit.,* hlm.72-83.

31 J.R. Chania*go, Op.cit.*, hlm. 28-9

32 *Ibid.,* hlm.39

33 J.R. Chania*go, Op.cit.*, hlm. 46

34 Robert Cribb, "Opium and the Indonesian Revolution." *Modern Asian Studies.* Vol 22, no. 4, 1988, p. 713.

35 J.R. Chaniago, *op.cit.,* hlm. 81-86.

36 Sebelum secara intens melakukan pertemuan secara langsung, komunikasi antara A.Halim dan Sri Sultan sebelumnya hanya melalui kurir-kurir yang mereka kirimkan untuk saling bertukar informasi, Lihat Ibid., 81-6. Keterangan lain terkait dengan kegiatan bertukar informasi melalui kurir dapat dilihat pada Atmakusumah, *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX,* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 77

37 J.R. Chaniago, *op.cit.,* hlm. 87-90, 119. Pasca serangan umum 1 maret 1949, Sri Sultan dilarang untuk menerima tamu dari luar keraton. namun Halim mendapatkan undangan dari Sri Sultan untuk datang ke Kraton seperti sediakala tanpa mengindahkan instruksi dari Jenderal Meyer. Atmakusumah, *Op.cit*., hlm. 202.

38 Nani Mulyani, dkk., *Op.cit.* 204 & 218; J.R. Chaniago, *Op.cit.,* hlm. 91-5; Mestika Zed, *Pemerintah Darurrat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang terlupakan*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 284-85.

39 J.R. Chaniago, *Op.cit.,* hlm. 41-4

40 J.R. Chaniago, *Op.cit.,* hlm. 55-6, 67

41 Forum Komunikasi Alumni GMNI Jawa Timur, *80 tahun Dr .H. Roeslan Abdulgani: 24 November 1994*, Surabaya: Forkom Alumni GMNI Jawa Timur, 1994), hlm. 109-11.

42 J.R. Chaniago, *Op.cit.,* hlm. 67-70

43 *Ibid.,* hlm. 72-6

44 J.R. Chaniago, *Op.cit.,* hlm. 72-7

45 *Ibid.,* hlm 77-80; Nani Mulyani, dkk., *Op.cit*., hlm. 185.

46 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi, 2010, hlm.488-90. Lebih lanjut dapat dilihat pada Mona

Lohanda, dkk., *Sejarah Peralihan pemerintah RIS ke RI: Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia,* Jakarta: Depdikbud, 1986, hlm.73; Nani Mulyani, dkk., *Op.cit*., hlm. 186.

47 Beberapa Tjajatan Detik dan peristiwa, hlm. 76.

48 J.R. Chaniago, *Op.cit.,* hlm. 96; Moh. Tholchah Mansyur, *Pembahasan beberapa Aspek tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*. Yogyakarta: Radya Indria, 1969, hlm. 38.

49 Nieuwe Courant, 7 September 1950. "WIe zijn Indonesia's nieuwe Ministers?"

50 Farabi Fakih, "Keraton dan Rakyat: Kejasama Menuju Kemerdekaan Indonesia", dalam *Gelora di Tanah Raja: Yogyakarta pada masa Revolusi 1945-1950*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY, 2017. hlm. 42-4

51 Anonim, t.t., Kembali kepangkuan Republik Indonesia: Menjongsong Terbentuknja Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950, (Djawa Tengah: Djawatan Penerangan), hlm.58-9; Bibit Suprapto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indoensia*. Jakarta: Ghalila Indoensia, 1985, hlm. 116-20.

52 Kedaulatan Rakyat, 6 Januari 1950 "Dugaan tentang susunan Kabinet: Baru Positip sehabis 10 Djan. Saptu hatta Mungkin datang"

53 Kedaulatan Rakyat, 7 Januari 1950, "Adam Malik dicalonkan menteri penerangan"; Kedaulatan Rakyat, 9 Januari 1950, "Pembentukan Kabinet masih hanget ".; J.R. Chaniago, *Op.cit.,* hlm. 97-8).

54 Anonim, t.t., Kembali kepangkuan Republik Indonesia: Menjongsong Terbentuknja Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950, Djawa Tengah: Djawatan Penerangan, hlm.58-9; Bibit Suprapto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indoensia*, Jakarta: Ghalila Indoensia, 1985, hlm. 116-20. Sebelumnya, Assaat pernah menjadi ketua KNIP, Lihat Aboe Bakar Loebis, *Op.cit*., hlm. 85.

55 Bibit Suprapto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indoensia*. Jakarta: Ghalila Indoenesia, 1985, hlm. 120. Lihat Beberapa Tjatatan Detik dan Peristiwa, hlm. 79-80.

56 *Kedaulatan Rakyat*, 20 Januari 1950. "Djiwa program kabinet: Pertahankan Republik sebagai Pelopor! Tapi hingga kini belum diumumkan".

57 *Kedaulatan Rakyat*, 19 Januari 1950. "Sjahrir dan Monomutu: Tetang Kabinet RI baru".

58 J.R. Chaniago, *Op.cit*., hlm. 45-57, 97.

59 *Kedaulatan Rakyat*, 20 Januari 1950. "Djiwa program kabinet: Pertahankan Republik sebagai Pelopor! Tapi hingga kini belum diumumkan".

60 *Kedaulatan Rakyat*, 22 Januari 1950. "PNI dan Kabinet Baru".

61 Natsir dikenal sebagai penggagas ide "penggabungan negara-negara bagian yang dilakukan secara integraal atas program (kerja) tertentu". Mosi yang diusulkan oleh Natsir tersebut tidak pernah dibicarakan dalam parlemen. mosi natsir ini baru dibicarakan ketika sidang pleno gabunagan antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan yang dicantumkan dalam piagam persetujuan pada Mei 1950. Subakir, *Skets Parlementer*,. Djakarta: Pena, 1950, hlm. 43-4.

62 *Ibid*., hlm. 96-9

63 Anonim, t.t., *Kembali kepangkuan Republik Indonesia: Menjongsong Terbentuknja Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950*. Djawa Tengah: Djawatan Penerangan), hlm. 58-9; Bibit Suprapto, *Op.cit*., hlm. 120-21.

64 *Kedaulatan Rakyat*, 17 Januari 1950. "Mangunsarkoro: Dalam 5th leerplicht harus bawa hasil".

65 *Kedaulatan Rakyat*, 17 Maret 1950, "30.000 peladjar pedjoangan didemobilisasi)

66 *Kedaulatan Rakyat*, 18 Februari 1950. "Usul Reshuffle berarti mosi tida pertjaja- kata Halim".

67 *Ibid*., hlm. 101-02. Prawoto Mangkusasmito adalah ketua Badan Pekerja yang menggantikan Mr. Assaat yang menjadi presiden Negara Bagian RI. Prawoto memimpin sidang Badan Pekerja ketika Perdana Menteri Halim melakukan pembelaan politik kabinetnya pada Februari 1950. Pada saat itu pembelaan terhadap PM Halim hanya datang dari Partai Sosialis Indonesia, anggota lainnya hanya melontarkan kritik terkait kebijakan dalam memperjuangakn negara kesatuan, usaha-usaha ekonomi, sosial yang berhubungan dengan perburuhan, dan keuangan negara. Logisnya, para anggota Badan Pekerja akan kehilangan banyak hal ketika kabinet PM Halim harus berhenti dalam kondisi negara yang kritis. Bagaimanapun juga RIS terbentuk dari sendi Republik Indonesia. Prawoto sebagai pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan pada peserta sidang untuk menjawab atau memberikan sanggahan terhadap pertanggungjawaban PM Halim. Jeda waktu yang diberikan untuk sidang pada hari berikutnya tentu saja membuat para anggota Badan Pekerja berfikir dua kali untuk menggulingkan kabinet Halim apabila hanya membawa bahaya bagi negara. Subakir, *Skets Parlementer*, Djakarta: Pena, 1950), hlm. 71, 73-4.

68 *Kedaulatan Rakyat*, 20 Maret 1950. Lihat Bambang Purwanto, Krisis di Awal Kebangkitan: Pengguntingan Uang Pada Masa RIS, 1950, dalam "Seminar Sejarah Nasional IV: Subtema II Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia". Yogyakarta, 1985.

69 A.B. Lapian,dkk.,*Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*. Jakarta: Depdikbud RI, 1996, hlm. 234-35.

70 *Kedaulatan Rakyat*, 22 Maret 1950.

71 J.R. Chaniago, *Op.cit*., hlm. 109-111.

72 A.B. Lapian,dkk., *Op.cit*., hlm. 192.

73 Lembaran Negara Nr.3, 1950, hlm. 3-6

74 Piagam persetujuan konstitusi RIS yang ditanda-tangani pada tanggal 29 Januari 1949. Penandatanganan piagam tersebut dilakukan oleh perwakilan RI (Drs. Mohammad Hatta) dan 15 negara bagian lainnya yang mengakui RIS secara de jure. Lihat Nadi Djaja dan M. Rusjad Nurdin, 1950, *Almanak Indonesia 1950/1369*,Bandung: Pustaka, 1950), hlm. 65-7. Lihat Lembaran Negara No.1 Tahun 1950 tentang pemberlakuan UU Federal dan Peraturan Pemerintah, termasuk pasal 143 dan 139 yang menggantikan Undang-Undang darurat sebelumnya.

75 Moh. Tholchah Mansyur, *Op.cit*., hlm.44

76 J.R. Chaniago, *Op.cit*., hlm. 109.

77 *Kedaulatan Rakyat*, 17 Januari 1950.

78 J.R. Chaniago, *Op.cit*., hlm. 100

79 *Kedaulatan Rakyat*, 1 Maret 1950, "Tgl.6 panitia2 penjelidik ke Sumatra"

80 *Kedaulatan Rakyat*, 28 Maret 1950, "Republik terus Berjuang".

81 *Kedaulatan Rakyat*, 25 Maret 1950, "Rakjat Djw. Timur rindu lihat pemimpin2 Republik".

82 *Kedaulatan Rakyat*, 31 Maret 1950, "Assaat ke Djawa Tengah".

83 *Java Post* 17 April 1750, "P.M.Halim dan Rombongan di Kota Palembang".

84 *Java Post* 17 April 1750, "Rapat umum di Lapangan Hatta ".

85 *Java Post* 24 April 1750, "di Djambi tidak ada Mr. dan Dr.: Kesan-kesan Perdjalanan P.M.Halim".

86 Undang-undang dasar RIS terdapat pasal yang mengatur tentang pembentukan undang-undang darurat yaitu pasal 139, berbunyi:

1. pemerintah berhak atas kekuasaan dan tanggung djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan-pemerintahan federal jang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan negara.

2. undang-undang darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa undang-undang federal: ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal yang berikut. Lihat Nadi Djaja, *Op.cit., hlm.* 119)

87 Mona Lohanda, dkk., *Op.cit., hlm.* hlm. 55.

88 *Kedaulatan Rakjat*, 9 Januari 1950, "Banten tetap daerah RI";

89 *Kedaulatan Rakjat*, 14 Januari 1950. "Sekali Republikan tetap Republikan";

90 *Kedaulatan Rakjat*, 17 Januari 1950. "Penduduk Tjirebon hanja akui Republik".

91 *Kedaulatan Rakyat*, 6 Januari 1950, "panitia Penggabungan pada Republik untuk Djawa Tengah"; Kedaulatan Rakjat 22 Januari 1950. "Penggabungan Djawa Tenagh disetudjui DPR".

92 *Kedaulatan Rakyat* 9 Januari 1950, "Rakyat Djawa Timur tidak taat pada NDT"; KR 19 Januari 1950. "Peleburan NDT ke Republik satu Kenjataan; Kedaulatan Rakjat 20 Januari 1950. "Surat dari Soerabaia: Bubarkan Negara Djawa Timur!".

93 *Kedaulatan Rakjat* 14 Januari 1950. "Dewan Pemerintahan Kota Padang Setudju Penggabungan pada Republik"; Kedaulatan Rakjat 27/29 Januari 1950. "Komisi Persiapan Penggabungan dibentuk di Padang"

94 *Kedaulatan Rakyat*, 12 Januari 1950. "Pembubaran NDT dan Pasundan ditinjau Kab.RIS"; *Kedaulatan Rakjat*, 29 Januari 1950. "Pasundan masuk RI: mosi D.P.H Indramayu".

95 *Kedaulatan Rakyat*, 7 Januari 1950, "Modjokerto Mendahului"

96 *Kedaulatan Rakjat*, 28 Januari 1950."Menudju Kesatuan Republik Indonesia".

97 *Kedaulatan Rakjat*, 30 Januari 1950. "Banjar putuskan Masuk Republik".

98 *Kedaulatan Rakyat*, 21 Februari 1950.

99 *Kedaulatan Rakyat*, 2 Maret 1950.

100 *Kedaulatan Rakyat*, 2 Maret 1950.

101 *Kedaulatan Rakyat*, 2 Maret 1950.

102 *Kedaulatan Rakyat*, 3 Maret 1950.

103 Lihat Lembaran Negara nomor. 13, 1950. berisi tentang penyelenggaraam tugas pemerintahan daerah negara PAsundan oleh RIS karena walinegara Pasundan meletakkan jabatannya. penetapan peraturan dilakukan pada 10 Februari 1950, dan diumumkan pada 20 Februari 1950, hlm. 1-3.

104 Lihat Lembaran Negara Nr.22, 1950. berisi tentang pengajuan pemerintah negara Sumatera Selatan agar pemerintah RIS melakukan penyelengaran negara karena walinegara Sumsel telah meletakkan jabatannya. dengan demikian, pemerintah RIS menetapkan undang-undang darurat tentang penyelenggaraan tugas pemerintahan di Negara Suamtera Selatan oleh Republik Indonesia Serikat. penetapan aturan tersebut pada 17 Maret 1950, hlm. 1-3; Moh. Tholchah Mansyur, *Op.cit.,* hlm. 41

105 Recomba adalah nama pemerintahan administrasi Belanda (*Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden*). Sebelum diganti, namanya adalah NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*).

106 *Kedaulatan Rakyat*, 20 Maret 1950.

107 *Kedaulatan Rakyat*, 25 Maret 1950.

108 *Kedaulatan Rakyat*, 25 Maret 1950.

109 *Java Post* 26 April 1750.

110 *Java Post* 2 Mei 1950.

111 *Java Post* 8 Mei 1950.

112 *Java Post* 10 Mei 1950.

113 *Java Post* 16 Mei 1950.

114 *Java Post* 17 Mei 1950.

115 Mona Lohanda, *Op.cit*., hlm.57.

116 *Java Post* 19 April 1950; *Java Post* 19 April 1950.

117 *Kedaulatan Rakyat*, 25 Maret 1950.

118 *Kedaulatan Rakjat*, 11 Maret 1950.

119 *Java Post*, 27 Djuli 1950.

120 Anonim., *Kembali kepangkuan Republik Indonesia: Menjongsong Terbentuknja Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950*, (Djawa Tengah: Djawatan Penerangan, 1950), hlm. 42-4.

121 *Java Post* 19 April 1750; Kedaulatan Rakyat, 25 Maret 1950.

122 *Kedaulatan Rakyat*, 28 Maret 1950.

123 *Java Post* 28 April 1750.

124 Ricklefts, *Op.cit*., hlm. 488-490.

125 George McTurnan Kahin, *Op.cit.,* hlm. 639.

126 *Ibid.,* hlm. 640-42.

127 *Kedaulatan Rakyat*, 18 Maret 1950.

128 Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985, hlm. 765.

129 Mona Lohanda, *Op.cit*., hlm.60-1.

130 Lihat Soebagio I.N., dkk, 1979, *Wilopo 70 tahun*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 97; Ide Anak Agung Gde Agung, *Op.cit*., hlm. 766.

131 Ide Anak Agung Gde Agung, *Op.cit*., hlm. 765-66.

132 J.R. Chaniago, *Op.cit.,* hlm. 112; Java Post 31 Mei 1950, "Panitya RI mendapat Mandat Penuh".

133 *Java Post* 20 Mei 1950.

134 Penentang pembentukan negara kesatuan juga berasal dari PBI, Partai Buruh Indonesia dengan ketua fraksinya Ir.Sukirman yang kemudian keluar adri panitia bersama pembentukan negara kesatuan. baginya, Pembentukan Negara Kesatuan hanya kelanjutan dari KMB dan tidak bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat karena masih terdapat modal asing yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Lihat Subakir, *Skets Parlementer.* Djakarta: Pena, 1950, hlm. 42.

135 Mona Lohanda, *Op.cit.,* hlm.62.

136 Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985, hlm. 767-69.

137 Moh. Tholchah Mansyur, *Op.cit.,* hlm. 42-43

138 *Java Post* 19 Mei.

139 *Java Post* 2 Djuni 1950.

140 *Java Post* 5 Djuni 1950.

141 *Java Post* 5 Djuli 1950.

142 Ide Anak Agung Gde Agung, *Op.cit*., hlm. 770-71.

143 Lihat Lembaran Negara Nr.59, 1950. berisi tentang peraturan pembentukan daerah provinsi Negara Kesatuan yang terdiri dari 10 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indoensia. penetapan pembentukan peraturan tersebut pada 14 AGustus 1950, diumumkan pada 16 Agustus 1950, hlm. 1-3.

144 Ide Anak Agung Gde Agung, *Op.cit*., hlm.64

145 *Java Post* 19 Djuli 1950, "Negara Kesatuan kini Lantjar".

146 *Java Post* 29 Djuli 1950, "Partai Kiri Tetap Menghendaki Amandemen".

147 Geogre McTurnan Kahin, *Op.cit.,* hlm. 643-46. Lihat Soebagio I.N., dkk, *Wilopo 70 tahun*, (Jakarta: Gunung Agung, 1979) hlm. 97. Kahin 643-46; Bibit , *Op.*cit., hlm. 122; Mona Lohanda, *Op.cit.,* hlm. 71. Lihat Lembaran Negara Nr.56, 1950. berisi tentang keputusan perubahan konstitusi sementara RIS menjadi UUDS Republik Indonesia. undang-undang tersebut disahkan pada 15 Agustus 1950, dan diumumkan pada 15 AGustus 1950, hlm. 1-39.

148 Ide Anak Agung Gde Agung, *Op.cit*., hlm. 770-71.

149 Bibit Suprapto, *Op.cit*., hlm.123.

150 J.R.Chaniago, *Op.cit*., hlm. 112.

151 *Java Post* 13 Agustus 1950, "Panitya Negara Kesatuan".

152 Ide Anak Agung Gde Agung, *Op.cit.,* hlm. 771-73.

153 Geogre McTurnan Kahin, *Op.cit.,* hlm. 646.

154 Nieuwe Courant, 12 September 1950.

155 Nieuwe Courant, 12 September 1951.

156 Nieuwe Courant, 9 September 1951.

157 Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia. 1945-1967*, p. 105-106.

158 Java-Bode. 12 September 1950.

159 Java-Bode. 15 September 1950.

160 Nieuwe Courant. 19 Desember 1950.

161 Algemeen Dagblad, 23 Desember 1950.

162 Algemeen Handelsblad, 11 September 1950.

163 Lutan, R. (2005). Indonesia and the Asian Games: Sport, nationalism and the 'new order'. *Sport in Society*, *8*(3), h. 419.

164 J.R.Chaniago, *Op.cit*., h. 34.

MOHAMMAD NATSIR

MOHAMMAD NATSIR:

Pelopor Politik Demokrasi Islam

"Pergerakan yang sudah mulai berjalan tak dapat dihentikan, bergerak terus walaupun bertukar rupa dan caranya. Patah tumbuh, hilang berganti!"[1]

Mohammad Natsir

PEMBUKAAN

Mohammad Natsir adalah orang yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia dikenal sebagai seorang intelektual Muslim dengan iman yang kuat dan pandangan politik yang konservatif, baik pada masa sebelum kemerdekaan maupun pada periode Orde Baru. Ia merupakan model dan pelopor dari politikus bergaris Islam modernis konservatif yang teguh pada perjuangan demokratis, seorang yang telah menjadi model spiritual dan pribadi dari beragam politisi aliran Islam modernis, sampai pada masa kini. Natsir dekat dan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan Islam modernis konservatif macam Ahmad Hassan dari Persis. Ide-idenya mengenai masyarakat, demokrasi, pengetahuan dan logika, negara dan masyarakat itu dibinanya pada periode intelektualnya pada tahun 1930an. Kepercayaan itu tetap dipegangnya dengan kuat pada periode akhir hidupnya, khususnya pada tahun 1970an di-zaman Orde Baru dimana Natsir kembali menunjukkan sumbangsihnya terhadap wacana konservatisme Islam di Indonesia.

Di sisi yang lain, ia juga dikenal sebagai seorang sosok yang percaya kuat dengan demokrasi, yang menjunjung pemahaman Indonesia sebagai negara yang plural dan beragam, dan membina persahabatan dan kepercayaan yang kuat dengan 'rival' utama Masyumi, yaitu kaum nasionalis dalam PNI serta pemimpin spiritualnya, Presiden Sukarno, menjadi sahabat karib dan rekan kerjanya sepanjang periode Revolusi. Pada periode ketika ia menjabat sebagai Menteri dan Perdana Menteri, ia menemukan banyak persamaan dengan kaum nasionalis serta simpatis terhadap pandangan kaum minoritas, termasuk dari golongan Kristen dan Katolik yang telah lama dilihatnya dengan penuh curiga. Pada periode polemik nilai-nilai kebangsaan di tahun 1930an, Natsir muncul sebagai salah satu kritikus utama Sukarno serta kaum nasionalis kiri lainnya. Ia kecewa dengan apa yang ia anggap sebagai serangan terhadap nilai-nilai Islam dalam cara pandang modern kaum nasionalis kiri, yang menurutnya mereduksi logika sehingga mengancam aturan-aturan agama Islam itu sendiri.[2]

Tetapi ketika ia diangkat menjadi Menteri Komunikasi oleh Perdana Menteri Pertama Indonesia, Sutan Sjahrir, Sukarno-lah yang mendukung pengangkatannya dan mengatakan bahwa ia-lah sosok yang tepat untuk pekerjaan itu. Sukarno berkata dalam Bahasa Belanda: "Hij is de man!" Menurut Mohammad Hatta, Natsir diperlakukan oleh Sukarno bagai anak emas Republik. Bung Karno menolak menandatangani segala pernyataan pemerintah jika belum disetujui oleh Mohammad Natsir. Hal ini menunjukkan sebuah hubungan yang penuh kepercayaan dan saling tergantung antar dua sosok yang dalam spektrum politik Indonesia berada di-ujung tersebut. Sebagai seorang Perdana Menteri, ia dapat dianggap telah gagal mencapai tujuan-tujuan utama politiknya. Bukan hanya kehilangan posisi Perdana Menteri, posisinya juga menyebabkan terpecahnya Masyumi dan menyebabkan ambruknya posisi Islam politik sebagai sebuah kesatuan kuat yang mendominasi dalam politik Indonesia pasca-merdeka. Pecahnya kongsi Natsir-Sukarno sudah terjadi semenjak awal tahun 1950an, ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri, tetapi terwujud dengan sangat nyata ketika ia beserta hampir semua pimpinan Masyumi dan PSI, termasuk diantaranya, Sumitro Djojohadikusumo dan Syafruddin Prawiranegara, meninggalkan Jakarta dan mendirikan PRRI, sebuah pemberontakan melawan Sukarno dan Jakarta, sebagai tindakan putus asa atas ambruknya kekuasaan Islam politik lewat jalur demokrasi.

Pada periode 1970an, Natsir tua muncul sebagai sosok konservatif yang menolak liberalisme serta berteriak mengenai bahaya daripada Kristenisasi lewat bantuan LSM gereja. Walaupun Masyumi tidak berhasil dihidupkan kembali dalam suasana represif Orde Baru, ia berubah menjadi sosok ulama intelektual yang, mirip dengan posisinya pada periode tahun 1930an, melakukan perjuangan lewat khotbah dan artikel yang bertujuan mempengaruhi nilai masyarakat lewat wacana. Suara dan pandangan keras Natsir tua ini-lah yang menggema sampai sekarang ketika Natsir dielu-elukan banyak politisi Muslim konservatif sebagai sosok spiritual mereka. Tetapi penting untuk tidak dilupakan bahwa Natsir juga merupakan seorang yang punya jiwa kompromistis yang kuat, yang menempatkan kepentingan nasional diatas segala kepentingan golongan serta yang bersedia untuk membuka tangan lebar kepada beragam sosok yang seharusnya dilihat sebagai 'musuh' pada puncak karirnya sebagai politisi nasional. Kekayaan dan keberagaman sisi dari Mohammad Natsir harus bisa dilihat dengan penuh hormat.

Ada empat periode yang menjadi penentu dari pandangan dan perkembangan nilai sosok Mohammad Natsir.[3] Periode awal adalah masa kecilnya, khususnya masa ketika ia mengalami pendidikan HIS, MULO serta HBS. Periode ini menancangkan kepercayaan Natsir sebagai seorang nasionalis sejati. Ketika ia menjalankan pendidikan tingkat SMA di Bandung dalam salah satu HBS terkemuka di Hindia Belanda, ia berkenalan pula dengan beragam sosok di Jong Islamieten Bond (JIB) serta kaum nasionalis lain seperti Tjokroaminoto, Haji Agus Salim

serta Ahmad Hassan yang mempengaruhi pandangan Islam politisnya.

Periode kedua adalah periode tahun 1930an, ketika ia menjadi seorang guru dan polemis di Bandung. Pada masa ini, Natsir muncul sebagai sosok intelektual di kalangan nasionalis yang bercorak politik Islam. Natsir memanfaatkan pendidikan Barat HBS-nya yang telah memberikan pemahaman yang mendalam atas filsafat pencerahan Barat dan digunakannya untuk menyerang pandangan modernis-sekuler dari kaum nasionalis kiri. Beberapa polemik besarnya termasuk perdebatan Natsir dengan Sukarno dan Soetomo yang memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh intelektual Muslim terkemuka Indonesia.

Periode ketiga adalah periode kompromi dan demokrat Natsir. Ini adalah periode semenjak pengangkatannya sebagai Menteri Penerangan pada Kabinet Sjahrir dan kabinet-kabinet lainnya sepanjang berlanjutnya Revolusi Kemerdekaan, serta periode Demokrasi Liberal ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri dan Ketua Faksi Masyumi di Parlemen. Pada periode ini, sosok Natsir sebagai orang yang demokratis dan mau bekerja-sama muncul. Ia menunjukkan sebuah model politisi Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila bangsa.

Periode terakhir bisa disebut sebagai periode tua Natsir dan dimulai dengan pemberontakkannya terhadap Sukarno lewat PRRI-Permesta. Periode ini melihat perubahan sikapnya terhadap demokrasi yang diakibatkan karena kegagalan pencapaian tujuan-tujuan politiknya serta ambruknya otoritas partai Masyumi yang dideklarasikan sebagai organisasi terlarang oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada tahun 1958. Melakukan pemberontakan di tanah adat Minangkabaunya, Natsir mencapai titik terendah hidupnya ketika pasukan TNI melakukan serangkaian ofensif yang menyebabkan kematian Jenderal Dahlan Djambek dan mengancam hidupnya. Setelah ambruknya Demokrasi Terpimpin Sukarno, Natsir kembali masuk dalam masyarakat sipil Orde Baru, tetapi ia menemukan sebuah masyarakat sipil yang sangat berbeda dengan masyarakat sipil demokratis yang ia temui pada awal kemerdekaan. Masyumi tidak akan pernah hidup kembali sampai sekarang, dan sosok Natsir mulai berubah menjadi seorang ulama sejati dengan pandangan yang konservatif.

Siapakah Natsir? Tamar Djaja dalam kata pengantar buku Natsir mengatakan bahwa

"Walaupun badannja ketjil tipis, kurus dan lemah, tetapi didalam dadanja terkandung djiwa besar yang luar biasa. Ia jang selalu senjum dan seorang jang tidak suka mengetjilkan hati tamu jang ingin bertjakap dengan dia, walaupun dari golongan rendah mesti dilajaninja, semua ini menjebabkan namanja semakin bertambah harum dikalangan masjarakat. Ia terkemuka dikalangan tinggi dan tentu lebih terkemuka dikalangan rakjat murba. Sedjak Masjumi didalam pegangan tangannja, nampak benar kepesatan kemadjuan partai itu sehingga diseluruh Indonesia sampai kepelosok2 didirikan orang Masjumi, dan malah banjak perkumpulan2 Islam lainnja jang meleburkan diri mendjadi Masjumi. Seorang kuat Masjumi jang dapat kepertjajaan dari lawan politiknja djuga, dan ternjata seorang kuat Indonesia jang berbadan lemah".[4]

Ketika George McTurner Kahin, ahli Indonesia tersohor dari Cornell University, bertemu dengannya pada tahun 1947 di Yogyakarta dalam periode penelitian S3-nya dalam bidang ilmu politik di Universitas Yale, ia terkejut betapa sederhananya pakaian dari sosok Menteri Penerangan Indonesia itu. Saking sederhana pakaiannya, staf di kementeriannya bahkan menyumbangkan duit untuk membelikan pakaian yang lebih representatif untuknya.[5]

Orang yang bersahaja dan tidak suka pamer, Natsir merupakan sosok intelektuil organik. Berbeda dengan Sukarno yang *dandy* dan flamboyan, ataupun Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir yang dipengaruhi oleh sosok intelektuil Barat dan mencontoh fesyen dan perilaku sesuai dengan ide idealis intelektuil Barat itu, Natsir menolak Barat secara kategorikal. Ia menolak asumsi Barat bahwa fondasi akal dan ilmu itu berasal dari peradabannya ataupun dari agama Kristen. Sementara itu, ia menemukan fondasi itu dalam Islam. Berbeda dengan Mohammad Hatta yang merupakan seorang Muslim taat tetapi sangat kagum akan Demokrasi Parlementer Eropa, Natsir percaya bahwa jawaban atas masyarakat Indonesia tidak perlu menggunakan Eropa sebagai model. Ia percaya bahwa Agama Islam sudah memiliki model yang paling tepat Indonesia. Kahin mengaggap bahwa perbedaan antara Natsir dan Hatta dalam hal ini disebabkan karena Hatta melanjutkan sekolahnya di Universitas Leiden di Belanda dan sehingga melihat dengan mata-sendiri Demokrasi Parlementer Eropa, sementara Natsir, seperti Sukarno, tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengalami tinggal di masyarakat Eropa ketika ia menolak beasiswa universitas yang ditawarkan kepadanya ketika ia selesai masa pendidikan HBSnya.[6]

Dari tulisan-tulisannya semenjak periode tahun 1930an sampai dengan tulisan tahun 1970an dan 1980annya, tampak muncul sosok yang penuh amarah akan posisi subordinat Islam dalam masyarakat. Natsir melihat Islam dan Muslim segaris dengan masyarakat pribumi dan sehingga amarahnya terhadap kejatuhan Islam adalah kemarahan terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat. Dalam pandangannya, pergerakan melawan kolonialisme sejalan dengan naiknya Islam modernis politik di Timur Tengah dan Hindia Belanda. Tetapi walaupun dalam tulisan dan khotbahnya banyak yang berisi amarah terhadap apa yang dilihatnya sebagai ketidak-adilan, dalam sosok kesehariannya ia merupakan orang yang jauh dari hal itu. Audrey Kahin yang melakukan serangkaian wawancara pada tahun 1970an diperkenalkan kepada Mohammad Natsir oleh George Kahin, suaminya, yang memiliki hubungan persahabatan yang erat dengannya. Audrey yang pertama kali bertemu dengannya pada tahun 1967 melihatnya sebagai seorang pemimpin yang penuh integritas, sosok yang sederhana, baik hati dan penuh rasa hangat. Seorang simpatisan Republik dari Inggeris menyebutnya sebagai seorang Sumatra yang berhalus tutur dengan perilaku yang halus. Ia merupakan sosok dengan nilai-nilai yang dipegang teguh tetapi juga yang

tidak keras dan memegang teguh keadilan dengan tanpa fanatisisme berlebihan. Mungkin hal ini diakibatkan karena pemuda Inggeris ini bertemu dengannya pada periode demokratis hidupnya, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa kepercayaan kuatnya terhadap Islam politik tidak mendorongnya menjadi sosok yang vulgar, fanatis dan penuh rasa benci terhadap orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh.

Biografi ini akan menelusuri empat periode hidup dari sosok Muhammad Nastir. Selain penekanannya sebagai Perdana Menteri, biografi ini juga akan menekankan ide-ide politiknya yang sangat penting dalam memahami bukan saja posisi politiknya dalam periode Demokrasi Parlementer (1950-1957) melainkan juga dalam menjelaskan posisi politik Islam konservatif masa kini.

MASA MUDA NATSIR

Natsir dilahirkan di Alahan Panjang sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1903 dari seorang keluarga juru tulis kontrolir Maninjau bernama Mohammad Idris Sutan Saripado. Ibunya bernama Khadijah berasal dari keturunan Chaniago. Ia mempunyai tiga saudara kandung masing masing bernama Yukinan, Rubiah dan Yohanusun.[7] Keluarga Natsir sebagaimana keluarga Minang lainnya taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Ayahnya sebagai pegawai rendahan Pemerintah Belanda sering pindah lokasi dinas. Hal tersebut mempengaruhi tempat belajar Natsir yang berpindah-pindah dan sering dititipkan pada sanak saudara. Ayah Natsir pernah dipindah ke Makassar pada 1918. Kemudian dipindah lagi ke Solok hingga pindah lagi ke Padang. Natsir sendiri tumbuh besar di Alahan Panjang, tinggal di rumah saudagar kopi sahabat ayahnya yang memberikan pinjaman rumah. Saudagar perkebunan kaya raya bernama Sutan Rajo Ameh yang meminjamkan rumah di tepian sungai. Satu rumah untuk keluarga Natsir satu lagi untuk keluarganya. Kesaksian ini disampaikan Hamdi, cucu Sutan Rajo Ameh, yang mengatakan bahwa kakeknya bersahabat baik dengan ayah Natsir.[8]

Natsir sempat mengeyam pendidikan sekolah rakyat di Maninjau sebelum akhirnya masuk ke *Hollands Inlandsch School* (HIS) Adabiah di Padang. Sekolah dasar partikelir yang didirikan H. Abdullah Ahmad meniru HIS Negeri dan diperuntukkan bagi petani, pedagang dan pegawai rendahan. Karena status ayah Natsir yang pegawai rendahan, cita-citanya masuk HIS Belanda belum tercapai.[9] Tetapi dari HIS Padang Natsir akhirnya berhasil masuk di HIS Negeri di Solok atas bantuan ayahnya. Ia tinggal bersama keluarga Haji Musa sambil belajar ilmu fikih dan bahasa arab. Selain itu, ia juga menimba ilmu di madrasah pada sore dan malam hari bersama Tuanku Mudo Amin.[10] Pada tahun 1920, Natsir berpindah ke Padang untuk tinggal bersama kakaknya, Rubiah. Di Padang ini kembali Natsir melanjutkan bersekolah di HIS Negeri sampai tuntas pada 1923. Selepas lulus HIS di Padang pada 1923, Natsir kemudian melanjutkan sekolah ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) Padang hingga selesai pada tahun 1927. Selama di MULO inilah Natsir mendapat beasiswa sebesar dua puluh rupiah per bulan dari pemerintah Belanda. Selama berada di MULO juga, Natsir belajar biola dan juga bergabung dengan pandu *Nationaal Islamiche Padvinderij* (Natipij), sebuah organisasi kepanduan di bawah *Jong Islamieten Bond* cabang Padang.[11]

Karena nilai-nilainya tergolong baik, selepas lulus dari MULO Padang, Natsir kemudian mendapat beasiswa untuk bersekolah di AMS Bandung jurusan Ilmu Sastra dan Humaniora Barat. Pada tahun 1927 Natsir kemudian berlayar ke Batavia menuju Bandung, dan untuk pertama kalinya, menjejakkan diri di Pulau Jawa. Pembelajaran Humaniora Barat ini sangat berkesan dalam jiwanya. Di AMS, ia belajar Bahasa Latin dan berkenalan dengan sosok filsafat Barat dari zaman Yunani sampai dengan periode pencerahan. Walaupun dekat dengan sosok Barat dan mendapatkan pendidikan yang sangat bagus yang membuka jendela yang lebar dan pandangan yang dalam akan filsafat Barat, Natsir sendiri tidak serta-merta hanyut dan mendukung pencerahan Barat beserta nilai-nilai liberalismenya. Bahkan sebaliknya, Natsir mulai mendapatkan pendidikan sejatinya melawan pembenaran terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat di AMS, dengan menggunakan pemahamannya terhadap filsafat dan tradisi ilmu Barat itu sendiri.[12]

Hubungan kolonialisme bagi Natsir muncul dalam hubungan guru-murid yang merupakan hubungan kekuasaan yang asimetris dan vertikal. Natsir mengingat sosok guru AMS yang tidak menyukainya dan tidak simpatis terhadap pergerakan nasionalis. Dalam kelas geografi ekonomi, Natsir memilih topik 'pengaruh perkebunan dan pabrik gula terhadap rakyat Jawa.' Pada masa ini, ia telah membina hubungan erat dengan kaum nasionalis di Bandung lewat perkumpulan Jong Islamieten Bond (JIB) ataupun lewat pembacaannya terhadap analisis-analisis kaum nasionalis yang menggunakan pendekatan Marxist untuk mengkritik kolonialisme Belanda. Natsir membaca buku dan diskusi tentang industri gula Jawa di perpustakaan dan berdiskusi dengan teman-teman nasionalisnya.[13]

Dalam pidato kelasnya, Natsir menolak anggapan bahwa industri gula telah mensejahterakan rakyat Jawa dan sebaliknya ia katakan bahwa penikmat utama industri ini adalah kaum kapitalis Barat dan para bupati yang telah meyakinkan rakyat untuk menyewakan tanah mereka dengan harga yang sangat murah. Industri gula ini telah mengubah para petani dari kaum yang miskin tapi bebas menjadi kaum pekerja pabrikan yang terikat dengan upah dan selamanya dibebani oleh hutang. Gurunya yang menganggap rendah siswa dari Padang dan menunjukkan ketidak-sukaannya terhadap kaum nasionalis ini telah mendorong Natsir untuk mencari jawaban atas ketidak-adilan sistem kolonial dan mendorongnya untuk membuka matanya terhadap analisis nasionalis yang didasari atas kritikan Marxist terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dimasa tuanya, Natsir berterima kasih atas guru itu yang menunjukkan secara mentah-mentah hubungan kolonial dalam bentuk paling pribadi.

Di masa AMS inilah Natsir muncul dengan fondasi kepercayaan nasionalisme yang kuat. Walaupun sendiri bukan seorang petani gula di Jawa, ia merasakan betapa sedihnya ditekan oleh kekuasaan luar dan pandangan rendah kaum kolonialis terhadap semua kaum pribumi. Walaupun Natsir bukan orang Jawa, dia mampu

untuk menjadikan kepedihan dan ketidak-adilan sistem perkebunan Jawa sebagai sesuatu yang melukai perasaan pribadinya. Ia mulai membangun ide kebangsaan yang didasarkan atas kesamaan nasib dijajah oleh sistem imperialisme Barat yang didasarkan atas kapitalisme. Dalam hal ini, Natsir punya kesamaan dengan hampir semua kaum nasionalis Indonesia lainnya, termasuk dengan Sukarno, Mohammad Hatta, kaum sosialis seperti Sjahrir ataupun tokok-tokoh PKI. Yaitu suatu pandangan bahwa permasalahan utama bagi masyarakat Indonesia bersumber dari penjajahan Belanda yang berbasis pada kapitalisme. Solidaritas Natsir untuk merasakan pilunya nasib penjajahan di Indonesia ini akan berkembang dan mencakup bukan hanya orang Minang dan Jawa, tetapi bahkan orang-orang Kristen dan minoritas lainnya. Posisinya sebagai murid membangun hubungan pribadi dengan kaum penjajah, dalam hal ini sosok guru di AMS Bandung. Disitu ia mampu memilih posisi nasionalis yang membuka ruang bagi Natsir untuk berdialog dengan kaum nasionalis. Disini ia perlahan menemukan bahwa persamaan sebagai kaum nasionalis, tidak serta-merta cukup. Kepercayaan ideologisnya yang kuat terhadap Islam mulai dibangun pada periode ini pula, ketika ia berhadapan dengan nasionalis sekuler yang tidak punya pandangan yang sama dengannya dalam hal politik Islam, maupun

MENJADI POLEMIS: NATSIR SEBAGAI SOSOK INTELEKTUAL

Taufik Abdullah mengatakan bahwa Natsir bukan hanya seorang pemikir, tetapi seorang polemisis karena keseluruhan tulisannya berbentuk dialog segitiga. Tiga level diskusi dia ini ada pada jenis tulisan yang dihasilkannya; yang pertama berbentuk pembelaan terhadap Islam, kedua berkaitan dengan pendidikan umat Muslim dan terakhir adalah mengenai posisi Islam dalam pembentukan negara. Menurutnya, diantara kaum nasionalis lainnya, teks-teks Natsir adalah yang paling menganjurkan praxis; "teks Natsir ada yang ditulis ada yang berbentuk tindakan."[14] Ketiga topik yang menjadi basis untuk tulisannya pada periode tahun 1930an ini juga merupakan basis perkembangan politik Islam-nya yang berpengaruh terhadap pemikiran politik Islam konservatif masa kini sekalipun. Perkenalannya terhadap Islam modernis ini terjadi lewat temannya bernama Fachroeddin Al-Kahiri, seorang teman siswa MULO-nya di Padang, yang memperkenalkannya dengan sosok Ahmad Hassan, seorang ulama reformis yang telah menetap di Bandung sejak tahun 1920an. Ahmad Hassan yang berasal dari Singapura ini membuka pandangan Natsir tentang Islam politik dan gerakan Islam modernis. Hassan tidak berbahasa Belanda, tetapi ia memiliki pemahaman tentang orientalisme Barat. Natsir yang sering mengunjungi rumahnya di Gang Belakang Pakgade terpengaruh ide-ide Hassan tentang ummat Islam, tentang pimpinan pergerakan nasional yang sering merendahkan Islam serta tentang usaha-usaha kaum Kristen untuk menyebarkan agamanya dikalangan umat Islam.[15] Pandangan-pandangan ini dipegang Natsir sepanjang hayat karir politiknya.

Ide-ide reformisme Islam yang bermuara pada pembaharuan gerakan Islam kemudian banyak disalurkan melalui jalur pendidikan. Ide-ide reformisme Islam sendiri terkait erat dengan gagasan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir. Gagasan yang sering disebut Pan-Islamisme ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah. Gagasan ini berusaha mengajak umat Islam untuk kembali memurnikan ajaran agama Islam dari praktek-praktek bid'ah yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist. Gerakan reformisme Islam ini kemudian mengalir masuk ke Indonesia melalui mukimin haji di Mekah dan para sarjana Indonesia yang menyelesaikan studi di Kairo Mesir. Terutama posisi yang paling penting adalah ulama-ulama Minangkabau dan Aceh yang banyak berperan dalam menyebarkan gagasan dari Timur Tengah hingga ke seluruh penjuru Indonesia.[16]

Gagasan reformisme Islam kemudian berkembang menjadi semangat perlawanan antikolonial ketika ulama-ulama Al-Azhar menyerukan perlunya persatuan umat Islam selepas kejatuhan Kekhalifahan Turki Usmani. Serta menjadi semakin meluas tatkala Bani Saud menguasai Arab Saudi dan berencana mengadakan Kongres Umat Islam. Ahmad Hassan sendiri adalah seorang ulama yang terpengaruh dengan gagasan-gagasan majalah Al-Manar yang diterbitkan Muhammad Abduh. Ahmad Hassan mendapat akses majalah ini sewaktu berada di Singapura. Pintu perlintasan dagang yang sangat penting di Asia Tenggara saat itu. Sehingga memudahkan akses informasi dan pertukaran gagasan.[17]

Selain Ahmad Hassan dan Persis, kondisi di Bandung sendiri juga sangat kondusif terhadap perkembangan pemikiran politiknya. Bandung saat itu yang menjadi pusat pendidikan dan pusat politik. Banyak berdirinya organisasi-organisasi pergerakan yang membuka cabang di Bandung. Organisasi-organisasi ini sering mengadakan diskusi-diskusi soal politik nasional yang membuat Natsir tertarik lebih mendalam mengenai dunia politik. Natsir tercatat bergabung dengan *Jong Islamieten Bond* (JIB) Cabang Bandung. Di JIB Cabang Bandung inilah Natsir bertemu dengan Mr. Kasman Singodimejo, Mr. Sjafrudin Pawiranegara, Prawoto Mangkusasmito, Mr. Mohammad Roem dan Agus Salim[18] yang kelak akan menjadi rekan separtai dan guru politiknya di Masyumi. Di JIB Cabang Bandung juga Natsir bertemu dengan Noer Nahar. Seorang anggota JIB putri yang kelak di kemudian hari dipersunting Natsir menjadi istrinya. Selain itu, Noer Nahar semakin dekat dengan Natsir karena diperkenalkan adik iparnya untuk membantu mengajar di sekolah yang didirikan Natsir bernama Pendidikan Islam.[19] Kelak pada tanggal 22 Oktober 1934 di Bandung, Natsir dan Noer Nahar melangsungkan pernikahan secara sederhana.

JIB sendiri merupakan organisasi baru sempalan Jong Java sebagai akibat dari keputusan organisasi tersebut untuk tidak mengakomodasi anggotanya mengadakan kursus agama Islam. Usulan untuk mengadakan kursus agama Islam ditolak kongres Jong Java. Untuk mencari jalan tengahnya, Haji Agus Salim yang saat itu hadir diundang dalam Kongres Jong Java mendirikan Jong Islamieten Bond (JIB) di Batavia pada tahun 1925. JIB kemudian berkembang pesat karena menjadi jalan tengah bagi pelajar-pelajar Muslim yang dahulunya pernah terdidik di sekolah Belanda, mempunyai wawasan keislaman yang cukup dan membutuhkan sarana organisasi yang memadai untuk menyuarakan suara mereka sendiri di panggung politik Hindia Belanda. JIB sendiri

dalam pandangan Natsir merupakan organisasi yang mengajarkan kepada anggotanya untuk belajar Islam secara kritis.[20]

Di bawah kendali Agus Salim, JIB berubah menjadi organisasi modern yang menjadi simbol antikolonial baru para pelajar di Hindia Belanda.[21] Hal ini tidak bisa dilepaskan posisi Agus Salim yang mampu menempatkan diri mendukung pergerakan nasional setelah dirinya lama berkecimpung menjadi penasehat pemerintah Belanda.[22] Karir Natsir di JIB semakin cemerlang saat diangkat sebagai Ketua JIB Cabang Bandung dari tahun 1928 hingga 1932. Posisi ketua cabang ini memudahkan Natsir banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pergerakan lintas ideologi. Misalnya ia pernah menghadiri rapat umum Partai Nasional Indonesia di Gedung Bioskop Oranje-Casino Bandung pada 17 Oktober 1929.[23] Dari sinilah Natsir kemudian mengenal gagasan kebangsaan Sukarno dan beberapa aktivis nasionalis sekuler lainnya yang berada di Partai Nasional Indonesia. Natsir juga beberapa kali mendengarkan pidato Cipto Mangunkusumo selama berada di Bandung.[24] Natsir sering mengadakan diskusi kecil secara rutin bersama Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito dan Kasman Singodimejo di Batavia. Diskusi rutin ini diadakan di rumah Agus Salim di Batavia, sehingga Natsir harus pulang pergi dari Bandung ke Batavia untuk menghadiri diskusi.[25] Proses ini meneguhkan bahwa guru-guru politik Natsir selain Ahmad Hassan adalah Agus Salim.

Setamat dari sekolah AMS di Bandung pada 1930 dengan nilai-nilai yang memuaskan. Natsir mendapat tawaran untuk melanjutkan beasiswa universitas ke sekolah tinggi hukum (*Rechts Hoogeschool*) di Batavia atau melanjutkan sekolah tinggi ekonomi (*Handels Hogeschool*) di Rotterdam Belanda. Namun tawaran itu ditolaknya. Natsir lebih memilih melanjutkan karir di dunia pendidikan dan jurnalistik dengan menjadi guru agama di beberapa MULO *Javastraat* di Bandung dan Sekolah Guru di di Gunung Sahari, Lembang. Serta menjadi jurnalis di Majalah *Pembela Islam* milik PERSIS.[26]

Natsir melanjutkan kursus diploma guru pada pertengahan tahun 1931 hingga selesai dan memperoleh ijazah *Lager Onderwijs* (LO). Hasil dari kursus diploma guru ini Natsir berhasil menyusun kurikulum Sekolah "Pendidikan Islam" yang diterapkan pada Taman Kanak-Kanak (*Frobelschool*), HIS, MULO dan Sekolah Guru (*Kweekschool*). Natsir menjadi direktur sekolah "Pendidikan Islam" sejak lulus LO sampai kemudian Pemerintah Pendudukan Jepang datang membubarkan semua sekolah partikelir termasuk sekolah Pendidikan Islam.[27] Natsir memilih mendirikan Pendidikan Islam (Pendis) sebagai salah satu jalur mengembangkan pendidikan Islam. Karena dirinya tidak puas melihat sistem pendidikan tradisional pesantren yang terlalu berfokus pada lmu agama sementara tidak terlalu responsif dengan perkembangan dunia. Selain itu Natsir juga melihat bahwa sistem pendidikan Taman Siswa terlalu berorientasi pada kebudayaan Jawa.[28]

Pada panggung jurnalistik dan politik, perseteruan Natsir dengan politisi nasionalis sekuler seperti Sukarno mengenai perdebatan Islam dan negara menemukan bentuknya saat dirinya masuk menjadi jurnalis *Pembela Islam*.[29]

Ahmad Hassan ikut memodali pendirian majalah resmi PERSIS tersebut dan mendukung tulisan-tulisan Natsir. Sementara Natsir sering menulis mengenai artikel-artikel islam dan negara dengan nama pena "is".[30] Ahmad Hassan sendiri lebih banyak menulis mengenai syariat agama dan juga kritik-kritiknya soal nasab Nabi Muhammad dan nasionalisme Arab.

Konsep berpikir Natsir sendiri mengenai islam dan negara terbentuk semenjak sebuah peristiwa di sekolah AMS Bandung pada tahun 1929. Saat itu seluruh murid-murid AMS hadir di sebuah gereja untuk mendengarkan ceramah seorang menteri Belanda beragama Kristen bernama Dr. A.C. Christoffels. Menteri Belanda tersebut menyampaikan pandangannya mengenai perbedaan pengajaran di dalam Qur'an dan juga di dalam Kristen. Sebenarnya secara umum ceramah Dr. A.C. Christoffels tidak menyerang islam. Akan tetapi pandangan-pandangannya yang membandingkan antara pendidikan di dalam Al-Qur'an dan Kristen. Seolah-olah menjadikan bahan perbandingan bahwa pendidikan islam tidak begitu bagus. Serta memberikan kesan bahwa Yesus adalah nabi yang sebenar-benarnya.[31] Natsir memandang pendapat menteri Belanda ini perlu diluruskan dan didebat.

Saat berdikusi dengan Ahmad Hassan, Natsir meminta Ahmad Hassan menulis artikel untuk meluruskan pandangan ini. Tetapi karena Ahmad Hassan tidak begitu fasih dalam berbahasa Belanda. Maka Ahmad Hassan hanya menyediakan sumber pustaka untuk Natsir menulis artikel. Artikel berjudul *Muhammad als Profeet* tersebut kemudian dimuat dalam *Preanger Bode* pada tahun yang sama ceramah Dr. A.C. Christoffels. Peristiwa ini membuka mata Natsir mengenai satu hal penting yaitu adanya kesamaan ide dengan para pejuang reformis islam (pan-islamisme) di Minangkabau mengenai pentingnya perlawanan di jalur pendidikan terhadap pendidikan Belanda yang membawa misi Kristenisasi. Pokok pertama ini menyadarkan Natsir untuk mendirikan Pendidikan Islam sebagai jalur perjuangan.

Sementara pokok hal kedua yang membuat pemikiran politiknya mengenai Islam dan negara semakin menyala-nyala saat menjadi jurnalis *Pembela Islam* dan menghadiri serangkaian pidato Sukarno. Pidato-pidato Sukarno mengenai nasionalisme dan semangat antikolonial menarik perhatian Natsir. Tetapi Natsir rupanya cukup terganggu dengan pandangan Sukarno mengenai pengajaran pokok-pokok Islam dan sumber nasionalisme Sukarno yang berbasis pada Kerajaan Hindu Majapahit.[32] Natsir mengkhawatirkan pandangan-pandangan Islam dan negara versi Sukarno. Terlebih ketika menerangkan demokrasi dan islam dalam pandangan bernegara, Sukarno terlalu berkiblat kepada konsep negara Turki dengan Mustafa Kemal Ataturk.

Penolakan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas di Belanda serta pengekuhannya untuk membangun pendidikan Islam ini merupakan perwujudan dari praxis Natsir dan menunjukkan keteguhan dari kepercayaan dan nilai-nilainya yang kuat. Natsir percaya bahwa pendidikan Barat merupakan alat yang digunakan kaum penjajah untuk memperkuat imperialisme mereka dengan cara

mempengaruhi dasar cara berfikir dan nalar siswa agar mereka mendukung sistem yang ada. Dia melihat bahwa tujuan pendidikan Barat adalah Kristenisasi dan bukan modernisasi sebenarnya. Modernisasi sebenarnya untuk orang Indonesia harus berbasis pada kepercayaan dan agamanya.

Dia ingin menawarkan basis falsafah dan nalar alternatif yang berbasis agama Islam. Natsir melihat bahwa Islam-lah yang menjadi pemersatu dari gerakan nasionalis bangsa Indonesia; dalam pandangan historiografi Natsir, semua pergerakan melawan penjajahan Belanda didorong oleh kepercayaan Islam. Tawaran modernisasi Barat, menurutnya sangat berbahaya dan sarat akan potensi Kristenisasi; sebagai contoh ia mengkritik penghormatan terhadap Kartini karena menolak feminisme Barat; "Herankah kita, kalau bagi perempuan jang telah mendapat pendidikan demikian, timbul sematjam perasaan 'berhak bersama' untuk turut memperebutkan mata pentjaharian dalam kantor2 Pemerintah dan perdagangan dengan kaum laki2." Dan bahwa "hubungan adat dan tradisi lama semakin lemah dan achirnja putus sendiri. Siapakah pula akan berkuasa atas diri mereka? Bukankah mereka hidup atas usaha dan titik peluh sendiri?!"[33] Ia menolak peran-serta perempuan dalam kehidupan berpolitik bangsa, karena memiliki kewajiban yang lebih penting sebagai ibu atau isteri.[34]

Ia menekankan pentingnya posisi ulama dalam masyarakat.

"Ulama bukanlah pemimpin jang dipilih dengan 'suara terbanjak', bukan jang diangkat oleh 'persidangan kongres'. Akan tetapi kedudukan mereka dalam hati rakjat jang mereka pimpin, djauh lebih teguh dan sutji dari pemimpin pergerakan jang berorganisasi, atau pegawai Pemerintah jang manapun djuga".[35]

Dan bahwa

"Ulama ialah warisan Nabi2, pemimpin umat jang mendapatkan pengakuan Agama. Dalam mentjapai kemadjuan rakjat umumnja 'korps' ulama jang bertebaran itu sekali2 tak boleh diabaikan, baik oleh pegawai Pemerintah, ataupun oleh pengandjur2 pergerakan kita. Mereka itu adalah satu faktor jang penting dalam kerdja pentjerdasan rakjat umumnja".[36]

Pandangan yang menempatkan ulama sebagai pemimpin masyarakat dan pemimpin politik ini merupakan suatu pandangan modernis dalam melihat negara Islam. Ini terlihat, sebagai contoh pada negara Islam Iran, dimana selain parlemen, terdapat Dewan Ulama yang memiliki posisi yang bahkan lebih tinggi daripada suara rakyat.

Pandangan Natsir terhadap demokrasi, oleh karenanya, tidak serta-merta menempatkan suara rakyat sebagai penentu tunggal. "Demokrasi bagus! Akan tetapi sistem kenegaraan Islam tidak menggantungkan semua urusan kepada kerahiman instelling2 demokrasi" dan bahwa "Islam bukan demokrasi 100%, bukan pula autokrasi atau diktatorial 100%. Islam itu… ialah Islam, jah Islam."[37] Oleh karenanya "Islam bersifat demokratis dengan arti bahwa Islam itu anti-istibdad, anti absolutisme, anti-sewenang2.

Akan tetapi ini tidak berarti bahwa dalam pemerintahan Negara Islam jang merdeka itu semua urusan diserahkan kepada musjawarat madjelis sjura. Dalam parlemen satu Negara Islam tidaklah perlu dipermusjawaratkan terlebih dulu, apakah jang harus mendjadi dasar bagi pemerintahan, dan tidaklah mesti ditunggu keridhaan parlemen terlebih dulu, apakah perlu diadakan pembasmian arak atau tidak, apakah perlu diadakan penghapusan perdjudian dan ketjabulan apa tidak, apakah perlu diadakan pemberantasan churafat dan kemusjrikan atau tidak dan sebagainja."[38] Disini terlihat bahwa bagi Natsir, hukum produk parlemen ini bukanlah yang paling tinggi karena hukum agama seharusnya mendahuluinya.

Pada tahun 1930 Natsir kemudian terjun ke dunia politik secara resmi dengan bergabung sebagai anggota Partai Sarikat Islam Cabang Bandung. Proses masuknya Natsir ke dalam PSI Cabang Bandung berkat Sabirin yang meminta Natsir untuk memperkuat PSI. PSI sendiri merupakan partai penerus Sarekat Islam yang pernah mengklaim memiliki anggota dua juta setengah di seluruh nusantara.[39] Peran Natsir di Partai Sarikat Islam Cabang Bandung tidak terlalu besar karena statusnya yang sebagai anggota. Natsir juga disibukkan membesarkan sekolah Pendidikan Islam. Hingga ketika PSI/PSII Pecah menjadi dua karena perpecahan internal. Natsir kemudian bergabung dengan kubu Sukiman Wirjosandjojo, Bagus Hadikusumo dan Agus Salim mendirikan Partai Islam Indonesia (PII). Natsir kemudian naik jabatan menjadi Ketua Partai Islam Indonesia (PII) Cabang Bandung.[40]

Natsir menduduki jabatan Ketua Partai Islam Indonesia (PII) Cabang Bandung dari 1940 hingga 1942. Ketika Pemerintah Pendudukan Jepang masuk ke Indonesia kemudian membubarkan seluruh partai politik yang ada termasuk PII, Pemerintah Pendudukan Jepang kemudian mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai sebuah federasi organisasi Islam se-Indonesia. Natsir yang masih menjadi pengurus PERSIS kemudian ikut duduk sebagai anggota di MIAI. Natsir menjadi anggota MIAI hingga kemudian pada 7 November 1945 Jepang membubarkan MIAI dan menggantinya dengan Masyumi. Di dalam Masyumi Natsir masih menduduki jabatan sebagai anggota.[41]

Peran Natsir semasa Pendudukan Jepang di bidang politik tidak terlalu terlihat. Pada masa itu, Natsir ditunjuk Pemerintah Jepang menjadi Kepala Biro Pendidikan Kota Madya Bandung (*Bandung Syiakusyo*) dari tahun 1942-1945. Penunjukan ini tidak lepas dari pengalaman Natsir sebagai Anggota Dewan Kabupaten Bandung pada 1940-1942. Serta pengalamannya dalam mendirikan Sekolah "Pendidikan Islam". Karir Natsir di dunia pendidikan pada masa Pendudukan Jepang semakin moncer saat Masyumi mengusulkan pendirian Sekolah Islam Tinggi (SIT) di Jakarta kepada Pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang menerima usul ini dan menunjuk Mohammad Hatta sebagai ketua panitia pendirian. Hatta dianggap oleh Jepang sebagai pemimpin Islam besar,[42] walaupun posisi politiknya nasionalis. Hatta kemudian menunjuk M. Zain Jambek sebagai sekretaris SIT. Tetapi Zain Jambek menolak dan merekomendasikan Natsir karena pengalamnnya di dunia pendidikan. Jadilah Natsir kemudian

menjadi Sekretaris SIT dan mengusulkan SIT diubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Islam (STI). Selama menjadi Sekretaris STI Jakarta Natsir juga masih menjabat sebagai Kepala Biro Pendidikan di Bandung. Sehingga Ia harus bolak balik kembali antara Jakarta dan Bandung. Posisi ini kembali mendekatkan Natsir dengan kondisi politik di pusat Pemerintahan Jakarta. Saat menjabat Sekretaris STI Jakarta ini Natsir biasanya ke Jakarta menumpang di rumah KH Kahar Muzakkar.[43]

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Natsir yang masih menjabat Sekretaris STI Jakarta kemudian diajak jalan-jalan KH Kahar Muzakkar dan bergabung ke dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Bergabungnnya Natsir ke dalam KNIP merupakan sebuah kebetulan karena diajak KH Kahar Muzakkar. Awalnya Natsir hanya menunggu di luar ruangan. Tetapi KH Kahar Muzakkar mendorongnya masuk dan mencatat namanya kepada petugas jaga. Natsir akhirnya bergabung menjadi KNIP dan menduduki posisi Badan Pekerja KNIP 25 November 1945. Posisi ini dijabat Natsir sampai kemudian diangkat sebagai Menteri Penerangan.[44]

NATSIR DALAM PEMERINTAHAN: PERIODE KOMPROMI DAN DEMOKRASI

Natsir ditunjuk sebagai Menteri Penerangan pada beberapa kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober 1946) dan Sjahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947) serta terakhir kali pada Kabinet Mohammad Hatta (29 Januari 1948 sampai dengan 29 Desember 1948. Penunjukan Natsir sebagai Menteri Penerangan tidak bisa dilepaskan dari kedekatan antara dirinya dengan Hatta dan juga Sjahrir sebagai sesama dari Minangkabau. Ketika Sjahrir mengusulkan Natsir sebagai Menteri Penerangan kepada Sukarno, Sukarno menjawabnya dengna positif dan mengatakan bahwa ia orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Pada bulan Januari 1946, Natsir menyusul ke Yogyakarta guna mendirikan kembali Kementerian Penerangan di Jalan Kali Code kawasan Kota Baru. Hubugan antara Natsir dengan Sukarno menjadi dekat dan baik. Sukarno seringkali mengundangnya untuk sarapan pagi di Istana. Dalam salah satu pertemuan, Sukarno mengatakan kepada Natsir: "Bung Natsir, kita kan berpolemik dulu ya? Tetapi sekarang ini jangan kita buka-buka soal itu lagi." Sementara itu jawaban Natsir adalah: "Tentu tidak. Dalam menghadapi Belanda bagaimanapula. Nanti saja."[45]

Di periode ini, Natsir berubah dari polemisis dan antagonis pendukung politik Islam menjadi bagian daripada pemerintahan duumvirat Sukarno dan Hatta. Hubungan dengan Sukarno menjadi sangat dekat dan, seperti yang telah disebut diatas, Hatta menganggap Natsir sebagai anak emas bung Karno. Mereka menempatkan perjuangan untuk kemerdekaan diatas segala perbedaan pandangan dan ideologi. Hubungan dengan bung Hatta pun sangat baik, walaupun tidak bisa dikatakan dekat. Hatta dan Natsir punya perbedaan ideologi yang kental; karena Hatta menolak penempatan Islam sebagai basis ideologi negara Indonesia, tetapi juga karena karakter kedua orang ini cukup berbeda. Hatta merupakan seorang yang serius dan tekun dalam membaca dan studi. Ia merupakan seorang intelektuil gaya Barat yang kadang terlihat sepi dan menyendiri, sementara itu Natsir berkebalikannya.

Natsir memang merupakan intelektuil yang serius dan seringkali menempatkan banyak waktu untuk membaca dan studi, tetapi ia juga menempatkan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dan ulama; yang siap sedia menerima masyarakat dari beragam lapisan. Ia mampu untuk membuat orang merasa nyaman dan diperhatikan, tak peduli apakah itu merupakan orang penting ataupun rakyat jelata. Dan sehingga membuat orang segan untuk berhadapan dengannya. Karakter ini sangat bermanfaat sebagai Menteri Penerangan. Hubungannya dengan beragam wartawan, baik asing maupun dalam negeri, menimbulkan perasaan simpatis terhadap Republik Indonesia dan menepis propaganda Belanda yang menggambarkan Republiken beserta elitnya sebagai orang-orang fanatik yang anti-demokrat dan kejam.[46]

Sentralnya peran Natsir dalam Kepresidenan Sukarno pada periode Revolusi ini terwujud dalam hal seperti penulisan pidato Kemerdekaan 17 Agustus. Natsir bekerja-sama Roeslan Abdoelgani yang menjabat sebagai Sekjen Kementerian Penerangan untuk menggodok lima sila kementerian penerangan. Natsir juga terlibat dalam berbagai perundingan Republik dengan Belanda sebagai anggota delegasi. Ketika Belanda melancarkan Serangan Agresi Militer Keduanya dan menginvasi ibukota Yogyakarta, Natsir sedang berada di rumah sakit Bethesda karena sakit. Beberapa hari sebelumnya, kabinet menyetujui tawaran Perdana Menteri Nehru dari India untuk mengundang Presiden Sukarno sebagai tamu negara kesana. Hal ini batal karena Agresi Militer Kedua Belanda. Sukarno, Hatta dan Natsir telah mempersiapkan sebuah pidato kepada rakyat untuk disiarkan tetapi hal pesan tersebut tidak jadi disiarkan karena RRI terkena bom Belanda pada pagi harinya. Pesan Natsir diselundupkan oleh Wakil Menpen A.R. Baswedan dalam bentuk stensilan dan, atas usaha Mr. Sumanang, disiarkan dalam koran terbitan Jakarta, Keng Po. Inti pesan dari Natsir adalah bahwa revolusi harus dilanjutkan dalam bentuk perjuangan rakyat; dengan cara melakukan sabotase untuk menghindari konsolidasi ekonomi dan politik Belanda serta melanjutkan perjuangan dari daerah yang belum dikuasai oleh Belanda.[47]

Pergerakan Natsir pada beberapa jabatan menteri penerangan lebih didominasi perannya dalam menjadi penghubung kabinet dengan permasalahan-permasalahan di daerah-daerah. Terutama dengan beberapa separatisme seperti Darul Islam Kartosuwiryo dan juga penyeleaian mandat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada Juli 1949 Natsir diutus Mohammad Hatta untuk menyakinkan Pemimpin PDRI Sjafrudin Prawiranegara untuk mengembalikan mandat PDRI kepada Pemerintahan Pusat. Negosiasi ini berlangsung ditengah kekecewaan PDRI terhadap Persetujuan Roem-Royen dan juga lemahnya pemerintah pusat terhadap diplomasi dengan Belanda.[48]

Peran penting Natsir sebagai Menteri Penerangan dalam menyakinkan Sjafrudin Prawiranegara tidak lepas dari posisi Mohammad Roem sebagai Pemimpin Delegasi Persetujuan Roem Royen dan kemudian dilanjutkan dalam Perundingan Komisi Meja Bundar. Keduanya adalah tokoh Masyumi yang harus diakurkan Natsir di tengah kemelut internal Masyumi yang menolak perancangan pengalihan

kekuasaan melalui Perundingan Komisi Meja Bundar. Selain persoalan diplomasi, Natsir juga menjadi utusan khusus Perdana Menteri Hatta dalam menyelesaikan persoalan Darul Islam Kartosuwiryo. Penunjukan Natsir sebagai utusan khusus ini tidak lepas dari kedekatan Natsir dan Kartosuwiryo yang dahulu sama-sama sebagai pengurus Masyumi. Hatta berharap dengan diutusnya Natsir bisa menyelesaikan persoalan Darul Islam melalui lobi-lobi politik.

Sayangnya harapan itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Natsir yang secara terus menerus berusaha mendekati tempat persembunyian Kartosuwiryo di Jawa Barat. Bahkan mengirim utusan melalui gurunya KH Ahmad Hassan juga menemui berbagai macam kendala. Rombongan Ahmad Hassan sempat ditolak bertemu Kartosuwiryo, karena Kartosuwiryo menghendaki agar yang menemuinya merupakan pejabat tinggi di kabinet Republik. Usaha Natsir untuk membujuk Kartosuwiryo membatalkan dekarasi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia juga menemui jalan buntu. Dalam sepucuk surat bujukan Natsir yang kemudian dibalas Kartosuwiryo. Kartosuwiryo menyampaikan bahwa surat Natsir terlambat dan Ia tidak mungkin menarik kembali ucapannya yang telah dideklarasikan.

Kelak ketika Natsir naik ke tampuk jabatan Perdana Menteri pada 6 September 1950. Usaha lobi-lobi politik terhadap Darul Islam terus digencarkan. Bahkan lobi-lobi ini membawa malapetaka bagi Masyumi yang dituding terlalu lembut dengan Darul Islam. Oposisi-oposisi Masyumi kemudian menuduh Masyumi berpihak kepada Darul Islam. Bahkan menuding Darul Islam merupakan bagian dari organisasi radikal ciptaan Masyumi. Natsir baru memutuskan memberikan peringatan agak keras ketika serangan terhadap Masyumi kian gencar. Melalui sebuah himbauan partai, Masyumi menyampaikan bahwa Darul Islam merupakan sebuah organisasi yang berbeda dengan Masyumi. Selain itu Masyumi juga bukan pendukung daripada gerakan Darul Islam. Setelah Kabinet Natsir lengser dan digantikan Kabinet Sukiman, Operasi militer terhadap Darul Islam kemudian dilancarkan pada Kabinet Sukiman.

Posisi Natsir sebagai Ketua Masyumi memudahkan dirinya melakukan turba (turun ke bawah) ke berbagai daerah. Guna menanggapi perubahan-perubahan signifikan dalam periode awal kemerdekaan yang penuh dengan ketidak-pastian dan bahaya. Beberapa peristiwa penting, seperti terjadinya usaha kudeta gagal yang dilakukan oleh Raymond 'Turk' Westerling yang berkonspirasi dengan Sultan Abdul Hamid II, pimpinan Negara Bagian Kalimantan Barat serta Menteri Negara non-Partai dalam Kabinet RIS Mohammad Hatta, serta terjadinya pemberontakan KNIL menolak pembentukkan negara kesatuan dan mendukung Negara Indonesia Timur didorong oleh rasa takut akan dominasi Jawa dalam pemerintahan kesatuan.

MOSI INTEGRAL

Assaat yang menjadi pemangku jabatan Presiden RI pada tanggal 4 Januari 1950 menunjuk Mr. Susanto Tirtoprodjo, Mohammad Natsir dan Dr. Abdul Halim sebagai formatur untuk membentuk Kabinet Republik Indonesi. Pada tanggal 16 Januari, Kabinet RI dibentuk dengan

Rapat serah terima Kabinet RIS kepada Kabinet Negara Kesatuan pada tanggal 7 September 1950.

Arsip Nasional Republik Indonesia

Dr. Abdul Halim sebgai Perdana Menteri. Natsir dalam parlemen RIS mengusulkan *mosi integral* untuk menjawab permasalahan ini; didalamnya diminta agar semua negara bagian federal dan Republik Indonesia menghapus masing-masing dahulu dan bersamaan masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[49] Pada 4 Januari DPR Malang mengajukan mosi untuk melepaskan diri dari Negara Jawa Timur dan bergabung dengan Republik, pada 30 Januari disusul dengan Sukabumi, 22 April dengan Jakarta Raya serta Pemerindah Daerah Sulawesi Selatan. Dorongan rakyat untuk bersatu dengan RI tampak sangat kuat dari beragam daerah di Indonesia. Natsir yang juga duduk dalam Dewan Perwakilan RIS melakukan lobi-lobi dengan Ir. Sakirman dari PKI dan B. Sahetapy Engel dari negara federal atau BFO (*Bijzonder Federaal Overleg*) untuk mencari permasalahan paling baik dari hasrat penyatuan ini.

Mohammad Hatta melakukan pertemuan pada bulan Mei 1950 dengan pemimpin Negara Indonesia Timur (NIT) dan Perserikatan Sumatera Timur (PST) dimana terjadi kesepatakan untuk membentuk negara kesatuan. Terjadi perbedaan pandangan tentang bagaimana proses penyatuan ini akan dilaksanakan; pihak NIT/PST ingin agar negara-negara federal itu bergabung dulu sebelum penyatuan dengan Republik Indonesia, sementara RI menginginkan agar segera mungkin semua negara federal menggabungkan diri dalam Republik Indonesia.

Dimana mosi yang diajukan berupa negara bagian masing-masing mengajukan usul menggabungkan diri menjadi Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Mosi ini sekaligus menawarkan konsep agar negara-negara bagian tidak saling telan menelan. Karena saat itu ada Republik Indonesia Serikat sebagai negara federal. Sementara ada beberapa negara bagian

lain, salah satunya adalah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Negara-negara bagian ini kemudian menyatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mosi integral ini, oleh karenanya, membentuk NKRI dimana tiap negara bagian dan Republik Indonesia memiliki posisi yang sama dihadapan negara baru.

Pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan pidato Mosi Integral yang bersejarah itu dihadapan Dewan Perwakilan RIS. Didalamnya Natsir menyatakan bahwa "Suara-suara rakyat dari berbagai daerah dan mosi-mosi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai saluran dari suara-suara rakyat itu, untuk melebur daerah-daerah buatan Belanda dan menggabungkannya ke dalam Pemerintah Republik Indonesia." Mosi itu turut ditandatangaini oleh Soebadio Sastrosatomo, Hamid Al-Gadri, Ir. Sakirman, K. Werdoyo, Mr. A.M. Tambunan, Ngadiman Harjosubroto, B. Sahetapy Engel, Dr. Cokronegoro, Moch. Tauhid, Amelz dan Siradjuddin Abbas.[50] Nama-nama yang tertera di Mosi Integral ini menunjukkan betapa luas dukungan terhadap mosi ini, baik dari dalam Republik Indonesia, kalangan politisi kiri dan kanan, serta dari pimpinan daerah dan mantan negara Federal sekalipun. Keberhasilan terbesar dari mosi ini adalah bahwa transisi dari RIS kepada RI merupakan sesuatu yang dilakukan secara sah, berdasarkan hukum, dengan musyawarah mufakat dan tidak menimbulkan kekerasan ataupun korban jiwa. Bahkan satu-satunya pihak yang harus diyakinkan oleh Natsir adalah dari kalangan RI di Yogyakarta yang khawatir bahwa posisi mereka dalam negara RI baru itu akan mengurangi peran-serta dan otoritas yang sudah mereka bangun dalam RI Yogyakarta.[51] Piagam persetujuan antara RIS dengan RI ditandatangani tanggal 19 Mei 1950 oleh Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta dengan Perdana Menteri RI Dr. Abdul Halim. Perjanjian itu menempatkan Presiden Sukarno sebagai Presiden RI tetapi, berbeda dengan keinginan Sukarno dan Mohammad Natsir beserta Masyumi, pemerintahan RI tetap berdasarkan sistem parlementer dan bukan presidensil.

PERDANA MENTERI MOHAMMAD NATSIR

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1950 pada 6 September 1950, Sukarno menunjuk Natsir sebagai Formatur Kabinet pertama pada Republik Indoensia pasca RIS. Ia menjadi Perdana Menteri dalam periode yang sangat singkat yaitu sekitar 7 bulan, dimulai dari 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Penunjukkannya karena beberapa alasan; pertama, walaupun hanya bisa diketahui lewat pemilu, ada kepercayaan umum bahwa Masyumi menjabat partai terbesar di Indonesia pada waktu itu. Hal ini terlihat dari jumlah organisasi massa di pusat dan daerah yang terafiliasi dengan partai Masyumi. Yang kedua adalah Sukarno percaya penuh terhadap Masyumi yang dianggapnya memiliki ide untuk menyelamatkan Republik lewat jalur konstitusional.[52] Ketiga, Natsir diharapkan dapat membentuk kabinet bersatu yang berarti menyatukan dua partai yang dianggap paling utama di Indonesia, yaitu Masyumi dan PNI. Kabinet Natsir disahkan sebagai kabinet pertama setelah NKRI terbentuk.

Sebagai formatur, Natsir berusaha menempatkan posisi Masyumi diatas PNI dengan memberi enam kursi kabinet versus PNI yang hanya dapat empat. PNI berusaha mendapatkan posisi kabinet yang paling berpengaruh termasuk Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan. Natsir mengancam akan membentuk pemerintahan tanpa PNI, tetapi tindakan keras seperti itu mengkhawatirkan faksi-faksi dalam Masyumi termasuk faksi Sukiman Wirjosandjojo dan faksi NU yang merasa bahwa pendekatan keras terhadap PNI hanya akan mendorong PNI untuk lebih dekat dengan PKI dan partai kiri lainnya. Sementara itu, PNI sadar akan perpecahan dalam Masyumi merasa bahwa ancaman Natsir itu tidak akan dijalankan. Ketika Natsir mengumumkan sebuah Kabinet yang berisi koalisi antara Masyumi, PSI dan beberapa partai kecil lainnya, maka ia membangun fondasi yang lemah atas pemerintahannya. Pertama, karena tindakan demikian memperkuat perpecahan dalam Masyumi, khususnya antara faksi Sukiman Wirjosandjojo yang berasal dari Jawa dan lebih dekat dengan aliran kaum Islam tradisional, serta NU yang merupakan organisasi Islam tradisional besar dari Jawa.

Barangkali memang koalisi Masyumi antara kaum modernis dan tradisionalis itu sudah ditakdirkan pecah dari awal, karena gabungan mereka memang didasarkan atas kebutuhan sesaat, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa tindakan awal kabinet Natsir ini telah membawa perpecahan selanjutnyua. Perpecahan awal dapat terlihat dalam Kongres Masyumi tahun Desember 1949 yang diadakan di Yogyakarta, dimana NU mendukung Sukiman Wirjosandjojo menjadi ketua umum partai karena dianggap sebagai tokoh yang moderat dan luwes. Kemenangan Mohammad Natsir menandakan konsolidasi kaum modernis di Masyumi. Kebijakan mengganti Majelis Syuro menjadi majelis konsultatif mengurangi lebih lanjut peranan kiai NU dalam penentuan kebijakan partai. Wahab Chasbullah, pimpinan NU, pada Muktamar NU bulan Mei 1950 mendesak penarikan diri NU dari Masyumi, walaupun baru pada April 1952 dimana NU secara resmi keluar serta mendirikan Partai NU.

Selain perpecahan dalam Masyumi, keputusan tidak melibatkan PNI juga mengkonsolidasi oposisi yang cukup solid dalam menghadapi pemerintahan Natsir. PNI beserta PKI mampu mengkoordinasikan beragam tindakan parlementer ataupun, ektra-parlementer, hal seperti pengarahan tenaga buruh. Perpecahan antara PNI dan Masyumi ini menjadi alasan utama ketidak-stabilan pemerintahan sepanjang Demokrasi Parlementer (1950-1957). Perpecahan dalam Masyumi dan konsolidasi oposisi dari PNI ini juga menandakan perpecahan lain yang signifikan; yaitu adanya perpecahan antara Jawa yang diwakili oleh PNI dan NU serta Luar Jawa yang diwakili oleh Masyumi. Sepanjang tahun 1950an, perasaan bahwa luar Jawa semakin jauh dari kontrol kebijakan serta adanya sentiment bahwa pembangunan nasional fokus pada Jawa akan mendorong pemberontakan PRRI dimana Masyumi dan Mohammad Natsir menjadi pelopor didalamnya.

Kabinet Mohammad Natsir didominasi oleh orang-orang dari Masyumi seperti Mohammad Roem yang menjadi Menteri Luar Negeri, Syafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Keuangan, serta KH. Wahid Hasyim pimpinan NU sebagai Menteri Agama. Ada beberapa

Upacara pelantikan Kabinet Natsir.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sidang Kabinet Natsir dan ex Kabinet Hatta pada tanggal 7 September 1950.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Kabinet Natsir berfoto bersama Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

orang PSI yaitu Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Peindustrian serta Tandiono Manu sebagai Menteri Pertanian. Lebih banyak lagi menteri dari PIR, partai Pamong Praja yang menandakan betapa tergantungnya pemerintah terhadap tenaga terdidik pamong praja. Mereka termasuk Ir. H. Johannes Leimena sebgai Menteri Pekerjaan Umum, Pandji Suroso sebagai Menteri Perhubungan dan Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri Kehakiman. Beberapa anggota partai2 Kristen juga dilibatkan karena koalisi Natsir melibatkan banyak partai-partai agama, termasu Harjadi dari Partai Katolik sebagai Menteri Sosial serta J. Leimena dari Parkindo. Diluar partai, Kabinet Natsir ini melibatkan cukup banyak orang-orang non-partai seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Perdana Menteri, Mr. Assaat mantan Presiden Republik Indonesia, sebagai Menteri Dalam Negeri, Dr. A. Halim mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, sebai Menteri Pertahanan, Ir. Djuanda Kartawidjaja yang telah menjadi menteri perhubungan sejak tahun 1946 dalam beragam kabinet dan tetap dalam posisi ini dalam Kabinet Natsir, serta Dr. Bahder Djohan yang menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.[53]

Program kabinet Natsir ini meliputi tujuh poin. Pertama adalah persiapan dan penyelenggaraan pemilu untuk Dewan Konstituante. Semenjak merdeka tahun 1945, Indonesia belum menyelenggarakan pemilihan umum sama sekali. Pembagian kursi parlemen ditentukan berdasarkan jumlah organisasi massa partai yang ada dalam masyarakat di berbagai daerah. Kedua mengkonsoildasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan dan peralatan negara, ketiga menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, keempat mengembangkan dan

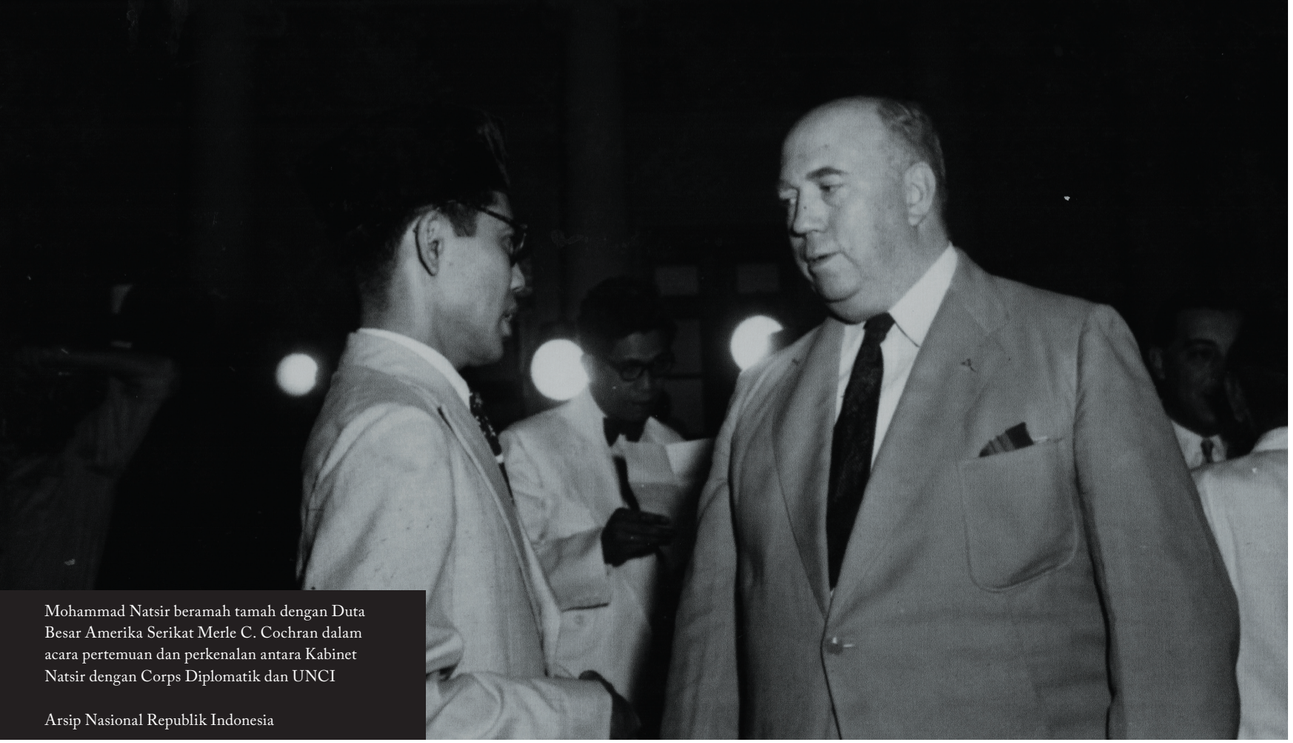

Mohammad Natsir beramah tamah dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle C. Cochran dalam acara pertemuan dan perkenalan antara Kabinet Natsir dengan Corps Diplomatik dan UNCI

Arsip Nasional Republik Indonesia

mengokohkan ekonomi rakyat sebagai dasar untuk melaksanakan ekonomi Nasional, kelima membangun perumahan rakyat serta memperluas usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat, keenam menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan memulihkan bekas anggota tentara dan gerilya kedalam masyarakat dan terakhir memperjuangkan penyelesaian Irian Barat.[54]

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah Natsir selama tujuh bulan masa jabatannya ini terfokus pada masalah keamanan dan kesatuan negara. Keberhasilan mosi integralnya dengan segera terancam karena adanya beragam usaha-usaha pemberontakan yang didorong oleh rasa khawatir akan dominasi Jawa ataupun Jakarta terhadap daerah-daerah lain. Seperti yang dibahas diatas, hal ini sudah terjadi semenjak periode RIS dimana elemen dalam KNIL dan pemerintah federal melakukan pemberontakan ataupun usaha kudeta. Ada dua permasalahan daerah ujung; pertama adalah adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan pada 24 April 1950; dan yang kedua adalah adanya otonomi penuh dari Gubernur dan rakyat Aceh yang merasa terancam akan jatuh dibawah kuasa orang-orang Batak yang non-Muslim jika Provinsi Aceh tidak jadi disahkan dan diintegasikan dalam Provinsi Sumatera Utara. Masalah keamanan utama adalah banyaknya senjata yang ada ditangan beragam laskar dengan haluan ideologi yang beragam pula yang telah pecah dengan pemerintah RI pada periode revolusi; termasuk diantaranya Hizbullah pengikut S.M. Kartosuwiryo yang masih bercokol di Jawa Barat, laskar-laskar PKI sisa-sisa pemberontakan PKI 1948 dalam Kompleks Merapi-Merbabu di Jawa Tengah, Laskar Harimau Liar, Pasukan Naga Terbang, Legiun Penggempur Komandemen Sumatera dan lain-lain di Sumatera Utara Gerakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil pengikut Kahar Muzakkar dan lain-lain.

Dalam pidato tanggal 24 November 1950, Natsir menyatakan perjuangan bersenjata sudah bukan lagi jalan utama untuk mewujudkan kemerdekaan. “Tingkatan perjuangan kita telah berganti. Tingkatan sekarang in menghendaki cara perjuangan yang berlainan dengan tingkatan peperangan gerilya menentang musuh seperit yang telah sudah itu. Tingkatan perjuangan sekarang tidak menghendaki lagi bahwa saudara-saudara meneruskan hidup memanggu senjata di pegunungan, terlepas dari ikatan keluarga dan masyarakat biasa.” Melainkan menurut Natsir “Fikiran dan tenaga saudara diperlukan untuk membangun Negara dengan arti yang lebih luas. Sudah datang saatnya untuk menutup sejarah lama dan memulai lembaran baru. Sudah datang saatnya untuk memperbaiki persaudaraan kembali atas dasar saling mengerti, untuk hidup bersama dalam udara Negara merdeka yang sudah sama-sama kit atebus dengan pengorbanan yang demikian hebatnya.”[55] Seruan Natsir untuk rekonsiliasi dan saling memaafkan guna membangun bangsa bersama ini merupakan salah satu kepercayaan politik pragmatisnya yang dia pegang teguh, ia melihat bahwa kebutuhan bangsa dan negara melebihi kebutuhan kelompok, termasuk kelompok Muslim modernisnya pula. Ia memahami bahwa membangun bangsa berarti menerima keberagaman, sebuah kepercayaan yang sudah dibentuknya semenjak potensi kemerdekaan Indonesia menjadi sebuah kenyataan.

Beberapa perundingan yang rumit bagi kabinet Natsir adalah perundingan Republik Maluku Selatan hingga Perundingan Irian Barat. Natsir juga mewarisi negosiasi kabinet sebelumnya dengan Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Pada masa kabinet sebelumnya, Natsir membantu Perdana Menteri Hatta menyelesaikan persoalan DI/TII yang dideklarasikan oleh Kartosuwiryo. Rekan satu partai ketika berada di Masyumi. Kartosuwiryo kemudian menolak bergabung dalam hijrah Divisi Siliwangi ke Jogja. Kemudian malah mendeklarasikan Darul Islam di Jawa Barat. Darul Islam sendiri kemudian mendapat sambutan di berbagai daerah seperti Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan hingga Sulawesi.

PERMASALAHAN BURUH

Konsolidasi oposisi pemerintah dari suatu aliansi non-koalisi antara partai-partai nasionalis dan kiri seperti PNI dan PKI telah menjadi duri dalam pemerintahan Mohammad Natsir. Gabungan Organisasi Buruh yang berafiliasi dengan PKI, yaitu SOBSI, yang pertama melakukan gerakan untuk meminta kenaikkan upah minimum dari Rp. 1.50 rupiah/hari menjadi Rp. 4.50 rupiah/hari. Kemerdekaan politik dan kedaulatan dari penjajahan Belanda telah tercapai semenjak 17 Agustus 1945 dan diperkuat dengan hengkangnya Belanda dan pasukannya dari Nusantara semenjak ditandatanganinya Perjanjian KMB pada akhir tahun 1949. Tetapi kemerdekaan politik ini tidak terwujud dalam kemerdekaan ekonomi. Bahkan, Perjanjian KMB telah memaksa Indonesia untuk mengambil-alih hutang negara Hindia Belanda sebanyak 1,2 milyar dollar, sesuatu yang sangat

langka yang terjadi antara negara penjajah dan mantan jajahan dalam proses dekolonisasi. Selain itu, KMB juga mengatur banyak urusan perekonomian Indonesia yang bertujuan melanggengkan posisi perusahaan-perusahaan Belanda dari tingkat multinasional sampai dengan perusahaan pribadi dalam perekonomian Indonesia.

Koalisi Pemerintahan Mohammad Natsir yang terdiri dari Partai Masyumi, PSI dan partai-partai minoritas dan konservatif lainnya ini cenderung dianggap sebagai partai-partai yang pro-Barat dan pro-Kapitalisme. Dalam perdebatan antara Syafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dari Masyumi, dengan Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Perdagangan dan Industri dari PSI, terlihat bahwa Syafruddin menentang usaha gegabah dalam nasionalisasi ekonomi dan menyatakan dukungan terhadap investasi asing sebagai alat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka membangun perekonomian yang mandiri sementara Sumitro lebih radikal dalam pandangannya mengenai nasionalisasi ekonomi dan melihat negara berperan dalam mewujudkan proses kemerdekaan ekonomi ini. Bagi orang kalangan kiri ataupun nasionalis, maka keberlanjutan kontrol ekonomi Indonesia dibawah kapitalisme Belanda ini tidak bisa diterima. Oleh karenanya, gerakan buruh ini bukan hanya masalah kesejahteraan belaka, melainkan merupakan bagian erat dari kebijakan oposisi PNI dan PKI dalam menolak sistem perekonomian yang didukung oleh Masyumi dan PSI. Ini merupakan awal dari usaha kemerdekaan ekonomi Indonesia yang akan berkulminasi pada pengambil-alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia pada tahun 1957.

Perundingan antara kalangan buruh dengan perusahaan-perusahaan Belanda dimediasi oleh pemerintah lewat Dr. Sumitro Djojohadikusumo serta R. Pandji Suroso sebagai Menteri Perhubungan. Kesepakatan antara gabungan serikat buruh dengan pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk mematok upah minimum sebesar 7.50/hari, lebih tinggi daripada permintaan awal para serikat buruh sebesar 4.50/hari dan jauh lebih tinggi daripada upah minimum yang sebelumnya berlaku sebesar 1.50/hari. Walaupun kondisi perekonomian Indonesia membaik pada masa ini akibat ledakan ekspor guna memenuhi kebutuhan Perang Korea, Syafruddin menggerakan perubahan sistem perbankan untuk mendorong pembangunan dan Sumitro mengeluarkan rencana industri Indonesia pertama, yang dikenal dengan sebutan *Sumitro Plan*.

Tapi keberhasilan-keberhasilan ini tetap dihantui oleh permasalahan perburuhan yang menjadi semakin buruk karena, walaupun sudah terjadi kesepakatan kenaikan patokan upah minimum, mulai Januari 1951, terjadi serangkaian gelombang pemogokan buruh yang diakibatkan karena pergantian pemimpin PKI dari Alimin ke Aidit. Pada saat yang sama produktivitas buruh Indonesia menurun signifikan sebagai akibat daripada kebijakan PKI untuk mendisrupsi pasar buruh nasional ini. Guna menghadapi masalah ini, PM Natsir mengumumkan pelarangan pemogokan kerja dan *lockout* (penguncian pabrik) pada sektor-sektor yang vital untuk ekonomi, termasuk dalam industri komunikasi

Malam perkenalan Kabinet dengan para pimpinan Ormas, Orpol, dan Corps Diplomatic pada tanggal 12 September 1950.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

dan transportasi. Natsir memperoleh dukungan dari TNI untuk memaksa pelarangan ini, sesuatu yang menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat dan tuduhan bahwa Kabinet Natsir ini telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

REPUBLIK MALUKU SELATAN

Republik Maluku Selatan diproklamasikan pada April 1950 dibawah R.S. Soumoukil, J.A. Manusama dan R.J. Metekohy yang merupakan politisi dan PNS dari Maluku dalam Negara Indonesia Timur. Mereka merasa bahwa kepentingan kaum Maluku Protestan tidak akan dipenuhi dalam negara Republik Indonesia yang didominasi oleh orang-orang Jawa Islam. Pada awalnya, Natsir mengirim Menteri Kemakmuran J. Leimena, sebagai putera Maluku, untuk bernegosiasi. Kegagalan Misi Leimena[56] mendorong Perdana Menteri Natsir mengirim operasi militer melalui Angkatan Perang Republik Indonesia.[57] Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Pimpinan Kolonel Kawilarang berjumlah 5000 orang kemudian mendarat di Ambon untuk memulai operasi militer.[58] Operasi militer ini beriringan dengan jalan perundingan yang tidak membuahkan hasil. Seiring Kabinet Natsir terus menerus mendapat tekanan dari Badan Pengawas PBB UNCI untuk membuka mediasi antara Pemerintah Indonesia dengan Republik Maluku Selatan melalui UNCI.[59] Operasi TNI/APRIS yang dimulai semenjak Juli 1950 itu berakhir ada awal November 1950 dengan jatuhnya kota Ambon.[60] Akhirnya, perundingan tiga pihak antara Pemerintah Indonesia, Republik Maluku Selatan dan UNCI kemudian disepakati. Perdana Menteri Natsir mengumumkan di depan parlemen pada 12 Oktober 1950. Bahwa Pemerintah bersedia memberikan akses seluas-

luasnya kepada UNCI untuk menyelesaikan masalah Republik Maluku Selatan di Ambon.

DARUL ISLAM

Natsir mengenal secara pribadi R.M. Kartosuwiryo semenjak masa mudanya aktif dalam JIB ataupun PSII. Keduanya memiliki pandangan ideologis yang mirip, yaitu Islam modernis, tetapi jika Natsir dikenal sebagai orang pragmatis dengan kepercayaan kuat akan demokrasi sehingga disebut oleh Ahmad Syafii Maarif dan Azyumardi Azra sebagai 'demokrat tulen',[61] maka Kartosuwirjo memiliki pandangan bahwa Islam tidak bisa digantikan dengan demokrasi. Tak dapat dipungkiri bahwa Natsir memiliki simpati terhadap Darul Islam, baik karena alasan ideologis maupun pribadi dan sehingga memilih penyelesaian jalur politik, bukan jalur militer terhadap DI TII Jawa.[62] Hal ini sudah terlihat saat menjabat sebagai Menteri Penerangan, dimana Natsir menggunakan jalan lunak dalam menyelesaikan persoalan Darul Islam. Ketika mendengar bahwa Kartosuwiryo berencana mengumumkan pendirian Negara Islam, pada akhir 1949, Natsir meminta KH Ahmad Hassan, pendiri Persis dan guru spiritual dari Natsir dan Kartosuwirjo pada masa muda mereka, untuk mengirimkan pesan untuk menunda pengumuman itu. Serta surat yang ditulisnya langsung dengan kertas buku hotel saat Natsir berusaha menemui Kartosuwiryo di Jawa Barat.[63] Tapi Hassan gagal mengirimkan surat tersebut, dan pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamirkan pendirian dari Darul Islam – Negara Islam Indonesia.

Pada saat menduduki jabatan Perdana Menteri, Natsir mulai mengubah haluannya terhadap Kartosuwiryo dan bersikap lebih keras. Natsir berharap bahwa posisinya sebagai Perdana Menteri akan melunakkan posisi Kartosuwiryo. Perang Korea juga memiliki pengaruh karena pertama-kalinya Kartosuwiryo menganggap bahwa ancaman terbesarnya berasal dari kalangan Komunis, bukan lagi dari Belanda.[64] Natsir berpendapat bahwa Darul Islam telah menimbulkan persoalan keamanan dan ketertiban. Semangat Darul Islam Kartosuwiryo bertentangan dengan visi Masyumi untuk menciptakan persatuan umat Islam dalam berjuang melawan agresi Belanda. Dengan adanya Darul Islam, umat Islam terpecah dan terpolarisasi antara Darul Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 20 Januari 1951 Natsir sebagai pimpinan Partai Masyumi mengumumkan sebuah himbauan partai tidak mendukung Darul Islam. Masyumi juga menegaskan bahwa pendirian Darul Islam menyalahi aturan kesepakatan Republik Indonesia.

Permasalahan rumit ini menyita perhatian Natsir pada saat ketika kehidupan keluarga dirudung musibah ketika anaknya yang berusia 13 tahun, Abu Hanifah, meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang Manggarai.[65] Bagi Natsir, Republik Indonesia adalah hasil jihad umat Islam dan merupakan satu-satunya jalur konstitusi untuk menyuarakan pandangan umat Islam.[66] Agaknya dalam proses penyelesaian Darul Islam ini Natsir sendiri mengakui kebijakannya kurang keras. Tawaran-tawaran untuk menyerahkan diri kepada para gerilyawan hanya didapat 1.200 orang yang menyerahkan diri dengan jumlah senjata yang disita sejumlah 46 pucuk.[67] Natsir sendiri mengakui bahwa kebijakannya kurang

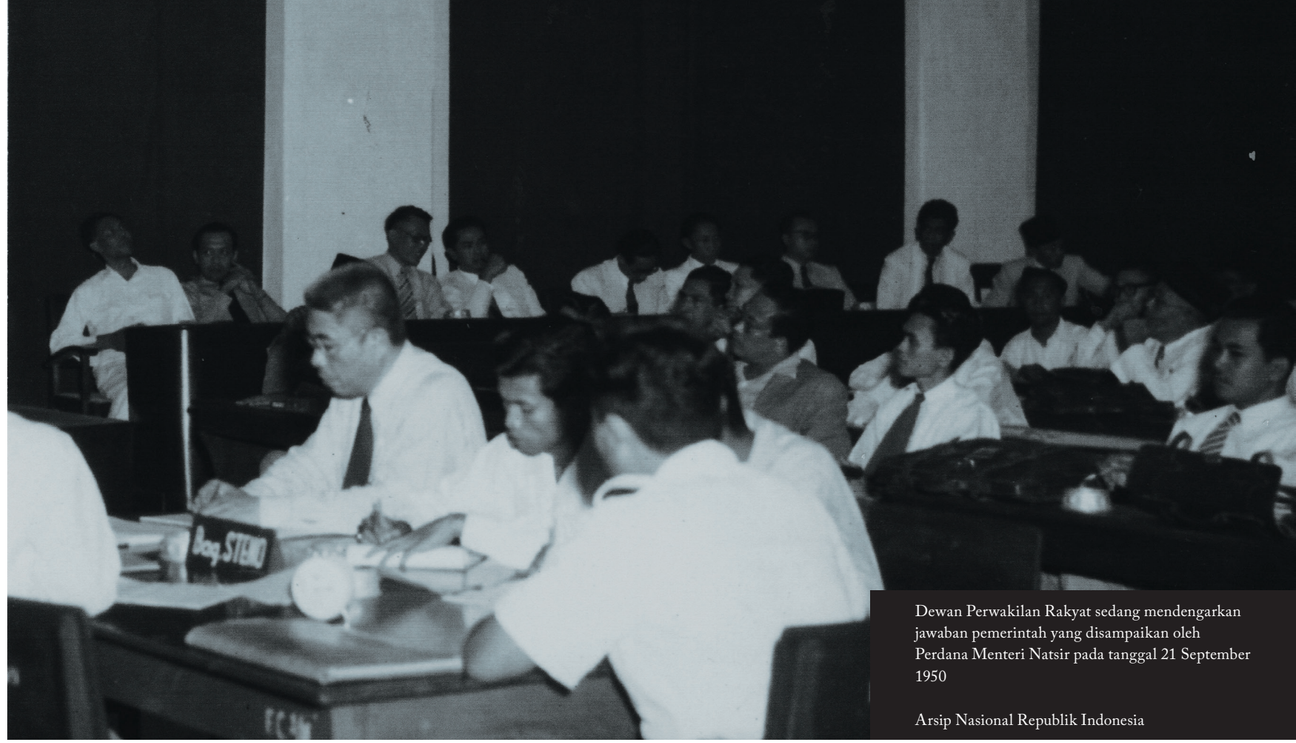

Dewan Perwakilan Rakyat sedang mendengarkan jawaban pemerintah yang disampaikan oleh Perdana Menteri Natsir pada tanggal 21 September 1950

Arsip Nasional Republik Indonesia

berhasil dalam menyelesaikan Darul Islam dan berharap bisa lebih keras lagi.[68] Pengakuan ini disampaikan Natsir beberapa bulan setelah kabinetnya jatuh dan digantikan Perdana Menteri Sukiman. Tetapi bagaimanapun, hubungan pribadi Natsir dengan Kartosuwiryo tetap bagus, dan selama Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri, maka Kartosuwiryo tetap mendukung pemerintah Republik Indonesia. Kartosuwiryo mengancam akan melakukan pemberontakan jika Kabinet Natsir jatuh. Naiknya Sukiman Wirjosandjojo, rival Natsir dalam partai serta pimpinan dari faksi yang simpatis terhadap Islam tradisionalis di Masyumi, mengubah haluan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI TII di Jawa Barat lalu dilanjutkan dengan pernyataan Pemberontakan Darul Islam di Aceh di bawah pimpinan Daud Beureuh pada September 1953. Dengan berubahnya kebijakan Darul Islam menjadi pemberontakan, maka Sukiman memerintahkan TNI untuk menjalankan operasi militer sebagai jalan menyelesaikan Darul Islam.

MASALAH PROVINSI ACEH

Proses keberhasilan perundingan di masa Kabinet Natsir hanya terjadi di Aceh. Saat itu terjadi pergolakan menuntut Aceh dikembalikan menjadi berstatus provinsi setelah sebelumnya diturunkan. Aceh merupakan sebuah wilayah dengan semangat kemandirian yang kuat dan merupakan salah satu wilayah Republik dimana Belanda tidak masuk pada periode Perang Kemerdekaan. Sukarno pada Juni 1948 telah menjanjikan rakyat Aceh bahwa daerah mereka akan menjadi Provinsi sendiri. Tetapi dalam pembentukkan RIS, Aceh tidak diberi Provinsi melainkan dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Orang Aceh yang punya identitas Islam yang kuat merasa khawatir bahwa mereka akan didominasi oleh suku Batak yang sebagian

besar bukan orang muslim. Selain itu, semenjak revolusi sosial pada awal Revolusi Kemerdekaan, kaum ulama telah mengambil alih sebagian besar negara daripada kaum zuama atau Pamong Praja Aceh lama. Ada pula kekhawatiran bahwa pengintegrasian Aceh ke dalam Sumatera Utara dapat menyebabkan kembalinya berkuasa kaum zuama, sesuatu yang tidak diinginkan kaum ulama Aceh.

Pada awalnya, Natsir mengambil kebijakan untuk melibatkan elit Aceh sepenuhnya dalam proses pembentukkan Provinsi Sumatera Utara. Secara pribadi, Natsir mendukung pendirian Provinsi Aceh karena beberapa alasan. Pertama, Natsir simpatis terhadap perspektif masyarakat Aceh yang keberatan untuk dipimpin oleh orang-orang non-Muslim dan ada kepercayaan dibanyak kalangan bahwa Sumatera Utara akan didominasi oleh suku Batak. Kedua, keberadaan Provinsi Aceh ini menambah suara dalam Parlemen ataupun dari dukungan Gubernur Provinsi yang pro-terhadap kebijakan Partai Masyumi. Berbeda dengan Maluku Selatan yang mayoritas dihuni oleh orang-orang non-Muslim, kenyataan bahwa Aceh merupakan daerah mayoritas Muslim dengan populasi Muslim paling taat di Indonesia, maka Natsir sangat simpatis terhadap keinginan rakyat Aceh. Tapi posisi Aceh sebagai provinsi Muslim ini pula yang membuat usaha menggolkan provinsi Aceh menjadi sulit. Oposisi yang terdiri dari kalangan Nasionalis Kiri seperti PNI dan PKI melihat pendirian Provinsi Aceh akan memperkuat posisi Masyumi dalam parlemen dan pemerintahan dan oleh sebabnya, Natsir gagal untuk mendapatkan dukungan Parlemen dalam mensahkan Provinsi Aceh. Bahkan baru tahun 1959 Aceh mendapatkan posisinya sebagai Provinsi dengan status Daerah Istimewa.

Pemerintah melakukan kerja-sama dengan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) guna mengangkat Gubernur sementara Provinsi Sumatera dari Masyumi, Abdul Hakim. Gubernur Abdul Hakim dikenal secara publik mendukung pembentukkan Provinsi Aceh yang otonom, dan sehingga diharapkan menjadi seorang Gubernur yang dapat dipercaya oleh penduduk dan elit Aceh.[69] Tetapi usaha pemerintah untuk meyakinkan masyarakat Aceh guna mendukung Provinsi Sumatera Utara ini gagal. Natsir mengutus Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara dan Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat untuk mendekati pemuka Aceh soal ini. Pada 27 November 1950, Wakil Presiden Mohammad Hatta mendatangi sendiri Aceh guna mendengar dan berunding dengan pemuka-pemuka Aceh yang tergabung dalam PUSA (Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh).

PUSA mengadakan kongres tanggal 22 Desember 1950 yang menuntut propinsi otonomi untuk Aceh dengan ancaman jika tidak dikabulkan, maka Gubernur dan seluruh jabatan negara Aceh akan mengundurkan diri. Kondisi pelik ini dikhawatirkan akan menjerumus menjadi konflik militer. Pada dasarnya Masyumi dan Natsir secara pribadi mendukung penciptaan Aceh sebagai provinsi mandiri. Sebagai partai Islam mereka melihat keberadaan provinsi dengan Islam kuat dapat membantu pemerintahan di tingkat nasional. Tetapi hal ini pula yang mendorong oposisi untuk menolak pembuatan Provinsi Aceh. Ketidak setujuan PNI dan partai-partai kiri lainnya untuk mendukung penciptaan Provinsi Aceh ini menyebabkan ketidak-mampuan PM Natsir untuk bisa menetapkan Provinsi Aceh. Bahkan, baru tahun 1956 dibawah Kabinet Ali Sastroamidjojo Kedua dimana Aceh baru mendapatkan posisinya sebagai Provinsi dengan status Daerah Istimewa.

Perdana Menteri Natsir berangkat menuju Banda Aceh dari kota Medan pada tanggal 23 Januari 1951 dengan rombongan menggunakan pesawat terbang. Sebuah pertemuan formil dengan delapan puluh pejabat pemerintah daerah dan pemuka masyarakat dilaksanakan. Tetapi pertemuan tersebut gagal mencapai kesepakatan. Esok harinya, Natsir balik ke Jakarta untuk meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Ia jelaskan ke Daud Beureuh keputusan tersebut: kegagalan perundingan ini hanya mengakibatkan dua pilihan yang bisa diambilnya. Pilihan pertama adalah melakukan tindakan kekerasan militer terhadap Aceh karena telah melakukan pemberontakan. Pilihan kedua adalah meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Daud Beureh yang akan ini masih punya harapan dan penghormatan terhadap Pemerintah Republik ketika dibawah Mohammad Natsir. Jatuhnya Natsir ini akan mendorongnya memperkuat pilihannya untuk memberontak dan mendirikan Negara Islam Indonesia di Aceh pada tahun 1953.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN PERPECAHAN DENGAN SUKARNO

Kebijakan Natsir mengikuti tradisi kebijakan 'bebas aktif' yang telah lama dijalankan oleh pemerintah. Walaupun Masyumi terkenal memiliki sifat yang dianggap banyak orang sebagai pro-Barat, Natsir tetap menolak bantuan militer Amerika Serikat yang ditawarkan lewat Misi John Melby pada akhir tahun 1950, walaupun pemerintah tidak menolak bantuan asistensi di bidang ekonomi dan pendidikan. Lebih sulit daripada hubungan dengan Amerika Serikat adalah hubungan dengan Belanda. Perjanjian KMB menjamin banyak dari pejabat ahli berkebangsaan Belanda yang akan tetap dipekerjakan oleh pemerintah Republik Indonesia selama lima tahun ke depan dalam kapasitas sebagai penasehat dengan harapan akan memperlancar periode transisi kemerdekaan. Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia berkaitan dengan usaha menambah tenaga ahli, baik sebagai penasehat maupun sebagai teknisi karena Indonesia sangat kekurangan jenis tenaga demikian. Tetapi hubungan yang seharusnya saling menguntungkan antara Indonesia dengan Belanda pada periode transisi ini diracuni oleh penolakan Belanda untuk membahas pengembalian wilayah Irian Barat. Posisi ini juga menyulitkan Natsir karena akan berefek pada perenggangan hubungannya dengan Presiden.

Hubungan erat antara Mohammad Natsir dan Presiden Sukarno menemui akhirnya justeru pada periode Perdana Menteri Natsir. Ini adalah hubungan yang terbina sejak Natsir masuk dalam pemerintahan sebagai Menteri Penerangan serta asisten Sukarno dalam beragam hal, termasuk penulisan pidato 17 Agustusnya. Hubungan baik ini tidak didasarkan atas kesamaan ideologis, melainkan sebuah *modus vivendi* yang menekankan pentingnya kerja-sama untuk mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Padahal, hubungan mereka dipenuhi dengan polemik dan saling kritik pada tahun 1930an ketika posisi ideologis dua pemimpin nasional ini

begitu berbeda. Salah satu titik awal perpecahan terletak dalam kebijakan negara terhadap Irian Barat. Berdasarkan perjanjian KMB, otoritas dan kekuasaan pemerintah Belanda atas Irian Barat ini diperpanjang selama 12 bulan sejak penandatanganan KMB. Hal ini berarti bahwa berdasarkan KMB, Belanda seharusnya sudah mengembalikan Irian Barat ke tangan Republik Indonesia pada akhir tahun 1950.

Ketika hal itu tidak terjadi, Sukarno ingin membuat pidato yang mengumumkan bahwa Uni Indonesia Belanda akan dihapuskan secara unilateral jika Belanda belum mengembalikan Irian Barat pada 1 Januari 1951. Natsir khawatir bahwa tindakan tersebut akan mencoreng nama baik Republik dimata internasional. Ia menginginkan agar proses penghapusan Uni Indonesia Belanda dilakukan lewat rapat antar-Menteri kedua negara. Natsir meminta naskah pidato Sukarno, sesuatu yang menyinggung perasaan Presiden Sukarno. Natsir kemudian meminta Presiden dan Wakil Presiden serta anggota dari kabinet untuk menghadiri 'sidang' yang dikepalai oleh Natsir sebagai ketua sidang guna membahas mengenai isi pidato tersebut. Dalam hal ini ada beberapa opsi dari pembubaran Uni Indonesia Belanda yang disepakati oleh semua bahwa kegunaannya sudah tidak nampak lagi. Dalam sidang tersebut, Natsir lalu meminta semua pihak yang ada untuk mengambil suara. Setelah sidang, Presiden Sukarno membatalkan pidato maulidnya tersebut. Ia juga menyatakan bahwa posisinya sebagai Presiden "tidak lebih dari satu stempel karet."[70] Tindakan Natsir yang begitu publik, dimata hadapan elit pemerintah, telah menikung Sukarno dari belakang dan memberikan ultimátum lewat suara kuorum sidang yang dilaksanakan di Istana Sukarno sendiri merupakan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan oleh Sukarno. Natsir yang sepanjang Perang Revolusi merupakan asisten Sukarno telah melebihi otoritasnya dalam sistem parlementer. Kecurigaan Sukarno terhadap Masyumi tidak akan pernah berubah kembali ke arah positif, dan bahkan akan semakin keras sepanjang dekade 1950an. Perasaan ini akan berakhir pada permintaan Sukarno terhadap Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja untuk melarang Partai Masyumi dan PSI sebagai pemberontak dan pengkhianat terhadap revolusi Indonesia dalam konteks pemberontakan PRRI.

Bergesernya posisi Sukarno menjadi oposan pemerintahan Natsir ini memperkuat oposisi PNI dan PKI yang sudah terkonsolidasi. Dari kalangan oposisi, ada dorongan untuk penghapusan dewan daerah pada tingkat Provinsi yang dibanyak kasus didominasi oleh partai Masyumi. Pemerintahan Natsir setuju untuk menghapus dewan daerah tetapi minta ditunda sampai bisa direncanakan pengganti dewan-dewan tersebut. Salah satu program awal Pemerintahan Natsir adalah penyelenggaraan pemilu baik pada tingkat nasional maupun daerah guna benar-benar mendapatkan parlemen dan pemerintahan yang berbasis dukungan rakyat. Tetapi karena ringkasnya pemerintahannya serta begitu banyak masalah yang datang bertubi-tubi, pemerintahannya belum sempat melakukan tindakan-tindakan menuju arah penyelenggaraan pemilu. Oposisi terhadap dewan daerah semakin menguat dan sehingga mengurangi kuorum parlemen. Dengan begitu banyaknya oposisi kepada pemeritahannya, Natsir terpaksa mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno.

Walaupun periode kepemimpinannya singkat, Natsir telah berhasil dalam membangun fondasi untuk menciptakan keamanan sipil yang lebih kuat. Pemerintahannya juga berhasil dalam menelusuri permasalahan administratif serta SDM pemerintahan dan ekonomi. Rancangan industrial pertama Indonesia berhasil diterbitkan. Semua ini akan bermanfaat dalam pembangunan SDM negara Indonesia serta dalam pembuatan rencana lima tahun negara. Bisa dikatakan bahwa Natsir berhasil dalam mendorong negara Indonesia menjadi negara yang 'normal'. Permasalahannya adalah tujuh bulan tidak cukup untuk benar-benar membangun fondasi yang kuat. Menurut Natsir masalah utama Kabinetnya itu terkait dengan lemahnya legitimasi yang disebabkan karena negeri Indonesia belum pernah melakukan pemilihan umum untuk menentukan seberapa populer partai-partai utama yang bercokol di gedung parlemen. Ada anggapan umum bahwa jika pemilu diadakan, maka pemenang terbesar akan jadi Masyumi.[71] Menurut Natsir pemerintahan parlementer yang berbasis pada pemilu akan lebih kuat dan lebih stabil – menandakan kuatnya pandangan Natsir sebagai seorang demokrat – yaitu demokrasi sebagai sebuah alat yang paling efisien untuk mencapai pembangunan bangsa dan negara.

NATSIR PASCA-PERDANA MENTERI

Natsir meninggal dunia pada tahun 1993, dan walaupun peran-sertanya dalam parlemen ini tetap berlanjut sampai dengan pecahnya pemberontakan PRRI, karirnya pasca-kejatuhan Sukarno-lah yang menjadikan namanya terkenal dalam pergerakan Islam modern sampai masa kini. Amien Rais menyebutnya sebagai seorang guru.[72] Tak dapat dipungkiri bahwa Natsir merupakan seorang yang demokrat yang bersikap kompromistis, seorang nasionalis yang menerima perbedaan. Tetapi disisi lain, prinsip terdalamnya tetap dipegangnya kuat-kuat, jikapun mungkin tampak seolah disembunyikan. Prinsip kuat ini membuatnya jadi tidak punya rasa takut; perlakuan Natsir terhadap Sukarno ketika ia menggagalkan pidato maulidnya menunjukkannya sebagai seorang yang dengan penuh akal dan perhitungan, serta tanpa menghiraukan perasaan orang yang merupakan teman dan atasannya guna mendapatkan hal yang menurutnya

Lalu siapa Natsir itu? Perjuangannya untuk mewujudkan penerapan prinsip-prinsip Islam modern dalam masyarakat Indonesia akan dilanjutkan seumur hayatnya. Rasa curiga terhadap Barat dan lembaga-lembaganya juga akan dipegangnya sampai tua; ia disibuki dengan usaha merancang modus vivendi terhadap agama Kristen/Katolik di Indonesia. Natsir dikenal sebagai orang yang simpatik terhadap perjuangan kaum Kristen dan Katolik dan relatif dekat dengan politisi Kristen seperti I.J. Kasimo, pemimpin Partai Katolik. Masyumi sendiri dikenal sebagai partai yang 'pro-Barat'; secara umum mereka pro-kapitalis serta mendukung investasi asing. Tetapi Natsir berasal dari sebuah grup politisi Muslim yang dinamakan sebagai Islam sosialis, sebuah klik kuat dalam Masyumi yang terdiri dari orang-orang seperti Syafruddin Prawiranegara, Jusuf Wibisono dan Burhanuddin Harahap yang melihat prinsip sosialisme dengan kacamata Islam. Disini mereka menemukan kesamaan dengan orang-orang PSI yang kebanyakan terdiri dari orang sosialis borjuis

(atau kadang disebut sebagai *champagne socialists*); yaitu kaum elit berpendidikan tinggi yang punya pandangan bahwa negara punya peran penting dalam mewujudkan pembangunan sosialis.

Salah satu perbuatan awal Natsir setelah karirnya sebagai Perdana Menteri berakhir adalah memperluas pergaulan internasional dalam dunia Islam. Seperti Sukarno, Natsir tidak melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda dan sehingga pandangannya terhadap luar negeri tidak dibuai oleh tarikan demokrasi parlementer Eropa Barat, seperti yang nampak terjadi pada pandangan pemimpin bangsa lain seperti Mohammad Hatta ataupun Sutan Sjahrir. Tetapi dari awal, pandangan Natsir ini sangat dipengaruhi oleh ide-ide transnasional yang berakar dari hasrat umat-umat Islam di Timur Tengah untuk menjadi orang modern tetapi dengan caranya sendiri. Memang beliau belajar pengetahuan klasik dan liberal Barat dan sehingga sangat faham mengenai filsafat yang mendasari peradaban Barat, tetapi pelajaran ini lebih dipakainya sebagai alat untuk mengkritik Barat itu sendiri. Dari sejak perkenalannya dengan pemahaman filusuf modernis Muslim yang diperkenalkan oleh Ahmad Hassan sejak masa AMS-nya di Bandung, maka Natsir memiliki rasa curiga terhadap pendidikan ataupun lembaga-lembaga Barat. Tujuan utama hayatnya adalah mewujudkan sebuah masyarakat Indonesia modern yang berbasis pada modernitas Islam.

Pada tahun 1952, Natsir melakukan perjalanan ke Pakistan bersama A.R. Baswedan dan Anwar Haryono untuk mengunjungi *Pakistan Institute of World Affairs*. Pakistan pada waktu itu merupakan sebuah percobaan baru penerapan ide-ide Islam dalam membangun negara modern. Disini Natsir berceramah dengan judul "Some observations concerning the role of Islam in national and international affairs." Ia bertemu dengan pemimpin-pemimpin *Muslim League* dan mengunjungi Pusat Kebudayaan Islam di Lahore. Setelah dari Pakistan, Natsir lalu melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi, Mesir, Turki, Irak, Iran, Libanon, India dan Birma. Perjalanannya mengelilingi dunia Muslim dan bertemu dengan Raja Arab Saudi dan Mesir serta pemimpin dari Ikhwanul Muslimin, ulama-ulama Syiah dan pemimpin agama Maronite membuka kesempatan Natsir untuk berpartisipasi dalam dunia Islam global yang modern ini tetapi juga sekaligus mendorongnya untuk meneruskan cita-cita politiknya di Indonesia. Pada tahun 1956, Natsir diundang ke Muktamar Alam Islami yang mengadakan kongres di Damaskus, Suriah, dimana permasalahan Palestina dibahas. Perjalanan internasional dan penguatan hubungan dengan beragam orang dan lembaga yang memiliki kesamaan ideologis untuk mewujudkan masyarakat Islam modern ini menunjukkan pergeseran ideologis Natsir kembali ke zaman sebelum kedatangan Jepang.[73]

Anggaran Dasar Masyumi yang diubah pada tahun 1952 menekankan bahwa garis tujuan dan perjuangan partai adalah untuk "melaksanakan ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat dan negara." Dalam sebuah pidato Natsir di Muktamar Masyumi tahun 1956, ia menekankan anggaran dasar partai dalam "menegakkan Republik Indonesia dan agama Islam." Pada saat yang bersamaan, Natsir juga berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa Masyumi tidak sama dengan Darul Islam, sebuah tuduhan yang sering dilontarkan oleh PKI untuk menerabas legitimasi dari partai dimata masyarakat.

Perjuangan terbesarnya pada periode 1950an ada di Dewan Konstituante yang bertujuan untuk merancang Undang Undang Dasar Republik menggantikan UUDS RIS yang masih berlaku sepanjang tahun 1950an. Akhirnya, UUD RI balik kepada UUD 45 setelah Dekrit Presiden 1959, tetapi dalam sidang itu, Natsir berjuang untuk menghapus sekulerisme dalam tata negara Indonesia. Menurutnya faham sekulerisme itu menyebabkan penyebaran faham atheisme dikalangan rakyat Indonesia. Tampak disini bahwa musuh utama Natsir adalah kaum Komunis dan faham-faham yang ia asosiasikan dengan PKI itu. Sebagai contoh, ia mendukung konsep hak milik dan menempatkannya sebagai bagian dari hak asasi manusia atau *humanity* yang berbasis agama, karena sesuai dengan fitrah agama.

Demokrasi yang ingin diwujudkan disini adalah demokrasi Islam, bukan demokrasi Barat. Menurut Natsir, Islam menyediakan dasar-dasar pokok yang berbasis pada fitrah manusia yang abadi dan tidak berubah. Basis fitrah ini mengasumsikan nilai universalitas dari Islam dan sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan; dalam demokrasi Islam, nilai-nilai dasar Islam itu otomatis diterapkan tanpa perlu lagi diperdebatkan. Kesakralitasan nilai-nilai Islam yang dianggapnya universal ini tentunya tampak sangat bertentangan dengan ide demokrasi modern yang mana nilai itu kontekstual dan dapat berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Pandangan konservatif ini sangat bertentangan dengan ide-ide progresif yang melihat bahwa manusia itu dapat diubah sesuai dengan zaman dan bahwa tidak ada fitrah ataupun nilai universal karena ajaran demikian seringkali merupakan cara kelas penguasa untuk mengelabuhi kelas yang dikuasai untuk mendukung penjajahan mereka.[74]

Tampak cukup jelas bahwa ide-ide utama konservatisme Natsir ini sama dan melanjutkan ide-ide yang telah dicurahkannya dalam berbagai publikasi pada tahun-tahun 1930an. Rasa curiga terhadap pergerakan progresif yang berbasis pada sudut pandang anti-fitrah, perayaannya terhadap ulama sebagai pemimpin ummat serta rasa curiga yang tinggi terhadap dunia Barat dan agama Kristen. Pada tahun 1920an dan 1930an, Natsir menulis mengenai bahaya Kristenisasi lewat pendidikan, dan oleh karenanya, usaha terbesarnya pada periode 1930an adalah mengembangkan pendidikan alternatif yang berbasis pada agama Islam.[75] Pada tahun 1970an dan 1980an, kecurigaannya terhadap Kristenisasi bergeser dari pendidikan menuju pada usaha-usaha pembangunan masyarakat (*community development*) yang dilakukan oleh gereja dan LSM-LSM yang berkaitan dengan gereja.[76]

'HIJRAH' PRRI DAN AKHIR DARI MASYUMI

Pemberontakan PRRI didorong oleh keputusan Mohammad Hatta untuk mengundurkan diri dari tampuk Wakil Presiden. Dikalangan tentara teritorial di daerah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan, ada rasa tidak puas terhadap Jakarta, khususnya usaha Kepala Staf TNI AH Nasution, untuk reorganisasi tentara yang

mengakibatkan berkurangnya otoritas tentara territorial yang terikat di wilayahnya bagaikan raja-raja kecil. Ahmad Hussein dari Sumatera Tengah dan Maludin Simbolon dari Sumatera Utara memproklamirkan dewan pemerintahan yang terpisah dari Jakarta di wilayah mereka. Pada awalnya politisi Jakarta yang memiliki hubungan darah dengan daerah pemberontak berusaha menengahi crisis tersebut, khususnya politisi dari Masyumi dan PSI yang memang banyak berasal dari Sumatera dan Sulawesi.[77]

Pada September Sumitro Djojohadikusumo bertemu dengan para kolonel pemberontak dan memproklamirkan Piagam Palembang, yang meminta untuk pengembalian duumvirat Sukarno-Hatta, perobahan pemimpin TNI dan pelarangan Komunis yang berhaluan internasional. Kolonel Hussein, Barlian dan Sumual datang ke Jakarta untuk menghadiri Musyawarah Nasional yang diselenggarakan untuk menyelesaikan krisis anti-Jakarta yang punya potensi memecah belah bangsa. Kegagalan Munas mendorong Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap untuk meninggalkan Jakarta pada Desember 1957. Mohammad Natsir menyusul pada awal Januari di Padang.[78] Kepergian pemimpin Masyumi ke Padang untuk mendirikan PRRI ini disebut dengan hijrah,[79] mencontoh hijrah Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dalam pandangan Natsir, apa yang diperbuat oleh mereka ini direstui oleh Allah. Gaya bicara yang dipakai oleh Natsir pada masa ini memperkuat kepercayaan mereka bahwa apa yang mereka lakukan ada dijalan agama.

Pemberontakan ini tidak berlangsung lama dan dengan mudah digagalkan oleh TNI. Hal ini mengejutkan para politisi Masyumi, termasuk Natsir, yang mengharapkan bahwa kolonel Hussein mampu untuk menolak tentara yang dikirim oleh AH Nasution. Tapi Padang jatuh ditangan tentara Jawa dari Divisi Diponegoro dan Brawijaya dalam waktu sehari tanpa ada resistensi militer. Selama beberapa minggu, Natsir dan politisi Masyumi bersembunyi di kota Bukittinggi. Keluarga Natsir, termasuk lima anaknya bergabung dengannya di kota itu. Natsir dan pemimpin lainnya terpaksa mengungsi dari Bukittinggi dan menjalani kehidupan gerilya didalam hutan Sumatera Barat. Pengalaman ini memperkuat kepercayaan mereka bahwa jalan yang mereka tempuh ini direstui oleh Tuhan. [80]

Masyarakat melihat kepergian Natsir, Burhanuddin dan Syafruddin bergabung dengan PRRI berarti pemberontakan tersebut salah partai Masyumi. Padahal kepergian Natsir dan yang lain atas dasar pribadi dan bukan atas nama partai.[81] Masyumi beserta PSI menjadi organisasi terlarang pada tahun 1961. Amnesti diberikan kepada pemberontak militer, tetapi semua pemipin politik Masyumi dijebloskan ke penjara. Natsir dijatuhi ditahan rumah semenjak tahun 1960 di Malang, dan setelah itu ditransfer ke penjara militer di Jalan Keagungan di Jakarta. Ia ikut bergabung dalam penjara beserta Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap yang telah ada disana sejak 1961.[82] Baru setelah jatuhnya Sukarno pada tahun 1966, Natsir diperbolehkan untuk balik ke rumahnya.

Usaha-usaha Natsir dan politisi Masyumi lain untuk membangkitkan kembali Masyumi yang telah menjadi organisasi terlarang oleh Sukarno pada tahun 1960 ini menemui kegagalan. Orde Baru tidak tertarik untuk menghidupkan kembali salah satu partai terbesar pada periode Demokrasi Liberal itu. Sebaliknya, ide utama Orde Baru adalah proses pengontrolan partai lewat pembatasan jumlah partai dan penggabungan partai-partai relijius konservatif kedalam satu partai bernama PPP. Jikapun Masyumi dapat dihidupkan kembali, Natsir sadar bahwa rejim baru Suharto tidak akan membiarkannya menjadi pemimpin partai baru tersebut. Keterbatasan politik dibawah Orde Baru tidak menyuruti semangatnya untuk menghidupkan kembali gerakan Islam modernis. Kalangan Islam modernis ini yang melihat Mohammad Natsir sebagai pemimpin politik dan spiritual menyebut diri mereka sebagai Keluarga Bulan Bintang. Mereka bukan golongan fundamentalis yang meminta pendirikaan Negara Islam, melainkan berusaha menafsirkan cara untuk membangun masyarakat Islam dan pengaruh partai Islam dalam masyarakat.

DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH – NATSIR SEBAGAI BAPAK ISLAM KONSERVATIF INDONESIA

Pemimpin-pemimpin Masyumi yang belum ditangkap pada masa setelah 'hijrah', secara reguler tetap bertemu untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi jikapun secara informal. Mohammad Roem dan Prawoto Mangkusasmito meneruskan pimpinan Natsir sebelum merekapun ditangkap oleh pemerintah pada tahun 1962. Keberadaan Masyumi bahkan dilanjutkan oleh diaspora Minang yang tinggal di Jakarta ketika mereka mulai berkumpul secara reguler di masjid Al Azhar di Kebayoran Baru. Dibalik Al Azhar adalah imam besar dan sosok utama yang melanjutkan perjuangan Masyumi, HAMKA. Hubungan HAMKA yang baik dengan pemimpin TNI, termasuk Jenderal Ahmad Nasution, menyelamatkannya dari penjara pada periode itu. Pasca kejatuhan Sukaro pada Desember 1965, sebuah Komite Koordinasi untuk Kegiatan Islam didirikan untuk mendorong pendirian kembali partai Masyumi. Mulai Mei 1966, pemimpin Masyumi, termasuk Natsir yang sudah keluar dari penjara pada waktu itu, mengadakan pertemuan di Menteng Raya no. 58 untuk mendorong pembentukkan Masyumi. Pada tahun 1967, Suharto menyatakan bahwa tentara dan rakyat korban PRRI tidak ingin menyaksikan kebangkitan kembali partai Masyumi. Pada tahun 1973, 'rasionalisasi' partai memaksa semua partai-partai Islam untuk bergabung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemimpin-pemimpin Masyumi periode demokrasi terpimpin tidak pernah bisa diterima oleh Suharto. Salah satu alasannya adalah ketidak-sukaan Suharto dengan pemimpin masa demokrasi parlementer karena Presiden baru Indonesia itu melihat demokrasi liberal gaya Barat itulah sebagai penyebab permasalahan bangsa.[83]

Disisi lain terdapat perbedaan signifikan antara pemikir Muslim generasi Natsir dengan generasi baru yang bercokol dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dalam grup diskusi 'Kelompok Terbatas' yang didalamnya termasuk Ahmad Wahib, Djohan Effendi, Dawam Rahardjo dan Nurcholis Madjid, seseorang yang sering disebut sebagai 'Natsir kecil' dan dilihat oleh Natsir sebagai calon pemimpin Masyumi dimasa mendatang. Tetapi sudut pandang generasi baru ini berbeda dengan Natsir. Nurcholis menolak politik. Ia mengatakan "Islam Yes, Islam Politik, No!" Natsir merasa dikhianati oleh generasi muda

intelektual Muslim dan mengkritik kebijakan 'sekulerisasi' mereka.

Dalam kondisi hilangnya masa depan partai Masyumi dibarengi dengan apa yang dianggapnya sebagai pengkhianatan generasi baru intelektual Muslim, maka Natsir bersama dengan Mohammad Roem, Anwar Haryono dan Yunan Nasution mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) pada tahun 1967. Kantor pusatnya berlokasi dimantan kantor pusat Masyumi. Pada tahun 1967, mereka menerbitkan media Dakwah Islam dan publikasi lainnya yang bertujuan untuk menyebarkan pemahaman Islam modernis. Agar menghindar dari persekusi Suharto yang curiga akan politik Islam, maka DDII dari awal mengarahkan para pendakwah Islam yang berada dibawahnya untuk mendengarkan pidato-pidato pembangunan dari pemerintah. Selain itu, dari awal DDII mendekati diri dengan Arab Saudi dan menjauhi dari pengaruh Sosialisme Nasional Gamal Abdul Nasser, agar otoritas Orde Baru tidak takut bahwa DDII membawa bibit-bibit ideologi sosialisme. Karena posisinya yang anti-Syiah, DDII menjadi saluran utama bantuan dakwah Arab Saudi. [84]

Islam modernis Natsir pada periode terakhir perjalanan karir intelektual politiknya berbeda dengan pandangan demokrat-pluralnya ketika aktif dalam negara ataupun sebagai pimpinan partai Masyumi pada zaman demokrasi parlementer. Dalam artikel pertama yang ditulis oleh HAMKA, tema utama yang diangkat adalah bahaya dari Kristenisasi. Hal ini kemungkinan didorong oleh banyaknya orang-orang mantan simpatisan Komunis yang pindah ke agama Kristen ataupun Katolik pasca 1965.[85] Pandangan Natsir dan pimpinan Masyumi lainnya yang pada tahun 1950an pro-Barat guna menghadapi Komunisme, berubah menjadi anti-Barat dan melihat kegiatan mereka sebagai serangan atas Islam. Mentalitas Natsir melihat Islam dalam kondisi dikepung oleh kekuatan-kekuatan besar dunia, seperti Gereja Barat ataupun dikekang oleh negara dan rejim baru Indonesia.

Pada pidato Idul Fitri 1968, Natsir mengkritik tajam usaha-usaha zending Gereja dan memaknai usaha-usaha gereja dan LSM yang berafiliasi dengan gereja dalam kegiatan bantuan ekonomi dan pembangunan masyarakat sebagai sebuah serangan terhadap umat Islam. Sepanjang tahun 1970an dan 1980an, kritikan Natsir atas apa yang dianggapnya sebagai serangan gereja Kristen dan Katolik atas umat Islam nyaring terdengar dalam masjid-masjid yang berafiliasi dalam Dewan Dakwah Islam Indonesia.[86] Natsir mengajak umat Kristen untuk mencari modus vivendi atau cara untuk hidup saling berdampingan, tetapi ia juga mengancam bahwa jika usaha gereja ini terus berlanjut, maka akan dimusuhi oleh umat Islam. "Kami ummat Islam tidak apriori menganggap musuh terhadap orang yang bukan Islam. Tetapi tegas pula Allah SWT melarang kami bersahabat dengan orang-orang yang mengganggu agama kami, agama Islam. Maka kami anggap zalim perbuatan demikian."[87] Natsir mengkritik kebijakan massa mengambang Orde Baru dan melihatnya sebagai sesuatu yang mempermudah proses zending gereja. Jika Natsir pada tahun 1930an melihat sekolah dan pendidikan sebagai cara Belanda untuk menghancurkan umat Islam, pada tahun 1970an, ia melihat pembangunan dan gerakan-gerakan perbaikan masyarakat memiliki potensi yang sama. Oleh karenanya, pembangunan Orde Baru harus bisa dikontrol agar tidak merugikan umat.

Dewan Dakwah Islam Indonesia ingin melatih dakwah yang kritis dan menggunakan akal, yaitu akal yang berbasis pada al Quran. Sekali-lagi ini adalah repetisi terhadap pemikiran yang telah dikembangkan Natsir di tahun 1930an. Dalam sebuah buku yang diterbitkan tahun 1947 berjudul *Islam dan Akal Merdeka*, Natsir sekali lagi mengulangi diskusi yang sering dia utarakan dalam artikel-artikel masa kolonialnya akan pentingnya kritis terhadap akal Barat itu sendiri. Natsir paham mengenai kekuatan orientalisme Barat sejak masa mudanya di Bandung yang kemungkinan didapatkannya lewat ide-ide transnasional Islam modernis yang telah berkembang dengan kecurigaan tinggi terhadap Barat.

PENUTUP

George McTurner Kahin, ahli Indonesia yang telah menjalin persahabatan lama dengan Mohammad Natsir, menuliskan ini dalam obituari Natsir di awal Februari 1993: "Raksasa terakhir diantara pemimpin politik yang nasionalis dan revolusioner, Natsir tanpa diragukan telah mempengaruhi perkembangan pemikiran dan politik Islam di Indonesia pasca-Perang Dunia dibandingkan pemimpin-pemimpin lain semasanya. Dengan sifatnya yang amat bersahaja dan tidak sombong, reputasinya sebagai seorang yang memiliki integritas tinggi dan kejujuran politik sepenuhnya layak."[88] Tak dapat dipungkiri bahwa gerakan modernis Muslim Indonesia masa kini hampir tak mungkin bisa seperti ini tanpa Mohammad Natsir. Ketika DDII berdiri pada tahun 1968, Natsir berkata: "dulu kita berdakwah dengan politik, sekarang kita berpolitik dengan dakwah."[89] Amien Rais, yang merupakan salah satu tokoh yang membawa Muhammadiyah masuk kembali ke politik pada zaman pasca-Suharto, menulis sebuah buku yang berterima-kasih kepada Natsir karena telah memberi jalan pendakwahan modern. Tak dapat dipungkiri bahwa benih Islam modernis gaya Natsir telah tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik utama dalam masyarakat Indonesia mutakhir pasca Orde Baru.

Tetapi seperti yang kita lihat diatas, Natsir merupakan tokoh yang rumit dan kadang paradoksal. Peringainya yang ramah dan sederhana tampaknya menyembunyikan amarah di dalam dadanya atas apa yang ia anggap sebagai ketidak-adilan dunia atas umatnya. Hal ini sudah nampak sejak dia muda, ketika kekukatan asimetris kolonial menghina dia dan bangsanya dalam ruang kelas AMS di Bandung kala itu. Timbul pertanyaan apakah jika Natsir dan Masyumi mencapai sebagian dari tujuan-tujuan politiknya, dan tidak dilarang dan dipermalukan seperti yang terjadi dimasa periode Demokrasi Terpimpin, ketika ia sekeluarga, orang elit kota Jakarta, harus bersembunyi dalam kelebatan hutan Sumatera, apakah pandangan Natsir tidak akan dipenuhi oleh perasaan dikepung dan ditindas? Bagaimanapun, terdapat dalam cerita panjang karir politiknya, seorang sosok Natsir yang demokratis, pluralis, mau bekerja-sama dengan mantan musuh ideologisnya

untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Terdapat sosok bersahaja yang menjadi anak emas Sukarno dan penuh simpatis terhadap perjuangan politik kaum minoritas bangsa. Disini, sosok Natsir sebagai Perdana Menteri yang demokratis, percaya akan keberagaman dan punya penghormatan terhadap beragam kaum yang tinggal di Indonesia merupakan sosok yang penting untuk diingat dan dirayakan untuk menjembatani perbedaan ideologis yang masih mewarnai politik demokrasi Indonesia dimasa kini dan di masa yang akan datang.

ENDNOTES

1 Mohammad Natsir. (2008). *Capita Selecta. Vol. I.* hlm. 369.

2 Sebagai contoh, perkataan Sukarno untuk mengganti tanah ke sabun dalam pembersihan barang yang kena najis, dalam hal ini air liur anjing. Menurut Natsir, logika tidak bisa mengalahkan perintah agama dan melakukan hal demikian itu akan menghapuskan agama itu sendiri. Mohammad Natsir, *Capita Selekta,* hlm. 246-255.

3

4 Mohammad Natsir, *Islam sebagai Ideologi*, h. 6.

5 Audrey R. Kahin (2012). *A Political Biography of Mohammad Natsir*, hlm. 51.

6 George McTurnan Kahin. *Indonesian Revolution*, p.

7 Solihin Salam. *Wajah Nasional* (Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam. 1990), hal 131.

8 Serial Tempo. *Natsir: Politik Santun di Antara Dua Rezim.*

9 Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya.* Hal 21

10 Deliar Noer, *Gerakan Islam Modern 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 100.

11 Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia,* h. 20.

12 Audrey Kahin, *A Political Biography of Mohammad Natsir*, p. 7.

13 *Idem*.

14 Taufik Abdullah, "Natsir, Seorang Guru Perfeksionis Filosofis" dalam *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Pustaka Firdaus: Jakarta, 1996, p. 24.

15 Ajip Rosidi. *M. Natsir. Sebuah Biografi*, p. 49.

16 Azyumardi Azra, "The transmission of al Manar Reformism to the Malay-Indonesian world: the cases of al-Iman and al-Munir. *Studia Islamika*, vol. 6, no. 3, 1999.

17 *Idem*.

18 Lihat dalam HJ. Benda. *Islam Indonesia di Masa Pendudukan Jepang.*

19 Audrey Kahin, *A Political Biography of Mohammad Natsir.* hlm. 29.

20 Audrey Kahin, *A Political Biography of Mohammad Natsir.* hlm. 12.

21 Dardiri Husni. *Jong Islamieten Bond: A Study of Muslim Youth Movement in Indonesia During the Dutch Colonial Era 1924-1942*. Thesis Master McGill University 1998. hlm. 44.

22 Audrey Kahin, *A Political Biography of Mohammad Natsir.* hlm. 12.

23 *Natsir: Politik Santun di Antara Dua Rezim.* Serial Tempo. hlm. 14

24 Audrey Kahin, *Loc.Cit.* Hal 9.

25 Mohammad Natsir. "InsyaAllah: Roem tetap Roem" di *Mohammad Roem. 70 Tahun Pejuang Perunding* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). Hal 209.

26 Dzulfikriddin, *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*. hal 21.

27 Dzulfikriddin, *Ibid*, hal 22

28 Audrey Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir.* 2012.Singapore: NUS Singapore. Hal 28.

29 Pembela Islam sendiri merupakan majalah yang terbit sebanyak 71 kali antara tahun 1929 hingga 1932 dengan tiras pembaca mencapai 2000 pelanggan tersebar di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera Barat, Siam dan Malaysia. Pembela Islam beberapa kali bersengketa dengan aktivis nasionalis sekuler (terutama PNI) mengenai gagasan negara dan Islam.

30 Audrey Kahin, *A Political Biography of Mohammad Natsir*, hlm. 13.

31 Audrey Kahin. *A Political Biography of Mohammad Natsir*, hlm. 11.

32 Audrey Kahin. *A Political Biography of Mohammad Natsir*, hlm. 28.

33 Capita Selekta. Vol I. p. 54.

34 Capita Selekta. Vol I. p. 58.

35 Capita Selekta. Vol I. p. 163.

36 Capita Selekta. Vol I. p. 164.

37 Mohammad Natsir, Islam sebagai Ideologi, h. 24.

38 Mohammad Natsir, Islam sebagai Ideologi, h. 23.

39 Audrey Kahin. *Islam, Nationalism and Democracy: A Political Biography of Mohammad Natsir.* 2012 (NUS Press, Singapore). hal 14.

40 Azyumardi Azra, "Sukiman: Potret Seni Politik Indah" dalam *Pandji Masyarakat* No. 477, 21 Agustus 1985 Hal. 29. Lihat juga Deliar Noer, *Gerakan Islam Modern*, hal 177-178.

41 Yusril Ihza Mahendra. "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik M. Natsir" dalam *Islamika* No 3, Januari - Maret1994, hal 65.

42 George McTurner Kahin, "In Memoriam: Mohammad Hatta (1902-1980)." Indonesia, no. 30, 1980, p. 114

43 Mohammad Natsir. 70 Tahun Kenang-keangan dan perjuangannya, p. 71.

44 Mohammad Natsir. 70 Tahun Kenang-keangan dan perjuangannya, p. 72-73.

45 *Mohammad Natsir. 70 tahun Kenang-keangan Kehidupan dan Perjuangan*, p. 80.

46 Audrey Kahin, *A political biography of Mohammad Natsir*, p. 50-51.

47 *Mohammad Natsir. 70 tahun kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan*, p. 80-83.

48 *Ibid*.

49 Audrey Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy*, p. 64-65.

50 Mohammad Natsir, 70 tahun Kenang2an Kehidupan dan Perjuangan, p. 100-101.

51 Mohammad Natsir, 70 tahun Kenang2an Kehidupan dan Perjuangan, p. 102.

52 Audrey Kahin, *Islam, Nationalism and Democracy*, p. 66-67.

53 Mohammad Natsir, 70 tahun Kenang2an Kehidupan dan Perjuangan, p. 107

54 Mohammad Natsir, 70 tahun Kenang2an Kehidupan dan Perjuangan, p. 107.

55 *Mohammad Natsir. 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, p. 106.

56 *Java Post*, 5 Oktober 1950.

57 *Java Post*, 4 Oktober 1950

58 *Java Post*, 10 Oktober 1950

59 *Java Post*, 7 Oktober 1950

60 *Mohammad Natsir. 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, p. 111.

61 Bustanuddin Agus, "Mohammad Natsir. Demokrat tulen?" dalam *100 Tahun Mohammad Natsir. Berdamai dengan Sejarah*, p. 54.

62 Chiarra Formichi, *Islam and the Making of the Nation. Kartosuwirjo and political Islam in twentieth-century Indonesia*, p. 111.

63 Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*.

64 Audrey Kahin, A Political Biography of Mohammad Natsir, p. 76.

65

66 Remy Madinier. *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral.* 2013 (Mizan, Jakarta). Hal 157.

67 *Ibid*, hal 161

68 *Berita Masjumi*, 16 Mei 1951

69 *Ibid*, hal 160.

70 Mohammad Natsir. 70 tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, p. 118-119.

71 Kepercayaan ini mendorong Perdana Menteri dari Masyumi untuk menggolkan pemilu; bahkan UU Pemilu dan penyelenggaraannya akan dilakukan dibawah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap yang berasal dari Masyumi. Sebaliknya, ada kecendrungan dari kalangan PNI untuk menunda pemilu.

72 Amien Rais. (2004). *Hubungan antara politik dan dakwah. Berguru kepada M. Natsir*. Bandung: Mujahid Press.

73 Mohammad Natsir. *70 tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, p. 132-165.

74 Mohammad Natsir. *Islam sebagai Ideologie*. p. 24-25.

75 Audrey Kahin. *Islam, nationalism and democracy*. p. 25.

76 Mohammad Natsir. (1974). *Dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Jafar Shadiq. h. 28-29; Mohammad Natsir. (1980). *Mencari Modus Vivendi antar Ummat Beragama di Indonesia*.

77 Audrey Kahin, p. 118-119.

78 Audrey Kahin, p. 119.

79 Remy Madinier, p. 427.

80 Audrey Kahin, p.

81 Howard Federspiel, *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, p. 189.

82 Remy Madinier, p. 426.

83 Remy Madinier, p. 433.

84 Noerhaidi Hassan, "The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development." *Comparative Studies of Southeast Asia, Africa and the Middle East*, Vol. 27, no. 1, 2007. p. 88.

85 Robert Hefner, "Print Islam: Mass Media and Ideological Rivalries among Indonesian Muslims." p. 83.

86 M. Natsir. *Mencari modus vivendi antar ummat beragama di Indonesia*, 1980.

87 M. Natsir. *Dari masa ke masa.* p. 34.

88 George McT. Kahin, *In Memoriam: Mohammad Natsir (1907-1993).* Indonesia, p. 159. "Last of the giants among Indonesia's nationalist and revolutionary political leaders, he undoubtedly had more influence on the course of Islamic thoughts and politics in postwar Indonesia than any of his contemporaries. By nature highly modest and unpretentious, he had a well-deserved reputation for personal integrity and political probility."

SUKIMAN WIRYOSANJOYO

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO:

Pemimpin Islam Nasionalis

"… kita semua menyediakan jiwa dan raga, harta kita untuk kepentingan nusa dan bangsa dalam rangka berbakti pada Allah S.W.T."

Sukiman Wirjosandjojo, 1959[1]

PENGANTAR

Salah satu persoalan utama yang muncul dalam politik Indonesia pada dekade 1950-an adalah mempertemukan dua kekuatan utama waktu itu: kelompok Islam dan nasionalis. Pada satu era pemerintahan perdana menteri, nama Sukiman muncul menggantikan Natsir sebagai pemimpin kabinet. Walaupun berasal dari partai yang sama dengan pendahulunya, yakni Masyumi, Sukiman adalah figur yang berbeda dengan Natsir. Ia merepresentasikan kalangan Islam yang menganggap munculnya Indonesia, sebuah negara sekuler, bukan sebagai ancaman. Sukiman juga menjadi tokoh Islam yang mampu menjadi jembatan penghubung kekuatan-kekuatan politik di Indonesia saat itu. Meskipun dikenal memiliki sikap politik yang keras terhadap kelompok kiri, ia adalah orang yang dapat diterima oleh berbagai kalangan: nasionalis; dan kalangan Islam yang biasa disebut tradisionalis—bahkan setelah keluarnya NU dari Masyumi. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri, Sukiman juga mampu meningkatkan reputasi Indonesia di hadapan negara-negara barat non-Belanda, pada saat bangsa ini tengah terbelit oleh berbagai persoalan yang disisakan terutama oleh konsensi-konsensi yang dihasilkan dari KMB. Perjalanan Sukiman—atau Pak Dokter ia biasa dikenal—yang merupakan sosok pemimpin Islam nasionalis bermula dari sebuah keluarga Jawa yang tinggal di kampung tepi Sungai Bengawan Solo di Surakarta.

KELUARGA JAWA DAN KAWAN BELANDANYA

Dalam sejarah Indonesia, tidak banyak tercatat sebuah keluarga yang melahirkan dua tokoh besar sekaligus. Satu dari sedikit itu adalah keluarga Wirjosandjojo yang tinggal di Kampung Beton Surakarta—sebuah pemukiman penduduk Jawa biasa di pinggir aliran Sungai Bengawan Solo. Dari keluarga Wirjosandjojo terlahir dua orang anak laki-laki: Satiman dan adiknya bernama Sukiman, keduanya adalah dokter Jawa yang dikenang dalam sejarah oleh karena jasa dan kiprah politiknya bagi bangsa Indonesia. Satiman adalah tokoh penting yang membidani kelahiran salah satu organisasi pergerakan bangsa Jawa pada awal abad ke-20. Adapun Sukiman merupakan tokoh Masyumi yang juga pernah menjabat sebagai perdana menteri keenam pada era Sukarno. Lebih dari sekedar posisi pentingnya dalam pemerintahan pada awal kemerdekaan Indonesia, seperti yang ditunjukan oleh banyak sejarawan,[2] bahwa Sukiman—bersama M. Natsir—merupakan dua tokoh terpenting dan paling berpengaruh dalam partai politik Islam terbesar waktu itu, Masyumi.

Satiman dan Sukiman terlahir dari keluarga pedagang biasa yang menjalankan usaha jual beli kebutuhan pokok skala sedang. Namun keduanya cukup beruntung karena orang tuanya terbilang cukup mapan secara ekonomi paling tidak untuk ukuran penduduk desa saat itu, sehingga, keduanya tumbuh dan dibesarkan dengan kondisi yang baik. Lebih dari itu, Wirjosandjojo yang dikenal sebagai seorang saudagar juga memiliki cakrawala berpikir yang luas dan maju. Ia melihat pendidikan adalah hal penting, untuk itu anak laki-laki dari keluarga ini disekolahkan hingga jenjang yang tinggi. Tanpa segan, Wirjosandjojo memasukan anak-anaknya ke sekolah modern yang menganut model pendidikan ala barat.

Sukiman terlahir pada 18 Juli 1898 sebagai putra bungsu dalam keluarga Wirjosandjojo yang memiliki empat orang anak: dua orang putra dan dua orang putri. Dua kakak perempuannya, Kartoyo dan Wiyoso, adalah anak pertama dan kedua, adapun Satiman merupakan saudara laki-lakinya yang terpaut usia sedikit lebih tua di atasnya. Masa kecil Sukiman tidak ubahnya anak kecil pada umumnya yang menikmati permainan-permainan yang menyenangkan, namun adakalanya pula ia harus membantu orang tua, dan pergi ke sekolah.

Untuk urusan sekolah, Sukiman sebenarnya cukup terlambat, meskipun hal yang demikian itu dapat dimaklumi dan sudah lumrah terjadi pada anak desa sebayanya. Di sekolah, Sukiman juga tidak begitu menonjol. Ia tidak pintar, namun juga tidak bodoh: sedang-sedang saja. Hanya saja, dua faktor penting dalam hidupnya yang membuatnya sehingga pendidikannya dapat terus berlanjut hingga tingkat yang tinggi, bahkan ia memperoleh hak istimewa untuk masuk ke sekolah untuk anak-anak orang Eropa dan bumiputera kelas atas. Kedua hal tersebut adalah peran Nyonya Wirjosandjojo—ibunya, dan pertemanan ayahnya dengan seorang Belanda bernama Van Der Wall.

Nyonya Wirjosandjojo, merupakan perempuan desa yang teremansipasi. Di lingkungannya, ibunda Sukiman dikenal sebagai *mubalighah*—pendakwah perempuan yang menyebarkan agama Islam. Ia biasa memberi ceramah di majelis-majelis pengajian, juga di desa-desa. Sebagai pendakwah perempuan, Nyonya Wirjosandjojo tentu memiliki keiistimewaan. Dapat dibayangkan pada saat itu, perempuan yang memiliki kemampuan seperti Nyonya Wirjosandjojo tidaklah banyak bahkan dapat dihitung dengan jari, terlebih lagi untuk berbicara soal agama lebih kerap menjadi ranah kaum pria ketimbang perempuan, sehingga dapat diketahui bahwa Nyonya Wirjosandjojo

termasuk perempuan yang melek literasi. Lebih dari itu, Nyonya Wirjosandjojo juga merupakan pribadi yang kreatif. Ia tidak hanya piawai dalam hal ilmu agama, namun juga sosok ulet yang kaya dengan ide-ide cemerlang. Suatu saat, Nyonya Wirjosandjojo memperoleh hak untuk mendirikan rumah gadai (*pandhuis*) dari pemerintah. Walaupun, pada kenyataannnya, ia tidak bersedia meneruskan bisnis ini karena menurut pemahaman agama yang dimilikinya, pegadaian adalah usaha yang terlarang. Sukiman, seperti halnya Satiman, tentu beruntung. Walaupun bukan termasuk keturunan ningrat kelas atas, atau pegawai berpangkat pangkat tinggi, keduanya dilahirkan dan diasuh oleh perempuan teremansipasi, yang juga taat kepada agama.

Tokoh lain yang memiliki peranan tak kalah penting bagi keduanya adalah seorang Belanda bernama Van Der Wall. Ia merupakan pensiunan tentara yang memilih tidak kembali ke negaranya melainkan menetap di Boyolali untuk mengabdikan sisa hidupnya bagi kemanusiaan. Di kota yang berjarak tidak terlalu jauh dari Solo itu, Van Der Wall membangun asrama sekaligus sekolahan. Hubungan Sukiman dengan Van Der Wall terjalin melalui bapaknya. Wirjosandjojo adalah orang yang dipercaya Van Der Wall untuk mengurus kebutuhan pokok, terutama bahan pangan, bagi anak-anak yang tinggal di asrama yang ia kelola. Relasi bisnis ini berkembang menjadi pertemanan yang akrab, hingga Wirjosandjojo menitipkan kedua anak laki-lakinya kepada Van Der Wall untuk diangkat anak. Sejak itu, kedua bersaudara pindah ke Boyolali.

Atas pertolongan mantan tentara ini para putra Wirjosandjojo dapat menempuh pendidikan dasar pada sekolahan elit. Karena Sukiman dan Satiman diangkat sebagai anak dari Van Der Wall, tidak tanggung-tanggung, keduanya dapat diterima di ELS (*Europesche Lagere School*)—sekolah dasar yang khusus diperuntukan bagi anak-anak orang Eropa maupun golongan bangsa lain dari kalangan terkemuka. Tentu untuk bersekolah di ELS yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar, keduanya harus bekerja keras dan tekun, terlebih lagi keduanya besar dari keluarga Jawa dan Islam yang tidak begitu akrab dengan Bahasa Belanda. Walaupun bukan yang terbaik, kedua bersaudara ini dapat menyelesaikan sekolahnya di ELS. Satiman yang lulus lebih dahulu kemudian melanjutkan pendidikannya di STOVIA. Langkah Satiman ini kemudian disusul oleh adiknya setelah ia memperoleh ijazah dari ELS Boyolali.

STOVIA DAN DUNIA PERGERAKAN BATAVIA

Pada tahun 1898, sekolah yang sebelumnya bernama 'Sekolah Pendidikan Ahli Ilmu Kedokteran Pribumi' berubah nama menjadi 'Sekolah Dokter Pribumi' atau dalam bahasa Belanda disebut *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* namun lebih popoler disebut STOVIA. Sekolah ini berada di Batavia yang dibangun dengan maksud untuk dapat mencetak para dokter Jawa (pribumi) guna memerangi berbagai penyakit dan ancaman kesahatan yang terjadi pada masyarakat tanah jajahan. Selain didorong oleh kurangnya tenaga kesehatan bangsa Belanda, alasan perlunya para dokter Jawa ini juga terkait dengan segregasi sosial, dan ketakutan para pemukim Eropa akan ancaman penyakit tropis yang mematikan yang sewaktu-waktu dapat ditularkan oleh para tetangga pribumi mereka.

STOVIA tidak hanya menjadi sekolah bagi para calon dokter Jawa, melainkan pula menjadi persemaian gagasan politik kelompok muda terdidik bangsa Indonesia, sekaligus titik temu bagi kalangan pergerakan nasional. Pada 1908, Budi Oetomo yang dianggap sebagai pelopor bagi kemunculan organisasi pergerakan lainnya dibentuk oleh para priyayi Jawa yang belajar di STOVIA. Tak berselang lama kemudian berbagai organisasi yang menggunakan latar belakang etniskultural sebagai identitas bermunculan, seperti Tri Koro Dharmo (1915), Jong Sumatera Bond (1917), Studerenden Vereeniging Minahasa (1918) dan Jong Ambon (1918). Tri Koro Dharmo yang pada tahun 1918 berubah menjadi Jong Java merupakan organisasi untuk menghimpun para pemuda yang dicetuskan oleh Satiman.

Sedikit berbeda dengan yang terjadi di luar gedung sekolahan di mana berbagai organisasi dengan berbagai macam arah ideologi baik agama maupun sekuler bermunculan, organisasi yang berkembang di dalam STOVIA umumnya berupa perkumpulan kedaerahan yang cenderung lunak dan tidak terlalu politis. Situasi di STOVIA memang sangat mendukung bagi kemunculan organisasi pergerakan. Sekolah ini menampung para pelajar dari berbagai daerah di wilayah Hindia Belanda yang menjadikan wajar—ketika gagasan mengenai bangsa Indonesia belum diformulasikan—masing-masing kelopok menggunakan identitas kedaerahannya. Selain itu, atas jasa Dr. H.F. Roll,[3] gedung STOVIA yang berhasil dibangun sebagai sebuah komplek yang terdiri atas beberapa bangunan dengan dikelilingi pagar rapi. Sulitnya orang keluar masuk lingkungan STOVIA tentu menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan pada sisi lain turut menciptakan interaksi yang intensif antar sesama mereka. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri, sikap yang terlalu mengagungkan primordialisme dan belum adanya ikatan persatuan sebagai suatu bangsa menjadi salah satu masalah kaum pergerakan waktu itu yang kerap kali melahirkan pertentangan-pertentangan tajam. Pada saatnya nanti, Sukiman akan turut berperan dalam menyelesaikan persoalan ini saat ia memimpin Perhimpunan Indonesia.

Setelah menghabiskan tujuh tahun hidup di Boyolali bersama keluarga Van Der Wall, Sukiman berangkat ke Batavia. Pada 1914, setahun sebelum kakaknya mendeklarasikan berdirinya Tri Koro Darmo, Sukiman resmi terdaftar sebagai siswa sekolah dokter Jawa atas beasiswa pemerintah kolonial. Di sekolah ini, ia memulai kisah hidup baru di ibu kota koloni yang tengah semarak dengan aktivitas pergerakan. Batavia pada awal abad ke-20, adalah kota yang melahirkan gagasan kesadaran nasional yang banyak menghinggapi benak kaum pribumi urban dan golongan cendekia-terpelajar yang menimba ilmu di berbagai jenjang pendidikan. Di kota tempat dimana Sukiman belajar menjadi juru sembuh modern ini, industri media cetak bumiputera telah berkembang, demikian pula dengan ideologi-ideologi baru yang mekar, ada pula berbagai bentuk hiburan populer seperti film; teater stambul; dan musik keroncong, yang semuanya itu hadir dalam suasana penderitaan di bawah penjajahan Belanda. Menurut Adrian

Vickers, kota itu telah memiliki komposisi yang tepat bagi bersemainya gagasan kesadaran nasional.[4]

Sama seperti kakaknya, Sukiman tidak hanya menjadikan STOVIA sebagai jalan memperoleh ijazah *indische art* semata, Ia juga menjadikan STOVIA sebagai sarana untuk memajukan bangsa melalui organisasi yang ada. Tanpa disadarinya, kiprahnya dalam Jong Java menjadi awal pembuka bagi karirnya di masa depan, bukan sebagai dokter melainkan politisi. Organisasi pertama yang diikuti Sukiman di mana kakaknya menjadi tokoh penting di dalamnya terbilang unik. Gagasan awal dari Jong Java tidaklah berorientasi politik melainkan untuk memajukan pendidikan, kebudayaan, dan kesenian. Bahkan hingga kongresnya yang ke-5, Jong Java masih bersifat apolitis. Meskipun demikian, Jong Java telah menyadari pentingnya persatuan dalam konteks Jawa Raya terutama sejak kongresnya yang pertama,[5] dan bermaksud menjadi wadah bagi para pemuda dari Sunda, Madura, dan Bali. Pernah pula dilakukan usaha untuk menggabungkan organisasi ini dengan Jong Sumatra Bond namun tidak berhasil. Adapun pengaruh yang menyebabkan organisasi ini berubah menjadi lebih politis tampaknya muncul dari tokoh SI dari Sumatra, K.H. Agus Salim, hanya saja ketika itu Sukiman sudah tidak lagi terlibat secara langsung dalam perkumpulan. Oleh karena pengaruh K.H. Agus Salim, banyak anggota perkumpulan yang kemudian ikut aktif dalam Jong Islamineten Bond (JIB).[6] Nantinya, tokoh ini akan cukup banyak terlibat dalam kisah hidup Sukiman.

Setelah menempuh kurang lebih separuh dari masa pendidikannya di STOVIA, sekolah Sukiman nyaris terhenti. Hal ini bukan disebabkan oleh karena aktivitas politiknya dalam perkumpulan, maupun masalah biaya sebagaimana yang lumrah dialami oleh kebanyakan orang. Sukiman saat itu tergiur dengan tawaran untuk bekerja di suatu perusahaan kereta api. Tampaknya, upah sebagai pegawai jawatan kereta api yang terasa sangat besar bagi Sukiman muda sangat menggodanya, sehingga keputusan penting untuk berhenti dari STOVIA nyaris ia ambil. Hanya saja niat ini tidak memperoleh restu dari Wirjosandjojo yang menginginkan Sukiman dapat menjadi dokter seperti kakaknya. Setelah cukup lama bernegosiasi dengan ayahnya, juga bergulat dengan keinginan pribadi dan harapan orang tua, Sukiman akhirnya mengambil keputusan untuk melanjutkan studinya di STOVIA. Di balik luluhnya hati Sukiman untuk menuruti kehendak ayahnya, terdapat suatu perjanjian antara keduanya. Sukiman meminta ayahnya untuk memfasilitasinya pergi ke Belanda guna melanjutkan studinya. Di usianya yang baru menginjak duapuluhan tahun, Sukiman telah bercita-cita besar bahwa ia tidak hanya ingin menjadi dokter Jawa biasa, melainkan seorang dokter penuh yang unggul di bidangnya. Untuk itu, ia berniat meneruskan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Amsterdam.

NEGERI BELANDA DAN PERHIMPUNAN INDONESIA

Memasuki paruh kedua abad ke-20, terobosan penting dalam bidang pendidikan terjadi, berupa kemudahan yang diberikan kepada para lulusan STOVIA dan Rechtsschool di Hindia untuk melanjutkan pendidikan di negeri Belanda. Jumlah mahasiswapun meningkat tajam, terlebih lagi jalur yang menghubungkan Asia-Eropa telah pulih sepenuhnya seusai perang dunia I berakhir.[7] Dalam sebuah *passagierslijst* (daftar penumpang) yang dimuat *De Indische courant* pada pertengahan tahun 1923, nama Sukiman Wirjosandjojo tercatat sebagai satu-satunya orang Indonesia yang menumpang kapal uap Johan de Witt. Kapal dengan J. Albert sebagai kapten berangkat dari Batavia pada bulan Juli menuju Amsterdam, dengan rute pelayaran melewati Singapore, Belawan-Deli, Sabang, Suez, Port- Said, Genua, Mesir dan Southampton.[8] Tidak ada lagi sumber lain yang dapat dikonfirmasi, namun tampaknya inilah awal keberangkatan Sukiman ke Belanda. Saat itu, Sukiman telah lulus dari STOVIA dan telah menikah dengan putri kelima Dr Kermat bernama Kustami, seorang perempuan dengan pribadi menarik yang ia jumpai pada acara kongres Jong Java di Bogor.[9] Ketika Sukiman melanjutkan studi ke Amsterdam, Kustami tidak turut serta, ia dengan setia menunggu di tanah air, merawat buah hati pertama mereka bernama Sakri—yang kelahirannya tidak ditunggui oleh ayahnya.

Di Belanda Sukiman memperdalam ilmunya untuk menjadi spesialis paru-paru, yang banyak menjangkit penduduk pribumi sejak lama, dan masih minim penanganan karena kurangnya dokter pribumi yang ahli penyakit paru-paru. Dikarenakan penyakit ini tidak menjadi wabah yang besar dan mematikan—berbeda dengan penyakit Pes atau Sampar; Kolera maupun Malaria—pemerintah kolonial baru melakukan usaha serius untuk menanggulanginya pada sekitar 1917. Hanya saja, atmosfer pergerakan di Belanda membuat Sukiman tidak sekedar belajar soal medis, ia ternyata banyak mencurahkan waktunya juga untuk aktivitas perjuangan.

Seperti halnya ketika Sukiman mulai menetap di Batavia yang membuatnya berkiprah dalam organisasi pergerakan, saat ia memulai tinggal di Belanda, perjuangan pergerakan juga sedang marak di negeri penjajah itu. Hadirnya para mahasiswa baru yang membawa hasrat besar untuk perbaikan nasib tanah kelahirannya, ditambah lagi para orang buangan yang sudah sejak dekade pertama abad keduapuluh telah berdatangan, menambah banyak jumlah orang Indonesia di negeri Belanda, yang sekaligus membuat perkumpulan-perkumpulan dengan lebih mudah dibentuk dan digerakkan. Tatkala Sukiman tiba di Belanda, *Indonesische Vereeniging*—organisasi yang sebelumnya bernama *Indische Vereneging*—tengah memformulasikan arah perjuangan baru. Pada 1923, organisasi ini mulai mengakhiri tradisi dan semangat lama yang menjadikan perkumpulan ini hanya sekedar ajang bersenang-senang, ke arah yang lebih progresif bahkan radikal. Untuk kali pertama asas non-kooperasi dan bertujuan untuk perjuangan menuju persatuan diterapkan, dan nasionalisme radikal perhimpunan bangsa sawo matang mengemuka di Belanda. Melalui Majalah *Hindia Poetra*—organ penerbitan milik perhimpunan—gagasan-gagasan radikal yang menuntut kemerdekaan disuarakan. Setahun kemudian, *Hindia Putra* mengubah namanya menjadi *Indonesia Merdeka* yang lebih tegas dalam menyampaikan ide-ide keras melaui artikel yang umumnya sengaja dibuat anonim.

Di tahun itu, Perhimpunan Indonesia menerbitkan *Gedenkboek van het Indonesische Vereeniging (1908-1924*), buku kenangan ulang tahun yang ke-15 perhimpunan—yang kemudian menjadi sangat ikonik dengan visualisasi Banteng dan merah putih pada bagian sampulnya. Buku ini mengumpulkan 13 artikel sumbangan dari para anggota yang menggunakan nama samaran dalam setiap tulisannya. Salah satu tulisan dalam terbitan ini berjudul "*Nieuwe Banen*" (Tugas-tugas Baru) yang membuka uraian dengan membuat komparasi pergerakan kemerdekaan di Rusia, India, dan Irlandia dengan yang sedang berlangsung di Indonesia. Penulis kemudian menunjukan persamaan terpenting adalah sikap pemudanya di mana ia juga menakankan perkembangan gerakan pemuda Indonesia di Belanda menunjukan kemajuan yang sangat baik. Akhir tulisan ini ditutup dengan nada yang lebih keras dengan ujaran bahwa kemenangan bangsa Indonesia dapat diperoleh tidak dalam pekerjaan (yang diberikan penjajah), tidak pula dalam pemerintahan palsu dan badan perwakilan semu (volksraad yang dimandulkan), melainkan berasal dari kekuatan sendiri untuk membangun yang menjadi tugas pemimpin sekarang.

"Sakri Soenarto" yang disebut dalam akhir artikel sebagai penulis merupakan nama samaran Sukiman. Nama "Sakri" barangkali diambil dari nama puta pertamanya. Di balik pembawaannya yang kalem bahkan terkesan kaku, gagasan yang diejawantahkan dalam "Nieuwe Banen" menggambarkan sisi kritis dan radikalnya. Di sisi lain, ia juga menunjukan konsistensi terhadap prinsip yang dikatakannya untuk tidak menggantungkan diri baik untuk pekerjaan maupun dalam hal politik kepada pemerintah kolonial, sebagaimana yang nanti ia praktekan setelah kembali ke tanah air.

Dalam organisasi yang memiliki semangat baru itu, Sukiman, bersama sejumlah mahasiswa lain yang kesemuanya belum lama menginjakan kakinya di negeri Belanda seperti, Nazir Datoek Pamuntjak (ketua), dan A.A. Maramis (sekretaris) menjadi orang-orang yang dipercaya menjadi pengurus baru.[10] Bagi Sukiman yang telah akrab dengan dunia pergerakan saat di STOVIA, pengalaman ini tentu bukalah hal yang baru. Meskipun demikian, ia dapat meraskan lompatan yang sangat dasyat ketika berada di Belanda, dari gerakan politik yang kalem dan kooperatif ala Budi Utomo maupun Jong Java seperti yang pernah ia ikuti saat sekolah di Batavia, berubah drastis menjadi radikal dan berisi nada-nada keras yang disuarakan tanpa tedeng aling-aling. Lebih dari itu, baru pada tahun pertamanya menginjakan kaki di Belanda, Sukiman telah banyak berinteraksi dengan 'orang-orang buangan' pemerintah kolonial seperti anggota tiga serangkai, dan Semaoen—yang walaupun banyak menghabiskan waktu pengasingannya di Soviet namun tetap membina jejaringnya di Belanda—maupun sesama mahasiswa pemikir yang kritis semisal Hatta, dan Ali Sastroamidjojo.

Pada 1925, perubahan kepengurusan perhimpunan terjadi. Kali ini, Sukiman memperoleh mandat sebagai ketua perhimpunan, didampingi A.I.Z. Mononutu—mahasiswa hukum asal Manado yang saat pertama datang ke Belanda bersikap apolitis, namun kemudian berubah menjadi sangat nasionalis oleh karena pengaruh pidato-pidato di perhimpunan.[11]

Pengurus Perhimpunan Indonesia 1925

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jika sebelumnya nama *Indonesische Vereeneging* dan Perhimpunan Indonesia kerap digunakan secara bergantian, maka pada era kepengurusan Sukiman, nama Perhimpunan Indonesia (PI) digunakan secara resmi untuk menggantikan *Indonesiche Vereeneging*. Bersamaan dengan itu, perhimpunan juga mensepakati penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam keseharian maupun dalam rapat-rapat. Terbitan perhimpunan tidak berubah, tetap memuat artikel-artikel radikal. Dikarenakan Sukiman dan Mononutu harus meniggalkan Belanda, puncak kepengurusan organisasi ini kemudian digantikan oleh Boediarto mahasiswa hukum, dan Soerono mahasiswa kedokteran.[12]

PAK DOKTER

Sepulang dari Belanda dengan membawa ijazah Art (dokter penuh), Sukiman memilih tinggal di Yogyakarta besama keluarganya. Entah sejak kapan persisnya tetapi saat ia tinggal di Yogyakarta, Sukiman memperoleh julukan baru dengan panggilan Pak Dokter. Sapaan ini nantinya menjadi sangat populer di kalangan Masyumi—salah satu partai dimana Sukiman mencurahkan kiprah politiknya. Bagi Kustami, istri Sukiman, permulaan tinggal kota *vorstenlanden* itu merupakan tahun-tahun ketika ia harus banyak melakukan adaptasi, baik dikarenakan statusnya sebagai istri dan ibu, dan terlebih lagi karena latar kulturalnya yang berbeda. Kustami memang memiliki alur darah Jawa dari leluhur yang berasal dari Bagelen (Purworejo), akan tetapi ia dilahirkan di Barabai, Kalimantan Timur. Saat itu, ayahnya yang merupakan kawan satu angkatan Dr. Radjiman, memang memperoleh penugasan untuk bekerja di tanah seberang. Sedangkan keluarga intinya berada di Bogor. Kustami dibesarkan dalam keluarga dokter yang moderen yang terbiasa

berbicara Belanda dalam kesehariannya, dan ia pun menempuh pendidikan di sekolah Belanda. Adapun bahasa Melayu baru dibiasakannya ketika ia mulai aktif di Jong Java. Sehingga, pantas jika Kustami harus belajar bahasa Jawa ketika ia mulai menetap di kota Yogyakarta.[13]

Kustami, dalam beberapa sisi, memiliki kemiripan dengan Nyonya Wirjosandjojo. Paling tidak, keduanya sama-sama perempuan yang teremansipasi, keduanya adalah para perempuan terdidik pada zaman itu. Selain mahir berbahasa Belanda, membaca-tulis, dan pernah terlibat dalam aktivitas organisasi, Kustami juga memiliki beragam keterampilan yang dapat digunakannya untuk bekerja. Ia membuka kursus keterampilan bagi kaum perempuan yang mengajari mereka merangkai bunga, memasak, memotong, juga menjahit. Kursus ini menjadi terkenal dan memperoleh murid yang banyak dari berbagai tempat karena Kustami mengajarkan jenis keterampilan moderen yang disenangi oleh orang-orang Belanda seperti membuat topi perempuan model Eropa, dan aneka karangan bunga untuk pesta.

Pasangan Sukiman dan Kustami juga penyuka musik, dengan selera Eropa tentunya. Di balik pembawaannya yang datar dan cenderung dingin, Sukiman ternyata mahir memainkan biola untuk memperdengarkan musik klasik. Adapun sang nyonya piawai memainkan piano. Tampaknya, sepulang dari Belanda, Sukiman berhasil membangun rumah tangga ideal, gambaran dari keluarga pribumi modern Hindia Belanda awal abad ke-20.

Dengan pekerjaannya sebagai dokter lulusan Belanda, secara ekonomi Keluarga Sukiman lebih dari sekedar kecukupan. Ia memiliki rumah yang besar dengan halaman yang luas. Bahkan setelah kariernya sebagai juru sembuh semakin melejit, Sukiman mampu membeli beberapa mobil baik untuk keperluan pribadi maupun pelayanan kesehatan. Selain itu ia juga membangun klinik yang dilengkapi dengan alat rotgen. Semuanya itu tidak datang begitu saja, namun dirintisnya secara perlahan dengan penuh kerja keras. Terlebih lagi, Sukiman adalah dokter yang memiliki prinsip untuk tidak bekerja bagi pemerintah kolonial.

Di Yogyakarta, Sukiman memperoleh pekerjaan pertamanya sebagai dokter di klinik pengobatan milik Muhammadiyah, yang dikenal dengan nama PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem). Tawaran bekerja ini datang dari pimpinan Muhamadiyah waktu itu, K.H. Fahrudin, pada sekitar 1926. Saat itu, Sumowidagdo, dokter yang bertugas di PKO, dipindah tugaskan oleh pemerintah ke tempat lain. Kekosongan ini menjadi peluang bagi Sukiman untuk memperoleh pekerjaan tanpa harus berurusan ataupun menggantungkan hidupnya kepada pemerintah kolonial.

Selain bekerja untuk PKO, Sukiman juga membuka kliniknya sendiri yang terletak di sebelah Pura Pakualaman, tidak seberapa jauh dari pusat kota. Oleh karena reputasinya yang baik sebagai seorang dokter, dan tentunya karena kepakarannya dalam bidang medis yang terbentuk oleh ketekunan Sukiman yang kerap melakukan risetnya sendiri—klinik yang ia buka menjadi sangat terkenal dan paling laris. Pasien yang berobat ke kliniknya berasal dari berbagai daerah dan golongan—tidak hanya orang-orang pribumi melainkan Eropa dan Tionghoa. Artinya, reputasi Sukiman sebagai dokter telah bersanding dengan para dokter bangsa Eropa yang juga banyak membuka praktik di Yogyakarta. Salah satu pasien Sukiman adalah Ki Hadjar Dewantara—tokoh pendiri Tamansiswa, kawan saat Belanda, yang juga seorang jebolan STOVIA.[14] Didorong oleh kesuksesan adiknya yang mampu bekerja sendiri tanpa harus mengabdikan diri kepada pemerintah kolonial, Satiman yang lebih dahulu menjadi dokter Jawa berniat melanjutkan studi ke Belanda. Ia pun menitipkan keluarganya kepada Sukiman yang memang hidupnya serba berkecukupan.

ORGANISASI ISLAM

Pada fase ini, ada hal menarik yang terjadi dengan Sukiman yakni kedekatannya dengan Islam. Bukan hanya dalam hal pekerjaan dimana Sukiman menjadi dokter bagi badan sayap organisasi Muhammadiyah, ia juga mulai aktif dalam politik pergerakan Islam, sejak mulai menetap di Yogyakarta. Para lulusan Belanda pada umumnya akan dihadapkan pada sejumlah pilihan ketika mereka kembali ke Indonesia, walaupun banyak yang kemudian terjun ke dunia politik pergerakan, namun tidak semuanya alumni memilih jalan yang sama. Terutama untuk para mantan aktifis PI, banyak yang melanjutkan perjuangannya dengan membentuk *Studie Club* semisal Hatta, dan ada pula yang berpolitik melalui jalur partai seperti Ali Sastroamidjojo. Demikian pula yang dialami Sukiman. Sepulang dari Belanda, disamping membina kehidupan sebagaimana lumrahnya orang berkeluarga, ia masuk dalam Partai Sarikat Islam (PSI).

Pilihan politiknya itu cukup menarik mengingat sepanjang perjalanan hidupnya, Sukiman yang Jawa itu lebih dekat dengan gerakan nasionalis-sekuler seperti Jong Java dan PI di Belanda. Sukiman tidak memiliki latar pendidikan agama seperti halnya tokoh-tokoh Islam semisal Natsir yang mencerminkan pendidikan Islam moderen; maupun Wahid Hasyim sebagai representasi kalangan pesantren. Sukiman adalah produk murni dari sistem pendidikan barat, dan barangkali pengetahuannya tentang Islam lebih merupakan hasil yang ia peroleh dari keluarga semasa tinggal di Surakarta. Selama ini, gagasan-gagasan yang ia kembangkan terutama ketika mulai aktif di perhimpunan juga tidak bersentuhan dengan Islam baik sebagai pemikiran politik, apalagi pemikiran agama.

Moh. Roem—salah satu tokoh Masyumi yang memiliki kedekatan pribadi dengan Sukiman—memberikan penjelasan bahwasannya pilihan politik Sukiman merupakan bagian dari agenda besar PI yang meminta para anggotanya yang telah pulang ke tanah air untuk masuk dan memperkuat organisasi pergerakan yang ada. Ketika Sukiman kembali, PSI yang akar gerakannya berasal dari SDI yang kemudian berubah menjadi SI tengah dalam keadaan limbung. Pada sisi lain, partai dengan ideologi nasionalis seperti PNI yang tampaknya lebih cocok dengan latar belakang politik-ideologis Sukiman, masih dalam proses awal pembentukan.[15] Sedangkan, untuk turut dalam barisan partai berideologi kiri, Sukiman—yang nantinya menjadi salah satu tokoh yang dikenal atas sikap anti-komunisnya—tampaknya tidak begitu tertarik. Alasan ini menjadi masuk akal ketika melihat bahwa pada saat kembali Sukiman

berada di dalam lingkaran Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam bercorak modernis yang tidak terlalu politis.

Awal ketika Sukiman mulai menjadi anggota, PSI melakukan reorientasi perjuangannya. Partai ini mengubah gerak perjuangannnya menjadi lebih kooperatif, dan tujuannya untuk mencapai kemerdekaan nasional berdasarkan Islam. Pada 1929, PSI menambahkan kata Indonesia pada namanya yang kemudian berubah menjadi PSII. Meskipun demikian, kelompok yang menolak untuk melakukan pendekatan yang lebih moderat dalam perjuangan tetap memainkan peran penting dalam tubuh PSI. Salah satu tokohnya adalah K.H. Agus Salim yang cenderung menolak gagasan-gagasan sekuler, juga untuk bekerjasama dengan para nasionalis. Lebih dari itu, Ricklefs menunjukan bahwa ia juga tidak begitu suka dengan kemunculan orang-orang baru yang terbaratkan yang merupakan hasil pendidikan kolonial untuk turut berkecimpung di kancah pergerakan nasional.[16] Di dalam PSI, pengaruh K.H. Agus Salim, yang berusia sekitar sepuluh tahun lebih tua dari Sukiman, sangatlah besar. Ia menjadi salah satu tokoh senior yang sangat dihormati bersama dengan H.O.S. Tjokroaminoto yang disebut-sebut sebagai guru Sukarno dan sekaligus mertuanya.

Meskipun telah menjadi anggota PSI yang menerapkan disiplin partai secara ketat, latar belakang politik Sukiman membuatnya lebih mudah untuk berhubungan dengan orang-orang dari luar PSI, termasuk PNI. Hal ini segera terlihat ketika pada bulan Desember 1927. Menyadari pentingnya kerjasama yang bersifat lintas partai dan idelogi, Sukarno berhasil menyakinkan sejumlah kelompok politik yang ada pada waktu itu untuk membentuk organ payung yang dapat mempersatukan mereka. Keengganan muncul dari sejumlah kalangan sepuh di PSI seperti K.H. Agus Salim, namun Sukiman memberikan dukungan kepada Sukarno untuk membentuk PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Keduanya kemudian dipercaya untuk menjadi bagian penting dalam mewujudkan terbentuknya PPPKI. Pada akhirnya, kesatuan yang dibangun dalam PPPKI tidaklah bertahan lama, dan dengan segera muncul antagonisme mengenai berbagai hal, namun keberhasilan mewujudkan PPPKI yang berusia pendek itu telah menunjukan kapasitas Sukiman, sekaligus karakter politisi yang ia miliki.

Persoalan lain yang menunjukan dan mempertegas posisi Sukiman dalam gelanggang politik nasional waktu itu adalah ketika ia mulai masuk dalam pergerakan buruh. Bagi PSII, buruh merupakan kelompok yang penting dan perlu memperoleh perhatian partai untuk banyak alasan. Secara politis, kelompok ini paling banyak terpapar pengaruh kiri, sehingga tidak mengherankan jika sebelumnya pada 1920an, Agus Salim yang bertarung habis-habisan untuk melawan radikalisasi kaum komunis di tubuh organisasi buruh. Kedekatan Sukiman terhadap kaum buruh dan pergerakannya semakin dalam ketika diangkat sebagai ketua PPPH (Perserikatan Pegawai Pegadaian Hindia) yang sebelumnya dipimpin Martowardoyo—orang dekat H.O.S Cokroaminoto—tengah berada dalam gonjang-ganjing kepengurusan karena tuduhan penyelewengan keuangan perserikatan. Pengangkatannya sebagai orang penting di PPPH memiliki banyak alasan salah satunya didasarkan bahwa Sukiman yang memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaannnya sebagai dokter.[17]

Sukiman melangkah lebih jauh untuk melakukan antisipasi dampak krisis ekonomi yang terjadi di kalangan buruh. Ia melihat perlunya melakukan edukasi terhadap mereka agar dapat memahami hak-haknya serta mengukur dampak dari aksi bersama yang kerap mereka lakukan yang dimaksudkan agar tidak memperparah kondisi ekonomi yang akan turut berdampak pada kesejahtaeraan buruh. Bagi Sukiman hal ini dapat dilakukan melalui surat kabar. Untuk itu Sukiman meminta PPPH membeli surat kabar Islam *Moestika* yang terbit di Yogyakarta untuk kemudian dijadikan corong suara kaum buruh. *Moestika*—di mana Sukiman menjadi salah satu *stakeholder*, dan Agus Salim menjadi pimpinan redaksi—yang pada waktu itu juga sedang limbung memiliki banyak sekali hutang yang diantaranya adalah milik Sukiman.[18] Langkah ini berhasil dan lahirlah kemudian surat kabar buruh yang bertajuk "Oetoesan Indonesia". Sukiman yang menjadi editor penerbitan ini menggandeng Suryopranoto, Soeroso, dan Sjahrir yang baru saja pulang dari Belanda. Tidak berselang lama kemudian, turut bergabung Hatta yang pada bulan Agustus kembali setelah 12 tahun meninggalkan tanah air sebagai co-editor. Keterlibatan Hatta dalam penerbitan yang diinisiasi Sukiman memiliki banyak dimensi. Selain berhasil meyakinkan Hatta bahwa "Oetoesan Hindia" bukanlah milik partai, Sukiman juga mampu memposisikan dirinya sebagai jembatan yang dapat menghubungkan Hatta dengan Sukarno, dimana secara garis politik Hatta dengan PNI-Barunya merupakan oposisi Partindo—penerus PNI-Sukarno yang telah dilarang pemerintah kolonial.

Selama menjabat sebagai ketua PPPH, Sukiman melakukan ekseminasi terhadap ketidakberesan organisasi untuk mengatasi krisis yang dialami oleh para karyawan pegadaian di Hindia Belanda. Pada saat itu terjadi pemecatan pegawai Pegadaian di Hindia Belanda besar-besaran hingga mencapai 500 orang, atau sepertiga total anggota PPPH. Mereka diberhentikan karena dianggap tidak mampu bekerja. Agenda Sukiman waktu itu adalah untuk memperjuangkan nasib para pegawai pegadaian yang telah dipecat oleh pemerintah dengan membentuk suatu badan yang terdiri dari tiga orang wakil PPPH—dimana selain Sukiman terdapat nama pula Suryopranoto, tiga orang jawatan pegadaian, dan satu representasi pemerintah. Badan ini kemudian menemukan bahwa pemerintah keliru dalam mengambil tindakan karena hanya 30 orang yang sebenarnya terbukti tidak cakap.

Sukiman juga melakukan ekseminasi atas kinerja perserikatan pada era sebelumnya. Ia menemukan adanya ketidakberesan dalam hal penggunaan keuangan yang kemudian mengumkannya secara terbuka, dan berjanji akan melaksanakan referendum untuk mengeluarkan Martowardoyo dari PPPH pada Januari 1933. Di lain pihak, Martowardoyo melihat ini semua sebagai usaha membungkam ketidaksetujuannya atas langkah Sukiman yang menggunakan uang PPPH guna membeli *Moestika*. Persoalan ini menyeret Tjokroaminoto yang kemudian menyerang

Sukiman dan Suryopranoto, sekaligus menyatakan bahwa PPPH adalah ilegal. Situasi bertambah panas ketika Sukiman membalas dengan menyebut Tjokroaminoto melindungi orang-orang yang bersalah, yang pada akhirnya membuat para pimpinan PSII mengambil tindakan lebih keras dengan mengeluarkan Sukiman dan Suryopranoto dari keanggotaan partai. Inilah akhir dari kiprah Sukiman dalam PSII, termasuk dalam beberapa hal, akhir dari hubungan keduanya dengan Agus Salim dan Tjokroaminoto—yang pada sisi lain dengan sangat jelas menunjukan haluan politik Sukiman.

Tanpa disadari keluarnya Sukiman dari PSII membuatnya dapat bergerak secara lebih leluasa, yang sekaligus membuka jalan baginya untuk membangun karier politik tanpa perlu berada di bawah bayang-bayang para tokoh senior. Pemecatan Sukiman dari PSII mengundang reaksi penolakan dari para pengurus cabang yang berhimpun dalam Persatuan Islam Indonesia. Mereka kemudian bekerjasama dengan PSII Merdeka—cabang PSII Yogyakarta yang menyatakan putus hubungan dengan PSII Tjokroaminoto—dan sejumlah anggota Muhammadiyah untuk mendukung Sukiman dalam mendirikan PARII, partai baru yang bertujuan mencapai kemerdekaan berdasarkan Agama Islam, yang pada 1934.[19] Hanya saja, PARII namun kurang dapat berkembang. Hingga pada akhir 1938, wadah politik baru dibentuk dengan nama PII (Partai Islam Indonesia) oleh Sukiman dan lingkarannya yang semula menginisiasi pembentukan PARII.

Ternyata pembentukan PII memperoleh lebih banyak dukungan dari pada partai sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah cabang yang kemudian didirikan pada 1939 sejumlah 41 cabang, dan bertambah dengan cepat hanya dalam jangka setahun menjadi 125 cabang, lebih dari seratus cabang hadir pada kongres pertama PII yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1940. Meskipun berperan penting dalam PII, Sukiman tidak lagi menjabat sebagai ketua yang dipegang oleh seorang aristokrat yang juga anggota Volskraad, Raden Wiwoho yang dipilih karena ia tidak pernah menjadi bagian dari konflik sebelumnya. Dalam hal azas politik, PII memiliki banyak kesamaan prinsip dengan organisasi nasionalis-sekuler lainnya yang sedang berusaha untuk mewujudkan Indonesa berparlemen penuh. Oleh karena itulah, PII terlibat dalam kampanye GAPI untuk mewujudkan Indonesia Berparlemen menjelang pecahnya Perang Pasifik. Dalam kesempatan itu, Sukiman menjadi salah satu tokoh penting yang dihadirkan dalam rapat-rapat akbar untuk menyampaikan pidatonya. Salah satunya adalah Kongres Rakyat Indonesia di Yogyakarta pada September 1941.[20]

Sukiman juga turut berkiprah dalam MIAI (Majelis Islam A'laa Indonesia)—suatu federasi bagi organisasi Muslim yang dibentuk pada bulan September 1937—sebagai delegasi dari PII. Meskipun tidak dimaksudkan sebagai partai politik melainkan sebagai forum diskusi organisasi-organisasi Islam, MIAI yang mendukung kampanye GAPI Indonesia Berparlemen, juga memiliki tuntutan politik yang menghendaki pembentukan kabinet dengan komposisi duapertiga anggotanya harus diisi oleh wakil-wakil bergama Islam.[21] MIAI ini kemudian menjadi organisasi Islam yang diizinkan tetap hidup, ketika partai-partai Islam dilarang, pada awal masa pemerintahan militer Jepang hingga Oktober 1943. Dalam kurun itu MIAI tidak hanya berada di bawah pengawasan yang sangat ketat, bahkan kepengurusan organisasi ini juga ditentukan oleh Dai Nipon. Kepengurusan dalam MIAI waktu itu banyak didominasi oleh elit islam perkotaan, mayoritas dari PSII. Hanya saja, Jepang melihat bahwa kapasitas para elit Islam politik seperti mereka dalam memobilisasi massa masih kurang kuat bila dibanding dengan para ulama non-politik seperti kyai NU dan tokoh Muhammadiyah.

MIAI dibubarkan pada Oktober 1943, dan sebagai gantinya dibentuklah Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia), yang diharapkan pemerintah militer Jepang dapat menjadi alat kontrol pemerintah atas umat Islam. Selain itu, Masyumi juga diharapkan dapat turut berperan dalam menggerakan umat Islam untuk mendukung program mereka, sehingga, di setiap daerah di Jawa dibentuk pula cabang Masyumi. Komposisi kepengurusan Masyumi menunjukan bahwa Jepang benar-benar menyingkirkan politisi modernis perkotaan yang sebelumnya sangat dominan dalam MIAI dan menggantinya dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU. Posisi ketua Masyumi dipercayakan kepada KH. Hasyim Asy'ari yang dibantu oleh tiga ketua muda dimana salah satunya adalah putranya, KH. Wahid Hasyim yang membuat ayahnya tetap dapat berada di pesantrennya di Jombang.

Pasca dikeluarannya maklumat wakil presiden No. X pada 3 November 1945 yang berisi tentang anjuran pembentukan partai-partai politik, diadakan konferensi umat Islam di gedung Madrasah Mualimin Muhammadiyah di Yogyakarta dengan M. Natsir sebagai ketua panitianya. Konggres yang dihadiri sekitar 500 delegasi dari seluruh Indonesia tersebut —yang mengkonfirmasi besarnya antusiasme dan arti penting penyelenggaraan konggres ini mengingat perhubungan antar wilayah Indonesia waktu itu masih sangat sulit—menghasilkan kesepakatan, salah satunya dan yang terpenting, untuk menjadikan Masyumi sebagai partai politik satu-satunya bagi umat Islam. Keputusan tersebut memperoleh dukungan luas dari organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia, kecuali Perti di Sumatera Barat. Kepengurusan Masyumi terdiri dari Dewan Partai (*Madjlis Syuro*) dan Pengurus Besar yang keanggotaannya diambil dari organisasi Islam yang ada. Dewan Partai dipercayakan kepada KH. Hasyim Asy'ari yang dibantu oleh tiga ketua muda dimana salah satunya adalah putranya, KH. Wahid Hasyim. Adapun untuk Pengurus Besar, jabatan ketua dipegang oleh Sukiman.

Jenis keanggotaan dalam Masyumi terdiri dari anggota perseorangan, dan anggota istimewa yang terdiri dari organisasi-organisasi Islam. Dengan cara ini Masyumi dapat menampung sebanyak-banyaknya umat, tanpa ada yang merasa tidak terwakili. Dalam konteks ini, Masyumi di bawah kepemimpinan KH. Hasyim Asy'ari dan Sukiman hadir sebagai konvergensi kepentingan dan kehendak umat yang terwakilkan melalui organisasi-organisasi Islam yang sejak lama telah mengemuka namun sulit disatukan, walaupun memang pada kenyataannya titik temu ini berangsur-angsur memudar seiring dengan berjalannya waktu.

Pada sisi lain, kehadiran Masyumi dalam kancah politik Indonesia masa itu—ketika persoalan bentuk dan dasar negara menjadi sedang pertentangan serius—menjadi penting untuk mengartikulasikan aspirasi umat yang dapat disalurkan untuk membangun pondasi negara-bangsa yang baru saja merdeka. Dalam hal ini, kedua pimpinan Masyumi, K.H. Hasyim Asy'ari dan Sukiman termasuk kelompok yang moderat. Ketika para pemimpin bangsa mempersiapkan rancangan undang-undang, di mana persoalan bentuk negara menjadi salah satu isu paling sensitif, posisi politik dan pandangan Sukiman sangat jelas. Sukiman yang hadir sebagai wakil Jawa Tengah dengan sangat yakin mendukung gagasan yang menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik, bukan kerajaan maupun negara agama. Demikian pula, dalam kesempatan lain, ketika para pemimpin sedang bergulat untuk memposisikan kedudukan agama dalam praktek bernegara, Sukiman yang memperoleh dukungan dari Wahid Hasyim menekankan bahwa agama adalah elemen penting dalam bernegara, namun menolak usulan yang mewajibkan presiden dan wakil Indonesia haruslah beragama Islam.[22]

Pandangan-pandangan politik Sukiman yang ia tunjukan pada saat negara bangsa sedang diformulasikan di awal kemerdekaan menunjukan secara jelas afirmasi politiknya sekaligus posisi politiknya di dalam partai. Dalam hal ini Sukiman adalah seorang Islam-Nasionalis yang tidak melihat negara sekuler terhadap Islam, maupun bahaya dari kelompok sekuler terhadap negara dan Islam. Pendirian politik Sukiman ini merupakan akumulasi pengalaman hidup, dan pergumulan politik, di mana Sukiman yang berasal dari latar belakang keluarga Jawa, menempuh pendidikan modern, terlibat dalam perhimpunan nasionalis-sekuler, kemudian mengadopsi Islam dalam langkah politiknya—bahkan menjadi ketua Masyumi di awal kemunculan partai ini. Remy Madinier menambahkan, paling tidak pada kurun 1945 hingga 1947, hubungan interpersonal para tokoh Masyumi dengan para tokoh nasional lainnya turut menentukan posisi mereka ketika menghadapi ujian atas pilihan-pilihan politik yang diambil. Dalam hal ini, Sukiman berada dalam satu spectrum dengan Sukarno dan Tan Malaka, sedangkan pada pihak lain berdiri Hatta, Natsir dan Salim.[23] Dalam tubuh Masyumi sendiri, Sukiman adalah sosok pengemong yang selalu terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja, kecuali PKI tentunya, dan yang lebih mampu menjembatani perbedaan-perbedaan dalam partai, terutama yang berporos pada perbedaan antara kalangan modernis dan tradisionalis, maupun elit Islam perkotaan dan tokoh Islam pesantren.

PERDANA MENTERI

Ketika Indonesia yang baru diproklamirkan kemerdekaannya memanggil peran serta seluruh anak bangsa, Sukiman tengah berada pada kematangan dalam usianya yang hampir memasuki setengah abad. Pada usianya itu ia dapat menjadi penyambung antara generasi senior seangkatan Agus Salim, dengan para pemimpin nasional semisal Sukarno, Hatta, Amir Sjarifuddin, yang dilahirkan pada awal abad ke-20 dan semuanya lebih muda dari Sukiman. Terlebih lagi, sebagai representasi dari umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia, Sukiman adalah tokoh dengan jejaring yang sangat luas. Ia memiliki kedekatan personal dan pernah bekerjasama dengan para tokoh lainnya, seperti kelompok alumni Belanda seperti Hatta, Ahmad Subarjo, maupun Ali Sastroamidjojo (PNI) yang pernah bekerjasama dengan Sukiman saat keduanya menerbitkan majalah '*Djanger*'.

Kiprah Sukiman bagi persiapan kemerdekaan Indonesia dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam PPKI. Nama Sukiman juga sempat muncul sebagai kandidat Wakil Presiden bersama dengan Hatta, Ki Hadjar Dewantara, Iwa Kusuma Sumantri dan tokoh lainnya, hanya saja pada bulan Oktober 1945, Sukarno memilih untuk mengangkat Hatta sebagai wakilnya. Dalam pemerintahan, Sukiman berkontribusi melalui KNIP, menjadi anggota DPA dan DPRS-RIS, dan menjabat sebagai Menteri Negara pada era Hatta I. Ketika Yogyakarta mengalami Agresi Militer, Sukiman merupakan salah satu menteri yang berhasil keluar dari Yogyakarta dan terlibat dalam gerilya. Sukiman juga memiliki pengalaman sebagai delegasi dalam berbagai perundingan diantaranya adalah Linggardjati (era Sjahrir) dan Konferensi Meja Bundar. Mundurnya Perdana Menteri Natsir—kolega Sukiman di Masyumi—menciptakan kekosongan kekuasaan yang meskipun tidak terlalu lama namun menimbulkan kegaduhan politik yang cukup dasyat. Pada saat itu, Sukiman yang memperoleh kepercayaan presiden sebagai formatur berhasil menyusun suatu kabinet baru yang kemudian ia pimpin bersama Suwiryo.

PEMBENTUKAN KABINET

Pada April 1951, Natsir yang memimpin kabinet kerja (*zaken cabinet*) selama tujuh bulan lebih, mengembalikan mandatnya kepada presiden. Beberapa hari kemudian, Sukarno menunjuk Mr. Sartono untuk menjadi formatur guna membentuk kabinet baru. Munculnya nama Sartono sebagai formatur tidak lepas dari usaha PNI yang berkeinginan untuk memimpin pemeritahan setelah sebelumnya dipegang oleh Masyumi. Dalam hal ini, Sartono merupakan tokoh PNI yang dikenal memiliki hubungan baik dengan Masyumi. Waktu itu, sudah lumrah jika seorang formatur membentuk susunan kabinet yang akan ia pimpin sendiri. Akan tetapi, Sartono tidak menginginkan hal yang sama, bila ia berhasil membentuk kabinet maka ia akan berada di luar pemerintahan. Seperti dalam mandat yang diterimanya, Sartono berusaha membentuk kabinet parlementer, di mana kabinet tersebut memperoleh dukungan luas dari partai-partai dalam DPR. Oleh karenanya, formatur sangat memperhitungkan besarnya dukungan yang akan diperoleh kabinet bentukannya dengan mempertimbangkan konfigurasi politik di parlemen. Untuk itu, Sartono memulai tugasnya dengan melakukan pembicaraan terhdap sejumlah elit partai, hanya saja usaha ini tidak berjalan baik, terutama dikarenakan perbedaan tajam dua partai besar yakni Masyumi dan PNI terutama menyangkut pimpinan kabinet dan keikutsertaan anggota mereka dalam pemerintahan. Setelah satu bulan berusaha, pada 18 April, Sartono mengembalikan mandatnya kepada presiden tanpa berhasil membuat susunan kabinet baru.

Meskipun banyak yang mencoba mentafsirkan sebab-sebab dari kegagalan Sartono untuk

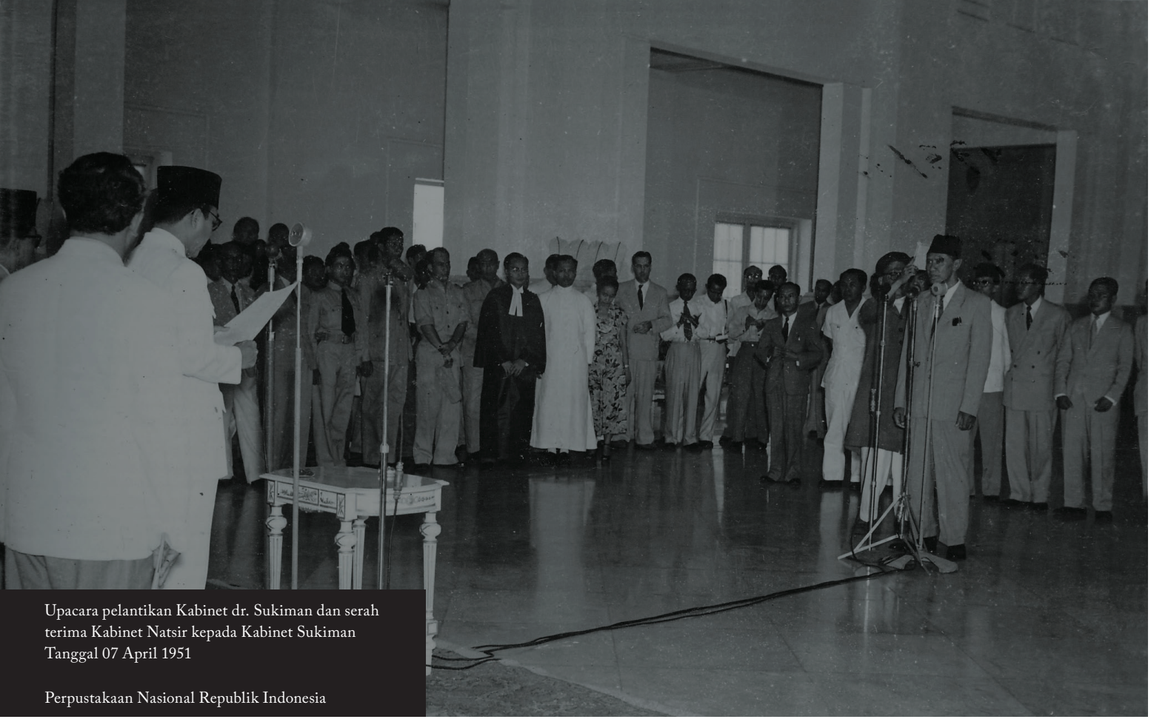

Upacara pelantikan Kabinet dr. Sukiman dan serah terima Kabinet Natsir kepada Kabinet Sukiman
Tanggal 07 April 1951

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Para menteri dalam upacara pelantikan Kabinet Sukiman tanggal 7 April 1951.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Kabinet Sukiman Wirjosandjojo berfoto bersama Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

menyusun kabinet baru, Sukarno sendiri dapat merasakan menguatnya politik aliran di parlemen yang mempertarungkan kekuatan nasionalis diwakili PNI dengan Islam yang diwakili Masyumi. Presiden kemudian meminta Sidik Joyosukarto dan Sukiman dari Masyumi untuk untuk membentuk kabinet yang memperoleh dukungan parlemen secara luas. Pada awalnya, Natsir dan pendukungnya di Masyumi mendukung Sukiman untuk berada dalam posisi ini dengan syarat bahwa pembentukan kabinet tidak akan lebih dari lima hari. Pada kenyataannya proses ini memakan waktu yang lebih lama, walaupun atas restu presiden. Bermula dari titik ini, perkubuan di tubuh Masyumi yang sudah mengemuka sejak pembentukan Natsir semakin menguat. Terlebih lagi, Sukiman menerima pinangan presiden untuk menjadi perdana menteri. Bagi kedua formatur itu sendiri, langkah-langkah yang lebih kongkret harus segera diambil dalam waktu yang semakin terbatas, dan pada akhirnya terbentuk koalisi yang terdiri dari Masyumi, PNI, Parkindo, dan PIR.

Pada malam 26 April 1951, Kabinet Sukiman-Suwirjo terbentuk. Membadingkan dengan formatur sebelumnya di mana Sartono memiliki hubungan baik dengan PNI, keberhasilan dalam membentuk kabinet ini cukup menarik, terlepas dari sejumlah kerumitan dalam negosiasi politik yang berlangsung. Tampaknya hubungan dan karakter pribadi Sukiman, yang dalam proses penyusunan kabinet selalu berusaha memberikan porsi kepada PNI sama besar seperti yang diterima Masyumi, mampu mengungguli sifat keras Sidik Joyosukarto, ketua umum PNI saat itu yang dikenal sebagai seorang nasionalis militan. Hanya saja, keberhasilan membentuk kabinet baru ini berbiaya mahal dengan apa yang kemudian dialami di Masyumi yang tidak

dapat lagi menyelamatkan diri dari perpecahan. Beberapa jam sebelum para formateur menyerahkan susunan kabinet lengkap kepada Presiden, badan eksekutif Masyumi yang dipimpin Natsir mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa tindakan Sukiman sebagai formatur tidak secara resmi mewakili Masyumi. Oleh karenanya, dalam daftar kabinet baru akhirnya diumumkan pada tanggal malam itu, tidak ada anggota Masyumi yang berasal dari kelompok Natsir yang duduk di kabinet Sukiman-Suwiryo.[24]

Komposisi anggota kabinet Sukiman-Suwiryo terdiri atas perdana menteri dan wakilnya yang dibantu oleh tujuh belas menteri. Feith berargumen mayoritas anggota kabinet Sukiman adalah orang-orang yang keunggulannya telah dicapai melalui peran "administrator" ketimbang peran "*Solidarity maker*" (penggalang solidaritas), walaupun bila dibanding kabinet pendahulunya, jumlahnya lebih sedikit. Selain itu jika pada era sebelumnya, pemerintahan merupakan bentuk dari *zaken cabinet*, Kabinet Sukiman dengan jelas memperlihatkan pengaruh besar dari partai-partai politik baik dalam penyusunan, pembagian portofolio, perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Perbedaan lain antara kabinet Sukiman dengan kabinet Natsir, menteri-menteri pada kabinet Sukiman mayoritas berasal dari partai politik, dengan sedikit pengecualian untuk M. Yamin, dan Juanda yang berasal dari non-partai. Ahmad Subardjo, tokoh Masyumi yang meskipun dalam partai tidak memegang kedudukan penting apapun dan merupakan kawan dekat Sukiman, menjabat sebagai menteri luar negeri.

Adapun pergantian menteri dilakukan dengan cepat pada sejumlah posisi. Sewaka dari PIR menggantikan koleganya satu partai, Sumitro Kolopaking, yang menolak penunjukannya pada posisi menteri pertahanan karena tidak sebidang dengan keahliannya pada persoalan Pamongpraja. Menyusul kemudian M. Yamin yang mengundurkan diri dari Menteri Kehakiman digantikan A. Pellaupessy dan kemudian diteruskan Mohammad Nasrun (non-partai). Pada bulan Juli nama Wilopo (PNI)—tokoh yang kemudian akan menjadi perdana menteri pada era setelah Sukiman—muncul menggantikan Sujono Hadinoto pada jabatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam beberapa hal, perubahan-perubahan komposisi dalam kabinet Sukiman merekam dinamika juga persoalan-persoalan yang menerpa pemerintahannya.

PROGRAM DAN KEBIJAKAN

Pada 28 Mei, Sukiman menyampaikan programnya di hadapan parlemen. Setengah bulan kemudian parlemen menyatakan keputusannya memberikan kesempatan kepada kabinet untuk bekerja, dengan suara 119 setuju berbanding 30 menolak. Hasil ini sudah dapat tidak terlalu mengagetkan, karena sejak pertama kali terbentuk, kabinet Sukiman disambut dengan antusisame yang sangat tinggi, dan media massa menyebutnya sebagai kabinet yang paling kuat karena selain didukung oleh koalisi yang tangguh, personalia dalam kabinet juga dikenal dengan keahlian di bidang masing-masing. Bahkan, lingkaran Masyumi pendukung Natsir yang pada awal pembentukan kabinet bersuara sangat kritis, memberi kesempatan kepada pemerintahan Sukiman untuk bekerja. Pada sisi lain, terlihat pula bahwa dalam menyusun pidato pertamanya di parlemen, Sukiman berhati-hati dalam memposisikan kabinet pendahulunya, dan terlihat berusaha memahami kekurangan dari pemerintahan Natsir tanpa perlu menyalahkannya.

Beberapa kalangan mengkritik kabinet Sukiman cenderung berorientasi pada distribusi kekuasaan untuk memperoleh dukungan politik partai-partai di DPR, dan kurang memiliki kebaruan dalam hal program yang akan dijalankan. Seperti Sukiman sendiri mengakui dalam pidatonya, sejumlah program kabinetnya pada dasarnya merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan Natsir, meskipun ia menambahkan, kabinetnya akan menyusun prioritas dalam penangan masalah. Hal ini tentu dapat dipahami karena akar persoalan yang mereka hadapi juga tidak berbeda. Dalam pidatonya di hadapan parlemen, Sukiman menyatakan perlunya untuk mengadopsi program yang pernah dijalankan baik oleh Hatta dan Natsir walaupun belum menunjukan hasil seperti yang diharapkan namun hal tersebut harus dipahami mengingat keduanya hanya memiliki waktu yang sangat pendek untuk merampungkan persoalan-persoalan besar dan fundamental. Program kabinet Sukiman memiliki enam agenda besar yang eliputi persoalan keamanan, kemakmuran, organisasi negara, perburuhan, politik luar negeri, dan masalah Irian Barat.

Keamanan dan kemakmuran menjadi dua isu yang paling diprioritaskan oleh kabinet ini. Sukiman melihat bahwa pemulihan stabilitas negara melalui penciptaan keamanan dan kepastian hukum adalah syarat mutlak untuk dapat menjalakan cita-cita kemerdekaan. Dalam hal ini, kabinet berusaha untuk dapat mengubah peraturan-peraturan lama warisan kolonial menjadi hukum nasional. Akan tetapi, hal yang lebih mendesak untuk dikerjakan adalah mengerahkan segala usaha guna memulihkan situasi yang banyak mengalami gangguan keamanan. Untuk itu, pemerintah berusaha utuk menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, dinamakan dengan istilah "Staf K", yang dikoordinasikan secara terpusat. Adapun tugas untuk menjaga keamanan negara harus dilakukan mulai dari tingkatan yang paling bawah yakni desa.

Terkait dengan masalah keamanan, Feith melihat bahwa dalam beberapa hal kabinet Sukiman cukup banyak belajar dari tindakan-tindakan yang diterapkan oleh kabinet sebelumnya untuk melemahkan kekuatan kelompok pemberontak dan pengacau keamanan lainnya. Termasuk, sejumlah tindakan yang diambil dalam rangka meminimalisir angka penyelundupan melalui pelabuhan. Keberhasilan ini memberi pengaruh yang luas untuk berbagai bidang. Namun pada sisi lain, pemerintahan Sukiman bukan tanpa celah. Tampaknya, kabinet Sukiman yang memperoleh dukungan politik dari kekuatan sipil ini memiliki titik lemah dalam membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kekuatan militer. Terlebih lagi, seperti diungkapkan Feith, hubungan antara pemerintah dengan tentara pada era kabinet Sukiman menegang sejak awal karena kabinet ini tidak terlalu memperhatikan

kepentingan tentara. Hal ini nantinya terbukti dalam kasus M. Yamin di bulan Juni, 'razia Agustus', dan MSA.

Program ekonomi menjadi prioritas terpenting lainnya bagi kabinet Sukiman yang sangat terkait dengan kemampuan pemerintah menciptakan stabilitas keamanan nasional. Dalam banyak hal, kabinet Sukiman melakukan kebijakan yang telah dimulai oleh kabinet sebelumnya,[25] diantaranya adalah meneruskan "Rencana Sumitro". Seperti yang dijalankan pendahulunya, kabinet ini juga memberi perhatian lebih industri kecil dan koperasi, serta mengalokasikan dana besar untuk melaksanakan proyek pembangunan daerah di mana cetak birunya telah dibuat jauh lebih lama. Kabinet Sukiman juga memandang pentingnya investasi asing pembangunan ekonomi Indonesia, yang dijalankan bersamaan dengan dikendorkannya kebijakan benteng, namun pada saat bersamaan pemerintah juga terus menjalankan program "Indonesianisasi" secara bertahap pada sejumlah bidang kegiatan bisnis, terutama impor.

Bruce Glassburner mencatat selama kurun periode ketika Sukiman menjadi perdana menteri terjadi beberapa perkembangan penting dalam sejarah ekonomi Indonesia.[26] Perkembangan yang paling signifikan adalah nasionalisasi Bank De Javansche Bank (DJB), dan memburuknya kondisi fiskal sebagai dampak dari "boom Korea" pada pertengahan tahun 1951. Nasionalisasi DJB sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa proses. Pada Keterangan Pemerintah di parlemen, Sukiman merinci rencana pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap DJB menjadi Bank Indonesia yang akan difungsikan sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Pada bulan Juni 1951, sebuah Panitia Nasionalisasi DJB dibentuk untuk merancang proposal nasionalisasi, dan rencana undang-undang nasionalisasi, serta rancangan undang-undang yang baru mengenai Bank Sentral. Pada tahap selanjutnya, diangkatlah Syarifuddin Prawiranegara pada tanggal 12 Juli 1951 untuk menggantikan Dr. Houwink Presiden DJB. Tiga hari berselang, pemerintah mengeluarkan UU No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi DJB menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

Terkait dengan 'Boom Korea', ketegangan yang terjadi di semenanjung Korea pada awal dekade 1950-an, memberi dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Sukiman. Hal ini berbeda dengan era sebelumnya di mana Perang Korea telah menyebabkan melambungkan permintaan pasar terutama dari Amerika terhadap komoditas strategis Indonesia seperti karet dan minyak, sekaligus mendorong perkebunan karet baik dalam skala besar maupun yang diusahakan rakyat untuk meningkatkan produksinya. Hanya saja setelah memasuki pertengahan 1951—tidak lama setelah Sukiman menjabat perdana menteri—permintaan dan produksi karet menurun secara signifikan yang secara langsung berpengaruh terhadap neraca ekspor Indonesia yang juga ikut anjlok. Memasuki tahun 1952, defisit anggaran negara sudah hampir mencapai tiga miliar rupiah, turun tajam bila dibandingkan dengan surplus Rp. 1,7 miliar di tahun sebelumnya.[27]

Kondisi diperburuk dengan keluarnya embargo PBB yang melarang ekspor bahan-bahan strategis

Sidang Parlemen ke-V yang dihadiri oleh Kabinet Sukiman pada tanggal 21 Mei 1951

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

dan kebutuhan perang ke Cina. Sejumlah kalangan dan media massa dengan penuh kecurigaan mentafsirkan bahwa hal ini adalah bentuk permainan ekonomi Amerika agar mereka dapat memonopoli komoditas penting dengan harga murah. Respon pedas keluar dari Menteri Luar Negeri, Subardjo yang menyatakan bahwa Indonesia akan "menjual kepada Iblis sekalipun jika hal ini dapat melayani kepentingan rakyat". Namun, kabinet tampaknya mendapatkan tekanan keras sehingga menolaknya, dan Subardjo sendiri juga segera merevisi komentarnya walaupun tidak secara langsung. Kabinet Sukiman kemudian mematuhi embargo—seperti halnya ketiga kabinet yang menggantikannya kemudian—, dan harga komoditas strategis Indonesia anjlok sesudah itu.

Kebijaksanaan berbeda diambil oleh Menteri Keuangan, Jusuf Wibisono, yang berasal dari Masyumi dalam hal impor dan distribusi alokasi anggaran. Menteri Keuangan era Sukiman memprakarsai—secara informal—suatu kesepakatan yang meminta bank-bank pemerintah untuk memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan partai-partai politik dalam lingkaran koalisi. Tentu saja, kebijakan yang diambil Jusuf Wibisono, yang dikenal lebih longgar dalam hal pencairan anggaran ketimbang pendahulunya, membuat senang pihak-pihak dalam pemerintahan, sehingga kesatuan dalam kabinet dapat terus terjaga, meskipun sebagai konsekwensinya ia juga membuat kubu oposisi semakin gusar.

SUKIMAN DAN SUKARNO

Sukiman memulai pekerjaan sebagai Perdana Menteri dengan penuh kepercayaan diri. Dukungan Sukarno merupakan salah satu faktor pentingnya. Hubungan antara Perdana Menteri dan Presiden sangat baik, dan telah terbina

sejak lama sebelum keduanya memiliki posisi politik apapun. Demikian pula, sejumlah nama anggota kabinet Sukiman seperti wakil perdana menteri Soewirjo, Iskaq, Ahmad Subarjo yang bahkan sudah seperti murid politiknya Sukarno. Adapun Yamin dan Djuanda merupakan orang dekat sekaligus orang penting bagi Sukarno dengan peran masing-masing, Yamin adalah ideolognya Sukarno, sedangkan Djuanda adalah teknokratnya. Dari pengakuan Sukarno sendiri beberapa tahun kemudian, ia menaruh rasa hormat kepada Sukiman yang lebih tua, demikian pula sebaliknya, perdana menteri juga sangat menghormati presiden. Keduanya dapat berbagi peran dengan sangat baiknya.

Kabinet memandang Sukarno bukan semata-mata presiden secara konstitusional, melainkan sebagai "bapak rakyat".[28] Pemerintahan Sukiman sangat luwes dalam memposisikan Sukarno, dan sangat paham kelebihan utama dari sang presiden sebagai seorang penggalang solidaritas. Ia memperoleh alokasi anggaran yang cukup banyak untuk melakukan muhibah keseluruh Indonesia dan memberikan ceramah-ceramahnya, pada saat yang sama, kabinet tetap pada tugasnya. Selain faktor Sukarno—dengan keberadaan PNI dan Masyumi sebagai penyokong utama serta partai-partai kecil yang tetap diperhitungkan dalam formasi kabinetnya—Sukiman juga berhasil memenangkan dukungan besar dari dalam parlemen yang tampak dari formasi kabinet yang disusunnya.

GUNCANGAN

Sejumlah persoalan yang dihadapi Kabinet Sukiman muncul bukan bersumber dari parlemen, melainkan berakar dari sejumlah keputusan internal yang kemudian berekor dan memicu munculnya antagonisme antar partai politik yang mereka wakili di kabinet. Kebanyakan masalah yang muncul bermuara dari persoalan-persoalan dalam negeri. Salah satu persoalan pertama muncul sangat awal yakni 10 Mei ketika Iskaq Tjokroadisurdjo (PNI) yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mengeluarkan perintah untuk menghentikan segala bentuk kegiatan dewan daerah yang direspon sangat keras oleh Masyumi. Oleh karena itu, dua hari kemudian, menteri Iskaq terpaksa mencabut instruksinya. Walaupin masalah ini dapat diselesaikan melalui kompromi kabinet dan dewan legislatif, ketegangan antara partai pendukung Iskaq dan kelompok yang mengkritiknya tidak langsung pulih. Ditambah lagi, sebulan kemudian, Iskaq menunjuk anggota PNI sebagai gubernur untuk Jawa Barat dan Sulawesi—yang keduanya memperoleh persetujuan kabinet. Penunjukan ini membuat Masyumi meradang. Alasannya, Kandidat Iskaq untuk Jawa Barat, Sanusi Hardjadinata, tidak masuk dalam daftar kandidat yang diusulkan oleh Dewan Daerah—di mana Masyumi adalah mayoritas. Sedangkan Sudiro yang diusulkan untuk Sulawesi Selatan, adalah orang Jawa yang dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan Masyumi merupakan bagian dari ekspansi kekuatan PNI melalui pamong pradja. Keputusan-keputusan itu membuat Iskaq panen kecaman, bahkan sebuah mosi untuknya diajukan oleh anggota parlemen dari PRN. Menanggapi serangan yang diajukan kepada menterinya, PNI mengecam balik dan mengancam akan keluar dari kabinet jika mosi tersebut diterima.

Beranjak pada bulan Juni, persoalan besar menghampiri Menteri Kehakiman yang dipimpin M. Yamin. Kali ini, permasalahan tidak hanya isu internal kabinet namun melebar hingga menyeret para pimpinan tentara ke dalam pusaran masalah, dan bahkan hingga memaksa menteri bersangkutan mengundurkan diri. Dalam bulan itu, M. Yamin mengambil langkah gegabah dengan membebaskan sekelompok besar tahanan politik. Sebenarnya pemikiran Yamin ini berangkat dari persoalan riil mengenai terjadinya kelebihan kapasitas tahanan, di mana pada saat ia menjabat menteri, penjara-penjara diisi oleh sekitar 17.000. Persoalan ini merupakan akibat dari banyaknya penangkapan yang dilakukan pada era sebelumnya, terhadap orang-orang yang terlibat—atau bahkan hanya sekedar diduga—dengan kelompok-kelompok pemberontak maupun pengacau keamanan lainnya. Banyak dari mereka yang dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses peradilan sebelumnya. Yamin sendiri beranggapan bahwa pengampunan dalam skala besar kepada mereka yang ditahan dapat menjadi opsi untuk masalah ini.

Pada 7 Juni, Yamin membebaskan 950 orang termasuk tahanan politik terkemuka seperti Chaerul Saleh, mantan pemimpin Tentara Rakyat di Jawa Barat yang bersimpati pada Murba. Persoalannya berekor panjang. Yamin yang memiliki kedekatan dengan Tan Malaka dan keberadaannya dalam kabinet kerap disinyalir sebagai wakil tersembunyi dari Murba dianggap cenderung memilih orang-orang yang memiliki kedekatan politis dengannya. Ia membebaskan orang-orang tanpa didasari pada kreteria yang jelas, dan tanpa menempuh prosedur formal di mana seharusnya daftar orang-orang yang akan diberikan kebebasan diajukan terlebih dahulu ke pengadilan. Selain itu, keputusan Yamin juga dianggap sebagai tindakan sepihak karena ia tidak berkonsultasi terlebih dahulu atas langkah yang akan diambilnya—walaupun Yamin menyatakan telah melaporkan hal ini kepada perdana menteri namun Sukiman membantahnya. Lebih parahnya lagi, keputusan Yamin ini menyinggung pimpinan militer yang merasa bahwa Menteri Kehakiman tidak pernah meminta izin pihak militer untuk membebaskan ratusan orang yang sebelumnya mereka tangkap.

Sebagai reaksi balasan atas tindakan Menteri Kehakiman, para pemimpin militer mengambil inisiatif untuk menahan kembali 950 orang yang telah dibebasakan Yamin, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama berhasil menemukan sebagian besar dari mereka, termasuk Chaerul Saleh. Kasus ini tidak berakhir di sini, militer kemudian melakukan tekanan terhadap Perdana Menteri dan Yamin secara pribadi yang kediamannya sempat diintimidasi tentara. Tekanan terhadap Sukiman dan kabinetnya ditujukan agar Menteri Kehakiman diganti. Menghadapi situasi yang memburuk, Yamin mengundurkan diri dari kabinet pada 14 Juni. Sukiman yang berusaha menyelamatkan keadaan segera mengumumkan bahwa terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan Yamin dalam membebaskan tahanan dengan alasan tidak semua orang yang dikeluarkan dari penjara berhak atas kebebasan, dan ia juga menekankan bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan angkatan bersenjata.[29] Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Pertahanan, Sewaka yang walaupun usianya 20 tahun lebih tua namun memiliki kedekatan personal dengan Nasution maupun istrinya, Sunarti, yang terbina sejak masa gerilya dan terus dipertahankan.[30]

Hanya saja, hubungan pemerintah dengan tentara tidak serta merta pulih, terlebih lagi pada bulan-bulan berikutnya terjadi insiden bertubi-tubi yang membuat para petinggi militer merasa gusar lagi.

Situasi menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-6 di bulan Agustus kembali memanas. Sebelumnya, di bulan Juni-Juli, pemerintah menghadapi gelombang demonstrasi dengan berbagai tuntutan, termasuk kecemburuan para buruh dan pegawai swasta atas tunjangan hari raya yang diberikan pemerintah kepada para pegawai negeri. Kriminalitas dengan skala sedang juga semakin marak menyasar kargo-kargo pengangkutan di pelabuhan. Di sejumlah tempat, kondisi yang memanas memakan korban. Pada 1 Agustus, serangan granat menyasaar suatu keramaian di Kota Bogor dan mengakibatkan 80 orang terluka. Serangan yang bersifat lebih frontal juga diarahkan kepada alat keamanan negara seperti penyerangan pos polisi di Jakarta pada 5 Agustus 1951. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok pemberontak dan bandit—di Jawa Barat, Tengah, dan Timur, masih beroperasi dengan leluasa di daerah-daerah kantong kekuasaan mereka.

Banyaknya desas-desus yang beredar memperburuk keadaan. Terkait dengan berbagai demonstrasi, pencurian kargo, perbanditan, dan penyerangan, PKI menjadi pihak yang selalu dicurigai. Begitu juga dengan kelompok pengacau keamanan, Merapi-Merbabu Complex, yang disinyalir memiliki hubungan dengan partai ini. Bahkan, PKI merilis pernyataan untuk menyatakan bahwa mereka tidak terkait dengan serangan granat yang terjadi di Bogor. *Jawa Post* memberitakan penangkapan besar-besaran di Banyuwangi yang terhadap suatu kelompok illegal yang dituduh akan menjatuhkan pemerintah yang sah, dan kemudian akan diganti dengan suatu pemerintahan Soviet. Gerakan ini, menurut *Jawa Pos*, memiliki koneksi dengan PKI dan akan memobilisasi seluruh penduduk Tionghoa di Indonesia dalam melakukan aksinya.[31] Rumor lain juga menyebutkan bahwa akan adanya gerakan yang berencana memboikot perayaan peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus yang dikaitkan dengan PKI.

Pemerintah, yang dalam beberapa hal telah belajar dari kabinet sebelumnya, kemudian melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang yang terlibat dalam sejumlah aksi maupun kepada siapa saja mereka curigai. Sejak minggu kedua bulan Agustus ketika rencana pembersihan ini dibicarakan hingga akhir bulan Oktober, pemerintah telah menangkap tidak kurang 15.000 orang dari seluruh Jawa, sejumlah tempat di Sumatra dan wilayah lainnya. Tindakan ini kemudian dikenal dengan Razia Agustus,[32] yang dalam praktiknya dilakukan secara terdesentralisasi, dengan demikian banyaknya orang yang berhasil ditangkap tidak lepas dari peran para pejabat lokal seperti Bupati yang memiliki kepentingan untuk membersihkan wilayahnya dari orang-orang yang dianggap berbahaya.

Mayoritas dari orang yang ditangkap itu adalah orang-orang PKI bersama para suporternya—termasuk para buruh progresif radikal—dan orang-orang Tionghoa. Walaupun kelompok kiri menderita paling banyak, penangkapan juga menyasar orang-orang lintas ideologi dari segala level sosial. Razia Agustus menangkap sejumlah anggota parlemen dari Murba, Partai Buruh dan Abdulah Aidit—ayah D.N. Aidit yang merupakan anggota DPR dari PRN. Bahkan, Razia Agustus menyasar pula seorang tokoh masyumi fundamentalis yang sangat anti komunis, Isa Ansyari, dengan alasan memiliki kaitan dengan pemberontakan DI/TII.

Atas tindakan ini, Sukiman harus memberikan penjelasan di depan DPR setelah Tan Po Goan, seorang Tionghoa anggota PSI mengusulkan mosi di parlemen. Sukiman menjelaskan bahwa tindakan ini diambil setelah melalui pembicaraan terbatas dengan sejumlah anggota kabinet, dan Suprapto yang menjadi pelaksana presekusi. Alasan yang ia kemukakan untuk menjadi dasar tindakannya adalah keamanan negara dimana berdasarkan laporan intelejen, ia mengetahui adanya ancaman terhadap negara melalui gerakan-gerakan yang berusaha untuk menggulingkan pemerintah, dan melakukan pembunuhan terhadap presiden dan wakilnya. Ancaman yang dimaksud Sukiman merujuk pada sejumlah gerakan pemberontakan yang masih eksis waktu itu yakni Darul Islam yang bekerjasama dengan sejumlah kelompok penjahat di Jakarta, maupun APRA atau pasukan Westerling yang membangun jejaring dengan kelompok sayap kiri di pemerintahan.

Walaupun Sukiman berhasil memenangkan perolehan suara melawan mosi Tan Po Goan saat dilakukan voting di DPR dengan 91 berbading 21, langkahnya telah menimbulkan berbagai reaksi. Kelompok kiri menuduh Razia Agustus sebagai tindakan fasis, adapun gerakan buruh progresif kemudian terpaksa tiarap untuk sementara waktu. Pada sisi lain, tindakan ini memberi dampak baik dengan menurunnya sabotase terhadap kargo di pelabuhan, maupun menurunnya frequensi demonstrasi oleh para buruh yang sebelumnya sangat marak terjadi dan cukup mengganggu aktivitas ekonomi. Pihak militer yang tidak diberitahu terlebih dahulu akan rencana Razia Agustus merasa tidak senang atas tindakan Sukiman, dan tidak begitu percaya dengan alasan yang ia kemukakan. Oleh karenanya militer memilih untuk tidak terlibat dalam aksi ini yang disebut Perdana Menteri dilaksanakan dalam kondisi SOB. Kalangan lain mentafsirkan tidakan Sukiman ini tidak lepas dari kepentingan maupun tekanan Amerika. Duta Besar US pada waktu itu, Merle Cohan, memang kerap diberitakan memiliki kepentingan khusus terhadap pemerintahan Sukiman untuk memperkuat sentiment anti-komunis dan mendorong Indonesia agar semakin menjauh dari poros kiri.

MSA DAN AKHIR KABINET SUKIMAN

Pada bulan Juli 1951, seiring dengan berlangsungnya kegaduhan politik dalam negeri, hubungan dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menunjukan tensi yang meningkat terkait dengan sejumlah usaha pemerintah Indonesia menghambat upaya Kedubes Tiongkok untuk memperoleh peran lebih di Indonesia. Pada kurun itu, pemerintah Indonesia dibuat cemas dengan meningkatnya usaha diplomatik Tiongkok yang memiliki banyak warga di Indonesia, terlebih lagi dengan ditambahkannya atase militer ke dalam Kedutaan Besar Tiongkok yang dilakukan sebelum memperoleh persetujuan resmi pemerintah.[33] Pada 1 Oktober,

pemerintah tidak memberikan izin perayaan hari ulang tahun Republik Rakyat Tiongkok, setelah sebelumnya politisi Tiongkok juga menyerang Sukarno dan Hatta melalu tulisannya. Puncak eskalasi, pemerintah Indonesia dengan dukungan suara populer bahkan mengupayakan larangan bepergian tanpa izin bagi representasi Tiongkok di Indonesia dari otoritas berwenang.

Terlepas dari persoalan dengan Tiongkok, dua kabinet Masyumi—Sukiman dan demikian halnya dengan Natsir—menempatkan kebijakan luar negeri bebas aktif dalam bentuk yang pragmatis dimana kebijakan diekspresikan secara moderat dengan menjalankan sikap politik 'tidak anti-Barat'. Walaupun dalam sejarah kabinet di era pemerintahan Indonesia Merdeka, Sukiman bukanlah yang pertama dalam menjalankan kebijakan yang oleh sejumlah kalangan dilihat sebagai '*pro-West neutralist*',[34] namun menerima reaksi yang jauh lebih keras atas kebijakan luar negerinya bila dibandingkan pada masa Natsir, yang sekaligus mengakhiri kiprah pemerintahannya.

Masalah luar negeri Indonesia menjadi isu politik yang mulai mencuat sejak bulan Juli 1951. Persoalan pertama terkait dengan hal ini adalah rencana Indonesia untuk mengirimkan delegasi guna menghadiri perjanjian San Fransisco yang merupakan perundingan perdamaian pihak Sekutu dengan Jepang sebagai akhir dari Perang Dunia II, pada awal minggu kedua di bulan September.

Kalangan yang mendukung menganggap Indonesia perlu mengirimkan wakil ke perundingan itu karena konswekensi politik yang dihasilkan akan berkaitan langsung dengan negosiasi selanjutnya antara Indonesia dengan Jepang. Di sisi lain, para penentang menganggap keterlibatan Indonesia dalam perundingan tersebut dapat mengarah pada hilangnya netralitas Indonesia. Bagaimanapun juga, isi dari perjanjian itu adalah produk dari Amerika dan Inggris. Terkait dengan netralitas politik luar negeri, banyak pihak mengkhawatirkan bahwa Indonesia akan terseret—atau paling tidak akan memperoleh tekanan—untuk masuk dalam blok Amerika. Selain itu, apabila delegasi Indonesia turut meneken perjanjian San Fransico, dikhawatirkan akan memperburuk hubungan politik regional dengan negara-negara sahabat yang dahulunya sangat mendukung kemerdekaan Indonesia, seperti India yang memilih tidak mengirimkan wakil ke San Fransisco.

Menjawab tudingan bahwa Indonesia akan kehilangan netralitas, para supporter Perundingan San Fransico berargumen bahwa Indonesia tetap dapat bertindak secara independen. Kelompok ini membedakan antara 'netral' dan 'independen'—terma yang menekankan bahwa Indonesia bebas menentukan langkah politiknya secara dinamis, yang mana dalam beberapa hal terdengar membenarkan sikap "*pro-West neutralist*". Lebih lanjut, pihak ini juga melihat perlunya Indonesia mereposisi sikap politiknya dalam menghadapi geo-politik dunia yang berubah pasca Perang Dunia II. Dukungan negara super-power seperti Amerika akan berguna bagi diplomasi luar negeri Indonesia terutama untuk menghadapi Belanda.

Perdebatan lebih lanjut juga terjadi pada tingkat kabinet dimana dua partai utama pendukung Kabinet Sukiman terpecah baik secara internal maupun di dalam kabinet. Di Masyumi, para

Sidang Kabinet mengenai Perjanjian San Francisco pada tanggal 4 Oktober 1951

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

petinggi partai yang mendukung Indonesia mendandatangani Perjanjian San Fransisco, tentu saja, adalah Sukiman dan Jusuf Wibisono—keduanya merupakan bagian dari pemerintahan. Sedangkan Natsir, M. Roem dan Sjafruddin Prawiranegara menjadi kubu yang menentang. Setelah melakukan seri pertemuan selama dua hari di awal September, kelompok Sukiman memenangkan pemungutan suara dengan jumlah 17 berbanding 14, dan 2 abstain.[35] PNI yang melakukan pembicaraan beberapa hari kemudian, hanya berselang beberapa jam sebelum naskah perjanjian disahkan di San Fransisco, mengambil keputusan untuk menolak keterlibatan delegasi Indonesia ikut meratifikasi perjanjian tersebut. Hal ini cukup mengejutkan karena dengan sejumlah tokoh senior menjadi pendukung perundingan ini: Suwiryo, Sartono, dan Ali Sastroamidjojo yang saat itu menjabat duta besar Indonesia di Amerika, arah politik PNI cenderung mudah diperkirakan sejak sebelum pembicaraan internal ini di mulai. Namun, keputusan musyawarah partai menunjukan hasil yang berlainan, sehingga secara resmi PNI mengumumkan bahwa partainya menolak.[36]

Perbedaan pandangan diantara kedua partai utama pendukung pemerintah itu sempat menimbulkan dugaan akan terjadinya perpecahan di kabinet yang diperkirakan merupakan akhir dari kabinet Sukiman. Hanya saja, persoalan ini tidak lantas membesar dan berujung pada kondisi seperti yang banyak dispekulasikan. Selain faktor jumlah partai yang menolak ratifikasi sangat kecil—terdiri dari PNI yang terpecah, dan Partai Buruh—kemampuan para elit poltik partai berbeda paham tersebut yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan ke hadapan publik cukup membantu meredam suasana. Seperti kasus yang menimpa salah satu tokoh PNI,

Sidik Djoyosukarto, yang harus merevisi sendiri komentarnya terkait dengan ratifikasi Perjanjian San Fransisco sehingga tidak menimbulkan kegaduhan politik lebih lanjut.

Pada sisi lain, Menteri Luar Negeri, Ahmad Subarjo memainkan peran penting dalam meredam kritik, sekaligus dalam melancarkan negosiasi Indonesia kepada kedua pihak sekaligus: Jepang dan Amerika. Dalam hal ini, Ahmad Subarjo—dan delegasi Filipina—berhasil meyakinkan, Sekretaris US, Acheson, untuk memasukan masalah pembayaran pampasan terhadap negara-negara yang pernah diduduki Jepang dalam naskah perjanjian. Oleh karenanya, Ahmad Subarjo kemudian melanjutkan pembicaraan dengan Yoshida yang menyatakan kesan baiknya atas pertemuan mereka berdua.[37] Kesuksesan ini membuat para politisi di dalam negeri memberikan apresiasi yang tinggi dengan berhenti meributkan masalah keikutsertaan Indonesia menandatangani piagam San Fransisco.

Lebih lanjut, beberapa hari setelah konferensi berakhir, Subardjo, mengunjungi Washington untuk pertemuan dengan Acheson di mana pembicaraan itu akan membahas kemungkinan dukungan AS—baik secara rahasia maupun terbuka—terhadap Indonesia.[38] Publik Indonesia kemudian mendengar bahwa pembicaraan itu membahas pinjaman $ 50 juta untuk Indonesia. Sebelum Menteri Luar Negeri meninggalkan Amerika untuk meneruskan lawatannya ke sejumlah negara lainnya, Ahmad Subarjo tampaknya berhasil meyakinkan representasi Amerika bahwa Indonesia, yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara-negara blok Komunis, memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari negara adidaya tersebut. Tanpa disadari, persoalan bantuan Amerika yang dikenal dengan MSA (*Mutual Security Act*) menjadi sumber kontroversi berikutnya yang berdapak dasyat bagi Kabinet Sukiman.

Saat Kabinet Sukiman berkuasa, National Security Council (NSC) Amerika telah membuat pemetaan rinci tentang kepentingan mereka di Indonesia. NSC melihat bahwa Indonesia dapat menjadi aset penting bagi Amerika guna melancarkan kontrol mereka atas wilayah Asia Tenggara. Hal ini didasarkan pada posisi strategis Indonesia, kekayaan ekonominya, dan kepentingan politiknya sebagai negara yang independen, non-komunis. Oleh karenanya, pada awal dekade 1950-an, manuver politik Amerika sangat terasa seperti melalui sejumlah tekanan yang dilancarkan kepada Indonesia untuk mentaati embargo PBB terhadap Tiongkok, maupun kesediaannya meratifikasi hasil konferensi San Fransisco. Pada tahap lebih lanjut, NSC berusaha untuk menjadikan Indonesia berperan lebih besar dalam setiap usaha keamanan regional di wilayah ini, yang dengan demikian Indonesia didorong untuk keluar dari netralitas yang menjadi platform politik luar negerinya.[39] Dalam situasi politik semacam inilah pemerintah Indonesia menerima MSA 1951, sehingga timbul persoalan besar di dalam negeri.

Konsekuensi bagi negara-negara yang memperoleh segala jenis bantuan Amerika harus menyatakan diri berkomitmen untuk perjanjian tertentu, dalam hal ini, Indonesia menerima MSA dengan basis 511a yang mengikutkan persyaratan dalam bidang militer dan pertahanan negara. Ali Sastroamidjojo sebagai representasi Indonesia dalam pembicaraan baru terkait dengan MSA mengusulkan agar dasar yang digunakan diubah dari 511a menjadi 511b yang lebih diarahkan pada bantuan ekonomi dan asistensi teknis, serta tidak melibatkan masalah pertahanan dan militer. Akan tetapi dalam surat yang dikirim kepada Cohan di awal 1952, Menteri Luar Negeri menyatakan kesediaan pemerintah untuk menerima 511a. Di lain pihak, Amerika tampaknya memainkan strategi ganda dimana mereka bersiap untuk menyetujui permintaan Ali Sastroamidjojo maupun Ahmad Subarjo sebagai dua perjanjian terpisah.[40]

Pada bulan Februari, isu soal bantuan amerika mencuat menjadi perbincangan public. Dua media massa, *Abadi*—milik Masyumi kelompok Natsir—, dan *Indonesia Raya* yang merupakan corong pemberitaan tentara memberitakan persoalan tersebut. Para anggota parlemen juga seolah dibangunkan dari ketidaktahuan ini, mula-mula para anggota PIR yang memperoleh informasi dari Menteri Pertahanan Sewaka yang didekati pemerintah terkait dengan bantuan militer melalui skenario MSA. Tampaknya, seperti yang telah kerap dilakukan sebelumnya, penentuan atas masalah ini tidak dibicarakan dalam forum kabinet resmi, dan hanya diberitahukan kepada sejumlah anggota saja—terlebih lagi waktu yang diberikan Cohan juga sangat sempit. Bahkan menurut Feith, Sewaka sendiri tidak diberitahu, dan demikian juga dengan para petinggi militer.[41] Baru kemudian, pada 8 Februari, sehari setelah berita tersiar secara luas, kabinet melakukan pertemuan resmi menyangkut sejumlah detail dalam perjanjian MSA.

Tekanan terhadap pemerintah mengemuka ketika perdebatan untuk menerima bantuan militer atau menolaknya dimulai. Kalangan yang mendukung beralasan bahwa dengan menerima poin 511a, akan memungkinkan pemerintah untuk memperoleh bantuan digunakan menambah peralatan militer yang sejak adanya Constabulary Agreement pada Agustus 1950 tidak mungkin dilakukan di Amerika dan Eropa tanpa adanya perjanjian politik. Berbeda dengan India misalnya yang pemerintahnya memperoleh pasokan senjata dari Inggris atas status commonwealth-nya, dan dapat mengembangkan peralatan militernya di dalam negeri, Indonesia harus melakukannya melalui kerja sama dengan negara lain yang pada saat itu opsi terbaik adalah Amerika. Kelompok ini melihat bahwa bantuan militer dalam hal ini tidak berarti meningkatkan dependensi Indonesia terhadap Amerika, atau lebih jauh lagi, menjadikan Indonesia bagian dari Blok Barat. Dalam pembicaraan lain yang tidak begitu terpublikasi, sejumlah kalangan mengusulkan pentingnya kerja sama dengan Amerika ini untuk membendung tumbuhnya kekuatan komunis dalam negeri.[42]

Kelompok penentang menganggap Indonesia harus menghindarkan diri dari segala hal yang terkait dengan Perang Dingin dan konflik kepentingan antara dua poros politik dunia waktu itu. Stabilitas dan keamanan nasional lebih baik jika tanpa intervensi pihak asing, terlebih lagi jika biaya politik yang ditimbulkan terlalu mahal bagi kedaulatan politik dan hubungan luar negeri Indonesia. Mereka mengkritik poin dalam nota Cochran tertanggal 22 Januari 1952, yang meminta kontrol terhadap ekspor Indonesia ke negara-negara blok Soviet—yang sebenarnya

oleh pemerintah Indonesia tidak diluluskan. Dalam perdebatan ini, kelompok yang tidak menyetujui perjanjian Cohan-Subarjo adalah mayoritas.

Akhir dari perjalanan kabinet Sukiman mulai tampak ketika partai-partai dominan menyatakan pandangan resminya atas persoalan ini. Pada 11 Februari, Masyumi di bawah Natsir—yang pada saat menjabat Perdana Menteri di tahun 1950 menolak bantuan militer Amerika yang ditawarkan Melby—mengeluarkan pernyataan bahwa partainya tidak bertanggung jawab atas langkah yang diambil oleh kabinet Sukiman. Di tanggal yang sama, PIR juga menolak penandatanganan MSA yang mereka lihat sebagai penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia, dan karena alasan itulah, PIR meminta Ahmad Subarjo mengundurkan diri. Lima hari berselang giliran PNI menyatakan pandangannya. Partai ini juga menolak, dan meminta keseluruhan kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Sebagai dampak dari masalah ini, Ahmad Subarjo sendiri kemudian mengundurkan diri. Pada 21 Februari, mosi tidak percaya atas penanganan masalah MSA yang dilakukan Ahmad Subardjo muncul dari kabinet sendiri,[43] yang sekaligus menerima pengunduran diri Ahmad Subarjo sebagaimana surat yang ia ajukan pada 11 Februari. Pemerintah sebenarnya memiliki kesempatan untuk menjawab interpelasi yang diajukan Djody Gondokusumo mengenai kebijakan yang diambil terkait dengan MSA pada 25 Februari. Tetapi, pada dua hari sebelumnya, Sukiman mengembalikan mandat kepada presiden dengan alasan untuk memperbaiki situasi dari kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan dari penandatanganan MSA. Meskipun sudah demisioner, kabinet ini masih melanjutkan tugasnya sampai terbentuk kabinet baru.

WARISAN PAK DOKTER

Selama 11 bulan lebih, Pak Dokter telah memimpin kabinet kedua di era Indonesia dalam bingkai negara kesatuan, dengan dua kekuatan politik besar yakni nasionalis (PNI) dan Islam (Masyumi) menjadi tulang punggung utamanya. Selama menjabat perdana menteri, Sukiman melakukan sejumlah hal penting, terutama di bidang keamanan, ekonomi, dan hubungan luar negeri. Terlepas dari sejumlah programnya merupakan usaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah ada sebelumnya, beberapa diantaranya dilakukan secara dramatis, seperti pembebasan 950 tahanan oleh M. Yamin, dan nasionalisasi DJB yang diumumkan oleh Jusuf Wibisono pada saat konferensi pers pertamanya.

Pada era Sukiman, sebenarnya sudah mulai terasa sejak Natsir, kiprah militer dalam politik pemerintahan mulai berkurang. Kondisi ini sangat berbeda dengan yang terjadi sebelum penyerahan kedaulatan di tahun 1949 dimana militer menjadi kekuatan terpenting dalam revolusi sekaligus sangat berperan dalam politik pemerintahan. Dalam hal ini, Sukiman tidak terlalu menekakankan peran tentara dalam politik dan pemerintahan selama ia memimpin kabinet. Bahkan, ia cenderung mengabaikan seperti banyak dilakukannya saat pengambilan keputusan-keputusannya tanpa berkonsultasi dengan para petinggi tentara. Contoh lain dapat dilihat dalam penyusunan anggaran untuk militer. Hal inidisebabkan oleh karena pergantian menteri pertahanan yang berlangsung cepat di awal masa kerja kabinet, Sewaka tidak menyusun alokasi anggaran baru untuk pertahanan melainkan menggunakan budget yang sudah dibuat oleh pendahulunya.

Terlepas dari hal itu, perkembangan menarik berlangsung selama pemerintahan kabinetnya di mana Perdana Menteri Sukiman menempatkan program keamanan dan penciptaan stabilitas sebagai proritas utamanya. Feith berkomentar, bila dibanding Natsir maupun Hatta, Sukiman terlihat lebih tegas dan tangguh dalam usahanya menciptakan ketertiban dan keamanan negara. Tindakan-tindakan keras memang diambil Sukiman untuk mengatasi pergolakan politik, maupun "pemberontak-bandit", terlebih lagi bila terkait dengan kelompok kiri, seperti yang dilakukannya dalam peristiwa 'Razia Agustus". Ia menangkap lebih banyak orang dibandingkan para pendahulunya. Tindakan keras semacam ini dapat menekan angka kriminalitas maupun aksi-aksi kolektif yang dapat mengganggu ekonomi seperti pembegalan kargo di pelabuhan-pelabuhan, dan demonstrasi buruh dimana untuk sementara waktu gerakan radikal kalangan buruh terpaksa mengurangi aksinya. Pada kasus lain, Sukiman memadukan tindakan kerasnya dengan pendekatan yang lebih lunak, seperti yang ditunjukan di Kudus. Pada akhir Desember 1951, battalion tentara di Kudus melakukan desersi dan mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Darul Islam. Gerakan ini dapat dengan segera diatasi oleh tentara yang ada di Jawa Tengah dengan menggunakan kekuatan militer yang disertai persuasi politik.[44]

Dalam bidang ekonomi, nasionalisasi DJB tampaknya akan terus dikenang sebagai *legacy* terbesar dari kabinet Sukiman. Program Benteng dan "*Sumitro Plan*" yang diadopsi pemerintahan Sukiman juga turut menyumbang kenaikan jumlah pengusaha pribumi dan industri kecil, walaupun tidak dapat dipungkiri kurang cermat dalam menyaring para pemohon izin impor, malah menyebabkan proporsi pengusaha impor yang sah menurun. Kebijakan lain yang diambil pada era Sukiman adalah ditinggalkannya sistem nilai tukar berganda yang telah menjadi bagian dari sistem ekonomi fiskal sejak tahun 1950. Langkah ini diambil atas saran ekonom Jerman, Hjalmar Schacht, yang diundang ke Indonesia sebagai penasihat keuangan oleh Jusuf Wibisono dan Sumitro Djojohadikoesoemo sejak kabinet sebelumnya.[45]

Dalam waktu kurang dari satu tahun, Sukiman yang memiliki program jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat berhasil mempersiapkan rancangan undang-undang pengakuan serikat buruh, dan perjanjian kerja sama (*collective arbeidsovereenkomst*). Hal ini sebenarnya menunjukan posisi Sukiman terhadap kaum buruh di mana banyak kalangan yang mengarahkan kritik kepada kabinetnya dalam menekan suara-suara radikal kaum buruh. Terlepas dari itu, Sukiman sendiri sebenarnya telah memiliki kedekatan dengan gerakan buruh sejak lama. Selain aktif dalam PPPH bahkan menjadi ketua, dan merupakan pemrakarsa sekaligus motor penggerak bagi surat kabar buruh bertajuk "Oetosan Indonesia", Sukiman adalah wakil Indonesia untuk berpidato pada konferensi buruh internasional di Geneva Swiss

Presiden Sukarno memberikan keterangan pers dalam acara penyerahan mandat Kabinet Sukiman-Suwirjo pada tanggal 23 Maret 1952.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Presiden Sukarno memberikan arahan dalam penyerahan mandat kabinet kepada presiden tanggal 23 Maret 1952.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

pada 1939. Kehadirannya dalam konferensi itu merupakan undangan NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) yang memintanya menjadi ahli dalam pertemuan tersebut.[46] Dalam perjalanannya menghadiri konferensi, Sukiman sempat singgah di Belanda, dimana ia berkesempatan menyuarakan aspirasi serikat pekerja di tanah air di hadapan menteri tanah jajahan. Terkait dengan keterlibatannya dalam gerakan buruh, hal ini juga perlu dilihat dalam konteks pergulatan politik yang sedang berlangsung dalam tubuh organisisi buruh yang mempertemukan antara kelompok kiri dengan kalangan Islam. Keberadaan Sukiman dalam gerakan buruh—seperti yang pernah dilakukan pula oleh seniornya di PSII, Agus Salim—telah memberi perimbangan atas dominasi kelompok kiri dan mendorong organisasi serta gerakan buruh untuk tidak menjadi sekedar menjadi alat politik ideologi tertentu.

Tampaknya, protes yang marak dilakukan para buruh pada pertengahan tahun 1951—saat itu umat muslim sedang menjalankan puasa ramadhan—erat kaitannya dengan tuntutan mereka untuk memperoleh bonus hari raya sebagaimana yang diterima para pegawai negeri. Terkenal sebagai kabinet yang pemurah dalam hal keuangan bagi para pegawai negeri, kebijakan Sukiman yang sangat populer dan bahkan terus dipertahankan hingga sekarang—walaupun sempat dihentikan sementara waktu pada era Wilopo—adalah pemberian tunjangan hari raya. Sukiman memberikan bonus pada para abdi negara menjelang Idul Fitri (yang jatuh pada awal Juli 1951) sebesar Rp.125,- hingga Rp.200,- untuk setiap orang. Selain itu, pada masa Sukiman menjabat perdana menteri, para pegawai juga memperoleh tunjangan beras yang cukup untuk satu bulan.[47] Sedangkan, untuk menjamin pembelian beras dan ketersediaan pasokan beras dibentuklah BAMA (Jajasan-Bahan Makanan) pada November 1951 yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan pasokan bahan pangan, sehingga rakyat tidak harus membayar harga beras di luar kapasitas ekonomi mereka. Kebijakan ini tidak lepas dari usulan Menteri Perekonomian, Wilopo.

Selama menjabat sebagai perdana menteri, persoalan politik luar negeri adalah masalah terberat yang pernah dihadapi Sukiman. Terlepas dari kurangnya koordinasi dan mitigasi resiko atas langkah yang diambilnya maupun di sisi lain tendensi politik partai-partai terhadap kepemimpinannya, sejumlah kebijakan Sukiman dalam politik luar negeri, bahkan yang paling kontroversial sekalipun, merupakan terobosan terutama untuk meningkatkan daya tawar diplomatik Indonesia di hadapan negara mantan penjajah. Salah satu contohnya adalah ratifikasi Perjanjian San Fransisco yang pada mulanya banyak memunculkan tentangan. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian tersebut menjadi penting karena Ahmad Subajro dan delegasi diplomat Indonesia berhasil melobi Amerika memuluskan jalan bagi negoisasi lebih lanjut atas kepentingan Indonesia terhadap Jepang.

Persoalan yang lebih kompleks sebenarnya terjadi dalam hubungan dengan Belanda, dan oleh karenanya muncul Amerika yang dipandang dapat menjadi pihak yang menguntungkan bagi kelanjutan diplomasi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, dalam jangka waktu dua tahun setelah ditandatanganinya KMB, perkembangan yang

berlangsung di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan yang telah ditandatangi Indonesia dan Belanda tersebut. Agenda pemerintahan Sukiman dalam hal ini paling tidak meyasar tiga hal prinsipil yakni: untuk menghapuskan *unie-statuut* Indonesia-Belanda, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil KMB, meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara, serta memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam konteks inilah Sukiman mengambil langkah-langkah yang oleh sejumlah pengkritiknya dianggap condong berpihak pada Blok Barat, atau sikap politiknya yang kerap ditafsirkan sebagai *"pro-West Neutralist"*. Meskipun untuk melihat keseluruhan hasil akhir dari pendekatan yang ia buat masih perlu menunggu waktu, sejumlah usaha Sukiman merupakan terobosan penting dalam meningkatkan posisi diplomatik Indonesia dalam percaturan politik internasional. Hal ini ditunjukan melalui serangkaian kunjungan Menteri Luar Negeri pasca menghadiri perundingan di San Fransico. Saat ia tiba di Australia, dalam kunjungannya yang mendadak, Ahmad Subarjo memperoleh sambutan hangat dari para pejabat pemerintah. Lebih dari itu, melalui kunjungan ini khalayak di Australia dan juga media massa di sana memberikan tanggapan luar biasa baik menyangkut posisi Indonesia dalam penyelesaian kasus Irian Barat. Dalam kurun waktu yang singkat, sebagaimana komentar Feith, Indonesia telah mencapai titik tinggi dalam hubungannya dengan negara-negara Barat (non-Belanda).[48]

PENUTUP

Akhir dari Kabinet Sukiman yang jatuh pada bulan Februari 1952 menjadi titik penting dalam perjalanan demokrasi parlementer di mana polarisasi politik kepartaian mencuat lebih tajam. Berbeda dengan kabinet Natsir yang merupakan *zaken kabinet* yang anggotanya dipilih didasarkan pada keahlian, Kabinet Sukiman merupakan hasil dari kompromi antar partai politik yang bertujuan untuk membangun suatu pemerintahan yang kuat. Akhir dari kabinet ini menunjukan sebuah permulaan akan semakin sulitnya memperoleh kompromi kekuatan-kekuatan utama dalam politik Indonesia—terutama kelompok nasionalis dan Islam—yang kemudian terbukti dalam proses pembentukan kabinet-kabinet selanjutnya. Terlebih lagi, tak lama setelah kabinet Sukiman demisioner, terjadi perpecahan kekuatan dalam tubuh Masyumi dimana NU keluar dari partai itu. Yang menarik, walaupun saat NU keluar dari Masyumi Sukiman telah demisioner, Wahab Chasbullah dalam audiensinya dengan Sukarno, meminta agar jabatan perdana menteri tetap dipegang Sukiman. Terlepas dari itu semua, Sukiman adalah contoh yang baik dari pribadi yang bertransformasi dari seorang Jawa-nasionalis menjadi sosok Islam-nasionalis. Dengan karakter personal itulah, Pak Dokter Sukiman telah membuktikan diri sebagai tokoh yang mampu menjadi jembatan bagi kelompok nasionalis dan Islam, maupun kalangan modernis dengan mereka yang disebut tradisionalis.

ENDNOTES

1 Pidato pada Muktamar Masyumi ke-9 di Yogyakarta (April 1959) dengan judul "Peran Umat Islam dalam Revolusi Nasional"

2 M.C.Ricklefs, *A History of modern Indonesia*, (Houndsmills: Basingstoke, 2008), hlm. 293., Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Jakarta: Equinox Pub, 2007), hlm. 139.

3 Dr. H.F. Roll yang dikenal sebagai 'Bapak STOVIA' merupakan direktur sekolah yang berhasil mengumpulkan £ 178.000 untuk pembangunan gedung. Lihat dalam Mardanas Safwan; Sutrisno Kutoyo; Tashadi, *Prof. Dr. Bahder Djohan: karya dan pengabdiannya*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) hlm. 13.

4 Adrian Vickers, *A History of Modern Indonesia*, (New York: Cambridge University Press, 2005), hlm. 73

5 Pada kongres ini nama Jong Java mulai digunakan untuk menggantikan Tri Koro Darmo. Komposisi keanggotaan Jong Java juga mulai berubah dengan masuknya sejumlah tokoh muda yang kelak akan dikenang sebagai tokoh bangsa, satu diantaranya adalah Sukarno. Lihat M.C. Ricklefs, *op. cit*, hlm. 212, 228.

6 Pringgodigdo, A. K, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1994).

7 Harry A Poeze, *Di negeri penjajah: orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, (Jakarta: KPG bekerja sama dengan KITLV, 2014), hlm, 155.

8 *De Indische courant*, 23-07-1923. Penumpang yang dimaksud ditulis dengan nama Soekirman Wirjosandjojo (menggunakan ejaan lama dan huruf 'r' di tengah). Adapun penulisan Soekirman sangat lazim ditemui dalam berbagai terbitan Belanda untuk merujuk pada Sukiman (Wirjosandjojo). Daftar penumpang juga dimuat pada harian berbahasa Belanda lainnya. Adapun manifest penumpang disimpang di The National Archives, Kew-Inggris.

9 Muchtarudin Ibrahim, *Dr. Sukiman Wirjosandjojo: Hasil Karya dan Pengabdianya*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Invetarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional, 1985), hlm. 22.

10 Harry A Poeze, *op. cit*, hlm. 174.

11 R. Nalenan, *Arnold Mononutu: Potret Seorang Patriot*. (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hlm. 48.

12 Harry A Poeze, *op. cit*, hlm. 187.

13 Muchtaruddin Ibrahim, *op. cit*, hlm. 22.

14 Ki Hadjar Dewantara atau Soewardi Soerdjaningrat pernah bersekolah di STOVIA namun tidak pernah selesai karena sakit. Lihat Rosihan Anwar, *Sejarah kecil "petite histoire" Indonesia (Volume 3)*, (Jakarta : Buku Kompas, 2009), hlm. 27.

15 PNI dibentuk Sukarno pada tahun 1927, pada tahun yang sama ketika Sukiman masuk menjadi anggota PSI.

16 M.C. Ricklefs, *op. cit*, hlm. 230.

17 Sejumlah sumber berbeda pendapat mengenai penunjukan Sukiman sebagai ketua PPPH. Muchtarudin Ibrahim menyebutkan H.O.S. Cokroaminoto menunjuk Sukiman sebagai pengganti ketua baru pada PPPH pada 1931. Adapun Ingelson mengatakan tidak mengatakan bahwa Sukiman ditunjuk oleh Tjokroaminoto melainkan ditetapkan melalui konggres. Lihat dalam Muchtaruddin Ibrahim, *op.cit*, hlm. 67-9., dan John Ingleson, *Workers, Unions and Politics: Indonesia in the 1920s and 1930s*, (Leiden : Brill, 2014), hlm. 164.

18 Ingelson, *ibid*, hlm. 166. Ingelson mencatat, tampaknya Sukiman sendiri mengalami masalah keuangan. Ia meminjam 16.000 gulden dari modalnya yang ada di perusahaan, dan pada 1932 asih tersisa 8.000 gulden. Lihat footnote 97.

19 Harry A Poeze, *Politiek-Politioneele Overzichten Van Nederlandsch-Indie: Deel IV 1935-941*, (Dordrecht : Foris Publications, 1994), hlm. 162.

20 Mengenai Indonesia berparlemen lihat dalam Uji Nugroho W, "Militia politics: Civil rights and the debate on indigenous conscription in Java, 1940-1942", *BA Thesis* Leiden University, 2011. Hlm. 19-22.

21 M.C. Ricklefs, *op. cit*, hlm. 243.

22 Remy Madinier, *Islam and Politics in Indonesia : the Masyumi Party Between Democracy and Integralism*, (Singapore : NUS Press, 2015), hlm. 68.

23 Ibid, hlm. 81.

24 Hebert Feith, *op. cit*, hlm, 179-80.

25 *Ibid*, hlm. 219.

26 Bruce Glassburner, *Economic Policy-Making in Indonesia 1956-1957*, dalam Bruce Glassburner.,(ed.) *The Economy of Indonesia: Selected Readings,* (Kuala Lumpur: Equinox Edition 2007), hlm. 86.

27 *Ibid*.

28 Soebagijo I.N., "Riwayat Hidup Wilopo", dalam *Wilopo 70 tahun*, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), hlm. 112.

29 Hebert Feith, *op. cit*, hlm. 185.

30 Pada 1947, Sewaka adalah gubernur Jawa Barat yang memberi mandat kepada Nasution untuk melakukan "perlawanan rakyat total". Baik selama gerilya maupun setelah merdeka, Sewaka juga tidak segan mengunjungi keluarga Nasution. Barry Turner, A.H. *Nasution and Indonesia's elites: "people's resistance" in the War of Independence and post-war politics*, (Lanham, MD: Lexington Books, 2018), hlm. 162.

31 Hebert Feith, *op. cit*, hlm. 196.

32 Setting peristiwa dan tensi pada waktu Razia Agustus diceritakan secara hidup dalam Francisca Fanggidaej, *Memoar perempuan revolusioner*, (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hlm. 174-184.

33 Hebert Feith, *op. cit*, hlm. 142-3.

34 Rizal Sukma, *Islam in Indonesian foreign policy*, (London, New York: Routledge Curzon, 2006), hlm. 30.

35 Hebert Feith, *op. cit*, hlm. 195.

36 *Ibid*, hlm.196.

37 Kiichi Miyazawa dan Robert D Eldridge, *Secret talks between Tokyo and Washington: the memoirs of Miyazawa Kiichi 1949-1954*, (Lanham: Lexington Books, 2007), hlm. 51.

38 Andrew Roadnight, *United States Policy towards Indonesia in the Truman and Eisenhower Years*, (Hampshire-New York: Palgrave Macmillan UK, 2002), hlm. 93.

39 *Ibid*, hlm. 3.

40 Timo Kivimaki, "US-Indonesia Negotiations over Aids" dalam I William Zartman; Jeffrey Z Rubin, *Power and negotiation*, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005) hlm. 69-71.

41 Hebert Feith, *op. cit*, hlm. 200.

42 *Ibid*, hlm. 203.

43 Feith, Wilopo, 81

44 Hebert Feith, *op. cit*, hlm. 207-8.

45 Glassburner, *op. cit*, hlm. 86.

46 Harry A Poeze, *op. cit*, hlm. 279.

47 Hebert Feith, *op. cit*, hlm. 186-7.

48 *Ibid*, hlm. 197.

WILOPO

WILOPO:

Di Tengah Pergulatan Partai Politik dan Tentara

"Wie het laatst lacht, lacht het best".

(Siapa tertawa paling akhir, tertawa paling baik)

Wilopo, mengutip pepatah Belanda[1]

PENDAHULUAN

Selain sumbangsihnya melalui karya dan kebijakannya dalam pemerintahan, kiprah Wilopo saat menjabat sebagai Perdana Menteri juga dikenang oleh karena kepribadiannya. Herbert Feith menggambarkan Wilopo sebagai seorang yang berfikiran adil, yang menuaruh rasa simpati besar kepada nasib kaum kecil. Wilopo adalah nasionalis dari PNI, namun bukan tipe loyalis fanatik buta, sehingga ia menjadi orang yang dapat diterima oleh semua kalangan. Komentar lain menegaskan bahwa Wilopo adalah seorang penyabar, *kalm,* dan yang selalu bekerja secara hati-hati. Wilopo menjabat Perdana Menteri untuk mengarungi suatu era yang penuh dinamika, ketika pergulatan politik antar partai semakin menajam, yang berlangsung bersamaan dengan ingin kembalinya tentara ke panggung politik nasional. Kiprah Wilopo di kancah politik Indonesia dekade 1950 yang penuh gejolak dan serba tidak stabil, menunjukan bahwa karakter pemimpin Indonesia tidak hanya para *solidarity maker*, ataupun administrator semata, melainkan pula seorang penyabar yang mampu bekerja di bawah kritikan dan serangan, serta keberadaannya dapat diterima secara luas.

PURWOREJO

Purworejo pada awal abad ke-20, bukanlah kota kabupaten yang terlalu ramai, namun tidak pula dapat disebut terlalu kecil. Kota ini mewarisi cukup banyak perkembangan dari dua abad sebelumnya. Sebelum Purworejo muncul, pusat wilayah ini berada di Bagelen yang pada saat Perang Jawa (1825-1830) berlangsung menjadi salah satu kantong perlawanan terpenting Diponegoro. Usai perang, Bagelan yang merupakan wilayah mancanegara Yogyakarta diambil oleh pemerintah kolonial untuk dimasukan ke dalam sistem *direct bestuur* (pemerintahan langsung) Karesidenan Kedu dengan kotanya yang baru: Purworejo. Sebagai wilayah yang diperintah langsung oleh pemerintah kolonial, infratruktur kota berkembang cukup baik seperti dibangunnya gedung pemerintahan, rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, tangsi militer, dan stasiun kereta api. Oleh karena itu pula, penduduk Purworejo juga berkembang dan beragam. Selain orang-orang Jawa, kota ini menjadi tempat tinggal bagi komunitas Tionghoa, Arab, orang-orang Afrika bekas serdadu KNIL, juga orang Belanda. Pernah lahir di kota ini linguist sekaligus orientalist ternama Johan Hendrik Caspar Kern.

Di kota ini pulalah, Wilopo dilahirkan pada 21 Oktober 1908, dan dibesarkan dalam asuhan sebuah keluarga seorang Mantri Guru bernama Raden Prawirodihardjo. Pak Mantri Guru mencurahkan perhatian dan kasih sayang yang sangat besar untuknya. Tumbuh sebagai anak dari keluarga yang cukup terpandang, walaupun untuk ukuran kota kecil, ia mendapatkan pendidikan yang baik sejak usia belia. Terlebih lagi dalam dalam *akta van bekenheid* Wilopo tercantum nama Prawirodihardjo, yang masih memiliki gelar raden, lebih-lebih ia bekerja sebagai pegawai. Oleh karenanya, dibenarkan bagi Wilopo untuk masuk sekolah HIS.

Di tempat Pak Mantri Guru itu, Wilopo tidak sendiri, ada banyak anak lainnya yang dititipkan oleh orang tuanya. Pada jaman itu, sangat lazim bagi orang tua terutama yang tinggal di desa untuk menitipkan anak-anaknya kepada kerabat yang ada di kota agar dapat sekolah sekaligus *ngenger*. Wilopo sendiri baru mengetahui hubungan sebenarnya dengan Pak Mantri Guru setelah beranjak dewasa. Setelah tamat dari AMS, Wilopo diberi tahu bahwa Pak Mantri Guru Pawirodihardjo, yang selama ini dianggapnya sebagai bapak, bukanlah ayah kandungnya melainkan orang tua angkatnya. Ayah kandung Wilopo bernama Soedjono, adik ipar Pak Mantri Guru, yang sebelumnya ia anggap paman. Sewaktu ia mengetahui hal tersebut, ibu kandungnya telah tiada.[2]

Meskipun diasuh oleh keluarga angkat, masa kecil Wilopo adalah dunia yang penuh kegembiraan. Sebagaimana lumrahnya sebayanya, Wilopo kecil memiliki banyak waktu untuk bermain. Tampaknya tuntutan bagi anak-anak yang tinggal di kota tidak terlalu banyak, terlebih lagi Wilopo hidup di tengah-tengah keluarga pegawai zaman kolonial. Berbeda dengan anak petani di desa yang harus membantu orang tua ke ladang; atau mengurus ternak, Wilopo hanya memiliki sedikit kewajiban yakni untuk ke sekolah, dan waktunya yang lain dapat ia pergunakan untuk bermain. Sepakbola dan kereta api adalah dua kesenangannya.

Stasiun kereta api Purworejo dibangun pada akhir abad ke-19. Pembangunan stasiun kereta api ini memiliki paling tidak dua maksud yaitu untuk melancarkan aktivitas perekonomian, dan menopang kebutuhan militer. Kereta api adalah kesenangan yang luar biasa, suatu *privilege* bagi Wilopo dan kawan-kawannya karena tidak semua orang waktu itu berkesempatan menyaksikan kereta api. Anak-anak suka sekali menyaksikan kereta yang beragam jenisnya: ada yang besar, ada pula yang sedang. Terlebih lagi ketika gerbong-berbong mulai dijalankan oleh juru lansir dan mesin loko bergemuruh keras sekali, lantas besi-besi saling berhimpit mengeluarkan suara menderit, maka Wilopo dan kawan-kawannya bertambah senang. Sepakbola adalah hiburan yang lain. Saat itu, Purworejo sudah memiliki kesebelasan yang populer terutama dari *elftal*-nya KNIL dan para siswa HKS (*Hogere Kweekschool*).

Jika tidak ada pertandingan yang disaksikan, Wilopo dan teman-temannya akan bertanding bola sendiri.

Sepakbola dimainkan di alun-alun kota Purworejo yang tata ruangnya masih mengikuti konsep tradisional catur gatra dengan dua beringin besar di tengahnya, serta terdapat kantor bupati, dan masjid di dekatnya. Tempat tinggal Wilopo berada di pusat kota, tidak jauh alun-alun dan Pecinan. Pecinan adalah kawasan yang selalu ramai karena banyak toko dan menjadi pusat perdagangan. Sesekali Wilopo datang ke Pecinan untuk membeli kebutuhan sekolah.

Wilopo bersekolah di HIS (*Hollands Indische School*), sekolah Belanda untuk kaum bumiputera. Karena Pak Mantri Guru Prawirodihardjo menguasai bahasa Belanda dengan baik, sebenarnya Wilopo memiliki kesempatan untuk bersekolah di ELS (*Europesche Lagere School*) yang lebih elit. Bahkan pamannya yang menyekolahkan anak-anaknya di ELS menjamin bahwa Wilopo pasti diterima jika mendaftar di sana. Akan tetapi Pak Mantri Guru Prawirodihardjo memiliki rencana lain. Ia menginginkan Wilopo kelak dapat menjadi pegawai bumiputra, maka oleh karena itu ia ingin Wilopo melanjutkan sekolahnya ke OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*) setelah tamat dari HIS.

Selama bersekolah, Wilopo pernah pindah rumah, mengikuti Pak Mantri Guru yang juga pindah tugas. Dari kota Purworejo mereka pindah ke Loano yang walaupun jaraknya tidak terlalu jauh terpaut beberapa kilometer saja, namun coraknya dan kehidupan masyarakatnya sangat berbeda. Purworejo adalah kota, sedangkan Loano lebih bersifat pedesaan. Bagi Pak Mantri Guru, perpindahan ini tidak lagi bisa ditawar, karena pekerjaan barunya sebagai SO (*School Opziener*) membuatnya harus tinggal di Sekolah. Bagi Wilopo, perpindahan ini tidak menimbulkan masalah. Ia sudah sangat terbiasa dengan suasana desa. Ia suka pergi ke desa mengikuti anak-anak lain yang tinggal ditempat Pak Mantri Guru pulang kampung ketika ada libur sekolah.

Tiga tahun tinggal di Loano, Wilopo sudah hampir menyelesaikan sekolahnya. Tak berselang lama kemudian, keluarga ini pindah lagi ke Purworejo. Kini giliran Wilopo yang sudah mengantongi ijazah HIS harus menentukan langkah yang akan ia tempuh selanjutnya. Pak Mantri Guru tentu memilih OSVIA, bahkan ia sudah mempersiapkan *udheng* (ikat kepala) untuk Wilopo, sebab sudah menjadi adatnya jika para pelajar OSVIA mengenakan ikat kepala sebagai pelengkap busana mereka. Pertimbangan memasukan Wilopo ke sekolah itu sebenarnya sederhana saja. Harapannya, ketika Wilopo lulus nanti ia akan mudah dapat kerja, dan waktu untuk menuju lulus juga tidak terlalu lama. Selama itu, Pak Mantri Guru masih sanggup memberinya biaya. Hanya saja atas saran dari seorang saudaranya, rencana ini berubah. Wilopo kemudian masuk MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) yang memungkinkannya setelah lulus untuk meneruskan ke AMS dan perguruan tinggi. Untuk sementara waktu, masalah keuangan untuk biaya sekolah Wilopo dapat teratasi berkat bantuan seorang kerabat yang berkerja sebagai dokter.

PENGGEMBLENGAN

Sekolah MULO berada di kota Magelang. Selama belajar di sana, Wilopo mondok di rumah Janda Wedana Bendungan dengan *geldkost* sebesar *f*.12.5,- setiap bulannya. Untuk keperluan ini, uang bulanan diberikan oleh dokter Soekadi. Pada bulan keenam, Wilopo mulai menerima beasiswa. Dan ia juga memperoleh rapelan beasiswa selama enam bulan dari masa studinya yang dilaluinya dengan biaya dokter Soekadi yang besarnya mencapai *f*.120,-. Selama sekolah, ia berkawan dekat Abdulrasjid, teman bermain bola sekaligus kakak tingkat dua tahun di atas Wilopo. Mereka banyak menghabiskan waktu saat liburan untuk pergi bersama, dengan menggunakan sisa uang kost. Selain bermain bola, Wilopo juga masuk dalam organisasi kepanduan *Natipij* (*Nationaal Islamistische Padvinderij*) milik Sarikat Islam dimana ia memperoleh pelajaran sholat. Walaupun ia tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga Pak Mantri Guru yang memeluk Islam, tampaknya ia lebih kuat dalam memegang tradisi Jawa. Dari Pak Mantri Guru, Wilopo kerap memperoleh pelajaran yang disampaikan dalam bait-bait tembang.

Setelah menempuh pendidikannya selama empat tahun, Wilopo memperoleh ijazah MULO. Kawannya, Abdulrasjid memilih untuk tidak melanjutkan studi untuk bekerja sebagai *klerk* (juru tulis) di Semarang. Nasib Wilopo lain cerita. Ia beruntung nilai raportnya cukup baik sehingga mempermudahnya untuk memperoleh beasiswa. Karena itu, Wilopo berangkat ke Yogyakarta untuk menyambung sekolahya di AMS-B Yogyakarta. Sekolah Wilopo berada di kawasan yang merupakan *enclave* bagi orang-orang Belanda yang tinggal di kota ini, dikenal dengan Kotabaru. Selama di Yogyakarta, Wilopo tinggal di rumah pamannya, Mas Nirman yang seorang pensiunan kepala sekolah.

Pelajaran di sekolah dapat dikuasainya dengan cukup baik. Artinya Wilopo yang memang dikenal sebagai pribadi yang serius tidak tertinggal dengan teman-temannya. Hanya saja pada saat itu, Wilopo juga sudah mulai masuk dalam organisasi pergerakan yang ternyata cukup banyak menyita waktu dan perhatiannya. Menjelang masa studinya berakhir, ia menyadari bahwa terdapat nilai salah satu pelajaran yang rata-rata, walaupun untuk mata pelajaran yang lain nilainya cukup bagus. Keadaan ini membuatnya sulit untuk memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Akhirnya, Wilopo memang tamat dari AMS-B namun tanpa jaminan akan memperoleh beasiswa untuk studi berikutnya.

Dalam kondisi ini, Wilopo merasakan bahwa apa yang dahulu pernah direncanakan Pak Mantri Guru untuk memintanya sekolah di OSVIA setelah tamat HIS ada benarnya. Karena selepas OSVIA ia lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan. Sedangkan sebagai lulusan AMS-B, walaupun juga terbuka peluang bekerja, Wilopo juga berkeinginan melanjutkan sekolahnya. Hanya saja untuk meminta ongkos dari Pak Mantri Guru juga tidak lagi memungkinkan karena biaya sekolah di THS (*Technischehoogeschool*) seperti yang ia cita-citakan ditambah lagi dengan biaya hidup tidak akan dapat dibayar oleh orang tuanya tanpa memperoleh besiswa. Untuk memecahkan persoalan ini, Pak Mantri Guru mengajaknya berembug. Tetapi kali ini bukan hanya mereka berdua saja, melainkan

Sudjono juga terlibat dalam pembicaraan. Pada kesempatan itulah Wilopo diberi tahu tentang siapa ayah kandungnya.

Walaupun kondisi serba sulit, pembicaraan itu mensepakati bahwa Wilopo tetap akan meneruskan studinya di THS Bandung. Persoalan biaya yang memang menjadi pokok masalahnya tidak serta merta terpecahkan dengan kesepakatan itu. Hanya saja, keberuntungan belum menjauh dari Wilopo. Melalui surat menyurat dari kawan baiknya, Abdulrasjid yang sudah bekerja, Wilopo memperoleh jaminan dari kaan baiknya itu jika ia belum memperoleh beasiswa maka Abdulrasjid akan menanggung biaya sekolahnya. Adapun untuk tempat tinggal di Bandung, ada seorang famili yang berada di sana yang bersedia menampung Wilopo. Sedangkan untuk uang harian ada banyak kerabat yang bersedia iuran untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya selama bersekolah di THS. Oleh karena itu tidak ada aral lagi yang merintangi keberangkatannya ke Bandung.

Di Bandung, Wilopo tinggal di kediaman Prawirosentiko, seorang Matri Ukur atau juru kadaster yang masih terhitung kerabatnya. Kali ini Wilopo harus pintar-pintar dalam mengatur pengeluaran karena keterbatasan dana, sangat berbeda dengan yang ia peroleh saat di Magelang maupun Yogyakarta. Selain masalah pembiayaan yang dapat ia atasi dengan hidup hemat, dua persoalan lain yang menuntut kemampuan adaptasi Wilopo yakni iklim Bandung, dan dengan pembelajaran di sekolah. Bandung memiliki udara yang dingin dan lembab. Lama kelamaan, kondisi udara kota Bandung berpengaruh terhadap kesehatannya. Ia beberapa kali jatuh sakit terkena bronchitis dan mulai muncul pula gejala penyakit asthma. Selain itu, belajar di sekolah teknik bukan hanya menuntut Wilopo bekerja keras namun juga menyita banyak waktunya. Siswa-siswa THS selain mengikuti pelajaran di kelas, juga diwajibkan melalukan praktikum dan kerja di laboratorium. Jika ada siswa yang terpaksa absen semisal karena sakit, maka harus menggantinya di lain waktu, yang sudah barang tentu saja menambah berat pekerjaan dan memerlukan waktu lebih. Bagi Wilopo, kondisi inilah yang memberatkannya, padahal ia juga mulai aktif dalam dunia pergerakan dan sangat tertarik mengikuti kasus persidangan Bung Karno.

Karena penyakit Asthma semakin sering muncul terutama saat mempersiapkan ujian, Wilopo kemudian memutuskan untuk pindah ke Sukabumi untuk sekedar memulihkan kesehatan. Di sana udaranya dingin namun lebih kering, sehingga akan lebih baik bagi tubuhnya. Selama berada di Sukabumi Wilopo tinggal di rumah seorang pegawai kabupaten yang masih merupakan saudara sepupunya. Tampaknya, kondisi di Sukabumi membuatnya merasa lebih baik. Wilopo pun betah. Walaupun semula hanya berniat untuk tinggal sesaat sembari beristirahat, namun cerita berubah ketika ia bertemu Ki Soedarso—pemimpin Taman Siswa Sukabumi.

Pada waktu itu, Taman Siswa yang sedang mengembangkan diri di Sukabumi membuka sekolah Taman Dewasa. Persoalannya, Ki Soedarso mengalami kesulitan untuk memperoleh tenaga pengajar. Oleh karena itu, ia meminta Wilopo untuk membantunya. Ketika Taman Dewasa benar-benar dibuka pada tahun ajaran 1932/1933, Wilopo merupakan pemimpinnya. Adapun Ki Soedarso mengepalai keseluruhan Sekolah Taman Siswa Sukabumi. Bagi Wilopo, keterlibatannya di Taman Siswa sangat berarti. Selain memperoleh gaji yang besarnya sebenarnya tidak seberapa, ia menikmati sangat perannya dalam memberi pelajaran. Wilopo dapat mempraktekan ajaran "massa aksi" Bung Karno yang sejak disampaikannya dalam pidato Indonesia Menggugat, gagasan massa aksi telah banyak mempengaruhi kalangan pergerakan.

Selama menjadi pengajar, Wilopo memiliki lebih banyak waktu untuk membaca. Salah satu buku yang diselesaikannya adalah terjemahan "Das Kapital". Waktu itu, karya Karl Marx ini memang tengah populer di kalangan pemuda terutama kaum pergerakan karena isinya merupakan anti thesis paling dasyat atas kolonialisme dan imperialisme. Selain itu Wilopo juga membaca karya-karya lain yang merupakan kritik atas Marxisme. Setelah menyelami kehidupan sebagai guru dan memiliki berbagai aktivitas lain terutama yang berkaitan dengan gerakan politik di Sukabumi, Wilopo nyaris tidak kepingin lagi melanjutkan studinya di sekolah teknik. Hanya saja, pertemanannya dengan Sjamsudin mengembalikan cita-citanya untuk meraih pendidikan tinggi.

Sjamsudin adalah seorang putra penghulu di Sukabumi yang sedang menempuh studi di sekolah hukum. Sebagai mahasiswa RHS (*Rechthogeschool*), Sjamsudin masih memiliki waktu cukup untuk mengembangkan diri, dan terlibat dalam organisasi pergerakan. Bahkan, oleh karena ekonomi keluarganya yang sangat baik, ia dapat pulang balik Jakarta-Sukabumi setiap akhir pekan menggunakan mobil. Sjamsudin sendiri melihat Wilopo sebagai pribadi yang penuh potensi, dengan pembawaan yang tenang. Dalam suatu kesempatan, Sjamsudin mengutarakan pemikirannya tentang Wilopo yang menurutnya akan lebih baik jika kembali meneruskan sekolahnya. Ia meyakinkan Wilopo bahwa sekolah di RHS seperti dirinya, berbeda sekali dengan di teknik seperti yang pernah dialami Wilopo karena tidak ada praktikum dan kerja laboratorium sehingga akan ada cukup waktu untuk mengurus hal lain. Terlebih lagi di RHS Wilopo akan memiliki lebih banyak peluang untuk masa depannya. Wilopo berhasil teryakinkan.

Setelah berpamitan kepada para pengasuh Taman Siswa, Wilopo berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan studi di RHS. Tidak banyak kendala yang ia hadapi untuk masuk ke sekolah itu, termasuk dalam hal biaya dimana sistem pendidikan saat itu mengijinkan Wilopo pindah sekolahan tanpa harus membayar ulang. Demikian pula untuk tempat tinggal, Wilopo dapat menumpang di kediaman kawan baiknya, Abdulrasjid yang ketika itu bekerja untuk jawatan pegadaian negeri. Hubungan pertemanan antara keduanya yang telah berlangsung sangat lama ini kemudian berubah menjadi keluarga, ketika Wilopo menikahi seorang guru bernama Sumikalimah, yang tak lain adalah adik Abdulrasjid. Setelah berkeluarga, Wilopo memilih untuk pindah rumah. Selain sekolah, ia juga bekerja.[3]

Studi Wilopo di RHS terbilang cukup lama. Ia masuk pada 1933-1934, dan baru pada 1939, Wilopo menempuh ujian D-II. Ia kemudian

melanjutkan dengan membuat karya akhir berjudul *Mohammadanese Instellingen* yang selesai pada 1941. Hanya saja, sebelum diujikan, Jepang keburu datang dan masyarakat Indonesia memasuki suatu zaman baru. Seharusnya, Wilopo dapat dapat memperoleh gelar sarjana sebelum kedatangan Jepang. Hanya saja, kesibukannya dalam politik membuatnya tidak sempat menempuh ujian akhir. Walaupun pada akhirnya, Wilopo tetap memperoleh status sarjana, karena situasi yang tidak lagi memungkinkan untuk menyelenggarakan aktivitas pendidikan secara normal, pimpinan RHS mengambil kebijakan bagi yang sudah menyelesaikan ujian D-II berhak atas gelar sarjana.

KIPRAH POLITIK

Setelah beranjak dewasa, Wilopo dan kehidupan politik tidak terpisahkan. Ketertarikannya pada bidang ini mulai muncul saat Wilopo tinggal di Yogyakarta, dimana ia menumbuhkan banyak hal dalam dirinya. Di kota itu Wilopo mulai dapat merasakan dan menemukan arti sebenarnya dari penjajahan. Dari pengalamannya selama tinggal di *vorstenlanden* yang merupakan pusat dari kebudayaan Jawa yang penuh dengan keagungan, Wilopo mulai menyadari bahwa bangsa Indonesia tidak kalah besar dengan bangsa lain. Namun sayangnya apa yang ia lihat dan rasakan tentang kehidupan masyarakat Indonesia tidaklah demikian, bahkan sebaliknya, bangsa yang sejatinya besar itu tampak lemah di hadapan penjajah.

Saat di Yogyakarta, selain menghabiskan waktu untuk belajar sebagaimana yang dikerjakan pelajar lain, ia menekuni kegemarannya bermain bola, dimana tampaknya dia punya berbakat besar. Klub sepakbola yang sering ia ikut bermain bersama adalah Jong Java—organisasi pergerakan kedaerahan yang merupakan perkumpulan pemuda Jawa. Jadi tidak terlalu salah jika ada anggapan bahwa Jong Java sangat fokus menjadi perkumpulan para pemuda Jawa ternyata tidak selalu politis. Bahkan Wilopo sendiri merasa bahwa organisasi ini terlalu kalem dan kurang progresif, sehingga ia merasa tidak puas. Oleh karenanya ia kemudian bergabung dengan Perhimpinan Pemuda Indonesia.

Ketika Wilopo pindah ke Bandung, perhatiannya terhadap masalah politik semakin dalam. Terlebih lagi, rumahnya yang ditempatinya tidak jauh dari kediaman Sukarno, tokoh penting dan masyur dalam dunia pergerakan kebangsaan Indonesia saat itu. Bagi Wilopo, nama Sukarno telah ia dengar sejak lama ketika ia masih menempuh pendidikannya AMS-B di Yogyakarta. Dalam banyak hal, Wilopo menaruh simpati dan kekaguman terhadap Sukarno muda, terutama oleh karena retorikanya tatkala berpidato dimana Sukarno sering tampil dengan menyampaikan kalimat-kalimat menarik yang dikutipnya dari para tokoh besar dunia. Walaupun sebelumnya Wilopo tidak sepenuhnya mengerti seluruh maksud dari pidato Sukarno, lama kelamaan ia pun menjadi paham arti sesungguhnya dari ucapan Sukarno.

Wilopo memanfaatkan kesempatan selama tinggal di Bandung untuk mengenal lebih dalam Sukarno. Ia mengikuti perkembangan persidangan Sukarno di *Landraad* Bandung, hingga sangat menyelami pidato *Indonesia Mengoegat*. Terlebih lagi, dalam waktu setengah tahun, dari pertegahan hingga akhir 1930, kasus Sukarno ini memperoleh pemberitaan besar-besaran baik hingga dimuat pula dalam koran-koran luar negeri. Pada akhir 1931 Sukarno dibebaskan dari penjara Sukamiskin. Wilopo bersama kawan-kawannya menemui pahlawan mereka itu tidak berselang lama setelah Sukarno dapat menghirup udara segar di luar penjara. Persehubungan ini terus berlanjut dan mereka juga kerap terlibat tukar pikiran dalam berbagai kesempatan. Tentu, masa-masa itu menjadi periode penting dalam kehidupan Wilopo untuk belajar politik dari tokoh yang namanya menjadi sangat terkenal di seantero negeri setelah keluar dari penjara.

Ketika Wilopo mulai terlibat secara intensif dalam politik merupakan tahun-tahun sulit bagi kaum pergerakan. Waktu itu De Jonge, Gubernur Jenderal yang terkenal konservatif, sedang menggiatkan politik *rust en orde* (ketenangan dan ketertiban), di mana penjajah menggunakan tangan besi untuk membungkam suara-suara progresif kelompok nasionalis.[4] Selain Gubernur Jenderal membekali diri dengan kuasa luar biasa yang dinamakan *exorbitante rechten* (hak istimewa), pemerintah juga memiliki PID dan banyak mata-mata. Oleh karena kebijakan politik pengamanan ini, PNI yang dipimpin Sukarno dilarang keberadaannya.

Hatta dan Sjahrir yang baru pulang dari Belanda kemudian mendirikan PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia atau 'Pendidikan') yang lebih berorientasi pada pembentukan kader dalam memperjuangkan hak-hak politik bangsa Indonesia. Sedangkan, Sartono mendirikan Partindo (Partai Indonesia) sebagai kelanjutan dari PNI yang telah dibubarkan pemerintah kolonial. Sukarno yang sebenarnya mencoba untuk menggabungkan Partindo dan Pendidikan namun tidak berhasil kemudian memilih untuk bergabung dengan Partindo pada 1932. Pilihan ini didasarkan pada ideologi Partindo yang lebih sesuai dengan konsep Sukarno yakni massa aksi adalah jalan utama yang harus ditempuh untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan, memang partai ini berhasil memperoleh pengikut yang banyak, dikabarkan jumlahnya mencapai 20.000 orang.

Pilihan Sukarno untuk masuk Partindo tampaknya turut mempengaruhi pandangan politik Wilopo yang setelah menetap di Jakarta masuk dalam Partindo. Sebelumnya, saat masih di Sukabumi, Wilopo sebenarnya juga telah terhubung dengan Partindo dan para anggotanya atas ajakan Abdulrahman. Hanya saja, Wilopo tidak menjadi anggotanya dan hanya terlibat dalam sejumlah kegiatan Partindo seperti memberikan kursus-kursus bagi para anggota organisasi dimana ia merasa puas.[5] Di Jakarta, keterlibatan Wilopo dalam Partindo semakin besar. Hanya saja, pemerintah kolonial semakin ketat dalam membatasi kaum pergerakan. Tidak lama kemudian, pada Agustus 1933, Sukarno kembali ditangkap atas tulisannya *Mentjapai Indonesia Merdeka*. Bersama keluarganya, ia lalu diasingkan ke Ende pada Februari 1934 dan dipindahkan ke Bengkulu pada 1938. Nasib sama juga dialami Hatta Sjahrir dan sejumlah nama penting dalam pergerakan nasional. Mereka ditangkap dan ditahan selama beberapa bulan di berbagai penjara seperti Glodok, Sukamiskin, Banceuy, dan Cipinang, sebelum kemudian dibuang ke Tanah Merah, Boven Digoel yang kejam.

Selain menangkap para pemimpin Partindo dan Pendidikan, rezim de Jonge juga melarang rapat-rapat ataupun konggres untuk digelar oleh

sejumlah organisasi pergerakan. Sedangkan untuk aktivitas dari perkumpulan lain dibatasi juga dimata-matai. Tindakan yang lebih keras kemudian diambil pemerintah kolonial dengan membubarkan Partindo dan Pendidikan. Gerakan nasionalis progresif lumpuh di tahun-tahun ketika Wilopo menjalani kiprah politiknya di Partindo. Meskipun demikian, Wilopo masih memiliki tempat lain untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.

Selain menjadi pengajar di Perguruan Rakyat, Wilopo juga dikenal sebagai penulis yang baik. Bahkan pekerjaan tersebut dapat diandalkan untuk membantu menyokong keuangan keluarganya setelah menikah. Wilopo sering memberi kursus penulisan melalui "Instituut Jurnalistiek & Pengetahuan Oemoem" yang didirikannya bersama Moh. Tabrani, Sumanang, dan Maruto Nitimihardjo. Di sekolah itu, Wilopo memberi pelajaran tentang ranjau-ranjau pers. Karena pengalaman dan kecakapannya dalam menulis, Wilopo dipercaya untuk menjadi wakil redaktur pada majalah Indonesia Raya yang diterbitkan oleh PPPI (Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia). Selain itu, Wilopo terlibat dalam berbagai organisasi yang diperuntukan bagi para pelajar lainnya seperti Studen Islam Studieclub, dan Unitas Studisorum Indonesiensis. Kiprahnya berlanjut lebih serius ketika organisasi baru bernama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan pada 1937.

Pemberlakuan politik tangan besi kolonial mematikan gerak kaum progresif revolusioner, dan yang tersisa adalah kelompok moderat yang mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial dengan turut dalam parlemen. Gelanggang politik Indonesia waktu itu sangat didominasi kiprah Parindra—lingkaran kelompok kooperatif yang dibentuk pada 1935 sebagai gabungan Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Di bawah pimpinan Dr. Sutomo, dan tokoh lain seperti M.H. Thamrin, dan Sukarjo Wiryopranoto, Parindra tumbuh pesat dengan dukungan massa yang cukup luas, dan memiliki wakil di *volksraad*. Namun, kiprah politik Parindra tidak dapat memuaskan kaum revolusioner yang kemudian mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) pada bulan Mei 1937. Pembentukan Gerindo tidak dapat dilepaskan dari Partindo—yang sudah dibubarkan—dan usaha untuk mendorong gerakan politik nasionalisme menjauh dari sikap konservatif.

Saat didirikan Gerindo dipegang oleh orang-orang progresif yang rata-rata di awal usia tigapuluhan tahun seperti Amir Sjarifuddin, A.K. Gani, dan Muhammad Yamin, kecuali Mr. Sartono yang saat organisasi ini dibentuk telah berusia 37 tahun. Tampuk pimpinan kepengurusan organisasi ini dipegang oleh mahasiswa kedokteran asal Sumatra, A. K. Gani. Sebenarnya kandidat paling potensial untuk posisi ini adalah Amir Sjarifuddin namun karena namanya sudah sejak lama menjadi target penangkapan PID, ia tidak bersedia untuk memimpin Gerindo. Adapun Wilopo menjabat sebagai Wakil Ketua II merangkap sebagai Ketua Departemen Perburuhan. Dengan keterlibatannya dalam Gerindo, Wilopo sering memberikan kursus kepada para kader, juga memulai kedekatannya dengan kaum buruh, hubungan yang terus bertahan hingga akhir karirnya nanti.

Gerindo yang berhaluan anti-fasis kerap menyamakan pemerintah kolonial sebagai rezim tangan besi. Berbeda dengan Parindra yang bersifat kooperatif, Gerindo yang bergerak secara non-kooperasi mulanya menolak untuk bekerjasama dengan pemerintah. Namun, pengawasan ketat dan dibarengi dengan tindakan-tindakan keras pemerintah terhadap organisasi yang bersifat non-kooperatif dan radikal sangat berpengaruh terhadap langkah organisasi ini. Dalam hal ini, pemerintah memberi tekanan kepada organisasi maupun anggotanya. Sebagai misal, Wilopo pernah empat kali diperiksa polisi karena pidato-pidatonya dianggap potensial mengganggu ketentraman umum. Dalam perkembangannya muncul pemikiran oleh sejumlah anggota Gerindo untuk mengubah garis perjuangan mereka menjadi lebih kompromis terhadap kondisi politik yang ada. Sedangkan kubu lain yang sangat anti sikap-sikap kooperatif menganggap bahwa perjuangan harus terus dilanjutkan tanpa bekerja sama dengan penjajah. Moh. Yamin merupakan anggota Gerindo yang kemudian masuk dalam *volksraad*, dan karenanya ia kemudian dipecat dari organisasi.

Wilopo merupakan orang yang berada di tengah-tengah kedua pandangan itu. Pada satu sisi, ia berkeyakinan bahwa kemerdekaan harus dicapai melalui perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Prinsip ini tidak dapat ditawar. Namun, ia juga dapat memahami jika ada koleganya dalam Gerindo yang berminat untuk turut terlibat dalam politik parlementer guna memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia seperti yang dilakukan oleh Moh. Yamin. Bagi Wilopo langkah-langkah yang lebih moderat dapat diambil sebagai jalan alternatif dalam menghadapi kejumudan politik akibat kekangan pemerintah kolonial yang sangat ketat. Hanya saja, Wilopo tetap tidak setuju dengan cara-cara mengemis kemerdekaan kepada Belanda, sebagaimana yang dilakukan Sutarjo melalui petisinya yang dianggap meminta kemerdekaan kepada penjajah. Ketika situasi berubah drastis menjelang kedatangan Jepang, Gerindo menunjukan sikap yang jauh lebih kooperatif dengan bergabung dalam GAPI. Tampaknya, perubahan ini sangat dipengaruhi oleh adanya ketakutan akan hadirnya kekuatan fasisme di Indonesia, dimana dalam konteks Perang Dunia waktu itu, Jepang merupakan bagian dari kelompok axis bersama Nazi-Jerman dan Musolini-Italia.

Runtuhnya negara kolonial oleh ekspansi Jepang membawa perubahan besar dan berlangsung sangat cepat. Pada masa itu, para pemimpin Indonesia memiliki perbedaan sikap dalam berhubungan dengan Jepang. Sikap pertama ditunjukan Sukarno dan Hatta—yang pada masa pra-perang merepresentasikan kelompok "*non-co*" dan "*co*"—keduanya bersedia untuk turut bekerjasama dengan Jepang dengan pertimbangan bahwa untuk melawan mereka secara langsung juga tidak akan berhasil. Sikap kedua dimiliki oleh mereka yang menunggu waktu baik yang memegang teguh prinsip tidak bekerjsama dengan Jepang, namun tidak pula mengadakan permusuhan. Sikap terakhir dimiliki sekelompok kecil yang melakukan klandestein untuk menlakukan perlawanan bawah tanah. Umumnya, para penggerak Gerindo yang anti-fasis berada pada kelompok terakhir ini.

Era pendudukan Jepang juga berpengaruh banyak bagi Wilopo. Selain sekolahnya di RHS harus berhenti. Gerindo juga dibubarkan dan aktivitas politiknya jadi mandeg pula. Lebih dari itu, karena sebelum kedatangan Jepang Wilopo aktif dalam kelompok anti-fasis, namanya masuk dalam daftar Kenpetai. Oleh karena itu, ia pernah nyaris ditangkap Kenpetai. Walupun Wilopo sendiri kemudian dibebaskan, ia pernah dipaksa menyaksikan penyiksaan atas sejumlah orang Indonesia yang dianggap berbahaya oleh pemerintah Dai Nipon. Terlepas dari itu semua, pada zaman yang penuh ketidak normalan ini, Wilopo malah memperoleh pekerjaan pada Gunseikanbu Somubu. Kenyataan ini terasa aneh mengingat kiprah politiknya dalam Gerindo yang sangat anti-fasis. Namun, Wilopo memiliki pertimbangan yang rasional. Bagi Wilopo, bekerja lebih baik ketimbang ditahan. Kantor tempat Wilopo bekerja bernama Gunseikanbu Somubu Indonesia Bunsitsu yang merupakan badan untuk urusan penduduk Indonesia secara umum. Dalam badan ini, Wilopo bertugas untuk mengepalai urusan sosial dan perburuhan. Dengan melakukan tugasnya pada badan bentukan Jepang tersebut, Wilopo menjadi sekain mengenal persoalan-persoalan yang dihadapi para buruh maupun kaum tani.

Kiprahnya dalam badan bentukan Jepang juga menyambung kembali jejaring Wilopo dengan sejumlah tokoh pergerakan. Ketika ia bekerja pada kantor Gunseikanbu Somubu, Wilopo dapat berkumpul dengan Mr. Sartono kawannya di Gerindo, dan M. Assat kolega sesama pengajar di Perguruan Rakyat. Pada 1943, Pemerintah Pendudukan Jepang membentuk Putera untuk menarik sebanyak mungkin kalangan nasionalis dan intelektual Indonesia, serta membentuk Jawa Hookoo Kai guna memobilisasi rakyat. Dalam perkembangannya, Wilopo pun turut terlibat dalam badan kedua badan tersebut yang memungkinkannya untuk semakin berjejaring dengan para tokoh nasional lainnya. Selain Mr. Sartono yang bekerjasama dengannya saat di Gunseikanbu Somubu dan kemudian saat di PUTERA, Wilopo juga berhubungan sejumlah nama lain seperti Soediro yang kemudian menjadi Gubernur Jakarta, dan Harsono Tjokroaminoto—putra tokoh Islam H.O.S. Tjokroaminoto yang kemudian menjadi orang kepercayaan Jenderal Soedirman. Karena jabatannya dalam Hookoo Kai, Wilopo diwajibkan pula untuk menjadi wakil ketua Suisintai yang kemudian dikenal sebagai Barisan Pelopor. Pada kesempatan inilah Wilopo berhubungan dekat dengan Muwardi, dokter yang menjadi pemimpin Barisan Pelopor dan Barisan Banteng saat revolusi fisik.

Relasi politik Wilopo semakin luas setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Memasuki era baru itu, Wilopo mulai mengambil banyak peran dalam gelanggang politik dan pemerintahan. Ketika pada awal 1946, PNI di bentuk di Kediri, Wilopo dipilih menjadi ketua untuk wilayah Jawa Barat. Oleh karenanya ia kemudian turut serta dalam KNIP sebagai wakil dari PNI. Wilopo dipercaya menjadi menteri muda dalam kabinet Amir Sjarifuddin untuk mendampingi SK Trimurti. Ketika Yogyakarta mengalami agresi Belanda yang kedua, Wilopo yang menjabat Sekretaris Jendral Kementrian memilih untuk tetap berada di dalam kota. Salah satu alasannya adalah karena ia harus menyimpan uang untuk gaji pegawai pada kementriannya.

Uang tersebut sempat ia tanam di bawah pohon tepat di depan rumahnya sebelum kemudia ia titipkan kepada seorang kawan yang pengusaha. Ketika tentara Belanda melakukan serangkaian penangkapan terhadap para tokoh politik Indonesia, Wilopo turut dipenjara bersama sejumlah teman seperjuangannya. Wilopo dan para tahanan politik lainnya dibebaskan setelah penandatanganan perjanjian Roem-Roeijn. Pada sekitar bulan Oktober 1949, Wilopo berangkat ke Den Haag untuk memantau pelaksanaan KMB dengan status sebagai penasihat urusan kepegawaian yang tugasnya menyampaikan laporan paling mutakhir dari perundingan Indonesia-Belanda itu.

Tugas lain yang harus ia kerjakan selama berada di Eropa adalah melakukan penyelidikan mengenai persoalan perburuhan. Wilopo melakukannya pekerjaan ini dengan cara pergi ke perpustakaan-perpustakaan, juga ke Perancis dan Swiss untuk mengadakan sejumlah pembicaraan tentang keanggotaan dalam International Labour Organization. Selanjutnya Wilopo juga melakukan muhibah ke Mesir dan India. Pengalaman tersebut merupakan kali pertama bagi Wilopo untuk mengijakan kaki ke negeri-negeri di luar Indonesia. Meskipun hanya berlangsung singkat, Wilopo mampu menyerap dan mengumpulkan banyak pengetahuan. Selain itu, ia juga sangat terkesan dengan praktek demokrasi terutama yang berlangsung di Swiss.

Dalam penjelajahan politiknya yang telah dimulai sejak usia muda, Wilopo menunjukan posisinya dengan sangat jelas bahwa ia bagian dari kalangan nasionalis. Namun, sebagai seorang PNI, ia seorang bukanlah loyalis fanatik yang membabi buta melainkan figur yang rasional, dan penuh pertimbangan. Pada sisi lain, Wilopo juga menunjukan bahwa dirinya adalah orang yang dapat diterima oleh semua kalangan. Ia tidak pernah memperlihatkan sifat antagonis terhadap sayap kanan, maupun kiri. Lebih dari itu semua, Wilopo yang dari pembawaannya tampak selalu serius dan berhati-hati, merupakan politisi yang sangat menaruh perhatian pada rakyat kecil terutama kaum buruh dan petani.

WILOPO DAN BURUH

Sepulang dari melakukan muhibah ke luar negeri, Wilopo diangkat menjadi bagian dari kabinet RIS yang dipimpin Hatta. Posisinya waktu itu adalah sebagai Menteri Perburuhan. Dalam periode sebelumnya, semisal saat Amir menjabat perdana menteri, posisi menteri perburuhan sebisa mungkin selalu dipertahankan oleh wakil kelompok sayap kiri karena begitu pentingnya urusan ini bagi mereka. Akan tetapi, berbeda dengan Hatta yang memilih Wilopo karena kapasitasnya dan reputasinya yang baik di kalangan buruh. Posisi dan keberpihakan Wilopo terhadap kelompok buruh ini tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui pergulatan panjang yang mempertautkan pengetahuan dari literatur yang dibacanya saat muda, ideologi sebagai seorang PNI yang marhaenis, dan ikatan emosional yang tumbuh dari pengalaman serta interaksi langsung dengan menyelami kehidupan kaum marginal.

Saat pendudukan Jepang, ketika Wilopo menjadi bagian Gunseikanbu Somubu bagian sosial dan perburuhan, ia menangani satu kasus penyerobotan tanah di Kranji dan Tambun. Akar masalah ini berasal dari zaman kolonial Belanda

Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan dengan Suwiryo tentang pembentukan kabinet tanggal 29 Februari

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

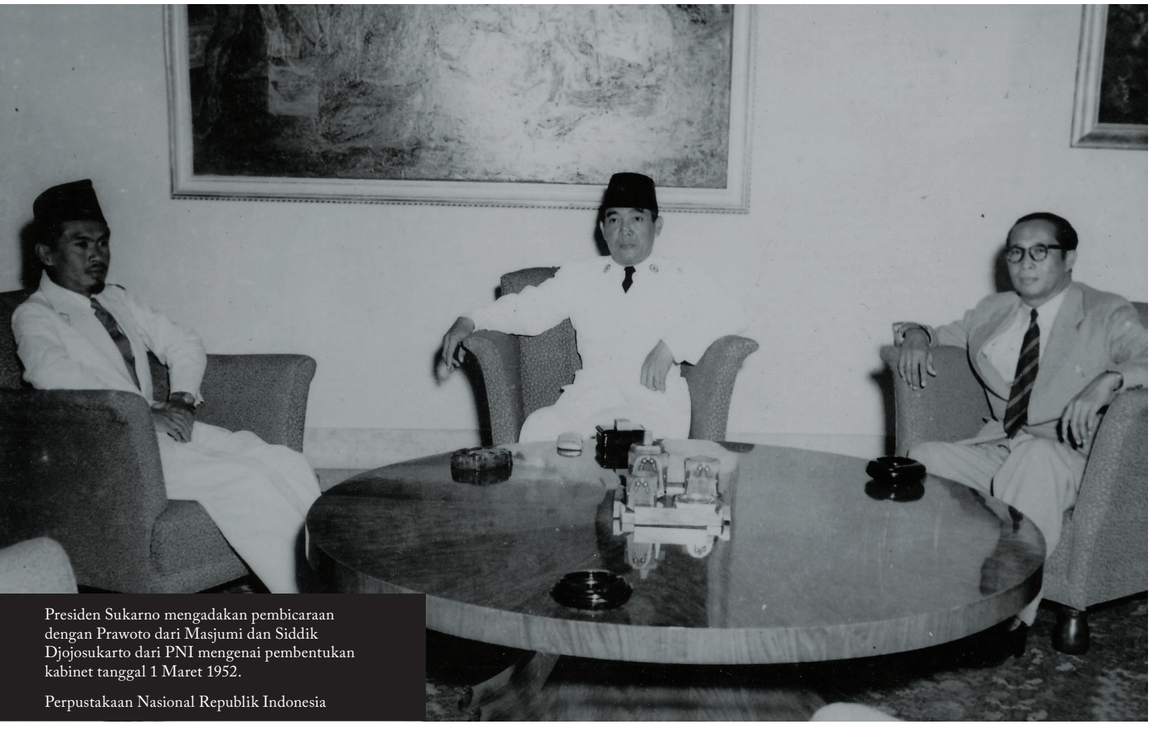

Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan dengan Prawoto dari Masjumi dan Siddik Djojosukarto dari PNI mengenai pembentukan kabinet tanggal 1 Maret 1952.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

dimana para petani kehilangan tanah akibat sistem sewa dan adanya tanah partikelir. Para petani yang menganggap sistem kolonial sudah tidak berlaku lagi sejak kedatangan Jepang, berusaha mengambil haknya dan kembali menanami tanahnya namun tindakan mereka malah memunculkan persoalan baru. Para petani ditangkap polisi. Wilopo kemudian ditugaskan untuk melakukan ekseminasi terhadap kasus itu dan merekomendasikan penghapusan ikatan yang diciptakan saat kolonialisme Belanda, usul ini direspon baik. Para petani kemudian dapat mengolah kembali tanahnya tanpa ada kewajiban lagi dengan para tuan tanah.

Pengalamannya dalam mengurus masalah buruh bertambah dengan keterlibatannya dalam Panitia Tertinggi Bersama Urusan Sipil—suatu kepanitaan bersama Indonesia-Belanda yang dibentuk sebagai bagian dari gencatan senjata pada Oktober 1946. Dalam badan ini, Wilopo terpilih menjadi ketua komisi bagian perburuhan yang kemudian berkembang menjadi Jawatan Perburuhan. Saat mendampingi S.K. Trimurti dalam "Kabinet Perdamaian" yang dipimpin Amir Sjarifuddin, Wilopo berhasil merancang undang-undang perlindungan buruh yang mengalami kecelakaan maupun terimbas perang. Hal ini dilakukan untuk menjamin karena dalam kondisi perang, buruh semakin tidak diperhatikan.

Dalam pandangan politiknya, Wilopo melihat buruh—termasuk di dalamnya adalah para pegawai—adalah kelompok penting yang memiliki kekuatan besar. Cara pandang ini menabrak gagasan lumrah yang menganggap buruh adalah manusia-manusia yang tergantung pada kuasa majikan atau pemberi kerja. Dalam suatu perdebatan menyangkut posisi Indonesia yang melemah dan akan memberi kelonggaran atas tuntutan-tuntutan Belanda saat perundingan Renvile, Wilopo menunjukan keyakinannya tersebut kepada Amir Sjarifuddin. Ia menjawab kegalauan Amir Sjarifuddin yang berfikir jika Belanda menggunakan kekerasan—atas persetujuan Amerika—maka Indonesia akan hancur. Wilopo berfikiran lain dengan mengatakan bahwa Republik akan tetap baik-baik saja selama para pegawai dan buruh yang tetap setia melakukan tindakan-tindakan non-kooperatif terhadap Belanda dan rakyat tetap tabah dalam menghadapai penderitaan. Hal ini menunjukan bahwa, Wilopo menempatkan para buruh dan pegawai sebagai kelompok yang berdaya karena mereka memiliki tenaga yang merdeka sehingga tidak dapat ditentukan oleh para pemilik uang saja. Dengan demikian, kelompok ini adalah elemen penting bagi perjuangan Indonesia, bukan karena kemampuan tempurnya, melainkan karena roda ekonomi dapat dihentikan oleh para buruh, dan administrasi oleh para pegawai, asalkan mereka menolak bekerja di bahwah Belanda.

Persoalan besar menyangkut buruh yang mencuat saat Kabinet Hatta berkuasa adalah pemogokan buruh di Sumatera Timur. Wilayah ini sejak masa kolonial merupakan *plantation belt* yang juga terkenal dengan konflik-konflik perburuhan, terutama yang diakibatkan oleh tingginya tingkat eksploitasi dan despotisme. Pada sisi lain, wilayah ini menyumbang banyak pemasukan terutama bagi tuan kebun pada masa kolonial dan untuk negara. Diharapkan oleh Perdana Menteri Hatta, konflik segera

dapat diatasi dan ekonomi kembali dijalankan, sehingga pemasukan dari wilayah ini tetap dipertahankan terlebih lagi dalam kondisi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang limbung, sumbangan dari perkebunan di Sumatra Timur menjadi semakin vital. Penyelesaian kasus pemogokan buruh di Sumatera Timur harus dilakukan secara seksama dan berhati-hati, mengingat akar perkara ini telah tertanam sejak masa penjajahan, yang kemudian mengemuka sebagai pertentangan kaum buruh melawan tuan kebun Belanda dan penguasa lokal feodal. Oleh karena itu, Hatta meminta Wilopo datang sendiri ke Sumatera, dan ia pun menyutujuinya dengan senang hati.

Dalam menangani kasus ini, Wilopo memiliki pertimbangan bahwa produksi tidak boleh terganggu oleh pemogokan karena kontribusi penting usaha ini sebagai alat pembayaran luar negeri pada masa itu tidak dapat diganti. Namun, tidak kalah pentingnya, hak-hak buruh juga tidak boleh diabaikan, karena era kemerdekaan yang berbeda dengan zaman penjajahan dimana buruh dapat ditindas demi memperbesar keuntungan. Tetapi memang kondisi di lapangan jauh dari ideal. Perusahaan yang dipegang tuan kebun asing lebih berorientasi untuk melipatgandakan keuntungan tanpa memperdulikan kesejahteraan pekerjanya. Sedangkan pada sisi lain, kaum buruh juga menuntut kenaikan upah yang terlampau tinggi. Oleh karenanya, Wilopo datang dengan jalan tengah—sebagaimana yang menjadi ciri khas pemikirannya. Buruh dan perusahaan sama-sama harus diuntungkan.

Wilopo harus mengambil tindakan-tindakan yang efektif tanpa mengulur-ulur waktu. Pemogokan harus segera dihentikan karena dalam waktu itu mendekati musim panen tembakau. Jika persoalan ini tidak segera diatasi, dan pemogokan terus berlanjut maka akan sangat merugikan, karena tembakau yang tidak dipanen pada musimnya akan cepat rusak. Melalui penyelesaian yang bersifat tripartite, dengan mempertemukan buruh; pengusaha; dan pemerintah sebagai penegah, maka diperoleh kesepakatan bahwa buruh akan memperoleh kenaikan upah, walaupun besarnya tidak sama tinggi dengan angka yang tercantum dalam tuntutan mereka. Setelah menyelesaikan pemogokan buruh perkebunan tembakau, Wilopo melanjutkan dengan kasus buruh perkebunan lain yang komoditasnya dapat dipanen tanpa bergantung musim, juga buruh kereta api. Dari penyelesaian kasus di Sumatra Timur, Wilopo memperoleh kesan bahwa pada dasarnya buruh memiliki nasionalisme yang sangat tinggi, dan pada sisi lain, ia juga menemui kenyataan akan adanya penjajahan berlapis dimana para pemodal asing menggunakan para penguasa lokal untuk menjalankan eksploitasinya. Oleh karenanya, ia memahami alasan para buruh menolak bernegosiasi atau bahkan keterlibatan Wali Negara Sumatra Timur waktu itu.

Wilopo berhasil mengatasi persoalan pemogokan buruh. Memuji kesuksesan ini, *Nieuwesgier*, koran Belanda yang tetap terbit setelah kemerdekaan memposting judul bombastis untuk laporannya mengenai penyelesaian pemogokan di Sumatera Timur itu dengan "*Wilopo kwam, zag en overwon*" (Wilopo datang, melihat dan menang). Sebelum kabinet RIS yang dipimpin Hatta berakhir—karena status Indonesia berubah menjadi negara kesatuan—Indonesia sudah mulai terlibat dalam kegiatan ILO seperti yang diperjuangkan Wilopo pada akhir 1949, dan pada 11 Juni, Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota organisasi di bawah PBB yang menaungi persoalan buruh. Sekali lagi, keberhasilan dan pencapaian tersebut menunjukan kapasitas sekaligus posisi politiknya yang lekat dengan pembelaan terhadap kaum kecil. Di balik pembawaannya yang tenang dan serius, bahkan terkesan kaku, Wilopo adalah seorang marhaen yang mengejawantahkan semangat kerakyatan dalam prilaku politiknya.

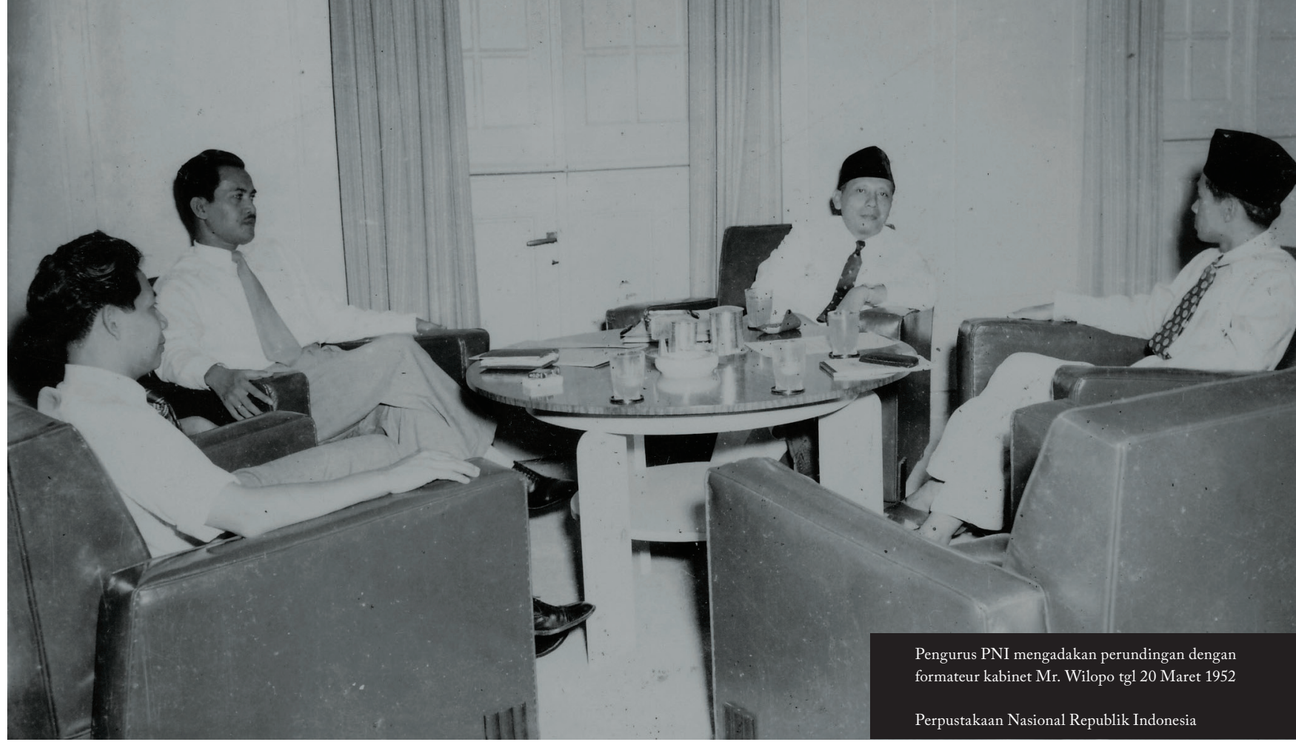

Pengurus PNI mengadakan perundingan dengan formateur kabinet Mr. Wilopo tgl 20 Maret 1952

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

PERDANA MENTERI

Selepas kabinet RIS-nya Hatta mengakhiri masa baktinya, Wilopo banyak mendedikasikan waktunya untuk kegiatan partai. Terlebih lagi pada era Kabinet Natsir, PNI memilih berada di luar pemerintahan. Hanya saja tidak berselang lama kemudian, nama Wilopo kembali dipanggil untuk mengisi jabatan Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada masa Kabinet Sukiman (Masyumi). Kali ini, ia diminta untuk menggantikan posisi menteri Sudjono Hadinoto yang meminta berhenti karena sakit. Dalam dua kali pembentukan kabinet pada awal era negara kesatuan, Wilopo menyaksikan bahwa politik tanah air waktu itu tidak dapat menghindar dari konflik kepentingan partai politik, yang juga menyeret persoalan ideologi. Hal ini sangat kentara melalui tawar menawar jumlah kursi yang akan dipegang oleh partai dalam kabinet, terlebih lagi waktu itu pemilu belum dapat terselenggara sehingga pembentukan kabinet dilakukan oleh formatur.

PEMBENTUKAN KABINET WILOPO

Tugasnya sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian berakhir saat Sukiman

Sebelum Kabinet Wilopo dilantik, anggota kabinet mengadakan pertemuan di kediaman Mr. Wilopo tanggal 3 April 1952

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Kabinet Mr. Wilopo dan Prawoto Mangkusasmito, serah terima kabinet dari dr. Sukiman kepada Wilopo, serta Ramah Tamah tanggal 3 April 1952 di Istana Merdeka Jakarta.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

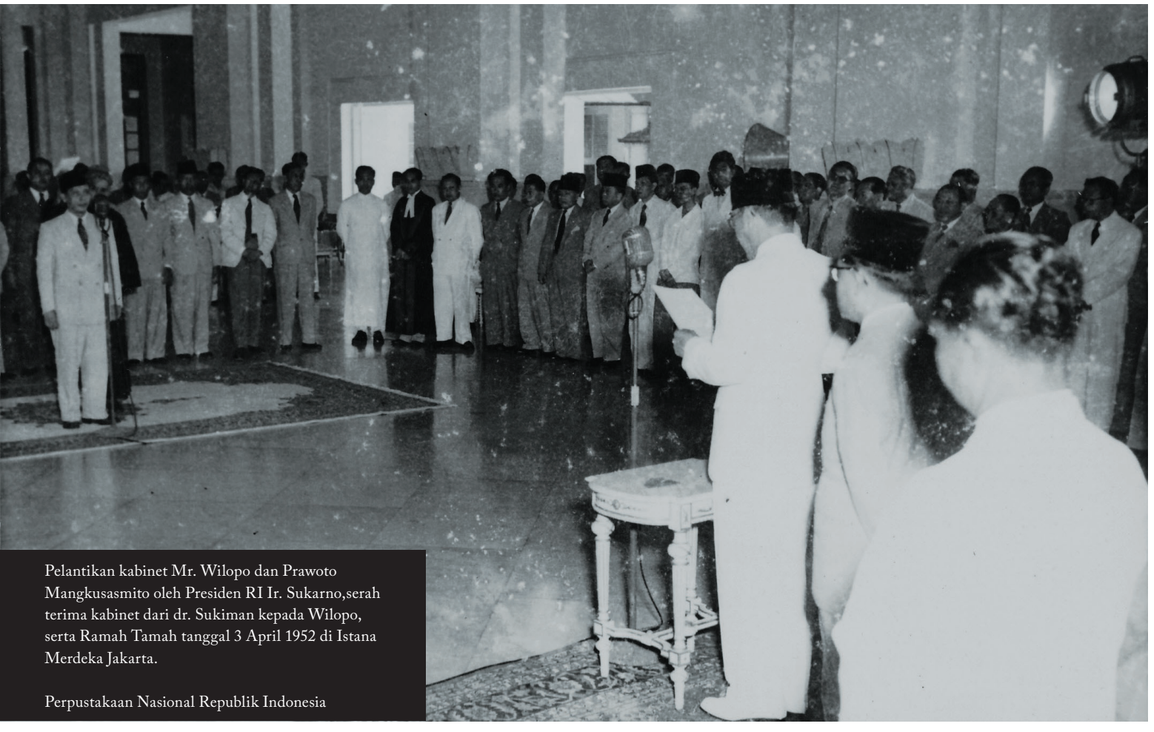

Pelantikan kabinet Mr. Wilopo dan Prawoto Mangkusasmito oleh Presiden RI Ir. Sukarno,serah terima kabinet dari dr. Sukiman kepada Wilopo, serta Ramah Tamah tanggal 3 April 1952 di Istana Merdeka Jakarta.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

mengembalikan mandatnya. Sebagai "orang dalam" pada kabinet ini, Wilopo tentu dapat menakar peliknya persoalan yang akan dihadapi oleh perdana menteri yang menjadi suksesor Sukiman. Saat itu, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam bidang ekonomi pasca berkah getah saat "boom Korea" berakhir, persoalan luar negeri pasca terkait dengan MSA, persoalan keamanan dan persehubungan dengan tentara. Selain itu, Wilopo juga menyadari bahwa tarik menarik kepentingan politik partai-partai terutama dua kekuatan terbesar waktu itu: PNI dan Masyumi, turut memperumit persoalan dalam hal menyusun pemerintahan yang kuat dan mewujudkan politik nasional yang stabil. Bahkan kecenderungan ini sudah dapat diterka sejak awal, ketika pada 1 Maret 1952, presiden mengangkat formatur baru, Sukarno yang tidak menjelaskan bentuk kabinet yang ia inginkan—*zaken kabinet* atau koalisi—meminta formatur untuk membentuk "kabinet yang kuat dengan dukungan parlemen yang memadai".

Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi, dan Sidik Djojosukarto dari PNI, adalah dua orang yang ditunjuk Sukarno sebagai *co-formatur* itu. Keduanya bekerja selama lebih dari dua minggu, tetapi pada akhirnya formatur menyerahkan mandat kembali pada kepada presiden tanpa memberikan susunan kabinet baru. Salah satu masalah pokok dalam pembentukan kabinet baru, menurut Sidik, disebabkan karena Prawoto menghendaki supaya anggota Masyumi Natsir yang masuk dalam kabinet, sedangkan Sidik sendiri menginginkan kabinet dapat mewadahi semua kelompok. Persoalan internal dalam tubuh Masyumi memang telah meruncing sejak Pemerintahan Sukiman dimana muncul dua kubu yang terdiri dari kelopok Natsir dan Kelompok

Sukiman. Adapun menurut Prawoto, kegagalan ini disebabkan oleh perbedaan intepreasi istilah "kabinet yang kuat" dan komposisi kabinet.[6]

Pada hari itu juga, tanggal 19 Maret 1952, Sukarno menunjuk Wilopo mengambil alih tugas formatur dengan tugas membentuk kabinet yang kuat dengan dukungan parlemen.[7] Herbert Feith menyatakan bahwa alasan Sukarno memilih Wilopo tidak didasarkan pada nominasi dari partai-partai melainkan dibuat oleh Presiden berdasarkan hasil pengamatannya atas perkembangan yang berlangsung selama co-formatur sebelumnya bekerja. Wilopo bekerja dengan cepat yang dimulainya dengan melakukan sejumlah *haering* dengan partai-partai politik, seperti Masyumi yang diwakili oleh Prawoto ditemuinya pada sore di hari penunjukannya itu. Setelah sembilan hari bekerja sebagai formatur, Wilopo berhasil menyerahkan daftar calon personalia kabinet kepada Presiden. Keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari peran *co-formatur* sebelumnya yang telah merumuskan program-program kabinet dan menegosiasikan sejumlah hal penting lainnya. Sebelumnya antara Prawoto Mangkusasmito dan Sidik Djojosukarto telah saling sepakat bahwa Wilopo dipandang paling pas dan mampu menjalankan tugas sebagai pemimpin kabinet sebagai Perdana Menteri. Nama-nama lain yang diusulkan tetapi masih dalam taraf 'tawar-menawar' dan belum sepenuhnya memperoleh persetujuan adalah Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan M. Roem. Wilopo yang kemudian mengambil alih proses pembentukan kabinet, mengeksekusi dengan baik apa yang telah dimulai oleh formatur sebelumnya.

Ketika daftar anggota kabinet yang disusun Wilopo diserahkan kepada Presiden, sebenarnya tidak langsung disetujui dengan alasan bahwa Sukarno ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan Wakil Presiden. Merespon pertanyaan para wartawan atas keputusan Sukarno yang menunda mengumumkan kabinet baru, Wilopo hanya menyatakan perasaannya lega telah melaksanakan tugasnya. Barulah pada 1 April, Presiden menyetujui rancangan kabinet Wilopo. Akan tetapi, dalam jangka tiga hari yang sebenarnya pendek itu, sejumlah kehebohan sudah muncul dalam masyarakat yang disebabkan oleh sikap Sukarno yang tidak langsung menyatakan pendapatnya atas usulan yang disampaikan Wilopo. Pejabat Ketua DPR, A.M. Tambunan menganggap langkah Sukarno yang tidak langsung menyetujui usulan resmi formatur dapat menimbulkan masalah baru, dan presiden dalam hal ini tidak lagi berhak menolak rancangan kabinet yang secara resmi telah diajukan formatur.[8] Desas-desus yang kemudian berkembang menduga bahwa presiden belum setuju dengan nama menteri luar negeri yang diusulkan Wilopo yakni Moekarto Notowidigdo dari PNI, yang menjadi salah satu perwakilan Indonesia di PBB saat pertama kali negara ini diterima keanggotaannya.[9] Oleh karena permasalahan itu, hingga bulan April, Wilopo mengampu jabatan menteri Luar Negeri *ad interim*.

Posisi Wakil Perdana Menteri merupakan bagian yang menarik dalam proses pembentukan Kabinet Wilopo. Jabatan ini diisi oleh Prawoto Mangkusasmito yang sebelumnya—bersama Sidik Djojosukarto—telah gagal membentuk kabinet. Tampaknya hal ini dapat menunjukan bahwa dibanding dengan Sidik Djojosukarto yang sama-sama berasal dari PNI, Wilopo lebih dapat bekerjasama dengan kelompok Masyumi. Di sisi lain, hal ini juga menunjukan bahwa program Wilopo lebih dekat dengan Masyumi dan Prawoto ketimbang, PNI dan Sidik.

TENAGA MUDA

Dalam kondisi politik yang sangat dinamis di awal dekade 1950-an, koalisi sudah barang tentu merupakan faktor penting dalam menentukan anggota kabinet. Kabinet yang dipimpin Wilopo, yang walaupun tidak dirancang untuk menjadi kabinet koalisi namun peran dua partai dominan yakni PNI dan Masyumi dan ditambah dengan enam partai lainnya tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam kabinet ini, PNI dan Masyumi sama-sama diwakili oleh empat menteri, 2 kursi menteri untuk PSI, dan lima partai lainnya yakni PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, dan PSII masing-masing satu menteri. Di luar itu, terdapat tiga menteri yang bukan berasal dari partai.

Keikutsertaan PSI untuk mengisi posisi menteri ekonomi dalam kabinet bukan hanya menjadi penunjukan yang tepat karena kapasitas Soemitro Djojohadikoesoemo yang dikenal sebagai ekonom yang handal, namun secara politis juga memperlemah kekuatan kelompok oposisi. Pada era kabinet sebelumnya, PSI—bersama dengan PKI dan sejumlah partai kecil lainnya—memainkan peran penting dalam membuat serangan-serangan kepada pemerintah. Dengan masuknya PSI ke dalam kabinet, dapat dipastikan PKI akan kehilangan tandem lamanya dalam membangun kekuatan oposisi. Pada perkembangannya, ketika kabinet mulai bekerja, PKI memberikan sambutan positif. Hal ini wajar terutama karena reputasi baik Wilopo yang dikenal dekat dengan kaum buruh dan keberhasilannya dalam mengatasi masalah pemogokan di Sumatra Timur. Terlepas dari itu semua, PKI menginginkan pembebasan anggota-anggotanya yang ditahan pada era Sukiman atas dasar SOB.[10]

Besarnya antusiasme publik yang dapat dirasakan saat nama-nama anggota kabinet diumumkan untuk kali pertama menunjukan adanya rasa puas sekaligus besarnya harapan terhadap personalia kabinet yang diharapkan dapat menyuntikan energi baru bagi politik Indonesia waktu itu. Masyarakat melihat bahwa kabinet ini banyak diisi oleh tenaga muda yang telah memiliki banyak pengalaman di bidang tata negara dan pemerintahan. Pemimpin kabinet ini adalah Wilopo yang berada pada saat itu tengah berada di awal usia empatpuluhan tahun. Ia dikenal memiliki reputasi bagus dalam pemerintahan maupun bidang pengabdian lainnya, seperti yang telah didedikasikannya melalui Taman Siswa dan Perguruan Nasional. Selain itu, banyak yang meyakini kekuatan kabinet ini terletak pada kemampuan dalam bekerja yang dikombinasikan dengan sikap bersahaja sebagaimana pembawaan Wilopo yang tenang, sederhana, demokratis, dan tidak konfrontatif terhadap lawan politiknya. Karakter personal semacam itu tentu sangat dibutuhkan dalam mengarungi situasi politik Indonesia di awal dekade 1950-an.

Figur penting lain yang juga seusia dengan Wilopo adalah Menteri Dalam Negeri, Mr. Mohammad Roem. Roem yang memulai pendidikannya dari sekolah desa (*volkschool*) hingga memperoleh

Presiden Sukarno memberikan keterangan kepada para wartawan mengenai terbentuknya kabinet Wilopo.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

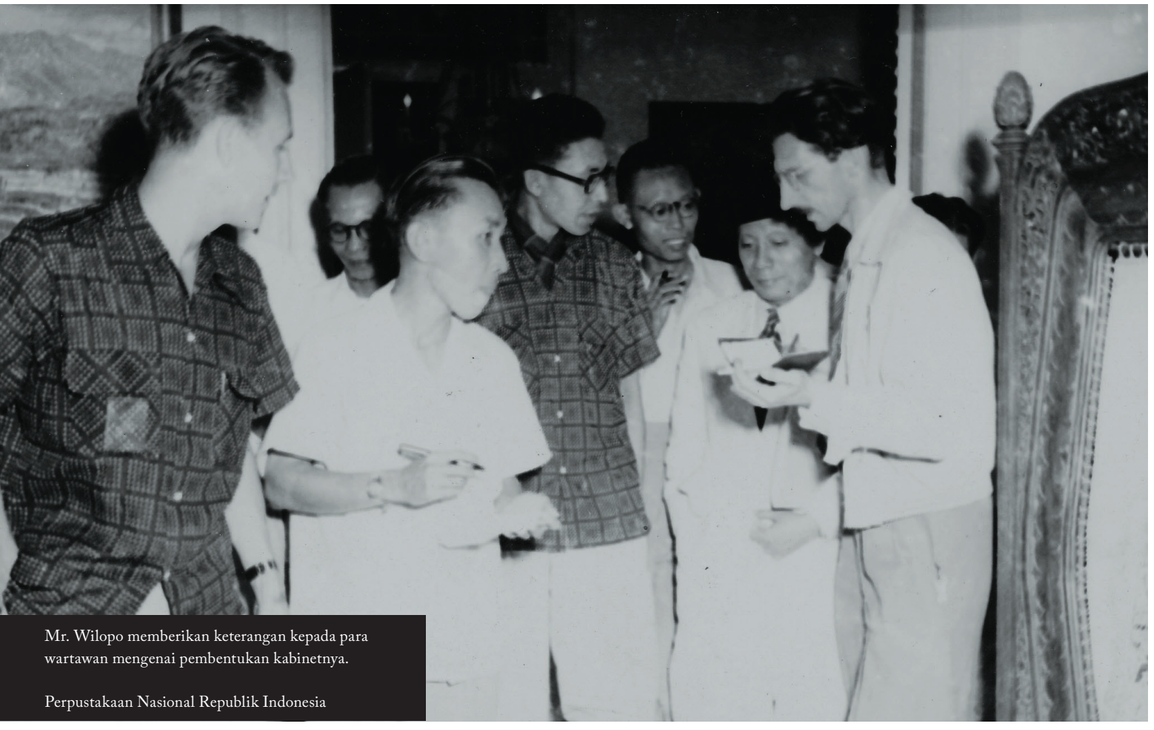

Mr. Wilopo memberikan keterangan kepada para wartawan mengenai pembentukan kabinetnya.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

gelar Sarjana di bidang Hukum pada RHS merupakan tipe pemikir tangguh yang telah terlibat dalam sejumlah diplomasi penting, dan kaya akan pengalaman dalam bidang birokrasi. Meskipun termasuk dalam kategori politisi yang mahir dalam bekerja, namun sedikit berbeda dengan Wilopo, Roem cenderung lebih frontal dalam menghadapi lawan politiknya. Beberapa serangan diarahkan kepada Roem yang berasal dari Masyumi saat ia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-undang Pemilu, yang dianggap oleh para lawan politiknya sebagai usaha untuk memenangkan partainya.

Sejumlah nama mantan menteri pada Kabinet Natsir turut masuk dalam kabinet ini. Dua diantaranya dikenal pula sebagai intelektual berpengaruh yakni Soemitro dan Bahder Djohan, keduanya juga mengabdikan diri sebagai guru besar di UI. Soemitro mengenyam pendidikan paling prestisius di antara nama-nama lainnya yakni di Sorbonne Paris dan *Economische Hogeschool* Rotterdam, adapun Bahder Djohan yang pada masa mudanya berkawan dekat dengan Hatta adalah seorang *Indische Art* lulusan STOVIA. Selain dua orang itu, terdapat pula nama-nama yang karena keahliannya selalu memperoleh posisi pada kabinet-kabinet terdahulu yakni Djuanda, dan Leimena. Djuanda adalah seorang insinyur dari THS Bandung yang tidak berasal dari partai politik manapun, sedangkan Leimena yang berasal dari Ambon menamatkan pendidikannya sebagai dokter di STOVIA merupakan salah satu pendiri Partai Kristen Indonesia. Keduanya merupakan tipe teknokrat masa itu yang telah mengabdikan diri sebagai menteri sejak Kabinet Sjahrir II, dimana Djuanda menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan Leimena sebagai Menteri Muda Kesehatan.

Nama menteri lain dalam kabinet ini yang sangat berpengaruh, baik karena kiprahnya maupun kharismanya adalah Sultan HB IX yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Raja Kasultanan Yogyakarta yang menghabiskan masa kecil hingga dewasanya di luar tembok istana dan lebih banyak hidup bersama keluarga Belanda dikenal sebagai tokoh yang demokratis. Melihat perkembangan hubungan sipil-militer pada era sebelumnya terutama pada era Sukiman, Sultan memegang jabatan yang berat. Akan tetapi di luar dugaan, penunjukannya dapat diterima luas oleh pihak militer. Tampaknya relasi saat masa revolusi fisik di Yogyakarta yang membuat namanya senantiasa harum di kalangan pejuang, dan pengalamannya sebagai menteri pertahanan pada Kabinet Hatta II, sangat berpengaruh atas penerimaan ini.

Di awal masa kerjanya, Kabinet Wilopo membawa angin segar dan harapan akan munculnya perubahan berarti dalam pemerintahan. Kabinet ini bukan hanya memperoleh restu dari Presiden, melainkan pula mampu menguasai suara mayoritas di parlemen dengan skema koalisi yang dibangun. Pada sisi lain, dengan dimasukannya tiga nama mentri di luar anggota partai, ditambah lagi dengan figur-figur veteran dari kalangan politisi; birokrat; maupun perancang, membuat kabinet Wilopo dalam beberapa hal memiliki ciri sebagai sebuah kabinet kerja dengan mengakomodir tokoh-tokoh ulung dan profesional. Selebihnya, masyarakat melihat kapasitas besar para anggota kabinet yang memiliki komitemen untuk siap bekerjasama.

Seperti yang berlaku lumrah dalam tradisi politik Indonesia, sebelum memulai tugasnya, setiap Perdana Menteri memaparkan program-programnya di hadapan anggota pareleman. Wilopo yang program kerja kabinetnya telah diformulasikan sejak formatur Prawoto-Sidik, menyampaikan keterangan di depan sidang pleno DPR pada 9 Mei 1953, dan setelah melewati 20 kali sidang, parlemen kemudian memberi kesempatan untuk bekerja kepada kabinet Wilopo. Meskipun memakan waktu cukup panjang, yakni satu bulan lebih, Wilopo memperoleh dukungan sangat besar dengan 125 menerima, 5 menolak. Pada dasarnya, Wilopo menekankan pada enam hal yang menjadi programnya meliputi:[11]

1. Organisasi Negara
   a. Melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan–dewan daerah.
   b. Menjelaskan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah
   c. Menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat.
2. Kemakmuran
   a. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional terutama bahan makanan rakyat.
   b. Melanjutkan usaha perubahan agrarian.
3. Keamanan
   a. Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum.
   b. Menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
4. Perburuhan
   a. Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional.
5. Pendidikan dan Pengajaran
   a. Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran.
6. Luar Negeri
   a. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia.
   b. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia – Belanda atas dasar Unie Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjianperjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara.
   c. Meneruskan perjuangan memasukan Irian Barat dalam Wilayah Indonesia secepat-cepatnya. memiliki enam program tidak

MEMPERSIAPKAN PEMILU

Penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu prioritas penting dalam program kerja kabinet Wilopo. Saat Sukiman menjabat Perdana Menteri, sejumlah pemilu lokal telah

Perdana Menteri Wilopo sedang bercakap-cakap dengan Gubernur Jawa Timur Samadikun.

Arsip Nasional Republik Indonesia

diselenggarakan yang sebenarnya juga untuk mengetahui model atau metode terbaik yang dapat diikuti sekaligus menakar kesiapan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi ini. Berkaitan dengan agenda penyelenggaraan Pemilu yang senantiasa menjadi program kerja kabinet-kabinet sebelumnya, Wilopo berusaha untuk menciptakan undang-undang yang dipandangnya sebagai faktor pokok, karena pemilu hanya dapat diselenggarakan jika telah memiliki dasar peraturannya. Walaupun pada era sebelumnya telah muncul rancangan undang-undang Pemilu dari kabinet Natsir pada 1951, Wilopo menginginkan dilahirkannya peraturan yang sama sekali baru yang dapat diterima dan dihormati bersama-sama sebagai suatu *rule of the game*.

Tugas menyusun undang-undang pemilu ini berikan kepada dua kementerian sekaligus, yakni Kementerian Dalam Negeri di bawah Moh. Roem, dan Kementerian Kehakiman yang dipimpin Lukman Wiriadinata. Untuk menyusun rancangan undang-undang yang baru, pemerintah melakukan ekseminasi atas pelaksanaan pemilu lokal yang terutama diselenggarakan di Yogyakarta dan Sangihe-Talaud. Kedua tempat melaksanakan pemilihan umum dengan sistem berbeda, yakni: bertingkat untuk Yogyakarta yang pada dasarnya merupakan masyarakat yang hidup di bawah kekuasaan monarki tradisional, dan langsung untuk Sangihe-Talaud yang dianggap telah memiliki pengalaman politik cukup panjang. Perbedan sistem ini cukup menguntungkan bagi Kabinet Wilopo untuk membuat evaluasi dan menentukan sistem mana yang akan diadopsi. Kedua pemilu lokal tersebut dapat dikatan sebagai penyelengaraan yang berhasil. Bahkan, pemilu di Yogyakarta dikatakan melebihi ekpektasi semula, di mana daerah ini sebenarnya mampu untuk

mengadopsi penyelenggaraan menggunakan sistem langsung. Kenyataan tersebut memberi petunjuk bagi pemerintahan Wilopo tentang sistem pemilu yang dapat dijalankan, yang berbeda dengan rancangan undang-undang sebelumnya yang dihasilkan kabinet Natsir pada 1951 maupun yang diajukan Kabinet Sukiman pada 1952 tentang RUU pemilihan anggota badan konstituante yang mengusulkan pemilu dengan sistem tidak langsung atau bertingkat.[12]

Meskipun pemerintah memiki dasar yang cukup kuat, pada kenyataannya proses mengundangkan pemilu tidak selalu berjalan mulus. Sejak proses penggodokan rancangan undang-undang dimulai, berbagai kritik sudah banyak bermunculan terutama ditujukan kepada kedua kementrian yang bertanggung jawab menangani urusan ini yang saat itu dipegang oleh anggota Masyumi dan PSI. Kebanyakan kritik mempertanyakan netralitas pemerintah dalam merancang undang-undang pemilu. Bukan hanya berasal dari pihak oposisi, sejumlah reaksi juga muncul dari partai perdana menteri sendiri yang mengkhawatirkan kedekatan hubungan Masyumi dan PSI dapat mengganggu posisi politis PNI terutama dalam pemerintahan. Memang pada masa itu, antara Masyumi dengan 4 kursi menteri dan PSI dengan 2 kursi menteri memang tampak sangat mesra. Oleh karenanya, seperti dinyatakan oleh H. Mohammad Said—wartawan kawakan yang juga pimpinan PNI Sumatra Utara—bahwa sebenarnya koalisi di kabinet Wilopo dibangun dengan memberikan Masyumi bukan 4 melainkan 6 kursi (terdiri dari 4 Masyumi ditambah 2 dari PSI). Walaupun memperoleh banyak kritik, pada 25 November pemerintah berhasil menyerahkan Rancangan undang-undang pemilihan anggota DPR dan badan Konstituante yang baru kepada parlemen. Perlu dicatat pula bahwa dalam penyusunannya, terdapat kontribusi besar dua sarjana hukum yang bekerja pada kedua kementrian tersebut yakni Mr. Kuntjoro dan Mr. Sahardjo.

Rancangan undang-undang pemilihan anggota DPR dan badan Konstituante yang diajukan Kabinet Wilopo terdiri dari 110 pasal. Dua hari setelah diajukan parlemen mulai bersidang. Persoalan terbesar terkait dengan penyusunan undang-undang pemilu adalah terlampau besarnya harapan anggota parlemen untuk menciptakan susunan perundang-undangan yang demokratis dan sempurna yang dapat dijalankan dalam waktu yang singkat. Herbert Feith mengistilahkannya dengan "*ultra democratic imagination*" (impian yang super demokratis). Namun pada sisi lain, besarnya harapan ini seolah mengabaikan kondisi yang lebih realistis dan aktual seperti persoalan-persoalan tingkat melek politik rakyat, dan urusan teknis-praktis dalam hal pembiayaan; percetakan; distribusi; dan banyaknya jumlah kandidat peserta pemilu yang waktu itu tidak hanya terdri dari partai poliik melainkan pula perkumpulan dan perseorangan.

Terdapat paling tidak terdapat dua hal utama yang menjadi perhatian kalangan parlemen untuk diamandemen, baik yang mengemuka dalam rapat informal maupun pada saat pleno. Pertama adalah persoalan substansial yang terkait dengan hak pilih, daftar pemilih, lembaga penyelenggara pemilihan, dan daftar calon. Selain itu, terdapat pula persoalan detail teknis semisal pelaksanaan pemilihan DPR dan badan konstituante, apakah dilaksanakan berbarengan atau berurutan? Dimana kemudian diputuskan untuk melakukan pemilihan konstituante terlebih dahulu. Dan, kedua berkaitan dengan rumusan pasal-pasal. Untuk persoalan subtasi RUU, parlemen secara keseluruhan mengajukan beberapa puluh usulan amandemen. Adapun untuk persoalan berkaitan dengan rumusan pasal-pasal terdapat 139 usulan amandemen. Moh. Roem menjelaskan bahwa dari 110 pasal yang diajukan pemerintah, PKI mengajukan lebih dari 100 usulan amandemen.[13]

Pembahasan RUU ini dilaksanakan dalam 35 kali sidang pleno yang memakan waktu sekitar lima bulan dengan jumlah perubahan sekitar 200 amandemen. Panjangnya durasi pembahasan RUU Pemilu ini selain disebabkan oleh banyaknya usulan amandemen, sebenarnya juga dikarenakan beberapa kali terinterupsi oleh sejumlah mosi mengenai masalah lain di luar pemilu yang dilontarkan melalui parlemen. Akhirnya, ketika Kabinet Wilopo tepat berusia satu tahun, DPR menerima RUU yang diajukan pemerintah untuk diundangkan. Pada 4 April 1953, UU pemilihan anggota DPR dan badan Konstituante yang pertama No. 7/1953 disahkan.

Melihat panjangnya perundingan dan tingginya harapan para wakil rakyat akan dihasilkannya peraturan sempurna yang kemudian muncul dalam serangan-serangan kerasnya atas RUU Pemilu pemerintah, kesuksesan yang dicapai Wilopo dengan tim perumusnya merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Menurut Moh. Roem, Sartono sebagai ketua Parlemen berperan penting dalam mengelakan usaha PKI yang bermaksud mengulur waktu. Pada sisi lain, keberhasilan ini menunjukan soliditas kabinet dimana sejumlah negosiasi politik penting untuk mendorong disahkannya RUU

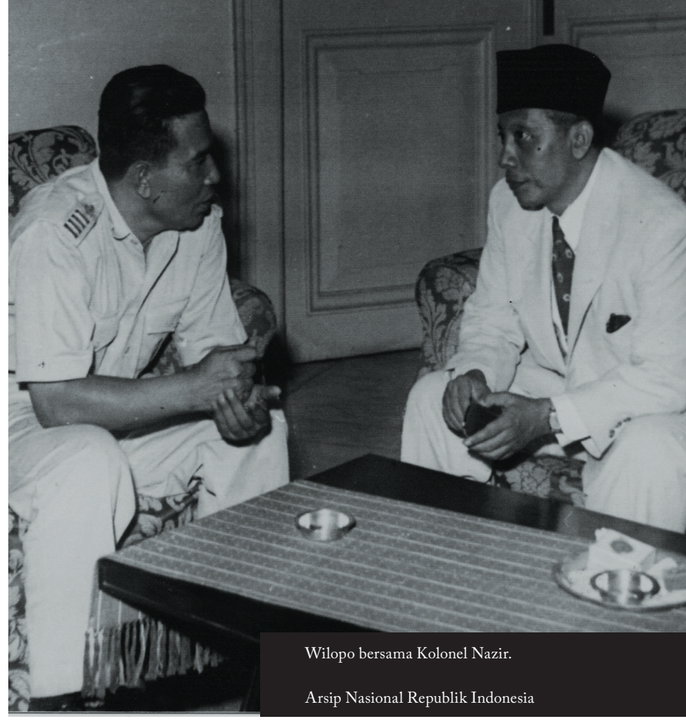

Wilopo bersama Kolonel Nazir.

Arsip Nasional Republik Indonesia

pemilu dilakukan melalui perwakilan partai yang menjadi anggota kabinet.

Sekitar bulan Maret, kabinet melaksanakan rapat ke-84 yang diantaranya mensepakati sejumlah strategi untuk melakukan lobi terhadap partai-partai pendukung pemerintah. Dalam hal ini, para menteri berperan untuk melakukan pembicaraan dengan partai-partai dan fraksi-fraksi pemerintah untuk mesepakati persoalan meliputi: daerah pemilihan, hak dan usia minimum pemilih, serta kontestan yang saat itu memperdebatkan apakah calon perseorangan juga boleh ikut dalam pemilu. Selain itu, para menteri juga mengusahakan agar partainya masing-masing dapat menyetujui supaya tidak diadakan pemungutan suara di DPR jika amandemen yang disampaikan pemerintah ditolak semua oleh DPR.

Meskipun pada akhirnya dapat disetujui, lamanya proses pembahasan RUU tersebut berakibat

pada mundurnya pelaksanaan pemilu nasional yang tidak dapat dilangsungkan pada tahun itu juga sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Pemilu Nasional baru terselenggara pada tahun 1955 pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Selama masa kepemimpinannya, Wilopo memang gagal menyelenggarakan pemilu sebagaimana direncanakan saat program kerja kabinet disusun, namun Wilopo berhasil menciptakan dasar hukum sebagai fondasi terpenting bagi penyelenggaraan Pemilu sekaligus menetapkan enam azas pemilu, yakni: jujur; umum; berkesamaan; rahasia; bebas; dan langsung—yang empat diantaranya terwarisi hingga kini.

MENAHAN DEFISIT

Selain berkarakter tenang dan berhati-hari, bagi orang-orang yang mengenalnya secara dekat, Wilopo dikenang sebagai sosok berpikiran logis juga sangat sederhana dan pandai berhemat. Tampaknya, kedua sifat ini pulalah yang ia teruskan ketika memimpin pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri, ketika Kabinet Wilopo mulai bekerja, kondisi ekonomi dan keuangan pemerintah sedang suram. Wilopo menggambarkan situasi ekonomi negara saat itu sebagai "penurunan yang tidak terlihat pangkalnya".[14] Oleh karenanya, Kabinet Wilopo menjadikan penghematan yang ketat sebagai tema ekonominya.

Pada tahun-tahun ketika Wilopo menjabat sebagai Perdana Menteri, berkah dari Perang Korea telah berakhir dan oleh karenanya harga-harga barang ekspor andalan Indonesia seperti seperti karet, timah dan kopra sedang merosot. Situasi lebih diperparah dengan munculnya pesaing dari negara lain yang juga menjadi penghasil bahan baku. Terlebih lagi, kabinet ini juga mewarisi beban ekonomi dan komitmen yang harus ditunaikan dari era sebelumnya dan ditambah pula dengan kecenderungan impor terus meningkat. Wilopo memproyeksikan pendapatan negara pada tahun 1952 kemungkinan akan jauh dari pendapatan tahun 1951 sebesar Rp 2.610 juta. Dengan beban sebelumnya yang harus dibayar sebesar Rp 3.800 juta, pemerintah kemungkinan akan menghadapi defisit sebesar Rp 4.000 juta, dengan pendapatan total kurang dari Rp 9.000 juta.

Secara keseluruhan, Kabinet Wilopo memang tidak membuat skema baru karena karena Indonesia sudah memiliki terlampau banyak rancangan. Ia juga tidak menyusun agenda ekonomi yang ambisius, melainkan mengikuti garis kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh kabinet sebelumnya.[15] Dengan Soemitro sebagai menteri Ekonomi, dan Sumanang pada posisi Menteri Keuangan, kebijakan kabinet ini lebih banyak mengadopsi Rencana Ekonomi Sumitro yang telah ada sejak Kabinet Natsir. Adapun langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang buruk adalah dengan merangsang produksi beras, meringankan pajak ekspor, mengurangi pengeluaran untuk keperluan konsumsi, memperbaiki kondisi industri tekstil dalam negeri, mendorong kegiatan wirausaha di sejumlah daerah dengan prioritas pertama di Sumatera dan Maluku. Selain itu, Kabinet Wilopo juga membentuk sejumlah lembaga baru yang penting bagi pembangunan ekonomi jangka panjang, diantaranya adalah Biro Perencanaan Nasional yang dibentuk sejak awal periode kerjanya dimulai. Biro Perencanaan Nasional ini berfungsi sebagai badan yang mengkoordinasikan perencanaan pemerintah dan memfasilitasi saran ekonomi oleh spesialis asing.

Sebelum menjabat Perdana Menteri Wilopo sering dijuluki sebagai "menteri beras", karena kebijakannya semasa menjabat menteri perekonomian era kabinet Sukiman, melihat bahwa pada dasarnya mayoritas rakyat Indonesia hidup dari sector agraris, namun ironinya untuk kebutuhan pangan masih harus didatangkan dari luar itupun berbiaya besar. Oleh karenanya, pemerintah berusaha untuk menggenjot produksi beras guna menghilangkan kebutuhan impor yang membebani anggaran negara. Langkah yang ditempuh pemerintah dalam memajukan pertanian adalah memelihara dan merehabilitasi infrastruktur pertanian, mengusahakan sumber-sumber baru bagi produksi pertanian, dan membuka sawah di Kalimantan dan Sumatera.[16] Strategi pemerintah ini cukup berhasil dalam meningkatkan produksi bahan makanan pokok seperti beras, jagung, singkong, ikan, dan ternak—meskipun juga sempat terhantam sejumlah krisis gagal panen akibat musim. Dengan mengusahakan peningkatan produksi domestik yang dikombinasikan dengan membuka kran beras impor, memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan harga beras tetap stabil.

Adapun untuk memperkuat ekspor, pemerintah melakukan pengurangan pajak dan pemberian kredit untuk menumbuhkan eksportir Indonesia. Selain itu pemerintah juga merancang suatu mekanisme yang memungkinkan para eksportir mengurus kebutuhannya sendiri. Pada sisi lain, pemerintah berusaha untuk menekan pengeluaran untuk keperluan konsumsi. Terkait dengan hal itu, pemerintah menaikan pajak impor barang-barang non-substansial sebesar 100% hingga 200% untuk item tertentu di mana para importir juga diwajibkan membayar 40% di muka. Pemerintah berpedoman bahwa politik import ini harus disesuaikan dengan politik industrialisasi untuk menjamin kebutuhan rakyat tanpa menambah saingan bagi pengusaha lokal. Kebijakan ini dapat dicontohkan dalam import tekstil murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak mematikan industri tekstil dalam negeri.

Industrialisasi menjadi bidang yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintahan Wilopo, paling tidak karena dua alasan. *Pertama*, industri harus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan import, dan *kedua*, memanfaatkan dan menambah nilai bahan-bahan yang ada dalam negeri. Untuk memperkuat industri dalam negeri, pemerintah diuntungkan dengan situasi yang semakin stabil dimana jumlah pemogokan buruh berkurang secara drastis dibanding era sebelumnya, bahkan serikat buruh menunjukan sikap kooperatif dengan pemerintah. Situasi yang demikian itu selain berpengaruh positif terhadap produkitifitas, juga bersifat atraktif bagi masuknya investasi asing. Dalam hal ini, walaupun politik mengadaptasi politik "Ekonomi Nasional", pemerintah tidak bersikap anti terhadap investasi asing sejauh dapat menaati peraturan yang sudah ada. Sebagai negara yang baru, investasi asing sangat dibutuhkan untuk menambah modal, mengadakan alat-alat dan teknologi baru. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk mempekuat industri fundamental

terutama yang menggunakan bahan-bahan yang tersedia di Indonesia. Pencapaian selama kabinet ini memerintah dalam bidang industri ditunjukan dengan dibangunnya pabrik semen di Gresik dan pabrik pemintalan di Cilacap.

Usaha untuk membantu industri tekstil dalam negeri juga memberi perbaikan siginfikan. Hal ini ditunjukan dari meningkatnya jumlah produksi yang mencapai hampir dua kali lipat. Pada pertengahan tahun 1953, industri tekstil dalam negeri telah mampu menghasilkan 41 kain juta meter rata-rata per-tahun, yang jauh melonjak dari jumlah yang dapat diproduksi pada tahun 1951 yakni sebesar 23 juta meter.[17] Pada sisi lain, usaha untuk mencukupi kebutuhan sandang dengan cara impor pemusatan impor dan distribusi di tangan satu organisasi koperasi "produsen batik" kurang begitu berhasil dan tampaknya malah melahirkan spekulan.

Para pengamat mengakui bahwa kabinet Wilopo memiliki prestasi besar dalam bidang ekonomi. Pemerintahan Wilopo berhasil menahan defisit yang semula diproyeksikan akan tembus angka 4 milyar, hingga hanya mencapai angka kurang dari 3 milyar pada akhir tahun 1952. Bahkan saat kabinet ini jatuh, angka defisit tetap masih lebih kecil dari yang seharusnya terjadi yang bertahan hingga pertengahan tahun 1953. Keberhasilan Wiloo dalam menahan defisit dilakukan melalui serangkaian kebijakan untuk menutup neraca pembayaran luar negeri yang berhasil dengan yang baik, politik industrialisasi yang secara tidak dinyanya juga memperoleh peningkatan dari kenaikan harga minyak, yang dikombinaiskan dengan politik impor yang cukup efektif dalam membatasi barang-barang mewah dan semi-mewah walaupun kurang berhasil untuk mencegah kenaikan harga domestik.

Sebagaimana orang mengenal Wilopo sebagai sosok yang hemat dan sederhana, pencapaian besar di bidang ekonomi yang diciptakan pada era kepemimpinannya juga merupakan hasil dari penghematan yang dilakukan dengan banyak sekali pengetatan pengeluaran. Salah satu tindakan yang ditempuh Wilopo adalah dengan melancarkan "*Austerity Program*". Kebijakan ini adalah usaha untuk menghentikan kenaikan pendapatan para menteri yang sudah diputuskan pada era Sukiman. Berkaitan dengan usulan kenaikan gaji pegawai per 1 Mei 1952 sebesar 20% yang sudah tidak dapat lagi dianulir,[18] Wilopo tetap memberikan kenaikan tersebut namun menghentikan tunjangan beras kepada pegawai yang diterimakan menjelang hari raya—gagasan yang dulu berasal darinya ketika menjadi menteri pada era Sukiman. Sekali lagi, pelaksanaan program penghematan hanya dapat dilaksanakan dengan adanya keteladanan yang baik dari sosok yang mampu menghayati penderitaan rakyat dan mampu menahan diri dari godaan-godaan kekuasaan. Sehingga, ketika berkuasa, Wilopo memilih untuk tidak menerima pendapatan lebih agar negara dapat berhemat dan tidak membebani rakyat.

Selain itu, pemerintah juga banyak melakukan reorganisasi keuangan yang ditujukan untuk menciptakan penghematan melalui pemotongan anggaran yang besar pada sejumlah kementrian dan badan pemerintahan lainnya dan pengurangan-penguranan belanja pemerintah. Guna memperoleh anggaran untuk tahun 1953, Kementrian Keuangan menghitung bahwa pemerintah perlu melakukan pengurangan pengeluaran lebih dari Rp. 4 miliar atau mencapai lebih dari 25% dari total pengeluaran pada tahun 1952. Implementasi dari kebijakan ini adalah harus dilakukannya rasionalisasi jumlah abdi negara. Konsekwensinya, pemerintah harus menghentikan setidaknya 150.000 orang pada daftar gaji dari negara. Kebijakan ini dilakukan dengan tidak lagi menambah aparatur sipil. Untuk dinas militer, kabinet ini melakukan langkah yang lebih berani, yang ketika usaha yang sama dilakukan pada era sebelumnya, menimbulkan masalah besar bagi pemerintah. Misalkan pada 1948 ketika Hatta dengan bantuan Simatupang dan Nasution melakukan rasionalisasi tentara, terdapat ribuan pejuang yang mengalami demobilisasi, dan kemudian melahirkan banyak kekecewaan dan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pada era Wilopo, usaha untuk melakukan rasionalisasi tentara dijalankan melalui kementrian Pertahanan yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwana dengan tujuan untuk modernisasi angkatan bersenjata sehingga tercipta tentara yang kuantitasnya tidak terlalu besar namun memiliki kualitas yang unggul.

PERKEMBANGAN POLITIK DAN AKHIR KABINET WILOPO

Saat memulai kerjanya, Wilopo mewarisi sejumlah persoalan politik yang pelik dari kabinet sebelumnya. Salah satunya adalah menyangkut posisi politik luar negeri Indonesia yang cenderung mengarah ke Blok Barat. Diterimanya bantuan *Mutual Security Act*, yang membuat kabinet sebelumnya mengembalikan mandat, menjadi tantangan besar yang dapat diselesaikan dengan baik pada masa Kabinet Wilopo. Terkait dengan persoalan ini, Indonesia melakukan serangkaian pembicaraan yang cukup rumit dengan Amerika untuk mengubah isi perjanjian yang sudah diteken Menteri Ahmad Subardjo. Diawali pada Mei 1952, kedutaan besar di Washington yang diperintahkan Perdana Menteri untuk melakukan pembicaraan tentang kemungkinan bagi Indonesia memperoleh bantuan yang lebih longgar.

Pembicaraan lain dilakukan di Indonesia yang mempertemukan Wilopo dengan Merle Cochran. Dalam meghadapi Duta Besar Amerika yang kaya berpengalaman yang telah memegang jabatan itu sejak 1949 dan yang sedang mempertaruhkan reputasinya, Wilopo memperlihatkan kharisma pribadinya sebagai politisi matang dengan tingkat kesabaran yang luar biasa dan sikap hati-hati yang tinggi. Karena gentingnya isu yang dibicarakan keduanya, pernah dalam suatu kesempatan, Merle Cochran menyampaikan memilih untuk mengundurkan diri dari pada gagal mempertahankan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini, Cochran memang berada dalam posisi serba sulit karena ia mempertaruhkan kredibilitasnya sebagai diplomat, dan pada sisi lain kepentingan dan reputasi negaranya. Demikian pula Wilopo yang bukan hanya mempertaruhkan posisinya sebagai Perdana Menteri—yang bisa dibayangkan betapa besar serangan apabila ia gagal menyelesaikan MSA—melainkan pula masa depan politik luar negeri Indonesia yang dijanjikan untuk tetap aktif dalam usaha memelihara perdamaian dunia dalam posisi yang netral.

Pada akhirnya, Indonesia berhasil mengubah bentuk perjanjian dan hubungan kerjasama biasa

melalui *Technical Cooperation Administration* (TCA). Skema ini memungkinkan Indonesia untuk memperoleh bantuan teknis dan ekonomi dari Amerika tanpa menyertaka poin seperti yang sebelumnya diatur dalam MSA poin 511a. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran Mukarto yang merupakan mantan deputi di kedutaan besar Indonesia di Amerika yang kemudian diangkat menjadi Menteri Luar Negeri oleh Wilopo. Walaupun awal penunjukannya disebut-sebut memperoleh penolakan dari Presiden—yang barangkali saat itu berfikir bahwa untuk menangani masalah rumit terutama menyangkut MSA dibutuhkan tokoh dengan kaliber yang lebih besar—Mukarto berhasil menghapuskan keraguan itu dengan membawa Indonesia mengatasi masalah MSA. Bahkan pada era selanjutnya ia dipercaya Sukarno untuk mengurus sejumlah posisi penting termasuk menjadi formatur kabinet.

Pada sisi lain, perkembangan politik era Wilopo ditandai dengan terus digencarkannya pemulihan keamanan yang walaupun belum dapat memadamkan semua gangguan namun menunjukan progress yang jelas dengan dukungan penuh dari angkatan bersenjata. Sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk melakukan pembangunan daerah yang salah satunya diproyeksikan di Maluku, pemerintah menyetujui dilakukannya tindakan tegas untuk menumpas RMS yang kemudian dibarengi dengan pemerataan pembangunan. Hal ini menegaskan telah pulihnya relasi yang sehat antara para petinggi militer dengan pemerintah sekaligus perubahan besar dari era Sukiman terdapat dimana antara pemerintah dan elit militer dipisahkan oleh antagonisme. Perlahan, status SOB dihapuskan tanpa menimbulkan pertentangan yang tajam, yang menunjukan suatu perkembangan menuju kondisi yang demokratis telah mulai berjalan.

Terlepas dari mulai membaiknya hubungan antara kabinet Wilopo, terutama menteri pertahanan, dengan para pimpinan angkatan bersenjata, di parlemen sempat muncul perdebatan panjang mengenai legalitas peraturan pemerintah tentang Staf Kemanan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1952. Dari parlemen pula berlangsung perdebatan sengit mengenai kebijakan Menteri Pertahanan dan Pimpinan AD terutama berkaitan dengan rencana rasionalisasi anggota tentara. Mosi tidak percaya ditujukan kepada Menteri Pertahanan yang diusulkan anggota DPR mencuat menjadi persoalan panas yang merembet hingga keluar gedung wakil rakyat melaui pemberitaan koran-koran partai politik, seperti harian *Merdeka* yang kemudian dianggap membocorkan rahasia tentara. Pada puncaknya, serangan-serangan itu diarahkan kepada para pemimpin tentara secara personal dengan mengungkit skandal pribadi, korupsi, nepotisme, dan perkara-perkara lainnya yang seolah-olah mempertentangkan antara bekas TNI dan bekas KNIL. Oleh karena persoalan ini, Wilopo harus menghadapi krisis politik yang menghantam kabinetnya terutama setelah terjadinya "peristiwa 17 Oktober'.

PERISTIWA 17 OKTOBER

Jakarta, 17 Oktober 1952. Ribuan orang bergerak dari Tanjung Priuk untuk berdemontrasi pada pagi itu. Para demonstran dengan mengarak spanduk-spanduk berisi kecaman atas paremen. Mereka berjalan menuju ke gedung wakil rakyat untuk menuntut dibubarkannya dewan perwakilan rakyat, dan menuntut segera dilaksanakannya pemilu. Aksi ini bertambah anarkis ketika sejumlah orang masuk ke dalam gedung palemen, dan mulai menghancurkan sejumlah perabotan, beberapa kursi, dan kafetaria parlemen. Massa sempat menyampaikan petisi kepada Hatta, kemudian mereka bergerak ke arah istana merdeka, dan jumlahnya bertambah banyak. Feith memperkirakan mencapai sekitar 30.000 orang.

Menghadapi situasi sangat menegangkan itu, ada dua hal yang di lakukan Sukarno. Pertama, dengan penuh kharisma, ia berpidato di tangga istana. Kedua, dengan tenang ia menghampiri para demonstran di pagar istana. Laiknya seorang bapak yang sedang berbicara kepada anaknya, Sukarno berhasil mengirim para demonstran untuk pulang dengan tertib, lantas meninggalkan mereka untuk kembali masuk ke dalam Istana Merdeka. Suasana tegang berubah, terdengar kemudian sorak sorai para demonstran mengelu-elukan presiden mereka.

Ketika Presiden memulai pidatonya muncul di hadapannya dua tank, beberapa mobil lapis baja dan sejumlah senjata berat lainnya. Satu unit tentara berada di dalam istana dan banyak lagi di luar. Seusai presiden berpidato, dua kelompok perwira senior termasuk lima dari tujuh komandan territorial datang menemuinya. Tidak berselang lama setelah Presiden menemui para perwira tersebut. Hatta, Mr. A.K. Pringgodigdo, Perdana Menteri Wilopo dan A.M. Tambunan dipanggil untuk turut begabung. Para perwira berbicara melalui perwakilan mereka: Kolonel Sutoko, Kolonel M. Simbolon, dan Kolonel AE Kawilarang. Pada intinya mereka mendesak Kepala Negara untuk membubarkan parlemen sementara yang sekarang dan membentuk sebuah parlemen baru dalam waktu sesingkat mungkin. Sikap Sukarno sangat jelas bahwa ia menolak untuk mengabulkan tuntutan para petinggi tentara untuk melakukan pembubaran parlemen.

Kondisi masih mencekam, tentara masih berpatroli di jalan-jalan, dan pertemuan yang melibatkan lebih dari lima orang dilarang. Berbagai saluran komunikasi telepon dan telegraf, baik internal maupun luar negeri, dihentikan. Demikian halnya dengan perhubungan dari dan menuju Jakarta, baik kapal dan pesawat terbang tertunda untuk sementara waktu. Enam orang anggota parlemen ditangkap yakni Sukiman, Kasman, Bebasa Daeng Lalo, A.B.M. Jusuf, Lamin dan Sjamsuddin Sutan Maknur. Harian *Merdeka* dan *Berita Indonesia*, serta Mingguan *Mimbar Indonesia* dan Mingguan *Merdeka*, dilarang terbit. Barulah, tiga hari kemudian semua tindakan darurat tentara telah dicabut yang diikuti dengan pembebasan anggota parlemen yang ditahan dan pencabutan larangan terbit bagi empat media massa.

Wilopo, yang dalam berbagai testimoni dikatakan menunjukan ketenangan luar biasa menghadapi ketegangan pada 17 Oktober, memilih untuk memproses peristiwa ini secara objektif dan proporsional. Wilopo berpendapat bagaimanapun juga keterlibatan tentara dalam urusan politik tidaklah dibenarkan, demikian pula perdebatan sengit di parlemen antara yang pro dan kontra terhadap kebijaksanaan menteri pertahanan yang kemudian menyeruak

menjadi masalah politik di masyarakat dengan bumbu-bumbu dari berita di koran juga tidak proporsional. Desakan untuk mengadili oknum-oknum tentara yang terlibat dalam peristiwa itu muncul dari sejumlah partai politik, termasuk PNI. Belakangan diketahui nama Kolonel Dr. Mustopo disebut-sebut sebagai yang bertanggung jawab atas demonstrasi yang terjadi pada pagi itu. Ia diyakini memiliki relasi kuat dengan kelompok buruh, dan diasosiasikan dengan kumpulan gangster dan para jawara yang tergabung dalam organisasi KOBRA (Komando Barisan Rakyat). Dalam surat edarannya, KSAD A.H. Nasution menyataka bahwa dirinyalah yang bertanggungjawab atas peristiwa itu. Sejumlah nama lain yang turut bertandatangan adalah Wakil Kepala Staf, Letkol. Sutoko dan Letkol Dr. Aziz Saleh dan Kepala Polisi Militer Letkol S. Parman. Orang-orang tersebut tidak berada dalam satu garis politik tertentu—walaupun sejumlah orang memiliki kedekatan dengan PSI—dan merupakan representasi dari kelompok tentara yang anti politisi.

Penyelesian peristiwa 17 Oktober memang tidak tuntas. Dalam testimoninya, A.H. Nasution—tokoh penting dalam peristiwa itu menyatakan bahwa Wilopo telah berusaha keras dengan sabar dan bekerja seobyektif mungkin, namun kondisi politik saat itu tidak memungkinkannya untuk mengatasi akar persoalan. Pada akhirnya, tentara mencari jalannya sendiri. Dalam tubuh tentara sendiri kemudian terbagi menjai kelompok yang dan kelompok anti peristiwa 17 Oktober. Penyelesaian yang berlarut memang berimbas besar kepada pemerintahan Wilopo, namun bukan karena masalah ini kabinet jatuh.

PERUBAHAN KONFIGURASI POLITIK DAN PERISTIWA TANJUNG MORAWA

Perkembangan politik lainnya yang terjadi pada awal pemerintahan Kabinet Wilopo berkaitan dengan perubahan konfigurasi politik kepartaian. Sebulan semenjak menyatakan keluar dari Masyumi, NU berubah menjadi sebuah partai politik pada akhir Agustus 1952. Pada saat yang bersamaan Liga Muslim Indonesia dibentuk. Perubahan yang berlangsung pada partai-partai Islam tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kerja kabinet. Bahkan, jabatan menteri agama yang dipegang oleh Fakih Usman, seorang muslim modernis yang mengasosiasikan diri dengan Muhammadiyah juga tidak menimbulkan persoalan lebih lanjut, walaupun sebelumnya posisi inilah yang menjadi salah satu pangkal perkara yang berujung perpecahan di tubuh Masyumi.

Imbas lebih besar dari perkembangan politik di tahun-tahun tersebut muncul dari perubahan orientasi politik PKI. Pada saat itu, PKI sebenarnya belum sepenuhnya berhasil merehabilitasi nama mereka dari peristiwa Madiun 1948 dimana partai ini dianggap menghianati perjuangan republik. Terlebih lagi, setelah "Razia Agustus" dilancarkan pada masa Kabinet Sukiman, PKI merupakan partai lemah yang kehilangan banyak anggotanya, dan tidak memainkan peran sentral dalam politik nasional. Hanya saja, partai ini telah mengalami perubahan mendasar dengan munculnya para pemimpin muda yang bersemangat—sebagian besar berada pada awal usia tiga puluhan tahun. Sejak awal 1951, Politbiro partai dipegang oleh D.N. Aidit dan M.H. Lukman, Njoto, Sudisman dan Alimin. Walaupun usia para pemimpin PKI ini masih muda, mereka telah mapan dalam penguasaan teori-teori gerakan, memiliki banyak pengalaman, dan rata-rata memiliki karakter sebagai "pemimpin massa". Aidit dan Lukman adalah dua orang yang baru kembali dari Tiongkok dan Vietnam, sedangkan Alimin satu-satunya anggota yang usianya lebih dari tigapuluh tahun (68 tahun) pada waktu itu merupakan tokoh senior dalam partai.

Di bawah pengaruh para pemimpin baru tersebut, PKI diatur sedemikian rupa untuk menjadi partai tunggal yang kecil dengan disiplin tinggi dan sadar teori gerakan. Para pemimpin partai menyadari bahwa PKI harus berkonsentrasi pada kerja politik massa ketimbang politik parlemen. Partai ini juga menginisiasi dibentuknya suatu Front Persatuan Nasional dengan menggandeng partai-partai lain yang jujur dan siap. Memasuki tahun 1952—walaupun masih dalam kondisi yang serba kacau akibat penangkapan dan hilangnya sejumlah besar anggota yang masih berada dipersembunyian—PKI telah menunjukan kepada publik bahwa partai ini telah mewujud sebagai kesatuan yang solid, dan teratur dan efektif.

Semenjak pemimpin politbiro PKI berganti, tampak pula usaha untuk mendekatkan PKI dengan kekuatan anti-fasis nasionalis demokrat. Dalam tiga bulan pertama pada 1951, PKI membuka hubungan dengan partai seperti Murba yang sama-sama merasakan getirnya Razia Agustus. Perubahan di tubuh PKI juga tampak sejak awal pembentukan kabinet Wilopo dimana PKI kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintah yang dibangun oleh kekuatan partai politik termasuk Masyumi. Pada perkembangannya, kabinet Wilopo yang mengikutsertakan PSI dan memperoleh dukungan kuat dari Masyumi, menjadikan PKI justru melakukan pendekatan dengan salah satu faksi dalam tubuh PNI. Kedekatan kedua partai ini memang sempat terajadi menyongsong kejatuhan Kabinet Natsir, dimana PKI juga berusaha menggandeng PNI untuk mengeliminir pengaruh Masyumi dari pemerintahan.

Hanya saja, pada masa Wilopo menjabat perdana menteri, terdapat sejumlah alasan lain yang kembali mendekatkan keduanya. Feith mengindikasikan PKI melakukan infiltrasi di tubuh PNI melalui Saleh Umar tokoh PNI dari Sumatra Utara dan Ahen Erningpraja yang berafiliasi dengan SOBSI.[19] Faktor lain adalah polarisasi politik menjelang pemilu dimana kekuatan nasionalis-sekuler seperti PNI melihat kekuatan Islam terutama yang berada di pedesaan akan muncul sebagai kompetitor kuat untuk menjaring suara. Pada sisi lain, kebijaksanaan Kabinet Wilopo dalam menyusun undang-undang pemilu tidak lagi menguntungkan partai ini dengan digunakannya sistem pemilihan nasional secara luas. Terlebih lagi, Wilopo selama menjabat memang tidak dapat digunakan sebagai alat partai dan bahkan cenderung memperlihatkan kedekatan dengan Masyumi dan PSI. Oleh karenanya, konfigurasi kekuatan politik menjelang akhir pemerintahan Wilopo berubah dari pola tradisional dimana PNI dan Masyumi biasanya mendukung pemerintah berhadapn dengan PKI-PSI sebagai oposisi, menjadi PNI-PKI dan PSI-Masyumi yang mendukung Wilopo. Perubahan konfigurasi politik inilah

yang sangat menentukan nasib Kabinet Wilopo dalam menghadapi krisis politik akibat peristiwa Tandjung Morawa.

Sejak 1951, ketika Iskaq masih menjabat sebagai menteri pada kabinet Sukiman, ia mensepakati untuk mengembalikan sejumlah besar lahan di Tanjung Morawa Sumatra Timur yang dulunya, sebelum perang, dikuasai oleh *Deli Planters Vereniging* (DPV). Kebijakan Iskaq tersebut erat kaitannya dengan usaha pemerintah dalam menarik pemodal asing. Persoalannya adalah tanah DPV yang pada masa Jepang diterlantarkan kemudian diolah oleh para petani yang merasa bahwa DPV tidak lagi memiliki hak atas tanah yang mereka garap. DPV sebenarnya telah menyetujui untuk mengembalikan 130.000 hektar (dari 255.000 hektar) dari tanah tersebut dengan syarat bahwa pemerintah akan memberikan izin kepada DPV untuk mengerjakan 125.000 hektar sisanya selama 30 tahun. Hingga kabinet Sukiman bubar, hasil negosiasi ini tidak pernah dieksekusi.

Kabinet Wilopo kemudian melakukan usaha untuk menjalankan kesepakatan dengan DPV tersebut. Permasalahannya pada tanah seluas 125.000 yang akan kembali digarap DPV, terdapat sekitar 62,000 jiwa yang mendiaminya baik warga pribumi pribumi maupun keturunan Tionghoa. Mereka beranggapan bahwa tanah tersebut dahulunya merupakan lahan garapan nenek moyang mereka yang jatuh ke tangan para pemodal asing melalui perantaraan Sultan Deli yang kemudian meyewakan tanah mereka secara semena-mena dalam jangka waktu 99 tahun. Ketika zaman kolonial berakhir dan muncul negara-nasional, para petani merasa memperoleh hak-nya kembali untuk mengerjakan tanah itu.

Pada bulan Maret 1953, pemerintah mulai menjalankan rencananya dengan merelokasi 62.000 orang yang tinggal di Tanjung Morawa. Namun, petani setempat tidak mau pindah dan kemudian melakukan perlawanan. Tindakan keras diambil, Abdul Hakim (Masyumi), Gubernur Sumatra Utara yang tidak mengindahkan pertimbangan dari Departemen Agraria di Jakarta yang telah memperingatkannya beberapa hari sebelumnya bahwa relokasi dapat dilakukan dengan memulihkan terlebih dahulu hak para petani sebelum dipindahkan dan memastikan pemindahan dilakukan dengan jalan damai. Polisi-tentara dikerahkan untuk mengawal penggusuran lahan petani menggunakan traktor. Konflik langsung tidak dapat dihindarkan dan pada puncaknya terjadi penembakan yang memakan 5 orang korban meninggal dan banyak lainnya luka-luka.

Buntut dari peristiwa ini menjadi masalah pelik di parlemen. Pada 22 Mei, Sidik Kertapati (SAKTI) mengajukan mosi terhadap pemerintah yang meminta agar menghentikan pelaksanaan pembagian tanah di Tanjung Morawa, membatalkan pedoman dan instruksi yang digunakan untuk menangani kasus itu, serta mendesak agar para tahanan yang terkait dengan peristiwa tersebut segera dibebaskan. Mosi ini memperoleh dukungan dari Sardjono (BTI), Rasuna Said (non-partai), Ehem Erningpraja (SOBSI) dan I.R. Lobo (Progresif). Pengusul melakukan sejumlah perbaikan pada mosi mereka untuk dapat diterima oleh PNI. Sehingga isi mosi tersebut hanya tersisa tuntutan untuk

Beberapa anggota Kabinet Wilopo sedang bercakap-cakap sebelum Wilopo menyerahkan mandat 2 Juni 1953

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

menghentikan pengembalian tanah kepada DPV, dan membebaskan orang-orang yang ditangkap karena kasus tersebut.

Masyumi yang menganggap mosi Sidik Kertapati ditujukan kepada menteri dalam negeri, M. Roem, memberi back up penuh kepada menterinya itu. Pemerintah juga turut menolak mosi tersebut, dan mendukung kebijaksanaan M. Roem dalam menangani kasus Tanjung Morawa. Pihak kementerian dalam negeri mengirimkan staffnya yang disebut-sebut berasal dari Masyumi untuk mengusut kasus ini yang kemudian memberikan keterangan yang cenderung menyudutkan petani. Laporannya menyebutkan bahwa bahwa konflik di Tanjung Morawa bukanlah suatu spontanitas melainkan perlawanan politik petani Tionghoa yang anti-pemerintah. Para petani ini berjejaring dengan PKI di Medan dan memiliki organisasi induk di Tiongkok.

Laporan berbeda muncul dari lingkaran PNI. Abdullah Jusuf—anggota parlemen dari PNI yang ditugaskan untuk menginvestigas kasus ini menyalahkan Gubernur Sumatra Timur, Addul Hakim. Baginya persoalan berakar dari kompensasi yang tidak adil sehingga petani menolak direlokasi. Lebih lanjut, ia juga menuduh bahwa Gubernur meneima *f.* 600.000,- uang kompensasi yang tidak dikelolanya dengan baik. Gubernur dianggapnya bertindak sendiri tanpa konsultasi kepada para wakil rakyat itu dan sengaja menciptakan ketegangan agar kekuatan polisi dapat digunakan.

Pemimpin PNI Sumatera Utara yang juga pemimpin harian *Waspada*, M. Said melihat bahwa peristiwa Tanjung Morara merupakan aksi spontan para petani yang akan digusur dengan menggunakan cara-cara kekerasan, dan ia mengecam keras tindakan gubernur tersebut. Belakangan, M. Said yang merupakan

penggagas gerakan anti Negara Sumatera Timur, juga mendesak pemimpin PNI di Jakarta untuk melakukan hal yang sama dan mengancam akan keluar dari partai jika fraksi PNI di parlemen tidak mendukung mosi Sidik Kertapati.

PNI dan Masyumi kemudian melakukan pertemuan untuk membahas masalah Tanjung Morawa yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan pada kedua partai pendukung pemerintah. Hanya saja, saat dilakukan pertemuan, haluan politik keduanya sudah bergeser. Pada pertemuan pertama yang diselenggarakan pada 26 Mei, PNI belum menunjukan sikap resminya terkait dengan Mosi Sidik Kertapati. Selang lima hari kemudian, pada pertemuan kedua, PNI menyatakan menolak cara-cara yang digunakan pemerintah untuk mengatasi peristiwa Tanjung Morawa, dan mendesak Masyumi untuk membubarkan kabinet. Masyumi menolak tuntutan PNI dan berkeyakinan bahwa kabinet masih memiliki cukup dukungan untuk melanjutkan tugas-tugasnya.[20]

Mencermati perkembangan politik, dan menakar dukungan terhadap pemerintah di parlemen setelah PNI mengeluarkan sikap resminya, perdana menteri Wilopo memilih untuk menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden sebelum pemungutan suara untuk menentukan nasib dari mosi Sidik Kertapati dilaksanakan. Terhitung mulai 3 Juni 1953, Kabinet Wilopo demisioner. Hingga kabinet baru terbentuk, maka untuk sementara waktu Wilopo masih menjalankan tugasnya.

PENUTUP

Akhir dari pengabdian Wilopo sebagai seorang perdana mentri seolah menunjukan suatu ironi. Kasus yang menyebabkannya mengembalikan mandat merupakan urusan yang sebenarnya bagian dari dunia yang telah ia geluti sejak lama dimana Wilopo dikenal sebagai pembela buruh dan kaum tani. Persoalan ini tentu saja tidak dapat digunakan untuk menilai bahwa Wilopo berubah, secara apapun ia tetap seorang yang dekat dengan rakyat kecil, lagi pula persoalan Tanjung Morawa tidak langsung berada di bawah kendalinya. Hanya saja jatuhnya kabinet Wilopo menjadi ilustrasi yang baik tentang persoalan pasca-revolusi dalam politik Indonesia yang telah dialami oleh para perdana menteri pendahulunya maupun yang akan dihadapi oleh para penerusnya. Wilopo yang mampu bertahan tatkala menghadapi badai di tubuh tentara, harus menerima kenyataan pahit oleh masalah Tanjung Morawa. Hal ini menunjukan seberapa tinggi ketergantungan pemerintah terhadap koalisinya. Dinamika politik di akhir masa jabatannya telah berubah arah dimana, seperti yang ia akui sendiri, terdapat faksi oposisi pemerintah dalam tubuh PNI bertambah kuat. Selain itu, situasi di akhir masa peerintahan Wilopo juga menunjukan betapa sulit posisi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait dengan modal asing.

Jatuhnya kabinet yang ia pimpin juga bukan kegagalan utama Wilopo. Bagi Herbert Feith kelemahan utama Wilopo terletak pada ketidakmampuannya untuk menggembor-gemborkan keberhasilannya selama memimpin pemerintahan. Komentar Feith ini sebenarnya suatu bentuk pujian. Kabinet Wilopo sangat diapresiasi oleh keberhasilannya di bidang ekonomi. Dari kerja kabinet ini pula, Undang-undang pemilihan Badan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat dihasilkan yang kemudian menjadi dasar pelaksanakan pemilu nasional yang pertama pada 1955. Lebih dari itu, kabinet ini menorehkan lebih banyak lagi pencapaian seperti penyelesaian masalah MSA, penciptaan sistem penganggaran jangka panjang pemerintah, serta banyak lagi lainnya. Keberhasilan tersebut dapat dicapai berkat keteladanan yang baik dari pribadi seorang perdana menteri yang tulus dan sederhana. Kemampuan personal Wilopo yang mampu merangkul segala perbedaan membuat kabinetnya dapat bekerja sebagai sebuah tim yang solid.

Dalam bekerja, Wilopo adalah orang yang tidak memanipulasikan keresahan rakyat, dan tidak ingin pula menonjol menjadi pahlawan maupun memberikan kesempatan pengikutnya untuk berlagak pahlawan. Wilopo adalah orang yang lugu, jujur, dan sederhana—dan menyitir pernyataan M. Roem—orang itu pahlawan.[21]

ENDNOTES

1 Jawaban Wilopo dalam suatu pembicaraan yang tidak menemui kesepakatan dengan Sukarno yang memintanya untuk mengambil tindakan untuk Jenderal Simatupang. Sukarno mengatakan kepadanya "Kalau saudara tidak setuju dengan saya, maka terserahlah. Saudara akan diketawakan rakyat". Wilopo menjawab dengan nada rendah dan ketenangan luar biasa yang menjadi ciri khas-nya, "*Wie het laatst lacht, lacht het best*". Lihat dalam Mohammad Roem, "Kabinet Wilopo sebuah Team" dalam I.N. Subagijo (1979), *Wilopo 70 tahun*, (Jakarta: Gunung Agung) hlm. 325

2 I.N. Subagijo (1979), *Wilopo*, hlm. 13

3 I.N. Subagijo (1979), *Wilopo*, hlm. 22

4 Lihat misalnya dalam Takashi Shiraishi (2015), *Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara)

5 Soenario S.H. *Banteng Segitiga*. Jakarta: Yayasan Marinda, 1988, hlm.45.

6 KR, 03 Maret 1952

7 KR. 20 Maret 1952

8 KR, 1 April 1952

9 KR, 04 April 1952

10 KR, 04 April 1952

11 KR, 4 April 1952

12 Ano, (1970) *Seperempat abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia*. (Djakarta: Sekretariat DPR), hlm. 175

13 Lihat dalam Mohammad Roem, "Kabinet Wilopo sebuah Team", hlm 321.

14 Keterangan dan Djawaban Pemerintah atas Program Kabinet Wilopo, P. 16.

15 KR, 15 Mei 1952.

16 KR, 15 Mei 1952.

17 Herbert Feith, (2009), *The Wilopo Cabinet 1952-1953: A turning point in post-revolutionary Indonesia*, (Jakarta: Equinox Publishing)., 566-67

18 KR, 9 Mei 1952.

19 Feith, *Wilopo*, 219

20 P.N.H. Simanjuntak, *Kabinet-kabinet*, h. 133

21 Roem, "Kabinet Wilopo", h. 326

ALI SASTROAMIDJOJO

ALI SASTROAMIDJOJO:

Indonesia untuk Perdamaian Dunia

"Perdamaian dunia hanya bisa tercapai apabila jurang kekayaan materiil antara negara-negara industri (Amerika, Eropa, Jepang, dan negara-negara sosialis) dan negara-negara sedang berkembang (Asia-Afrika dan Amerika Latin) selekas mungkin dihapuskan".[1]

Ali Sastroamidjojo

PENGANTAR

Keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) atau dikenal juga sebagai *Bandung Conference* di tahun 1955 menjadi jalan pembuka bagi kiprah yang lebih penting negara-negara berkembang dalam percaturan politik global waktu itu. Bagi Indonesia, kesuksesan KAA juga turut menaikan reputasi bangsa ini di hadapan khalayak internasional. Seolah tenggelam oleh nama-nama besar para pemimpin negara-negara dunia ketiga seperti Sukarno; Pandit Jawaharlal Nehru; dan Gamel Abdul Nasser, Perdana Menteri Indonesia saat itu, Ali Sastroamidjojo, adalah figur yang memiliki peran besar dalam membidani terselenggaranya KAA.

Ali Sastroamidjojo yang dalam sejarah Indonesia tercatat sebagai Perdana Menteri sebanyak dua kali merupakan tokoh yang berhasil meyakinkan pemimpin negara-negara Asia-Afrika untuk menggalang solidaritas dan untuk memainkan peran aktif di tengah situasi dunia yang memanas akibat terpapar Perang Dingin. Latar belakang penyelenggaraan konferensi ini tidak lepas dari gagasan-gagasan transnasional Ali Sastroamidjojo. Sebagai Perdana Menteri sekaligus seorang politisi PNI, Ali Sastroamidjojo memiliki visi internasional yang sangat kuat, yang terbentuk melalui pergulatan dan pengalamannya berinteraksi dengan dunia luar semenjak usianya yang masih belia. Terlepas dari cara pandangannya yang sangat mendunia, maupun karirnya sebagai diplomat yang menonjol, Ali Sastroamidjojo sejatinya adalah anak yang berasal dari lereng Gunung Merbabu.

MAGELANG DAN BATAVIA

Ali Sastroamidjojo lahir pada 21 Mei 1903 di Grabag, kira-kira 20 km jauhnya dari Magelang. Sebagai ibukota kawedanan, Grabag merupakan desa yang bercorak kekotaan. Jalur kereta api Semarang-Magelang melintasi wilayah ini, terdapat pula beberapa fasilitas lain seperti pendidikan dan kesehatan yang cukup memadahi. Lumrahnya seorang anak desa biasa, Ali Sastroamidjojo menghabiskan waktu kecilnya untuk bermain bersama teman-temannya yang sebagian besar merupakan anak-anak petani desa. Beberapa kawannya tidak bersekolah, melainkan membantu orang tuanya untuk mengembalakan kerbau. Dalam hal ini, Ali Sastroamidjojo cukup beruntung karena orang tuanya cukup terpandang dan sangat mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya.

R.Ng. Sastroamidjojo, ayah Ali Sastroamidjojo, merupakan elit lokal dari kalangan priyayi. Ia berasal dari keluarga birokrat setempat, putra R. Wirjodipuro, seorang wedana Batur di Banyumas. Dalam otobiografinya, Ali Sastroamidjojo menunjukan peran besar ayahnya baik sebagai orang tua yang mendorong anaknya untuk menempuh pendidikan tinggi, maupun sebagai model pegawai yang rajin. R.Ng. Sastroamidjojo muda juga gemar berkelana mengunjungi tempat-tempat baru, kesenangan ini menurun pula kepada Ali. Sepulang dari mengembara di Batavia, R.Ng. Sastroamidjojo bekerja untuk Bupati Magelang sebagai juru tulis. Oleh karena sang bupati menilai baik kerjanya juga pribadinya yang tekun, R.Ng. Sastroamidjojo dinikahkan dengan Kustiyah putri ke-19 Raden Tumenggung Ario Danuningrat II, bupati Magelang. Dari pernikahan ini lahirlah duabelas orang anak: enam laki-laki dan enam perempuan. Ali Sastroamidjojo sendiri merupakan putra ke sebelas, dan masih memiliki satu adik bernama Usman. Setelah menikah, karir R.Ng. Sastroamidjojo semakin menanjak. Ia diangkat sebagai asisten wedana, dan kemudian naik pangkat menjadi wedana Jetis Temanggung hingga pensiun. Dengan latar belakang sosial ini, putra-putri R.Ng. Sastroamidjojo dapat mengenyam pendidikan yang baik. Bahkan, beberapa saudara Ali dapat melanjutkan pendidikan di Batavia, dan Surabaya.

Selama bertumbuh sebagai anak desa di Grabag, Ali belajar membaca, menulis dan berhitung di sekolah desa. Tampaknya, sekedar mempelajari ilmu-ilmu dasar semacam itu kurang memuaskan hati ayahnya. Terlebih lagi, beberapa saudara Ali ada yang bersekolah di kedokteran dan teknik. Hanya saja untuk dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi, Ali harus masuk di sekolah Belanda dan untuk itu ia harus mahir berbahasa Belanda. Saudara Ali juga menyarankannya untuk dapat mengusai bahasa Belanda, karena bahasa Belanda adalah kunci kemajuan pada waktu itu. Usaha pertama untuk memasukan Ali ke sekolah Belanda gagal karena Ali dinilai tidak cakap dalam berbahasa Belanda, terlebih lagi, ayahnya hanya seorang pensiunan. Karena penolakan ini, Ali kemudian diberi kursus bahasa Belanda dengan guru Tuan Westendorp yang menerima sejumlah murid berbangsa Indonesia dengan mengutip ongkos yang cukup besar bagi ayah Ali saat itu.

Setelah belajar bahasa selama kurang lebih setengah tahun, Ali dapat diterima di sekolah nomor 2 (*tweede klasse school*) di Magelang. Sekolah ini sebenarnya merupakan sekolah untuk anak-anak Indo-Belanda, dan dengan sedikit pengecualian para anak priyayi. Biasanya murid-murid Indo-Belanda di *tweede klasse school* berperangai buruk dan berlaku nakal terutama terhadap siswa bumiputra. Hanya setahun setelah

masuk, Ali memilih keluar dari sekolah itu karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan teman-temannya yang kerap berlaku kejam. Meskipun sempat menolak untuk bersekolah lagi, ayah Ali tetap berusaha agar putranya dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Ali kemudian didaftarkan ke sekolah angka satu (*eerste klasse school*) yang sebenarnya merupakan sekolah elit untuk anak-anak Belanda. Tentu saja Ali ditolak, secara halus karena penguasaan bahasa Belandanya tidak terlalu bagus, namun juga oleh karena latar belakang sosialnya sebagai anak pribumi, yang hanya putra seorang pensiunan. Tidak kehabisan akal, ayah Ali kemudian menghadap kepada asisten residen dan mengatakan bahwa anak yang akan didaftarkannya ke sekolah angka satu masih merupakan cucu dari bupati Magelang. Dengan berbekal rekomendasi dari pejabat Belanda tadi, ayah Ali dapat membuat kepala sekolah kesulitan untuk menolak putranya. Setelah melalui test yang tidak terlampau susah, akhirnya Ali diizinkan bersekolah dengan syarat bahwa ia akan melanjutkan studinya ke sekolah kedoktoran. Syarat ini merupakan jalan tengah dari kepala sekolah untuk menjaga gengsi sekolahnya dengan memastikan bahwa anak didiknya yang seorang Jawa putra pensiunan itu kelak akan menjadi elit bumiputra.

Bagaimanapun, posisi Ali di sekolah itu tidak menguntungkan. Ia dianggap *inlander* dan oleh karenanya inferior. Di sisi lain, keberadaan Ali di sekolah elit tersebut juga meningkatkan persaingan bagi kawan-kawan Belandanya. Mereka dituntut untuk membuktikan bahwa anak-anak kulit putih lebih unggul dibandingkan siswa pribumi. Hanya saja, Ali mampu meraih prestasi yang bagus, selalu naik kelas setiap tahunnya, bahkan dengan nilai-nilai yang tinggi. Pencapaian ini membuat Ali belajar untuk mengatasi *inferiority complex* (rasa rendah diri) dan diskriminasi masyarakat kolonial yang menganggap bangsa Indonesia lebih rendah ketimbang bangsa Eropa. Pengalamannya bergaul dengan anak-anak Belanda di sekolah elit telah menyadarkan Ali bahwa kemampuan anak-anak Belanda itu juga tidak bagus-bagus amat, dan dengan ketekunan serta kerja keras, anak-anak pribumi dapat mengungguli mereka. Namun hal penting lain yang dirasakannya, Ali juga meyakini bahwa kolonialisme menghambat kemajuan bangsa Indonesia dengan menempatkan mereka sebagai kawula nomer dua. Sebagai contoh, pembagian sekolah yang bersifat diskriminatif, dimana untuk anak-anak pribumi disediakan HIS (Holands Inlandsche School) yang hanya mengajarkan bahasa Belanda tingkat dasar, dan yang untuk dapat masuk membutuhkan banyak persyaratan.

Setelah lulus dari *Eerste Europesche Lagere School* pada 1918, peluang Ali untuk melanjutkan sekolah semakin terbuka lebar. Oleh karena prestasinya yang baik selama menempuh pendidikan dasar, ditunjang pula dengan dukungan keluarganya, terutama saudara-saudaranya yang saat itu telah menamatkan pedidikan dan memperoleh pekerjaan yang mapan—seperti dokter bahkan anggota volksraad—Ali dihadapkan pada tiga pilihan menarik. Ali dapat memilih studi lanjut sekolah teknik, sekolah *ambtenaar* (Pamong Praja), atau HBS. Pilihan Ali jatuh ke HBS atas dorongan kakaknya, Sastrowidjono, yang merupakan aktifis Budi Utomo sekaligus anggota volksraad.[2] Meskipun HBS berbiaya mahal yang tidak mungkin lagi dijangkau oleh ayahnya, lulusan HBS memiliki peluang untuk melanjutkan studinya ke Belanda. Untuk menempuh pendidikan di HBS, Ali pindah ke Batavia dan tinggal di kediaman salah satu kakaknya, dokter Seno Sastroamidjojo, yang bekerja sebagai asisten pengajar di STOVIA.

Ali Sastroamidjojo lahir dan dibesarkan pada zaman bergerak, ketika berbagai kelompok nasionalis Indonesia muncul. Dalam atmosfer metropolitan Batavia, Ali bergaul dengan berbagai macam orang dari latar belakang sosial dan etnis. Adapun di HBS Ali mengalami persentuhan awal dengan aktivitas politik. Ketika Ali mulai tinggal di Batavia, berbagai organisasi kedaerahan muncul seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Pasundan. Karena belum memiliki ikatan kebangsaan, kerap kali timbul permusuhan antar organisasi pergerakan tersebut. Hanya saja di HBS, antagonisme antar perhimpunan dengan latar kedaerahan tidak terjadi karena jumlah siswa bumiputra yang masih sedikit dan mereka semua bersepakat untuk membentuk *Inlandsche HBS Vereniging*, atau perhimpunan (pelajar) HBS bumiputra. Organisasi ini beranggotakan siswa dari bangsa Indonesia, dan bersifat lintas etnis. Adapun, sentimen terhadap *inlander* yang selalu dipandang inferior yang merebak di sekolah elit semacam HBS menjadi faktor penting yang menyemaikan perasaan satu nasib para siswa yang beragam itu.

Pengetahuan Ali menjadi jauh lebih baik ketika kost di rumah Kartosemito, seorang dokter Jawa. Di rumah itu Ali kerap berjumpa dengan Alimin, kerabat ibu kost yang juga seorang tokoh muda dari Sarikat Islam yang namanya sudah cukup masyhur di kalangan pergerakan. Meskipun saat itu Ali masih belum begitu tertarik politik,—karena studi di HBS telah menyita banyak waktunya, dan barangkali juga kerena takut kehilangan beasiswa yang ia terima sejak tahun kedua—sosok Alimin mengesankan dan cukup mempengaruhi pandangan politiknya kala muda. Banyak gagasan Alimin merupakan pemikiran-pemikiran melampaui zamannya dan baru bagi Ali yang menjadi juga anggota Jong Java, sebuah perkumpulan yang termasuk salah satu paling awal namun lebih bercorak konservatif dengan orientasi pada semangat kejawaanya. Ali untuk pertama kali mendengar gagasan persatuan dari Alimin yang meyakini bahwa penjajahan harus dilawan dengan dengan persatuan bangsa Indonesia di bawah payung Islam. Kerap mendengar gagasan-gasagan progresif semacam itu, wajar jika kemudian Ali menjadi kecewa, ketika ia hadir dalam sidang Volksraad sebagai penonton di tribun, melihat para wakil bangsa Indonesia hanya menyampaikan usul yang datar-datar saja, itupun dalam bahasa Belanda yang di mata Ali lebih menampakan ketundukan pada budaya penjajah.

Meskipun Ali adalah produk pendidikan Belanda, dan sebagaimana ia rasakan sendiri bahwa kemampuannya berbahasa Belanda turut andil besar dalam kesuksesannya, Ali merasa bahwa bahasa adalah alat dominasi penjajah. Pandangan ini terus menerus dipegang teguh oleh Ali. Oleh karena itulah ia mulai melakukan dekolonisasi kecil-kecilan dalam keluarganya. Bahkan, kelak ketika ia telah berkeluarga dan memiliki anak, Ali memilih untuk mendididik anaknya dengan bahasa Jawa. Sehingga,

walaupun anaknya lahir dan besar di negeri penjajah, ia tidak dapat berbicara dalam bahasa Belanda. Keteguhan Ali dalam memegang erat tradisi tidak muncul begitu saja, melainkan berproses sejak ia masih di Magelang dan bersumber dari pengaruh orang tuanya. Ketika ia masih di Magelang selain harus belajar bahasa Belanda kepada Tuan Westendorp, kedua orangtuanya meminta Ali untuk belajar bahasa Jawa dan mengaji secara rutin tiga kali seminggu.

LEIDEN

Ali adalah orang yang dibesarkan bersama kisah-kisah. Dongeng-dongeng hadir memperkaya pengalaman pribadinya sebagai *archetype* dari masa lalu. Ali selalu terpesona dengan para pengkisah yang baik, semacam dokter Kartosemito yang mampu menghadirkan cerita letusan Gunung Krakatau seolah menjadi begitu nyata melalui penuturannya. Demikian pula, Ali gemar membaca lakon pewayangan, maupun sastra Barat karya Shakespeare, Bernard Shaw, La Martine, dan Mutatuli yang ia pelajari di HBS. Dongeng pulalah yang menjadi kenangan mendalam dari kehidupan masa kecilnya. Dari sekian banyak pengalaman masa kecilnya saat tinggal di Grabag, pertunjukan "gambar *implengan*" sangat membekas di ingatannya. Gambar *implengan* adalah kotak yang dilengkapi dua suryakanta (kaca pembesar) untuk memainkan gambar yang diputar oleh penjual gulali. Sembari memainkan kotak itu, penjual gulali bercerita untuk menarik para pembeli. Tentu saja, bermain di sawah, membuat wayang dari rumput, dan mandi di kolam dekat sumber air panas Candi Umbul dapat ia ingat dengan baik pula. Hanya, kotak gambar *implengan* dan dongeng penjual gulali tentang perang Jepang melawan Soviet yang adalah awal dari imajinasinya akan luasnya dunia, tanpa ia perlu tahu di mana Jepang atau Soviet berada.

Keinginan Ali untuk menjelajah dunia mulai memperoleh jalan setelah ia berhasil memperoleh ijazah HBS. Setelah melalui berbagai urusan yang rumit—mengurus surat sehat, mendaftarkan diri; termasuk mengurus persiapan pernikahannya dengan Titi Roelia—di akhir tahun 1922, berangkatlah Ali menumpang kapal laut 'Oranje' menuju Belanda. Lama tempuh dari Pelabuhan Tanjung Priuk ke Eropa adalah tiga minggu. Selama itu Ali merasakan kehidupan di kapal yang sebenarnya penuh *privilege*. Namun baginya, kehidupan serba enak semacam itu lebih cocok untuk menggambarkan situasi masyarakat kolonial dimana hanya ada dua penumpang "inlander" yang ditaruh pada kelas nomor dua, dan puluhan pelayan berbangsa Indonesia yang bekerja keras untuk membuat perjalanan penumpang kelas satu yakni para tuan kulit putih, totok dan Indo menjadi nyaman.

Ali mengingat betul tempat-tempat yang disinggahi kapalnya. Pelabuhan pertama adalah Colombo di Sri Lanka yang sejak era VOC sudah menjadi salah satu transit lalu lintas laut Indonesia-Eropa, Port Said di tepi utara Terusan Suez yang merupakan jalur penting yang dibangun untuk memendekan jarak tempuh Asia-Eropa, dan terakhir adalah pelabuhan yang sibuk dan penting di Eropa yang telah ada sejak abad ke-11: Genoa Italia. Dua hari singgah di Genoa, Ali yang pernah menghabiskan masa remajanya kota paling modern di Hindia Belanda: Batavia, merasa menjadi sangat udik karena melihat kota di Eropa yang begitu indah dan maju. Dari Genoa, Ali menempuh perjalanan darat selama satu hari melewati wilayah bergunung di Eropa selatan, terowongan Simplon yang menerobos pegunungan Alpen di perbatasan Italia dan Swiss. Hingga, sampailah Ali di Den Haag pada bulan Januari yang masih menyisakan hawa dingin musim salju.

Di negeri penjajah itu, ia bermaksud melanjutkan studinya di Universitas Leiden. Pada mulanya, Ali ingin mengambil Jurusan Bahasa dan Sastra, namun pilihan ini ia urungkan karena berbagai pertimbangan. Akhirnya Ali memutuskan untuk mendaftarkan diri pada Fakultas Hukum (*De Faculteit der Rechtsgeleerdheid*) dengan jurusan studi Hukum Hindia Belanda. Pada fakultas ini terdapat seorang ahli sekaligus perancang hukum kolonial yang terkenal yakni Profesor Cornelis van Vollenhoven. Adapun sejumlah orang berbangsa Indonesia juga pernah menempuh studinya di sini untuk belajar hukum seperti Oei Jan Lee, Noto Soeroto, Gondowinoto, dan Raden Panji Iskaq Tjokrohadisurjo.

Atmosfer kehidupan mahasiswa di negeri penjajah sangat dekat dengan aktivitas politik nasionalis. Di tahun-tahun ketika Ali sedang menempuh studinya itu, Belanda ibarat rumah yang menampung tokoh-tokoh pergerakan Indonesia—banyak diantaranya yang berusia muda dan akan memiliki karir politik yang panjang—dan berasal dari semua spektrum ideologi: mulai dari yang konservatif hinggga progresif. Menurut sejarawan R. Elson, istilah Indonesia yang memuat gagasan kebangsaan dan ekspresi nasionalisme mekar dari negeri Belanda.[3] Semula istilah Hindia Timur atau Hindia Belanda digunakan untuk menyebut wilayah kepulauan nusantara dan mereka yang berasal dari wilayah itu, tetapi pada 1917 para pelajar yang tinggal di Belanda kemudian membentuk perhimpunan dengan memakai nama Indonesia secara eksplisit. Perhimpunan ini dinamakan dengan *Indonesisch Verbond van Studeerenden* (Perhimpunan Pelajar Indonesia). Pada 1922, *Indische Vereeniging* mengadopsi istilah Indonesia untuk (*Indonesische*) mengganti kata *Indische*, lantas organisasi ini kemudian popular sebagai Perhimpunan Indonesia (PI). Pergantian nama ini turut mempengaruhi dinamika dan orientasi politik perhimpunan yang semula cenderung konservatif dan apolitis menjadi jauh lebih progresif dan berpengaruh besar dalam mengusung aspirasi bangsa Indonesia. Jika ketika dibentuk oleh Noto Soeroto dan Rajiun Harahap, *Indische Vereeniging* adalah kumpulan dansa-dansi dan pidato-pidato, organisasi ini berubah menjadi wadah perjuangan nasionalis di negeri penjajah setelah menjadi PI.

Melalui Perhimpunan Indonesia inilah, kiprah Ali dalam politik pergerakan semakin dalam. Ia menjadi editor untuk terbitan bertajuk *Indonesia Merdeka*, salah satu media corong pergerakan yang paling berani menentang kolonialisme. Selain itu, melalui PI, Ali berjerjaring dengan tokoh-tokoh penting lainnya seperti Moh. Hatta, Nazir Datuk Pamuntjak, Iwa Koesoemasoemantri, Sukiman Wirjosandjojo, dan Sunario Sastrowardoyo. Hingga, puncaknya Ali memperoleh masalah besar dengan polisi di Belanda. Ia ditahan bersama tiga kawan lainnya dengan tuduhan yang serius, melakukan aktivitas melawan pemerintah Belanda.

Persoalan ini sempat mengganggu studinya dan tentunya keluarganya. Kantor pemberitaan Belanda sengaja memberitakan kasus ini secara sensasional. Bahkan, foto Kemal, anaknya yang baru berusia dua tahun dan jelas tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini, turut dimuat dalam surat kabar Belanda. Di sisi lain, kasus yang menjeratnya memperoleh simpati banyak kalangan baik yang di Belanda maupun di Indonesia. Karena kasus ini pula, pamor Perhimpunan Indonesia yang semula tidak begitu diperhitungkan oleh kelompok pergerakan nasional lainnya di tanah air menjadi semakin meningkat.[4] Bahkan, organisasi-organisasi pergerakan yang semula terpecah belah menjadi bersatu untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di Belanda, SDAP—Partai Buruh Belanda beraliran sosialis-demokrat yang kerap memberikan kritik pedas atas politik kolonial Belanda—menjadi pendukung militant keempat aktifis pergerakan yang ditangkap. Partai ini bahkan meminta Ali dan kawan-kawan setelah bebas dari penahanan untuk turut dalam pawai keliling kota, pada kesempatan itu Ali memperoleh podium untuk menyampaikan pidato yang menelanjangi keburukan penjajah. Ali menuliskan kisahnya saat ditahan selama enam bulan, ketika menghadapi persidangan yang melalahkan, hingga akhirnya divonis bebas dalam sebuah buku kesaksian berjudul 'Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda Tahun 1927".

Selama dalam penahanan, Ali diizinkan untuk melaksanakan ujian doktoralnya di Universitas Leiden. Ujian Ali diajukan dua hari lebih awal dari agenda yang direncanakan sebelumnya karena mengantisiapsi demonstrasi SDAP yang akan digelar di depan gedung universitas. Ujian yang seharusnya dilaksanakan secara terbuka tiba-tiba diubah menjadi tertutup, dan hanya dihadiri dua orang sipir di bangku penonton.[5] Sesaat setelah ujian, Ali memperoleh kesempatan menemui anak dan istrinya dalam sebuah perjumpaan yang cepat namun mengharukan. Setelah itu ia kembali masuk ke selnya.

Setelah semua urusan hukum dan studinya di Belanda selesai, Ali beserta keluarga memutuskan pulang ke Indonesia. Hanya saja, menjelang kepulangannya, Ali memperoleh kabar bahwa setibanya di tanah air ia kemungkinan ditangkap lagi untuk diasingkan ke Digoel. Atas bantuan Mr. Duys yang menjadi pengacaranya, Ali dapat beraudiensi dengan Menteri Jajahan, Dr. J.C. Koningsberger. Melalui perdebatan yang cukup sengit dan setelah didesak terutama oleh kepiawaian diplomasi politik ala oposisi Mr Duys, Dr. J.C. Koningsberger akhirnya bersedia menjamin bahwa Ali tidak akan diusik selama ia tidak melanggar aturan. Akhirnya, Ali, Istri dan anaknya meninggalkan Belanda melalui perjalanan panjang menggunakan kapal melewati, Brussel di mana ia sempat menemui Hatta, lanjut menyusuri sungai Rhine di Jerman hingga Basel di Swiss, dan transit sejenak di kota pantai Locarno yang berbatasan dengan Italia. Di sana, Usman adik Ali yang tengah berada di Perancis menyusul untuk bertemu kakaknya itu setelah berpisah selama lima tahun. Ali dan keluarga meninggalkan benua biru Eropa yang memberinya banyak kenangan dan pengalaman sekaligus membuka cakrawala politik internasionalnya melalui pelabuhan Genoa di Italia. Dengan menumpang kapal milik biro pelayaran Jerman, tiga minggu dihabiskan keluarga kecil hingga sampai ke Tanjung Priuk.

KIPRAH BAGI INDONESIA

Sekembalinya di Indonesia, Ali Sastroamdijojo membuka kantor advokat di belakang gedung kantor asuransi NILLMIJ (Bumiputra) Yogyakarta. Oleh karena reputasinya saat di Belanda yang pernah ditahan dan disidangkan, pers kolonial menjukinya 'pengacara merah' (*rode advocaat*). Selain menangani beberapa kasus hukum, Ali Sastroamdijojo juga turut berkiprah dalam organisasi pergerakan melalui PNI. Partai ini dipilihnya karena memiliki tujuan politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang sejalan dengan asas dan tujuan Perhimpunan Indonesia. Oleh karena keterlibatannya dalam politik Hindia Belanda ditambah reputasinya sebagai orang berbahaya saat di Belanda, polisi dan dinas mata-mata kolonial semakin intens memata-matai Ali Sastroamdjojo.

Pada awal kemerdekaan, pemerintahan Sukarno-Hatta yang mempertimbangkan Kiprahnya dalam pergerakan kebangsaan, pengalamannya dalam birokrasi, dan keahliannya dalam bidang hukum, memintanya bergabung dalam Kementrian Penerangan yang saat itu dipimpin oleh Amir Sjarifuddin. Kali pertama dilantik posisi Ali adalah sebagai pegawai tinggi. Bagi Ali Sastroamdijojo jabatan ini bukanlah posisinya yang pertama dalam birokrasi mengingat ia pernah menjabat Walikota *Gemeente* Madiun pada akhir masa kolonial, meskipun demikian, jabatan yang diembannya sekarang adalah tugas pertamanya di bawah pemerintahan Indonesia Merdeka.

Hal unik terjadi saat bekerja dalam Kemetrian Penerangan waktu itu. Karena Amir Sjarifuddin masih berada di tahanan Kenpetai di Malang, Ali tiba-tiba saja ditunjuk sebagai wakil perdana menteri oleh Sukarno. Lebih mengagetkan lagi, rupanya Soekano mengetahui bahwa selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, Ali dan Amir menjalankan perlawanan politik melalui gerakan bawah tanah. Sukarno bahkan juga mengetahui bahwa gerakan itu telah menerima uang sebesar 25.000 Gulden dari Van Der Plaas. Meskipun demikian, Sukarno malah mempercayakan posisi penting di kementrian kepada keduanya yang notabene memiliki garis politik yang berlawanan dalam menghadapi Jepang: Sukarno cenderung kooperatif, sedangkan Ali dan Amir resisten, sebagai penghargaan atas perjuangan keduanya.[6]

Dalam perjalanan pulang dari Den Haag setelah menyelesaikan perundingan KMB, Ali Sastroamidjojo dilantik menjadi duta besar pertama Republik Indonesia Serikat. Prosesi pelantikannyapun terbilang unik dan berbeda dari pada kebiasaan yang ada. Saat itu, wakil presiden Moh Hatta melantik Ali Sastroamidjojo di dalam pesawat yang membawa keduanya dari Jakarta ke Yogyakarta. Mengingat pentingnya hubungan diplomatik RIS sebagai negara yang baru saja diakui kedaulatannya oleh Belanda, jabatan sebagai duta besar untuk Amerika memiliki posisi penting dalam membina kerjasama dan melangsungkan politik luar negeri Indonesia. hal ini juga dapat dilihat dari kapasitas orang-orang Indonesia yang telah dikirim ke Amerika terlebih dahulu seperti L.N. Pallar yang mewakili Indonesia dalam PBB, dan Soemitro Djodjohadikoesoemo yang ditugaskan sebagai duta sejak 1950 di sana. Hatta berkeinginan agar Ali Sastroamidjojo dapat membangun pondasi-pondasi awal persahabatan yang baik antara Amerika dan Indonesia. Selama

Pertemuan Presiden RI Ir. Sukarno-Mr. Ali Sastroamidjojo membicarakan rencana pembentukan kabinet, tanggal 12 Juni 1953.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

bertugas di Amerika, Ali Sastroamidjojo berhasil menciptakan hubungan baik dengan para pejabat di sana yang berperan penting dalam melancarkan diplomasi Indonesia-Amerika. Selain itu, Ali Sastroamidjojo juga berhasil menaruh pondasi penting dengan membeli rumah tinggal duta besar di Teldelen Street yang saat ini difungsikan sebagai kantor kedutaan Indonesia di Washington. Namun, sebelum Ali Satroamidjojo tuntas melakukan semua tugasnya, ia dipanggil pulang untuk mengakhiri krisis politik akibat kekosongan jabatan perdana menteri.

KABINET ALI SASTROAMIDJOJO JILID I

Krisis kabinet pasca Wilopo demisioner merupakan kekosongan kabinet yang paling panjang dalam sejarah, yang berlangsung selama 58 hari. Hal ini bukan hanya membawa Indonesia dalam situasi yang tidak menguntungkan, namun juga semakin memunculkan pertentangan-pertentangan politik sesama bangsa Indonesia. Sebenarnya, kecenderungan akan menguatnya politik aliran sudah tampak pada akhir pemerintahan Kabinet Sukiman. Walaupun menguatnya politik aliran itu tidak selalu menjadi penyebab suatu kabinet dibubarkan, hal ini sangat berdampak pada ketidakstabilan politik. Saat itu, tanpa adanya partai dominan dalam DPRS, pemerintahan hanya dapat disusun melalui koalisi. Sebagaimana terjadi dengan kabinet-kabinet sebelumnya, pasca Wilopo mengundurkan diri, pembentukan kabinet baru juga harus didasarkan pada kekuatan koalisi partai-partai. Hanya saja, membangun koalisi dalam situasi politik seperti ini tidaklah mudah, sehingga muncul gagasan oleh banyak kalangan yang beranggapan bahwa kabinet koalisi juga akan berujung pada ketidakstabilan politik.

PEMBENTUKAN KABINET

Sebagai langkah antisipasi, usul awal yang mengemuka ialah utuk membentuk kabinet presidensial untuk menggatikan kabinet Wilopo. Nama yang muncul sebagai kandidat utama saat itu adalah Moh. Hatta, tokoh kuat yang dianggap netral karena tidak berpartai. Berdasarkan ketentuan konstitusi, Hatta dapat menjabat sebagai perdana menteri hanya jika negara berada dalam kondisi darurat. Natsir sebagai salah satu tokoh yang mengusulkan gagasan ini menyatakan bahwa negara sedang berada pada kondisi darurat walaupun tidak tampak di permukaan. Meskipun pengusulan nama Hatta dianggap tidak memihak kelompok politik manapun, muncul pula ketidaksetujuan dari berbagai golongan dengan alasan bahwa Hatta telah menjabat sebagai Wakil Presiden. PNI, misalnya, dapat menerima Hatta asal ia melepaskan terlebih dahulu jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Di sisi lain, antagonisme antar kelompok politik turut menyebabkan sulitnya menentukan formatur guna membentuk kabinet baru karena terbentur masalah keengganan antar sejumlah partai untuk bekerja sama. Salah satunya adalah PNI yang saat itu dipegang oleh Sidik Djojosukarto, tokoh pergerakan yang lebih banyak menghabiskan hidupnya bergumul dengan akar rumput ketimbang menjadi sosok metropolitan. Bagi Sidik Djojosukarto, menganggap koalisi dengan Masyumi dan PSI tidak akan menguntungkan bagi PNI.

Setelah langkah-langkah awal untuk melakukan pembentukan kabinet baru tidak menampakkan hasil, Presiden Sukarno mengambil inisiatif dengan menunjuk Sarmidi Mangunsakoro dari PNI dan Mr. Moh. Roem dari Masyumi untuk bertindak sebagai formatur. Pemilihan keduanya didasarkan pada pertimbangan politik akan pentingnya peran dan pengaruh dua partai: PNI yang nasionalis sekuler, dan Masyumi berhaluan Islam. Presiden sangat berharap melalui kerjasama antara keduanya antagonisme dua aliran politik tadi dapat dikompromikan yang juga dapat turut meredakan gonjang-ganjing politik yang sudah menjalar ke masyarakat. Pada 15 Juni 1953, kedua formatur itu mulai melaksanakan mandatnya.

Hanya saja, pekerjaan formatur tampaknya banyak menemui hambatan, kali ini bukan dari partai keduanya, melainkan lebih pada perbedaan besar antara kedua tokoh. Sarmidi Mangunsarkoro, tokoh pendidik dari Taman Siswa yang dikenal kuat dalam memengang prinsip-prinsipnya, merupakan orang dekat yang juga memiliki pandangan politik sehaluan dengan Sidik Djojosukarto. Artinya ia termasuk dalam bagian radikal dari PNI. Adapun Mr. Moh Roem yang merupakan diplomat terkemuka merupakan bagian dari Masyumi yang jauh dari sikap-sikap radikal. Perbedaan antara keduanya segera terlihat. Sarmidi Mangunsakoro berpandangan bahwa formatur perlu melakukan hearing dengan semua partai, tetapi, Moh. Roem merasa hal tersebut tidak perlu dilakukan karena presiden telah mendengar dari mereka. Lebih lanjut, keduanya juga berbeda pendapat dalam hal pembukaan kedubes di Moscow, penyelesaian permasalahan tanah di Sumatera Timur, pertambangan minyak Sumatera Utara, dan ratifikasi perjanjian San Fransisco. Oleh karena perbedaan yang mencolok tersebut, formatur kemudian mengembalikan mandat kepada presiden setelah tujuh hari

berusaha menjalankan tugasnya. Sebenarnya, Presiden memperpanjang mandat keduanya selama dua hari, namun tetap saja tidak ada kata sepakat yang dapat dicapai.

Setelah kegagalan formatur yang pertama, Presiden kemudian mengangkat Mukarto Notowidagdo, mantan Menteri Luar Negeri dalam kabinet Wilopo, yang juga dari PNI sebagai formatur baru. Dalam Otobiografinya Ali Sastroamidjojo menyebutkan, setelah surat kabar komunis memberitakan dukungannya terhadap Mukarto Notowidagdo, partai-partai Islam menutup kemungkinan untuk bekerjasama. Meskipun demikian, sebenarnya Mukarto Notowidagdo berhasil memperoleh dukungan dari sejumlah wakil Liga Muslim Indonesia, namun tanpa Masyumi yang melihat bahwa program yang ditawarkannya tidak jauh beda dengan yang disodorkan oleh Sarmidi Mangunsakoro kepada Moh. Roem. Oleh karena penolakan ini, dalam waktu enam hari setelah pengangkatan, tugas Mukarto Notowidagdo sebagai formatur gagal. Presiden Sukarno kemudian memberinya mandat dengan tugas yang berlainan yakni untuk membentuk "*zaken kabinet* yang memperoleh dukungan cukup dari parlemen". Kompromi yang dilakukan Mukarto Notowidagdo lagi-lagi terbentur dengan tuntutan Masyumi yang tidak menyetujui komposisi dan personalia dalam kabinet baru. Masyumi menginginkan nama Abdul Halim dan Moh. Roem di masukan dalam kabinet untuk urusan dalam negeri. PNI menolak usulan tersebut karena menganggap keduanya terlibat dalam peristiwa Tanjung Morawa. Pada tanggal 6 Juli 1953, Mukarto Notowidagdo mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Mandat sebagai formatur kemudian diberikan kepada Burhanuddin Harahap dari Masyumi, dengan tugas membentuk kabinet dengan "cukup dukungan dari parlemen". Dapat dipastikan, karena formatur dari Masyumi maka tantangan terbesarnya adalah memperoleh dukungan dari PNI. Strategi Burhanuddin Harahap waktu itu adalah menawarkan posisi-posisi penting untuk PNI, sedangkan Masyumi mengambil kursi yang dianggap tidak terlalu penting, namun meminta kesepakatan PNI bahwa posisi perdana menteri akan ditentukan oleh formatur. Hanya saja, PNI secara tiba-tiba tetap menginginkan posisi Perdana Menteri untuk partainya. Karena persoalan formasi dan komposisi kabinet tidak dapat diatasi, formatur ketiga ini pada akhirnya mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada 18 Juli 1953.

Dengan gagalnya formatur yang ketiga, terasa persoalan semakin pelik. Hal ini mengingat mereka yang ditunjuk Presiden sebagai formatur adalah tokoh-tokoh kunci dari dua partai besar waktu itu. Bahkan kolaborasi antara keduanya juga gagal mencapai kesepakatan. Langkah selanjutnya yang diambil presiden adalah mengangkat formatur baru, namun kali ini yang ditunjuk adalah Mr. Wongsonegoro dari PIR, partai kecil yang suaranya tidak sebesar Masyumi dan PNI. Penunjukan Mr. Wongsonegoro selain mengagetkan banyak kalangan juga memunculkan pesimisme. Satu minggu waktu yang diberikan Sukarno kepada formatur baru, namun kemudian diperpanjang selama tiga hari. Di luar dugaan, Mr. Wongsonegoro berhasil menghimpun kekuatan partai-partai kecil lainnya untuk mendukungnya, sehingga dapat membentuk susunan kabinet dengan posisi Perdana Menteri diberikan kepada PNI.

Rancangan kabinet baru tidak memperoleh persetujuan Masyumi yang ditawari posisi Wakil Perdana Menteri. Masyumi juga tidak mensepakati beberapa program yang diajukan oleh formatur, serta merasa keberatan dengan sejumlah nama yang akan duduk di kabinet yang baru. Meskipun memperoleh penolakan dari Masyumi, Presiden mensetujui rancangan kabinet baru yang disodorkan Mr. Wongsonagoro yang didukung oleh PNI dan partai-partai kecil lainnya. Alhasil, kabinet tetap akan dilantik dengan komposisi seorang perdana menteri, dua wakil perdana menteri, dan tujuh belas menteri. Untuk mengisi kursi perdana menteri, PNI kemudian menunjuk Ali Sastroamidjojo yang masih berada di Washington. Ini adalah kabinet yang pertama dalam sejarah yang memiliki dua wakil Perdana Menteri yang dipegang oleh formatur sendiri yakni Mr. Wongsonegoro (PIR), dan Zainul Arifin (NU). Untuk kali pertama pula semenjak pengakuan kedaulatan Indonesia di tahun 1949, Masyumi tidak masuk dalam pemerintahan.

Delapan belas anggota kabinet baru dilantik presiden pada 30 Juli 1953. Terbentuknya kabinet Ali Sastroamidjojo mengakhiri krisis kabinet terpanjang dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Komposisi kabinet Ali Sastroamidjojo sebelum mengalami perubahan:

- Perdana Menteri
  Ali Sastroamidjojo PNI
- Wakil Perdana Menteri I
  Wongsonegoro(PIR)
- Wakil Perdana Menteri II
  Zainul Arifin (NU)
- Menteri Luar Negeri
  R. Sunario (PNI)
- Menteri Dalam Negeri
  Prof. Dr. Mr. Hazairin (PIR)
- Menteri Perekonomian
  Dr. Iskak Tjokroadisurjo (PNI)
- Menteri Keuangan
  Dr. Ong Eng Die (PNI)
- Menteri Pertahanan
  Iwa Kusumasumantri (Progresif)
- Menteri Kehakiman
  Djody Gondokusumo (PRN)
- Menteri Penerangan
  FL Tobing (S.K.I.)
- Menteri Perhubungan
  Abikusno Tjokrosujoso (PSII)
- Menteri P.U dan Tenaga
  Prof. Ir. Rooseno (PIR)
- Menteri P.P. dan K.
  Mohammad Yamin (Independen)
- Menteri Perburuhan
  Sutan Muchtar Abidin (Partai Buruh)
- Menteri Pertanian
  Sadjarwo (BTI)
- Menteri Agama
  K.H. Masjkur (NU)
- Menteri Kesehatan
  FL Tobing (*ad interim*, S.K.I.)
- Menteri Sosial
  Pandji Suroso (Parindra)
- Menteri Urusan Kesejahtraan
  Sudibjo (PSII)
- Menteri Urusan Agraria
  Mohammad Hanafiah (NU)

Keanggotaan Kabinet Ali Sastroamidjojo menunjukan adanya komposisi kabinet cukup berbeda dari yang sebelumnya. Dari duapuluh

Presiden Sukarno melantik Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri pada tanggal 30 Juli 1953.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

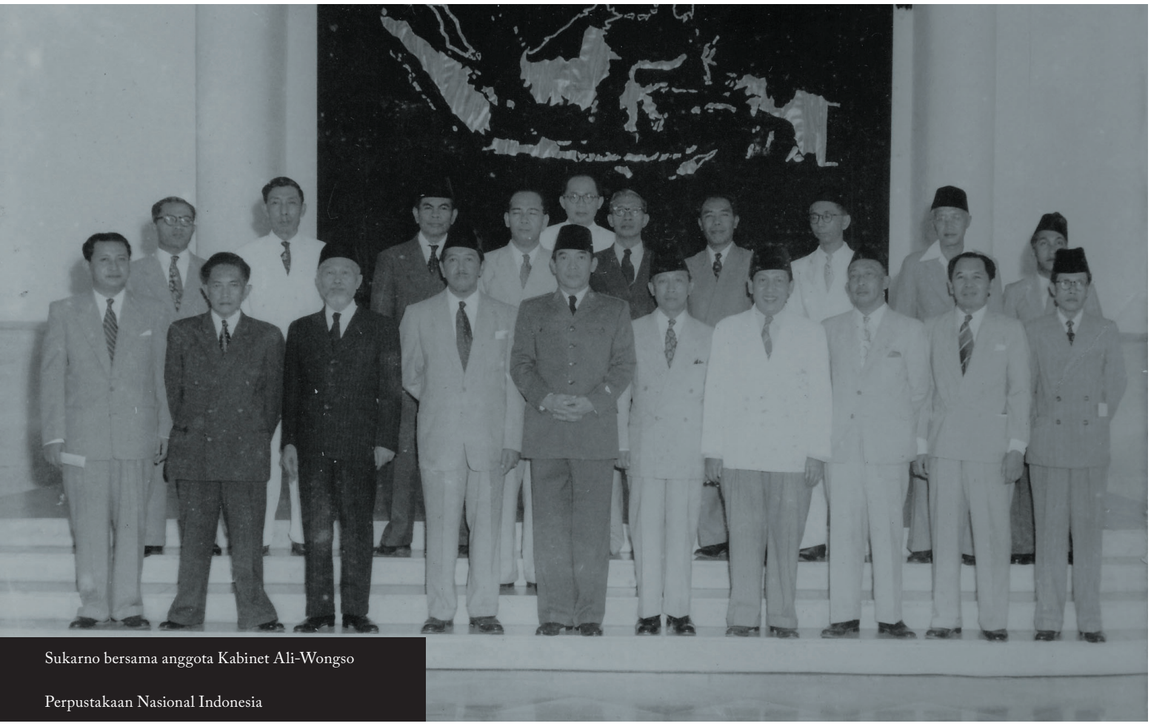

Sukarno bersama anggota Kabinet Ali-Wongso

Perpustakaan Nasional Indonesia

anggota kabinet baru, hanya empat nama yang menjadi bagian dari pemerintahan sebelumnya. Mayoritas merupakan tokoh-tokoh politik yang telah berperan penting sebelum 1949, termasuk sejumlah nama yang menjadi bagian dari gerakan politik radikal pada masa sebelum perang yakni: Ali Sastroamidjojo sendiri, Sunario, Iwa Kusumasumantri, Iskaq Tjokroadisurjo, Abikusno, dan Yamin. Mereka semua memiliki hubungan personal dan politik yang dekat dengan Sukarno, namun cukup berjarak dengan Hatta. Oleh karenanya, sebagaimana Herbert Feith menyebutkan, inilah kabinet sejak 1945 dimana pengaruh Hatta dan Sjahrir absen dari posisi penting.[7]

PROGRAM DAN OPOSISI

Perdana Menteri baru yang belum diambil sumpahnya baru tiba di Jakarta pada 11 Juli setelah menempuh perjalanan panjang dari Amerika dengan singgah semalam di Den Haag. Sehari setelah tiba di Jakarta, Ali Sastroamidjojo dan F.L. Tobing dilantik oleh Presiden sebagai Perdana Menteri dan Menteri kesehatan *ad interim* pada sekitar pukul tujuh malam. Pengambilan sumpah Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri berlangsung serba singkat. Karena hari itu ketika ia dilantik adalah hari kedua baginya berada di Indonesia, dan lagi pula selama ini ia belum mengadakan perhubungan dengan anggota kabinet lainnya, maka setelah prosesi pelantikan berakhir, Ali Sastroamidjojo langsung memimpin sidang kabinetnya yang pertama. Agenda yang dibahas pada pertemuan itu adalah program kerja kabinet. Pembahasan ini dapat berjalan dengan lancar, terutama karena garis besar program kabinet telah dipersiapkan dengan baik dan tidak terlalu banyak mengalami perubahan dari kabinet sebelumnya. Banyaknya kesamaan program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo dengan yang sebelumnya dikarenakan masalah-masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia waktu itu juga tidak jauh berbeda, banyak persoalan dasar yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya yang perlu untuk segera diselesaikan.

Program kabinet yang telah disusun kemudian diajukan dalam sidang parlemen pada 25 Agustus 1953 untuk memperoleh persetujuan atau penolakan. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memberikan keterangan pemerintah mengenai program kerja kabinetnya. Setelah mendengarkan keterangan pemerintah, parlemen diberi waktu untuk mempelajari dan memberikan tanggapan atas program-program yang diajukan Perdana Menteri. Kritik dengan mudah dapat diprediksi, muncul dari kelompok oposisi terutama dari Masyumi—dan belakangan kemudian adalah Partai Katolik.

Kritik pertama pihak oposisi terhadap kabinet Ali Sastroamidjojo menyangkut kebaruan program yang ditawarkan. Kabinet Ali Sastroamidjojo dianggap mengajukan program yang membosankan dan tidak memiliki kebaruan dari apa yang sudah direncanakan pemerintahan sebelumnya. Lebih lagi, pemerintah tidak memberi latar belakang analisa atas program yang diajukan. Pemerintah kemudian memberikan jawaban atas kritik kelompok oposisi. Ali Sastroamidjojo mengakui bahwa program kabinetnya tidak ada hal-hal yang baru. Hal ini terjadi karena memang masalah-masalah

yang dihadapi masih merupakan persoalan lama, sehingga baginya tidak perlu merancang sesuatu yang baru hanya untuk berbeda dari sebelumnya. Menurut Ali Sastroamidjojo, masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia merupakan kelanjutan dari persoalan sudah ada sejak awal tahun 1950 dan oleh sebab itu tugas kabinetnya adalah menyelesaikannya. Demikian pula tentang analisa terhadap program yang akan dijalankan, pemerintah merasa tidak perlu lagi untuk membautnya karena sudah terlalu banyak analisa dan yang pelu diambil adalah langkah kongkrit untuk melaksanakannya. Dalam hal pendekatan pelaksanaan program, Ali Sastroamidjojo menekankan bahwa kabinetnya akan mengambil sikap yang 'tegas dan jelas'. Persoalan sikap inilah yang menjadi bahan kritik yang kedua, dimana pihak oposisi menganggap Ali menggunakan '*de rumoerige uitdagende toon*' (suara keras dan menantang).[8]

Tampaknya pihak oposisi juga tidak memiliki alternatif program untuk ditawarkan kepada kabinet baru, dan cenderung berpikiran sama dengan pemerintah. Setelah melalui proses tanya jawab di parlemen, sebagai kewajaran dalam mekanisme demokrasi, selanjutnya partai-partai mengambil suara untuk memutuskan apakah program kerja kabinet ini dapat diterima. Hasil perhitungan suara menunjukan 122 setuju berbanding 34 menolak, dan 26 tidak memberikan suara atau blangko. Dari keseluruhan anggota parlemen, hanya Masyumi dan Partai Katholik yang menolak, sedangkan PSI dan Partai Murba yang sama-sama tidak menjadi bagian dari kabinet memilih bersikap abstain. Bagi Ali Sastroamidjojo perolehan suara ini berarti sangat penting karena membungkam isu yang sebelumnya banyak beredar yang menyatakan bahwa kabinetnya hanya akan dapat hidup atas dukungan PKI. Perolehan 122 suara yang mendukungnya menunjukan bahwa tanpa PKI yang menguasai 15 kursi parlemen, kabinetnya tetap akan memenangkan voting. Dengan demikian, program kabinet pada prinsipnya diterima, hanya saja istilah yang digunakan sesuai dengan budaya politik Indonesia waktu itu adalah "parlemen menyetujui memberikan 'kesempatan bekerja' kepada Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Secara garis besar agenda kerja kabinet ini dapat dibagi menjadi persoalan-persoalan dalam negeri dan luar negeri. Adapun persoalan dalam negeri meliputi:[9] (1) Bidang ketertiban-keamanan; (2) Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu); (3) Kemakmuran dan Keuangan; (4) Organisasi negara dan hubungan pusat dan daerah; (5) Perburuhan; dan (6) penyusunan perundang-undangan. Hampir semua masalah ini telah ada sejak kabinet sebelumnya, sehingga formulasi program yang dirancang pemerintahan Ali Sastroamidjojo juga tampak meneruskan program kerja kabinet pendahulunya. Misalkan saja untuk Pemilu dan bidang keamanan dan ketertiban. Persiapan Pemilihan Umum sudah mulai dibicarakan sejak Kabinet Natsir. Dalam hal ini Kabinet Ali Sastroamidjojo berusaha agar dapat dengan segera melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam bidang ketertiban-keamanan, Kabinet Ali Sastroamidjojo berusaha untuk memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas dapat diambil untuk menciptakan kestabilan politik. Pemerintah juga berusaha untuk membangkitkan tenaga rakyat dan serta membangun hubungan yang sinergis antar alat-alat kekuasaan negara.

Persoalan ekonomi menjadi bidang yang tak kalah rumit dan berkaitan dengan banyak hal. Adapun langkah-langkah Kabinet Ali Sastroamidjojo untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional kerap menjadi sasaran kritik baik dari kelompok oposisi, maupun para perancang ekonomi. Soemitro Djojohadikoesoemo yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo mengkritik kebijakan Iskaq Tjokroadisurjo (Menteri Perkonomian) dan Ong Eng Die (Menteri Keuangan)—keduanya berasal dari PNI—yang dianggap tidak peduli terhadap masalah keuangan. Dengan semakin dekatnya pemilihan umum mereka dengan terang-terangan mulai memakai sistem lisensi impor untuk membeli dukungan politik yang mengakibatkan ketidak pastian dunia usaha.[10] Kritik lain juga muncul dari Sjafruddin Prawiranegara yang menyatakan ketidaksetujuannya atas keputusan Iskaq Tjokroadisurjo dan Ong Eng Die untuk membebaskan para menteri dari kewajiban membayar pajak impor mobil mewah.[11]

Terlepas dari seringnya program ekonomi kabinetnya memperoleh kritik, Ali Sastroamidjojo memiliki agenda kerja di bidang ekonomi yang menitikberatkan programnya untuk menciptakan kemakmuran dan mengatasi persoalan dalam bidang keuangan. Untuk itu Pemerintah berusaha untuk menciptakan politik pembangunan yang dapat menjangkau rakyat banyak, memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan

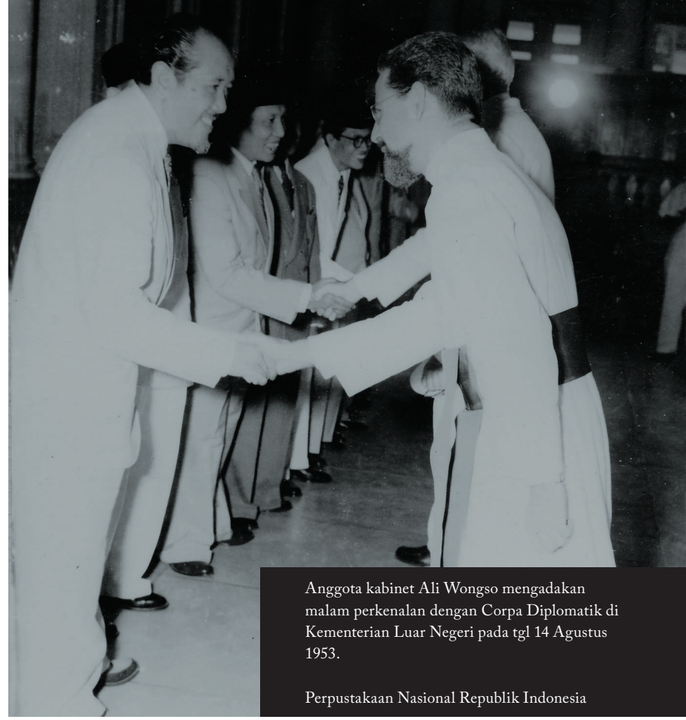

Anggota kabinet Ali Wongso mengadakan malam perkenalan dengan Corpa Diplomatik di Kementerian Luar Negeri pada tgl 14 Agustus 1953.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

rakyat kota, mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan, dan memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara. Bruce Glassburner mencatat, pada masa pemerintahan Ali Sastroamijojo ini pula, pengetatan fiskal yang diterapkan kabinet Wilopo mulai ditinggalkan.[12]

Di antara program ekonomi kabinet Ali, terdapat kebijakan Menteri Perekonomian Iskaq Tjokroadisurjo—yang oleh sebagian kalangan dianggap berani mengambil langkah radikal—dikenal dengan istilah 'Indonesianisasi' ekonomi.[13] Indonesianisasi ekonomi sebenarnya merupakan suatu langkah lumrah diterapkan oleh sejumlah negara bekas koloni contohnya Philipina, maupun untuk diadopsi oleh sejumlah kabinet pemerintahan di Indonesia meskipun dengan pendekatan yang lebih moderat. Gagasan ini dapat dianggap cukup wajar karena

sebagai negara yang baru saja terbebas dari penjajahan sebagian besar sumber ekonomi dan akses produksi masih berada di bawah kekuasaan perusahaan-perusahaan asing. Pada awal dekade 1950-an, sektor ekonomi modern berskala besar yang menyumbang hampir 25% PDB masih berada di bawah perusahaan-perusahaan Belanda dan beberapa perusahaan multinasional kepunyaan Inggris dan Amerika.[14] Pada kurun yang sama, tepatnya di tahun 1952, 60% impor barang-barang konsumsi dipegang oleh delapan perusahaan dagang Belanda; demikian halnya dengan perbankan swasta juga didominasi oleh bank asing.[15] Mengingat lemahnya modal 'pribumi', arah kebijakan pemerintah ditujukan untuk mengembangkan perusahaan negara agar dapat bersaing dengan perusahaan Belanda. Program ini dilaksanakan melalui penyediaan lisensi impor di mana 80-90% dari devisa berlisensi harus disediakan untuk importir pribumi (asli), yang dijalankan berbarengan dengan pengambilalihan bisnis-bisnis yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda oleh pemerintah Indonesia.

Sebagai negara yang masih muda, Indonesia pada 1950-an dihadapkan pada persoalan integrasi yang menyangkut masalah perhubungan pusat dan daerah, dan masalah birokrasi di mana Indonesia mengalami kekurangan tenaga ahli dan maraknya korupsi. Menyangkut perhubungan pusat-daerah, pemerintahan Ali Sastroamidjojo mengagendakan penyempurnaan undang-undang untuk memperbaharui politik desentralisasi, dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah. Terkait dengan birokrasi, Ali Sastroamidjojo mendorong usaha-usaha pemberantasan korupsi dan terwujudnya aparatur pemerintahan yang efisien yang disertai pembagian tenaga secara rasional dan taraf hidup pegawai yang meningkat. Sejarawan Herbert Feith mencatat bahwa kabinet Ali Sastroamidjojo melakukan paling banyak pergantian, pemecatan, dan transfer pegawai terutama pada posisi-posisi penting bila dibanding dengan kabinet perdana menteri sebelumnya.[16] Perubahan administratif semacam ini, menurut Feith, tidak terlalu efektif dalam meningkatkan kinerja aparatur negara karena lebih condong pada kebutuhan politik—terutama oleh partai penguasa—ketimbang pemilihan yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan perfoma kerja.[17]

Adapun masalah pasca-revolusi lainnya yang dihadapi Ali Sastroamidjojo terkait dengan banyaknya sumber daya manusia yang perlu disalurkan ke berbagai lapangan pekerjaan, dan memperoleh penghidupan yang layak. Masalah ini erat kaitannya dengan veteran dan buruh. Perburuhan adalah masalah pasca revolusi yang juga memerlukan pendanganan serius dalam banyak hal dipengaruhi oleh struktur ekonomi Indonesia yang belum dapat beranjak jauh dari struktur ekonomi kolonial. Oleh karenanya buruh menjadi kelompok yang tidak diuntungkan walaupun tidak dapat dipungkiri mereka memainkan peran penting bagi ekonomi nasional. Pada lain sisi, telah banyak bermunculan organisasi ataupun serikat buruh. Mereka merupakan kelompok yang juga turut berkiprah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan telah menjadi organ yang kritis dalam menyuarakan nasib anggotanya. Pada satu sisi, perkembangan ini menunjukan hal yang positif, namun pada sisi yang lain, berbagai

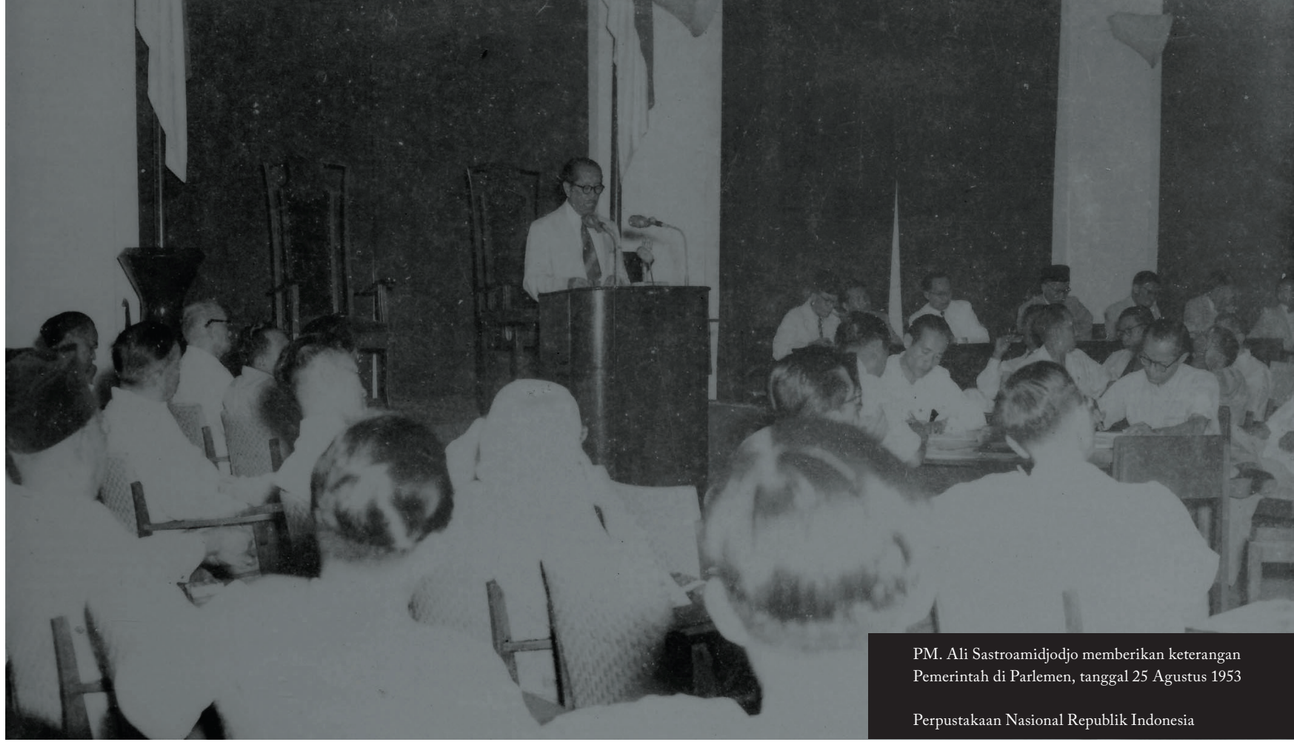

PM. Ali Sastroamidjodjo memberikan keterangan Pemerintah di Parlemen, tanggal 25 Agustus 1953

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

aksi buruh terutama dengan jalan mogok kerja turut menghambat laju ekonomi. Program Kabinet Ali berusaha untuk menyusun undang-undang perburuhan untuk mencapai kembali ketenagakerjaan sebesar-besarnya.

Program-program Kabinet Ali Sastroamidjojo yang berkaitan dengan persoalan luar negeri Indonesia menunjukan kapasitas Perdana Menteri yang sangat piawai dalam menterjemahkan persoalan internasional dan memposisikan kepentingan Indonesia di dalamnya. Meskipun secara garis besar terdapat program yang bersifat melanjutkan dari kabinet sebelumnya, pendekatan Ali Sastroamidjojo cukup berbeda ketika menempatkan Indonesia dalam situasi politik dunia waktu itu. Secara rinci, program Kabinet Ali Sastroamidjojo dalam bidang politik Luar Negeri meliputi: 1.) Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia, 2.) Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas *unie-statuut* menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, 3.) Mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara.

Dalam otobiografinya, Ali Sastroamidjojo mengakui bahwa selama dua tahun masa kerjanya sebagai perdana menteri, ada banyak masalah yang tidak terpecahkan, dan sejumlah kegagalan yang dialami.[18] Akan tetapi, sejumlah pencapaian penting juga berhasil diraih. Kebijakan kabinet Ali Sastroamidjojo mencerminkan perubahan radikal dari praktik yang dilakukan oleh keempat kabinet sebelumnya yang terasa benar dalam bidang ekonomi. Jika para pendahulunya mengarahkan kebijakan ekonomi mereka terutama untuk

melakukan restorasi dan perluasan produksi yang didasarkan pada pertimbangan akan kebutuhan stabilitas keuangan, kebijakan kabinet Ali Sastroamidjojo ditujukan untuk mendorong keunggulan atas ekspansi produksi dan stabilitas harga.[19] Menteri Iskaq mencangkan program Indonesianisasi ekonomi dengan semboyan 'dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional'. Adapun langkah yang diterapkan oleh Menteri Perekonomian ini dianggap mengarah pada suatu bentuk proteksionisme yang langsung memperoleh respon keras dari kolega sesama anggota kabinet yakni Menteri Keuangan, Ong Eng Die, dan Gubernur Bank Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara.[20]

Meskipun menemui sejumlah masalah, program Indonesianisasi ekonomi berhasil menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan pribumi. Tanpa mengingkari bahwa Indonesianisasi ekonomi berlawanan dengan interdependensi ekonomi, Ali Sastroamidjojo menganggap semangat nasionalisme ekonomi—yang berpandangan bahwa bidang ekonomi harus dipegang oleh bangsa sendiri—sangat penting untuk dimiliki bangsa Indonesia guna mentransisikan struktur ekonomi kolonial ke nasional. Bagi Ali Sastroamidjojo dengan meneruskan struktur kolonial dimana ekonomi dipegang dan dikuasai oleh para kapitalis asing sama artinya dengan menghilangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi.[21] Salah satu hasil yang dapat dilihat dari kebijakan ini adalah meningkatnya nilai ekspor komoditas tertentu, utamanya adalah karet rakyat dan minyak bumi, terutama dikarenakan keberhasilan pemerintah untuk mendatangkan investor.[22]

Pelaksanaan Indonesianisasi ekonomi menurut Ali Sastroamidjojo berlangsung sangat pesat yang oleh sebab itu pula tidak dapat dijalankan dengan teliti.[23] Meskipun demikian, banyak perkembangan yang berlangsung semenjak program menteri Iskaq ini dijalankan. Selama satu tahun pelaksanaannya, terlihat bahwa program ini berhasil mengakselarasi jumlah perusahaan impor pribumi yang pada akhir tahun 1950 berjumlah sekitar 250, menjadi paling tidak 2.000 banyaknya pada November 1954.[24] Demikian pula selama Ali Sasatoamidjojo menjabat perdana menteri, terjadi peningkatan jumlah bank swasta nasional yang pada pertengahan 1953 sejumlah 20 buah meningkat pesat hingga angka 75 buah pada November 1984.[25] Hal ini dapat terjadi karena adanya kemudahan pemberian kredit dari Bank Indonesia. Contoh lain dari perkembangan positif yang berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank-bank pemerintah ditunjukan dengan semakin berkembangnya perusahaan perkapalan swasta nasional yang tumbuh pesat hingga mencapai jumlah 65 perusahaan kapal swasta nasional pada 1955.[26]

Perbaikan juga tampak pada bidang pertanian. Jumlah produksi beras Indonesia selama dua tahun masa kepemimpinan Ali Sastroamidjojo meningkat, hanya saja karena terkendala bencana seperti banjir, usaha untuk swasembada belum tercapai. Dengan peningkatan produksi beras, pemerintah dapat melakukan stabilisasi harga beras yang besarnya Rp.1.85,- per liter untuk daerah-daerah, dan Rp.2.85,- khusus untuk wilayah ibukota. Stabilisasi harga beras ini sangat berpengaruh dalam mengendalikan harga berbagai kebutuhan pokok lainnya, walaupun untuk harga textil masih terbilang tinggi namun tetap terbeli.[27]

Pada bidang politik dalam negeri, kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil mengawal tahapan persiapan dari penyelenggaraan pemilu nasional yang berlangsung pada 1955 di bawah pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, pada dasarnya, kabinet Wilopo telah berhasil menyelesaikan peraturan perundang-undangan no. 7 tahun 1953 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 1955. Tugas kabinet Ali Sastroamidjojo kemudian adalah untuk mengurus persoalan teknis yang menjadi operasionalisasi dari peraturan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebelumnya telah dihelat sejumlah pemilu lokal yang dapat dikatan sebagai langkah pemetaan seperti yang digelar di Yogyakarta (1951), Minahasa, Sangihe Talaut (1951) dan kotapraja Makasar (1952). Sejumlah pemilu pada tingkat lokal tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem bertingkat maupun langsung.[28] Hanya saja, permasalahan teknis penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional tentu lebih rumit.

Selain itu, tantangan besar dalam penyelenggaraan Pemilu nasional adalah kenyataan bahwa untuk perhelatan pesta akbar demokrasi ini akan dilenggarakan untuk kali pertama dalam situasi kemanan dan ketertiban yang belum begitu stabil. Bahkan, banyak pihak yang pesimis bahwa pemilu akan dapat diselenggarakan secara lancar. Mereka memperkirakan bahwa pemilu akan banyak memakan korban jiwa karena akan menjadi ajang bagi eskalasi konflik antar kelopok, juga karena gangguan keamanan. Tugas pemerintahan Ali Sastroamidjojo dalam hal ini ialah melakukan persiapan yang matang dengan perhitungan terperinci yang dimulai sejak Januari 1954 dengan perkiraan pemilu dapat dilaksanakan 16 bulan kemudian. Walaupun seolah banyak terlupakan, peran penting pemerintahan Ali Sastroamidjojo dalam mensukseskan Pemilu 1955 yang berbiaya Rp 479.891.729, terutama untuk menggarap tahap persiapan, sangat besar. Misalnya untuk persoalan teknis mencetak surat suara dan dokumen laininya saja ternyata memakan tenaga dan waktu yang sangat besar, bahkan untuk melaukukan proses cetak, Percetakan Negara harus dibantu 21 percetakan swasta di Jakarta yang bekerja siang malam dengan penjagaan dari aparat keamanan. Mereka harus mencetak sebanyak 1.948.000 daftar pemilih tetap, dan 96.000.000 surat suara dan dokumen lainnya dengan menghabiskan 2.250 ton kertas. Untuk pembuatan peti suara, proses pengepakan serta distribusi ke berbagai daerah dibutuhkan biaya tidak kurang dari lima juta rupiah. Keseluruhan dari proses ini memang baru selesai beberapa saat setelah Ali Sastroamidjojo mundur, namun telah dimulai jauh-jauh hari ketika ia masih menjabat.

Salah satu langkah awal terpenting—namun juga menuai kontroversi—yang dilakukan Ali Sastroamidjojo adalah menggerakan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang sebenarnya telah terbentuk sejak kabinet Wilopo namun tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena tidak adanya kesepakatan soal susunan anggota. Untuk mengatasi hal itu, ketua PPI yakni M. Asaat (non-partai) digantikan oleh S. Hadikusumo dari PNI. Kepengurusan PPI yang baru, didasarkan atas Keputusan Presiden

Nomor 188 tahun 153 tentang pengangkatan PPI tanggal 7 November 1953, memasukan nama Rustam Sutan Palindih (PNI), Sudarnadi (PIR-Hazairin), Surjaningprodjo (NU), Sudibjo (PSII), H. Sofjan Siradj (Perti), Sumarto (Parkindo), Hartojo (PKI), dan Asraruddin (Partai Buruh). Komposisi ini menunjukan bahwa partai-parti oposisi tidak memiliki wakil dalam PPI, sehingga muncul kemudian kritik atas pembaharuan anggota PPI yang dianggap lebih menguntungkan partai pendukung pemerintah. Terlepas dari semua kritik itu, dengan kembalinya PPI bekerja, maka segala keperluan untuk penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan. Pemilu nasional pertama yang melibatkan 43.104.464 pemilih (dari total 77.987.879 penduduk Indonesia) dapat terlaksana secara tertib dan aman. Ali Sastroamidjojo sendiri percaya bahwa "rakyat kita sanggup menjalankan pekerjaan-pekerjaan besar secara tertib dan berdisiplin asalkan saja diorganisir di bawah pemimpin yang cakap dan jujur".

DINAMIKA PEMERINTAHAN DAN AKHIR KABINET

Sebagaimana dialami oleh para perdana menteri sebelumnya, Ali Sastroamidjojo memimpin sebuah kabinet untuk menghadapi situasi politik Indonesia di awal dekade 1950-an yang jauh dari kata stabil. Selain masalah-masalah yang dihadapi negara seperti persoalan hubungan daerah dengan pusat; persoalan di bidang ekonomi, persoalan yang menyangkut dinas ketentaraan, persoalan politik kepartaian, pemerintahan Ali Sastroamidjojo juga dihadapkan pada persoalan internal kabinet. Banyak kritikus yang sejak awal menyatakan bahwa soliditas antar anggota kabinet berpotensi besar dalam memunculkan maslah-masalah baru. Masalah yang paling awal muncul tidak berselang lama setelah kabinet ini mulai bekerja. Beberapa hari setelah menjabat, Menteri Keuangan, Dr. Ong, menyatakan bahwa investasi asing di Indonesia harus disalurkan melalui pemerintah. Pernyataan ini dan kemudian harus diklarifikasi oleh salah satu seniornya sendiri.[29]

Ujian terhadap soliditas kabinet juga muncul sebagai akibat dari sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil oleh Menteri Pertahanan, Iwa Kusumasumantri. Salah satunya adalah adanya kecurigaan sejumlah golongan dalam tubuh TNI yang menuduh bahwa Iwa Kusumasumantri memberikan posisi-posisi penting kepada orang-orang dekatnya terutama untuk menjadi penasehat menteri. Orang-orang tersebut seperti Sukalid dan Dr. Boentaran merupakan tokoh-tokoh yang dianggap kiri. Untuk mengatasi persoalan ini, Perdana Menteri sendiri meminta Iwa Kusumasumantri untuk mengganti para penasehatnya yang tidak diterima oleh kalangan TNI itu.[30] Akan tetapi masalah tidak begitu saja berhenti di sini, muncul kemudian persoalan berikutnya ketika Menteri Pertahanan menyetujui usul organisasi veteran bernama PERBEPBSI (Persatuan Bekas Pedjuang Bersendjata Seluruh Indonesia) untuk membentuk "brigade sukarelawan" guna membantu tentara untuk menumpas pemberontakan.[31] Sebenarnya, usulan-usulan untuk membentuk kelompok-kelompok sukarelawan sebagai tenaga bantuan militer baik yang dimaksudkan untuk merebut Irian maupun menumpas Darul Islam pada waktu itu bukanlah sesuatu terlalu mengagetkan.[32] Hanya saja, untuk kasus ini, banyak kecurigaan timbul karena PERBEBSI merupakan kelompok yang banyak dipengaruhi oleh PKI. Oleh sebab itu, gagasan Menteri Pertahanan memperoleh tentangan baik dari kalangan sipil—dari pihak oposisi maupun partai-partai pendukung pemerintah sendiri—dan militer yang melihatnya sebagai usaha distribusi senjata kepada kelompok-kelompok lasykar. Ketika usul ini dibicarakan dalam sidang kabinet, hanya Menteri Pertahanan yang mendukung idenya sendiri, sedangkan menteri-menteri yang lain menolak.

Selain masalah soliditas kabinet, pemerintahan Ali Sastroamidjojo juga dihadapkan pada persoalan riil yang serius, dan dalam hal tertentu membutuhkan penanganan ekstra-cepat. Persoalan berikutnya muncul tidak lebih dari tujuh minggu setelah Ali Sastroamidjojo menjabat perdana menteri. Situasi politik di Aceh yang selama masa revolusi dikenal sebagai 'Daerah Modal' karena tidak pernah diduduki Belanda pasca 1945, dan merupakan wilayah penting bagi berdirinya Republik Indonesia tiba-tiba memanas setelah Teungku Daud Buereueh mendeklarasikan gerakannya di bawah panji Negara Islam.

Pemberontakan ini memiliki akar panjang yang dapat dirunut sejak masa revolusi sosial yang berlangsung pasca pendudukan Jepang dan periode revolusi, namun permasalahan menjadi lebih kronis lagi ketika diterapkan reorganisasi administrasi pasca pengakuan kedaulatan RI.[33] Meskipun selama proses transisi terjadi kondisi serba tidak menentu, pemimpin Aceh masih bersedia berunding dengan pemerintah pusat yang masih mereka percayai terutama dari partai Masyumi. Akan tetapi ketika kabinet Ali Sastroamidjojo dengan PNI sebagai tulang punggung utamanya terbentuk, dan kekuatan Masyumi absen dari pemerintahan, Aceh bangkit memberontak dengan skala penuh. Terlebih lagi, berhembus pula desas-desus yang memperkeruh suasana yang menyatakan bahwa penguasa di Jakarta akan menangkap 190 pemimpin Aceh—dalam sumber lain disebutkan menghabisi 300 tokoh penting Aceh.[34] Dipercayai bahwa berita ini tersebar setelah surat rahasia yang dibawa oleh Jaksa Sunarjo ke Medan terkuak isinya. Dalam rapat kabinet pada 2 November, Ali Sastroamidjojo menegaskan tidak pernah membuat dokumen semacam itu. Walaupun sumber kabar ini, dan demikian pula isinya, masih sumir,[35] para tokoh penting di Aceh yang merasa terancam memutuskan untuk meninggalkan kota menuju kawasan pegunungan untuk memulai gerakannya.

Pada 19 September 1953, Teungku Daud Buereueh memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di Aceh dan membangun kontak dengan NII Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Kasus ini menambah masalah ketertiban dan kemanan yang dihadapi pemerintahan Ali Sastroamidjojo dimana sebelumnya juga telah muncul gerakan pemberontakan di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Dihadapkan dengan kondisi ini, Ali Sastroamidjojo memilih langkah yang cenderung berbeda dari yang pernah dilakukan oleh dua perdana menteri sebelumnya. Bilamana Wilopo dan Sukiman mengedepankan 'hukum' dan 'kebijaksanaan' yang lebih bersifat persuasif dan sedapat mungkin menghindari konflik terbuka, Ali Sastroamidjojo mengambil tindakan yang

lebih tegas yang ditujukan untuk menumpas gerakan tersebut.[36]

PNI dan partai-partai pendukung pemerintah melihat bahwa tindakan yang tegas dan cepat dapat diambil Kabinet Ali Sastroamidjojo karena Masyumi tidak masuk dalam pemerintahan. Adapun pada sisi lain, langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi DI/TII memperoleh tentangan dari kelompok oposisi terutama Masyumi. Bahkan perdebatan antara Pemerintah dan pendukungnya dengan pihak oposisi sempat mengundang kehebohan atas pernyataan salah satu pemuka Masyumi. Mr. Moh Dalidjono yang menyebutkan bahwa solusi terbaik untuk menyelesaiakan persoalan gerakan sparatis adalah dengan menjadikan RI sebagai suatu negara Islam.[37] Meskipun kemudian, Masyumi mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut adalah opini pribadi dan bukanlah mewakili partai.

Menjelang berakhirnya bulan Oktober, wilayah-wilayah di Aceh yang semula dikuasai pemberontak dapat diambil alih oleh tentara pemerintah. Hanya saja usaha lebih lanjut untuk memberantas gerakan perlawanan NII di Aceh harus tertahan yang disebabkan oleh kekuatan militer yang dapat digunakan sangat terbatas karena kekuatan TNI juga harus melakukan operasi yang sama di wilayah lain meliputi Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada sisi lain, hal ini menunjukan bahwa pendekatan militer yang diambil pemerintah tidak mampu mengatasi hingga ke akar persoalan sebenarnya. Bahkan, Remy Madinier mengungkapkan operasi tersebut juga tidak terlalu efektif untuk melemahkan pemberontakan yang setelah dipukul mundur TNI dengan mudah memperoleh tambahan tenaga dari rakyat.[38]

Persoalan-persoalan lain yang lebih kerap dihadapi selama menjabat perdana menteri muncul dari instabilitas yang tercipta sebagai akibat dari ketidakharmonisan politik pemerintah dengan kelompok oposisi. Situasi ini sudah dapat dilihat sejak kabinet ini mulai bekerja di mana berbagai kritik keras, bahkan berujung hingga dikeluarkannya interpelasi atau mosi telah beberapa kali dihadapi oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo. Dalam konteks politik Indonesia waktu itu, serangan-serangan oposisi yang ditujukan kepada pemerintah adalah perkara wajar. Demikian halnya dengan yang dialami kabinet Ali Sastroamidjojo yang hampir semua program selalu memperoleh serangan dari lawan politik terutama di parlemen. Sebagai contoh, untuk persiapan penyelenggaraan pemilu yang undang-undangnya telah diselesaikan oleh Wilopo, pihak oposisi menuduh Ali Sastroamidjojo sengaja mengulur waktu agar dapat memainkan siasat untuk memenangkan partai pemerintah terutama PNI, PNU dan PIR.[39] Serangan ini banyak muncul pada awal 1954 setelah pemerintah gagal memenuhi jadwal seperti yang mereka janjikan yakni pada bulan November 1953, yang baru terlaksana pada bulan kedua 1954 itupun dengan modifikasi waktu selama 16 bulan hingga pelaksanaan pemilu.[40] Komentar keras oposisi mulai mereda setelah ketua PPI yang baru S. Hadikusumo mengumumkan secara resmi tanggal defintif pelaksanaan anggota DPR dan konstituante.[41]

Pergantian sejumlah pejabat, terutama para pemimpin daerah sangat membuat kubu oposisi

Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo membuka konferensi keamanan di Istana pada tanggal 13 Januari 1955

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

meradang. Pada saat kabinet Ali Sastroamidjojo mulai berkuasa, paling tidak terdapat empat posisi gubernur yang dipegang oleh anggota PNI, dan dua posisi serupa—yakni di Jakarta Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta—dijabat oleh simpatisan PNI.[42] Terlebih lagi, pada awal 1954, Gubenur Jakarta Raya Sudiro dari PNI yang pada bulan November 1953 menggantikan Sjamsuridjal dari Masyumi, membuat banyak perubahan menyangkut susunan panitia pemilihan Indonesia.[43] Langkah ini dianggap sebagai suatu usaha untuk mendongkrak perolehan suara partai pendukung pemerintah dan di sisi lain berpotensi menggerus lumbung suara pihak oposisi. Sebagai reaksi atas keputusan tersebut, Masyumi mengarahkan massa untuk melakkan aksi demonstrasi menolak keputusan Sudiro. Tidak tinggal diam, PNI dan partai lain pendukung pemerintah membalas aksi tersebut dengan menyelenggarakan rapat umum untuk menjawab protes pihak oposisi terhadap pemerintah. Tidak berhenti di sini, aksi kembali digelar Masyumi sehingga pertentangan antara kubu pro-pemerintah dengan pihak oposisi menjalar sebagai kegaduhan politik yang berlangsung di tingkat akar rumput.[44]

Tensi tinggi antara kedua belah pihak tampak pula dari serangan pihak oposisi agenda politik luar negeri pemerintah yang biasanya sepi dari kritik. Gagasan untuk menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika juga memperoleh kecaman keras. Program ini dianggap menghambur-hamburkan uang karena untuk penyelenggaraannnya diperlukan biaya yang besar. Lebih dari itu, penyelenggaraan KAA dianggap sebagai usaha pemerintah untuk menutup-nutupi kegagalan programnya terutama di bidang ekonomi dan urusan politik dalam negeri. Seperti tampak pada serangan pihak oposisi atas rencana penyelenggaraan KAA, tidak semua kritik yang

dialamatkan kepada pemerintah memiliki alasan yang cukup dan bersifat prinsipil. Banyak pula serangan yang kemudian direspon oleh partai-partai pendukung pemerintah dengan tensi tinggi sehingga yang terjadi adalah perdebatan yang kurang begitu berbobot. Akan tetapi tidak semua kritik dapat diabaikan begitu saja, beberapa serangan kritik dari pihak oposisi dalam parlemen dapat mengena dengan sangat telak hingga mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dalam kabinet ini, dan bahkan berbuntut panjang hingga mengakibatkan perpecahan di tubuh partai pendukung Ali Sastroamidjojo.

Serangan-serangan lebih keras dari pihak oposisi yang berdampak besar terutama ditujukan kepada kebijakan ekonomi menteri Iskaq dan keputusan-keputusan menteri Iwa Kusumasumantri yang menyangkut persoalan militer. Program Indonesianisasi menteri Iskaq menjadi salah satu masalah yang memperoleh serangan paling serius. Tidak dapat dipungkiri bahwa program Indonesianisasi memiliki banyak kelemahan dan juga terjadi banyak penyimpangan. Tampaknya kemudahan pemberian kredit oleh pemerintah yang semula ditujukan mendorong muncul dan menguatnya usawahan bumiputera juga banyak disalahgunakan. Kemudahan ini merangsang munculnya pengusaha baru, kebanyakan dari mereka adalah pegawai negeri yang menginginkan gaji tambahan namun sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman berkecimpung dalam usaha komersial. Karena minim pengalaman namun mudah memperoleh pinjaman, mereka tidak benar-benar menjalankan usahanya melainkan mengalihkannya kepada para pengusaha Tionghoa. Demikian pula lisensi impor yang dimiliki orang-orang pribumi dengan mudah mereka alihakan kepada pengusaha Tionghoa. Oleh karenanya, lahir istilah 'pengusaha koper' (pengusaha aktentas). Situasi yang demikian ini kemudian populer disebut dengan istilah 'Ali-Baba' dimana 'Ali' merepresentasikan pengusaha pribumi, dan istilah 'Baba' menggambarkan pengusaha asing atau Tionghoa.[45]

Tekanan-tekanan yang dialamatkan kepada pemerintah membuat beberapa tokoh dalam koalisi berubah pikiran. Melalui rapat internal fraksi, sejumlah pimpinan partai menuntut ditariknya anggota PIR dari susunan kabinet. Prof. Hazairin menjadi tokoh berpengaruh bagi kubu pengusung gagasan ini. Adapun lawannya adalah Wongsonegoro yang saat itu menempati posisi wakil perdana menteri dalam kabinet Ali Sastroamidjojo. PIR terpecah menjadi dua kubu yang dikena dengan PIR-Rin (Hazairin) dan PIR Wong (Wongsonegoro). Kebanyakan anggota parlemen merupakan pengikut PIR-Rin yang dengan perpecahan ini maka 23 anggota di DPRS dari PIR diganti dengan anggota dari fraksi-fraksi non-partai.

Tidak berselang lama, muncul pula persoalan baru dari partai koalisi pemerintah lainnya yakni NU yang mendesak pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet. Melalui nota politiknya yang dikeluarkan pada bulan Juli 1953, NU menuntut pergantian tiga anggota kabinet yakni Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Urusan Dalam Negeri, serta meminta pengalihan kewenangan di bidang keamanan dialihkan dari Wongsonegoro (Wakil perdana menteri I) kepada Zainal Arifin (wakil perdana menteri II). Ali Sastroamidjojo berhasil menangani tuntutan NU dengan melakukan sejumlah perubahan. Adapun perubahan komposisi anggota kabinet dapat dilakukan pada bulan September 1953. Melalui reshuffle kabinet itu sejumlah posisi diisi orang baru, Ir. Roosseno (PIR) ditunjuk menggantikan Iskaq, Mr. Soenarjo menggantikan Prof. Hazairin sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri. Sedangkan, posisi Mr. Wongsonegoro yang memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya dibiarkan tidak terisi.

Pada 20 Oktober 1953, anggota fraksi Masyumi, K.H Tjikwan, mengajukan interpelasi kepada parlemen. Permasalahannya berakar pada pemberian lisensi yang tidak cermat sehingga jatuh kepada pihak-pihak yang tidak bonafide dan terkesan diskriminatif. Dalam prakteknya, banyak lisensi diberikan kepada para pengusaha yang ditengarai menjadi pendukung atau simpatisan pemerintah. Oleh karenanya istilah yang muncul kemudian adalah program nasionalisasi ekonomi Indonesia dipelesetkan menjadi program ekonomi nasionalis Indonesia yang merujuk pada ideologi PNI sebagai partai penguasa waktu itu. Menanggapi tuduhan tersebut partai pendukung pemerintah membalas dengan mengatakan hal yang sama terjadi saat Masyumi berkuasa. Pada bulan April 1954, interpelasi kubu oposisi berubah menjadi mosi tidak percaya setelah semakin banyak kabar yang menyatakan bahwa para penerima lisensi diminta menyetorkan sejumlah uang kepada PNI. Tuduhan tersebut telah dibantah langsung oleh menteri Iskaq. Dalam pemungutan suara di parlemen pemerintah memperoleh keunggulan suara yang cukup signifikan yakni 101 berbanding 60. Pada akhir 1954, pemerintah kembali menghadapi mosi tidak percaya yang kali ini disampaikan oleh Mr. Jusuf Wibisono dari Masyumi yang ditujukan kepada seluruh kabinet. Melalui mekanisme pemungutan suara pemerintah kembali memenangkan dukungan meskipun dengan selisih yang tidak cukup banyak yaitu 115 berbanding 92. Tampaknya pergantian sejumlah menteri, terutama pada posisi Menteri Perekonomian dimana tokoh PNI digantikan oleh anggota PIR yang tidak berpihak pada kubu manapun berperan cukup besar dalam memperbesar dukungan anggota parlemen terhadap pemerintah. Dari sini Nampak bahwa upaya parlementer untuk menjatuhkan pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo tidak membuahkan hasil. Hanya saja, persoalan lain yang tidak kalah serius muncul menjelang berakhirnya tahun 1953, kali ini berhubungan dengan persoalan internal di tubuh militer.

Pada bulan November 1953, menteri pertahanan Iwa Kusumasumantri mengeluarkan keputusan untuk menghapus jabatan Kepala Staff Angkatan Perang yang saat itu dijabat oleh Mayor Jenderal T.B. Simatupang. Langkah ini berbuntut panjang dan kembali mengungkit pertentangan dalam tubuh dinas tentara di mana sebelumnya telah muncul dua kubu "pro" dan "kontra" 17 Oktober—peristiwa yang membuat kabinet sebelumnya jatuh. Dalam hal ini, Simatupang dikenal sebagai perwira tinggi yang 'pro-17 Oktober'. Mosi terhadap Menteri Pertahanan segera dilayangkan Masyumi, meskipun setelah pemungutan suara yang dilangsungkan pada Februari 1954, pihak pengusul mosi kalah suara. Iwa Kusumasumantri yang telah berada pada posisi aman kembali membuat keputusan yang mengundang kegusaran kelompok 'pro-17 Oktober' dengan mengangkat Kolonel Zulkifli

Lubis sebagai wakil kepala staf, dan sejumlah nama lain sebagai perwira tinggi di MBAD. Adapun, nama-nama baru yang dilantik oleh menteri Pertahanan dikenal sebagai bagian dari kelompok 'Anti-17 Oktober'. Untuk meredam situasi, Bambang Sugeng—yang dikenal dekat dengan Sukarno dan juga bagian dari kelompok anti-17 Oktober—yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf mengambil sikap untuk menenangkan suasana.

Titik tengah dari perkubuan yang terjadi di tubuh TNI mulai terlihat seiring dengan sikap anggota-anggota kabinet dan perdana menteri sendiri yang menunjukan sikapnya secara jelas dengan menolak usul Iwa Kusumasumantri mengenai pembentukan 'Brigade Sukarelawan' dan permintaan Ali Sastroamidjojo kepada Menteri Pertahanan agar mengganti orang-orang yang dianggap kiri sebagai penasehatnya. Pada bulan Februari 1955, para perwira baik "pro-17 Oktober" maupun "kontra-17 Oktober" sama-sama ke Yogyakarta untuk melakukan rekonsiliasi yang diinisiasi oleh Bambang Sugeng. Ali Sastroamidjojo, mantan perdana menteri Wilopo, dan A.H. Nasution juga turut hadir dalam acara penandatanganan kesepakatan, dikenal dengan 'Piagam Yogya', yang ditujukan untuk menghentikan perkubuan di tubuh TNI. Ketegangan mereda, dan situasi berangsur-angsur tentram sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempersiapkan pelaksanaan KAA yang diagendakan terselenggara pada bulan April.

Hanya saja, berselang minggu setelah pelaksanaan KAA, Bambang Sugeng mengajukan pengunduran diri kepada Ali Sastroamidjojo. Alasannya karena Bambang Sugeng merasa kesulitan untuk mengemban amanah dari Piagam Yogya. Ini bukan kali pertama Bambang Sugeng mengajukan pengunduran diri, sebelumnya ia juga telah beberapakali mengajukan hal serupa namun selalu ditolak. Untuk kali ini, setelah selama seminggu mempertimbangkan alasan pengunduran diri Bambang Sugeng, pemerintah terpaksa menyetujuinya. Dikhawatirkan jika usulan pengunduran diri ini ditolak akan dapat memperberat beban yang bersangkutan, dan pada sisi lain juga tidak dapat menyelesaikan masalah. Merasa bahwa perkubuan di kalangan perwira TNI sudah mereda, Ali Sastroamidjojo sendiri tidak menyadari bahwa langkahnya menerima pengunduran diri Bambang Sugeng menjadi awal dari jatuhnya kabinet yang ia pimpin.

Pergantian KSAD berlangsung rumit. Iwa Kusumasumantri kembali mengusung calon yang sebelumnya pernah ia promosikan yakni Zulkifli Lubis. Dalam sidang kabinet pertama, menteri pertahanan dapat memberikan alasan-alasan yang sangat baik terkait dengan calon yang ingin ia usung, alhasil semua menteri menyetujuinya. Hanya saja, dalam sidang berikutnya Iwa Kusumasumantri mencabut usulnya bahkan menyatakan bahwa kandidat yang didukungnya itu telah mengangkat 'perwira-perwira PSI' selama menjabat sebagai wakil KSAD tanpa sepengetahuannya. Terungkap kemudian bahwa pengakatan Zulkifli Lubis tidak direstui Hatta yang berpandangan bahwa pengganti Bambang Sugeng seharusnya adalah perwira senior. Adapun nama seorang perwira senior, Kolonel Simbolon, sempat dikabarkan menjadi calon yang digadang-gadang Hatta. Akan tetapi untuk mengangkat Kolonel Simbolon yang merupakan bagian dari kelompok pro-17 Oktober dan ditegarai pula sebagai perwira PSI juga akan memperkeruh suasana. Untuk itu, Menteri Pertahanan kembali dengan kandidat baru yakni seorang perwira senior yang berpengalaman memimpin divisi di Sumatra Selatan dan namanya tidak pernah dikaitkan dengan kubu manapun, Kolonel Bambang Utojo.

Walaupun secara garis politik, kandidat baru ini dapat dianggap netral, tentangan keras muncul dari kelompok Kolonel Zulkifli Lubis yang memperoleh dukungan kuat dari para perwira teritorial. Mereka beralasan Kolonel Utojo tidak cocok menjabat KSAD karena memiliki cacat di tangan kanannya yang hilang terpotong. Tentangan ini berlangsung sangat hebat, Kolonel Zulkifli Lubis dan banyak perwira tinggi lainnya memilih absen dari upacara pelantikan. Bahkan ketika pelantikan Kolonel Utojo sebagai KSAD yang baru, korp musik tentara yang seharusnya bertugas mengiringi acara pelantikan tidak hadir sehingga harus digantikan oleh korp musik dari dinas pemadam kebakaran Jakarta Raya. Lebih dari itu, Kolonel Zulkifli Lubis yang saat itu bertindak sebagai pejabat KSAD menolak menyerahkan posisinya kepada pejabat yang baru dilantik dan dinaikkan pangkatnya menjadi Mayjen. Peristiwa ini tentu saja menjadi tamparan yang sangat memalukan bagi pemerintah. Konsekuensinya, pemerintah terpaksa menskors Kolonel Zulkifli Lubis, namun langkah ini tetap gagal untuk mengendalikan situasi.

Parindra menyerukan agar wakilnya di kabinet, R.P. Suroso ditarik, sedangkan PSII bersuara lebih keras dengan meminta kabinet dibubarkan. Tekanan paling besar datang kepada menteri pertahanan yang memperoleh mosi dari parleman. Tidak berselang lama, Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri dari jabatannya. Ali Sastroamidjojo dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri berinisiatif mengambil jalan tengah. Ia mencoba menawarkan kepada kubu Kolonel Zulkifli Lubis bahwa ia akan memberhentikan Mayjen Utojo dari jabatan KSAD dan memberinya pensiun, asalkan Kolonel Zulkifli Lubis terlebih dahulu menerima pengangkatannya. Usul ini sebenarnya hanya strategi untuk menyelamatkan muka pemerintah dengan cara memenuhi tuntutan kelompok Kolonel Zulkifli Lubis yang tidak meginginkan Bambang Utojo menjadi KSAD. Pada 13 Juli 1955, perdana menteri memperoleh jawaban yang mengecewakan: Kolonel Zulkifli Lubis dan kelompoknya menolak tawaran Ali Sastroamidjojo.

Kegoncangan semakin terasa dalam kabinet, setelah PSII dan Parindra menarik wakilnya, kini giliran NU mendesak supaya kabinet dibubarkan. Dalam kondisi seperti itu, Ali Sastroamidjojo sendiri merasa sudah tidak ada gunanya untuk melanjutkan kabinetnya. Pada 24 Juli 1955, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta dikarenakan pada saat itu Presiden Sukarno tengah berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, tugas Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri untuk kesempatan yang pertama berakhir sudah setelah melalui hampir dua tahun masa pengabdian.

KABINET ALI SASTROAMIDJOJO II

Setelah Ali Sastroamidjojo demisioner, jabatan perdana menteri dipegang oleh Burhanuddin

Sidang terakhir dari kabinet Ali-Arifin tanggal 22 Juli 1955.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 24 Juli 1955.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Harahap sejak 11 Agustus 1955. Selama kurun periode itu, bangsa Indonesia melaksanakan hajatan besar yakni dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum nasional yang pertama. Atas permintaan PNI, nama Ali Sastroamidjojo turut dicalonkan sebagai anggota DPR dan Konstituante.[46] Dalam Pemilu 1955, PNI yang berhasil mendulang suara dari wilayah Jawa keluar sebagai pemenang dengan memperoleh 23% (57 kursi DPR), disusul oleh Masyumi yang banyak memperoleh suara dari luar Jawa dengan 20% (57 kursi DPR), NU dengan perolehan suara mencapai 18,41% (45 kursi DPR) dan PKI pada posisi keempat dengan jumlah suara 16,36% (39 kursi DPR).

MEMBANGUN KOALISI TANPA PKI

Setelah enam setengah bulan memimpin kabinet, Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya pada 3 Maret 1956 walaupun kabinet ini masih melakukan tugasnya sampai kabinet baru terbentuk. Presiden yang selanjutnya melakukan *hearing* dengan partai-partai yang memiliki kursi di parlemen. Pada 8 Maret 1956 presiden menugaskan formatur untuk membentuk kabinet baru. Tanggung jawab sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru ini dilimpahkan kepada Ali Sastroamidjojo yang memiliki waktu selama delapan hari untuk menyusun "kabinet baru yang mendapat dukungan yang luas". Dalam bekerja sebagai formatur, Ali Sastroamidjojo didampingi oleh Wilopo atas saran dari para petinggi PNI yang menganggap bahwa Wilopo merupakan tokoh yang dapat diterima dengan baik oleh kalangan Masyumi. Keduanya memulai pekerjaan sebagai formatur dengan melakukan *hearing* dengan partai-partai yang memiliki paling tidak empat suara di parlemen. Selain itu *hearing* juga dilakukan dengan para kepala staf tiga angkatan pada dinas militer.

Sebagaimana para petinggi PNI, Ali Sastroamidjojo melihat peluang untuk membentuk suatu kabinet pemerintahan yang solid dengan membangun koalisi kekuatan nasionalis dan Islam. Koalisi semacam ini dapat dibentuk dengan menggandeng perwakilan partai-partai yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu 1955. Karena empat besar pemenang pemilu telah tampak, maka pembicaran penting dilakukan dengan Masyumi, dan NU dimana dapat diberjalan dengan baik. Hanya saja untuk membuka kerjasama dengan PKI ada sejumlah masalah. Selain keengganan dari formatur, Masyumi juga menolak dengan keras masuknya PKI dalam pemerintahan. Bahkan Masyumi tidak menginginkan nama-nama orang yang disinyalir memiliki hubungan dengan PKI meskipun belum terbukti bahwa mereka bagian dari partai komunis itu. Secara teoritis, jika koalisi didasarkan atas kerjasama partai tiga besar dan tanpa keikutsertaan PKI dalam koalisi, Ali Sastroamidjojo dan Wilopo sudah dapat membentuk kabinet yang sangat kuat dengan dukungan parlemen. Untuk itu, formatur memilih untuk tidak melibatkan PKI dalam kabinet.

Pembicaraan mulanya dilakukan antara PNI dengan NU, menyusul kemudian Masyumi turut terlibat dengan menggunakan posisinya di parlemen sebagai daya tawar. Masyumi menyerahkan sejumlah nama anggotanya yang sangat bereputasi seperti Moh. Roem—

Presiden Sukarno dalam pengangkatan Mr. Ali Satroamidjojo sebagai Formateur Kabinet pada tanggal 8 Maret 1956.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Presiden Sukarno mengumumkan kepada para wartawan mengenai pengangkatan Mr. Ali Satroamidjojo sebagai Formateur Kabinet pada tanggal 8 Maret 1956.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

yang juga sudah dikenal Ali Sastroamidjojo sejak perundingan Roem-Roeijen dan sama-sama diasingkan ke Bangka. Pada sisi lain, Ali Sastroamidjojo sendiri tidak ingin memasukan nama-nama orang yang sebelumnya menjadi bagian dari kabinet Burhanuddin Harahap.[47]

Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan Sukarno, Ali Sastroamidjojo dan Wilopo berhasil memberikan daftar nama anggota kabinet baru. Ali Sasatroamidjojo sendiri menjabat sebagai perdana menteri, dan oleh karena ada PNI, Masyumi, dan NU menjadi tulang punggung utama, maka wakil perdana menteri satu dan dua dijabat dari perwakilan Masyumi (Moh. Roem) dan NU (Idham Chalid). Karena Ali Sastroamidjojo sendiri yang membentuk kabinet ini, berbeda dengan pengangkatan pertamanya sebagai perdana menteri, ia merasa percaya diri dengan komposisi kabinet, dan dukungan politik parlemen. Masalahnya kemudian adalah, formasi kabinet harus disetujui oleh Sukarno.

Pada 16 Maret 1956, Ali Sastroamidjojo menemui presiden untuk melaporkan hasil kerjanya sebagai formatur. Setelah melihat komposisi kabinet, Sukarno merasa kecewa karena keanggotaan kabinet yang disusun formatur tidak mengikutsertakan PKI sebagai salah satu partai empat besar pemenang pemilu. Sukarno beranggapan bahwa formatur bertindak tidak adil, bagaimanapun juga, PKI merepresentasikan enam juta suara rakyat yang menjadi pemilihnya.[48] Di pihak lain, Ali Sastroamidjojo tetap menolak untuk mengubah susunan kabinetnya karena telah menjadi kesepakatan dengan partai-partai pendukung. Lebih lanjut, Ali Sastroamidjojo mempersilakan Sukarno bila memang tidak setuju dengan susunan yang telah dihasilkannya,untuk menunjuk orang lain sebagai formatur..

Pertemuan pertama antara Ali Sastroamidjojo dengan Presiden tidak menghasilkan keputusan apakah susunan kabinet disetujui atau tidak. Di hadapan para wartawan yang sudah menunggu hasil pembicaraan keduanya, Sukarno menyatakan bahwa dia masih akan memperlajari susunan kabinet yang diajukan oleh formatur karena ada sejumlah nama yang belum ia kenal. Ia juga menyampaikan bahwa kabinet baru akan diumumkan paling lambat satu minggu. Tentu saja, Sukarno memberikan alasan-alasan itu untuk menutupi ketidaksetujuannya dan berusaha untuk menjaga agar persoalan ini tidak memunculkan kegaduhan politik yang lebih besar. Dalam jangka waktu itu, Sukarno sebenarnya melobi sejumlah petinggi partai untuk bersedia mengikutsertakan PKI dalam kabinet. Sukiman (Masyumi) dan Idham Chalid diundang untuk beraudiensi dengan presiden di Istana, sedangkan untuk PNI dan PSII, presiden mengundang Surijo dan Araudji Kartawinata. Hanya saja, usaha ini berakhir tanpa hasil.

Kurang dari seminggu kemudian, pada 20 Maret sore hari, presiden mengumumkan bahwa ia akhirnya menyetujui susunan kabinet yang diajukan oleh Ali Sastroamidjojo, yang tidak mengikutsertakan PKI dan juga PSI dalam pemerintahan yang menjadi oposisi bagi pemerintah. Adapun dalam susunan terbaru kabinet ini, muncul nama Ir. Djuanda, tokoh non-partai yang juga orang kepercayaan Sukarno, sebagai Menteri urusan Perencanaan negara.[49] Sedangkan, terdapat tiga nama mantan menteri

Kabinet formateur Ali Sastroamidjojo mengadakan hearing dengan Partai Masyumi tentang pembentukan Kabinet pada tanggal 9 Maret 1956

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Kabinet formateur Ali Satroamidjojo mengadakan hearing dengan Partai Parkindo (atas) dan Partai Katholik (bawah) tanggal 9 Maret 1956.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Kabinet formateur Ali Sastroamidjojo melaporkan kepada Presiden Sukarno, bahwa kabinet baru telah tersusun pada tanggal 1956

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

kabinet Bruhanuddin Harahap yakni Soenarjo (NU-Menteri Dalam Negeri); Soedibjo (PSII-Menteri Penerangan); dan Moh. Iljas (NU-Menteri Agama).[50]

Kabinet Ali-Roem-Idham dilantik pada 24 Maret 1956 dan mulai bekerja dua hari kemudian untuk merancang program-programnya. Pada bulan April, kabinet melakukan pembicaraan dengan DPR yang dimulai dengan memberikan keterangan pemerintah pada 9 April. Pada akhir bulan yang sama, parlemen mengumumkan menerima program-program yang diajukan kabinet dengan suara bulat, dan memberi kesempatan kabinet untuk bekerja.[51] Banyak kalangan di DPR yang optimis jika kabinet ini dapat bekerja lebih dari empat tahun karena melihat bahwa kabinet ini berasal dari koaliasi kekuatan nasionalis dan Islam yang didukung pula oleh sejumlah partai kecil memiliki lebih dari 60% suara di parlemen.

Dalam keterangan pemerintah di DPR, Ali Sastroamidjojo menyampaikan program kabinetnya yang diberi judul "Program Pembangunan Nasional" yang difokuskan untuk menciptakan usaha-usaha pembangunan di segala bidang secara berencana dan teratur.[52] Kabinet ini menitikberatkan perencanaan yang sistematis dan berjangka seperti mempersiapkan rencana ekonomi yang dapat dijalankan secara terencana selama kurun 5 tahun. Pada bulan Mei 1956, Ali Sastroamidjojo mengeluarkan Rencana Lima Tahun yang sudah sejak lama dinanti-natikan, dan telah dibicarakan selama empat tahun dan setidaknya oleh lima kabinet. Rancangan ini disetujui oleh kabinet pada bulan September di tahun yang sama.[53] Seiring dengan hal itu, kabinet Ali Sastroamidjojo II juga masih memperjuangkan program ekonomi yang sebelumnya mengisi agenda pemerintahan pertamanya yakni untuk mentransisikan

Sukarno menemui wartawan setelah menerima laporan dari Ali Sastroamidjojo pada tanggal 16 Maret 1956

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

ekonomi kolonial menuju ekonomi nasional, namun kali ini dengan menekankan pada usaha mempergiat perkembangan koperasi.[54]

Dalam bulan-bulan pertama masa jabatannya, Ali Sasatroamidjojo berhasil melakukan langkah politik penting dengan pemulihan keseimbangan atau kekuatan birokrasi yang cukup stabil di departemen-departemen. Pemulihan ini sangat penting mengingat pada tahun-tahun sebelumnya jajaran birokrasi sempat terpapar dampak kontestasi politik di sekitar pemilu. Tampaknya, strategi koalisi yang Ali-Wilopo dalam membentuk kabinet turut memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas politik. Selain ketiga partai dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu, kabinet Ali Sastroamidjojo II juga berhasil menggandeng partai-partai kecil lainnya dalam pemerintahan dengan memberi mereka kursi di kabinet. Para menteri tersebut berasal dari PSII (Sudibjo dan Sjech Markhaban), Parkindo (N.F. Umbas dan Dr. H. Sinaga), A.B. de Rozario (Partai Katolik, dan Prof. Dr. Suhardi), Dahlan Ibrahim (IPKI), H. Rusli Abdul Wahid (Perti). Oleh karenanya tidak mengherankan jika kemudian dalam kabinet ini muncul jabatan untuk tiga orang menteri muda yang tugas dan kewenangannya belum diatur secara rinci sebelumnya.

Kestabilan politik yang terwujud pada awal masa pemerintahan Kabinet Ali Sasatroamidjojo II yang juga lahir oleh karena besarnya kekuatan koalisi pendukung pemerintah di parlemen—yang juga merepresentasikan besarnya suara rakyat—tampaknya membawa pengaruh positif ke berbagai bidang lain yang sangat terasa terutama saat kabinet ini mulai bekerja. Dalam bidang ekonomi, kabinet kembali menjalankan kebijakan yang serupa dengan yang dulu pernah

Acara serah terima jabatan dari Kabinet Burhanuddin Harahap kepada Kabinet Ali Sastroamidjojo.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Kabinet Ali Sastroamidjojo dan Burhanuddin Harahap berfoto bersama Presiden Sukarno.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

diterapkan oleh menteri Iskaq Tjokroadisurjo. Hanya saja, untuk kali ini, pihak yang dahulunya menentang kebijakan tersebut tidak lagi menyuarakan kritik kerasnya, bahkan Masyumi yang sebelumnya sangat keras dalam menyerang kebijakan menteri Ishaq pada kabinet Ali Sastroamidjojo I, juga dapat menerima.

Akan tetapi, dari semua programnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II, tampaknya pemerintah sangat menekankan pada agenda politik luar negeri dimana Ali Sastroamidjojo kembali memperlihatkan kapasistasnya dalam bidang ini. Bagi Ali Sastroamidjojo usaha untuk membatalkan KMB adalah agenda terpenting sehingga berada pada urutan teratas program pemerintah. Ali Sastroamidjojo berpendapat bahwa Indonesia masih tersandera oleh hasil-hasil KMB yang memberatkan, yang oleh karenanya harus dihilangkan terlebih dahulu jika ingin dapat melaksanakan program pembangunan. Dalam hal ini, kabinet bertindak dengan kecepatan penuh. Kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil menyusun rancangan undang-undang baru yang menghapuskan keseluruhan perjanjian Konferensi Meja Bundar secara unilateral, baik materiil maupun formil, dan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi atas dampak yang ditimbulkannya. Sebenarnya, rancangan sebelumnya telah pernah disusun oleh kabinet Burhanuddin Harahap dan telah disahkan pula oleh parlemen pada 28 Februari 1956, setelah melewati perdebatan yang keras di Parlemen. Hanya saja, undang-undang produk kabinet sebelumnya terpaksa kandas setelah gagal memperoleh tanda tangan presiden. Berbeda dengan sebelumnya, rancangan undang-undang penghapusan hasil perjanjian KMB secara menyeluruh yang rancang oleh kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil memperoleh persetujuan DPR dengan mudah pada 22 Mei, dan begitu pula dengan Sukarno yang tanpa keengganan lagi menandatangani RUU ini pada 3 Mei 1956.[55]

Dengan penghapusan isi KMB tersebut, hubungan uni Indonesia-Belanda yang didasarkan pada KMB ikut hilang dan berubah menjadi hubungan yang lazim beraku antar negara biasa saja. Oleh sebab itu, pemerintah dapat mengambil langkah lebih lajut menyangkut pembebasan Irian Barat. Pemerintah memprioritaskan untuk meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat dengan didasarkan pada kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional. Pada masa pemerintahan kabinet ini, Propinsi Irian Barat berhasil dibentuk pada 17 Agustus 1956. Provinsi ini beribukota di Soa Siu dengan wilayah yang meliputi sejumlah wilayah Tidore (yang sebelumnya di bawah Belanda), Oba, Weda, Patani, dan Wasile (Maluku Utara).[56] Adapun Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah, diangkat sebagai gubernur pertama.

PERSOALAN DAERAH DAN TENTARA

Tantangan terberat yang dihadapi oleh Ali Sastroamidjojo beserta kabinetnya berasal dari persoalan yang timbul dengan adanya pergeseran para pejabat di kalangan militer. Persoalan di luar parlemen serupa juga pernah terjadi sebelumnya, dan mirip dengan yang membuat kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh. Hanya saja, kali ini, persoalan yang timbul menjadi lebih kompleks karena menyeret sentiment daerah dan pusat. Persoalan ini berakar pada usaha *Tour of Duty* atau pergantian para perwira TNI yang lazim dilakukan Nasution yang pada era Burhanuddin Harahap dikembalikan pada posisi KSAD. Sejumlah perwira yang digeser dari posisinya oleh Nasution meradang, bahkan mempergunakan kekuatan yang dimilikinya untuk melawan—termasuk melakukan usaha-usaha yang menentang pemerintah.

Salah satu 'korban' dari *Tour of Duty* adalah kolonel Simbolon, panglima teritorium Bukit Barisan Sumatera Utara. Simbolon digeser dari posisnya untuk digantikan oleh kolonel Zulkifli Lubis yang saat itu menjabat sebagai wakil KSAD. Kelompok tentara pro-Simbolon-Lubis mentafsirkan tidakan KSAD ini adalah upaya untuk membersihkan para perwira yang terkait dengan jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan mempreteli kekuasaan keduanya. Oleh karena tindakan-tindakannya tersebut Nasution kerap disebut sebagai alat atau bahkan dengan istilah yang lebih kasar lagi: 'antek perdana menteri' oleh para lawan politiknya dan media oposisi. Perwira lain yang kemudian terseret dalam kasus ini adalah Kawilarang yang sebelumnya sangat berjasa dalam mengawal keamanan KAA. Kawilarang saat itu memiliki posisi strategis di Jawa Barat rencananya digantikan oleh Letnan Kolonel Soeprajogi.

Sebagai usaha perlawanan pertama terhadap pemerintahan Ali Sastroamidjojo dilakukan oleh Kawilarang yang mencoba menahan menteri Roeslan Abdulgani atas tuduhan korupsi. Roeslan Abdulgani ditangkap sesaat sebelum berangkat ke luar negeri untuk mengkuti konferensi tentang Terusan Suez.[57] Aksi ini terjadi pada 13 Agustus, sehari sebelum pergantian Kawilarang dilaksanakan. Langkah Kawilarang ini kontroversial. Selain tindakan hukum untuk kasus korupsi tidak termasuk dalam ranah tentara, penangkapan Roeslan Abdulgani ini juga dilakukan dengan mengerahkan pasukan dan dilaksanakan pada momentum yang sangat kritis yakni ketika yang bersangkutan hendak terbang ke London. Jika perwakilan Indonesia gagal berangkat karena ditangkap tentara dengan tuduhan korupsi, maka hal ini dapat menghancurkan reputasi Indonesia di dunia internasional. Hanya saja, aksi Kawilarang ini dapat digagalkan atas bantuan KSAD.[58] Lubis sendiri mengundurkan diri—atau dalam versi lain diturunkan—dari jabatannya sebagai wakil KSAD untuk digantikan oleh Gatot Soebroto. Adapun pemerintah kemudian membentuk suatu panitia yang terdiri dari para menteri dan pejabat negara yang bertugas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas tuduhan korupsi kepada Menteri Luar Negeri. Proses ini dilakukan sebagai respon terhadap kelompok Lubis yang semakin gencar menyuarakan tuduhan kepada pemerintah yang dianggap melindungi korupsi. Hasil penyelidikan memutuskan bahwa Roeslan Abdulgani tidak bersalah.

Kasus yang melibatkan kekuatan militer sebagai upaya di luar parlemen yang ditujukan kepada pemerintah tidak berakhir dengan kegagalan Kawilarang. Hingga akhir tahun 1956, tercatat paling tidak dua insiden yang melibatkan kekuatan bersenjata dengan tujuan menjatuhkan kabinet. Pada 11 Oktober, para perwira pendukung Lubis di Jawa Barat menggerakan sembilan batalyon menuju Jakarta. Aksi ini gagal di tengah jalan karena berhasil dicegah oleh Mayor Achmad Wiranatakusuma yang loyal terhadap KSAD dan pemerintah. Sebulan

kemudian, tepatnya pada 16 November, Lubis mencoba melakukan upayanya yang kedua dengan menggerakan satuan-satuan Divisi Siliwangi dibawah komando Mayor Djaelani. Rencananya pasukan ini akan bergabung dengan satuan-satuan AD dari Komando Jakarta Raya pimpinan Mayor Djuhro Sumitradilaga untuk menangkap para menteri dan tokoh-tokoh lainnya. Hanya saja, karena kegagalan Djuhro menggerakan pasukannnya, usaha kudeta yang dikenal dengan peristiwa '16 November' tersebut gagal dilaksanakan. Sejumlah perwira yang terlibat dalam aksi ini kemudian ditangkap dan dipecat.[59]

Tidak berhenti sampai di situ saja, persoalan pergereran perwira ini melebar pada persoalan lain yakni menyangkut hubungan pusat-daerah. Berkembang pula desas-desus spekulatif yang mengkaitkan persoalan pergesieran perwira ini dengan ketidaksenangan Ali-Nasution (Jawa-pusat) kepada Simbolon-Lubis (Sumatera-daerah). Sentimen primordial yang didasarkan pada asal etnis-kultural semacam ini dengan mudah menyebar, terutama dengan memperoleh dukungan dari oposisi yang kerap mengangkat sentiment anti-Jawa.[60] Pada saat bersamaan di tahun 1956, ikatan-ikatan etnis memang kembali menguat dengan dibentuknya organisasi-organisasi kedaerahan yang dibarengi dengan semakin banyaknya tututan daerah untuk berbagai bidang kepentingan. Pada sisi lain, alasan yang mempertentangkan pusat dan daerah ini menarik karena pada waktu itu kabinet Ali-Roem-Idham juga berhasil menciptakan langkah penting yang mengatur hubungan pusat-daerah melalui rancangan undang-undang otonomi. Bahkan pemerintah juga berhasil membentuk provinsi-provinisi otonomi meliputi Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Pada 1 Desember, Moh. Hatta secara resmi mengundurkan diri setelah sebelumnya pada pertengahan Juli, ia bersurat ke DPR untuk meminta berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Terkait dengan sikapnya ini, Hatta, sebagaimana dituliskan dalam suratnya, menyatakan bahwa setelah DPR dan dewan konstituante hasil pemilu terbentuk, maka jabatan wakil presiden tidak lagi diperlukan.[61] Spekulasi atas pengunduran diri ini bermunculan, sejumlah pihak mentafsirkan peristiwa ini adalah puncak ketidakcocokan Dwi-tunggal.[62] Akan tetapi, banyak pula kalangan, terutama penentang pemerintah, yang mengkaitkan pengunduran diri Hatta sebagai bentuk dari semakin buruknya hubungan pusat-daerah, bahkan tuduhan yang lebih jauh lagi: Jawa dan non-Jawa .[63]

Sejak Desember 1956, situasi politik menjadi semakin buruk yang ditandai oleh munculnya dewan daerah di sejumlah tempat dan perpecahan di dalam tubuh kabinet. Selain menurunnya kepercayaan para elit daerah terhadap pemerintah pusat pasca pengunduran diri Hatta,[64] persoalan hubungan pusat-daerah yang memburuk ini juga terkait erat dengan distribusi kesejahteraan dimana daerah telah banyak menyumbangkan devisa namun tidak memperoleh timbal balik yang pantas. Ali Sastroamidjojo sendiri melihat faktor lain yang turut berperan dalam memperumit masalah itu yakni adanya keterlibatan para pemimpin tentara di daerah dalam aktivitas penyelundupan yang memang marak waktu itu. Oleh karenanya, mereka merasa terancam dengan program '*tour of duty*' Nasution, seperti dalam kasus Simbolon yang dilaporkan menerima uang sekitar 50 juta dari kegiatan illegal—dimana ia sendiri juga mengakuinya.[65] Terkait dengan praktek-praktek illegal itu, pihak oposisi tidak bersuara keras melainkan mengalihkan isu tersebut untuk menyerang pemeritah dengan mengatakan bahwa banyaknya penyelundupan disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam memeratakan pembangunan, dan pusat menganaktirikan daerah.

Pada 22 Desember, Kolonel Simbolon yang mengambil kembali komando Territorium I Bukit Barisan mengumumkan situasi wilayah kekuasaannya dalam keadaan perang dan bahaya. Simbolon juga menyatakan bahwa untuk sementara waktu wilayahnya putus hubungan dengan pemerintah pusat, dan tidak lagi mengakui pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo. Hanya saja, Djamin Ginting yang saat itu merupakan wakil Simbolon tidak sepakat dengan manuver politik yang mempertentangkan pusat-daerah. Dalam waktu singkat, pasukan Djamin Ginting dapat memaksa Simbolon dan pasukannya melarikan diri ke Tapanuli.

Berbagai tentangan dari daerah tidak hanya melibatkan perwira militer namun juga menyeret penguasa sipil seperti yang terjadi di Sumatera Tengah dan Sumatra Selatan. Pada 20 Desember, mantan Panglima Divisi IX Banteng, Kolonel Ismail Lengah, memprakarasi 'Dewan Banteng'.[66] Pembentukan dewan ini dipicu oleh adanya penciutan divisi Banteng, masalah keuangan yang menyangkut buruknya kesejahteraan prajurit; dan tidak adanya pemerataan pembangunan di daerah. Dewan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein yang berhasil melakukan pengambilalihan kekuasaan sipil dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Karena masalah ini memiliki banyak kaitan yang pelik—termasuk juga kuatnya pengaruh Masyumi di Sumatra Tengah, pemerintah mengambil sikap berbeda dengan yang diterapkan kepada Kolonel Simbolon.[67] Untuk mengatasi persoalan ini, Ali Sastroamidjojo menekankan 'pendekatan yang bijaksana'.

Sebelum persoalan Dewan Banteng rampung, pemerintah juga dihadapkan pada munculnya kasus serupa di Sumatera Selatan. Tokoh penting dalam gerakan ini adalah Letkol Barlian panglima setempat yang memiliki kaitan dengan Simbolon dan Ahmad Husain mengambil langkah politik serupa dengan keduanya untuk menentang pemerintah. Hanya saja Barlian menempuh cara yang lebih halus dengan mempergunakan pengaruhnya atas Gubernur Winarno untuk melawan pusat, misalnya dengan melarang bank untuk mencairkan uang tanpa izin gubernur, dan melarang orang keluar daerah dengan membawa uang melebihi Rp.5000,- untuk satu keluarga. Tindakan ini disebut oleh Ali Sastroamidjojo sebagai 'menguasi daerah dari belakang'.[68]

Persoalan-persoalan yang muncul di daerah dengan melibatkan perwira dan penguasa sipil berimbas langsung terhadap kabinet. IPKI yang memiliki satu dalam kabinet memilih menarik wakilnya, Dahlan Ibrahim—mantan komandan Divisi Banteng—yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Veteran.[69] Keluarnya IPKI dari kabinet pada 26 Desember tidak terlalu berpengaruh bagi pemerintah karena

partai ini hanya memiliki empat wakil di DPR. Hanya saja, keluarnya IPKI dari koalisi menjadi awal dari perpecahan di tubuh kabinet Ali-Roem-Idham.

AKHIR KABINET ALI II DAN LAHIRNYA DEMOKRASI TERPIMPIN

Perpecahan di tubuh kabinet tidak dapat diselamatkan lagi setelah Masyumi yang melakukan konggres pada akhir Desember memutuskan untuk menarik seluruh menterinya dari kabinet. Saat M. Roem menyampaikan keputusan Masyumi kepada Perdana Menteri, Ali Sastroamidjojo menyatakan kekecewaannya dengan mengatakan bahwa keluarnya Masyumi dari pemerintahan adalah suatu kesalahan yang akan memuluskan langkah PKI, karena yang mereka incar adalah pecahnya koalisi PNI-Masyumi. Perpecahan ini menyebabkan dukungan parlemen terhadap kabinet berkurang secara drastis mengingat Masyumi memiliki 57 suara dalam DPR. Ali Sastroamidjojoendiri berpikir untuk meletakan jabatannya saat itu juga, namun PNI dan NU mendesaknya untuk tetap mempertahankan kabinet.[70]

Masalah baru kemudian muncul, kali ini datang dari sikap politik Presiden Sukarno. Sejak oktober 1956, Sukarno telah mengkritik habis praktek demokrasi dengan menimpakan kesalahan pada usulan pembentukan partai-partai politik yang digagas Hatta pada awal kemerdekaan, di tahun 1945. Lebih lanjut ia menyebut bahwa partai-partai politik adalah sumber penyakit, yang menyebabkan bangsa Indonesia terpecah-pecah. Sukarno melihat bahwa demokrasi yang sedang diterapkan di Indonesia merupakan sistem yang diimpor dari Barat, yang terbukti tidak sesuai dengan iklim politik Indonesia. Oleh karenanya, Sukarno memandang perlunya untuk kembali pada bentuk demokrasi asli yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, dimana partai-partai dapat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah, dan bukannya melakukan oposisi. Dalam suatu rapat umum di Bandung yang dihelat pada awal 1957, Sukarno lebih tegas menyatakan bahwa ia akan mengintervensi pemerintahan untuk menghentikan segala kekacauan.[71] Sukarno beralasan tindakan ini diperlukan atas dasar pertimbangan kondisi yang berkembang saat itu dimana terjadi pepecahan dan kekacauan politik, serta ia juga mengkhawatirkan bahwa tentara akan mengambil alih jika kegaduhan poitik tidak segera ditemukan penyelesaiannya.[72]

Pada bulan Februari, keinginan Sukarno semakin jelas. Presiden yang saat itu baru saja pulang dari kunjungan ke Tiongkok, Soviet, dan sejumlah negara Eropa Timur lainnya mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan 'konsepsi'—istilah yang sudah muncul, dan telah menjadi rumor sejak akhir 1956. Pada dasarnya konsepsi Sukarno berisi dua hal utama. *Pertama*, kabinet harus dibentuk atas perwakilan semua partai, bukan seperti yang terjadi dalam pemerintahan saat itu yang diibaratkannya seperti kuda dengan tiga kaki—merujuk pada koalisi tiga partai utama pendukung Ali Sastroamidjojo. Bagi Sukarno, kabinet yang tersusun nantinya akan bekerja secara *gotong-royong*, yang dalam retorika indah khas Sukarno dikatakan dengan mengutip pribahasa Belanda"*alle leden van de familie aan tafel: alle leden van de vamilie aan de eettafel en aan de werktafel*" (Semua adalah anggota keluarga di meja: semua adalah anggota keluarga di meja makan dan di meja kerja) tanpa pengecualian bagi siapapun.[73] *Kedua*, perlunya dibentuk Dewan Nasional yang mewakili seluruh golongan fungsional yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, Dewan Nasional adalah representasi dari rakyat, sedangkan kabinet adalah representasi dari parlemen.

Tanggapan atas konsepsi yang diajukan Sukarno tidaklah begitu baik terutama menyangkut gagasan yang pertama tentang pembentukan kabinet yang mengikutsertakan semua partai. Gagasan ini hanya memperoleh dukungan dari PKI, PNI, Murba, Baperki, dan Persatuan Pegawai-pegawai Kepolisian Negara, sedangkan sisanya dari keseluruhan yang ada menolak. Salah satu poin penting dari penolakan tersebut adalah besarnya keengganan untuk bekerja sama dengan—terlebih lagi untuk mengikutsertakan—PKI dalam kabinet. Selain muncul dari partai politik, penolakan juga muncul dari kalangan militer dan tokoh-tokoh daerah. Pada sisi lain, Daniel S. Lev menyebutkan bahwa penolakan untuk memasukan PKI dalam kabinet adalah strategi yang salah bagi partai-partai anti-komunis karena dengan demikian mereka mengizinkan presiden mengontrol pemerintahan.[74]

Memasuki bulan Maret 1957, kondisi dalam negeri semakin gawat. Di berbagai tempat tentangan-tentangan terhadap pemerintah pusat semakin gencar disuarakan. Vintje Samuel yang menjabat sebagai Panglima Teritorium VII mengumumkan keadaan darurat perang untuk seluruh wilayah kekuasaannya di Ujung Pandang (Makasar). Bersamaan dengan itu, diumumkan pula Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) untuk wilayah Indonesia bagian timur. Secara teknis, gerakan ini mengambil alih otoritas sipil di Bali, Nusa Tenggara dan Maluku. Gerakan Permesta kemudian menyatakan bergabung dengan PRRI yang pembentukannya telah diumumkan terlebih dahulu pada 15 Februari.

Bagi Ali Sastroamidjojo, kondisi politik saat itu sudah tidak lagi memungkinkannya untuk memimpin pemerintahan. Di samping situasi semakin memburuk dengan munculnya kekuatan anti pemerintah di berbagai daerah, kabinetnya juga semakin lemah dengan keluarnya NU yang jengkel atas konsepsi presiden, dan partai Islam lainnya yakni PSII. Pada 14 Maret, Ali Sastroamidjojo menghadap presiden untuk mengembalikan mandat. Hari itu menjadi hari terakhirnya sebagai perdana menteri untuk kali kedua, sekaligus hari ketika keadaan SOB (*staat van oorlog en beleg*) yang menunjukan situasi darurat untuk negara ditetapkan. Adapun, surat keputusan presiden tentang SOB yang dikeluarkan pada hari itu adalah dokumen terakhir yang ditandatangani Ali Sastroamidjojo selaku Perdana Menteri, sekaligus Menteri Pertahanan *ad interim*. Ali Sastroamidjojo yang membangun kabinet dengan rasa percaya diri karena didukung oleh mayoritas anggota parlemen yang dipilih pilihan rakyat melalui pemilu yang demokratis, terpaksa mengakhiri jabatannya karena paremen dianggap menjadi biang

keladi pertentangan politik. Pengunduran diri Ali Sastroamdijojo sekaligus menandai akhir dari demokrasi parlementer pada era Sukarno, yang kemudian digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin.

MEMBAWA INDONESIA MENDUNIA: LEGASI ALI SASTROAMIDJOJO

Sejak sebelum mengabdikan diri sebagai Perdana Menteri untuk kali yang pertama, Ali Sastroamidjojo telah memainkan peran sebagai suryakanta khalayak umum di Indonesia untuk meneropong kejadian-kejadian yang tengah berlangsung di berbagai belahan dunia. Ali Sastroamidjojo kerap diundang untuk memberikan ceramah-ceramah di hadapan para pelajar dan mahasiswa, wartawan dan berbagai kalangan lainnya untuk membicarakan situasi aktual dunia internasional. Selain karena pengetahuan global dan pengalaman internasionalnya yang sangat baik, ia adalah duta besar Indonesia di Washington yang telah terlibat dalam berbagai usaha diplomasi internasional sejak 1947.

Tatkala menjabat duta besar, Ali Sastroamidjojo turut memperkenalkan Indonesia di Amerika. Di depan bangunan mansion bergaya Eropa yang terletak di *embassy row*, Massachusetts Avenue no. 2020 yang setelah dibeli pemerintah Indonesia digunakan sebagai kantor kedutaan Indonesia, Ali Sastroamidjojo dibantu istrinya mendandaninya dengan corak Indonesia. dua patung Bali yang semula berada di kedutaan Belanda diperoleh atas bantuan Van Roijen dengan dengan menukarkannya dengan karpet kemudian dipasang. Dalam berbagai perjamuan di kantor kedutaan, menu khas Indonesia dihidangkan dan para tetamu disuguhi pula dengan pertunjukan tari-tarian, dan lantunan gamelan, maupun keroncong yang diperdengarkan melalui *tape recorder*.

Pasca selesainya Perang Dunia, Amerika yang muncul sebagai negara adidaya banyak menarik perhatian khalayak di Indonesia yang ingin mengetahui suasana kehidupan di sana mulai dari situasi politik, kehidupan muda-mudi, kegiatan akademik, dan dinamika persuratkabaran yang tentu saja sangat menarik bagi para wartawan. Ali Sastroamidjojo memberikan pengetahuannya untuk memenuhi rasa ingin tahu itu, dan untuk menunjukan pula kepentingan maupun ketertarikan Amerika terhadap Indonesia.

Semenjak itu pulalah, Ali Sastroamidjojo sudah memperlihatkan kepiawaiannya dalam membaca dan memahami perkembangan situasi dunia, sekaligus menunjukan kuatnya visi internasional yang ia miliki. Selama menjabat sebagai perdana menteri, Ali Sastroamidjojo kerap mengambil langkah-langkah strategis yang memiliki dimensi internasional yang kuat. Oleh karena itu, dalam situasi politik Indonesia tahun 1950-an yang penuh pertentangan, kelompok oposisi sangat sulit mencari celah untuk menyerang kebijakan luar negeri Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Ia muncul sebagai figur yang memiliki pandangan internasional yang luas. Terlepas dari berbagai masalah domestik yang menghantam pemerintahannya, Ali Sastroamidjojo memiliki legacy untuk menempatkan Indonesia secara bermartabat dan terhormat dalam kancah politik dunia saat itu, dimana negara-negara yang baru saja merdeka sedang mencari peran mereka. Bukan hanya melalui KAA, langkah Ali Sastroamidjojo dalam mengintegrasikan kembali Irian Barat kepangkuan ibu pertiwi menunjukan kapasitasnya dalam membaca dinamika politik internasional.

Usaha untuk melakukan pengintegrasian kembali Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya bukanlah agenda yang baru lagi. Kabinet Natsir telah mencantumkan bahwa masalah Irian Barat dapat diselesaikan pada tahun 1950. Dua kabinet selanjutnya juga melakukan hal yang sama, Sukiman ingin 'memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya', adapun penggantinya, Wilopo, menjanjikan untuk 'melanjutkan perjuangan untuk memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya'. Dalam hal ini, persoalan Irian Barat adalah satu dari banyak masalah nasional di mana baik pemerintah maupun kelompok oposisi tidak memiliki banyak perbedaan. Sehingga program kabinet yang menyangkut pembebasan Irian Barat lumrahnya akan memperoleh dukungan dari semua pihak.

Walaupun isu Irian Barat bukalah hal baru, hanya saja, pendekatan politik Ali Sastroamidjojo dalam menangani persoalan ini berlainan dari langkah-langkah politik yang sudah pernah dilakukan oleh Perdana Menteri sebelumnya. Ali Sastroamidjojo melihat bahwa persoalan Irian Barat bukanlah persoalan internal bangsa Indonesia yang dapat dilokalisir, atau hanya untuk dikaitkan hubungannnya dengan Belanda. Persoalan untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik, bagi Ali Sastroamidjojo, adalah persoalan internasional. Strategi Perdana Menteri dalam hal ini adalah mengangkat kasus Irian Barat dalam forum internasional dengan menggunakan isu kolonialisme sebagai akar masalah. Dengan demikian, usaha Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat bukan hanya masalah diplomasi bilateral dua negara, melainkan usaha mengakhiri kekuasaan kolonial dan praktik kolonialisme yang saat itu merupakan isu penting di seluruh dunia. Ali Sastroamidjojo sangat yakin dengan pendekatan politik yang ia tempuh akan mengundang banyak dukungan dari negara-negara lain di dunia, terutama yang baru melepaskan diri dari penjajahan. Lebih dari itu, kepercayaan diri Perdana Menteri bertambah saat menghadiri Konferensi Colombo di Sri Lanka, empat pemimpin negara yang menjadi delegasi waktu itu menyampaikan dukungan yang disampaikan secara personal kepada Ali Sasatroamidjojo.

Dalam hal politik luar negeri Indonesia yang menganut bebas aktif, Ali Sastroamidjojo memiliki pandangan yang menarik. Rumusan bebas aktif menunjukan Indonesia ingin berlaku netral dalam situasi perang dingin, tetapi netral saja tidak cukup karena akan cenderung pasif oleh karenanya ditambahkanlah sifat aktif yang menunjukan bahwa Indonesia ingin turut berkiprah dalam memelihara perdamaian dunia. Bagi Ali Sastroamidjojo, sifat bebas aktif yang rumusannya telah disetujui sejak 1945 merupakan suatu kewajaran bagi negara yang merdeka. Ali Sastroamidjojo lebih menekankan posisi Indonesia dalam gelanggang politik internasional sebagai 'non-aligned' atau non-blok, rumusan ini menjadi semakin jelas dalam penyelenggaraan Konferensi Bandung. Istilah 'non-aligned' ia rasa lebih cocok karena titik berat rumusan ini ada pada usaha untuk memelihara perdamaian

dunia, dan mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan yang sedang berkembang. Dalam hal ini, menurut Ali Sastroamidjojo, perdamaian dunia hanya akan tercapai jika jurang pemisah antara negara-negara industrialis dengan negara-negara yang sedang berkembang dapat ditiadakan.[75]

Kesuksesan penyelenggaraan KAA, dan kemudian bagaimana konferensi ini memiliki pengaruh besar bagi politik global menjadi salah satu kontribusi dan legasi terpenting dari Ali Sastroamidjojo. Menyitir keterangan Jürgen Dinkel, KAA disebut oleh harian di Jerman sebagai bukti yang meyakinkan 'kemerdekaan negara-negara baru ketimbang semua dokumen resmi, statuta, dan konstitusi yang telah ditandatangani sejauh ini".[76] Lebih dari itu, KAA menjadi "momen" penting bagi diplomasi internasional abad ke-20 yang sekaligus menegaskan tampilnya negara-negara bekas jajahan dalam kancah politik internasional pada masa itu dengan mengusung gerakan-gerakan antikolonial yang dampaknya bisa bertahan lama.

Gagasan penyelenggaraan KAA tercetus untuk pertama kalinya dalam Konferensi Colombo yang dihelat atas inisiatif Perdana Menteri Sri Lanka John Kotelawala di Kandy, Sri Lanka pada 1954. Konferensi Colombo yang mempertemukan lima negara yang dikenal sebagai "Colombo Powers", yakni Burma, Indonesia, India, Sri Lanka, dan Pakistan—di Colombo mulanya dirancang sebagai pertemuan yang bersifat informal—sebagaimana saran tuan rumah pertemuan ini—dan tidak memiliki agenda pasti kecuali untuk memperlihatkan sebuah blok negara-negara Asia Tenggara yang baru merdeka untuk menjadi kekuatan efektif baru dalam urusan dunia. Karena terdorong oleh perkembangan situasi di Asia Tenggara yang kian memanas dengan adanya krisis Vietnam, Indonesia mengusulkan untuk memasukan masalah Vietnam dalam agenda pembahasan. Indonesia juga mengusulkan untuk melaksanakan konferensi yang akan dihadiri kepala pemerintahan Mesir, Pakistan, India, Burma, Srilanka untuk membicarakan situasi di Vietnam dan Afrika Utara. Empat hari sebelum konferensi dimulai, usulan untuk memasukan krisis Vietnam sebagai agenda pembicaraan diterima.[77]

Dalam prosesi keberangkatannya menghadiri Konferensi Colombo yang dihelat di lapangan terbang Kemayoran, Ali Sastroamidjojo menjelaskan di hadapan para pewarta bahwa salah satu misinya adalah untuk menggalang dukungan untuk penyelenggaraan konferensi yang lebih luas yang menghadirkan negara-negara Asia dan Afrika. Gagasan ini memperoleh kesempatan untuk diperdengarkan pada sesi keenam Konferensi Colombo. Ali Sastroamidjojo yang mewakili Indonesia menyodorkan ide mengenai Konferensi Asia-Afrika yang "sama hakekatnya dengan konferensi sekarang ini, tetapi lebih luas jangkauannya dengan tidak hanya mencakup negara-negara Asia tetapi juga negara-negara Afrika lainnya". Bagi Ali Sastroamidjojo KAA dapat diselenggarakan dengan sponsor dari Colombo Powers, dan Indonesia akan siap menjadi tuan rumahnya. Gagasannya tidak langsung diterima oleh para peserta lainnya. U Nu dan Moh. Ali tampak ragu-ragu tetapi tidak berani menolak secara terang-terangan. Nehru merespon dengan lebih skeptis mengingat banyaknya masalah harus diatasi terlebih dahulu untuk dapat melangsungkan konferensi semacam itu baik dari segi teknis, juga politis terutama yang berhubungan dengan besarnya keragaman sikap politik luar-negeri negara-negara yang akan diundang.

Respon dari para delegasi lainnya tidak menyurutkan niat Ali Sastroamidjojo yang tetap ingin melaksanakan gagasannya hingga pada akhirnya, ia berhasil meyakinkan para peserta lainnya. Bahkan kemudian pertemuan ini menyatakan menerima baik sebuah usul bahwa Perdana Menteri Indonesia akan menyelidiki kemungkinannya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri kesepakatan ini masih menyisakan keraguan terutama menyangkut kemampuan Indonesia, yang saat itu berada dalam kondisi yang serba tidak stabil baik secara ekonomi maupun politik, untuk menyelenggarakan konferensi besar yang mempertemukan negara-negara dari benua Asia dan Afrika.

Sejumlah keraguan juga muncul dari dalam negeri. Berbagai kalangan meragukan kesiapan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan mencukupi seluruh kebutuhan KAA mengingat waktu itu fasilitas yang dimiliki Indonesia masih terbilang minim. Selain itu, banyak pula pandangan yang juga mengkhawatirkan kondisi keamanan dalam negeri yang kala itu masih belum stabil karena kerap memperoleh gangguan dari kelompok-kelompok bersenjata. Ada juga komentar-komentar tajam yang menjadikan gagasan Perdana Menteri ini sebagai bahan kritik bagi pemerintah. Kelompok oposisi menuduh bahwa gagasan untuk menghelat

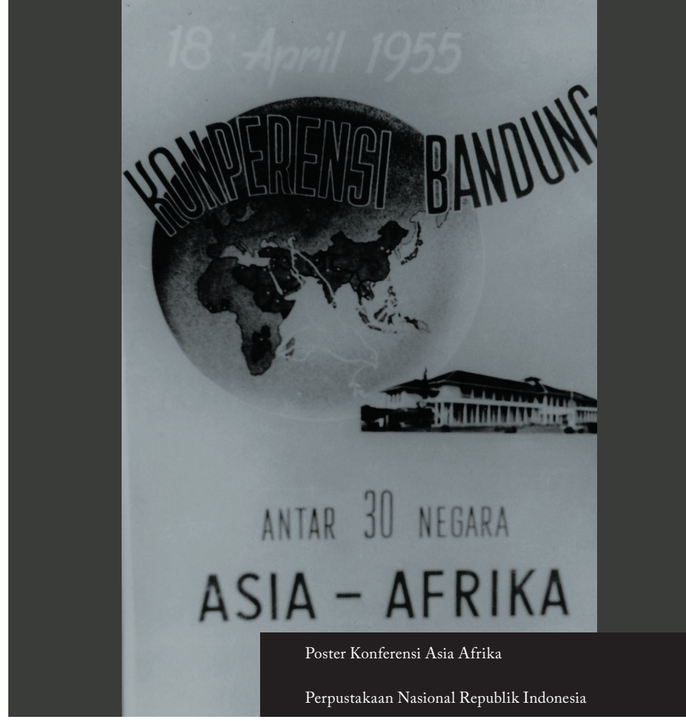

Poster Konferensi Asia Afrika

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

KAA di Bandung hanyalah strategi politik pencitraan oleh pemerintah yang berbiaya mahal untuk menutupi berbagai kelemahan maupun kegagalannya. Meskipun demikian, pemerintah berhasil meyakinkan parlemen akan arti penting penyelenggaraan KAA bagi Indonesia dan perdamaian dunia. Bahkan, dua partai oposisi kemudian turut serta mengirimkan wakilnya yakni PSI dan Partai Katholik yang menunjuk Sudjatmoko dan Sutarto Hadisudibjo.[78]

Kekhawatiran akan gangguan keamanan selama penyelenggaraan konferensi ini tidak pernah terbukti. Begitu juga dengan kekhawatiran lainnya. Nehru yang memperoleh laporan dari duta besarnya di Jakarta tentang sejumlah kendala yang dihadapi penyelenggara KAA sempat meminta Mohamad Jusuf untuk memberikan asistensi teknis kepada Indonesia. Salah satu usulannya ialah membangun perkemahan berukuran besar di alun-alun untuk

Ali Sastroamidjojo dalam Konferensi Asia Afrika.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Penyelenggaraan KAA dianggap sebagai salah satu prestasi terbesar Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

menampung para peserta konferensi untuk mensiasati kekurangan akomodasi. Namun, Ali Sastroamidjojo tidak dapat menerima usulan ini untuk menampung para pejabat negara undangan dalam tenda. Oleh karenanya, pemerintah mempersiapkan sejumlah hotel, penginapan dan gedung-gedung di Bandung untuk pelaksanaan konferensi itu. Ali Sastroamidjojo bahkan sempat menolak usulan Sukarno yang sekitar sepuluh hari sebelum konferensi dimulai melakukan inspeksi terhadap persiapan penyelenggaraan acara ini, yang menginginkan perubah arsitektural sejumlah bagian bangunan Gedung Merdeka (semula bernama Concordia) dan dibuatnya restoran yang besar. Meskipun cukup kecewa, Presiden yang juga arsitek itu dapat memahami alasan Perdana Menteri yang menyatakan tidak cukup waktu dan tidak ada dana untuk mewujudkan keinginan Sukarno tersebut.

KAA yang dicetuskan Ali Sastroamidjojo menjadi momentum bersejarah bagi usaha mewujudkan perdamaian dunia ditengah krisis Perang Dingin waktu itu. Pada sisi lain, kesuksesan menyelenggarakan KAA turut mengharumkan nama Indonesia atas komitmennya yang tinggi terhadap terciptanya perdamaian dunia, dan sikap politiknya yang anti penjajahan. KAA juga menepis keraguan baik yang dirasakan oleh para delegasi negara peserta maupun yang mengemuka di dalam negeri, sekaligus menunjukan betapa bangsa ini bermartabat. Bagi Ali Sastroamidjojo sendiri, KAA jalan pembuka bagi kiprah yang lebih besar seorang putra bangsa Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia yang didasarkan pada semangat kebebasan dan perjuangan melawan imperialisme. Kiprah Ali Sastroamidjojo sebagai wakil Indonesia terus berlanjut bahkan setelah ia tidak lagi menjabat Perdana Menteri. Ali Sastroamidjojo terlibat dalam berbagai resolusi perdamaian untuk mengatasi krisis Suez, dan krisis Hongaria. Ketika ia menjabat sebagai diplomat PBB, lebih banyak lagi masalah-masalah internasional yang ia tangani.

Dari pada itu, salah satu usaha paling menarik pernah dilakukan Ali Sasatroamidjojo bersama dengan Nehru yang menginisiasi serangkaian usaha untuk mendekatkan Peking dan Washington. Langkah ini diambil untuk meredakan kekhawatiran internasional akan pecahnya krisis dunia yang melibatkan dua negara tersebut. Meskipun keduanya boleh dibilang tidak terlalu berhasil, usaha ini sangat patut dihargai. Bagaimana tidak, Indonesia dan India yang keduanya merupakan bekas jajahan berani mengambil langkah-langkah aktif untuk memperoleh resolusi atas ketegangan dua negara besar adidaya.

PENUTUP

Dua kali, nama Ali Sastroamidjojo tercatat sebagai Perdana Menteri pada suatu era ketika Indonesia mencari jalan terbaik untuk dapat menerapkan sistem demokrasi. Akhir dari masa baktinya sebagai Perdana Menteri untuk kali yang kedua sekaligus menandai transisi penting dalam sejarah politik Indonesia yakni lahirnya demokrasi terpimpin. Seperti yang ia sendiri akui, selama dua periode masa kerjanya sebagai Perdana Menteri masih menyisakan sejumlah masalah tak terselesaikan terutama terkait dengan isu-isu domestik. Meskipun demikian, banyak pula prestasi yang berhasil ditorehkan selama dua

kali masa kepemimpinannya. Diantara sejumlah pencapaiannya itu, Ali Sastroamidjojo memiliki peran penting untuk menempatkan Indonesia dalam percaturan politik dunia.

Ali Sastroamidjojo dikenal dengan visi internasionalnya yang sangat kuat yang diperolehnya dari pengalaman hidup selama bersekolah di Leiden, menjadi wakil dalam berbagai usaha diplomasi internasional, representasi Indonesia di Washington, dan kunjungan-kunjungannya ke berbagai penjuru dunia. Selama menjalankan mandat untuk memimpin cabinet, banyak kebijakannya yang disandarkan pada pandangan akan peran penting yang harus diambil bangsa Indonesia dalam arus sejarah dunia. Oleh karenanya Indonesia kemudian hadir dalam panggung politik internasional sebagai negara yang belum lama merdeka namun memiliki semangat kuat dan kontribusi besar dalam menjaga perdamaian dunia, maupun dalam menentang imperialisme. Peran penting ini dimainkan Indonesia tatkala dunia sedang dilanda krisis besar akibat Perang Dingin.

Terlepas dari gagasan maupun kiprahnya yang mendunia, Ali Sastroamidjojo adalah sosok yang tidak pernah kehilangan jati dirinya sebagai seorang Indonesia. Walaupun menjulang tinggi, ia tetap memegang akar-akar tradisi. Ketika para tokoh berpendapat bahwa peci sebagai identitas nasional, namun mulai menanggalkan sarung karena memandangnya sebagai hal yang kuno, Ali Sastroamidjojo menyatakan ketidaksetujuannya, dan menyatakan bahwa sarung juga bagian dari identitas nasional Indonesia juga. Ia dan istrinya juga membawa suasana Indonesia di Amerika. Lebih dari itu, Ia mendidik anaknya—yang sempat merasakan kehidupan Eropa—dengan bahasa ibu. Alasannya sederhana, ia melakukan dekoloniasasi mulai dari keluarga. Kiprah yang ditunjukan Ali Sastroamidjojo baik sebagai pribadi maupun sebagai politisi dan tokoh bangsa menunjukan arti penting seorang putra bangsa untuk mendunia tanpa kehilangan jati diri ke-Indonesiaannya.

ENDNOTES

1 Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, (Jakarta: PT. Kinta, 1974), hlm. 311.

2 Sebenarnya Ali gamang dalam menetukan pilihan, oleh karenanya ia tetap mengikuti ujian Sekolah Teknik dan HBS. Hasilnya, Ali dinyatakan lulus untuk kedua-duanya.

3 R. Elson, *Idea of Indonesia: a history*, (New York: Cambridge University Press, 2009)

4 Ali Sastroamidjojo, *Empat Mahasiswa di Negeri Belanda tahun 1927*, (Jakarta: Idayu Press, 1977), hlm, 35-7.

5 Harry A Poeze, *Di Negeri Penjajah : Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, (Jakarta : KPG bekerja sama dengan KITLV Jakarta, 2014), hlm. 210.

6 Ali Sastroamidjojo, *op.cit*, (Jakarta: PT. Kinta, 1974), hlm. 180-1.

7 Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Jakarta : Equinox Pub, 2007), hlm. 341.

8 Ali Sastroamidjojo, *op. cit*, hlm. 313.

9 Dikutip dari P.N.H. Simanjutak, *Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari awal kemerdekaan sampai reformasi*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 162.

10 Soemitro Djojohadikoesoemo, dalam Thee Kian Wie, *Pelaku Birkisah*, hlm. 20-21, Hebert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Jakarta : Equinox Pub, 2007), hlm. 371.

11 Sjafruddin Prawiranegara, dalam Thee Kian Wie, *Pelaku Birkisah*, hlm. 45.

12 Bruce Glassburner, "Economic Policy-Making in Indonesia, 1956-1957", dalam Bruce Glassburner.,(ed.) *The Economy of Indonesia: Selected Readings,* (Kuala Lumpur: Equinox Edition 2007), hlm. 87.

13 Misalkan lihat dalam J. Thomas Lindblad, "The Importance of Indonesianisasi during the Transition from the 1930s to the 1960s", (makalah konferensi) *Economic Growth and Institutional Change in Indonesia in the 19th and 20th Centuries*, Amsterdam, 25-26 February 2002, hlm. 7. Artikel ini diterbitkan dengan judul yang sama dalam *Itinerario* Vol. 26, Issue 3-4 November 2002 , pp. 51-71.

14 B. Higgins., *All the Difference: A Development Economist's Quest*. (Montreal: McGill-Queen's, 1992), hlm. 51.

15 Howard Dick, "Formation of the nation-state, 1930s–1966" dalam Howard Dick, et.al., (eds.), *The Emergence of a National Economy: An economic history of Indonesia, 1800–2000* (Crows Nest: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin; Honolulu : University of Hawai'i Press, 2002), hlm. 174.

16 Hebert Feith, *op, cit.*, hlm. 366.

17 Hebert Feith, *ibid.*

18 Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*, hlm. 335.

19 Hebert Feith, *op. cit*, hlm. 373.

20 J. Thomas Lindblad, *op. cit.*,

21 Ali Sastroamidjojo, *op, cit.*, hlm. 338.

22 Ali Sastroamidjojo, *ibid.*

23 Ali Sastroamidjojo, *ibid*, hlm. 325.

24 Herbert Feith memberi estimasi angka 2.125 sebagai batas minimal, dan dimungkinkan jumlahnya melampaui angka tersebut antara 4.000 hingga 5.000 pada 1954. Lihat Feith, *Decline*, hlm. 375. Thomas Lindblad mengindikasikan besarnya kenaikan yang mencapai 76% ini tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dimana pertumbuhan pesat dialami oleh pengusaha pribumi ('asli') karena kerancuan dalam konstruksi Ali-Baba. Lindblad, op.cit, hlm. 8.

25 Lihat Hebert Feith, *op. cit.*, hlm. 375.

26 Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*, 325.

27 Ali Sastroamidjojo, *ibid*, hlm. 336.

28 Penyelenggaraan pemilu lokal yang lebih awal dilaksanakan di Penyelenggaraan pemilu di Karesidenan Kediri (11 Juli 1946), Surakarta (10 Desember 1946), dan Kalimantan Selatan (1948). Uji Nugroho Winardi, "pengantar" dalam Uji Nugrho Winardi, dkk. *Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 dan 1955 di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018), hlm. 3.

29 Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*,

30 Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak Diperjalananku*, (Jakarta : PT. Kinta, 1974), hlm. 330., Badruzzaman Busyairi, *Boerhanoeddin Harahap: Pilar demokrasi*, (Jakarta: Bulan Bintang untuk Panitia Buku Boerhanoeddin Harahap, 1989), hlm. 58., Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*, (Jakarta : S. Soerojo, 1988), hlm. 66,

31 Hebert Feith, *op. cit.*, hlm. 143.

32 Abdul Haris Nasution, *Tjatatan2 sekitar politik militer Indonesia*, (Djakarta: Pembimbing, 1955), hlm. 176.

33 Taufik Abdulah, "Regionalisme dan Sentralisme", 323. Terbentuknya RIS dan RI hanya merupakan salah satu negara bagian, Menteri Dalam Negeri RI tidak menyetujui adanya Provinsi Aceh, yang secara otomatis juga berarti menolak pengangkatan Daud Bueruen sebagai gubernur. Pada masa Kabinet Natsir, Aceh masuk menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara.

34 B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, (Dordrecht : Springer Netherlands, 2013), hlm. 74, lihat pula Tim Buku Tempo, *Seri Tempo: Daud Beureueh*, 2-3.

35 B.J. Boland megindikasikan bahwasanya dokumen ini tidak pernah ada, sedangkan Kees Van Dijk menyiratkan bahwa dokumen berisi daftar nama tokoh-tokoh Aceh ada. Indikasinya, kegaduhan politik ini sengaja dihembuskan kelompok kiri dari Jakarta. C. van Dijk, 'Aceh, the rebellion of the Islamic scholars', dalam *Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*, (Leiden: Brill, 1981).

36 Nazaruddin Sjamsuddin, *The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion* (Publisher: Singapore: Inst. of

Southeast Asian Studies, 1985), hlm. 123.

37 Ali Sastroamidjojo, *op. cit*., hlm. 318.

38 Remy Madinier, *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism*, (Singapore: NUS Press, 2015), hlm. 160.

39 Ali Sastroamidjojo, *op. cit*., hlm. 319.

40 Hebert Feith, *op. cit*., hlm. 350.

41 Tanggal yang ditentukan adalah 29 September 1955 untuk pemilihan anggota DPR, dan 15 Desember 1955 untuk anggota konstituante.

42 Hebert Feith, *op. cit*., hlm. 369. Posisi walikota Jakarta Raya waktu itu setera dengan jabatan gubernur.

43 Sudiro merupakan Gubernur Sulawesi pada periode 1 Juli 1951 – 1953. Soal kebijakan Sudiro dapat dilihat dalam Hebert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Jakarta : Equinox Pub, 2007), hlm. 349. Untuk kaitannya dengan PNI lihat dalam Hebert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Jakarta : Equinox Pub, 2007), hlm. 267.

44 Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak Diperjalananku*, (Jakarta : PT. Kinta, 1974), hlm. 319. Paling tidak tercatat dua insiden yang cukup menggegerkan yakni ketika pidato Mr. Hardi (PNI) dianggap menyerang Agama Islam, dan terbunuhnya seorang tentara yang berusaha meredam keributan massa saat demonstrasi.

45 Thomas Lindblad mengindikasikan istilah 'Ali' terkait dengan nama Perdana Menteri saat itu: Ali Sastroamidjojo. Sedangkan istilah baba (dari kata Babah atau *Wa wa Sze*) merupakan sebutan bernada *derogative* (merendahkan) yang digunakan oleh orang Tionghoa kelahiran Tiongkok untuk menyebut orang Tionghoa yang lahir di Indonesia. Lihat dalam Lindblad, "The Importance of Indonesianisasi during the Transition from the 1930s to the 1960s", (makalah konferensi) *Economic Growth and Institutional Change in Indonesia in the 19th and 20th Centuries*, Amsterdam, 25-26 February 2002, hlm. 7.

46 Pencalonannya untuk anggota DPR dari tiga wilayah pemilihan yakni Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera tengah dan utara. Adapun untuk menjadi anggoa konstituante, daerah yang menduknggnya adalah Jawa Timur dan Jawa Barat. Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak Diperjalananku*, (Jakarta : PT. Kinta, 1974), hlm. 339.

47 Hebert Feith, *op. cit*., hlm. 467.

48 P.N.H. Simanjutak, *Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari awal kemerdekaan sampai reformasi*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 162.

49 Feith, *Decline*, 469.

50 Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak Diperjalananku*, (Jakarta : PT. Kinta, 1974), hlm. 344; P.N.H. Simanjuntak, *Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari awal kemerdekaan sampai reformasi*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 162.

51 Sekretariat DPR-GR, *Seperempat abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,* (Jakarta : Tanpa Tahun Terbit, 1983), hlm. 198.

52 Ali Sastroamidjojo, *op. cit*., hlm. 348.

53 Bruce Glassbuner, *op. cit*., hlm. 90.

54 Sekretariat DPR-GR, *op.* cit., hlm. 197.

55 Hebert Feith, *op. cit*., hlm. 474.

56 Indonesia Sekretariat Negara, *30 tahun Indonesia merdeka*, (Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1986), hlm. 100.

57 Korupsi yang dituduhkan kepada Roeslan Abdulgani ini dilakukan dengan wakil kepala percetakan negara Lie Hok Thay. Meskipun jabatan sebenarnya adalah wakil kepala, namun ia dikatakan mampu mempengaruhi kepala percetakan negara Piet de Queljoe.

58 Ali Sastroamidjojo, *op. cit*., hlm. 354-5.

59 P.N.H. Simanjuntak, *op. cit*., hlm. 172.

60 Hebert Feith, *op. cit*., hlm. 491-94.

61 Deliar Noer, *Mohammad Hatta: biografi politik,* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 481-2, lihat juga dalam Mizar Djamily, *Mengenal Kabinet RI selama 40 tahun Indonesia merdeka*, (Jakarta: Kreasi Jaya Utama, 1986), hlm. 101-2. Sergius Sutanto, *Hatta: aku datang karena sejarah*, (Bandung: Qanita, 2018), hlm. 13.

62 P.N.H. Simanjuntak, *op. cit*., hlm. 174.

63 Dalam otobografinya, Ali Sastroamidjojo berusaha mendudukan perkara ini secara wajar dengan mengutip secara langsung surat Hatta, Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak Diperjalananku*, (Jakarta : PT. Kinta, 1974), hlm. 368-9.

64 Hebert Feith, *op. cit*., hlm. 524.

65 Ali Sastroamidjojo, *op. cit*., hlm. 352.

66 Audrey Kahin, *Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 280-90.

67 Untuk memahami posisi Pemerintah dan Masyumi dalam menyeesaikan persoalan di Sumatra Tengah perlu dipahami pembentukan dan kiprah Divisi Banteng pada masa revolusi 1945-1949 lihat dalam Audrey R. Kahin, "West Sumatra: Outpost of the Republic", dalam Audrey Kahin (ed.), *Regional dynamics of the Indonesian Revolution: unity from diversity*, Honolulu : University of Hawaii Press, 1985) hlm. 145-168.

68 Ali Sastroamidjojo, *op. cit*., hlm. 365.

69 Pejabat di kementrian ini sebelumnya bernama Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang, yang mulai 30 April 1956 diganti menjadi Menteri Negara Urusan Veteran. P.N.H. Simanjuntak, *Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari awal kemerdekaan sampai reformasi*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 164.

70 Ali Sastroamidjojo, *op. cit*., hlm. 370-1.

71 P.N.H. Simanjuntak, *op. cit*., hlm. 177.

72 Daniel S Lev, *The transition to guided democracy: Indonesian politics, 1957-1959*, (Jakarta: Equinox Publishing, 2009), hlm. 29.

73 Dikutip sebagaimana aslinya dari Sukarno, "*Menjelamatkan Republik Proklamasi: tjatatan stenografis dari pidato Presiden Sukarno tgl. 21 Febr. 1957 djam 20.05 di Istana Merdeka*", (Jakarta: Kementerian Penerangan R. I., 1957) hlm. 9. Ungkapan yang sama diulangi kembali pada hlm. 10.

74 Daniel S Lev, *op, cit*., hlm. 31.

75 Ali Sastroamidjojo, *op, cit*., hlm. 311.

76 Jürgen Dinkel, Bandung 1955 Mengubah "Pejuang Kebebasan" Menjadi Negarawan" dalam Wildan Sena Utama, (2017), *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri), hlm. v-vi.

77 Wildan Sena Utama, *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri), hlm. 39.

78 Ali Sastroamidjojo, *op. cit*., hlm. 324.

BURHANUDDIN HARAHAP

BURHANUDDIN HARAHAP:

Penyelenggaraan Pemilu Nasional Pertama dan Pemberantasan Korupsi

"Kemerdekaan telah tercapai dan kewibawaan Pemerintah tidaklah lagi berdasarkan ketakutan dari rakyat, akan tetapi ditimbulkan oleh sikap kasih sayang dari pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan terhadap rakyat".[1]

Burhanuddin Harahap

PENGANTAR

Burhanuddin Harahap merupakan Perdana Menteri ke-9 Republik Indonesia sejak sistem parlementer diberlakukan pada tahun 1945. Burhanuddin juga merupakan sosok kedua Batak yang menempati posisi Perdana Menteri Republik setelah Amir Sjarifuddin. Seorang yang kalem, menengah dan tidak begitu ambisius, Burhanuddin merupakan pilihan kompromistis antara koalisi Kiri Islam yang diwakili oleh Masyumi, partai terbesar Indonesia, dan PSI, partai sosialis dan tempat konsentrasi intelektual Indonesia, dengan Nasionalis Kiri yang diwakili oleh PNI. Burhanuddin merupakan seorang sosok politikus Muslim modernis, satu klik dengan Mohammad Natsir. Dia aktif dalam kegiatan siswa Muslim pada tahun 1930an, menggabungkan diri dengan Jong Islamieten Bond. Kenaikan Burhanuddin sebagai Perdana Menteri disebabkan karena kejatuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo Pertama dari tuduhan korupsi yang dilontarkan oleh Masyumi dan PSI, khususnya salah satu skandal korupsi besar pertama dalam sejarah Indonesia dengan melibatkan menteri Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo. Lahir dari kompromi dan skandal korupsi, Burhanuddin bertekad untuk memberi marka positif kepada kabinet interimnya yang singkat itu di dalam sejarah Republik. Sosok Burhanuddin tidak begitu terkenal dibandingkan dengan tokoh sesama Masyumi Mohammad Natsir, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membangun Islam Politik yang sesuai dengan nasionalisme Indonesia dan ideologi Pancasila, tetapi dibawah kepemimpinannya Indonesia membentuk kisi-kisi awal dari Undang Undang Anti-Korupsi serta mempersiapkan diri dalam menyelenggarakan Pemilu Nasional pertama yang sukses.

Kabinet Burhanuddin dikedepankan sebagai kabinet professional atau *zakenkabinet* dan dalam banyak hal merupakan referendum terhadap posisi kaum intelektual dan administrator yang banyak tergabung dalam PSI dan Masyumi. Herbert Feith menyebutkan bahwa jatuhnya Kabinet Wilopo menandakan berakhirnya kekuasaan kaum sosial demokrat yang telah memimpin Republik semenjak naiknya Kabinet Hatta pada tahun 1949.[2] Kegagalan kaum professional ini untuk mendapatkan mandat pada Pemilu tahun 1955 dengan sedikitnya perolehan kursi PSI menandakan berakhirnya peranan kaum administrator dalam kepemimpinan Indonesia pada era Sukarno. Pada November 1957, bersama dengan Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara, serta tokoh-tokoh PSI seperti Sumitro Djojohadikusumo, Burhanuddin mengungsi ke Padang guna mendeklarasikan PRRI dan memberontak terhadap Jakarta. Masyumi sendiri akhirnya menjadi partai terlarang pada tahun 1960. Naiknya Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri setelah Pemilu 1955 merupakan referendum rakyat Indonesia yang menempatkan semangat nasionalisme di atas profesionalisme. Kita bisa menilai sekarang betapa pentingnya Kabinet dan sosok Burhanuddin Harahap pada masa yang menentukan ini dan menempatkan sumbangsih Ia pada tempat yang semestinya. Walau hanya berjalan selama tujuh bulan, pengaruh kabinet ini sentral dalam memahami mengapa Indonesia memilih jalan menjauhi demokrasi dibawah Sukarno dan Suharto sepanjang hampir setengah abad dari kemerdekaannya. Kegagalan dalam meluncurkan UU Anti Korupsi dan baliknya pengaruh kaum Nasionalis Kiri dibawah Kabinet Ali Sastroamidjojo II menandakan perpecahan mendasar. Kabinet Burhanuddin merupakan kabinet terakhir saat partai berhaluan Muslim modernis mempunyai posisi dominan dalam pemerintahan Indonesia hingga masa kini.

AWAL PERJALANAN

Burhanuddin Harahap lahir di Medan pada tanggal 12 Februari 1917. Ia merupakan anak ketiga dari enam bersaudara pasangan Muhammad Yunus dan Siti Nurfiah. Muhammad Yunus sang ayah berasal dari Tapanuli dan merupakan seorang Mantri Polisi yang bekerja di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Timur di kota Tanjung Balai. Sebagai seorang Mantri Polisi, Muhammad Yunus harus berpindah-pindah tempat tinggal karena urusan dinas. Hal inilah yang membuat Burhanuddin Harahap berpindah-pindah sejak kecil mengikuti sang ayah. Burhanuddin Harahap kemudian memutuskan untuk menetap di Tanjung Balai dengan menyewa kamar kost semenjak menempuh pendidikan di HIS (*Hollands Inlandse School*) Bagan Siapi-api. Tidak semua daerah di Sumatera yang memiliki HIS.[3]

Selepas menempuh pendidikan di HIS, Burhanuddin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) yang berada di Padang Sidempuan. Hingga kemudian pada tahun 1935, Burhanuddin memperoleh kelulusan di MULO dan memulai perjalanannya keluar pulau Sumatera. Burhanuddin hijrah ke Yogyakarta untuk kemudian bersekolah di AMS A-2 (*Algemene Middelbare School*).[4] Ia mengambil jurusan *Westersklassiek* atau pendidikan liberal Barat. Jurusan ini membuka mata Burhanuddin terhadap filsafat dan nilai-nilai masyarakat Barat. Sama seperti koleganya di Masyumi Mohammad Natsir, pendidikan ini membuka pemikiran Burhanuddin akan keterbatasan pemikiran Barat itu sendiri dan akan mengarahkannya pada ide-ide Islam modernis yang menawarkan alternatif terhadap sistem filsafat Barat yang hegemonik

tersebut. Di Yogyakarta, Burhanuddin indekost di Prabuningratan dalam sebuah rumah besar bersama delapan orang lainnya dengan seorang pembantu yang memasak dan mencuci pakaiannya. Kondisi kehidupannya sangat mewah untuk anak seusia 19 tahun. Pada periode ini, Buhanuddin mulai aktif dalam organisasi JIB (*Jong Islamieten Bond*) tempat dia bertemu Mohammad Roem, Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo serta tokoh utama JIB Haji Agus Salim. JIB yang didirikan pada tahun 1925 ini merupakan sempalan dari Jong Java ketika kongres organisasi tersebut tidak menyetujui penyelenggaraan kursus pengajian Islam. Jong Java merupakan sebuah organisasi yang dekat dengan orang Jawa. Pada tahun 1936, Burhanuddin diangkat sebagai ketua dari JIB cabang Yogyakarta.

Setelah tiga tahun menempuh pendidikan AMS, Burhanuddin melanjutkan pendidikannya ke *Rechtshogeschool* atau sekolah tinggi hukum di Batavia pada tahun 1938. Para periode ini Burhanuddin juga masuk dan aktif dalam SIS (*Studenten Islam Studieclub*) perkumpulan mahasiswa Indonesia yang tertarik pada isu-isu keislaman. Pada tahun 1939, Burhanuddin menjadi sekretaris dari SIS. SIS merupakan sebuah perkumpulan mahasiswa Islam modernis merupakan bagian dari pergerakan Islam sosialis di Indonesia. SIS ini banyak dipengaruhi oleh ide-ide Islam sosialis dari India, khususnya dari Mushir Hosein Kidwei, yang bukunya berjudul *Islam dan Sosialisme* dipakai oleh HOS Tjokroaminoto dalam terbitannya yang berjudul sama. Pengaruh Tjokroaminoto dan ide sosialismenya sangat kuat terhadap hampir semua pemikir utama Masyumi, termasuk Burhanuddin, Syafruddin Prawiranegara, Jusuf Wibisono, Mohammad Natsir, Mohammad Roem dan Sukiman Wirjosandjojo. Burhanuddin, Natsir dan Sukiman akan menjadi Perdana Menteri pada tahun 1950an dan Syafruddin dan Jusuf akan mendapat jabatan penting dalam hal ekonomi dan perbankan.[5] Burhanuddin juga tergabung dalam PPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) di Jakarta.[6] Islam modernis di Indonesia, khususnya pada tahun 1950an, akan memiliki wujud Islam kiri atau sosialis. Pemikiran ini dekat dengan pemikiran orang-orang PSI, seperti Sutan Sjahrir atau Sumitro Djojohadikusumo, yang berhaluan sosialisme Fabian atau sosialisme sampanye, yaitu sosialisme dari kalangan elit berpendidikan tinggi. Mereka simpatik terhadap ide-ide sosialis tetapi tetap berpegang teguh pada pandangan-pandangan elitis yang konservatif.

Kedatangan Jepang ke Indonesia menjadi babak baru dalam perjalanan hidupnya. Pasca kemenangan Jepang atas Belanda di Indonesia, segala bentuk pendidikan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Belanda dihapuskan. Kebijakan inilah yang memaksa Burhanuddin menghentikan aktivitas pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum. Pada tahun 1942, Burhanuddin diangkat menjadi jaksa di Jakarta. Meskipun Burhanuddin tidak bisa melanjutkan sekolah tingginya, ia dan beberapa mahasiswa lainnya yang berasal dari luar pulau Jawa berkumpul dalam suatu organisasi yang bertujuan membantu masalah keuangan mahasiswa yang berasal dari luar pulau Jawa.

Organisasi ini ia jalankan bersama dengan Chairul Saleh dan Sukarni. Mereka kemudian menyewa sebuah kost di daerah Cikini 71 untuk melihat kemungkinan melanjutkan sekolah tingginya kembali. Ketika Supomo diangkat oleh pemerintahan pendudukan Jepang di Jakarta menjadi Menteri Kehakiman, ia membuka kembali sekolah tinggi kehakiman. Burhanuddin memutuskan untuk melanjutkan sekolah hukumnya dengan menempuh kursus pendidikan kehakiman. Ia memulai karirnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada ini. Setelah kapitulasi Jepang dan pernyataan kemerdekaan, Burhanuddin bergabung dengan laskar dan berperan dalam peperangan gerilya menghadapi pasukan Belanda di daerah Yogyakarta. Ia menjadi anggota dari BP-KNIP pada tahun 1945. Pengangkatan Burhanuddin yang pada waktu itu merupakan seorang bujangan berusia 29 tahun dalam BP-KNIP adalah atas permintaan Sukiman Wirjosandjojo[7], seorang tokoh Masyumi yang sudah dikenalnya semenjak periode kolonial. Pada Maret 1946, KNIP terpaksa pindah dari Jakarta ke Purworejo sebagai bagian dari perpindahan pemerintahan RI ke Jawa Tengah. Ia terkenal sebagai seorang yang gigih dalam memperjuangkan prinsip-prinsipnya guna mendorong kepentingan umat. Ketika Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, yang tidak disukai oleh kalangan Masyumi dan politikus Muslim lainnya karena berasal dari golongan kiri, menandatangani perjanjian Renville, Burhanuddin dan politisi PNI Sarmidi Mangunsarkoro mendatanginya dan memintanya mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri.[8] Pada tahun 1947, Burhanuddin mengundurkan diri dari BP-KNIP sebagai bentuk penolakan atas penandatanganan perjanjian Linggajati oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir.

Setelah keluar dari BP-KNIP, Burhanuddin lalu diangkat sebagai Wakil Ketua dari Kantor Pemilihan Pusat (KPP) mewakili Partai Masyumi.[9] Oleh karenanya, Burhanuddin sudah memiliki pengalaman berhadapan dengan permasalahan pemilu jauh sebelum ia menjadi Perdana Menteri pada tahun 1955. Selain aktif di KPP, ia juga kembali aktif di Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan juga menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat Masyumi. Ketika Belanda melakukan Agresi Militer Kedua pada bulan Desember 1948, Burhanuddin terpaksa mengungsi. Ia bertemu dengan tokoh-tokoh Masyumi cabang Yogyakarta seperti Zaini Dahlan, Wahid Muhari, dan Sirad, dan bersembunyi di rumah ayah Sirad, seorang lurah di Sidorejo, Godean bernama Haji Abdullah. Rumah Haji Abdullah ini menjadi salah satu markas Angkatan Perang Sabil dan Hizbullah Sabilllilah.[10]

Disini pula Burhanuddin bertemu dengan Siti Badriyah, puteri kesembilan dari Haji Abdullah. Siti Badriyah lahir pada 15 November 1928 atau beda sekitar 11 tahun dengan Burhanuddin yang lebih tua, ia mengenyam pendidikan di Volksschool Muhammadiyah atau Sekolah Ongko-Loro di Sidorejo selama tiga tahun. Ia lalu melanjutkan sekolahnya ke Vervolg School di Moyudan selama empat tahun. Semasa pendudukan Jepang Badriyah mengikuti pendidikan di Sekolah Keputerian di Godean selama satu tahun. Setelah penyerahan Jepang, ia diajak oleh kakaknya Zainuddin dan Hamdani untuk masuk dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia bagian puteri. Badriyah mengenang mengenai perkenalan pertama dengan Burhanuddin pada sebuah wawancara dengan

Badruzzaman Busyairi pada pertengahan tahun 1980an sebagai berikut: “Saya mengenal almarhum mulanya sebagai pemuda yang terasa angkuh. Tidak mau mengajak bicara dengan saya, dan tidak mau menegor sekalipun berpapasan di jalan. Sering terjadi, bila ketemu di jalan dengan saya, ia melengos, pura-pura tidak tahu. Malah kalau masih ada kemungkinan untuk membelok ke jalan lain, ia tidak segan-segan melakukannya, sekalipun saya tahu bahwa tindakannya itu sekedar untuk menghindar dari saya saja. Entahlah mengapa ia demikian?” Tetapi rasa canggung dari pemuda yang baru berusia tiga puluh tahun ini mencair selama delapan bulan pengungsiannya dalam rumah Haji Abdullah di Sidorejo. Pada Desember 1949, Burhanuddin Harahap dan Siti Badriyah melakukan upacara pernikahan yang sederhana, walaupun ada beberapa kalangan keluarga Siti Badriyah yang menolak pernikahan dengan seorang pemuda Sumatera. Tetapi pernikahan tersebut mendapat persetujuan dari Ayah Mertua, Haji Abdullah.[11]

Setelah ‘pengakuan kemerdekaan’ oleh Belanda kepada RIS pada akhir tahun 1949, Burhanuddin menjadi aktif dalam kegiatan sipil dan politik dengan menjadi anggota Parlemen RIS. Ia bersama Siti Badriyah menyewa rumah di Juminahan di Yogyakarta dan Burhanuddin terpaksa melakukan perjalanan bolak-balik Jakarta-Yogyakarta untuk menghadiri sesi parlemen.[12] Baru pada bulan Mei 1955 keluarganya pindah ke Jakarta untuk menempati rumah di Jalan Yogya. Menurut Siti Badriyah, dari sejak awal Burhanuddin menghabiskan sebagian besar waktunya untuk masyarakat dan umat: “Sebab sejak pernikahan dulu, sudah terlatih ditinggal Bapak lama.”[13] Meski demikian Siti Badriyah tetap setia mendampingi suaminya; ketika PRRI pecah dan Burhanuddin memasuki hutan belantara Sumatera, Badriyah beserta anaknya menyusul Burhanuddin ke Palembang. Burhanuddin menjemputnya di lapangan terbang Talang Betutu dan membawa keluarganya untuk mengungsi di rumah Ibu Sarkowi pada akhir tahun 1950an.

Burhanuddin melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1951.[14] Pada tahun yang sama, ia diangkat sebagai ketua Fraksi dari partai Masyumi dan anak pertamanya, Johan Arifin, lahir di Yogyakarta. Bisa dikatakan bahwa Burhanuddin mengawal karir politiknya semenjak bergabung dalam Jong Islamieten Bond di Yogyakarta pada tahun 1936, tetapi posisinya sebagai anggota Parlemen semenjak terbentuknya Parlemen RIS merupakan awal dari karirnya dalam parlemen. Bisa dikatakan, Burhanuddin merupakan seorang anggota parlemen sejati. Sepanjang awal karirnya di KNIP sampai dengan pengunduran dirinya dari MPR semenjak diberlakukannya Konsepsi Presiden Sukarno pada tahun 1957, maka Burhanuddin hampir selalu duduk dalam kursi parlemen, kadang sebagai anggota, Perdana Menteri ataupun ketua fraksi partai Masyumi. Di Parlemen RIS, ia bekerja-sama dengan Natsir dan anggota parlemen lainnya mewujudkan Mosi Integral yang menyatukan kembali RIS menjadi negara kesatuan Republik Indoneisa.

KARIR AWAL POLITIK PARLEMENTER

Sebelum karir Burhanuddin sebagai pimpinan Partai Masyumi, ia merupakan seorang yang sudah punya posisi dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini sama dengan pemuka Masyumi lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara ataupun Mohammad Natsir yang sudah punya karir di pemerintahan sebelum memasuki karir politik pada tahun 1950an.[15] Burhanuddin mendapatkan jabatan penting dalam partai Masyumi sejak tahun 1952 dengan terdaftar sebagai anggota pengurus pusat di partai Masyumi beserta Syarifuddin Prawiranegara dan Mohammad Roem di bawah pimpinan Mohammad Natsir. Pimpinan Masyumi mengalami pergeseran jika dibandingkan pada awal pendiriannya di tahun 1945 dengan awal kemerdekaan pada tahun 1950an. Alasan mengapa terjadi pergeseran tersebut terdapat pada Sutan Sjahrir, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Sjahrir cenderung menarik pengikutnya untuk menjadi anggota Kabinet ataupun Pemerintahannya. Orang seperti Burhanuddin, Syafruddin dan Natsir merupakan golongan intelektual Muslim yang memiliki simpati terhadap pendekatan sosialis Sjahrir. Sementara itu pimpinan Masyumi lainnya seperti Abikusno Tjokrosujoso, Sukiman Wirjosandjojo ataupun Kyai Haji Wachid Hasyim cenderung dilupakan oleh Sjahrir. Golongan yang dekat dengan Sjahrir ini dikenal sebagai grup sosialis agamis Masyumi. Bahkan, Burhanuddin Harahap baru menjadi anggota Masyumi setelah lebih dahulu menjadi anggota dari BP KNIP setelah anjuran dari Sukiman Wirjosandjojo.[16] Keaktifannya dalam SIS pada masa mudanya menandakan status elitnya dan Harahap memang tidak memiliki hubungan apapun dengan organisasi massal Muslim.

Sejak tahun 1952 sampai 1956, Burhanuddin menjadi anggota pusat partai Masyumi.[17] Semenjak Kabinet Wilopo, Burhanuddin merupakan ketua fraksi Masyumi di Parlemen. Karir awal Parlemennya dimulai pada awal Kabinet Wilopo (April 1952–Juli 1953). Bersama dengan Prawoto Mangkusasmito dan Sidik Djojosukarto dari Fraksi PNI sebagai formatur kabinet Wilopo, Burhanuddin sama-sama menggarap kisi-kisi program Pemerintah. Sebagai anggota parlemen, ia terkenal sebagai orang yang memiliki posisi moderat, bahkan kadang berseberangan dengan posisi-posisi yang lebih radikal yang dipegang oleh beberapa orang di Masyumi seperti Mohammad Natsir. Ini terlihat dalam diskusi seputar perjanjian aliansi militer Amerika atau *Mutual Security Agreement* yang menyebabkan jatuhnya kabinet Wilopo pada tahun 1952. Walaupun Burhanuddin beranggapan bahwa penandatangan MSA harus dihormati karena perjanjian ini telah ditandatangani negara, ia tetap menekankan pentingnya netralitas dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Hal ini berbeda, contohnya, dengan sosok seperti Jusuf Wibisono menginginkan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih tegas menekankan aliansi dengan Amerika Serikat daripada dengan Uni Soviet dengan alasan bahwa nilai Pancasila lebih dekat nilai-nilai yang dianut Amerika daripada nilai-nilai yang dianut Uni Soviet.[18]

Dari awal, perhatian Burhanuddin banyak yang tersita pada manajemen pemerintahan. Pada pernyataan di Parlemen di awal Kabinet Wilopo, Burhanuddin menekankan pentingnya koordinasi antar-departemen serta penciptaan disiplin terhadap pegawai negeri. Ia juga mendukung otonomi daerah yang lebih kuat serta menekankan pentingnya penyederhanaan organisasi negara. Banyak tokoh Masyumi

Presiden Sukarno menunjuk Burhanuddin Harahap S.H. sebagai kabinet formateur pada tanggal 8 Juli 1953.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Presiden Sukarno menunjuk Burhanuddin Harahap S.H. sebagai kabinet formateur pada tanggal 8 Juli 1953.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

yang dekat dengan tokoh militer daerah yang, dalam banyak hal, punya kesamaan dalam visi, kebijakan serta ideologi. Militer daerah, khususnya yang berada di luar Jawa, punya rasa curiga terhadap Komunisme dan PKI. Banyak dari mereka juga simpatik dengan politik Islam. Kebijakan otonomi daerah berkaitan dengan penguatan daerah, khususnya daerah luar Jawa, agar posisi mereka dengan Jakarta bisa lebih berimbang. Basis suara Masyumi pun terletak di luar Jawa, khususnya di Sumatera dan bagian-bagian tertentu pulau Sulawesi dan Jawa, mengikuti kawasan-kawasan Islam modern seperti di Sumatera Barat. Sebagian dari tokoh-tokoh utama Masyumi pun merupakan orang-orang muslim Sumatera, seperti Mohammad Natsir dan KH Muhammad Isa Ansyari dari Padang, walaupun ada orang-orang Jawa seperti Sukiman Wirjosandjojo dan Jusuf Wibisono.

Karir politik Burhanuddin semakin menanjak pada masa setelah kejatuhan Kabinet Perdana Menteri Wilopo. Periode antara kejatuhan PM Wilopo dan pengangkatan Kabinet Ali adalah krisis kabinet pertama Indonesia. Selama tiga bulan dari April sampai akhir Juli 1953, Indonesia tidak memiliki pemerintahan. Posisi Burhanuddin sebagai sosok yang relatif netral dan dianggap tidak ambisius menjadi keuntungan bagi dirinya. Pada awalnya Mukarto Notowidigdo, yang merupakan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Wilopo dan anggota partai PNI, ditunjuk oleh Presiden Sukarno untuk membentuk kabinet. Mukarto menempatkan satu orang Masyumi, Jusuf Wibisono dalam kabinetnya, tetapi hal ini ditentang oleh Masyumi. Presiden Sukarno menginginkan sebuah kabinet bersatu dengan melibatkan PNI dan Masyumi. Sukarno menunjuk kembali Mukarto sebagai formatur tetapi gagal kembali karena Masyumi menolak usulan Perdana Menteri dalam formasi Mukarto. Menurut Ali Sastroamidjojo, alasan utama penolakan Masyumi terhadap formasi Mukarto adalah karena kedekatannya dengan dan dukungan dari PKI. Dalam kaitan ini, peristiwa Tanjung Morawa yang merupakan salah satu peristiwa awal dari usaha Reforma Agraria menjadi bagian dari alasan penolakan ini. Tanjung Morawa merupakan lahan yang dihuni oleh petani 'liar' dari Tiongkok dengan dukungan dan perlindungan organisasi petani PKI, BTI. Usaha pemerintah untuk merelokasi petani-petani ini mengakibatkan bentrokkan dengan korban jiwa. Peristiwa ini mengakibatkan kejatuhan Kabinet Wilopo. Masyumi melihat peristiwa ini sebagai perlawanan orang asing terhadap pemerintahan yang sah dengan dukungan oleh pihak Komunis. Mengingat salah satu pendukung utama Masyumi adalah ulama dari Sumatera yang juga pemilik lahan, peristiwa Tanjung Morawa dengan keterlibatan dengan orang-orang Tionghoa asing serta kaum Komunis menjadi posisi prinsipil ideologis.[19] Posisi ini tidak diambil oleh PNI sehingga menyulitkan proses pembentukkan formatur pemerintah.

Untuk menghindari *stalemate*, pada bulan Juli 1953 Sukarno meminta Masyumi untuk menunjuk formatur kabinet. Dewan Eksekutif Masyumi meminta Burhanuddin, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai ketua Fraksi Masyumi di Parlemen, sebagai formatur. Burhanuddin mengingat proses pengangkatan ini sebagai sebuah proses yang amat rumit dari Dewan Pimpinan Partai Masyumi di

rumah Faqih Usman. Ketika ada keputusan rapat untuk mengangkatnya sebagai formatur, ia kaget dan berkeberatan, khususnya karena usianya yang muda yaitu 36 tahun. Dalam formasi yang dibentuk oleh Burhanuddin, Jusuf Wibisono, mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Sukiman (April 1951–April 1952), akan diangkat sebagai Perdana Menteri dari Masyumi sementara Ali Sastroamidjojo akan diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri dari Fraksi PNI.[20]

Sebuah artikel di surat kabar *Pemandangan* menyatakan bahwa Burhanuddin merupakan pilihan yang paling baik karena ia tidak ambisius dan sehingga tidak akan memikirkan kepentingan dirinya. Sementara surat kabar Merdeka berkata bahwa posisi Burhanuddin netral dan bukan bagian dari klik Natsir ataupun Sukiman. Ia juga dikatakan sebagai seorang yang jujur dan berniat baik.[21] Tetapi pada akhir Juli, Burhanuddin terpaksa menghadap Sukarno untuk menyerahkan kembali mandat sebagai formatur di Istana Negara Bogor karena sulitnya perundingan dengan PNI dalam membentuk pemerintahan.[22] Ia mengatakan bahwa "Bung Karno tampak kaget melihat saya begitu cepat menyerahkan mandatnya. Ia minta supaya saya mau melanjutkan perundingannya dengan PNI. Tapi saya menangkap di balik kata-katanya itu Bung Karno tidak memperlihatkan kesungguhannya untuk membantu saya dalam meyakinkan PNI. Dari itu, mandat tetap saya kembalikan."[23]

Menurut formatur PNI, S. Hadikusumo, permasalahan utama penolakan PNI menjadi bagian dari Kabinet karena adanya perbedaan pandangan soal urusan Reforma Agraria di Sumatera Timur atau peristiwa Tanjung Morawa, permasalahan sumber minyak di Sumatera Utara, serta kebijakan luar negeri antara Moskow dan San Francisco yang berkaitan dengan penandatangan *Mutual Security Act* dengan Amerika Serikat.[24] Tampak bahwa permasalahan-permasalahan utama yang tidak bisa dijembatani ini bersifat ideologis dan menyangkut posisi Indonesia dalam Perang Dingin. Penandatanganan MSA oleh Perdana Menteri Sukiman di San Fransisco merupakan pernyataan akan ketidak-netralan Republik dalam Perang Dingin. MSA diiming-imingi bantuan militer serta perjanjian perlindungan keamanan dibawah militer AS. Jatuhnya pemerintahan Sukiman yang didominasi oleh Masyumi menandakan perpecahan yang mendalam antara Sayap Kanan–Masyumi dan PSI yang cenderung pro-Amerika–dengan Sayap Kiri Parlemen–PNI serta partai-partai kiri, kadang termasuk PKI, yang mendorong pendirian netralitas yang didukung oleh Sukarno. Selain permasalahan kebijakan luar negeri, perbedaan signifikan lainnya adalah kecendrungan Masyumi untuk berpihak kepada kelompok-kelompok ningrat dan ulama yang cenderung merupakan kelompok pemilik lahan di Indonesia. PNI punya pendirian yang ambivalen dalam hal ini, tetapi ada kecendrungan dari kalangan mereka untuk menyokong petani tak berlahan dalam menyelesaikan permasalahan Reforma Agraria. Dalam hal ini, PNI sering mendapat dukungan PKI serta partai-partai kiri *fringe* lainnya. Permasalahan Reforma Agraria menjadi isu yang sangat sensitif khususnya di Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara). Di wilayah ini golongan aristokrat dan ulama Sumatera pro-Masyumi berhadapan langsung dengan petani dan buruh tani dari Jawa yang pro-PNI.

Perpecahan antara PNI dan Masyumi juga terwujud dalam perbedaan posisi partai terhadap TNI. Masyumi mendukung posisi dari Kepala Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution; seorang Batak dari Sumatera yang memiliki kepercayaan Islam kuat dengan pandangan profesional dan aspirasi memodernkan TNI. Nasution juga merupakan salah satu pendukung utama doktrin territorial TNI yang memberi otonomi lebih terhadap pimpinan militer daerah dan sehingga membatasi kontrol Jakarta. Otonomi ini memungkinkan perwujudan kebijakan agraria di daerah, khususnya Sumatera, yang lebih kondusif terhadap keinginan Masyumi. Kedekatan pimpinan militer terhadap elit sipil daerah di Sumatera mendukung kebijakan territorial dan posisi Nasution dalam militer. Kedekatan pimpinan-pimpinan militer daerah, khususnya daerah militer di Sumatera terhadap partai dan tokoh Masyumi inilah yang memungkinkan mereka beserta PSI melancarkan pemberontakan PRRI di Sumatera pada akhir tahun 1950an. Oleh karenanya, salah satu mosi pertama yang diajukan oleh Burhanuddin sebagai ketua Fraksi Masyumi pada masa Pemerintahan Ali Sastroamidjojo Pertama adalah permintaan penarikan Peraturan Pemerintah no. 35 yang berimplikasi pada pemberian sanksi terhadap mereka yang terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober 1952, saat Nasution mengerahkan tentara TNI untuk mengarahkan moncong senjata mereka ke Istana Negara dengan harapan meyakinkan Sukarno untuk membubarkan Parlemen dan mengangkat diri sebagai diktator dengan dukungan TNI. PP no. 35 akan menempatkan militer dibawah Kementerian Pertahanan dan sehingga mengurangi otonomi dari TNI, yang semenjak Revolusi Kemerdekaan beroperasi seolah di luar negara.

Pada Desember 1954, pengurus Masyumi baru dilantik dengan Mohammad Natsir kembali menjadi Ketua Umum dengan didampingi dua wakil ketua; Sukiman Wirjosandjojo dan Kasman Singodimedjo. Burhanuddin Harahap menjadi anggota dari pengurus baru tersebut, beserta Mohammad Roem, Jusuf Wibisono, Prawoto Mangkusasmito, dan Sjafruddin Prawiranegara. Burhanuddin merupakan seorang yang relatif masih muda pada waktu itu. Ia juga orang yang tidak terlibat dalam perseturan antara klik Mohammad Natsir dan Sukiman Wirjosandjojo, walaupun ia cukup dekat secara pribadi dengan Mohammad Natsir.[25] Kejatuhan Kabinet Wilopo yang merupakan Kabinet Bersama antara PNI dan Masyumi serta pengangkatan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang merupakan kabinet PNI tanpa Masyumi dan PSI menandakan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan parlemen menjelang pertengahan tahun 1950an. Kabinet Ali merupakan kabinet koalisi yang melibatkan banyak partai tetapi memiliki oposisi yang cukup berat dalam koalisi Masyumi-PSI. Partai yang paling diuntungkan dalam struktur parlemen macam ini adalah PKI yang bisa mendorong konsesi dari PM Ali karena lemahnya pemerintahannya vis-a-vis oposisi. PKI seolah dianggap sebagai sekutu dari pemerintah dan hal ini meninggikan prestis mereka. Menguatnya PKI mengkhawatirkan Angkatan Darat yang semenjak Revolusi

Kemerdekaan dan pemberontakan PKI di Madiun memiliki kecurigaan terhadap kaum Komunis.

Kejatuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo Pertama pada bulan Oktober/November 1954 kembali menarik Indonesia ke dalam krisis politik. Di bawah Pemerintahan Ali, perekonomian Indonesia mengalami pelambatan dengan terjadinya peningkatan inflasi. Banyak kritik diajukan kepada Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Menteri Ekonomi, serta bagaimana kebijakan ekonomi pemerintahan Ali ini menunjukkan unsur-unsur korupsi. Contohnya Menteri Keuangan Ong Eng Die dari PNI yang mengarahkan kredit kepada Bank Umum Nasional tempat ia menjadi salah satu pemilik saham. Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro mengakui di media massa bahwa korupsi meningkat setiap waktu, bahkan Menteri Urusan Sosial, Panji Suroso, mengusulkan bahwa ibukota harus dipindah dari Jakarta untuk menghindari dari korupsi. Kedua orang ini berasal dari PIR, koalisi utama PNI dalam Kabinet Ali Wongso. Pengunduran tiga menteri PIR inilah yang akan memulai jatuhnya Kabinet Ali.[26] Meningkatnya korupsi serta menguatnya Komunis ini meluruhkan kepercayaan banyak orang terhadap demokrasi parlementer Indonesia, khususnya opsir-opsir TNI. Ada rasa ketidak-percayaan akan efektivitas pemerintah dalam demokrasi. Rendahnya rasa percaya rakyat Indonesia terhadap sistem parlemen ini merupakan krisis moral otoritas terbesar yang harus dihadapi oleh pemerintahan baru.

Setelah kejatuhan Ali Sastroamidjojo, Wakil Presiden Mohammad Hatta menunjuk Burhanuddin sebagai formatur. Hatta memanfaatkan kenyataan bahwa Sukarno sedang berada di luar negeri untuk menunjuk formatur Masyumi.[27] Sukarno tidak terlalu antusias dalam mendukung pemerintahan yang didominasi oleh Masyumi, sehingga dalam hal ini, kabinet Harahap merupakan sebuah *fait accomply* yang telah dilakukan oleh Hatta. Menurut penuturan dari Burhanuddin:

"Tidak banyak mukaddimahnya seingat saya, Bung Hatta langsung saja bertanya pada saya yang maksudnya, bagaimana kalau saya tunjuk saudara sebagai formatur… Karena Bung Hatta bertanya straight-to-the-point, bertanya bersedia atau tidak, maka karena mental saya memang tidak siap, saya puntidak bisas lain daripada menjawab belum siap. Alasan saya situasinya terlalu sulit, terutama dari segi pertahanan dan keamanan dan tidak kurang pula dari segi situasi perekonomian".[28]

Hatta lalu bertanya siapa yang bisa menjadi formatur, dan Burhanuddin mengusulkan Sukiman. Hatta lalu mengangkat Sukiman Wirjosandjojo dengan Wilopo dari PNI dan Assaat yang merupakan orang non-partai tetapi dekat dengan PSI. Tetapi ketiga orang ini gagal dalam menyepakati pemerintah baru. Ketika Sukiman, Wilopo dan Assaat mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta, maka Hatta kembali menunjuk Burhanuddin sebagai formatur. Burhanuddin mulai menyusun pemerintah sejak 3 Agustus 1955. Pada awalnya, Burhanuddin ingin melibatkan PNI yang menunjuk Mr.

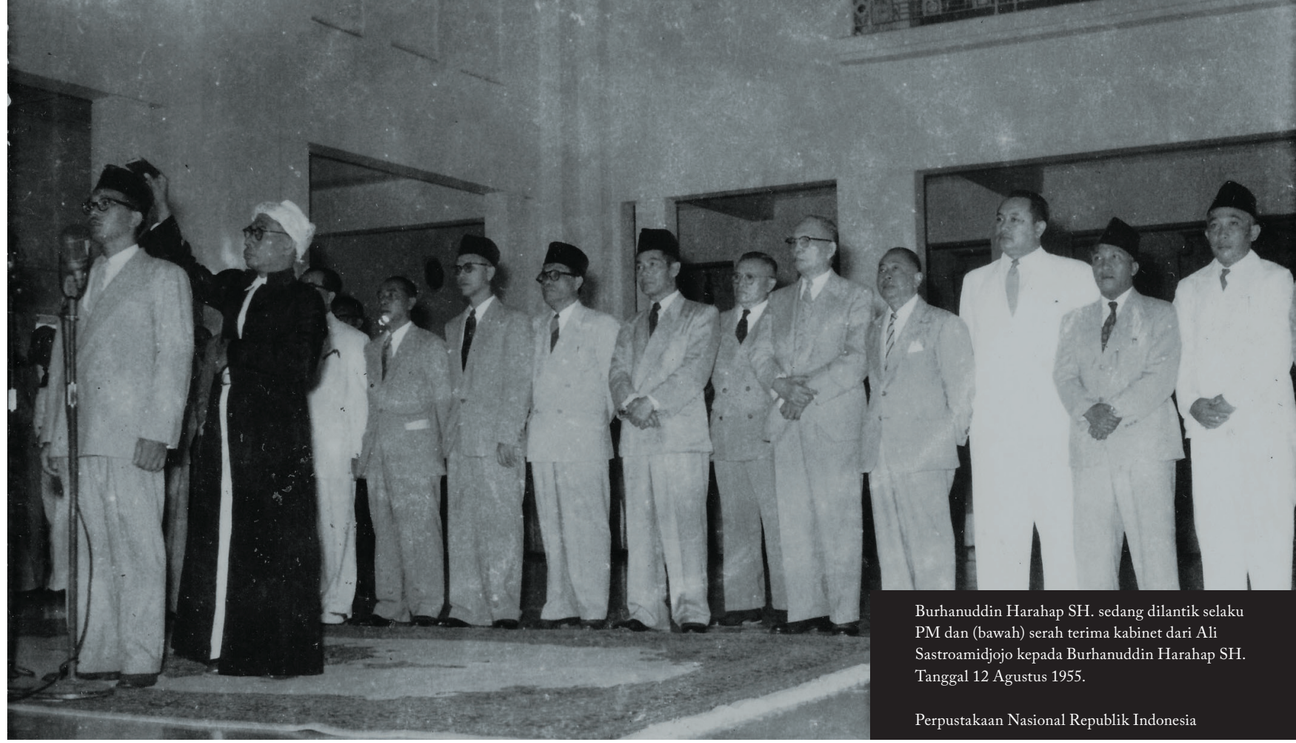

Burhanuddin Harahap SH. sedang dilantik selaku PM dan (bawah) serah terima kabinet dari Ali Sastroamidjojo kepada Burhanuddin Harahap SH. Tanggal 12 Agustus 1955.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Hardi, seorang tokoh muda PNI yang juga anggota SIS pada zaman kolonial, sama seperti Burhanuddin. Tetapi hal ini tidak diterima oleh Masyumi karena perkataan Hardi dalam pidato yang dianggap menyinggung umat Islam. Setelah sekitar seminggu, Burhanuddin berhasil membentuk sebuah koalisi yang tidak melibatkan PNI. Komposisi pemerintahan ini disetujui oleh Hatta pada 11 Agustus 1955.

KABINET PERDANA MENTERI BURHANUDDIN HARAHAP

Setelah melakukan konsolidasi dukungan partai politik, pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap secara resmi dilantik oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 12 Agustus 1955 setelah sehari sebelumnya secara resmi melalui Keputusan Wakil Presiden tanggal 11 Agustus 1955 No. 141 tahun 1955 kabinet pimpinan Burhanuddin Harahap disahkan serta diumumkan. Dalam pelantikannya tanggal 12 Agustus 1955, Burhanuddin Harahap menyatakan bahwa pemerintahannya didukung oleh 12 Partai politik serta 1 orang perseorangan yang akan menjalankan program kerja mereka.[29] Pada tanggal 7 Agustus 1955 sejak pukul 4 sore hingga 10 malam pembahasan komposisi kabinet dilakukan.[30] Dalam usaha menciptakan kabinet yang bersatu dan stabil, Burhanuddin menekankan niatnya untuk memberi kursi kepada semua partai yang menjadi bagian dari koalisinya. Koalisi Burhanuddin yang terdiri atas 12 partai yang tidak hanya mencakup partai-partai sayap kanan tetapi juga meliputi partai-partai sayap kiri, seperti Partai Buruh. Partai-partai yang berpisah dari Masyumi seperti NU dan PSII juga ikut dalam pemerintahan. Koalisi Burhanuddin juga didukung oleh partai-partai tengah, khususnya partai PRI yang merupakan partai kaum birokrat Jawa. Tetapi Burhanuddin

Anggota Kabinet Burhanuddin Harahap.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

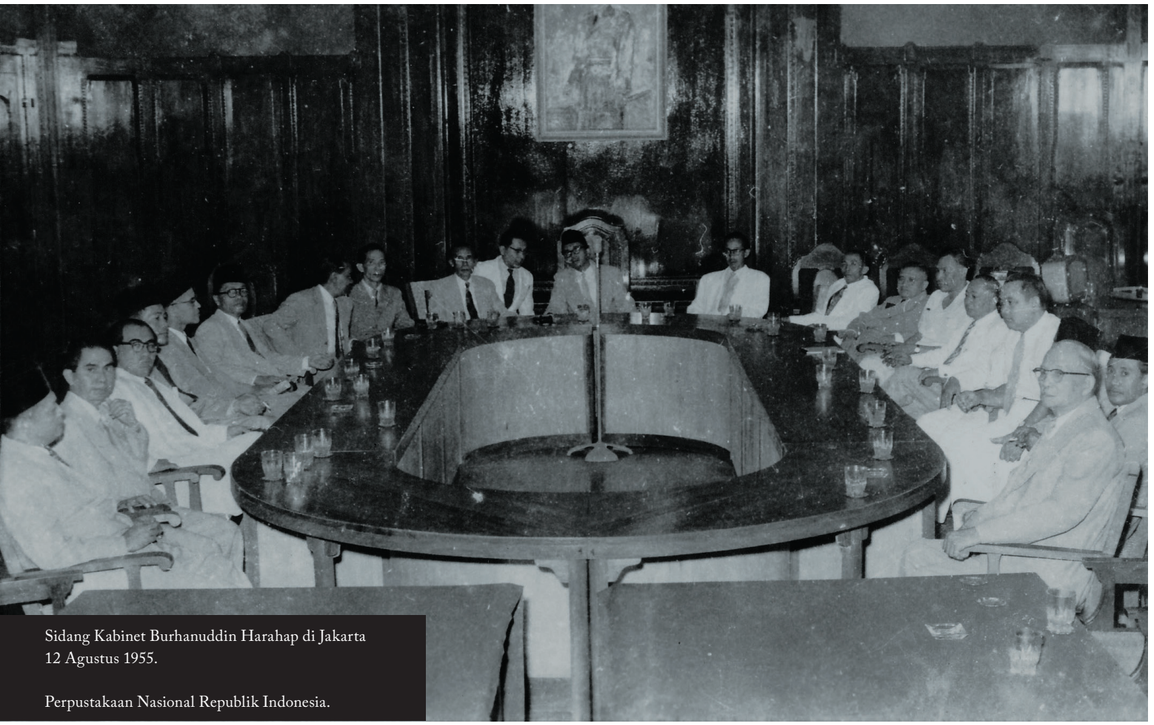

Sidang Kabinet Burhanuddin Harahap di Jakarta 12 Agustus 1955.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

gagal untuk meyakinkan PNI menjadi bagian dari koalisi. PNI menempatkan dirinya sebagai oposisi pemerintah. Sementara itu PKI terus-menerus berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi.

Kabinet Burhanuddin ini merupakan kabinet pertama Indonesia yang tidak jatuh akibat mosi tidak percaya. Kabinet ini cukup kuat karena mendapat dukungan dari Wakil Presiden Mohammad Hatta dan TNI, walaupun Presiden Sukarno tidak terlalu simpatik terhadapnya. Kabinet ini juga kuat karena adanya batas waktu pemerintahan mengurangi keinginan partai oposisi untuk menjatuhkannya.[31] Walaupun kabinet ini dianggap sebagai kabinet demisioner dengan waktu akhir yang jelas, yang menakjubkan dari Kabinet Burhanuddin adalah ambisinya dalam membawa perubahan-perubahan signifikan dalam permasalahan Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan kabinet demisioner yang paling sukses dalam sejarah Indonesia; menangani hal-hal berat dari kondisi ekonomi, korupsi sampai penyelenggaraan pemilu dan memulai proses hubungan antar-selatan yang berkulminasi dalam bentuk penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung.

Ada tujuh program kabinet yaitu; mengembalikan kewibawaan moril pemerintahan, melaksanakan pemilihan umum, menyelesaikan undang-undang desentralisasi, menghilangkan faktor penyebab inflasi, meneruskan perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat, serta mengembangkan politik kerja-sama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif.[32] Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelesaikan beberapa dari program awal yang telah dirancangnya. Ada beberapa program yang sulit untuk bisa diwujudkan, termasuk masalah penurunan inflasi yang cukup tinggi, serta soal pengurangan korupsi. Walau begitu, di antara kabinet-kabinet lain, tak dapat dipungkiri bahwa Kabinet Burhanuddin ini termasuk yang paling sukses dalam menyelenggarakan programnya.

Kabinet ini juga merupakan kabinet tes dari kalangan profesional yang banyak bercokol di partai-partai kanan seperti Masyumi dan PSI. Hal ini tercermin dari pengangkatan Sumitro Djojohadikusumo dari PSI sebagai Menteri Keuangan. Sumitro Djojohadikusumo merupakan mantan menteri keuangan pada Kabinet Wilopo dan menteri perdagangan dan industri dari Kabinet Natsir. Mr. Lukman Wiriadinata dari PSI diangkat sebagai Menteri Kehakiman serta Dr. J. Leimena dari Parkindo sebagai Menteri Kesehatan. Menteri Luar Negeri dipilih seorang diplomat karir yang juga merupakan perwakilan Parkindo, Anak Agung Gde Agung. Koalisi ini melibatkan partai-partai dalam seluruh spektrum politik Indonesia. Memang Masyumi menolak partai-partai kiri, seperti PKI, tetapi partai nasionalis kiri tetap dilibatkan. PNI mendapatkan satu kursi yang diisi oleh Ir. Laoh sebagai Menteri Perhubungan, sementara itu ada dua Menteri dari Partai Buruh, yaitu Asrarudin sebagai Menteri Muda Perhubungan dan I. Tedjakusuma sebagai Menteri Buruh. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa Kabinet ini berat pada partai-partai kanan, termasuk partai agama seperti Partai Katolik, dengan IJ Kasimo menjadi Menteri Keuangan, dan Parkindo, dengan J. Leimena menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Danu Ismadi dari

PIR menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Pertama sementara itu Harsono Tjokroaminoto dari PSII menjabat sebagai Perdana Menteri Kedua. Selain Danu Ismadi, Sjamsudin St. Makmur sebagai Menteri Penerangan dan Cumala Noor sebagai Menteri tanpa Portofolio adalah sumbangan PIR lainnya. Mr. Gunawan dari PRN menjadi Menteri Pertanian sementara itu dari NU; Mr. Sunarjo menjadi Menteri Dalam Negeri dan KH Ilyas menjadi Menteri Agama. Burhanuddin selain menjadi Perdana Menteri juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Terakhir Sutomo dari PRI juga diangkat sebagai Menteri tanpa portofolio.[33]

Pelantikan Kabinet Burhanuddin dirayakan bersamaan dengan hari ulang tahun Wakil Presiden Mohammad Hatta yang ke-53. Usaha mengembalikan otoritas moral pemerintah di mata publik serta mata tentara ini esensial. Suara-suara anti-partai dan anti-parlemen yang datang dari militer pada periode ini menjadi semakin sinis melihat ketidakmampuan politisi untuk menjalankan negara dengan benar. Oleh karenanya, kebijakan Burhanuddin ini mencakup sebenarnya tes terhadap penerimaan sistem Demokrasi Parlementer oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah demisioner ini akan diakhiri dengan penyelenggaraan pemilu demokratis pertama Indonesia dan inipun sebenarnya bagian dari tes tersebut. Memulihkan kepercayaan tentara dan masyarakat kepada pemerintah menjadi PR besar kabinet Burhanuddin. Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan oleh Mohammad Hatta bahwa pemerintahan Burhanuddin harus mampu merekonsiliasi hubungan dengan tentara melalui kepercayaan yang dibangun. Tak dapat dipungkiri bahwa pilihan-pilihan Burhanuddin dalam banyak hal menyudutkan PNI. PNI tidak hanya mendapatkan posisi minoritas yang terbatas dalam pembentukkan pemerintahan, tetapi Burhanuddin menyokong pengangkatan AH Nasution, yang anti-PKI dan memiliki hubungan dingin dengan PNI, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.[34] Selain itu, banyak orang-orang PNI yang duduk dalam birokrasi dicopot olehnya. Dalam hal ini Burhanuddin sejalan dengan Mohammad Hatta dan menyatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya menganggap tentara sebagai satu kejelekan, tetapi sebagai alat yang bisa dipergunakan serta diambil manfaatnya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.[35] Kedekatan Burhanuddin dengan TNI memungkinkan pemerintahannya menyelesaikan lebih banyak hal daripada yang seharusnya, mengingat betapa singkatnya pemerintahannya berjalan.

PENEKANAN INFLASI DAN STABILISASI EKONOMI

Masyumi merupakan partai pro-investasi asing dan dianggap pro-Barat. Dalam perdebatan terkenal antara Syafruddin Prawiranegara, salah satu ahli ekonomi paling terkemuka dari Masyumi, dengan Dr. Sumitro Djojohadikusumo, ekonom paling cemerlang Indonesia dari PSI, Syafruddin terkenal membela investasi Barat sebagai sesuatu yang harus didukung selama Indonesia sendiri belum mampu untuk mendirikan ekonomi yang mandiri.[36] Menurut Emil Salim, hanya dibawah Kabinet Burhanuddinlah kebijakan ekonomi rasional yang efektif dijalankan semasa Demokrasi Parlementer, termasuk di dalamnya usaha pengurangan defisit anggaran

Presiden menerima kunjungan P.M. Mr. Burhanuddin Harahap dan para Anggota Kabinet.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

negara, penghapusan serangkaian sistem sertifikasi impor, penghentian diskriminasi terhadap pengusaha Tionghoa dan serangkaian kebijakan ekonomi untuk mencapai mekanisme harga yang lebih rasional berdasarkan pasar. Alasan utamanya adalah peran-serta Sumitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Keuangan. [37] Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan kabinet Ali Sastroamidjojo dibawah Menteri Keuangan Iskaq Tjokroadisurjo yang memilih kebijakan ekonomi nasionalis yang radikal.[38]

Di bawah Burhanuddin, kebijakan pro-investasi ini dilanjutkan. Ketua Umum PKI, D.N. Aidit, menuduh kabinet Burhanuddin sebagai sebuah Kabinet Komprador yang mereka bergantung pada kapitalis asing.[39] Tetapi dari sudut pandang Masyumi, bentuk kebijakan Lisensi Impor-lah atau yang dikenal oleh kalangan umum dengan nama Ali-Baba yang mendominasi kebijakan nasionalis Kabinet Ali Pertama-lah yang telah menimbulkan kondisi buruk dalam perekonomian. Kebijakan ini dianggapnya merebakkan korupsi dan kaum importir-aktentas, orang yang menggunakan lisensi impor Program Benteng untuk bekerja-sama dengan pengusaha Tionghoa untuk berpura-pura menjalankan bisnis yang sebenarnya dijalankan oleh pengusaha Tionghoa tersebut.[40] Burhanuddin mengatakan bahwa dalam sistim ini

"Benih-benih kekuatan pengusaha nasional seakan-akan menjadi tersingkir dan harus memberi tempat kepada orang-orang parasit yang menamakan dirinya sebagai pengusaha nasional, tapi… merupakan alat dan kaki tangan modal besar".[41]

Kebijakan awal kabinet Burhanuddin adalah mendekati Belanda dan berteman dengan mereka

guna memulai kembali hubungan kerjasama ekonomi dengan Barat. Hubungan dengan Barat telah meluruh di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Burhanuddin bahkan tidak mengangkat masalah Irian Barat pada Sidang Umum PBB tahun 1955. Tapi Belanda tetap bersikap bermusuhan dengan Indonesia. Di saat yang lain ada banyak tuduhan dalam negeri bahwa pemerintahannya terlalu mengiba pada Barat.[42] Pada akhirnya, kondisi-kondisi ini menyebabkan Burhanuddin menggeser haluan dan menjadi bersikap anti-Belanda. Hal ini nanti berakhir dengan pemutusan Uni-Indonesia-Belanda.

Semenjak ambruknya ekspor Indonesia pada tahun 1952 yang diakibatkan oleh karena berhentinya Perang Korea, maka inflasi meningkat dengan pesat. Hal ini dikarenakan defisit impor yang dibayar lewat pencetakan uang rupiah. Edaran uang rupiah yang meningkat ini mengakibatkan penurunan nilai rupiah dan sehingga menyebabkan defisit. Kondisi ini semakin parah pada tahun 1953 ketika nilai ekspor Indonesia tambah menurun pada saat harga komoditas ekspor Indonesia juga menurun dipasaran dunia. Defisit ini meningkat dan pemerintah terpaksa mengurangi impor barang dari luar secara signifikan. Pengurangan impor ini menyebabkan pelambatan perekonomian, khususnya karena banyak barang impor ini dibutuhkan untuk industri dan manufaktur dalam negeri. Situasi ekonomi pada tahun 1955 menunjukkan perbaikan dari kondisi ini. Ekspor meningkat dan bahkan mencapai surplus, terjadi pengurangan defisit dalam neraca berjalan negara dan indeks harga beras stabil, yaitu menunjukkan bahwa inflasi mulai terkendali. Hal ini disebabkan karena meningkatnya nilai impor dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pengurangan uang rupiah.[43] Tak dapat dipungkiri bahwa kebijakan-kebijakan Kabinet Harahap telah menunjukkan potensi ekonomi Indonesia untuk tumbuh dibawah kebijakan yang pro-pasar dan pro-investasi asing, tapi kebijakan ini tidak akan diteruskan oleh kabinet Ali Kedua ataupun oleh Kabinet Karya di bawah PM Djuanda Kartawidjaja dan Negara Demokrasi Terpimpin Sukarno.

PEMBERANTASAN KORUPSI

Mungkin salah satu sumbangsih yang paling signifikan sebagai hasil dari pemerintahan Kabinet Burhanuddin terletak pada usaha pemberantasan korupsi. Kejatuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo Pertama diakibatkan antara lain, karena skandal korupsi yang melibatkan Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo, Iskaq Tjokroadisurjo serta beragam fihak pada dalam Kabinet Ali. Masyumi mengeluarkan pamflet yang menyerang pemerintahan Ali sebagai pemerintah paling korup hanya setelah beberapa bulan pemerintahan itu berjalan. Ada tuduhan bahwa bentuk penangkapan terhadap menteri-menteri PNI ini merupakan tindakan balas dendam yang dilakukan oleh PM Burhanuddin Harahap. Ia menyanggah tuduhan tersebut.[44] Sebagai reaksi atas tuduhan tersebut, Ali Sastroamidjojo memerintah Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Sirajuddin Abbas untuk memulai pembuatan kisi-kisi hukum dan lembaga guna menangani permasalahan korupsi. Abbas membentuk sebuah komisi yang mengkategorisasikan korupsi ke dalam 59 jenis.

Draf Undang Undang Anti-Korupsi Abbas telah berhasil diselesaikan pada bulan Juni 1955, tetapi tidak pernah disahkan sebelum kejatuhan Kabinet Ali Pertama tersebut. Pemberantasan korupsi dijalankan pemerintah Burhanuddin sebagai upaya mengembalikan kembali kepercayaan serta kewibawaan pemerintah di depan masyarakat, dan tentara yang selama ini menganggap pemerintahan parlementer terlalu lemah.[45]

Dalam pernyataan-pernyataan publik, Burhanuddin mendorong peperangan melawan korupsi dan bertindak tanpa pandang bulu. Hal ini diperkuat dengan kebijakan Menteri Keuangan Sumitro dalam memberantas korupsi dengan langkah melakukan audit secara umum kepada semua kementerian dan penyelidikan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat kementerian.[46] Burhanuddin juga merencanakan Undang-Undang Anti-Korupsi dan Undang-Undang Darurat Anti-Korupsi.[47] Rancangan Undang-Undang Anti-Korupsi ini membagi usaha pemberantasan korupsi dalam dua bagian, yang pertama adalah tindakan peradilan dalam peradilan biasa, sementara bagian kedua mengatur tindakan luar pengadilan lewat pendirian sebuah Biro Penilik Harta Benda.[48] Kabinet Burhanuddin membentuk sebuah komisi *ad-hoc* guna meneruskan kerja yang telah dilakukan oleh Sirajuddin Abbas dan meminta Kementerian Hukum di bawah Menteri Lukman Wiriadinata untuk mengarahkan perkembangan ini. Komisi ini diketuai oleh Menteri Pertama Djanu Ismail dan melibatkan Kementerian Keuangan, Urusan Ekonomi dan Menteri Negara Abdul Hakim dan Supomo. Undang-undang Anti-Korupsi yang dihasilkan oleh komisi ini mengharuskan aparatur sipil negara untuk membeberkan harta dan kekayaan serta mendirikan pengadilan khusus untuk menangani kasus korupsi serta sebuah badan yang bertugas untuk melakukan investigasi kekayaan pribadi. Pengadilan khusus ini didirikan di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar dan dalam kasus besar ditangani oleh beberapa hakim kolegial. Pada akhir bulan Juli 1955, Kabinet Burhanuddin mengarahkan Corps Polisi Militer (CPM) untuk melakukan penanganan dan penangkapan orang-orang berprofil tinggi.

Pada bulan Agustus, beberapa orang ditangkap termasuk di antaranya Mr. Djody Gondokusuma, mantan Menteri Kehakiman, beserta sekretarisnya bernama Subagio, Dr. Ong Eng Die, mantan Menteri Keuangan serta Mohammad Yamin, mantan Menteri Pendidikan dan Budaya. Semua orang ini adalah menteri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo Pertama dan adalah anggota atau orang yang memiliki kedekatan dengan PNI dan fraksi nasionalis kiri. Mereka menjadi tahanan rumah dalam kaitan dengan korupsi yang melibatkan lembaga impor dan devisa negara. Penggunaan CPM atau polisi militer dipakai dengan asumsi bahwa militer lebih obyektif dan netral dibandingkan dengan Kepolisian Republik. Hal ini menandakan asumsi masyarakat mengenai tentara yang belum dikotori oleh korupsi dan degradasi moral.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Burhanuddin bertujuan untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia. Burhanuddin menilai bahwa sangat perlu untuk mengambil tindakan terhadap korupsi yang telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah terhadap Negara

PEROLEHAN SUARA PEMILU 29 SEPTEMBER 1955

PARTAI	SUARA SAH	% SUARA SAH	KURSI PARLEMEN	%KURSI PARLEMEN
PNI	8.434.653	22,3	57	22,2
Masyumi	7.903.886	20.9	57	22,2
NU	6.955.141	18,4	45	17.5
PKI	6.176.914	16,4	39	15,2
PSII	1.091.160	2,9	8	3,1
Parkindo	1.003.325	2,6	8	3,1
Partai Katholik	770.740	2,0	6	2,3
PSI	753.191	2,0	5	1,9
Murba	199.588	0,5	2	0,8
Lain-lain	4.496.701	12,0	30	11,7
Jumlah	37.785.299	100,0	257	100,0

Sumber M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*

Indonesia. Maka dari itu untuk memerangi korupsi, harus ada upaya kerja sama yang terjadi antara penegak keadilan yakni TNI, Jaksa Agung, dan Polisi.[49] Jusuf Wibisono menuduh cara penanganan Ali Sastroamidjojo dan Burhanuddin Harahap berbeda dalam kasus-kasus korupsi. Menurutnya, jika seorang anggota Masyumi ditangkap dengan tuduhan korupsi, kabinet Masyumi tetap memberikan bantuan hukum sebagai bagian dari pembelaan kasus hukum yang sedang dijalankan, tetapi tidak melakukan intervensi berlebih. Menurut Jusuf, Burhanuddin akan menyerahkan seluruh kasusnya kepada Jaksa Agung dan lembaga pengadilan. Hal ini merupakan kritikan Masyumi bahwa PNI dan orang-orang nasionalis kiri tidak bermain sesuai aturan, sementara Masyumi berjalan dalam koridor hukum. Jusuf mencontohkan perlakuan pemerintah Ali Sastroamidjojo yang melakukan intervensi terhadap kasus Djody Gondokusumo, menteri Kehakiman yang berasal dari PNI.[50]

Kritikan terhadap korupsi Ali Sastroamidjojo ini merupakan serangan yang paling signifikan terhadap pemerintahannya. Ada anggapan banyak kalangan bahwa kasus-kasus korupsi pemerintahan Ali telah meluruhkan kepercayaan masyarakat terhadap partai dan Demokrasi Parlementer.

C.P.M melakukan kerja sama dengan Jaksa Agung Soeprapto dan melakukan perbuatan yang amat berani pada waktu itu, yaitu menangkap Djody Gondokusumo dengan segala konflik yang terjadi antara PRN, PNI, Pemuda Nasional dengan tentara dan kabinet Burhanuddin. Semenjak peristiwa tersebut, C.P.M menjadi salah satu elemen penting dalam pemberantasan korupsi karena dinilai mempunyai sisi obyektifitas, dan netralitas yang tinggi. Menurut Jusuf Wibisono, C.P.M merupakan lembaga yang sulit dipolitisasi, sedangkan polisi, dan kejaksaaan kadang-kadang berafiliasi dengan partai politik seperti Masyumi, PRN, PNI. Sehingga jika pemerintah menaruh harapan kepada polisi atau kejaksaan saja maka mereka tidak akan bertindak tegas dalam memberantas korupsi.[51]

Pada akhir Kabinet Burhanuddin, 16 orang telah ditangkap atau ditahan rumah dengan tuduhan melakukan korupsi, termasuk diantaranya dua pejabat polisi, tujuh pejabat sipil dan tiga warga partikelir. Mantan Menteri Urusan Perekonomian Iskaq Tjokroadisurjo yang merupakan pejabat PNI dibawah Kabinet Ali Sastroamidjojo tidak ditangkap walaupun terlibat dalam kasus impor dan devisa karena sedang berada di Belanda.[52] Iskaq baru kembali ke Indonesia setelah naiknya Kabinet Ali Sastroamidjojo Kedua. Mr. Djody Gondokusumo mendapatkan hukuman kurung selama satu tahun, tetapi dibebaskan setelah enam bulan di penjara karena diberi grasi oleh Presiden Sukarno.[53]

Usaha Burhanuddin ini terbatas karena tingginya oposisi di Parlemen serta Istana Negara dalam penerapan UU tersebut. Kegagalan meloloskan UU Anti-Korupsi ini juga menandakan permasalahan sistem Parlementer, setidaknya dimata banyak kalangan rakyat serta TNI. Kegagalan UU Anti-Korupsi PM Burhanuddin diakibatkan oleh karena rasa takut dari partai-partai oposisi, khususnya PNI, tetapi juga partai pengusung seperti NU dan PSII bahwa UU ini menempatkan kekuatan yang terlalu besar terhadap Perdana Menteri. Mr. Sunarjo, Menteri Dalam Negeri dari Partai NU, ini dengan terbuka mengatakan bahwa walaupun dia secara pribadi mendukung UU ini, tetapi dia harus berkonsultasi dulu dengan partainya.[54] Dengan UU ini, maka Perdana Menteri mendapatkan kekuasaan untuk memenjarakan oposisi, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Republik dan yang memiliki potensi penyalah-gunaan yang signifikan jika dibawah seorang Perdana Menteri yang tidak benar. Sebelum UU itu dapat berlaku, Presiden Sukarno harus menandatanganinya. Tetapi Sukarno menginginkan agar ada UU itu dibahas dalam Panitya Mufakat Parlemen. Pada awalnya Burhanuddin mencoba untuk mengubah pandangan Sukarno agar bisa ditandatangani, tetapi akhirnya dikirim untuk dibahas oleh Parlemen pada 8 November 1955. Kenyataan bahwa pembahasan UU ini terlalu berlarut-larut, maka PM Burhanuddin memutuskan untuk menghentikan pengejarannya karena pentingnya untuk fokus pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 1955.

Kabinet Ali Sastroamidjojo meneruskan usaha untuk menggolkan UU Anti Korupsi dengan memerintahkan Menteri Kehakiman Moeljatno yang mengusulkan agar meniadakan rencana pembentukkan Pengadilan Korupsi dan mengembalikkan kasus korupsi ke Pengadilan Kriminil Khusus. Pengadilan ini dapat menangani kasus korupsi militer sekaligus sipil. Moeljatno juga mengusulkan pembentukkan Badan Koordinasi Penelitian Hak Milik. Tetapi yang paling kontroversial dari usulan Moeljatno adalah agar Mahkamah Agung dan kepolisian ditempatkan di bawah Kementerian Kehakiman. Usulan ini mendapatkan kecaman dari beragam pihak. Kegagalan menggolkan UU Anti-Korupsi ini membuka kesempatan nanti kepada TNI untuk menerbitkan sendiri serangkaian aturan anti-korupsi setelah diberlakukannya UU

Darurat Militer setelah kejatuhan Kabinet Ali Sastroamidjojo Kedua pada bulan April 1957.[55]

PEMILU PERTAMA INDONESIA TAHUN 1955

Pada masa demokrasi parlementer, ada setidaknya tiga kabinet yang mencanangkan pemilu, yakni kabinet Wilopo, Ali Sastroamidjojo, serta Burhanuddin.[56] Wilopo memulai mencanangkan pemilu setelah kabinet sebelumnya yakni Natsir dan Sukiman gagal menyelenggarakan pemilu karena tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu sebagai payung hukum pelaksanaan pemilu. Hingga kemudian pemerintah Wilopo berhasil melahirkan UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilu yang memperkuat UUDS 1950 sebagai titik awal pelaksanaan pemilu di Indonesia.[57]

Di antara semua partai yang paling mendorong penyelenggaraan pemilu adalah partai Masyumi. Kabinet Natsir menempatkan penyelenggaraan pemilu secepatnya sebagai bagian dari tujuh poin pemerintahannya, sementara itu Sukiman juga telah mendorong secara signifikan usaha penyelesaian UU Pemilu. Burhanuddin bukan seorang yang baru dalam hal urusan pemilu karena posisinya sebagai Wakil Kepala Kantor Urusan Pemilu pada masa Revolusi Kemerdekaan. Alasan utama mengapa Masyumi sangat entusias untuk menyelenggarakan pemilu terletak pada kepercayaan para elit partai bahwa Masyumi memiliki dukungan yang paling besar di antara partai-partai lain dalam parlemen. Burhanuddin dikutip oleh surat kabar Pakistan menyatakan perkiraannya bahwa Masyumi akan memenangkan 40-50 persen dari total suara hanya beberapa saat sebelum penyelenggaraan pemilu tahun 1955.[58] Dalam sebuah artikel yang terbit pada November 1954, Burhanuddin mengkritik kelompok-kelompok dalam Parlemen yang keberadaannya tidak didukung oleh suara rakyat ataupun organisasi sosial.[59] Burhanuddin juga percaya bahwa menunda pemilu berbahaya mengingat semakin menguatnya popularitas PKI yang mengancam suara Masyumi.[60] Sementara itu partai-partai sekuler nasional cenderung mencoba menghindari atau memperlambat penyelenggaraan pemilu karena alasan yang sama; kekhawatiran mereka bahwa partai Islam akan mendominasi pemerintahan pasca-pemilu. Pemimpin PIR, A.R. Djokoprawiro bahkan menyatakan keinginannya untuk menunda pemilu agar dukungan rakyat terhadap Pancasila dapat diperkuat dahulu. Panitia Pemilihan Umum yang anggotanya didominasi oleh partai-partai nasionalis cenderung juga memperlambat proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini menjelaskan mengapa walaupun UU no. 7 tentang pemilu sudah diratifikasi parlemen pada tahun 1953, dibutuhkan waktu 2 tahun ketika pemilu pertama diselenggarakan dan dibawah Kabinet Burhanuddin yang Masyumi.[61]

UUDS 1950 yang mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950 merupakan Undang-Undang perubahan dari konstitusi RIS. UUDS 1950 terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. Penyelenggaraan pemilu tahun 1955 sendiri terdapat dalam pasal 35 UUDS 1950 yang menjelaskan bahwa pemilihan umum harus dilakukan dengan cara yang jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu penyelenggara harus bersikap adil dan tidak memihak serta berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan harus bersifat umum dan berkesamaan, yang berarti semua warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan pemilu mempunyai hak pilih yang bersifat rahasia (tidak diketahui oleh siapapun). Mengenai sistem pemilu yang berlaku pada tahun 1955 ialah sistem proporsional. Sistem ini memiliki pengertian bahwa jumlah anggota DPR dan Konstituante ditetapkan berdasarkan imbangan penduduk, tiap daerah pemilihan memilih lebih dari seorang wakil, penetapan jumlah kursi yang akan diperoleh tiap peserta pemilu seimbang dengan besarnya dukungan pemilih yang diimplementasikan dari jumlah suara yang diperoleh.[62] Pemilu ini diselenggarakan dua kali, yakni pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih konstituante.

Pelaksanaan Pemilu 1955 dirancang untuk memungkinkan partisipasi sebanyak mungkin orang-orang Indonesia dalam demokrasi. Semua orang dapat mengajukan diri sebagai calon independen tanpa dukungan partai, jika ia berhasil mendapatkan dukungan tanda-tangan yang cukup. Para pemilih juga diperbolehkan menulis calon yang mereka inginkan dalam daftar partai yang tersedia pada kertas pilihan. Calon juga tidak ditarik biaya dan hanya wajib menyetorkan tanda-tangan pendukung. Terakhir, untuk menjawab permasalahan ketidak-seimbangan suara antara Jawa dengan pulau-pulau Luar Jawa, maka dibentuk 15 distrik pemilihan, suatu sistem yang ditinggalkan pada pemilu-pemilu demokratis Indonesia pasca-Orde Baru.[63] Usia pemilih diturunkan dari usia 18 ke 16 tahun atas usulan PKI yang merasa bahwa dukungan dari pemuda lebih kuat untuknya. Sementara itu, mereka yang punya catatan kriminil juga diperbolehkan untuk memilih agar orang-orang yang terlibat dalam Darul Islam ataupun simpatisan PKI yang ditangkap semasa Kabinet Sukiman dapat tetap memilih. Strategi ini dilaksanakan untuk memaksimalkan suara umat Muslim dalam pemilihan agar dapat menyokong kemenangan buat Masyumi.[64] Tetapi hal tersebut juga menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan Kabinet Harahap terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak warga negara untuk berpartisipasi di dalamnya.

Pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komite pemilihan (panitia pemilihan) yang sifatnya independen. Pada pemilu 1955 terdapat panitia pemilihan di ibukota yang ditunjuk langsung oleh Presiden dengan nama Panitia Pemilihan Indonesia. Menteri Kehakiman menunjuk Panitia Pemilihan daerah atau provinsi. Pada level kabupaten, Menteri Dalam Negeri menunjuk Panitia Pemilihan Kabupaten. Untuk wilayah yang lebih kecil seperti kecamatan terdapat Panitia Pemungutan Suara, dan Panitia Pendaftar Pemilih untuk tingkat desa. Meskipun otoritas penunjukan ketua dan anggota panitia pemilih secara langsung berada di tangan eksekutif, namun pada kenyataan di lapangan, panitia pemilih bekerja secara independen tanpa paksaan memenangkan partai politik yang berkuasa.[65]

M.C. Ricklefs menyatakan bahwa jumlah orang yang hadir dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR pada bulan September 1955 sangat banyak. Setidaknya lebih dari 39 juta orang memberikan hak suaranya. Walaupun banyak dari suara mereka diberikan atas paksaan para pemimpin keagamaan, kepala

desa, para pejabat, tuan tanah, atau atasan lainnya. Bagaimanapun juga pemilu tahun 1955 merupakan satu tonggak sejarah baru bagi kelangsungan demokrasi Indonesia karena pemilihan umum tersebut menawarkan pilihan yang paling bebas di antara sederet partai-partai yang jumlahnya tidak dibatasi.[66]

Herbert Feith dalam buku *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia* menyatakan bahwa terdengar desas desus yang mengabarkan bahwa akan ada upaya penggagalan pemilu di Indonesia. Di beberapa tempat di pulau Jawa terdapat kabar yang menceritakan ada upaya menawarkan ramuan khusus untuk kekebalan tubuh. Hal ini terjadi karena ada beberapa cerita yang berkembang bahwa hampir semua daerah di pulau Jawa akan mengalami keracunan saat menjelang atau bahkan sesudah pemilihan umum anggota Parlemen.[67] Selain kabar tersebut, upaya menakut-nakuti masyarakat juga terjadi pada saat pemungutan suara. Banyak dari masyarakat yang percaya bahwa memilih adalah sebuah upaya untuk menghilangkan rasa takut dari ancaman mendapatkan hukuman, karena memilih adalah kewajiban. Feith juga menyatakan bahwa daerah yang terbebas dari desas-desus tersebut pemilih merasa takut dimarahi lurah dan pejabat desa lainnya kalau tidak datang memberikan suaranya. Ketakutan mereka jauh lebih bertambah ketika mereka percaya bahwa para pemimpin partai yang sudah mendatangi mereka dengan harapan meminta suara mereka akan memarahi penduduk yang tidak datang ke tempat pemungutan suara.[68] Beberapa tempat yang terindikasi melakukan pemaksaan pemilu terjadi di Aceh dan Jawa Barat oleh Masyumi, dan intimidasi yang dilakukan oleh lurah-lurah PNI serta para pembantunya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pada akhirnya, perolehan suara pemilu tahun 1955 menunjukkan empat partai yang memiliki jumlah kursi di parlemen lebih dari 8 kursi yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Ini merupakan partai-partai terbesar di Indonesia. Hasil pemilihan ini mengejutkan pimpinan Masyumi karena perkiraan bahwa pemilihan ini akan memperkuat legitimasi mereka atas pemerintahan serta menunjukkan ummat mereka sebagai pemilih demokratis Indonesia terbesar telah terpatahkan. Hal ini juga mengejutkan kaum administrator dan teknokrat, yang tergabung dalam PSI dan Masyumi. PSI mendapatkan suara yang amat sedikit dan sehingga posisi mereka di parlemen hampir terhapuskan. Harapan kaum administrator bahwa pemilu akan memperkuat koalisi Masyumi-PSI dan melegitimasi usaha-usaha pemerintahan Harahap untuk melanjutkan serangkaian reformasi dalam ekonomi dan hukum guna menjadi basis ekonomi yang kuat, serta mendorong penguatan posisi Islam dalam negara, tampak pupus sudah. Usaha Masyumi untuk menempatkan Islam sebagai basis negara dalam Dewan Konstituante tampak tergoyahkan. Sementara itu tampak pula di kalangan ekonom dan teknokrat yang sedang muncul bahwa proses demokrasi tidak memberikan mereka kondisi yang paling efisien untuk mendorong terjadinya pembangunan.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI–HUBUNGAN INDONESIA-BELANDA

Salah satu pengambilan kebijakan yang paling signifikan dalam hubungan luar negeri Indonesia terjadi justru pada saat Kabinet Burhanuddin Harahap; yaitu pemutusan hubungan Indonesian-Belanda yang tergabung dalam Uni-Indonesia Belanda yang disepakati pada saat Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949. Salah satu kebijakan luar negeri tersebut ialah mempertimbangkan kembali hubungan Indonesia-Belanda yang selama ini dinilai tidak menguntungkan bagi pihak Indonesia. Hubungan yang bertahan sejak pelaksanaan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 ini sejatinya ingin dihapuskan sejak masa kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, dan Ali Sastroamidjojo periode pertama. Bisa dikatakan secara tidak langsung upaya pembubaran hubungan ini dikarenakan Indonesia ingin menyatukan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secara geografis. Maka dari itu kebijakan pembubaran Indonesia-Belanda ini mendapatkan perhatian banyak dari perdana menteri sebelum Burhanuddin Harahap.

Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo, proses pembubaran Uni Indonesia-Belanda mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Menurut Mohammad Yamin, upaya untuk melepaskan perjanjian Indonesia-Belanda ini menjadi pertimbangan sejak tidak lancarnya perjanjian Uni Indonesia-Belanda pada tahun 1950. Salah satu alasan ketidak-lancaran Uni Indonesia-Belanda terletak pada ketidak-inginan Belanda untuk membuka diskusi yang berarti mengenai posisi Papua atau Irian Barat. Pada waktu itu, Papua masih ada di tangan Belanda dan Indonesia merasa bahwa Papua merupakan wilayah terakhirnya yang masih dijajah. Pada pertengahan tahun 1954 dilangsungkan konferensi yang dihadiri oleh Mr. Sunario perwakilan dari Indonesia serta Mr. Luns perwakilan dari Belanda untuk membahas kemungkinan pembubaran Uni Indonesia-Belanda di Den Haag. Pertemuan ini kemudian menghasilkan keputusan untuk mempertemukan kembali pejabat pemerintahan yang bertanggungjawab dari kedua negara untuk membahas hal-hal pembubaran Uni Indonesia-Belanda pada tahun-tahun berikutnya[69].

Perundingan tahun 1954 nyatanya dijadikan satu momentum oleh Ali Sastroamidjojo untuk kembali berjuang membubarkan Uni Indonesia-Belanda. Pada tahun 1955, di saat pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Ali Sastroamidjojo kembali mengungkit permasalahan Irian Barat antara Indonesia dan Belanda di depan peserta Konferensi Asia Afrika tersebut. Walaupun kehadiran peserta Konferensi Asia-Afrika tidak mewakili kepentingan PBB (karena tidak mencapai kuorum) akan tetapi peristiwa ini menjadi langkah positif yang nantinya akan dilanjutkan oleh Burhanuddin. Dalam salah satu sidang kabinet pada tanggal 14 dan 20 September 1955, kabinet Burhanuddin telah menyetujui adanya garis besar politik yang ditunjukkan kepada Belanda dan Australia yang berkaitan erat dengan Papua Barat. Langkah yang diambil kabinet Burhanuddin adalah menugaskan R. Oetoyo Ramelan Duta Besar Indonesia di Belanda sebagai delegasi awal ke Den Haag untuk menyiapkan perundingan-perundingan yang diperlukan. Delegasi ini berangkat pada tanggal 18 November 1955. Apabila Oetoyo sebagai delegasi awal berhasil menjalankan tugasnya untuk membuka jalan perundingan serta memeriksa apakah pemerintahan Belanda juga menginginkan konferensi tersebut, maka perundingan setingkat menteri akan segera dilakukan setelahnya. Perundingan setingkat menteri ini rencananya

akan membahas tiga hal utama. Pembubaran Uni Indonesia-Belanda, masalah hubungan ekonomi dan keuangan Indonesia-Belanda, dan yang terakhir ialah mengenai pembebasan wilayah Irian Barat.[70]

Pasca perundingan awal yang dilakukan oleh Oetoyo Ramlan, kabinet Burhanuddin segera mengadakan rapat kabinet untuk membahas keberangkatan menteri kabinet dalam rangka melanjutkan kembali perundingan yang telah dilakukan. Dalam sidang yang diadakan 6 Desember 1955 tersebut disepakati satu instruksi kepada perwakilan pemerintah Indonesia yang akan berangkat ke Den Haag. Salah satu instruksi yang disepakati ialah mengenai hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belanda yang dikenal sebagai perjanjian FINEC. Rapat sidang memutuskan untuk menghapuskan perjanjian kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Belanda yang selama ini dinilai merugikan pemerintah Indonesia. Hal ini dipertegas dengan kebijakan *statement of policy* mengenai penanaman modal asing di Indonesia harus melalui kementerian keuangan dan perekonomian yang terlebih dahulu disetujui oleh kabinet[71].

Di lain sisi, upaya untuk menghapuskan perjanjian Uni Indonesia-Belanda pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin menemui permasalahan dari koalisinya sendiri. Ketika partai Nahdlatul Ulama menarik diri dalam delegasi pemerintahan ke Belanda. Hal ini tentu saja mempengaruhi kondisi politik di Indonesia yang dianggap Belanda menjadi sebuah kelemahan dalam perundingan. Tetapi pemerintahan Burhanuddin tetap dengan keputusannya meminta Menteri Luar Negeri I Gde Agung Anak Agung, Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo, Menteri Perekonomian I.J. Kasimo, Menteri Kesehatan Dr. Leimena, Moh Roem dan Aroedji Kartawinata sebagai perwakilan perundingan Indonesia-Belanda di Den Haag. Rombongan ini direncanakan berangkat ke Belanda setidaknya pada tanggal 8 Desember 1955.

Dalam perundingan, pemerintah Belanda mengupayakan menyetujui point-point yang akan dibahas, tetapi tidak dengan persoalan Irian Barat. Pemerintah Belanda bahkan melalui Perdana Menteri Luns bertolak ke New York untuk menekan PBB agar tidak ikut campur dalam permasalahan Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Hal ini dilakukan pemerintah Belanda yang diwakili perdana menteri Luns karena pemerintah Belanda sadar bahwa pasca peristiwa Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Indonesia berada di atas angin mengenai Irian Barat karena mendapatkan dukungan dari Negara peserta Konferensi Asia-Afrika[72].

Pada tahun 1956, setelah masa-masa perundingan yang terjadi di Den Haag dan Jenewa, Swiss tidak mendapatkan hasil keputusan yang jelas bagi kedua belah pihak selama periode 1950-1956, Pemerintahan kabinet Burhanuddin menyatakan bahwa hubungan Indonesia-Belanda berakhir dengan sendirinya. Seperti yang ia ucapkan dalam pidato radio yang disiarkan secara langsung diseluruh jaringan radio di Indonesia.

Dalam pidatonya, Burhanuddin mengatakan bahwa kabinetnya ingin mengakhiri kebencian serta ketakutan antara kedua negara. Burhanuddin menilai bahwa hubungan yang seharusnya terjadi ialah hubungan bilateral yang tidak mengikat, melainkan hubungan yang lazimnya dilakukan oleh dunia internasional dengan menempatkan perwakilannya di masing-masing negara. Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan bahwa semua hubungan antar negara harus didasarkan kepada kebaikan dan perlakuan yang sama sebab Burhanuddin menilai bahwa selama ini Uni Indonesia-Belanda tidak berjalan dengan semestinya. Banyak perjanjian-perjanjian, terutama dalam perjanjian ekonomi menghambat laju perekonomian Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo. Sumitro menilai bahwa membatalkan perjanjian antara Indonesia dan Belanda tidak akan merugikan Indonesia, asalkan tindakan yang diambil kemudian dilaksanakan dengan benar. Sumitro juga menegaskan ia telah membuat rancangan untuk hal ini serta akan dibahas oleh dewan moneter, keuangan, dan ekonomi[73].

Berakhirnya Uni Indonesia-Belanda dengan sendirinya merupakan salah satu keberhasilan program kabinet Burhanuddin, meskipun dalam beberapa kesempatan perundingan untuk membahas persoalan Irian Barat menemui kebuntuan hingga pemerintahan Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno. Pembubaran Uni Indonesia-Belanda menjadi salah satu program kerja yang dinilai cukup berhasil dilakukan oleh kabinet Burhanuddin periode 1955-1956. Penghapusan Uni Indonesia-Belanda merupakan sebuah ironi dari mata banyak orang yang menganggap bahwa Kabinet Burhanuddin akan mengubah kebijakan-kebijakan Kabinet Ali yang anti-Belanda. Berakhirnya posisi khusus ini Belanda dalam ketata-negaraan Republik Indonesia ini merupakan pernyataan simbolis yang akan berakibat pada pengambil-alihan perusahaan Belanda secara sepihak pada tahun 1957 oleh serikat-buruh yang berafiliasi dengan PKI dan nasionalisasi oleh negara.[74]

BERAKHIRNYA KABINET BURHANUDDIN

Beberapa keberhasilan pemerintahan kabinet Burhanuddin antara lain dalam memperbaiki hubungan dengan Angkatan Darat yang selama pemerintahan Ali Sastroamidjojo telah merenggang. Pada masa Kabinet Burhanuddin, Angkatan Darat sendiri sedang mengalami transisi ke pimpinan baru setelah pengunduran diri Kol. Bambang Sugeng yang mundur akibat dari rasa ketidak-percayaannya terhadap niat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan Angkatan Darat. Jabatan tersebut diincar beberapa orang, termasuk Zulkifli Lubis dan A.H. Nasution, dua orang saingan berat dalam TNI. Kabinet Burhanuddin mendukung pengangkatan kembali A.H. Nasution sebagai Kepala Stafff Angkatan Darat (KSAD) dengan asumsi bahwa Nasution akan mendukung pemerintahan Masyumi. Nasution segera melaksanakan serangkaian *reshuffle* dalam Angkatan Darat guna memperkuat posisinya dalam pimpinan pucuk tentara. Nasution menuduh Lubis melakukan pembangkangan tetapi ia menghilang. Golongan kiri, termasuk PKI, menuduh Pemerintah Burhanuddin menyembunyikan Zulkifli Lubis, walaupun Burhanuddin mendukung pengangkatan Nasution.[75] Pemecatan Zulkifli Lubis, Maludin Simbolon dan lain-lain akan mendorong terjadinya pemberontakan PRRI dimana Burhanuddin beserta pemimpin Masyumi lainnya akan bergabung.

Jamuan makan yang diadakan oleh Presiden Sukarno untuk para Menteri Kabinet Burhanuddin Harahap demisoner pada tanggal 19 Maret 1956.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Walaupun Kabinet Burhanuddin mendukung Kolonel Nasution, termasuk dalam hal reshuffle TNI, hubungan pemerintah dengan tentara ini merenggang pula akibat lemahnya reaksi Kabinet terhadap gerakan separatis, khususnya DI/TII. Burhanuddin menolak pendekatan militer Ali Sastroamidjojo dan menyerukan penawaran amnesti bagi 'pemberontak. Sementara itu, Kasman Singodimedjo berkata bahwa DI/TII itu tidak pantas disebut sebagai musuh, melainkan anak bangsa yang nakal. Pernyataan-pernyataan tersebut tidak disukai tentara khususnya dalam Kodim Siliwangi di Jawa Barat yang sering bertempur dengan pasukan DI/TII.[76] Dengan kesepakatan antara Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Kolonel Zulkifli Lubis pada tahun 1955, maka serangkaian pendekatan politis dilaksanakan kepada DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan. Kabinet Burhanuddin juga memulai proses penetapan Aceh sebagai Provinsi mandiri dan terpisah dari Provinsi Sumatera Utara sebagai konsesi untuk meredam pemberontakan Daud Beureh walaupun hal ini akhirnya diresmikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II.[77]

Selain hal tersebut, kebijakan pembubaran Uni Indonesia-Belanda ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari Presiden Sukarno dan beberapa partai koalisi dalam kabinet. Perpecahan koalisi dalam kabinet ditandai dengan upaya penarikan menteri yang berasal dari partai Nahdlatul Ulama dan PSII. Sesuai dengan hasil pemilihan umum, maka PNI yang muncul sebagai partai terbesar parlemen merasa partainya yang paling berhak untuk menunjuk formatur. Burhanuddin meyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Sukarno pada tanggal 3 Maret 1956. Penyerahan ini dilakukan setelah Burhanuddin berhasil menyelesaikan pemilihan umum serta mengumumkan pembagian kursi di DPR pada tanggal 2 Maret 1956. Namun kabinet Burhanuddin masih melaksanakan tugasnya sampai terbentuk kabinet baru.[78]

Setelah disepakati bahwa kabinet selanjutnya akan dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo periode, maka peralihan kekuasaan dari Burhanuddin ke Ali jilid keddua terjadi di Gedung Pedjambon pada hari senin, 26 Maret 1956. Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin meminta kepada Ali Sastroamidjojo untuk tetap memperhatikan dua poin yang selama ini menjadi perhatian dari pemerintahan kabinet Burhanuddin. Pertama, perihal penghapusan Uni Indonesia Belanda yang secara formil sudah diselesaikan oleh Burhanuddin. Kedua, dalam hal pemulihan keamanan dalam negeri yang sudah menjadi persoalan lama sejak Indonesia merdeka.[79] Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan kabinet terakhir dalam periode demokrasi liberal Indonesia. Pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang ditandai dengan permasalahan ekonomi yang berlanjut serta serangkaian pemberontakkan luar Jawa semakin menurunkan kepercayaan rakyat dan TNI terhadap demokrasi. Meluruhnya posisi Masyumi dalam parlemen dianggap oleh banyak orang luar Jawa, khususnya orang dari Sumatera, sebagai hilangnya suara mereka di Parlemen. Oleh karenanya, dorongan pemberontakkan ataupun reformasi pusat ini semakin menguat dari luar Jawa. Kondisi ini akan diperparah pada tahun 1956, ketika Mohammad Hatta, yang dianggap banyak orang sebagai wakil luar Jawa dalam pemerintahan Sukarno, mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Kondisi ini, serta perasaan putus asa dari kalangan intelektual Masyumi dan PSI akan mendorong sebagian dari pemimpin-pemimpin partai ini untuk memberontak terhadap kekuasaan Sukarno di Jakarta.

PEMERINTAHAN REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA (PRRI)

PRRI bisa dikatakan merupakan perwujudan terhadap ketidak-puasan orang, khususnya mereka yang tinggal di luar Jawa, terhadap dominasi Jawa di Jakarta. Kegagalan Masyumi dalam Pemilu 1955 ini menandakan kepada orang-orang luar Jawa bahwa politik nasional akan didominasi oleh suara dari pulau Jawa yang cenderung mendukung partai-partai Nasionalis Kiri ataupun Islam tradisional. Perpecahan antara Jawa dan Luar Jawa bahkan menentukan dinamika respons Masyumi, partai yang sering digadang oleh oposisi sebagai penyebab 'pemberontakan' PRRI, dengan pimpinan Masyumi dari Jawa seperti Sukiman Wirjosandjojo dan Moehammad Roem untuk lebih lunak menghadapi perilaku Presiden Sukarno, sementara pimpinan yang berasal dari Luar Jawa, khususnya dari daerah Minangkabau, seperti Burhanuddin, Natsir dan Sjafruddin untuk lebih reaktif terhadap Presiden.[80] Kelemahan daerah luar Jawa diakibatkan karena jumlah penduduk yang timpang antara Jawa dan Luar Jawa. Masyumi, khususnya Mohammad Natsir telah mendorong reformasi sistem parlementer Indonesia dengan pembentukkan satu kamar dewan sehingga menjadi sistem bikameral dengan berdasarkan pemiliran teritorial, sehingga memperkuat posisi provinsi Luar Jawa atas jumlah numerik provinsi-provinsi Jawa.[81]

Sejarawan R.Z. Leiriza menyatakan bahwa penyebab pertama adalah kegagalan dalam sistem politik demokrasi parlementer. Terutama pada

masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo periode pertama (1954-1955) karena pada masa ini, ada upaya untuk melakukan *dropping* pegawai dari pusat ke daerah yang mengakibatkan ada sekelompok orang yang mencari peluang untuk meraih keuntungan material serta jabatan di pusat ataupun di daerah. Ini menunjukkan bahwa Ali Sastroamidjojo lebih memilih untuk memperkuat PNI sebagai sebuah partai ketimbang bangsa Indonesia. Perihal ini kemudian masih dibawa oleh kabinet Ali Sastroamidjojo periode kedua (1956-1957) hingga kemudian menimbulkan istilah sentralisme melalui system *dropping* pegawai tersebut. Persoalan inilah yang kemudian memicu semboyan otonomi yang semakin hari semakin populer di berbagai daerah di Indonesia. Gerakan otonomi ini menuntut agar daerah diberikan mengatur rumah tangganya sendiri baik dalam masalah administrasi maupun keuangan[82].

Keterlibatan tiga tokoh Masyumi ini bukan salah satu kebetulan. Kahin menilai bahwa sejak peroleh pemilu 1955 Masyumi merasa bahwa kekuatan politiknya sudah semakin menurun. Kekalahan Masyumi terhadap PNI di pemilu merupakan sebuah kejutan bagi elit Masyumi, termasuk Burhanuddin yang sudah merasa bahwa partainya akan menang dalam jumlah yang besar. Ditambah lagi, Nadhatul Ulama yang dianggapnya sebagai partai sempalan yang seharusnya mendapatkan suara kecil malah mendapatkan posisi ketiga. PKI sebagai partai ketiga terbesar juga amat mengkhawatirkan Masyumi karena semangat anti-Komunis yang kuat dikalangan partai ini.[83] Malah partai yang paling dekat dengan Masyumi, PSI mendapatkan suara yang sangat sedikit yaitu hanya 2 persen. Ini adalah awal dari bergesernya kepercayaan elit-elit Masumi terhadap demokrasi. Burhanuddin, Syafruddin dan Mohammad Natsir merupakan suara penentang utama dari tindakan-tindakan Sukarno yang anti-demokrasi. Partai Masyumi dan PSI dicap sebagai organisasi terlarang pada tahun 1960. Usaha pasca Sukarno untuk menghidupkan kembali Masyumi, termasuk dalam bentuk Partai Musyawarah Islam (Parmusi) yang gagal mendapatkan suara dan akhirnya beraliansi pada Golkar di tahun 1971, menyempitkan kesempatan elit Masyumi untuk mengambil jalan demokrasi.

Terjadi serangkaian peristiwa ditahun 1957 yang pada akhirnya mendorong tokoh-tokoh Masyumi, termasuk Burhanuddin, untuk 'hijrah' ke Padang. Pada Juni dan Agustus, pemilihan daerah dilangsungkan dimana PKI muncul sebagai pemenang terbesar dengan perolehan suara sebesar 27,4%. Pada 30 Oktober, sekelompok aktivis Muslim muda dari Bima melakukan percobaan pembununan terhadap Presiden Sukarno di Cikini. Nasution dan kepala Intel Kolonel Sukendro menuduh Kolonel Lubis, sekutu militer Masyumi di Sumatera, mendalangi percobaan pembunuhan itu.[84] Keberhasilan penangkapan pelaku ancaman pembunuhan Presiden di Cikini kurang dari 24 jam dinilai sebagai bagian dari rekayasa dari mereka yang anti gerakan daerah. Ditambah lagi dengan kejadian pengambil alihan perusahaan milik Belanda oleh PKI. Pada saat itu, tokoh Masyumi dan PSI serta Hatta sangat menentang tindakan yang dilakukan oleh PKI. Tindakan tokoh tersebut kemudian dijadikan alasan oleh PKI bahwa mereka adalah antek imperialism, pengkhianat, dan musuh Negara. Dilain pihak, Presiden Sukarno merasakan bahwa lambat laun PKI mendukung konsepsi pemerintahan yang digagas oleh Sukarno sementara tokoh Masyumi dan PSI menentang konsepsi tersebut. Perihal ini mengakibatkan terjadi terror terhadap tokoh yang menentang konsepsi Presiden sehingga mengakibatkan pergolakan daerah semakin besar karena menilai bahwa pemerintah pusat sudah sangat terpengaruh oleh PKI.[85]

Burhanuddin diintimidasi oleh pemuda-pemuda serta 'tukang pukul' kiri radikal. Hal ini terjadi karena Burhanuddin menolak konsepsi yang diajukan oleh Presiden Sukarno. Pada bulan Januari 1958, Presiden Sukarno pergi keluar negeri dalam perjalanan enam minggu. Sepanjang bulan itu, terjadi serangkaian pembicaraan antara orang Masyumi dengan pimpinan militer daerah Sumatera yang telah memberontak. Pada 10 Februari 1958, mereka mengeluarkan ultimatum menuntut penurunan pemerintahan Djuanda Kartawidjaja dan pembentukan kabinet baru dengan formatur Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX. Tuntutan tidak bisa dipenuhi Djuanda karena Presiden Sukarno masih dalam perjalanan luar negeri. Kedatangan Burhanuddin ke Palembang dimanfaatkan oleh Letkol Barlian untuk mengadakan pertemuan membahas politik di tanah air, konflik di Cikini, serta ancaman-ancaman yang diperoleh oleh beberapa tokoh yang menolak konsepsi Presiden Sukarno. Burhanuddin kemudian mengusulkan untuk menyertakan Sjafruddin yang juga berada di Palembang untuk ikut dalam pertemuan tersebut Setelah pertemuan tersebut, Burhanuddin beserta Letkol Barlian, dan Sjafruddin mendapat undangan dari Ketua Dewan Djambek untuk kemudian mengadakan pertemuan dengan tokoh militer dan sipil di Sungai Dareh.[86]

Sebelum pertemuan di Sungai Dareh, para tokoh militer dan sipil bertemu di Gubernuran Sumatera, tanggal 6 Januari 1958. Burhanuddin hadir dalam pertemuan tersebut bersamaan dengan Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Sumitro Djojohadikusumo, dan Isa Anshari dari kalangan sipil. Dalam pertemuan ini muncul ide untuk mendirikan Negara federal yang dianggap lebih cocok diterapkan di Indonesia, tetapi kemudian ide ini dibatalkan karena pendirian Negara federal merupakan wewenang dari Konstituante. Peningkatan intensitas perjuangan daerah menjadi pembicaraan yang menarik, karena para tokoh tersebut menyetujui bahwa tindakan presiden Sukarno yang menunjuk dirinya sebagai formatur hingga kemudian membentuk Kabinet Karya merupakan hal yang melanggar hukum karena melanggar demokrasi yang ditetapkan oleh UUDS 1950.[87]

Pertemuan selanjutnya diadakan di Sungai Dareh pada tanggal 9 Januari 1958 untuk membahas langkah mereka selanjutnya. Pertemuan ini diikuti oleh Burhanuddin, Sjafruddin, Natsir, dan Sumitro Djojohadikusumo menjadi tokoh sipil yang tergabung dalam pertemuan tersebut selain tokoh militer yang terdiri dari Letkol Ahmad Husein, Letkol Balian, Letkol Sumual, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, Kapten Sutarno, dan beberapa perwira lainnya yang diduga terlibat dala peristiwa ancaman pembunuhan terhadap Presiden Sukarno. Pertemuan di Sungai Dareh ini menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya ialah keputusan untuk mencari senjata ke luar negeri serta

mencoba kembali melakukan pendekatan kepada pusat yang bersimpati terhadap perjuangan daerah.[88]

Pertemuan demi pertemuan dilakukan oleh tokoh militer dan sipil yang tergabung dalam pergolakan daerah di Sumatera untuk mencapai kesepakatan dengan pusat tetapi hal tersebut tidak mendapat respon yang baik dari pemerintah. Hingga kemudian pada tanggal 13 Februari 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan menolak segala tuntutan yang diajukan pimpinan daerah (Padang) serta melakukan pemutusan hubungan darat, laut, dan udara dengan Sumatera Tengah. Pengumuman tersebut disertai dengan perintah penangkapan Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, Simbolon, dan Dahlan Djambek dan pembekuan terhadap Komando Daerah Militer Sumatera Tengah.[89] Pengumuman ini mendapat jawaban dari Letkol Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan dengan memberikan tenggat waktu hingga tanggal 15 Februari 1958 untuk melihat apakah pemerintah pusat masih bersikeras dengan pendiriannya. Hingga kemudian di tanggal 15 Februari 1958, berdirilah PRRI yang ditandatangani oleh Letkol Ahmad Husein. Pendirian PRRI kemudian disertai dengan pembentukan kabinet dengan melibatkan Sjafruddin sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Mohammad Natsir sebagai juru bicara, dan Burhanuddin sebagai Menteri Pertahanan merangkap Menteri Kehakiman.[90] Berkaitan dengan pendirian Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Burhanuddin mengatakan:

"…Supaya kabinet diganti dan diangkat pemerintahan yang berwibawa. Berulangkali kita menyuarakan itu, rupanya Jakarta marah. Maka dibomlah Padang. Pemboman itulah yang melahirkan PRRI. Sebetulnya PRRI, itu merupakan pemerintah tandingan, karena tidak mau mengakui kabinet Djuanda… saya mula-mula dicalonkan sebagai Menteri Dalam Negeri… Belum sempat dilantik, tahu-tahu kalangan militer sendiri merubahnya. Saya masuk menjadi Menteri Pertahanan, sedang Menteri Dalam Negei Djambek. Perubahan-perubahan itu pun saya tidak ikut berunding. Tidak diajak, kami lalu dilantik di rumah Gubernur. Maka dihantamlah berkali-kali dengan roket. Dan karena terus dibom, militer bertindak. Saya sendiri tidak berbuat banyak. Apalagi sekarang keadaanya perang. Militerlah yang berperang".[91]

Kekalahan PRRI Permesta dengan serangan TNI berakhir dengan penangkapan pimpinan-pimpinannya, termasuk orang-orang terkemuka Masyumi yang telah bergabung. Burhanuddin dan tokoh lain seperti Mohammad Natsir terpaksa mengungsi ke dalam hutan sebelum mereka menyerahkan diri kepada tentara Republik. Kekalahan ini menandakan berakhirnya karir politik Burhanuddin dan tokoh-tokoh lain.

KARIR PASCA-PRRI

Para tokoh yang terlibat pemberontakan PRRI di Sumatera mendapat amnesti dari Presiden Sukarno. Mereka kemudian "dikarantina" secara terpisah di beberapa tempat terpencil di pulau Jawa serta membatasi akses mereka dari pergaulan masyarakat luas. Mr. Sjafruddin ditempatkan di Gunung Muria, Mr. Assaat di daerah Kopeng, Natsir di Batu, dan Burhanuddin di Jatipohon. Jatipohon terletak sekitar 9 kilometer dari Grobogan, Jawa Tengah ke arah Utara dengan kontur jalanan yang mendaki melewati hutan jati yang lebat. Wilayah ini sangat sulit untuk diakses dengan kendaraan, kecuali pedati yang ditarik dengan sapi atau kerbau. Itupun dengan resiko menanggung kerusakan bagian As roda karena melalui jalanan berbatu.[92] Di Jatipohon, Burhanuddin ditempatkan di pesanggrahan milik Jawatan Kehutanan. Pesanggrahan tersebut terletak jauh dari rumah-rumah penduduk serta tempat ibadah. Satu-satunya gedung yang berada di dekat pesanggrahan ialah Sekolah Rakyat (SR). Burhanuddin tinggal bersama istri dan anaknya, Johan Arifin murid kelas empat SR.

Kehidupan Burhanuddin di Jatipohon jauh dari apa yang dijanjikan oleh Nasution sebelumnya. Akses dibatasi sampai desa saja, padahal Nasution menjanjikan akses sampai kecamatan. Pembatasan uang belanja sehari-hari, serta pembatasan pendidikan untuk anaknya pada akhirnya membuat Burhanuddin menyurati Nasution di Jakarta. Setelah lama tidak dibalas suratnya, Burhanuddin mengirim surat ke Pangdam Diponegoro di Semarang. Surat yang dikirim Burhanuddin ke Semarang menghasilkan pengiriman guru ke Jatipohon untuk pendidikan anaknya. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena Burhanuddin tidak tega membiarkan sang guru yang masih gadis berjalan sejauh 6 kilometer setiap hari melalu hutan jati yang rawan penyamun. Akibat dari persoalan tersebut, Johan Arifin mendapat izin untuk tinggal bersama neneknya di Sidorejo, Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya[93].

Setelah mengalami karantina di Jatipohon, Burhanuddin dipindahkan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jakarta. Pemindahan ini dilakukan setelah penanganan kasus Burhanuddin berpindah dari militer ke penanganan sipil yang ditetapkan di kejaksaan Semarang. Setelah proses perpindahan karantina tersebut, Burhanuddin dan istrinya (Badriyah) berpisah. Badriyah sendiri berangkat menuju Yogyakarta untuk mengurus anak mereka yang lebih dahulu tinggal bersama keluarganya di Yogyakarta. Di Rumah Tahanan Militer (RTM), Burhanuddin bertemu dengan rekan-rekan lain seperti Sumual, Husein, Mohammad Natsir, dan Simbolon. Mereka ditahan di RTM berdasarkan Perpres No.3 / 1962 yang berisi sebagai berikut;

"Guna pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi berdasarkan petunjuk Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, Menteri/Jaksa Agung berwenang untuk menunjuk bagi orang terhadap siapa terdapat petunjuk-petunjuk bahwa ia akan mengganggu usaha mencapai tujuan revolusi, suatu tempat tertentu sebagai tempat berdiam sementara dan membawanya ke situ atau melarang untuk sementara orang tersebut bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagai suatu daerah tertentu dalam wilayah Indonesia".[94]

Selama masa penahanan di RTM, Burhanuddin bersama kelompok PRRI menghadapi persoalan dengan kelompok komunis. Sejak kegagalan pemberontakan komunis pada tahun 1965, beberapa dari mereka ditangkap dan ditahan, hingga kemudian mereka dipindahkan ke RTM dan dicampur dengan kelompok non komunis. Semenjak kedatangan tahanan komunis, perlakuan pemerintah terhadap tahanan Masyumi berubah drastis. Jika sebelumnya akses untuk membaca surat kabar dan majalah tidak dibatasi, sejak kedatangan kelompok komunis hal tersebut dibatasi. Selain pembatasan akses surat kabar dan majalan, jam berkunjung tahanan juga. Usaha-usaha dari Anak Agung Gde Agung dan Mohammad Roem untuk memperbaiki kondisi tahanan Masyumi dari pemerintahan baru ini mengalami kesuksesan ketika Burhanuddin dipindahkan kembali ke Wisma Keagungan pada bulan Februari 1966[95].

Pemindahan Burhanuddin ke Wisma Keagungan dibarengi dengan perpindahan pemerintahan dari Sukarno ke Soeharto. Di Wisma Keagungan, Burhanuddin dan 30 orang tahanan lainnya seperti M. Natsir, Mr. Sjafruddin, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, M. Yunan Nasution, Kolonel Simbolon, V. Sumual, Anak Agung Gde Agung, Mochtar Lubis, dan lainnya. Di Wisma Keagungan mereka yang menjadi tahanan negara diberikan akses jenguk yang bebas, fasilitas membaca Koran dan majalah yang pada waktu itu didominasi oleh upaya pemberantasan komunis dan pengikutnya oleh pemerintah Soeharto. Setelah mengalami beberapa kali pemindahan lokasi penahanan, serta kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1965. Burhanuddin dibebaskan pada tanggal 20 Mei 1966 bersama dengan 15 orang tahanan lainnya oleh pemerintahan Orde Baru.[96]

Kehadiran Burhanuddin disela-sela masyarakat, khususnya masyarakat Masyumi nyatanya masih dibutuhkan. Banyak tokoh Masyumi dan masyarakat yang datang berkunjung ke rumah Burhanuddin di jalan Tebet Timur Raya No. 43, Jakarta untuk berdiskusi mengenai masalah pribadi atau persoalan agama. Burhanuddin juga dipercaya menjadi pimpinan umum harian Abadi oleh kawan-kawan Masyumi. Ini bagian dari usaha elit Masyumi untuk mengubah strategi dakwah dengan masuk ke dalam masyarakat sipil ke dalam bentuk-bentuk yang beragam. Syafruddin mendirikan Himpunan Usahawan Muslim Indonesia (HUSAMI), Prawoto Mangkusasmito mendirikan Serikat Tani Islam Indonesia, Anwar Haryono memimpin Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, khususnya di bidang hukum, sementara Burhanuddin masuk ke usaha surat kabar.[97] Harian Abadi adalah surat kabar Islam yang telah aktif sejak masa pemerintahan Sukarno. Sebuah harian yang dibredel oleh presiden Sukarno dan diperbolehkan kembali oleh presiden Soeharto. Sejalan dengan apa yang selama ini dilakukan, harian Abadi kembali bersuara dengan Burhanuddin sebagai pimpinan. Hingga kemudian harian ini kembali mengalami pembredelan untuk kedua kalinya pada tahun 1974 bersama dengan beberapa surat kabar lainnya.

Selepas harian Abadi dibredel, kehidupan Burhanuddin lebih banyak diisi sebagai bagian dari pengurus pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sendiri sudah berdiri sejak tahun 1967 yang diketuai oleh Mohammad Natsir. Bersama dengan tokoh-tokoh Islam lainnya, Burhanuddin memberikan dakwah dan pemahaman agama Islam di Indonesia sampai akhir hayatnya di tahun 1987. Tepat pada hari Minggu, 14 Juni 1987, jam 09.30 pagi di RS. Harapan Kita, Burhanuddin menghembuskan nafasnya karena serangan jantung yang dideritanya sejak 1976.[98] Mungkin sebagai tanda akhir dari semangat demokratis Burhanuddin, pada tahun 1980, Ali Sadikin beserta 49 warga negara RI terkemuka lainnya mengeluarken Petisi 50 yang menyatakan keprihatinan atas janji Presiden Soeharto untuk mengkoreksi kesalahan 'Orde Lama' yang tidak pernah terjadi.[99]

Periode akhir kehidupan Burhanuddin terisi dengan usaha pendekatan ke masyarakat dengan mengambil posisi pemimpin agama. Tetapi berbeda dengan Mohammad Natsir yang sudah semenjak tahun 1930an sering mengeluarkan pendapatnya tentang agama dan hubungannya dengan rasionalitas dan filsafat Barat, masyarakat dan negara, Burhanuddin bukan seorang polemisis. Sedikit dari pemikiran dan pendapat Burhanuddin yang tertulis ataupun tercetak dalam publikasi. Berbeda dengan Syafruddin Prawiranegara ataupun Jusuf Wibisono, Burhanuddin tidak pernah mendorong ataupun mengeksplorasi ide-ide ekonomi Islam sebagai bagian dari pengaruh Islam Sosialis, walaupun Burhanuddin aktif dalam SIS yang mendorong pemikiran Islam Sosialis akibat dari patronase HOS Tjokroaminoto. Ia hampir tidak pernah memformulasikan pandangannya mengenai Islam dalam ekonomi dan masyarakat.

PENUTUP

Sebagai seorang pemimpin, Harahap tidak dikenal akan sumbangan pemikiran intelektualnya. Ia tidak pernah menulis sebuah manifesto ataupun dianggap sebagai pemimpin intelektual ataupun spiritual daripada gerakan Islam modernis Indonesia, berbeda dengan beberapa teman pemimpin Masyumi lainnya. Tetapi sumbangsihnya memiliki pengaruh yang panjang dalam sejarah Indonesia. Ia merupakan seorang Perdana Menteri yang memulai beragam proses pelembagaan baru dalam ketata-negaraan Indonesia; termasuk yang pertama menyelenggarakan pemilu dan yang memulai usaha-usaha terstruktur dalam menghadapi permasalahan korupsi di Indonesia. Kegigihannya memperjuangkan penyelesaian politis atas gerakan-gerakan separatis Indonesia akan terwujud pada penyelesaian konflik DI TII di Aceh yang tidak berbentuk serangan militer dan merupakan proses awal dari akomodasi dan integarsi Aceh ke dalam Republik Indonesia. Keputusannya mendukung kepemimpinan AH Nasution sebagai pemimpin Kepala Staf Angkatan Darat juga memiliki implikasi dalam mendorong menciptakan kisi-kisi kelembagaan Orde Baru lewat dwi-fungsi yang diberlakukan Nasution. Pendekatan rasionalnya terhadap ekonomi, posisinya yang pro-investasi asing dan pro-Barat ini akan ditiru pada zaman Orde Baru oleh teknokrat yang, lewat posisi Sumitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Keuangan, telah diberi kesempatan untuk bekerja dalam pemerintahannya. Tak dapat dipungkiri bahwa banyak pengamat, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang melihat bahwa kabinetnya merupakan kabinet terbaik dalam sejarah

kabinet-kabinet Demokrasi Liberal Indonesia dalam hal kegigihannya memperjuangkan perbaikan tata-kelola negara serta mendorong demokratisasi dan perdamaian dalam Republik Indonesia.

Burhanuddin menghabiskan masa tuanya dalam posisinya sebagai pemimpin ummat. Hijrah yang dilakukannya ketika meninggalkan Jawa untuk memulai pemerintahan tandingan Jakarta di Sumatera Barat memperkuat kepercayaan spiritualnya. Dalam kejaran TNI di hutan belantara Sumatera, ia bersama dengan Mohammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara seolah mengalami penguatan kepercayaannya. Setelah ujian masuk penjara dan pengintegrasian kembali di masyarakat, Burhanuddin mencari posisi baru dalam masyarakat dan sistem politik Orde Baru yang sama sekali baru dan asing baginya. Pencantuman namanya dalam Petisi 50 yang diprakarasi oleh Ali Sadikin dan tertera didalamnya nama pemimpin-pemimpin politik, intelektual dan masyarakat zaman dahulu, menunjukkan bahwa dimasa-tuanya, kepercayaannya akan demokrasi itu tetap menyala. Aktif dalam lembaga Dewan Dakwah Islamiah, ia tidak pernah memaksakan pandangan politiknya dan kepercayaan agamanya kepada orang-orang lain, melainkan melakukan usaha-usaha pembangunan ummat dalam koridor lembaga-lembaga demokratis. Walaupun pemikiran Burhanuddin relatif sederhana dibandingkan dengan teman-temannya, penghargaan terhadap Burhanuddin terletak dalam tindakan-tindakannya. Perdana Menteri Burhanuddin membuktikan bahwa walaupun sistem parlementer cenderung mendorong pemilihan pemimpin yang paling netral, bisa diterima dan tidak ambisius, hal tersebut tidak serta menciptakan pemimpin lemah. Keyakinan kuatnya akan lembaga demokrasi dan parlemen untuk mendorong keputusan-keputusan yang secara politis sulit diterima ini menjadi bukti betapa kuatnya Ia sebagai salah satu Perdana Menteri terbaik Indonesia di tahun 1950an.

ENDNOTES

1 Burhanuddin Harahap, 1955, *Keterangan Pemerintah tentang Program Kabinet*, Kementerian Penerangan RI, hlm. 5.

2 Feith, H. (2009). *The Wilopo Cabinet, 1952-1953: a turning point in post-revolutionary Indonesia*. Equinox Publishing.

3 Achmad Mudjiono, "Kabinet Burhanuddin Harahap Tahun 1955-1956", *Jurnal Avatara,* Vol. 5, No.3, Oktober 2017, hlm. 689

4 *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, 5 Agustus 1955

5 Kevin Fogg, Indonesian Islamic Socialism and its South Asian Roots, p. 1-17.

6 Suswanta, 2000, *Keberanian Untuk Takut: Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRI*, Yogyakarta: Avyrouz, hlm. 23

7 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, p. 21.

8 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, p. 23-24.

9 Kevin Fogg, Muslim Nationalism after Independence, p. 288.

10 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, p. 27.

11 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, p. 28.

12 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, p. 29-30.

13 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, p. 33.

14 Achmad Mudjiono, "Kabinet Burhanuddin Harahap Tahun 1955-1956", *Jurnal Avatara,* Vol. 5, No.3, Oktober 2017, Halaman 690.

15 Fogg, Fate of Muslim Nationalism after Independence, p. 94-95.

16 Fogg, p. 94-95.

17 Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional,* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hal. 102 - 105

18 Het Nieuwsblad voor Sumatra, 12 Juni 1952.

19 *Het Nieuwsblad voor Sumatra*. 9 Juli 1953.

20 *Java Bode*. 15 Mei 1952.

21 *De Preangerbode*. 10 Juli 1953.

22 *Nieuwsgier. Ochtenblad voor Indonesie*. 20 Juli 1953.

23 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, p. 38.

24 *Nieuwsgier. Ochtenblad voor Indonesie*. 20 Juli 1953.

25 Tedjasukmana, The development of labor policy in Indonesia, h. 114.

26 Justus van der Kroef, "Indonesia's Economic Difficulties" dalam *Far Eastern Survey,* Vol. 24, no. 2, 1955, hlm. 17-24.

27 Goh Cheng Teik, "Why Indonesia's attempt at democracy in the 1950s failed?", hlm. 234.

28 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, hlm. 39-40.

29 *De Locomotief*, 12 Agustus 1955

30 *Java Bode,* 8 Agustus 1955

31 Iskandar Tedjasukmana, The Development of Labor Policy and Legislation in the Republic of Indonesia, p. 116-118.

32 *Het Nieuwsblad voor Sumatra*. 12 Agustus 1955.

33 Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional.*

34 Goh Cheik Teng, Why Indonesia's Attempt at Democracy in the Mid-50s failed?" p. 234.

35 Surat Kabar *De nieuwsgier,* 12 Agustus 1955

36 Wie, T. K. (2010). The debate on economic policy in newly-independent Indonesia between Sjafruddin Prawiranegara and Sumitro Djojohadikusumo. *Itinerario*, *34*(1), 35-56.

37 Salim, E. (2011). "Widjojo's Invisible Hand". *Economics and Finance in Indonesia*, *59*, h. 234-235.

38 Thomas Lindblad. (2010). "Economic growth and decolonization in Indonesia." *Itinerario*, 24:1. h. 102.

39 Sandra Chambers Vaughn, Foreign Aid: its Impact on 1950s Indonesian Political Development, 1950-1972, p. 44.

40 Thomas Lindblad, Economic growth and decolonization in Indonesia, p.

41 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, p. 52.

42 Sandra Chambers Vaughn, Foreign Aid: its Impact on1950-Indonesian Political Development, 1950-1972, p. 44

43 Iskandar Tedjasukmana, The Development of Labor Policy and Legislation in the Republic of Indonesia, p. 229-231.

44 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, p. 54-55.

45 Indri Astuti, "Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 41 No.2 Desember 2014, Hal. 173

46 *De Nieuwsgier*, 20 Agustus 1955

47 *Algemeen Indisch dagblad*, 27 Oktober 1955

48 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, p. 55.

49 De Telegraaf, 31 Agustus 1955.

50 *Het nieuwsblad voor Sumatra,* 24 September 1955

51 Surat Kabar *Java Bode,* 23 September 1955

52 Pembelaan Iskaq Tjokrohadisurjo dapat dibaca dalam Iskaq Tjokroadisurjo. 1960. *Rasa Keadilan Berbitjara. Pembelaan Iskaq Tjokroadisurmo*, Dep.Pen/Prop DP PNI.

53 Fakih, F. (2017). Strategies of Rent Seeking during The Sukarno Period: Foreigners and Corruption, 1950–1965. *Lembaran Sejarah*, *13*(1).

54 Badruzzaman Busyairi, *Burhanuddin Harahap, Pilar Demokrasi*, p. 56.

55 Fakih, F. (2014). *The rise of the managerial state in Indonesia: institutional transition during the early independence period. 1950-1965*, p.

56 Winda Rizky Nur Lutfiana, "Usaha-Usaha Penggagalan Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955", *Jurnal Avatara*, Volume 5, No. 1, Maret 2017, Halaman 72

57 Muhammad Yahya Selma, "Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia", *Jurnal Konstitusi,* Volume 1, No.1, Juni 2009, Halaman 20

58 Goh Cheik Teng, Why Indonesia's Attempt at Democracy in the Mid-50s failed?" p. 234

59 Remy Madinier (2015). *Islam and Politics in Indonesia*. Singapura: NUS Press. h. 125.

60 Sandra Chambers Vaughn, Foreign Aid: its Impact on1950-Indonesian Political Development, 1950-1972, p. 46-47.

61 Kevin Fogg, Fate of Muslim Nationalism after Independence, p. 289.

62 Lukman Ramdhani Firmansyah, "Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1955", *Jurnal Avatara,* Volume 1, No. 1, Januari 2013, Halaman 55

63 Kevin Fogg, Fate of Muslim Nationalism after Independence, p. 290. Kelima belas distrik pemilih ini adalah: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara serta Maluku.

64 Kevin Fogg, Fate of Muslim Nationalism after Independence, p.

65 UU No. 7 Tahun 1953 Pasal 17

66 M.C. Rickleff, 1991, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hal. 376

67 Herbert Feith, 1999, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Hal. 72

68 *Ibid,* halaman 76

69 Muhammad Yamin, 1954, *Pembentukan dan Pembubaran Uni*, Jakarta: Bulan Bintang, Hal. 12

70 ANRI, Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959, No. 2234

71 ANRI, Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959, No. 2234

72 *Leeuwarder Courant*, 3 Desember 1955

73 *Friese Koerier*, 18 Februari 1956.

74 J.T. Lindblad (2008). *Bridges to new business: The economic decolonization of Indonesia*. Leiden: Brill.

75 Ruth McVey (1971). "The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army". *Indonesia*. no. 11. h. 158 & 168.

76 Chiara Formicchi (2012). *Islam and the Making of the Nation*. Leiden: Brill. h. 163-164.

77 Remy Madinier (2015). *Islam and Politics in Indonesia*. Singapura: NUS Press. h. 160.

78 Achmad Mudjiono, "Kabinet Burhanuddin Harahap Tahun 1955-1956", *Jurnal Avatara,* Vol. 5, No.3, Oktober 2017, Halaman 698

79 *De Preangerbode,* 23 Maret 1956

80 Moehammad Roem yang akan memulai islah dengan Mohammad Natsir dan pimpinan Masyumi pendukung PRRI lainnya pada tahun 1960an, sebagai upaya untuk membangun kembali gerakan Masyumi. Hamdan Juhannis, Moehammad Roem's political activities and Islamic political vision, disertasi di McGill University, Institute of Islamic Studies, 1999, h. 75. Lihat juga, Goh Cheng Teik, p. 235.

81 Goh Cheik Teng, "Why Indonesia's attempt at democracy in the 1950s failed?" h. 241.

82 R.Z. Leirissa, 1991, *PRRI PERMESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis,* Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, h. 9

83 Audrey Kahin (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia. 1926-1998,* Jakarta: Yayasan Obor. h. 270

84 Ulf Sundhausen. 2002. Politik Militer Indonesia 1945-1967. Menuju Dwi-Fungsi ABRI, Jakarta: LP3ES, h. 193-194.

85 Suswanta. 2000. *Keberanian Untuk Takut: Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRI*, Yogyakarta: Avyrouz, h. 101

86 Badruzzaman Busyairi. *Burhanuddin Harahap. Pilar Demokrasi.* 115-116

87 Badruzzaman Busyairi. *Burhanuddin Harahap. Pilar Demokrasi.*119-120

88 Badruzzaman Busyairi. *Burhanuddin Harahap. Pilar Demokrasi.*102

89 Badruzzaman Busyairi. *Burhanuddin Harahap. Pilar Demokrasi.*131

90 Badruzzaman Busyairi. *Burhanuddin Harahap. Pilar Demokrasi.*132

91 Badruzzaman Busyairi. *Burhanuddin Harahap. Pilar Demokrasi.*138-139

92 Badruzzaman Busyairi, 1989, *Burhanuddin Harahap Pilar Demokrasi*, 163

93 Badruzzaman Busyairi. *Burhanuddin Harahap. Pilar Demokrasi*. hlm. 165

94 Badruzzaman Busyairi. *Burhanuddin Harahap. Pilar Demokrasi.* hlm. 168

95 Badruzzaman Busyairi. *Burhanuddin Harahap. Pilar Demokrasi,* hlm. 172

96 Badruzzaman Busyairi. *Burhanuddin Harahap. Pilar Demokrasi.* hlm. 176

97 Buchari Tamam (1993). "Anwar Haryono dalam lintasan pengenalanku". Dalam Lukman Hakiem (ed). *Perjalanan mencari keadilan dan persatuan. Biografi DR. Anwar Haryono.* Jakarta: Media Dakwah, h. 485.

98 *Ibid,* Hal. 181-182

99 Arrohman Prayitno eds. (2004). *Ali Sadikin. Visi dan Perjuangan sebagai Guru Bangsa*, p. 166-168.

DJUANDA KARTAWIDJAJA

DJUANDA KARTAWIDJAJA:

Demokrasi Terpimpin dan Wawasan Nusantara

"Di sinilah letak suatu tugas mulia bagi pemerintah untuk menciptakan tenaga-tenaga pimpinan bagi masa depan berhubung dengan politik, ekonomi dan sosial. Untuk sementara pemecahan masalah ini harus dicari dengan upaya secara sadar untuk memberikan kepada para akademisi Indonesia kedudukan pimpinan dalam pemerintahan dan kesempatan sebanyak mungkin baginya".[1]

Djuanda Kartawidjaja

PENGANTAR

Djuanda Kartawidjaja adalah seorang birokrat *extraordinaire*; ia menjabat sebagai Menteri semenjak 1946 di bawah Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Sukiman Wirjosandjojo, Wilopo dan Ali Sastroamidjojo. Ia lalu melanjutkan karir menjadi Perdana Menteri pada kabinet kerja ekstra-parlementer. Posisi ini lanjut setelah pemberlakuan Demokrasi Terpimpin lewat Dekrit Presiden Sukarno pada tahun 1959 sebagai Menteri Utama, posisi yang setara dengan Perdana Menteri, sampai dengan kematiannya pada 7 November 1963. Seorang Menteri non-partai, Djuanda sering dilihat sebagai tokoh yang tak mengancam, karena tidak memiliki basis massa ataupun organisasi politik dibelakangnya. Yang dimilikinya adalah integritas tinggi, loyalitas kuat, kepercayaan tinggi dan kemampuan bekerja dengan tanpa perhitungan politik. Singkat kata, keteguhan seorang profesional. Putera Sunda ini telah menempatkan jejaknya dalam begitu banyak *state-building* pada masa awal kemerdekaan Indonesia tetapi sumbangannya tidak tercermin dalam statusnya di buku-buku sejarah Indonesia.

Benjamin Higgins, ahli ekonomi yang bekerja dengannya dalam kantor Biro Perantjang Negara pada tahun 1950an dan membantu merancang rencana lima tahun pertama Indonesia yang terbit pada tahun 1955, menyebut Djuanda sebagai sosok non-partai yang mampu, tahan banting, berintegritas tinggi dan pada intinya orang yang baik.[2] Djuanda berperan memang dalam membantu melahirkan generasi teknokrat utama Indonesia yang akan memiliki pengaruh besar nanti dalam pertumbuhan ekonomi cemerlang Orde Baru. Jika Sumitro Djojohadikusumo dianggap sebagai bapak dari teknokrasi Indonesia, maka Djuanda bisa dianggap pula sebagai ibunya. Dia adalah orang yang praktis dan pragmatis dan pemahaman ekonominya itu tidak dipengaruhi oleh ideologi.[3] Ia berperan pula dalam mengembangkan program pembangunan masyarakat, mendorong perkembangan ilmu pertanian serta pengembangan dari pendidikan pertanian di IPB, berperan dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta lembaga-lembaga pendidikannya, seperti pendirian Lembaga Administrasi Negara dan juga memiliki sumbangsih dalam pengakuan internasional atas lautan nusantara di antara pulau-pulau Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda ini diakui secara internasional dan menjadi basis hukum untuk semua pernyataan kedaulatan laut oleh negara-negara kepulauan lainnya mengikuti Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia modern ini tak bisa dipahami tanpa mempertimbangkan peran-serta dan sumbangsih darinya.

Di buku suntingan menantu Djuanda, mantan kapolri dan ahli administrasi Prof. Awaloeddin Djamin, mantan Gubernur Jawa Barat Mashudi mengatakan kepadanya bahwa hampir tak ada yang kenal sosok dari Djuanda Kartawidjaja padahal namanya menghiasi begitu banyak jalanan, gedung, waduk, hutan lindung sampai bandara utama kota kedua terbesar Indonesia.[4] Rosihan Anwar menulis dalam buku catatan hariannya mengenai Djuanda pada hari kematiannya sebagai berikut:

"Djuanda bukan seorang pemimpin seperti halnya Sukarno, Hatta, Sjahrir. Ia juga bukan volksleider, atau pemimpin rakyat. Ia lebih banyak merupakan seorang ambtenaar yang baik, pegawai yang technisch goed onderlegd (secara teknis mempunyai dasar bagus). Bagaimanapun juga ekses-ekses demokrasi terpimpin, Djuanda menurut sebagian peninjau politik masih tetap dapat digolongkan sebagai orang yang fatsoenlijk atau sopan".[5]

Sebagai tangan kanan Presiden Sukarno, kematian Djuanda pada tahun 1963 memperlemah Demokrasi Terpimpin dan kontrol Sukarno atas negaranya. Ir. Rooseno mengatakan bahwa tanpa Djuanda, maka Sukarno makin bergeser mendekati PKI[6] dan mendorong terjadinya tragedi akhir kuasa Presidennya.

Ketika Sumitro tiba di tanah air setelah menjalankan tugas sebagai kuasa usaha Republik Indonesia di Amerika Serikat, Djuanda-lah yang menyambutnya langsung di pelabuhan Tanjung Priok. Alasan keberhasilan karirnya dalam negara memang bisa dikarenakan kepandaian bergaulnya, kesetia-kawanannya yang tinggi dan keteguhannya untuk tidak membeda-bedakan orang berdasar pangkat ataupun golongan[7] serta posisinya sebagai orang non-partai. Ia dekat dengan semua grup dan bersedia untuk bekerja-sama kepada semua. Tetapi ia juga orang yang sangat setia, khususnya kepada Sukarno sehingga menjadi sebagai tangan kanan Presiden. Kesetiaannya kepada Presiden ini dipegangnya sebagai sebuah prinsip pribadi yang kuat; dialah Perdana Menteri yang mengirim TNI untuk menyerang PRRI Permesta di Sumatera, melarang partai Masyumi dan PSI serta menangkap ataupun mengusir sesama rekan dan temannya dalam pemerintahan serta

mantan atasannya seperti Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap, Sjafruddin Prawiranegara ataupun Sumitro Djojohadikusumo, semua untuk mewujudkan cita-cita revolusi Sukarno dalam sistem Demokrasi Terpimpin.

Walaupun ia adalah orang Muhammadiyah, Djuanda tidak menempatkan kesetiaannya kepada sosok Masyumi seperti mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Kesetiaan ini juga dilakukannya untuk menyetir Sukarno menjauhi dari pikiran dan tindakan ekstrim. Dalam analisis ahli politik Indonesia tahun 1950an yang tersohor Herbert Feith, pemimpin Indonesia itu bisa dibagi menjadi dua; kaum *administrator/problem solvers* atau *populis/solidarity makers*.[8] Sebagai seorang Sunda yang sopan bertutur dan berlaku baik untuk semua orang, ia tetap mempertahankan 'kesopanan' berinteraksi dalam masyarakat politik yang mengalami polarisasi tingkat tinggi pada masa Demokrasi Terpimpin. Ir. Rooseno menyebutkan bahwa kematian Djuanda adalah *turning point* dalam pemerintahan Sukarno. Tanpa suara Djuanda sebagai administrator, maka pemerintahannya dipenuhi oleh kaum *solidarity maker*, yang semakin menjerumuskan negara ke dalam avontur-avontur yang mahal dan semakin menghancurkan ekonomi. Beralihnya kekuasaan dari Djuanda kepada Soebandrio mengakibatkan pergeseran menuju pandangan-pandangan yang lebih simpatik terhadap PKI. Kematian Djuanda pada usia yang relatif muda di 52 tahun hidupnya, bisa dilihat sebagai tragedi nasional. Peran-sertanya dalam usaha dekolonisasi, pembangunan negara serta pembentukkan fondasi untuk pembangunan negara dan bangsa merupakan sesuatu yang tidak boleh dilupakan oleh generasi muda.

MASA MUDA DJUANDA

Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911, Djuanda hidup di lingkungan keluarga priyayi "baru" atau priyayi "profesional", suatu predikat yang dialamatkan kepada para dokter, guru maupun pegawai-pegawai pemerintahan semenjak awal abad ke-20an.[9] Ayah Djuanda yang bernama Raden Kartawidjaja adalah seorang mantri guru HIS (*Hollandsch Inlandchse School*), suatu sekolah dasar berbahasa Belanda bagi anak-anak pribumi. Istri Raden Kartawidjaja, Nyi Momot, berasal dari Leles suatu desa yang dekat dengan Tasikmalaya. Raden Kartawidjaja menjabat sebagai mantri guru HIS di Kuningan pada tahun 1923. Sebagai anak seorang guru, Djuanda mendapat pendidikan yang memadai.[10] Sebagai pegawai negeri, Raden Kartawidjaja dan keluarga harus mengikuti ritme perpindahan dinas, dari Tasikmalaya keluarga pindah ke Kuningan dan kemudian Cicalengka. Djuanda dikenal dari sejak kecil sebagai seorang yang pendiam, sebuah karakter yang diwarisinya dari ayahnya dan akan terus menemaninya sepanjang hidupnya.

Pada tahun 1923, Kartawidjaja diangkat menjadi mantri guru HIS di Kuningan dan Djuanda menamatkan sekolah ELS (*Europeesche Lagere School*) tahun 1924 di kota yang sama. Guru-guru ELS mengamati bahwa Djuanda merupakan anak pendiam yang cerdas dan mereka mengakselerasi pendidikannya loncat dari kelas V ke kelas VII, suatu prestasi yang hebat untuk seorang anak pribumi. Disiplin dan kecermatan dalam belajar telah didapatkannya dalam pengalaman di ELS dan akan dibawanya sampai tua. Ia kemudian melanjutkan ke HBS (*Hogere Burger School*) Bandung, suatu sekolah

Keluarga Menteri Ir. Djuanda. Gambar diambil pada tanggal 15 Juni 1953.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

yang tidak terjangkau bagi kebanyakan anak-anak pribumi karena alasan finansial ataupun akademis. HBS pada waktu itu dipimpin oleh direktur Dr. J.W. Bart, yang sebelumnya menjadi direktur HBS di Surabaya ketika Sukarno belajar di sana. Ketika Djuanda belajar di HBS, ada 343 murid tapi hanya 5 murid pribumi dan 21 murid Tionghoa sementara sisanya adalah murid-murid Belanda dan Indo.

Djuanda menggunakan kereta api tiap hari untuk menghadiri sekolah HBS di Bandung, sementara rumahnya berada di Cicalengka, sebuah perjalanan empat jam pulang-pergi, sebelum ia dimasukkan ke asrama siswa (*Algemeen Indisch Internaat*) di Bandung oleh ayahnya. Di asrama ini, Djuanda mengalami kehidupan yang penuh peraturan dan disiplin. Dia belajar untuk memecahkan persoalan bersama, melakukan kegiatan olah-raga, musik dan kesenian dengan anak-anak lainnya serta membangun rasa solidaritas dengan penghuninya yang sebagian besar anak-anak Eropa dan Indo ini. Ketika tahun 1950an, Djuanda dan nyonya mengunjungi Belanda, ia masih kenal dan bertemu dengan salah satu teman asramanya, orang Belanda yang memuji kecerdasan Djuanda sebagai murid HBS. Kawan-kawan sesama HBS menyebut Djuanda sebagai seorang kutubuku. Ia tetap merupakan seorang pendiam, tetapi ia juga remaja yang luwes dan dapat menyesuaikan diri pada setiap ragam kondisi sosial. Ia aktif pula dalam kegiatan olah-raga renang dan polo dan bergabung dalam perkumpulan Neptunus Bandung. Tampak bahwa kehidupan Djuanda merupakan kehidupan elit anak-anak Hindia Belanda yang multirasial dan multikultur tetapi merasa memiliki saling keterikatan karena gaya hidup kelas-menengah perkotaan yang sama. Hubungan baik dengan orang Belanda menunjukkan bahwa dari sejak kecil, walaupun

ia menjadi seorang nasionalis, ia tetap menjaga hubungan baik dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan identitas bangsa ataupun ras.

Karena kemampuan matematikanya bagus, direktur HBS Dr. Ir. W.F. Gisolf mendorongnya agar bisa melanjutkan studinya ke Technische Hogeschool Bandoeng atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung). Djuanda mendaftarkan diri ke Fakultas Ilmu Bangun Jalan dan Air (*Weg en Waterbouwkunde*) atau sekarang dikenal sebagai Teknik Jalanan dan Hidrolika bidang Teknik Sipil dibawah Dr. Ir. Boomstra pada tahun 1929, pada saat awal dari Depresi Ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kemakmuran Hindia Belanda. Ia memperoleh beasiswa karena prestasinya di HBS. Ada 39 mahasiswa pada tahun itu di fakultas itu dengan empat orang pribumi dan dua orang Tionghoa, termasuk Djuanda. Sekolah Teknik itu juga merupakan tempat Sukarno belajar menimba ilmu dan menjadi aktivis pergerakan nasional. Sukarno yang masuk Sekolah Teknik pada tahun 1920 dan belajar teknik sipil, merupakan kakak kelas Djuanda. Iklim pergerakan nasional yang berkembang di sekolah ini turut berpengaruh dalam diri Djuanda.

Berkembangnya rasa nasionalisme di kalangan mahasiswa didorong pula karena pengadilan Sukarno pada tahun 1929 yang menelorkan pledoinya yang terkenal itu. Pada tahun 1930, mahasiswa-mahasiswa Indonesia memutuskan untuk keluar dari perkumpulan mahasiswa Sekolah Teknik Bandung (*Bandung Studenten Club*) untuk mendirikan organisasi mahasiswa sebangsa bernama Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (*Indonesische Studenten Vereniging* atau ISV). Walaupun Djuanda tidak pernah terjun masuk ke dalam politik, ia menjadi aktif dalam perkumpulan mahasiswa yang memiliki sifat politik ini. Wataknya yang mencari keseimbangan dan penerimaan semua pihak ini secara alamiah menghindari sifat konfrontasional yang dibutuhkan dalam politik. Hal ini merupakan karakteristik lain yang juga akan selalu menemaninya dalam kehidupan dan karirnya sebagai seorang birokrat. Tak dapat dipungkiri bahwa kesadaran politiknya muncul pada masa ini. Ia sempat menjadi ketua ISV tahun 1930an. Di samping aktivitasnya di ISV, fokus utama Djuanda tetap pada studinya. Ia menyelesaikan studi selama empat tahun. Pada 6 Mei 1933, ia lulus dengan gelar Insinyur Sipil dengan tiga orang Indonesia lainnya.

Pada masa HBS, ia berkenalan dengan Juliana seorang guru HIS yang dikepalai ayahnya di Cicalengka. Juliana merupakan gadis Sunda dan anak dari Raden Wargadibrata. Djuanda bertemu dengan Juliana setiap kali ia pulang ke Cicalengka. Setelah lulus dari Sekolah Teknik, Djuanda meminang Juliana pada tahun 1933.

KARIR AWAL BIROKRASI & PERGERAKAN NASIONAL

Djuanda menekuni diri dalam birokrasi semenjak lulus Sekolah Teknik Bandung dan mendapatkan kepegawaian dalam dinas pemerintah kota Batavia. Usianya baru 22 tahun ketika ia berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Tetapi ia memasuki pasar pekerjaan justru pada pertengahan Depresi Ekonomi, yang efeknya dashyat terhadap perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada pasar dunia. Oleh karenanya, usahanya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai seorang insinyur, khususnya dalam dinas negara itu terpaksa ditunda. Di Jakarta, ia bertemu dan berteman dengan Otto Iskandar Dinata, seorang anggota Volksraad dan pengurus dari organisasi Paguyuban Pasundan. Atas rekomendasi dari Otto, maka pada tahun 1934 Djuanda menjadi guru di AMS dan *Kweekschool* Muhammadiyah Jakarta. Di AMS Djuanda bekerja bersama dengan Maria Ulfah Santoso, seorang politisi dan aktivis perempuan terkemuka Indonesia. Maria berkata mengenai Djuanda: "ia merupakan seorang yang tenang, ramah dan tidak lekas marah dan selalu '*in balance*'."[11] Meski berperan sebagai guru, Djuanda juga terlibat dalam organisasi Muhammadiyah.[12] Muhammadiyah bukan organisasi politik melainkan organisasi sosial tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian dari tindakannya berbasis pada kesadaran identitasnya sebagai seorang bangsa Indonesia. Djuanda menjadi guru di AMS Muhammadiyah selama 5 tahun. Ketika ia keluar dari AMS, usianya telah beranjak menjadi 28 tahun. Keadaan ekonomi yang membaik semenjak pertengahan tahun 1930an, mulai membuka kesempatan pekerjaan profesional.

Pada tahun 1934, mengikuti jejak Otto Iskandardinata, Djuanda Kartawidjaja menjadi anggota dari Paguyuban Pasundan. Ia diangkat menjadi sekretaris dan berkenalan dengan beragam tokoh seperti Lukman Djajadiningrat, sekretaris Departemen Pendidikan serta anggota dari Dewan Hindia[13] dan pembantu dari Dr. Van Mook yang pada waktu sebelum kedatangan Belanda merupakan Kepala Departemen Pendidikan. Lukman pergi ke Belanda sebelum kedatangan Jepang dan tidak akan pernah balik kembali ke Indonesia.[14] Serta Moh. Enoch yang akan menjadi Menteri Pekerjaan Umum di bawah Kabinet Amir Syafruddin. Djuanda juga tertarik untuk mengembangkan organisasi pemuda dan menjadi salah satu pemimpin dari *Padvinders Organisatie Pasundan*, yaitu organisasi kepanduan atau kepramukaan untuk pemuda Pasundan. Fokus utama Paguyuban Pasundan adalah untuk perbaikan ekonomi kalangan orang-orang Sunda, mirip dengan pendekatan yang diambil oleh Muhammadiyah ataupun Boedi Oetomo. Pada Kongres ke-20 pada tahun 1935, paguyuban ini menyerukan kebutuhan pendirian sebuah bank untuk melayani kebutuhan kredit orang-orang Sunda serta mendorong kotapraja untuk mengeluarkan peraturan pelarangan lintah darat dan tindakan keras terhadap pelacuran, perkawinan anak serta penderitaan rakyat sebagai akibat dari malaise yang berkelanjutan. Pada Desember 1939, Kongres Rakyat Indonesia diselenggarakan di Jakarta dan Djuanda hadir sebagai perwakilan dari Paguyuban Pasundan. Kongres ini mengambil keputusan akan pentingnya parlemen sejati di Indonesia, suatu tuntutan yang ditolak oleh Pemerintah Belanda.

Pada tahun 1939, insinyur Djuanda akhirnya diangkat menjadi pegawai di Dinas Perairan Provinsi (*Provinciale Waterstaat)* dalam Departemen Pekerjaan Umum (*Departement Verkeer en Waterstaat*) yang berkantor di Bandung. Pekerjaan dalam bidang ini akan akan terus digelutinya hingga masa-masa kemerdekaan sampai ia menjadi menteri dalam berbagai kabinet Republik Indonesia. Pada tahun 1940, Djuanda sekeluarga pindah ke Bandung.

Pada tahun 1940, Paguyuban Pasundan mengeluarkan buku jubelium, Djuanda menyumbangkan satu artikel berbahasa Belanda berjudul "Suatu Tindakan yang Bijaksana Bahwa Pemerintah memberikan Jabatan Pimpinan kepada para Akademisi Indonesia." Dalam artikel ini, Djuanda menjelaskan bahwa

"Oleh karena sekalipun jumlah bangsa Indonesia yang menduduki suatu jabatan penting begitu kecil, tetapi haruslah mereka dianggap sebagai pos-pos terdepan dalam usaha memperoleh kedudukan politik dan ekonomi yang lebih baik bagi bangsa Indonesia yang berada ditengah-tengah bangsa lain".[15]

Ia mengkritik bahwa "susunan masyarakat di sini membatasi daya serap terhadap para akademisi. Ini sangat terasa di dalam lingkungan masyarakat Indonesia sendiri… Kesempatan untuk menduduki suatu jabatan yang bertanggung-jawab di dalam perusahaan swasta di kemudian hari, sangat terbatas bagi para akademisi Indonesia, berlainan sekali dengan koleganya di lain negara."[16] Dan sehingga

"Daripada perusahaan swasta asing tidak dapat diharapkan bahwa mereka akan memelopori usaha ke arah itu. Disinilah letak suatu tugas mulia bagi pemerintah untuk menciptakan tenaga-tenaga pimpinan bagi masa depan berhubungan dengan politik, ekonomi dan sosial. Untuk sementara pemerintah masalah ini harus dicari dengan usaha secara sadar untuk memberikan kepada para akademisi Indonesia kedudukan pimpinan dalam pemerintahan dan dalam sebanyak mungkin baginya".[17]

Dalam artikel ini terdapat beberapa pendapat Djuanda yang tetap dipertahankannya sepanjang hayatnya sebagai pejabat negara. Pertama adalah kepercayaan bahwa yang akan membawa rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan dan kebodohan adalah kaum intelek atau akademisi. Kedua, kemampuan akademisi untuk menciptakan kondisi yang bagus untuk rakyat itu tidak dapat diharapkan untuk dihadirkan oleh kapitalisme/liberalisme lewat masyarakat sipil yang didominasi oleh perusahaan swasta, melainkan hanya dapat dilakukan lewat negara. Dan sehingga, ketiga, adalah tugas negara, dalam hal ini himbauan Djuanda diutarakan kepada negara kolonial Hindia Belanda, untuk menempatkan sebanyak mungkin intelek Indonesia dalam garda depan pengambilan kebijakan negara di beragam departemen agar mereka mampu untuk memberikan bantuan menolong rakyat Indonesia untuk berkembang dan keluar dari siklus kemiskinan. Pandangan teknokratis ini melihat negara sebagai alat untuk melakukan reorganisasi sosial yang ditugaskan kepada orang-orang ahli. Djuanda melihat agensi perubahan ini hanya pada kaum ahli, dan bukan kepada para politisi ataupun pemimpin masyarakat. Di sini terlihat betapa kuatnya tradisi *ambtenaar* yang dipercayai oleh Djuanda. Oleh karenanya, kedudukan Djuanda dalam pemerintah, khususnya di bawah Demokrasi Terpimpin Sukarno, sangat penting karena membawa sudut pandang konservatif pro-ahli guna membatasi dorongan-dorongan populis Sukarno yang anti-ahli. Tak dapat dipungkiri bahwa teknokrasi Indonesia bisa hidup dan melewati transisi zaman Sukarno ini dikarenakan pengaruh Djuanda sebagai salah satu pelindung teknokrasi tersebut. Jika ada yang mengatakan bahwa Djuanda itu sukses karena dia tidak memiliki posisi ideologis yang kuat, justeru kekuatan kepercayaan ideologinya terhadap ide negara modernis yang teknokratis inilah yang menjadi sumbangsihnya. Dan terlihat di sini bahwa sudut pandang ini sudah lama digodognya dalam proses pendewasaan pandangan politiknya pada masa akhir periode kolonial ini.

REVOLUSI DAN PENGANGKATAN MENJADI MENTERI

Di bawah pendudukan Jepang, Djuanda tetap bekerja dalam Jawatan Pekerjaan Umum dan ditugaskan untuk membangun jembatan sungai Citarum di Kedunggede. Di luar ini, peran-serta Djuanda tampak terbatas. Pasca kemerdekaan Djuanda langsung memegang peran penting dalam pemerintahan Republik. Jabatan sebagai Menteri Perhubungan mulai diembannya pada masa kabinet Sjahrir tahun 1946. Penunjukan sebagai menteri tersebut bukanlah tanpa alasan karena kerja Djuanda dalam hal transportasi maupun perhubungan cukup penting. Pada awal Januari, Djuanda dan keluarga terpaksa mengungsi dari rumah mereka di Bandung utara ke Tasikmalaya sebagai akibat dari kedatangan NICA. Di Tasikmalaya, Djuanda menerima kabar bahwa ia diangkat oleh pemerintah Republik sebagai Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia melalui Maklumat Kementerian Perhubungan No.1/KA tanggal 23 Januari 1946. Pusat Jawatan KA ada di Cisurupan, Bandung. Ia ditugaskan untuk merehabilitasi kondisi per-kereta-apian. Fungsi kereta api cukup penting dalam perhubungan darat sebagai sarana utama pengangkutan para pemimpin RI dan keluarganya dari Jakarta ke Yogyakarta. Kereta Api juga berfungsi sebagai sarana angkut laskar-laskar rakyat ke medan pertempuran. Tetapi kondisinya amat mengkhawatirkan karena banyak rel yang telah dibongkar Jepang dan diangkut ke Birma pada waktu Perang Pasifik. Banyak dari lokomotif beserta onderdilnya sudah rusak dan tak dapat diperbaiki, sementara itu impor alat-alat tidak dimungkinkan.[18]

Sebelum ia bisa banyak melakukan perubahan, ia diangkat menjadi Menteri Muda Perhubungan dalam Kabinet Sjahrir ke II pada bulan Maret 1946, mendampingi Menteri Perhubungan Ir. Abdul Karim, teman seangkatannya di Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Pada April 1946, ia pindah ke Yogyakarta, sementara Juliana dan keluarga terpaksa ditinggalkan di Cisurupan karena sulitnya kondisi perumahan di Yogyakarta sebagai akibat dari banyaknya pengungsi yang telah pindah ke kota itu. Kemampuannya dalam manajemen dan kepemimpinan ini terlihat pada periode ini, yaitu sebagai seorang yang tegas dan berani tapi sekaligus rasional dan tidak emosional. Pada bulan Oktober 1946, ia diangkat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Sjahrir ketiga, bersamaan dengan Maria Ulfah Santoso yang diangkat sebagai Menteri Sosial dan Ir. Gunarso, yang diangkat sebagai Menteri Muda Pengajaran. Posisi Menteri Perhubungannya berlanjut di bawah Kabinet Amir Syafruddin. Pada Januari 1948, Kabinet Amir Syafruddin berganti menjadi Kabinet Mohammad Hatta,

Djuanda tetap diangkat sebagai Menteri Perhubungan.

Djuanda dikirim sebagai anggota dalam perundingan negara federal Indonesia antara delegasi RI dengan Belanda di Kaliurang. Ia merupakan Ketua Panitya Ekonomi/Keuangan. Agresi Militer Belanda tahun 1948 di Yogyakarta menyebabkan pucuk pimpinan RI ditawan, sementara pemimpin-pemimpin yang lain tetap tinggal di dalam kota dalam pengawasan ketat Belanda. Djuanda tetap berada dalam kota dan berhubungan dengan pasukan gerilya melalui Mr. Ali Budiarjo, yang pada tahun 1950an nanti akan menjadi asisten Djuanda dalam Biro Perantjang Negara. Situasi yang tidak menentu akibat konflik dengan Belanda di satu sisi dan tekanan Belanda di sisi lain terhadap orang-orang Republik agar bersedia bekerja-sama dengan mereka menjadikan Yogyakarta sebagai tempat yang penuh provokasi dan aksi kekerasan. Aksi-aksi kekerasan tidak hanya melibatkan tentara Republik dan Belanda, namun juga dilakukan oleh kriminil, seperti terjadinya perampokan.[19] Rumah tinggal Djuanda pun tak luput dari teror yang membahayakan nyawanya dan keluarganya. Sebuah granat meledak pada suatu petang di dekat jendela rumah Djuanda. Beruntung Djuanda selamat dalam peristiwa ini. Ia juga dibujuk oleh Belanda agar bersedia kembali ke Jawa Barat untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negara bagian Pasundan.[20] Belanda menghasut tokoh-tokoh Republik di Yogyakarta agar bersedia meletakkan jabatannya sebagai pimpinan Republik dalam strateginya menghancurkan kredibilitas dari Republik Indonesia dan memperkuat pembentukan negara-negara federal. Tokoh-tokoh Republik yang lain seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun tak luput dari bujukan ini.[21] Pada akhirnya Sri Sultan maupun Djuanda menolak bujukan ini. Ini menandakan berakhirnya Perang Revolusi Kemerdekaan karena penolakan Sultan ini merupakan sinyal kepada Belanda bahwa perang mereka sia-sia. Segera setelah ini pimpinan Republik akan dikembalikan ke Yogyakarta setelah pengasingan paksa mereka di pulau Bangka. Perundingan KMB lalu dimulai Agustus 1949. Djuanda ikut sebagai bagian dari delegasi Wakil Presiden Mohammad Hatta yang terdiri dari 12 orang.

KARIR MENTERI DJUANDA PADA PERIODE DEMOKRASI LIBERAL

Setelah pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, RIS resmi berdiri dan berpusat di Jakarta. Pemimpin Republik kembali ke Jakarta dengan susunan kabinet yang baru. Di dalam kabinet RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta, Djuanda bertugas sebagai Menteri Kemakmuran. Pergeseran dari Menteri Perhubungan kepada Menteri Kesejahteraan menandakan juga pergeseran Djuanda menuju pos yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan ekonomi Republik. Program kabinet Hatta dalam bidang ekonomi rakyat cukuplah berat seperti perbaikan keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan, persiapan jaminan sosial, upah minimum. Berbagai hal tersebut harus dilakukan oleh Djuanda meski dirinya belum pernah menempuh pendidikan ekonomi secara formal. Istri Djuanda, Ny. Juliana mengisahkan; “Bapak sangat rajin membaca. Pengetahuan mengenai ekonomi dan keuangan bapak peroleh dari buku-buku”.[22] Djuanda adalah seorang murid yang tekun dan pimpinan Republik percaya akan kemampuannya mengemban tugas yang terkait dengan ekonomi. Di dalam delegasi perundingan KMB (Konferensi Meja Bundar), Sumitro Djojohadikusumo yang pada waktu perundingan berkedudukan sebagai wakil ketuanya menilai bahwa Djuanda adalah orang yang gigih dalam setiap perundingan, bersikap tenang, hampir tidak pernah terlihat gelisah, mengutarakan pendapat yang jelas dan mudah dimengerti kepada tim perunding dari Belanda.[23]

Kecakapan Djuanda dalam bidang ekonomi ini mengantarkan dirinya ke dalam posisi menteri yang terkait dengan bidang ekonomi maupun dengan perhubungan dan perencanaan. Tugas pertamanya sebagai Menteri Kemakmuran adalah mencari pembantu ahli ekonomi termasuk beberapa diantaranya pegawai tinggi Belanda yang dipekerjakan selama lima tahun pada masa transisi pasca penandatanganan perjanjian KMB. Di bawah Kementerian Kemakmuran tenaga-tenaga ahli Belanda dimasukkan dalam sebuah institusi penghubung yang berusaha membangun saling pengertian antara beragam Kementerian dan Departemen yang berhubungan dengan ekonomi, dalam rangka membuat rancangan perekonomian. Namanya adalah Biro Finansial dan Ekonomi atau sering disebut Biro Finek. Biro Finek lalu akan diubah menjadi Biro Perantjang Negara (BPN) yang bertugas untuk merancang rencana lima tahun pertama Indonesia. Djuanda diangkat sebagai ketua dari BPN yang didalamnya bercokol banyak ahli ekonomi dari dalam dan luar negeri, termasuk Sumitro Djojohadikusumo dan Benjamin Higgins.

Pembubaran RIS dan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950 merupakan babak baru dalam demokrasi parlementer. Di dalam sistem ini Presiden menunjuk tokoh-tokoh yang umumnya merupakan elit politik untuk membentuk formatur kabinet. Djuanda terlibat aktif dalam beragam kabinet-kabinet pada masa ini. Di dalam kabinet yang dipimpin Mohammad Natsir, ia menjabat sebagai menteri Perhubungan. Jabatan sebagai Menteri Perhubungan ini tetap diembannya hingga masa kabinet Sukiman dan kabinet Wilopo. Sebagai Menteri Perhubungan, salah satu keberhasilan terbesar Djuanda terletak pada pendirian perusahaan PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) pada April 1952, sebagai tandingan terhadap monopoli KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*), walaupun nasionalisasi baru akan terjadi pada tahun 1957 di bawah Perdana Menteri Djuanda.[24] Menggunakan kredit Eximbank dari Amerika Serikat, ia mampu membeli 35 kapal untuk Pelni dari Jerman Barat, Belgia dan Italia. Selain itu, pemerintah juga menasionalisasi PT Djakarta Lloyd yang dimiliki oleh BNI 46, serta membuka Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) di Jakarta guna memproduksi perwira pelayaran yang ahli.

Di bidang perkereta-apian, kementerian mendapatkan bantuan Exim Bank Amerika Serikat guna meremajakan stok lokomotif yang rusak serta memesan lebih dari 100 kilometer rel propil dari kredit Jerman. Pembelian lokomotif diesel listrik ini merupakan kemajuan teknologi perkereta-apian Indonesia. Kereta model baru ini yang cenderung berjalan bergoyang-goyang ini mendapat julukan populer sebagai ‘goyang Djuanda.’[25]

Ir. Djuanda memeriksa pesawat convair yang baru dari G.I.A 23 September 1950

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Upacara penandatanganan kontrak pesanan lokomotif pada G.E. tanggal 4 Desember 1951.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Ir. Djuanda memeriksa pesawat convair yang baru dari G.I.A 23 September 1950

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Di bidang penerbangan, pembentukkan perusahaan penerbangan nasional Garuda Indonesia Airways menjadi salah satu terobosan penting, yang stok awalnya diambil dari pesawat-pesawat Dakota dari *Koninklijke Nederland Indische Luchtvaard Maatschappij* atau KNILM (Perusahaan Penerbangan Kerajaan Hindia Belanda), anak perusahaan KLM yang telah melayani penerbangan antar-pulau-pulau Hindia Belanda sejak 1928; pengambilalihan 11 pesawat-pesawat Dakota dari KNILM dan 12 pesawat kargo dan 3 pesawat amfibi sebelumnya didirikan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia Airways (GIA).[26] Perusahaan GIA dimulai sebagai patungan antara KNILM/KLM dengan Pemerintah RI; masing-masing memiliki 50% saham. Baru pada tahun 1954, semua saham KNILM diambil alih oleh Pemerintah. Semua peningkatan sarana maupun prasarana perhubungan tersebut umumnya digalakkan dengan bantuan kredit dari Eximbank Amerika Serikat.[27] Perhatian dalam sektor infrastruktur perhubungan akan terus diperhatikan Djuanda hingga kelak dia menjabat sebagai Menteri Pertama. Djuanda mencanangkan pembangunan infrastruktur seperti waduk Jatiluhur, bandara di Waru, Surabaya (kelak dikenal sebagai Bandara Juanda) serta pembangunan Jakarta *Bypass* untuk mendukung perhubungan jalan di Jakarta.

Posisinya sebagai Menteri Perhubungan ini selesai semenjak berakhirnya Kabinet Wilopo pada Juni 1953. Dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I serta Kabinet Burhanuddin Harahap, Djuanda tidak diminta untuk menjadi Menteri. Dua periode Kabinet ini merupakan periode dimana Djuanda tidak menjabat sebagai Menteri. Walau begitu, hal ini tidak berarti bahwa ia tidak memiliki jabatan kenegaraan. Bahkan sebaliknya, posisinya dalam pembangunan serta dekolonisasi ekonomi berlanjut dalam bentuk

posisi strategisnya dalam Biro Perancang Negara serta usaha dekatnya dalam proses pembinaan tenaga teknokratis dalam hal perancangan perekonomian. Posisinya sebagai Menteri Perhubungan menunjukkan komitmennya dalam mengawal dan mensukseskan proses dekolonisasi ekonomi Indonesia.

Djuanda memang memiliki tugas berat dalam hal itu. Perjanjian KMB di mana ia menjadi negosiator Indonesia dalam urusan ekonomi beserta Sumitro Djojohadikusumo berarti ia bertanggung jawab moral dalam menanggung beban perjanjian itu yang mana Belanda berhasil melimpahkan hutang negara Hindia Belanda sebesar 1,3 milyar dollar Amerika Serikat diatas pundak negara yang baru saja merdeka itu. Selain itu, serangkaian perjanjian dipaksa oleh Belanda untuk memastikan keberlanjutan dari peran-serta perusahaan-perusahaan Belanda dari yang multinasional sampai kepada perusahan pribadi dalam perekonomian Indonesia.[28] Proses nasionalisasi yang dilakukan oleh Djuanda pada periode ini berbasis hukum dan disertai dengan negosiasi dan pemanfaatan pinjaman dari AS dan negara-negara Barat untuk membayar pengambil-alihan perusahaan-perusahaan asing. Hal ini berbeda dengan nasionalisasi yang terjadi pada tahun 1957 di bawah Kabinet Kerja Ekstra Parlementer di mana Djuanda menjadi Perdana Menteri–nasionalisasi yang awalnya dilakukan oleh organisasi buruh yang berafiliasi dengan PKI ini lalu diambil alih oleh TNI dalam rancangan Badan Nasionalisasi (BANAS) yang dikepalai oleh perwira TNI Soekamto Sajidiman. Nasionalisasi tahap kedua ini dilakukan di luar koridor hukum dan akan menyebabkan penanggungan pemerintah RI untuk membayar restitusi pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Belanda secara bertahap. Tak dapat dipungkiri peran positif Djuanda dalam proses nasionalisasi ekonomi Indonesia.

Pembangunan perekonomian pada dekade 1950an tidak dapat berjalan dengan lancar akibat pergolakan politik yang terjadi di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sementara itu politisasi warga negara yang ditandai dengan pesatnya perkembangan partai politik maupun organisasi rakyat berkembang dengan cepat. Tahun 1951 terdapat tujuh belas partai ataupun organisasi yang duduk di Parlemen.[29] Dengan semakin meningkatnya polarisasi dua kubu politik utama Indonesia, yaitu kaum sosialis kanan di bawah partai Masyumi dan PSI dengan kaum nasionalis kiri, di bawah PNI dan partai-partai nasionalis lainnya. Kuatnya polarisasi kedua kubu ini menyebabkan retaknya kemampuan sistem parlementer untuk mencapai konsensus; bahkan sebaliknya tindakan-tindakan politisi di parlemen pada periode ini mengakibatkan instabilitas politik akibat seringnya jatuh-bangun kabinet perdana menteri. Ada perasaan di banyak kalangan, termasuk oleh Sukarno dan TNI, bahwa sistem parlementer Indonesia mencapai titik krisis dan bahwa keberadaan mereka menghambat pembangunan bangsa. Tetapi, usaha-usaha untuk melakukan sentralisasi serta membatasi otoritas parlemen dan partai mengundang resistensi, khususnya karena adanya anggapan bahwa negara Indonesia bersifat Jawa-sentris dan tidak menggubris kepentingan daerah-daerah lain. Resistensi daerah terhadap pemerintah pusat terjadi di Jawa Barat, Sumatera, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.

BIRO PERANCANG NEGARA: DJUANDA SEBAGAI IBU TEKNOKRAT INDONESIA

Tak dapat dipungkiri ada dua sosok utama dalam proses pembentukkan teknokrasi Indonesia; yaitu Djuanda Kartawidjaja dan Soemitro Djojohadikusumo. Peran Soemitro ini sentral dan esensial, dan mungkin melebihi perannya Djuanda, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keselamatan dan keberlanjutan dari teknokrasi Indonesia ini tidak otomatis terjamin tanpa peran-serta Djuanda. Soemitro dari awal sudah bergerak untuk membangun aparatus rancangan pembangunan ekonomi. Pada tahun 1950-1951, sebagai Menteri Industri dan Perdagangan dibawah Kabinet Mohammad Natsir, Soemitro membuat rancangan industri pertama Indonesia dengan nama populer Soemitro Plan. Kegagalan rancangan industrial ini menunjukkan kelemahan Indonesia dalam hal SDM. Soemitro pada waktu itu juga secara aktif mencari ahli-ahli dari luar negeri untuk membantu merancang perencanaan ekonomi Indonesia. Dia mendapatkan bantuan dari PBB, khususnya dari Lembaga Bantuan Teknis PBB atau *United Nations Technical Assistance Administration* (UNTAA). PBB mengirim Benjamin Higgins, ekonom pembangunan dari Australia pada tahun 1952. Dalam beberapa tahun berikutnya beragam ahli ekonomi, ahli perburuhan dan lain-lain dari negara-negara Barat datang ke Jakarta untuk bekerja dalam Biro Perancang Negara.

Djuanda diangkat sebagai Kepala Biro Perancang Negara pada tahun 1952 dan dia mengajak Ali Budiardjo sebagai Wakil Kepala, seorang yang telah dikenalnya sejak Revolusi Kemerdekaan di Yogyakarta. Oleh beragam pemerintahan Barat, Djuanda mendapat banyak pujian.[30] Ketika Benjamin Higgins selesai kontraknya dan meninggalkan Indonesia pada tahun 1953, Djuanda menolak ketika Kanada menawarkan untuk mengirim salah satu ahli perancang mereka untuk menjadi pemimpin ahli-ahli Barat. Setelah itu, Djuanda secara efektif berfungsi sebagai pemimpin utama BPN. Djuanda menunjukkan kemampuannya untuk memimpin dan mengarahkan para ahli baik dari Indonesia maupun Barat dalam proses pembuatan rancangan ekonomi tersebut. Ia juga dinilai mampu melindungi ahli-ahli ekonomi Barat dan Indonesia dari serangan politisi di Parlemen karena ia berfungsi sebagai wajah daripada BPN ini. Dalam kesehariannya, Djuanda lebih banyak membiarkan para ahli untuk merumuskan kebijakan Indonesia dengan bebas. Sumitro dan Higgins lebih banyak melakukan kegiatan rancangan dan bahkan kantor mereka berseberangan dalam gedung BPN.

Pada tahun 1954, di bawah Proyek Indonesia MIT, Higgins balik ke Indonesia ditemani dengan Nathan Keyfitz. Mereka menawarkan memimpin proses perancangan Indonesia, tetapi hal ini ditolak oleh Djuanda yang tampak sebal dengan campur-tangan Higgins dalam proses perancangan ini. Hal ini membuktikan bahwa otoritas Djuanda ini sangat kuat dalam BPN dan bahwa proses perancangan ekonomi Indonesia di tahun 1950an ini tetap dijaga dibawah kontrol Djuanda.[31] Walaupun peran-serta ahli-ahli asing itu sangat besar dalam membentuk rancangan lima tahun pertama Indonesia, hal tersebut berada di bawah jalur yang didorong oleh Djuanda. Lebih penting lagi, Djuanda sangat berperan dalam melindungi dan memberi otoritas kepada para ahli ekonomi Indonesia yang

berada dibawahnya baik dalam Biro Perancang Negara maupun dalam kantor Perdana Menteri dan Menteri Utama pada periode Dmeokrasi Terpimpin. Di bawah Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956–Maret 1957), Djuanda diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan dan sehingga menempatkan BPN dalam tingkat Kementerian. Ia juga diangkat menjadi Direktur Jenderal BPN sementara itu Ali Budiardjo diangkat sebagai Direkturnya. Ali Budiardjo merasa bahwa kedudukan Djuanda sebagai Direktur Jenderal sudah tepat mengingat pengalaman fungsional Djuanda dalam bidang administrasi negara lebih jauh daripada dirinya. Di samping itu sebagai orang non-partai, Djuanda dianggap memiliki hubungan yang baik dengan para politisi.[32] Perlindungan terhadap kaum ahli, baik di BPN maupun di Universitas seperti FEUI ini merupakan sesuatu yang dipercayai oleh Djuanda hingga akhir hayat hidupnya. Ketika Soemitro Djojohadikusumo bergabung dengan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, ada kekhawatiran bahwa anak didiknya di FEUI akan mendapatkan efek negative dari tindakannya ini. Tetapi Djuanda merupakan salah satu patron dalam perlindungan terhadap ekonom-ekonom baru Indonesia ini.[33]

Sebagai Kepala BPN, Djuanda berperan dalam menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (RPLT-I). Penyusunan ini sulit karena kurangnya data yang valid mengenai kependudukan dan perekonomian nasional. BPN memutuskan untuk fokus terlebih dahulu pada rencana-rencana pemerintah yang terdapat dalam semua kementerian. Rencana pembangunan dibatasi dan disesuaikan dengan kekuatan keuangan negara. Pemerintah tidak mengajak dunia usaha dan swasta dalam rancangan ini, mengingat keraguan keinginan kerja-sama swasta yang pada saat itu sebagian besar masih dikuasai oleh orang Belanda. Guna melaksanakan hal ini maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional yang beranggotakan para Menteri Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dengan Djuanda bertindak sebagai Sekretarisnya. Posisi Djuanda sebagai sekretaris Dewan Perancang Nasional mempermudah hubungan Biro Perancang Negara dengan semua kementrian. Djuanda juga mengikutsertakan insinyur-insinyur muda dalam Biro Perancang, seperti Sie Kwat Soen, Koesoediarso Hadinoto, Salman, Soebekti, Rahman Subandhi dan Sayuti Soediono. Guna menyamakan pembangunan nasional dan daerah, Djuanda mengirim dua pegawai BPN yang pandai, Widjojo Nitisastro dan Emil Salim, untuk melakukan survei dan penelitian ke berbagai daerah. Widjojo ini akan menjadi pemimpin dari grup teknokrat Orde Baru yang dikenal dengan nama *Mafia Berkeley*.

Sementara staf-staf ahli asing diperbantukan untuk menangani masalah-masalah pembiayaan, pendapatan nasional dan model pembangunan. Hasilnya tersusun RPLT 1956-1960 setebal 277 halaman dalam bentuknya yang siap diajukan kepada pemerintah. Rencana tersebut berisi hal-hal pokok seperti penduduk, pembiayaan rencana pembangunan, pertanian, kehutanan, perikanan, pengairan, sumber-sumber mineral, tenaga listrik, perindustrian, perhubungan, sumber tenaga kerja, hubungan perburuhan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perumahan, pembangunan masyarakat desa, koperasi, transmigrasi, administrasi pemerintahan serta perencanaan dan organisasinya.

Setelah disetujui oleh anggota kabinet, selanjutnya Djuanda mengajukan RUU RPLT tersebut ke Parlemen untuk dibahas. Berbagai fraksi di parlemen mengapresiasi RUU tersebut, baik itu PKI, Masyumi, NU, PNI menyatakan perlunya RPLT disahkan untuk kemajuan bangsa dan daerah. Pasca disetujui oleh Parlemen, Djuanda menyatakan kepada publik bahwa disahkannya RPLT ini dapat memberikan kepercayaan dari berbagai pihak terhadap keberlangsungan pemerintahan pembangunan Indonesia meskipun terjadi pergantian menteri. RPLT juga menjadi suatu ikatan bagi kementerian-kementerian di kabinet untuk saling bekerja bersama.[34]

Meski tidak memuaskan semua pihak, terutama pemerintah di daerah-daerah, RPLT 1956-1960 adalah suatu keberhasilan awal dalam bidang rancangan pembangunan. Dapat dibayangkan bahwa Indonesia baru keluar dari krisis revolusi fisik yang tentu saja menghancurkan segala sumber daya sosial maupun ekonomi di dalamnya, namun telah tercipta kesadaran akan pentingnya koordinasi di tingkat tinggi dalam administrasi pemerintahan, suatu hal yang belum dikenal pada saat itu. Pemerintah menjadi semakin menyadari arti penting pembangunan dan terdorong untuk memperbaiki anggaran belanja modal dan bantuan luar negeri.[35]

Kerja Djuanda dan rekan-rekannya dalam bidang perancangan pembangunan membuahkan hasil. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan negara-negara lain dalam memberi bantuan kredit kepada Indonesia. Awal Januari 1959 kredit senilai 100 juta disepakati dengan Uni Soviet. Kredit tersebut dikhususkan dalam bidang ekonomi dan teknik yang pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing kementerian yang dikoordinir oleh Biro Perancang Negara.[36] Kredit dari Polandia terkait dengan bantuan pembangunan galangan kapal yang dilaksanakan oleh Kementereian Urusan Veteran juga hampir mencapai persetujuan senilai $ 5 juta. Beberapa bulan sebelumnya, Djuanda juga telah mendapat tawaran kredit dari Yugoslavia sebesar $ 10 juta.[37] Tapi rancangan RPLT I ini tidak pernah benar-benar terlaksana.

PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT (*COMMUNITY DEVELOPMENT*)

Djuanda juga merupakan seorang yang memprakarsai pembangunan Indonesia dari masyarakat desa atau *community development*. Djuanda meyakini bahwa pembangunan masyarakat adalah pembangunan dari akar rumput oleh masyarakat yang tergerak dengan mengupayakan sendiri hal-hal yang dirasakan perlu bagi masyarakat desa. Pendekatan ini merupakan pendekatan rintisan yang mengedepankan peran masyarakat desa dengan terlebih dahulu dilatih dalam hal pembangunan, teknik diskusi serta cara-cara mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat untuk kemudian dikomunikasikan dengan struktur pemerintahan di level yang lebih tinggi. Djuanda membentuk tim di dalam Biro Perancang Negara untuk mengkaji kelayakan pendekatan pembangunan masyarakat untuk berkunjung ke daerah-daerah. Tim dipimpin oleh Boediono selaku pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri untuk mengunjungi daerah-daerah di Jawa, Bali, Sulawesi maupun

Nusa Tenggara Timur. Pada perkembangannya Djuanda merencanakan suatu konferensi untuk menanggapi hasil kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah tersebut dalam suatu Konferensi Nasional tentang Pembangunan Masyarakat Desa.[38] Hal tersebut dilakukan setelah sebelumnya dibentuk suatu Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (BKPMD) yang dilantik oleh Djuanda pada tanggal 19 Desember 1960. Di dalam pelantikan tersebut, Djuanda berpesan agar BPKMD fokus pada suatu kerja pembentukan masyarakat yang adil dan makmur.[39]

Djuanda aktif mengikuti perkembangan wacana perekonomian di ranah masyarakat sipil. Dalam Kongres Ekonomi Nasional (Kensi) Djuanda menyampaikan kepada peserta kongres agar memikirkan jalan bagaimana ekonomi nasional akan ditempuh. Kongres diharapkan akan dapat menemukan sistem ekonomi nasional yang sesuai dengan kepribadian, akhlak dan jiwa bangsa Indonesia.[40] Pada akhirnya kongres yang dihadiri oleh seluruh badan pekerja Kensi daerah beserta organisasi-organisasi induk dari berbagai perusahaan memutuskan beberapa hal. Hal terpenting adalah bahwa dasar perekonomian nasional akan bertumpu pada asas kekeluargaan serta dukungan terhadap Indonesianisasi. Asas kekeluargaan tersebut dijalankan dengan "terencana" dan "terpimpin" dimana pemerintah bertindak sebagai pembimbing serta pengawasan secara luas. Kensi juga bersedia bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan Indonesianisasi dengan cara menampung usaha-usaha dalam kelompok usaha yang sejenis.[41] Dengan demikian Kensi memiliki visi yang sama dengan pemerintahan Djuanda dalam mewujudkan perekonomian nasional.

PERDANA MENTERI DJUANDA KARTAWIDJAJA (APRIL 1957–JULI 1959)

Secara politik-kenegaraan, periode percobaan demokrasi-parlementer memperlihatkan kondisi yang tidak stabil dan rapuh. Rickleffs menyatakan bahwa struktur sosial dan politik negara mulai hancur.[42] Sentimen-sentimen kesukuan dan kedaerahan merebak yang didorong oleh perbedaan-perbedaan daerah. Ketidak-puasan terhadap pimpinan pusat di Jakarta disuarakan, terutama oleh kalangan militer di daerah-daerah yang menganggap elit-elit politik di Jakarta lemah dan korup. Analisis lebih mendalam memperlihatkan bahwa faktor ekonomi memiliki andil penting dalam kekacauan Indonesia pada dekade 1950an. Pemerintah Indonesia justru menempuh kebijakan yang kontraproduktif, seperti kebijakan kurs beraneka yang membebani lalu lintas perdagangan yang menguntungkan, iklim bisnis yang tidak ramah terhadap pengusaha swasta yang sebagian besar modalnya berada di tangan orang-orang Eropa maupun Tionghoa, serta adanya praktek *rent-seeking* di mana peraturan maupun birokrasi yang penuh dengan pungutan-pungutan tidak resmi terhadap para pengusaha. Singkatnya perdagangan menjadi tidak aman dan tidak menguntungkan sehingga bisnis swasta beralih ke luar negeri. Beberapa hal tersebut mengakibatkan terjadinya kemandekan ekonomi dan ketegangan politik.[43]

Krisis di dalam tubuh militer daerah semakin memuncak pada pertengahan dekade 1950an. Perwira-perwira daerah mulai menentang Nasution selaku pimpinan pusat tentara di Jakarta sebagai akibat dari krisis yang berlarut-larut. Nasution tidak menyukai panglima-panglima militer daerah menjalin hubungan tidak lazim dengan instansi-instansi sipil daerah luar Jawa sebagai upaya untuk membiayai satuan-satuan dan penghasilan pribadi mereka. Nasution menghendaki agar tubuh militer dapat dikendalikan dari pusat, bersatu dan bebas dari hubungan sipil. Awal tahun 1955 penyelundupan secara besar-besaran telah dimulai dari Sulawesi, terutama Minahasa. Berlanjut hingga awal tahun 1956 suatu penyelundupan karet dilancarkan oleh panglima Sumatera Utara, Kolonel Simbolon.[44] Ketegangan pun meningkat, di mana pada bulan Desember 1956, para perwira tentara di Sumatera (veteran-veteran bekas Divisi Banteng) memutuskan untuk melawan Jakarta. Di Sumatera Barat militer mengambil-alih pimpinan sipil, begitupula di Sumatera Utara oleh Kolonel Simbolon. Di Sulawesi Letkol Sumual mengumumkan keadaan darurat perang di seluruh wilayah Sulawesi. Deklarasi Perjuangan Semesta (Permesta) dikumandangkan dan disusul dengan pengambilalihan kekuasaan sipil seluruh wilayah Sulawesi dan Maluku. Krisis ini ditanggapi oleh Nasution dengan mendesak Sukarno untuk memberlakukan keadaan darurat militer, sehingga Nasution dapat leluasa membereskan persoalan internal dalam tubuh militer.[45]

Di tengah-tengah krisis tahun 1957, Sukarno memutuskan untuk mengakhiri bentuk pemerintahan parlementer dan menuju pemerintahan Demokrasi Terpimpin.[46] Dalam sistem baru ini, tugas pemerintahan beralih dari parlemen menuju eksekutif, yaitu Presiden. Sementara itu partai secara perlahan diganti dengan grup-grup karya, yaitu grup yang berdasar pada posisi mereka dalam masyarakat, contoh pemuda, petani, wartawan dan lain-lain. Sukarno mencoba melegitimasi rumusan baru tersebut sebagai suatu cara-cara kuno Indonesia dalam hal mengambil keputusan, meski ia sendiri sebenarnya tidak mengandalkan tradisi untuk menggerakkan sistemnya. Sukarno menempatkan dirinya di tengah-tengah demokrasi ciptaannya sebagai konsiliator antara pandangan yang bertikai, sebagai pemandu yang keberadaannya sangat dibutuhkan agar sistem dapat berjalan.[47] Untuk menjalankan pemerintahan, Sukarno membentuk Kabinet Karya dan menunjuk Djuanda sebagai Perdana Menteri. Penunjukkan tokoh non-partai diharapkan dapat mendorong stabilitas politik, lagipula pemerintahan dalam kabinet ini tidak akan terlalu tunduk dan bergantung pada suara-suara di parlemen. Sama seperti Sukarno, Djuanda meyakini bahwa jatuh-bangunnya kabinet selama ini yang menyebabkan pembangunan tidak dapat berjalan lancar diakibatkan oleh karena belum ditemukannya formula baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.[48]

Kabinet Djuanda didukung oleh tokoh-tokoh dari PNI dan NU. Nama-nama seperti Hardi (PNI), K.H. Idham Chalid (NU), dan Leimena (Partai Kristen) duduk dalam posisi Wakil Perdana Menteri. Subandrio, Chairul Saleh dan Moh. Yamin masing-masing menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Veteran dan Menteri Negara. Walaupun PKI tidak duduk langsung dalam Kabinet, ia diwakili oleh wakil dari BTI. Presiden Sukarno menginginkan empat kaki besar sebagai inti kabinet, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI.[49] Mr. Sukardan dan Mohammad Noor yang tidak lain adalah kawan

Djuanda duduk sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum. Pokok kerja kabinet ini berkutat pada pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melanjutkan pembatalan KMB dan perebutan Irian Barat. Tidak semua program tersebut berjalan dengan baik mengingat negara dalam kondisi yang terancam perpecahan.

Langkah pertama yang diambil oleh kabinet yang dipimpin Djuanda adalah pembentukan suatu dewan yang berfungsi sebagai penasehat pemerintahan, suatu Dewan Nasional. Dewan Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat tertanggal 6 Mei 1957 yang terdiri dari 45 orang dan dipilih oleh presiden. Ketua Dewan Nasional dipegang langsung oleh Presiden dan terdiri dari kaum fungsional, Perdana Menteri, tiga Wakil Perdana Menteri, tiga Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Kepala Kepolisian dan Jaksa Agung. Pada kenyataannya peran Dewan Nasional cukup dominan sehingga banyak yang menilai keberadaanya memperlemah Parlemen.[50] Posisi Dewan Nasional ini merupakan bagian dari konsepsi Presiden untuk mendirikan sebuah negara tanpa Partai Politik melainkan terdiri atas golongan-golongan fungsional.

Dewan Nasional dalam sidangnya menyarankan untuk mengadakan Musyawarah Nasional guna menangani permasalahan keretakan nasional dan adanya gerakan-gerakan separatis ataupun gerakan anti-Jakarta yang semakin membesar. Gerakan separatis yang paling signifikan berasal dari PRRI, yang meliputi tokoh-tokoh nasional dari Partai Masyumi dan PSI, termasuk Soemitro Djojohadikusumo. Ada kekhawatiran pula bahwa gerakan PRRI ini didukung oleh Amerika Serikat dan sehingga ada ancaman intervensi militer AS ke tanah air. Mohammad Hatta berhenti jadi Wakil Presiden pada Desember 1959 dan ada anggapan bahwa Dwitunggal sudah retak. Djuanda meninjau beragam daerah untuk pembentukkan Daerah Otonom tingkat I (Provinsi) Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Pemekaran macam ini merupakan jawaban atas ancaman disintegrasi yang semakin menguat. Munas mengundang pemerintah daerah sipil dan militer beserta penasehat dan tokoh-tokoh daerah. Munas ini awalnya dipenuhi oleh rasa tegang dan saling curiga dan mencurigai, tetapi pada akhirnya mencapai kesepakatan dalam hal-hal yang berarti. Sukarno dan Hatta mengeluarkan pernyataan bersama guna menekankan pentingnya kebersamaan.

MUSYAWARAH NASIONAL 1957

Pada perkembangannya, Dewan Nasional menasehati pemerintah agar mengadakan suatu pertemuan yang dikemas dalam Musyawarah Nasional (Munas). Nasehat itu diajukan oleh Djuanda kepada Kabinet dalam sidang tanggal 21 Agustus 1957 dengan tujuan apa yang disebut dengan normalisasi keadaan Republik.[51] Munas dilaksanakan pada bulan September 1957 bertempat di Gedung Proklamasi, jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta dengan harapan kekacauan yang terjadi akibat perselisihan antar struktur kepemimpinan nasional baik sipil maupun militer dapat diredam dengan kembali pada ruh Proklamasi 1945. Tokoh-tokoh yang dianggap penting hadir dalam acara ini, seperti Sukarno dan Hatta yang mana keretakan hubungan keduanya dianggap sebagai sumber berbagai masalah nasional yang sedang terjadi. Agenda Munas akan berkisar pada persoalan administrasi, otonomi, perimbangan keuangan, pemerintahan, pembangunan angkatan perang, pembangunan daerah, penyempurnaan organisasi di pusat dan daerah.

Djuanda memiliki peran penting dalam Munas tersebut. Ia bertindak sebagai ketua Munas dan memegang kendali operasional jalannya Munas. Di dalam pidato pembukaan, Djuanda menyatakan :

"Kejadian-kejadian yang tidak normal di negara kita akhir-akhir ini perlu segera dipecahkan dan dicarikan jalan penyelesaiannya sehingga keadaan RI normal kembali. Dalam hal ini pemerintah berkeyakinan bahwa dengan Musyawarah Nasional ini kita akan dapat membuka jalan guna mengatasi persoalan-persoalan dan kesukaran-kesukaran karena peserta ikhlas datang ke tempat musyawarah untuk sama-sama menghadapi dan menyelesaikan bahaya yang mengancam kita bersama dimana akan tidak terjadi pendiktean oleh suatu pihak terhadap yang lainnya, tidak terdapat curiga-mencurigai satu sama lain dan tidak akan saling tuduh-menuduh siapa yang bersalah. Musyawarah Nasional adalah gelanggang persaudaraan serta keutuhan. Dan di atas semuanya ini, Proklamasi 17 Agustus 1945".[52]

Kutipan dari pernyataan Djuanda tersebut menegaskan bahwa seolah-olah ia berada pada posisi sebagai penengah pihak-pihak yang bertikai. Sulit rasanya membayangkan apabila Djuanda adalah tokoh partai, karena tentu saja ia tidak akan bisa berdiri mengayomi pihak-pihak yang berseteru. Itulah mengapa pidato-pidato dalam Musyawarah Nasional dari pihak non-partai seperti Hatta sangat diharapkan dapat meredakan ketegangan. Hatta menegaskan bahwa yang terpenting adalah perlunya kembali pada tujuan semula yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta membangun suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila.[53]

Pada praktiknya, Musyawarah Nasional berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil dalam kesepakatan bersama. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sukarno-Hatta sebagai simbol persatuan bangsa. Pernyataan bersama tersebut berbunyi :

"Bahwa kami bersama atas nama Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bahwa sesungguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hak milik seluruh rakyat Indonesia, yang mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Bahwa Pancasila yang dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar RI 1945 adalah jaminan hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia untuk tetap berkehidupan bebas dan merdeka serta

mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Karenanya adalah kewajiban mutlak kami untuk tetap turut serta dengan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah RI serta segenap alat-alat kekuasaan negara, membina dan membela dasar-dasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam kedudukan apapun juga adanya".[54]

Munas kemudian ditutup dengan kunjungan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Semaki Yogyakarta. Tujuannya untuk menegaskan bahwa mereka akan berjanji setia pada keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.

Dari sudut pandang perwakilan daerah, kesepakatan Munas diterima dengan baik sekaligus perasaan pesimis. Delegasi Sumatera Barat yang diwakili Kolonel Husein menekankan bahwa selama ini daerah bergolak karena bertujuan untuk mengoreksi pemerintah pusat dan menjelaskan masalah-masalah besar yang dihadapi seperti pecahnya dwitunggal serta masalah pra-senat. Daerah menginginkan agar dibentuk pra-senat di mana anggotanya dipilih oleh daerah sehingga hubungan yang harmonis antara daerah dan pusat dapat terbina.[55] Forum Munas dapat memuaskan delegasi dari daerah-daerah karena mereka dapat secara terbuka mengutarakan pendapatnya. Namun demikian, mereka psimis karena dwitunggal Sukarno-Hatta sulit untuk disatukan kembali. Usaha-usaha yang dilakukan untuk memulihkan kerjasama antara Sukarno dan Hatta gagal tergerus ketidakmampuan dan keengganan mereka untuk bekerja-sama.[56] Hatta kurang begitu antusias dengan hasil Munas karena harapannya agar posisinya dalam pemerintahan kembali menguat telah pupus.[57]

Keberhasilan acara Munas didorong oleh tekad yang kuat Djuanda untuk menghadirkan pimpinan dewan-dewan di daerah yang bergolak ke Munas, karena pada dasarnya merekalah yang merupakan ujung tombak permasalahan di daerah. Djuanda adalah orang yang meyakini bahwa pergolakan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan diplomasi sebelum akhirnya upaya militer terpaksa ditempuh. Upaya tersebut tentu saja terhalang oleh KSAD yang menolak mereka. Nasution menghendaki agar Munas tidak perlu dihadiri oleh perwira-perwira daerah yang telah melakukan tindakan perlawanan. Pada posisi yang sulit, Djuanda mengutus salah seorang pensiunan tentara, Mayor Subowo untuk menemui Letkol Sumual di Manado agar bersedia menghadiri Munas. Utusan tersebut dibiayai oleh Djuanda tanpa sepengetahuan pimpinan militer. Sumual menyambut gembira ajakan tersebut dan bersedia berpartisipasi. Djuanda dan Sumual pun bertemu di Jakarta sebelum acara Munas berlangsung. Djuanda meminta Mayor Alwin Nurdin sebagai utusan berikutnya untuk menghubungi dewan-dewan daerah di Sumatera, seperti Kolonel Simbolon dan Letkol Husein. Pada akhirnya mereka bertemu dengan Letkol Barlian di Palembang dan sepakat untuk mendukung Munas. Hasil pertemuan mereka di Palembang dikenal dengan Piagam Palembang, yang menjadi platform perjuangan daerah-daerah yang akan diperjuangkan bersama di Munas.[58] Semua perencanaan di Palembang tersebut berlangsung atas andil dan tentu saja sepengetahuan Djuanda sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan.

Munas menghasilkan keputusan untuk membentuk panitia yang terdiri dari tujuh orang yang akan membahas langkah-langkah yang lebih konkret untuk menjembatani perbedaan antara pimpinan pusat tentara dan panglima daerah. Panitia ini diketuai oleh Presiden Sukarno dan anggotanya adalah Hatta, Djuanda, Leimena, Sri Sultan HB IX, Azis Saleh dan Nasution. Suatu komisi dari Panitia Tujuh juga dibentuk sebagai tim pencari fakta mengenai pergolakan yang melibatkan militer di daerah. Banyak ketidakjelasan dan ketidakpastian di sini. Komisi sempat meminta pemerintah untuk mencabut tuntutan kepada Kolonel Lubis yang tentu saja mendapat penentangan dari Nasution. Ketika komisi mengadakan penyelidikan di Sumatera Barat, perwira militer Dahlan Djambek mengeluh bahwa hasil Munas semakin kabur dan pesimis tentang apa yang telah terjadi.[59] Hasil dari Panitia Tujuh belum sempat diumumkan karena terjadi Peristiwa Cikini 30 November 1957 yang semakin memperkeruh keadaan.

NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA

Romantika Munas tidak bertahan lama, tidak seperti apa yang Djuanda inginkan. Cita-cita Djuanda untuk menciptakan rekonsiliasi politik dan militer menemui kegagalan. Krisis politik nasional kembali memuncak. Tanggal 18 November 1957, kurang dari dua minggu terjadinya peristiwa Cikini, diadakan rapat umum di Jakarta dalam upaya pembebasan Irian Barat.[60] Rapat tersebut diikuti dengan tindakan-tindakan yang konfrontatif terhadap Belanda. Pada tanggal 3 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda menyerukan pemogokan total secara nasional selama 24 jam di berbagai perusahaan milik Belanda. Dampaknya luar biasa, terjadi gerakan-gerakan yang cukup anarki di mana kaum buruh pelayaran merebut kantor pusat *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) di Jakarta. Hari-hari berikutnya diwarnai aksi demonstrasi dan pengambilalihan milik Belanda, seperti perkebunan, pabrik, perusahaan, bank, rumah kediaman.

Guna mendukung pelaksanaan nasionalisasi, dibentuklah Badan Nasionalisasi (BANAS) perusahaan-perusahaan Belanda yang dipimpin oleh suatu Dewan Pimpinan dengan Djuanda sebagai ketuanya. Kelompok pertama perusahaan Belanda yang dinasionalisasi meliputi 38 perusahaan perkebunan tembakau yang dimiliki perusahaan perkebunan besar seperti NV. Verenigde Deli Mij., N.V. Senembah Mij., N.V. Verenigde Klatensche Cultuur Mij., N.V. Landbouw Mij Oud Djember, dsb. Disusul dengan perusahaan perkebunan/pertanian lainnya yang berjumlah 205 perusahaan. Kelompok usaha dagang juga tak luput dari nasionalisasi, termasuk perusahaan yang dikenal sebagai *the big five*, yakni Internationale Crediet en Handels Vereniging Rotterdam (Internatio), Jacobson van den Bergh, Borneo-Sumatra Handelsmaatschappij (Borsumij), Lindeteves Stokvis dan Geo Wehry.[61]

Hal tersebut justru berakibat pada kekacauan ekonomi di berbagai tempat, terutama di luar Jawa. Penghentian pelayaran KPM misalnya, justru dimanfaatkan oleh pimpinan gerakan di daerah-daerah untuk mengadakan barter langsung dengan luar negeri. Barter langsung dengan luar negeri atau barter ilegal ini akan terus terjadi, bahkan mendekati akhir tahun

1958 pemerintah Djuanda bersama Nasution sepakat untuk memperberat hukuman bagi siapapun yang tetap melanggar.[62] Nasionalisasi berbagai aset-aset Belanda yang lain juga terjadi. Maskapai Belanda KLM dilarang terbang dan mendarat di Indonesia. Seluruh perwakilan konsuler dengan Belanda sudah dihentikan sejak 5 Desember 1957. Modal-modal perusahaan Belanda diambil-alih dan didirikan Front Nasional Pembebasan Irian Barat pada tanggal 10 Februari 1958. Pemerintah menyerukan agar orang-orang Belanda segera meninggalkan Indonesia. Undang-undang No.86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda disetujui dan disahkan pada 27 Desember 1958. Undang-undang tersebut disahkan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembatalan KMB serta pembebasan Irian Barat. Meski upaya konfrontatif telah mulai dilakukan, upaya pembebasan Irian Barat belum akan berhasil pada masa kabinet Djuanda.

Terjadinya peristiwa Cikini yang menyudutkan pelopor gerakan daerah membuat suasana tidak aman sehingga mereka melakukan 'hijrah' menuju daerah aman. Letkol Sumual kembali ke Manado, Lubis meninggalkan Jakarta, tokoh-tokoh seperti Natsir dan Syafruddin Prawiranegara pergi menuju Padang menghindari kekacauan dan aksi teror di Jakarta. Kabinet Djuanda mendapatkan kecaman keras akibat seruan pemogokan kerja para buruh yang juga digencarkan oleh serikat buruh PKI (SOBSI). Pemogokan dilakukan dengan alasan kegagalan PBB memasukkan agenda Irian Barat dalam sidangnya. Tindakan PKI dan kabinet dikecam keras oleh tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, Soemitro Djojohadikusumo, serta pimpinan Masyumi, PSI dan Katolik. Tokoh-tokoh tersebut kini secara jelas berseberangan dengan Jakarta.

OPERASI MILITER TERHADAP DAERAH

Kegagalan meredam gejolak antara pusat dan daerah melalui Munas menyadarkan Djuanda bahwa tidak ada cara lain selain penyelesaian dengan cara militer. Keputusan tersebut diambil setelah pada bulan Januari 1958 kabinet diultimatum oleh Simbolon melalui radio Padang agar Djuanda mengundurkan diri. Ultimatum Simbolon termasuk agar supaya dibentuk kabinet yang dipimpin oleh Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai tokoh yang dianggap bebas dari komunis. Ultimatum tersebut disertai ancaman bahwa akan didirikan kabinet alternatif untuk seluruh Indonesia di bawah Perdana Menteri Syafrudin Prawiranegara jika Djuanda menolak mundur. Meski Letkol Husein sempat mencoba menawarkan kompromi kepada Jakarta dengan dalih menyelamatkan Negara Kesatuan dan mendorong agar pemerintah mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang tengah dihadapi, pemerintah dan militer di Jakarta membalas dengan membekukan Komando Sumatera Tengah. Kabinet memecat dengan tidak hormat Husein, Lubis, Djambek dan Simbolon.[63]

Letkol Husein mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang pada 15 Februari 1958. Susunan pemerintahan dipimpin oleh Syafrudin sekaligus merangkap sebagai Menteri Keuangan. Kolonel Simbolon, Kolonel Djambek dan Saleh Lahade masing-masing diangkat sebagai Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan. Tokoh-tokoh sipil seperti Burhanuddin Harahap dan Sumitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Keamanan dan Kehakiman serta Menteri Perdagangan dan Perhubungan. Mantan presiden RI Yogyakarta Mr. Assaat juga meninggalkan Jakarta dan bergabung dengan PRRI.[64] Pemerintahan ini berjanji akan mengembalikan mandat setelah Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono membentuk kabinet yang baru.

Djuanda dan Nasution yakin bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan jalan militer.[65] Djuanda memerintahkan penangkapan anggota kabinet PRRI, Syafrudin, Syafei, Burhanuddin Harahap, Sumitro dan Abdulgani Usman sehari setelah berdirinya PRRI. Letkol Somba yang pada tanggal 17 Februari 1958 mendeklarasikan Dewan Manguni sebagai bagian dari PRRI di Sulawesi Utara tak luput dari pemecatan pimpinan di Jakarta. Anggota parlemen di Jakarta, Soebadio (Fraksi PSI) sempat mendatangi rumah Djuanda dan membujuknya untuk mengundurkan diri, namun bujukan tersebut ditolak oleh Djuanda yang berpendirian akan mengatasi pemberontakan yang tengah terjadi.[66] Nasution memerintahkan penyerangan udara atas Painan, Padang dan Bukittinggi pada 21 dan 22 Februari 1958, menghancurkan sarana telekomunikasi pemberontak yang utama. Djuanda dan Nasution tidak akan berunding sebelum Pekanbaru dapat diambilalih.

Operasi militer segera digencarkan untuk melumpuhkan PRRI. Secara garis besar pemerintah dan militer pusat membagi operasi militer ke dalam dua bagian. Operasi 17 Agustus di bawah Kolonel Ahmad Yani untuk mengatasi PRRI dan Operasi Merdeka di bawah Letkol Rukminto untuk menumpas Permesta. PRRI berhasil diatasi dalam kurun waktu Maret hingga akhir Mei yang ditandai dengan menyerahnya Husein dan kawan-kawannya. Operasi militer Merdeka untuk menumpas Permesta dibagi menjadi beberapa tahap Operasi Sapta Marga dengan lokasi yang berbeda-beda, seperti di Sulawesi Utara bagian tengah, Sulawesi Utara bagian Selatan, Kepulauan Utara Manado, Jailolo serta perebutan lapangan udara Morotai dan Halmahera.[67]

Tokoh-tokoh pemberontak dari kalangan sipil secara otomatis juga terdesak akibat kekuatan militer mereka terpukul. Sjafruddin marah besar dan berusaha mencari Kolonel Husein seraya bersumpah akan tetap tinggal di hutan.[68] Keyakinan Sjafruddin didasari atas keberhasilan dirinya bergerilya pada sepuluh tahun yang lalu ketika Belanda melancarkan agresi ke ibukota Yogyakarta. Namun Sjafruddin dan kawan-kawannya salah perhitungan. Sjafruddin tidak sedang menghadapi Belanda dimana semua unsur kekuatan baik sipil maupun militer bersatu, yang mereka hadapi adalah Sukarno, Djuanda dan militer Jakarta yang dalam banyak hal lebih menguasai sumber daya kekuatan dibanding mereka sendiri. Dalam kunjungannya ke negara-negara Eropa, Djuanda menyatakan dan memastikan bahwa figur-figur nasional termasuk Sukarno dan militer RI tidak dapat dikesampingkan dalam usaha meredam pemberontakan.[69]

Selain mengatasi pergolakan PRRI, masa pemerintahan Djuanda juga dituntut untuk meredam pemberontakan lain. Di Jawa Barat

terdapat gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pimpinan Kartosuwiryo.[70] Di Sulawesi Selatan terdapat Kahar Muzakar dan di Aceh terdapat Daud Beureh serta sisa-sisa pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) di Seram. Berbagai pergolakan tersebut juga diatasi oleh Djuanda dengan operasi militer hingga tahun 1959 yang meski belum tuntas dapat meminimalisir dampak-dampak politiknya. Baik PRRI maupun DI/TII bagi pemerintah sudah dianggap sebagai gerombolan pengacau yang perlu segera ditumpas.[71] Djuanda menyatakan dalam siaran pers bahwa Kabinet Karya harus berani mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang dianggap mengacaukan keamanan.[72]

KRISIS DI BADAN KONSTITUANTE

Di samping krisis keamanan nasional yang muncul akibat pergolakan militer di daerah-daerah, kabinet Djuanda menghadapi situasi yang sulit dari segi politik-ketatanegaraan. Sidang Badan Konstituante sejak 10 November 1956 hingga Januari 1959 masih menyisakan persoalan yang belum disepakati bersama. Berbagai hal tersebut meliputi persoalan *unitarisme* atau *federalisme, parlementer* atau *presidensil,* dasar negara maupun wakil kepala negara. Konstituante menemui jalan buntu karena menurut Pasal 134 UUD Sementara, tugas pembentukan UUD yang baru dibebankan kepada Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah.

Di tengah tidak-pastian dan stagnasi tersebut, Djuanda menyatakan asumsinya bahwa negara harus kembali ke UUD 1945 sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi terpimpin. Menurut Mr. Abd. Wahab, rekan kerja Djuanda, Perdana Menteri Djuandalah yang pertama-tama mencetuskan ide kembali kepada UUD 1945.

"Pada suatu waktu Pak Djuanda masuk kantor dan memanggil saya. Tanpa penjelasan dan pendahuluan, Ia menyerahkan sehelai kertas, bertuliskan tangan kepada saya. Kembali ke Undang-undang Dasar 1945, diikuti beberapa pont. Ia berkata minta tolong di-uitwerken (mengerjakan lebih rinci). Orang lain bisa mengatakan lain, tetapi sepanjang pengetahuan saya ide kembali ke UUD 1945 ini adalah ide Mang Djuanda, bukan dari Presiden Sukarno. Untuk pertamakali sayalah yang menyusun kerangkanya. Pak Djuanda kemudian mengirim surat kepada Presiden, yang pada waktu itu berada di Yogyakarta dengan anjuran kembali ke UUD 1945 via Konstituante".[73]

Surat yang dikirimkan Djuanda kepada Presiden mengenai ide kembali kepada UUD 1945 ditanggapi positif oleh Presiden. Guna menindaklanjuti hal tersebut Djuanda intens bertemu dengan Presiden maupun petinggi-petinggi partai. Mereka sepakat mengenai point-point pelaksanaan demokrasi terpimpin.[74] Di samping itu Djuanda juga mengajak masyarakat luas khususnya organisasi kemahasiswaan untuk mendukung langkah ini, terutama dalam hal kembali ke UUD 1945. Djuanda meminta mahasiswa agar turut aktif di dalam masyarakat mensosialisasikan sikap pemerintah ini.[75]

Pembukaan Sidang Kabinet di Istana Negara pada tgl 15 Januari 1959.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sumber lain menyatakan bahwa pencetus ide kembali ke UUD 1945 adalah berasal dari Nasution. Daniel Lev menyatakan bahwa Nasution berkepentingan dengan kembalinya UUD 1945 karena pertimbangan kepentingan posisi tentara untuk turut aktif dalam masyarakat dan politik Indonesia. Guna mewujudkan hal tersebut, harus terbuka peluang agar Sukarno menjadi Pemimpin Besar dan menyingkirkan parlemen. Usaha tersebut hanya dimungkinkan dengan kembalinya UUD 1945. Nasution akan lebih leluasa bermanuver tanpa hambatan sistem dari keberadaan parlemen yang kedudukannya lebih kuat dari presiden. Dengan demikian Nasution berharap agar Konstituante akan menyetujui untuk kembali ke UUD 1945.[76] Terlepas dari perbedaan pendapat siapakah yang mencetuskan ide tersebut, perlu diketahui bahwa Nasution dan Djuanda adalah sama-sama pendukung Sukarno dan masing-masing pihak memiliki motif tersendiri dengan kembalinya UUD 1945. Djuanda sebagai orang non-partai, seorang administrator tentu menyukai dan akan dapat leluasa bekerja secara maksimal tanpa hambatan seperti intrik-intrik maupun negosiasi politik yang rumit dalam parlemen.

Awal Maret 1959, Djuanda mengunjungi pimpinan Konstituante di Bandung untuk membicarakan mengenai rencana ini. Pertemuan tersebut juga membicarakan mengenai prosedur hukum: apakah harus disetujui kuorum Konstituante.[77] Tanggal 9 Maret 1959, Djuanda beserta tiga wakilnya, Hardi, Idham Chalid dan Leimena bertemu Presiden di Istana Merdeka. Mereka menyampaikan hasil pertemuannya dengan Konstituante.[78] Presiden mengapresiasi hasil pertemuan Djuanda dengan Konstituante. Di Istana Merdeka, mereka juga menyinggung mengenai persiapan amanat presiden yang akan disampaikan dalam rapat pleno Konstituante.

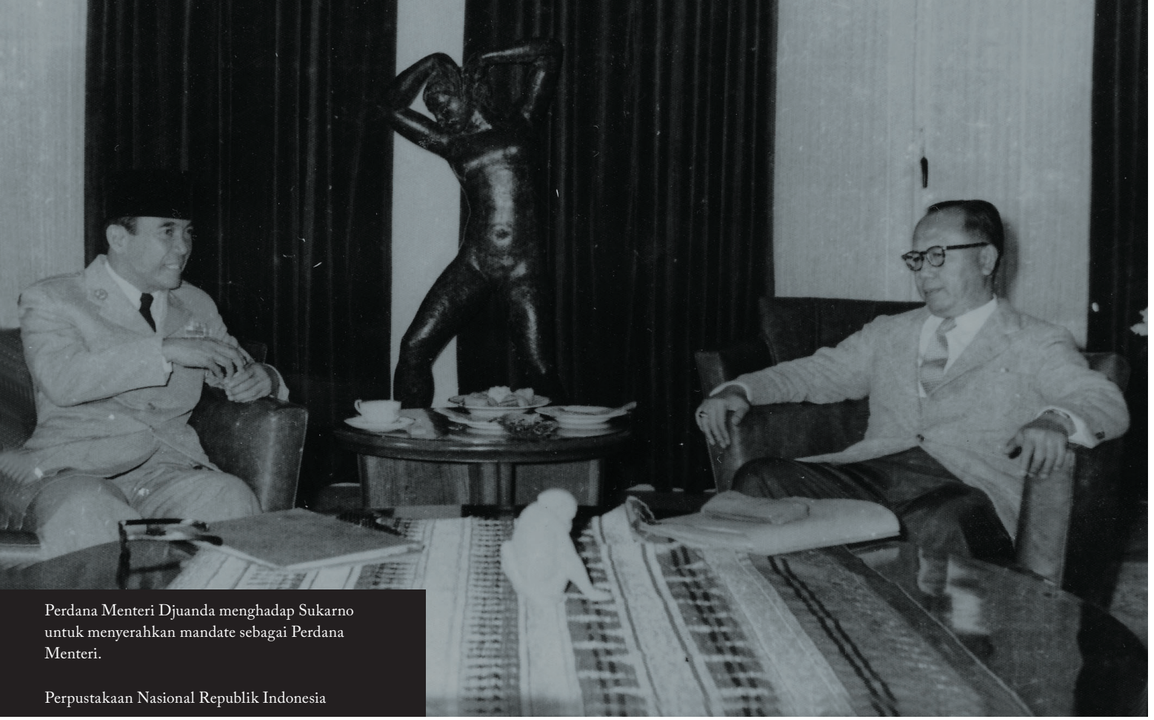

Perdana Menteri Djuanda menghadap Sukarno untuk menyerahkan mandate sebagai Perdana Menteri.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Acara penyerahan mandat Perdana Menteri oleh Ir. Djuanda.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Langkah-langkah untuk kembali ke UUD 1945 semakin jelas.

Meskipun wacana kembali ke UUD 1945 semakin menguat, bukan berarti Konstituante dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaannya. Sidang Konstituante masih menyisakan perdebatan. Hingga Mei 1959, Masyumi adalah partai yang menolak pendapat tersebut. Masyumi berpendapat bahwa UUD 1945 tidak mengandung hukum-hukum Islam dan menyarankan agar Dewan Penyusun UUD diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.[79] Kelompok yang menerima UUD 1945 seutuhnya diantaranya adalah PNI, PKI, Parkindo, PSI, Murba sementara yang menuntut untuk diadakan amandemen adalah Masyumi, PSII dan beberapa partai kecil lainnya, sementara NU berada di posisi tengah-tengah, yakni kembali ke UUD 1945 dengan Piagam Djakarta sebagai landasannya.[80]

Perbedaan pendapat ini mendorong Konstituante mengadakan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan hingga tiga kali dan belum memenuhi syarat 2/3 dari seluruh anggota yang hadir. Pada pemungutan suara yang ketiga, dari jumlah anggota yang hadir sebanyak 312, suara setuju sebesar 263 sementara yang menolak sebesar 203.[81] Kegagalan menghasilkan keputusan hingga tiga kali pemungutan suara ini mengakibatkan Konstituante pada kondisi stagnan dan sidang ditutup untuk masa reses dengan harapkan akan tercapai kemajuan-kemajuan yang signifikan. Tidak banyak yang mengira bahwa sidang tersebut akan menjadi sidang yang terakhir bagi Konstituante karena Presiden akan membubarkannya.

Kondisi politik mulai menghangat pasca Konstituante mengakhiri sidangnya. Kondisi ini disusul oleh Pusat Angkatan Darat yang mengeluarkan Peperpu (Peraturan Penguasa Perang Pusat) mulai tanggal 3 Juni 1959 yang melarang seluruh kegiatan politik, yakni segala kegiatan yang akan memengaruhi haluan negara. Sementara itu Djuanda terus berkomunikasi dengan Presiden melalui saluran kawat menginformasikan perkembangan di dalam negeri. Djuanda juga meyakinkan kepada publik agar tidak terjadi kekacauan. “Pemerintah akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan asalkan kita tetap tenang dan dapat menekan sentimen”, demikian pernyataan Djuanda kepada pers setelah Konstituante mengalami kemacetan.[82]

Seluruh kabinet berkumpul di Istana Bogor setelah Presiden tiba di tanah air guna membicarakan persoalan Konstituante. Mereka merumuskan suatu hal yang kemudian akan diumumkan oleh Presiden dan dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut menyatakan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi sekaligus pembubaran Konstituante.[83]

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya UUD 1945, Djuanda pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Di hadapan Parlemen, Djuanda menyatakan bahwa Presiden telah menerima baik penyerahan kembali mandat tersebut. Djuanda juga menyampaikan terima-kasih kepada Parlemen atas kerja-sama yang telah dilakukan selama dua tahun dalam kepemimpinannya sebagai Perdana Menteri, yang telah menghasilkan beberapa produk undang-undang, seperti UU Keadaan Bahaya, UU Wajib Militer, UU Nasionalisasi Perusahaan

Belanda, UU Pembatalan Hak Pertambangan, dll.[84] Peranan Djuanda sebagai Perdana Menteri telah berakhir, namun ia akan tetap menjadi menteri dalam Kabinet Kerja yang dipimpin langsung oleh Sukarno dan menjabat sebagai Menteri Pertama sekaligus merangkap Menteri Keuangan. Dengan demikian kiprah Djuanda akan tetap dominan. Tugas berat berikutnya telah menanti Djuanda, khususnya dalam bidang ekonomi-pembangunan sebagai salah satu program dari Kabinet Kerja.[85]

KEBIJAKAN LUAR NEGERI: DEKLARASI DJUANDA

Indonesia mewarisi hukum laut Hindia Belanda (*Teritoriale Zee en Maritieme Ordonanntie* 1939) yang mengikuti penetapan internasional mengenai garis batas laut; yaitu sejauh 3 laut mil dari batas pantai pada waktu surut. Hal ini merupakan permasalahan bagi Indonesia karena ini berarti bahwa sebagian besar dari lautan yang ada di antara pulau-pulaunya merupakan perairan internasional sehingga semua kapal berhak untuk melintas. Pada zaman revolusi, perairan Indonesia ditutup oleh angkatan laut Belanda yang lebih kuat untuk memblokade Republik dari dunia luar, khususnya dari akses transportasi perairan. Sebaliknya, pada waktu Konfrontasi Malaysia, pelayaran kapal induk Inggeris melewati Selat Sunda menimbulkan krisis di Jakarta karena potensi terjadinya perang terbuka antara Inggeris dan Indonesia yang akan meningkatkan perseteruan Konfrontasi menjadi perang terbuka. Oleh karenanya, kedaulatan atas lautan Indonesia dianggap sebagai kepentingan inti keamanan nasional dan menjadi basis dari Wawasan Nusantara, yang melihat wilayah daratan dan perairan Indonesia sebagai satu kesatuan.

Ketika Djuanda mengeluarkan deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, deklarasi tersebut bukan merupakan pernyataan hukum. Deklarasi Djuanda ini menyatakan bahwa:

"Secara historis, kepulauan Indonesia merupakan satu entitas dari sejak zaman dahulu. Melihat dari sudut wilayah secara keseluruhan dan kekayaan wilayah dari negara Indonesia, maka wajib untuk menganggap bahwa semua perairan diantara pulau-pulau sebagai bagian dari wilayah kesatuan... mengingat konsideran diatas, Pemerintah menyatakan bahwa semua perairan disekeliling, diantara dan yang menyatukan pulau atau sebagian dari pulau yang menjadi wilayah kepulauan Indonesia tanpa dihalangi oleh lebar ataupun dimensi dari kondisi alam daratannya dan sehingga merupakan bagian integral dari perairan dalam atau perairan nasional yang didalamnya berlaku kedaulatan penuh dari Indonesia".[86]

Perairan tersebut dinyatakan sebagai perairan nasional di mana pelayaran-pelayaran asing diperbolehkan selama tidak melanggar kedaulatan dan keamanan Indonesia.[87] Lebar laut wilayah Indonesia juga ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar. Ini adalah suatu ide yang mengusahakan agar laut tidak lagi dianggap sebagai pemisah namun merupakan alat pemersatu bangsa dan sebagai wahana pembangunan nasional. Pada tahun 1960, Deklarasi Djuanda mendapatkan basis hukum dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 4 perihal Perairan Indonesia yang menghitung wilayah air Indonesia dengan menarik garis lurus di antara titik-titik terluar dari pulau terluar Indonesia pada pasang surut. Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang mendeklarasikan konsep negara kepulauan. Diplomat Indonesia akan memperjuangkan pemberlakuan deklarasi Djuanda sampai berhasil pada Sidang UNCLOS (*United Nations Conference on Law of the Seas*) ketiga tahun 1982 yang memberlakukan hukum internasional atas konsep negara kepulauan.

Deklarasi Djuanda menjadi basis untuk konsep negara kepulauan Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Konsep pertahanan negara dapat ditarik dari pemahaman teritorial negara Indonesia yang meliputi kepulauan dan perairan. Dalam hal ini, sumbangsih Djuanda terhadap ide nasionalisme Indonesia maupun terhadap hukum internasional tidak dapat digugat. Dengan kerangka deklarasi ini, Indonesia mendapatkan legitimasi yang sah dari bentuk negara kepulauannya.

DJUANDA DI DALAM KABINET KERJA

Kabinet Kerja adalah suatu formatur kabinet yang dibentuk dalam praktik demokrasi terpimpin. Figur Sukarno sangat dominan dalam segala aspek, baik itu politik, sosial, ekonomi maupun kultural bangsa dengan kerangka yang dicetuskannya dalam MANIPOL-USDEK (Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Sukarno menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang nyaris tanpa batas, terlebih setelah ia membentuk DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) sebagai ganti dari DPR yang telah dibubarkan oleh Sukarno sendiri. Praktis seluruh jalannya pemerintahan berpusat dan tunduk kepada Presiden.

Seluruh anggota kabinet adalah eksekutor dalam pemerintahan. Para menteri maupun menteri muda harus mendukung penuh jalannya demokrasi terpimpin ini. Secara umum kabinet akan fokus pada urusan penyediaan sandang-pangan rakyat, penciptaan keamanan negara serta perjuangan Irian Barat. Pendirian lembaga negara yang cukup penting di masa-masa awal pemerintahan ini adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Perancang Nasional (Depernas). Lembaga-lembaga tersebut akan bekerja sebagai bagian dari jalannya pemerintahan.

Sebagai seorang administrator, Djuanda yang tidak lain adalah Menteri Pertama mendambakan kondisi kerja yang stabil, teratur dan tentu saja terpimpin dengan baik. Kondisi tersebut hanya dapat terwujud jika persatuan nasional dapat terbina dengan baik pula, tidak seperti kabinet-kabinet sebelumnya yang rapuh. Djuanda pun menyerukan kepada khalayak untuk menyambut era baru pemerintahan yang berpedoman pada Manifesto Politik dan UUD 1945 dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan pendapat yang berpotensi pada disintegrasi bangsa. Pada tanggal 20 Mei 1960, Djuanda menyatakan dalam suatu pidatonya sebagai berikut :

"Kita telah menerima Manifesto Politik sebagai pedoman perjuangan, sebagai haluan negara. Kita semua menyadari bahwa konsekuensi daripada Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 dan Manifesto Politik itu adalah perubahan-perubahan secara keseluruhan dan prinsipil di segala bidang kehidupan, di bidang ketatanegaraan, maupun di bidang sosial, ekonomi dan keuangan. pun kita semua mengetahui bahwa masih terdapat banyak perbedaan pendapat di dalam kita menafsirkan perubahan-perubahan yang diadakan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mengganti UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Tetapi ketahuilah bahwa segala perbedaan itu akan dapat kita selesaikan dengan baik, asal kita semua tetap mengutamakan keselamatan negara dan persatuan nasional di atas segala kepentingan".[88]

Tidak hanya di dalam negeri, seruannya untuk mensukseskan Manipol-USDEK juga disampaikan dalam kunjungannya ke luar negeri. Di sela-sela pidato kunjungan ke Soviet dalam rangka kerjasama ekonomi pembangunan pada Juli 1960, Djuanda menegaskan kepada pemerintah Uni Soviet bahwa Indonesia bercita-cita untuk menciptakan masyarakat sosialis yang berkepribadian Indonesia dan juga berusaha menciptakan masyarakat di seluruh dunia yang adil, makmur dan sejahtera.[89]

Di dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertama, Djuanda lebih aktif dalam urusan-urusan pembangunan perekonomian nasional daripada urusan politik-konfrontasi dengan Belanda dalam persoalan Irian Barat maupun konfrontasi dengan Malaysia yang sedang mencuat pada masa itu. Pada bulan Juli 1962, Djuanda bertemu kembali dengan pemerintah Uni Soviet, yakni Wakil I Ketua Dewan Menteri Uni Soviet, A. Mikoyan dalam rangka pembicaraan pelaksanaan proyek pembangunan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Uni Soviet berjanji untuk memberikan bantuan kredit sebesar-besarnya kepada Indonesia dalam pembangunan pabrik besi baja di Cilegon, pabrik pupuk di Cilacap, sebuah pusat hidro listrik dan pabrik alumunium, termasuk rencana pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan. Kerjasama tidak hanya selesai sampai di situ, namun juga akan berlanjut dalam pembiayaan proyek-proyek petro kimia yang akan menghasilkan bahan-bahan sandang dengan menggunakan minyak sebagai bahan baku, diantaranya seperti nilon dan segala macam plastik.[90]

Produksi memang merupakan sektor yang mutlak diperlukan dalam kondisi Indonesia yang sedang berupaya membangun pasca stagnasi ekonomi periode-periode sebelumnya. Awal tahun 1963, Djuanda mengumumkan sebagai langkah pertama menuju stabilisasi ekonomi untuk mengeluarkan Rp 1,8 milyar devisen atau kurang lebih 40 juta dollar AS guna mendatangkan barang-barang dari luar negeri yang dibutuhkan untuk memperbesar produksi di sektor pertanian, industri serta pengangkutan. Djuanda menekankan bahwa prioritas yang utama adalah untuk penyediaan bahan baku, bahan penolong dan berbagai suku cadang untuk produksi sandang pangan dan produksi ekspor. Prioritas kedua adalah untuk memperlancar pengangkutan dengan mengimpor ban-ban truk dan bus serta bahan yang diperlukan untuk pabrik-pabrik ban dalam negeri. Prioritas ketiga adalah untuk pemenuhan keperluan-keperluan di bidang yang lain seperti kebun-kebun karet, pabrik-pabrik gula, tekstil, pengangkutan laut, udara, dsb. Djuanda memperkirakan berbagai kebutuhan penunjang tersebut akan tiba di Indonesia dalam waktu tiga bulan pertama tahun 1963.[91]

Stabilisasi ekonomi yang tengah dilakukan tersebut pada kenyataannya belum menunjukkan keberhasilan. Kondisi ekonomi maupun moneter masih buruk pasca dilakukan pengguntingan pada tahun 1959. Devaluasi yang dikenal dengan istilah "gunting Djuanda" tersebut hanya bermanfaat dalam jangka pendek saja. Begitu pula dengan kebijakan pembekuan 90% uang simpanan yang berjumlah di atas Rp 25.000 serta penghapusan sistem Bukti Ekspor yang diganti dengan "pungutan impor" juga tidak sepenuhnya membuat perekonomian stabil. Kesulitan-kesulitan tersebut mendorong pemerintah untuk membentuk Komando Operasi Ekonomi, di mana Presiden bertindak sebagai Panglima Besar dan Djuanda dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertama berkedudukan sebagai Wakil I Panglima Besar Operasi Ekonomi.[92] Soebandrio bertugas sebagai Wakil II, Soemarno sebagai Kepala Staf dan Leimena sebagai Deputi Kepala Staf. Tugas komando tersebut tiada lain adalah untuk menanggulangi berbagai masalah ekonomi nasional. Pada perkembangan berikutnya, Djuanda dan menteri-menteri ekonomi-keuangan menyusun suatu konsepsi yang diajukan kepada Presiden. Konsepsi inilah yang menjadi landasan bagi Sukarno untuk mencetuskan Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada tanggal 28 Maret 1963 di Istana Negara. Dekon berisi *basic strategy* ekonomi di mana program jangka pendeknya meliputi persoalan sandang-pangan. Kebijakan tersebut dititikberatkan pada *iron stock* beras, intensifikasi pertanian dengan penambahan areal serta transmigrasi, mempergunakan *civic mission* angkatan bersenjata, penyempurnaan reformasi agraria, menjamin proyek-proyek infrastruktur yang strategis dapat selesai pada waktunya dan pengurangan impor bahan-bahan luks.[93] Perlu dicatat bahwa pada waktu itu kondisi fisik Djuanda sudah mulai sakit-sakitan. Rosihan Anwar menyatakan bahwa meski dalam kondisi yang tengah sakit, Djuanda masih berusaha menjalankan tugas-tugasnya dan terlihat enggan untuk digantikan oleh orang lain. Djuanda terus bertahan meski Sukarno telah berencana mencari pengganti posisinya.[94]

Djuanda juga ditunjuk oleh presiden untuk memimpin kebijakan dalam rangka pengembangan sarana telekomunikasi. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh presiden dalam keputusan No. 61/63 setelah memperhatikan keputusan-keputusan dan saran-saran rapat telekomunikasi yang diselenggarakan oleh staf Penguasa Perang Tertinggi di Bandung. Penunjukkan ini tentu saja beralasan mengingat karir Djuanda yang tidak dapat lepas dari sektor perhubungan sejak awal kemerdekaan. Guna mendukung hal ini Djuanda berwenang untuk melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,

pendidikan, riset industri dan kerjasama internasional di bidang telekomunikasi dengan berbagai instansi pemerintahan maupun swasta.[95] Dewan Telekomunikasi tersebut terdiri dari berbagai unsur lembaga pemerintahan seperti Departemen Perhubungan Darat, Laut, Udara, Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian, Penerangan, Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Luar Negeri, Research Nasional, Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Perdagangan, Perindustrian Rakyat, dll.

Secara politis, kepemimpinan Sukarno pada masa ini pun tak luput dari pertentangan dan perlawanan dari masyarakat. Hal tersebut khususnya setelah Presiden menerbitkan penetapan Presiden RI no.7/1969 tentang pengaturan berbagai segi kepartaian Indonesia, dimana seluruh partai diwajibkan menyesuaikan dengan Manipol-Usdek. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi berbagai percobaan pembunuhan terhadap Presiden. Pada perkembangannya Presiden membubarkan Masyumi dan PSI yang dianggap tidak bersedia menyesuaikan garis partainya dengan konsepsi presiden. Para pemimpin partai tersebut seperti Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Hamka, Sjahrir dan Soebadio ditangkap. Surat kabar yang vokal terhadap pemerintahan, seperti Indonesia Raya dan Pedoman diberangus, wartawan seperti Mochtar Loebis ditangkap dan dipenjarakan.

Langkah-langkah Presiden yang mendekati kediktatoran sebenarnya tidak sepenuhnya disetujui oleh para menteri-menterinya. Sebagai teknokrat, Djuanda terpaksa tunduk terhadap rezim yang berkuasa, meski hati nuraninya mengatakan lain. Djuanda loyal mengabdi kepada negara, terbukti dari berturut-turut dirinya duduk dalam jabatan di kabinet, dan kedudukannya itulah yang mengharuskan dirinya juga loyal terhadap pemerintah yang tengah berkuasa. Ali Budiarjo memaparkan terkait dengan Djuanda sebagai berikut :

"Djuanda tahu bahwa penahanan pemimpin-pemimpin PSI dan Masyumi tidak benar, tetapi ia tidak bisa bertindak. Pada bulan Mei 1961, sebagai Pejabat Presiden, ia menganugerahkan bintang penghargaan kepada orang-orang yang berjasa terhadap nusa dan bangsa, termasuk kepada Sutan Sjahrir. Hal ini menyebabkan kemarahan Sukarno sekembalinya dari luar negeri. Bentrok dengan Sukarno ini rupa-rupanya menyebabkan Djuanda makan hati, sehingga menjadi sakit-sakitan. Kemudian ia harus berobat ke Tokyo disertai dokter ahli jantung dr. Soehardo".[96]

Pernyataan tersebut menunjukkan sulitnya posisi Djuanda sebagai seorang yang bekerja dengan mengesampingkan kepentingan politik kekuasaan. Djuanda bukanlah seorang politisi yang lantang berbicara, melainkan ia adalah seorang administrator yang baik yang dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang partai.[97]

Djuanda tidak sempat menyaksikan puncak ketegangan politik yang memilukan pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Sukarno. Djuanda tutup usia pada 8 November 1963 akibat sakit yang dideritanya sejak satu tahun terakhir. Pada hari meninggalnya, Nasution bertindak selaku inspektur upacara pemberangkatan jenazah. Presiden Sukarno memimpin upacara di Taman Makam Pahlawan dengan dihadiri 2000an orang, termasuk Wakil Menteri Pertama, para Menteri, pimpinan Lembaga-lembaga Tertinggi Negara, Korps Diplomatik, para pemimpin partai dan organisasi, pegawai tinggi Departemen, dll. Harian *Merdeka* pada tangga 8 November 1963 menyebutnya sebagai "menteri marathon" karena nyaris tanpa henti duduk dalam kabinet sejak kemerdekaan. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden no.244 tahun 1963 Djuanda ditetapkan sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional mengingat jasa-jasa selama hidupnya.[98]

RPLT 1956-1960 rancangan Djuanda dan timnya, sulit terlaksana secara maksimal tetapi akan direproduksi kembali dalam rancangan pembangunan nasional pada masa kabinet Presidensil pasca Dekrit Presiden Juli 1959. Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibentuk pada 15 Agustus 1959, diketuai oleh Moh. Yamin dan bertugas merencanakan pembangunan jangka pendek dalam bidang ekonomi pembangunan, termasuk sosial-kebudayaan dalam suatu konsep Sosialisme Indonesia. Rancangan ini dibagi menjadi dua bagian, yakni A dan B. Rancangan A tidak lain adalah reproduksi dari RPLT 1956-1960 dan Rancangan B yang merupakan eksploitasi sumber daya seperti minyak, kayu dan perikanan akan digunakan untuk membiayai Rancangan A. Djuanda yang pada saat itu (kabinet presidensial) menjabat sebagai Menteri Pertama, bertanggungjawab atas pelaksanaan Rancangan A, sementara Moh. Yamin bertanggungjawab atas Rancangan B. Diharapkan Rancangan B dapat menghasilkan $ 2,465.2 juta atau sekitar Rp 111 milyar untuk membiayai proyek A (pendapatan minyak diperkirakan sebesar $ 1,180 juta, kayu sebesar $ 52.5 juta, perikanan sebesar $ 12.5 juta, Kopra sebesar $ 76 juta, Karet sebesar $ 320, Aluminium dan sektor pariwisata sekitar $ 56.5 juta). Seluruh eksploitasi proyek tersebut pada kenyataannya harus melibatkan investasi asing.[99]

Kebijakan yang ditempuh oleh Depernas mengacu pada prinsip Sosialisme Indonesia. Hal tersebut menekankan pada produksi barang konsumsi, distribusi kebutuhan sehari-hari yang lebih baik, produksi pertanian dan industri yang mendorong perolehan devisa, penggunaan pelabuhan sebagai pembuka lapangan kerja serta meningkatkan devisa serta pengembangan industri dasar. Guna melaksanakan prinsip ini maka pemerintah membutuhkan bantuan dari pihak-pihak swasta, khususnya dalam bidang produksi dan transportasi, kecuali distribusi. Orientasi ini mengindikasikan adanya sentimen negatif Indonesia yang meluas terhadap para pedagang dan perantara China. Rencana ditekankan pada pengerjaan proyek-proyek tertentu daripada pendekatan yang dimulai dari analisis ekonomi makro. Hal ini mirip seperti rencana pembangunan sebelumnya yang juga dipimpin oleh Djuanda.[100]

Penghargaan terhadap Djuanda datang bukan dari dirinya, yang tetap bersahaja dan mempertahankan kerendahan hati dalam bertindak. Tetapi nama Djuanda telah berkibar dalam beragam proyek negara serta fasilitas umum, dari bandara sampai jalanan utama beragam kota. Bandara Djuanda di Surabaya,

sebagai contoh, diberi nama oleh Ali Sadikin yang waktu itu menjabat Kolonel di Angkatan Udara dan memperjuangkan pembentukkan Bandara TNI AU padahal ingin dihapus oleh Djuanda yang khawatir akan biaya besar di saat ekonomi Indonesia sedang merana.[101]

KESIMPULAN

Karir Djuanda Kartawidjaja menggambarkan perjalanan awal dari dekolonisasi negara Indonesia. Karirnya sepenuhnya berada dalam posisi dirinya sebagai aparatur sipil negara, perhatian utama Djuanda berkaitan dengan urusan peningkatan kemampuan aparatur sipil negara serta pembangunan perekonomian berdasarkan pendekatan yang ilmiah dan teratur. Walaupun merupakan seorang insinyur dan bukan seorang ekonom, Djuanda membawa pendekatan teraturnya untuk menjawab tantangan utama permasalahan perekonomian Indonesia pada periode awal dekolonisasinya; yaitu kekurangan tenaga ahli. Ia dapat dikenang sebagai bapak dari kelompok teknokrasi Indonesia, bersamaan dengan Sumitro Djojohadikusumo, seorang sosok yang sejak masa akhir revolusi merupakan rekan kerjanya dalam mengarahkan proses dekolonisasi ekonomi dan pembangunan aparatur negara Indonesia ke arah yang lebih baik, tetapi juga seorang sosok yang menjadi musuh ketika Sumitro beserta pimpinan partai Masyumi lainnya seperti Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, ber-'hijrah' ke Sumatera Barat untuk mendirikan pemerintahan saingan PRRI pada tahun 1957. Ia juga bisa disebut sebagai salah satu pelopor pembentukkan sistem pendidikan administrasi sipil Indonesia. Sosoknya sebagai pembangun negara dan pendorong semangat pembangunan bangsa merupakan sesuatu yang jelas dan disepakati bersama.

Tak dapat dipungkiri, sifat Djuanda yang tenang dan teratur, serta pandangannya yang rasional dan berkepala-dingin ini sangat penting dalam menjaga agar sifat avontur dan kepala panas dari Presiden Sukarno tidak kebablasan, khususnya menjelang periode Demokrasi Terpimpin Sukarno. Ia kadang disebut sebagai Gajah Mada Abad ke-20.[102] Jatuh sakit serta kematian Djuanda pada tahun 1963 ini seolah melepaskan Sukarno dari pandangan dan naungan kepala dingin Djuanda. Serangkaian avontur besar Sukarno, seperti Konfrontasi dengan Malaysia, pendirian Poros Pyongyang-Peking-Hanoi-Jakarta, pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Inggeris dan Amerika Serikat, serta keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mungkin tidak akan terjadi jika Djuanda masih dalam helm sebagai Menteri Utama pemerintahan Sukarno.

Seorang yang kalem dan tidak sering menampakkan emosi, Djuanda merupakan sosok yang akseptabel secara politis. Tetapi akseptabilitas ini bukan didorong hanya oleh karena posisi netralnya, serta loyalitas dan keteguhannya untuk mendukung Presiden Sukarno, tetapi juga oleh kenyataan peran-sertanya yang begitu besar dalam membantu proses dekolonisasi negara dan ekonomi Indonesia. Sebuah posisi yang dilakukannya dengan tanpa banyak menonjolkan diri, usahanya untuk melindungi sosok-sosok teknokrat muda yang dianggapnya begitu penting untuk keberhasilan negara dan bangsa dalam membangun di masa mendatang. Keteguhannya untuk bekerja dalam sistem sekaligus melindungi mereka yang dianggapnya penting demi keberhasilan bangsa merupakan sebuah kualitas yang langka dalam sebuah demokrasi yang penuh dengan pemimpin-pemimpin yang lebih suka menempatkan dirinya sebagai sosok utama dalam narasi sejarah bangsa. Walaupun Djuanda menempatkan dirinya di belakang panggung narasi tersebut, efeknya yang begitu sentral dalam memahami Indonesia modern ini. Pada tanggal 23 November 1963, Presiden Sukarno memutuskan untuk mengangkat Djuanda sebagai tokoh nasional dan pahlawan kemerdekaan nasional. Hal inilah yang menyebabkan begitu banyak jalanan dan infrastruktur dinamakan atasnya. Tetapi penghargaan Sukarno atas teman setianya itu sekarang sering dilupakan. Jasa-jasa Djuanda haruslah dikenang bukan hanya sebagai sosok Perdana Menteri, tetapi juga seorang yang telah mengawal kemerdekaan bangsa dan dekolonisasi negara. Tanpa peran-sertanya, proses dekolonisasi negara Indonesia akan berjalan dengan jalur yang berbeda. Memahami Presiden Sukarno juga tidak mungkin dilakukan tanpa memahami peran-serta Djuanda dalam pemerintahannya. Kata-kata mutiara dari Nainulita berbunyi: "Patutlah kita semua berterima-kasih kepada Ir. Djuanda, seorang patriot bangsa. Seorang negarawan yang sederhana, jujur, berani menghadapi segala macam kesukaran untuk membawa rakyat Indonesia menuju ke suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera."[103] Walaupun Indonesia masih dalam perjalanan menuju cita-cita bangsa itu, sosok Djuanda tidak bisa dilupakan sebagai pembina awal dari pergerakan ini.

ENDNOTES

1 Pidato Djuanda berjudul *Een Daad van Wijs Beleid, Dat de Regeering de Indonesische Academici Opneemt in Leidense Functies* dalam kongres Paguyuban Pasundan. Kutipan ini menandakan filsafat utama Djuanda mengenai kaum ahli dan hubungan mereka dengan negara. Diterjemahkan oleh I.O. Nainulita dalam Awaloeddin Djamin (ed.) 2001. *Ir. H. Djuanda. Negarawan, Administrator dan Teknokrat Utama*. Jakarta: Kompas, h. 49-50.

2 Benjamin Higgins, *Crisis of the Milestones*, p. 81.

3 Mohammad Sadli, 'Pelopor Perencanaan Pembangunan Ekonomi' dalam Awaloeddin Djamin, Ir. Djuanda. *Pahlawan Nasional. Negarawan, Administrator dan Teknokrat Utama*, p. 258.

4 Awaloeddin Djamin, Ir. Djuanda. *Pahlawan Nasional. Negarawan, Administrator dan Teknokrat Utama*, h. xii.

5 Rosihan Anwar, 'Pelopor Teknokrat, Non-stop jadi Menteri' dalam Awaloeddin Djamin, Ir. Djuanda. *Pahlawan Nasional. Negarawan, Administrator dan Teknokrat Utama*, h. 217.

6 Rooseno, 'Wafatnya mengubah sejarah Indonesia' dalam Awaloeddin Djamin, h. 273.

7 Sumitro Djojohadikusumo, 'Ir. H. Djuanda yang saya kenal' dalam Awaloeddin Djamin, h. 205.

8 Herbert Feith membagi pimpinan nasional menjadi dua golongan figur yang berbeda. Lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.* Ithaca : Cornell University Press, 1960, p. 113.

9 Lihat Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1989; Lihat juga Lihat Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia.* (judul asli : *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*). Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1984.

10 Mengenai data diri dan keluarga Djuanda lihat I.O.Nanulaita, *Ir.Haji Juanda Kartawijaya*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1983.

11 Nainulita, I.O., *Ir. Haji Djuanda Kartawidjaja*, p. 35.

12 Organisasi Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mengembangkan pendidikan bagi orang-orang pribumi pada masa pergerakan nasional dengan mengadopsi lembaga pendidikan model barat (sekolah). Pendiri Muhammadiyah, K.H.Ahmad Dahlan menjadi penggerak pendidikan modern yang tidak hanya mengembangkan rasionalitas dan akal budi, namun juga mengolah ranah mental dalam dimensi horizontal dan vertikal yang saling melengkapi. Lihat Agus Suwignyo, *Pendidikan Muhammadiyah dari Kolonial ke Pasca Kolonial,* dalam Suyatno, Pudjo Semedi, AS Gunawan Suryoputro, Suswandari, *Pendidikan Muhammadiyah di Tengah Persaingan Nasional dan Global.* Jakarta : UHAMKA Press, 2010, hlm.17-32.

13 Dewan ini bisa dianggap sebagai Kamar Atas dari sistem 'perwakilan' Hindia Belanda dengan Volksraad sebagai Kamar Bawah. Berbeda dengan Volksraad, anggotanya tidak dipilih berdasarkan pemilu melainkan ditunjuk oleh negara. Kebanyakan anggota adalah kalangan ningrat dan pejabat tinggi Hindia Belanda. Keputusan mereka, sama seperti Volksraad, tidak punya ikatan hukum melainka hanya berupa himbauan kepada Gubernur Jenderal atau Menteri Daerah Penjajahan Belanda di Den Haag.

14 Satyawati Suleiman, "The Last Days of Batavia." *Indonesia*, no. 28/1979, h. 62.

15 Awaloeddin Djamin (ed.) (2001). *Ir. H. Djuanda*. h. 47.

16 Awaloeddin Djamin (ed.) (2001). *Ir. H. Djuanda*. h. 49.

17 Awaloeddin Djamin (ed.) (2001). *Ir. H. Djuanda*. h. 49.

18 Awaloeddin Djamin (ed.) (2001). *Ir. H. Djuanda*. h. 74-76.

19 Lihat Bambang Purwanto, "Kekerasan dan Kriminalitas di Kota pada Saat Transisi: Kotagede, Yogyakarta pada Akhir Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan", disampaikan dalam *The 1st International Conference on Urban History*, Surabaya 23-25 August 2004.

20 I.O.Nanulaita, *Op.Cit.,* hlm. 97.

21 Lihat Atmakusumah (Ed), *Tahta Untuk Rakyat : Celah-celah Kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.* Jakarta : Gramedia.

22 I.O. Nanulaita, *Op.Cit.,* hlm. 107.

23 Sumitro Djojohadikusumo, "Ir. H. Djuanda yang Saya Kenal", dalam Awaloeddin Djamin (Ed), *Ir.H.Djuanda : Negarwan, Administrator, Teknokrat Utama.* Jakarta : Kompas, 2001, hlm.204.

24 Campo, J. À. (1998). Business not as Usual: Dutch Shipping in Independent Indonesia, 1945–1958. *International Journal of Maritime History*, *10*(2), 1-39 & J. Thomas Lindblad, *Bridges to New Business. The Economic Decolonization of Indonesia*, 115-118.

25 Awaloeddin Djamin (ed.) (2001). *Ir. H. Djuanda*. h. 108.

26 Mengenai sejarah pembentukan dan nasionalisasi transportasi udara Indonesia lihat Dwi Adi Wicaksono, "Membangun Jembatan Udara : Pembentukan dan Nasionalisasi Maskapai Penerbangan Sipil Indonesia 1928-1962", *Skripsi*. Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2017. Lihat juga Dadan Adi Kurniawan, "Melihat Angkasa Indonesia : Komersialisasi Kawasan Pangkalan Udara Adi Soemarmo Surakarta 1974-2011", *Tesis*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2016.

27 I.O. Nanulaita, *Op.Cit.,* hlm. 115.

28 Thomas Lindblad, *Bridges to New Business. Economic Decolonization of Indonesia*, p. 64-74.

29 Feith, *Op.Cit.*,p. 128.

30 David Webster, *Fire and the Full Moon*, p. 83.

31 David Webster, *Fire and the Full Moon*, p. 88.

32 Ali Budiardjo, "Abdi Negara dan Abdi Bangsa", dalam Awaloeddin Djamin (Ed), *Ir.H.Djuanda : Negarwan, Administrator, Teknokrat Utama.* Jakarta : Kompas, 2001, hlm.245

33 David Webster, *Fire and the Full Moon*, p. 91.

34 *Kedaulatan Rakyat* 24 November 1958.

35 Lihat Benjamin B. Higgins, *Indonesia's Economic Stabilization and Development.* New York : Institute of Pacific Relations, 1957, p.45.

36 *Kedaulatan Rakyat* 6 Januari 1959.

37 *Kedaulatan Rakyat,* 29 Desember 1958.

38 Emil Salim, "Semangat Djuanda", dalam dalam Awaloeddin Djamin (Ed), *Ir.H.Djuanda : Negarwan, Administrator, Teknokrat Utama.* Jakarta : Kompas, 2001, hlm.263.

39 "Badan Koordinasi Pembangunan Masjarakat Desa Dilantik", *Kedaulatan Rakyat,* 20 Desember 1960.

40 "P.M. Djuanda dalam Kensi : Djangan Terlalu Perfektionistis", *Kedaulatan Rakyat,* 2 Oktober 1958.

41 "Dasar Perekonomian Indonesia Kekeluargaan", *Kedaulatan Rakyat,* 6 Oktober 1958.

42 M.C. Ricklefs, "Sejarah Indonesia Modern", judul asli : *A History of Modern Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 380.

43 Lihat Howard Dick, "Ekonomi Indonesia Pada Tahun 1950an : Kurs Beraneka, Jaringan Bisnis Serta Hubungan Pusat-Daerah", dalam Sita van Bemmelen & Remco Raben, *Antara Daerah dan Negara Indonesia Tahun 1950an*. Jakarta : YOI & KITLV Jakarta, 2011, hlm.60.

44 Ricklef, *Op.Cit.,* hlm. 381.

45 Lihat A.H.Nasution, *Mengamankan Pandji-pandji Revolusi.* Jakarta : Delegasi, 1964. Lihat juga A.H.Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas.* Jakarta : Gunung Agung, 1982.

46 Dalam pandangan Herbert Feith, Demokrasi Terpimpin diandaikan sebagai suatu sistem politik yang dipengaruhi secara kritis terutama oleh suatu hubungan antara Sukarno dan Angkatan Darat, suatu hubungan "konflik yang mantap" yang ditandai oleh upaya bersama dan berlangsungnya terus kompetisi dan ketegangan antara dua mitra yang bertanding dengan lebih kurang setara. Lihat Herbert Feith, "Sukarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin" judul asli : *Dynamics of Guided Democracy.* Jakarta : Sinar Harapan, 1995, hlm. 27.

47 Robert Cribb, "Bangsa : Menciptakan Indonesia", dalam Donald K.Emmerson, *Indonesia Beyond Soeharto, Negara, Ekonomi, Masyarakat dan Transisi.* Jakarta : Gramedia, 2001, hlm.53.

48 Djuanda dan Sukarno akan membahas persoalan ini secara mendalam pada akhir tahun 1928. Lihat "PM. Djuanda Akan Berunding dengan Presiden Setjara Mendalam", *Kedaulatan Rakyat,* 28 November 1958.

49 I.O. Nanulaita, Ir. Haji Juanda Kartawijaya, p. 136.

50 Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Op.Cit.* p.580

51 Nanulaita, *Op.Cit.,* hlm.127.

52 Lihat jalannya acara di dalam Kementerian Penerangan, *Kabinet Karya Triwulan ke III.* Djakarta : Kementerian Penerangan RI, 1957.

53 *Ibid.,* hlm. 16-17.

54 *Ibid.,* hlm.18

55 Selengkapnya baca pidato Husein di R.Z. Leirissa, *PRRI Permesta : Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis.* Jakarta : Grafiti, 1997, hlm. 291.

56 M.C. Ricklefs, *Op.Cit.,* hlm. 392.

57 Hatta menyesalkan delegasi-delegasi dari daerah yang menerima bulat keputusan-keputusan Munas. Lihat Deliar Noer, *Mohammad Hatta : Biografi Politik.* Jakarta : LP3ES, 1990, hlm. 521-523.

58 Meski demikian, Simbolon tidak tertera dalam piagam ini dan tidak hadir dalam Munas. Lihat R.Z.Leirissa, *Op.Cit.,* hlm.143-146

59 Audrey Kahin, "Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998", judul asli : *Rebellion to Integration, West Sumatra and the Indonesian Polity 1926-1998.* Jakarta: YOI, 2005, hlm.313

60 Bibit Suprapto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 193.

61 Lihat Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958).* Jakarta : Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991, hlm. 395.

62 *Kedaulatan Rakyat,* 25 November 1958.

63 Kahin, *Op.Cit.,* hlm. 326-327.

64 Ajib Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara : Lebih Takut kepada Allah SWT.* Jakarta : Inti Idayu Press, 1986, hlm.212.

65 Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas jilid 2: Masa Pancaroba Kedua*. Jakarta : Gunung Agung, 1984, hlm.215

66 Nanulaita, *Op.Cit.,* hlm.135

67 Bibit Suprapto, *Op.Cit.,* hlm. 195-196.

68 Kahin, *Op.Cit.,* hlm.340

69 "Sendi2 Negara dapat Diteguhkan", *Kedaulatan Rakyat,* 30 Oktober 1958.

70 Mengenai pemberontakan DI/TII yang lebih lengkap lihat Barbara Sillars Harvey, "Pemberontakan Kahar Muzakar : Dari Tradisi ke DI/TII" judul asli : *Tradition, Islam and Rebellion : South Sulawesi 1950-196*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1989.

71 *Kedaulatan Rakyat,* 2 Desember 1958.

72 *Kedaulatan Rakyat,* 9 Desember 1958.

73 Nanulaita, *Op.Cit.,* hlm.138-139.

74 "Hari ini dan Besok Kabinet Tentukan Sikap Mengenai Pelaksanaan Deokrasi Terpimpin", *Kedaulatan Rakyat,* 18 Februari 1959. Lihat juga "Persesuaian paham Presiden dan Kabinet", *Kedaulatan Rakyat,* 21 Februari 1959.

75 *Kedaulatan Rakyat*, 2 April 1959.

76 Lihat wawancara dengan Daniel S. Lev dalam Baskara T.Wardaya (Ed), *Membangun Republik Bercakap Tentang Sejarah Indonesia*. Yogyakarta : Galangpress, SDUP, PUSDEMA dan APPTI, 2017, hlm.167.

77 *Kedaulatan Rakyat,* 6 Maret 1959.

78 *Kedaulatan Rakyat,* 10 Maret 1959.

79 *Kedaulatan Rakyat,* 5 Mei 1959.

80 *Kedaulatan Rakyat,* 16 Mei 1959.

81 *Kedaulatan Rakyat,* 3 Djuni 1959.

82 *Kedaulatan Rakyat,* 4 Djuni 1959.

83 *Kedulatan Rakyat*, 6 Djuli 1959.

84 *Kedaulatan Rakyat,* 8 Djuli 1959.

85 *Kedaulatan Rakyat,* 10 Djuli 1959.

86 Ku, C. (1991). The archipelagic states concept and regional stability in Southeast Asia. *Case W. Res. J. Int'l L.*, *23*, 463.

87 Hasjim Djalal, "Deklarasi Djuanda Menyatukan Kita", dalam Awaloedin Djamin, *Op.Cit.,* hlm. 342.

88 Nanulaita, *Op.Cit.,* hlm. 164.

89 *Kedaulatan Rakyat,* 12 Juli 1960

90 *Kedaulatan Rakyat,* 23 Juli 1962.

91 *Kedaulatan Rakyat,* 17 Januari 1963.

92 Nanulaita, *Op.Cit.,* hlm. 173.

93 *Ibid.,* hlm. 174.

94 Rosihan Anwar, "Pelopor Teknokrat, Non-Stop Jadi Menteri", dalam Awaloedin Djamin, *Op.Cit.,* hlm. 216.

95 *Kedaulatan Rakyat,* 6 Mei 1963.

96 Nanulaita, *Op.Cit.,* hlm. 176.

97 *Ibid.,* hlm, 175.

98 *Ibid.,* hlm.190.

99 Komposisi Depernas lebih dominan para politisi ketimbang para teknisi. Selengkapnya lihat Guy J. Pauker, "Indonesia's Eight-Year Development Plan", *Journal Pacific Affairs*, Vol. 34, No. 2 (Summer, 1961), pp. 115-130.

100 *Ibid.*

101 Arrohman Prayitno (eds.). (2004). A*li Sadikin. Visi dan Perjuangan sebagai Guru Bangsa*. Pusat Kajian Kadeham Univ. Trisakti, p. 62.

102 Prajoedi Atmosoedirdjo, "Figur yang unik dan all round" dalam Awaloeddin Djamin. *Ir. H, Djuanda. Negarawan, Administrator dan Teknokrat Utama*. h. 336.

103 Awaloeddin Djamin. *Ir. H, Djuanda*. h. 170.

PENUTUP

Para Perdana Menteri Republik, Mereka Telah Memenuhi Tugas Kesejarahannya Untuk Tetap Bertegaknya Bangsa–Negara Merdeka

Sepuluh tokoh-pemimpin yang telah diurai perjalanan hidupnya–terutama yang berkaitan dengan posisi, jabatan yang pernah dipangkunya perdana menteri; jabatan yang bertugas untuk menjadi kepala, pemimpin jalannya pemerintahan negara bersama sejumlah orang. Menteri yang dipilih untuk menduduki jabatan khusus, yaitu menteri yang membidangi bidang-bidang tertentu, misalnya menteri pertahanan, pertanian, kemakmuran sampai kepada menteri tanpa portopolio. Perdana menteri, singkatnya memimpin kabinet yang dibentuk dan diresmikan oleh presiden sebagai kepala negara.

Kalau kita melihat dan mengetahui situasi bangsa dan negara Republik yang dibentuk sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tertanggal 17 Agustus 1945, esok hari 18 Agustus 1945, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuklah sebuah negara Republik merdeka bersama dengan perangkat-perangkat kenegaraan, Presiden dan Wakil Presiden, Pembukaan UUD Negara, Pembagian wilayah Negara–terdiri atas delapan Propinsi, antara lain 4 Propinsi di Jawa yaitu Jakarta, Ibukota Negara, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur. Dalam sidang itu juga telah ditetapkan gubenur-gubernur dari propinsi-propinsi yang dibentuk itu.

Terbentuknya sistem Kabinet Parlementer sejak bulan Nopember 1945 itu sebenarnya "menyimpang" dari ketentuan UUD Negara yang ditetapkan dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 yang menentukan sistem kabinet, pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem presidensial, Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang lazim disebut: Perdana Menteri. Tetapi oleh karena situasi bangsa-negara yang dihadapi, yaitu antara lain karena pemerintah kolonialis Kerajaan Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia dan kedaulatan Negara Republik Indonesia, sebab pemerintah kolonialis itu berusaha untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di wilayah negara Republik Indonesia, yang dahulu memang adalah wilayah jajahannya. Di samping itu, di

> "Kemerdekaan tidak pernah menjadi masa lampau, melainkan selalu menjadi bagian dari masa kini dan masa depan".

antara para pemimpin bangsa-negara Indonesia sendiri, juga terjadi perbedaan pendapat tentang kebijakan strategis di dalam langkah- langkah menghadapi kolonialis Belanda yang hendak mengembalikan kekuasaan kolonialis ke tengah-tengah bangsa-negara Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya 17 Agustus 1945.

Kalau kita melihat situasi yang terjadi di dalam pembentukan pemerintahan sistem Parlementer, maka jarak waktunya adalah Nopember 1945-5 Juli 1959. Dan dalam jarak waktu itu, situasi yang terjadi di dalam negara Republik kita terdiri dari dua situasi, yaitu *pertama*, situasi sebelum pengakuan Kedaulatan Republik oleh Kerajaan kolonialis Belanda, atau yang juga kita sebut Perang (Mempertahankan) Kemerdekaan, 1945-1949; dan *kedua*, situasi setelah pengakuan Kedaulatan Negara–yaitu Kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS)–pada 27 Desember 1949; pengakuan kedaulatan atas RIS sesuai dengan kesepakatan dalam Konprensi Medja Bundar (KMB). Ini berlangsung dari tahun 1950-1959 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dijalankannya sistem pemerintahan Kabinet Parlementer diawali dengan "penunjukan" (Sutan) Sjahrir sebagai Perdana Menteri, dan itu berarti bahwa ia adalah Perdana Menteri pertama dari Republik Indonesia. Sjahrir tampil sebagai Perdana Menteri di awal kemerdekaan negaranya, tetapi sekaligus juga terjadi di awal kritis keberadaan Republik karena ulah kolonialis Kerajaan Belanda yang tetap bermata gelap oleh dorongan pikiran-sikap kolonialistik yang hendak mengambil kembali bekas wilayah jajahannya dengan memaksakan Perang kolonialis kepada bangsa-negara Indonesia yang telah merdeka.

Di dalam merancang dan menjalankan tugas kenegaraan yang "dibebankan" kepadanya, ia telah menghadapi pelbagai kesulitan dengan kerumitan yang terkait di dalam langkah-langkah yang akan diwujudkannya. Ia harus berhadapan dengan "teman-teman sesama pejuang untuk kemerdekaan bangsanya" yang tidak sepakat terhadap apa yang (akan) dilakukannya sebagai pemimpin, Kepala Pemerintahan Negara. Itulah sebabnya ia harus berhadapan dengan penculikan dirinya. Juga ia harus menghadapi keselamatan diri pribadinya karena ancaman dari "lawan" politiknya. Semua harus dilalui dan dilewati dengan keberanian dan moralitas politik yang diandalkan. Itu pula sebabnya maka ia harus tiga kali–dalam waktu yang amat singkat, menduduki jabatan Perdana Menteri. Tetapi, ia telah memberikan "tanda-tanda sejarah" yang dapat menjadi bahan berguna untuk melanjutkan perjalanan kita ke depan, menuju ke sebuah Indonesia yang mudah-mudahan akan lebih baik sebagaimana cita-cita kemerdekaan.

Situasi yang dilahirkan oleh perundingan yang menghasilkan Perjanjian Linggarjati, tampak tidak memberi ruang bagi Sjahrir untuk tetap menduduki jabatan Perdana Menteri. Ia pun mengembalikan mandat pemerintahannya kepada Presiden dan pada akhirnya digantikan oleh rekannya sesama sosialis dan pernah seiring-sejalan, yaitu Mr. Amir Sjarifuddin. Ia menduduki jabatan Perdana Menteri sampai dua kali. Tetapi karena jalan diplomasi-perundingan di atas Kapal Renville, yang hasilnya dianggap lebih merugikan Republik jika dibanding dengan hasil Linggarjati pada masa Perdana Menteri Sjahrir. Amir Sjarifuddin pun tersingkirkan.

Yang menarik dari kedua Perdana Menteri Republik yang berurutan itu adalah pada awalnya keduanya berkawan dalam partai yang dibangunnya secara bersama, Partai Sosialis. Keduanya juga "berhasil" menjadi Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri) dengan menghasilkan perjanjian-perjanjian Linggarjati dan Renville; justru kedua hasil kerja mereka dalam perjanjian itu yang menyebabkan "berakhirnya" karier politik mereka, yang sebelumnya adalah keduanya "politikus cemerlang". Di akhir kehidupannya, kedua sahabat-politik ini telah mengalami jalan tragedi. Amir Sjarifuddin meninggal karena peristiwa Madiun 1948; ia sebagai pemimpin Komunis bersama Muso melakukan pemberontakan atas nama PKI/FDR. Sedang Sjahrir sempat berada dalam tahanan rezim Demokrasi Terpimpin–Presiden Sukarno; dalam tahanan ia sakit, dan akhirnya dikirim berobat ke Zurich, Swiss. Ia meninggal dalam status "orang tahanan" di negeri orang.

Hasil perjanjian Renville yang merupakan buah dari upaya diplomasi Amir Sjarifuddin, membuat posisi Perdana Menteri dari aliran Kiri–sosialis ini tidak dapat dipertahankan lagi. Beberapa waktu sebelum ditandatanganinya Perjanjian Renville, persoalan pergantian Kabinet yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin sudah dibicarakan dan sudah ada yang mengusulkan kepada Presiden Sukarno untuk menggantikan Kabinet Amir Sjarifuddin.

Siapa yang menggantikannya, menurut *Memoir* Hatta, Presiden Sukarno pernah menyampaikan kepadanya, bahwa ada pemimpin partai yang mengusulkan agar Wakil Presiden Hatta ditunjuk sebagai Perdana Menteri, membentuk kabinet dengan tetap dalam posisinya juga sebagai wakil presiden.

Rupanya usul dari partai-partai tertentu didengar oleh Presiden Sukarno. Pada tanggal 29 Januari 1948, Wakil Presiden Hatta membentuk kabinetnya tetap menempuh jalur diplomasi dengan perantaraan KTN. Tetapi tampaknya pemerintah kolonial Belanda tidak sabar untuk melihat wujud tujuan kolonialnya. Dan karena itu pemerintah kolonial Belanda melakukan tindakan kekerasan-brutalnya dengan melakukan aksi agresi militer ke-2 nya kepada negara Republik Indonesia. Tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda menyerang Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta dan menangkap sejumlah pemimpin-pemimpin pemerintah Republik, termasuk Presiden, Wakil Presiden/Perdana Menteri. Sedang Panglima Besar Soedirman–walau dalam keadaan sakit–melanjutkan perlawanan mempertahankan kemerdekaan dan keberadaan Republik Indonesia. Jenderal Soedirman ke luar kota dan memimpin Perang Gerilya.

Ketika penyerangan Agresi Militer Belanda ke-2 itu, kabinet bersama Presiden Sukarno dan Wakil Presiden/Perdana Menteri mengirim telegram ke Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukit Tinggi, untuk membentuk sebuah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dengan serangan agresi ke-2 nya itu, "dengan bangga Letnan Gubernur Jenderal" Van Mook dan pemimpin-pemimpin Kerajaan Belanda menyatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah tidak ada; angkatan perangnya,

TNI telah lumpuh dan tidak memiliki kekuatan sebagai sebuah kekuatan militer. Propaganda pemerintah kolonialis Belanda tentang "hilangnya Republik dan lumpuhnya TNI" disampaikan juga di PBB. Tujuan agresi Belanda itu ternyata terbalik dari apa yang diharapkan. Dengan tindakan agresi ke-2 nya itu, pemerintah kolonialis Belanda justru menuai kecaman dan kemarahan dari negara-negara lain, termasuk wakil- wakil pemerintah anggota PBB, seperti pemerintah Amerika Serikat.

Dalam situasi itu Perdana Menteri Hatta tampak tidak kehilangan akal dan putus asa. Dari tempat "pengkerangkengannya", ia tetap melakukan usaha untuk menunjukkan keberadaan pemerintah negaranya. Dengan PDRI yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawiranegara dan dengan Perang Gerilya yang dilakukan TNI yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, menunjukkan kebohongan pemerintah Belanda tentang hasil agresi ke-2-nya. Makin terlihat lagi kebohongan pemerintah Belanda setelah TNI berhasil melakukan "serangan besar-besaran" dan berhasil menduduki Ibukota Yogyakarta selama ±6 jam; serangan ini dikenal dengan nama: Serangan Umum, tertanggal 1 maret 1949.

Setelah melewati pelbagai kegiatan pendekatan diplomasi dan dukungan internasional akhirnya pemerintah kolonial Belanda bersedia berunding dan terjadilah *Perjanjian Roem-Royen* yang pada akhirnya menentukan diadakannya sebuah konferensi yang dikenal Konperensi Medja Bundar (KMB). Dan dengan itu pada tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah Belanda mengakui Kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS); jadi dengan hasil KMB, bentuk negara kita adalah *federal.* Namun demikian, Ir. Sukarno tetap menjadi Presiden RIS dan Hatta tetap sebagai Perdana Menteri. Sebagai Perdana Menteri, Bung Hatta telah meninggalkan jejak- jejak sejarah untuk bangsanya, yang amat berguna untuk memahami perjuangan kita di dalam mempertahankan kemerdekaan dan tetap bertegaknya Republik Indonesia. Dalam Konperensi Medja Bundar itu Delegasi Republik Indonesia, dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta.

Dengan bergantinya bentuk negara, dari NKRI ke RIS–sebagai ketentuan Perjanjian KMB, maka terjadi pergolakan yang nyaris memecah kehidupan bersama kita di dalam Indonesia merdeka. Hal itu terjadi karena adanya konflik antara pendukung NKRI–disebut Unitaris– di satu pihak, berhadapan dengan pendukung *federalis*. Keadaan ini cukup mengkhawatirkan. Tetapi sebagai Perdana Menteri RIS, ia tidak menunjukkan keberpihakannya. Ia menyerahkan apa yang dikehendaki oleh rakyat secara demokratis.

Adanya pertentangan antara dua kekuatan unitaris dan federalis membuat situasi negara dalam "krisis". Tetapi walaupun di tengah masyarakat sering terjadi demonstrasi dari kedua pihak yang saling bertentangan, pada akhirnya ditemukan solusi politis. Solusi itu adalah merupakan langkah yang dilakukan oleh seorang politikus Islam, Partai Masyumi, Mohammad Natsir. Ia berhasil mengajak pemimpin-pemimpin partai lain untuk merumuskan sebuah mosi dalam Parlemen; yaitu sebuah mosi yang bertujuan untuk mengembalikan Negara Republik Indonesia, dari berbentuk RIS-Federal ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia kembali menjadi negara kesatuan sejak tanggal 15 Agustus 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan bangsanya di dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan bergantinya kembali bentuk negara Republik dari RIS ke NKRI, maka dijalankan lagi sistem Parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, maka pembentukan pemerintahan Parlementer dilakukan di dalam situasi bertegaknya Republik Indonesia dengan sebuah pengakuan kedaulatan sebagai bangsa negara merdeka. Pembentukan pemerintahan dan sistem Parlementer dalam periode ke-dua ini, berlangsung dalam jarak waktu 1950-1959, diakhiri dengan Dekrit Presiden, 5 Juli 1959.

Dalam periode yang berlangsung selama lebih dari delapan tahun itu, 1950-1959 (pertengahan), maka sistem Parlementer mengalami situasi yang sering digambarkan sebagai: tidak berlangsungnya pemerintahan yang stabil. Keadaan yang demikian ini dikaitkan dengan berganti-gantinya kabinet dalam jarak waktu yang dapat dikatakan singkat. Tidak ada kabinet yang berusia sampai batas waktu lima tahun. Kenyataan situasi yang dianggap tidak stabil ini–dalam arti berganti-gantinya kabinet dalam jarak waktu yang singkat–terlihat juga di dalam buku tentang para Perdana Menteri yang dikerjakan oleh Tim Ditjen Kebudayaan/Direktorat Sejarah, Kemdikbud ini.

Perdana menteri pertama dalam periode yang sering juga disebut periode Demokrasi Liberal, 1950-1959, adalah pemimpin Partai Masyumi, Mohammad Natsir yang merupakan pemerakarsa *Mosi Integral*. Ia adalah seorang pemimpin yang memiliki integritas diri yang sangat kuat. Ia juga dikenal dan dihargai dengan hidup sederhananya, juga sangat dihormati oleh karena kesopanan, kesantunannya. Dalam seri Buku Saku Tempo, biografinya bahkan dikaitkan dengan kesantunannya itu: *Natsir Politik Santun Di Antara Dua Rezim* (2017). Sebelum menduduki jabatan Perdana Menteri, pemimpin utama Partai Islam Masyumi ini telah menduduki jabatan Menteri Penerangan. Ia adalah "lawan" polemik Ir. Sukarno sejak tahun 1930-an. Tetapi di dalam kemerdekaan, sejak 1946, pemimpin Islam ini justru menjadi–istilah mantan Wakil Presiden Hatta–Menteri Kesayangan Presiden Sukarno. Tetapi justru setelah menjadi Perdana Menteri, hubungan dengan Presiden Sukarno menjadi "retak". Persoalannya adalah pada sikap formal Natsir sebagai Perdana Menteri yang di dalam berbagai hal–misalnya sikap terhadap Belanda dan mungkin juga Papua (baca: Irian Barat)–tidak sejalan dengan kehendak Presiden Sukarno. Karena sikap "tidak sepakatnya" dengan Presiden Sukarno membawa "ketidaksenangannya" pada Natsir yang sekian tahun adalah "anak kesayangannya". Tetapi hal itu justru menarik, jika dipandang dari sikap dengan integritas diri "murni" yang tidak tergoyahkan! Pada akhirnya, Presiden Sukarno mendongkel Kabinet Natsir.

Dalam situasi yang tampak tidak menentu itu, Natsir segera mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Sejak itu Natsir sebagai pemimpin utama Partai Islam Masyumi tak pernah lagi "sehaluan" dengan Presiden yang pernah "menyayanginya" itu. Natsir digantikan oleh rekan separtainya, Dr. Sukiman. Ia

tampaknya dapat diterima karena kecenderungan sikap “lebih nasionalis daripada rekan-rekan separtainya”. Tetapi Kabinet Sukiman pun segera didongkel karena dianggap lebih condong ke Blok Barat-Amerika.

Selanjutnya, setelah beberapa formatur Kabinet yang ditunjuk oleh Presiden, maka akhirnya Wilopo dari PNI berhasil membentuk Kabinetnya. Tetapi Kabinet Wilopo pun tidak bertahan lama dan digantikan oleh Kabinet Ali-Wongso (Kabinet Ali I). Kabinet ini cukup lama bertahan, tetapi karena pelbagai persoalan yang dihadapi termasuk makin “berkembangnya” pemberontakan di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan. Juga karena lanjutan dari pengaruh Peristiwa 17 Oktober 1952, dan juga persoalan-persoalan keamanan yang lainnya. Karena itu Kabinet Ali I ini segera pula mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Tarik menarik untuk pembentukan Kabinet yang akan menggantikan Kabinet Ali I, juga menimbulkan perbedaan pendapat di antara pemimpin- pemimpin partai. Pada mulanya Wakil Presiden Hatta–Presiden Sukarno sedang di Mekkah, ibadah Haji–menunjuk tiga orang formatur Kabinet, yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI) dan Asaat (Non Partai). Tetapi formatur ini gagal karena pertentangan sikap tentang bisa tidaknya Hatta, dalam posisi sebagai Wakil Presiden memimpin Kabinet. Masyumi dan PNI tidak sepakat tentang persoalan ini. Dalam situasi itu, ketiga pimpinan dan anggota formatur itu mengembalikan mandatnya. Wakil Presiden Hatta menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatur dan ia berhasil membentuk Kabinet dan, walaupun menghadapi konflik yang kuat dari pelbagai pihak, Kabinet ini justru berhasil mengadakan Pemilu I di dalam Republik Indonesia setelah republik ini merdeka ±9 tahun. Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia menggunakan haknya dan menuju ke tempat-tempat kotak suara untuk melakukan pencoblosan calon-calon anggota Parlemen; selanjutnya pada 15 Desember 1955, pemilihan anggota-anggota Badan Konstituante–yang akan bertugas untuk merumuskan sebuah UUD Negara yang baru menggantikan UUD-Sementara 1950–yang berlaku pada waktu itu.

Setelah berhasil melakukan pemilu pertama yang dalam situasi aman–termasuk anggota-anggota TNI menggunakan hak suaranya–sebagaimana kabinet-kabinet terdahulu, juga mengalami desakan untuk segera diganti. Salah satu faktor utamanya adalah karena di beberapa kementrian telah diadakan mutasi, pergantian personil untuk menduduki jabatan tertentu. Dengan itu, pada tanggal 3 Maret, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dan pada tanggal 8 Maret 1955, Presiden Sukarno menunjuk Ali Sastroamidjojo sebagai formatur Kabinet. Susunan Kabinet lengkap diumumkan pada 20 Maret 1956. Tampak bahwa Presiden Sukarno memiliki kepercayaan penuh terhadap kabinet ini, yang terlihat di dalam isi pidatonya di depan Parlemen pada 26 Maret 1956. Namun, kembali nasibnya tidak berbeda dengan kabinet-kabinet yang terdahulu, yaitu menghadapi pelbagai tantangan yang harus diselesaikannya. Ketika itu berkembang perasaan-sikap anti Cina di dalam masyarakat; dan di daerah-daerah tertentu terjadi “kekacauan” karenanya. Di samping itu

berkembang pula sikap anti Kabinet Ali II ini di daerah- daerah karena anggapan bahwa Kabinet-pemerintah mengabaikan pembangunan di daerah (luar jawa). Isu pengabaian pembangunan daerah (di luar Jawa) melahirkan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pimpinan TNI di daerah; nanti pada akhirnya gerakan-gerakan ini melahirkan apa yang disebut dengan Gerakan Pembangunan Semesta (Permesta) tanggal 2 Maret 1957 dan Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada bulan April 1958. Pimpinan mereka, gerakan ini, antara lain Letkol. Vence Sumual dan Mayor Saleh Lade, dan lain-lain. Sedang PRII didukung oleh perwira-perwira Kolonel Simbolon, Letkol. Ahmad Husein, Kolonel Dahlan Djambek. Sedang dari Partai-partai politik Masyumi dan PSI, antara lain ada Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikusumom, dan lain-lain.

Pelbagai peristiwa yang terjadi itu, dan terutama peristiwa-peristiwa terakhir yang disebut di atas, membawa kepada penyebab Presiden Sukarno untuk “mencari alternatif” untuk mengakhiri kemelut yang dihadapi itu. Dalam kaitan itu ia mengarahkan ketidak-senangannya kepada partai-partai politik. Karena itu di dalam pidatonya pada peringatan Sumpah Pemuda tahun 1957, ia menyatakan ketidak-senangannya dengan menyatakan secara terus-terang bahwa “segala kesulitan yang dihadapi negara pada waktu ini”, disebabkan terdapatnya banyak partai- partai politik, sehingga merusak persatuan negara. Karena itu ada baiknya partai-partai dibubarkan. Untuk menghadapi semua kesulitan negara itu, Presiden Sukarno mengajukan apa yang disebut: Konsepsi Presiden yang sebenarnya Konsepsi itu ditolak oleh partai-partai seperti Partai Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, yang berpendapat bahwa merubah susunan Kenegaraan secara radikal harus diserahkan kepada konstituante. Penolakan Konsepsi Presiden itu tidak menyurutkan niat Presiden Sukarno untuk mengganti sistem demokrasi yang digunakan ketika itu, sistem Demokrasi Liberal dengan sistem yang dirumuskan sendiri, yaitu Demokrasi Terpimpin. Tetapi konsep demokrasinya ini tetap menjadi tujuannya; untuk mencapai maksudnya itu, Presiden meminta kepada Dewan Menteri atau Kabinet Djuanda untuk membahas sampai seberapa mungkin Konsepsi Demokrasi Terpimpin ini dijalankan dan menggantikan Demokrasi Liberal yang berlaku ketika itu berdasar pada ketentuan-ketentuan di dalam UUD-Sementara 1950. Untuk menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin rumusan Presiden Sukarno itu maka diperlukan sebuah UUD Negara yang dapat menopang dijalankannya demokrasi tersebut. Untuk itu, akhirnya disepakati jalan “inkonstitusional” yaitu Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dan dengan itupun berakhir pulalah periode dari sistem pemerintahan Parlementer dengan Demokrasi Liberal yang ditopang oleh UUD-Sementara 1950.

Buku biografi singkat dari tokoh-pemimpin yang pernah menduduki jabatan kepala pemerintahan, perdana menteri dengan kabinetnya menunjukkan kepada kita betapa mereka semua itu telah mengambil tanggung jawab yang datang dan ada bersama dengan jabatan perdana menteri itu, dan di tengah pelbagai kerumitan permasalahan yang harus, tidak sekedar dihadapi, melainkan harus diselesaikan. Dalam kaitan itu, tidak jarang

permasalahan yang demikian rumitnya, sehingga sang tokoh- pemimpin, perdana menteri-lah yang harus menerima dampak-tragisnya. Itu terjadi pada dua pemimpin utama yang menjadi perdana menteri pertama dan kedua, Sjahrir dan Amir Sjarifuddin; keduanya mengalami nasib tragis karena jabatan yang di dalamnya memang bukan hanya bermakna tanggung jawab "biasa", melainkan lebih dari itu di dalamnya juga kemungkinan yang berkembang menjadi tragedi yang mengakhiri karier politik yang pada awalnya "bersinar". Demikian juga jabatan perdana menteri itu tidaklah berarti akan selalu mendapat dari seorang pemimpin lain yang tadinya adalah saling menghargai dan tampak dua sahabat yang akrab. Karena ternyata di dalam perjalanan kedudukan itu dapat meretakkan hubungan di antara keduanya. Itulah yang terjadi dengan nasib Perdana Menteri Natsir. Ia pada mulanya mendapat dukungan penuh untuk jabatannya dari Presiden Sukarno; tetapi karena terjadi selisih pendapat antara Ia sebagai Perdana Menteri dengan Presiden Sukarno, maka akhir dari jabatannya adalah karena ketidak-senangan dari Presiden yang tadinya adalah penopang utamanya.

Buku biografi singkat dari sepuluh tokoh-pemimpin yang pernah menduduki jabatan penentu jalannya pemerintahan negara ini, ditulis bukanlah sekadar untuk menjalankan sebuah program kerja Ditjen. Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan terutama juga untuk "menggugah kesadaran sejarah" setiap kita, siapapun yang membacanya; dan tentu saja buku ini akan diharapkan tersentuh oleh Generasi Muda kini dan yang akan datang. Dengan membaca biogafi singkat dari para perdana menteri dalam periode 1945-1959 (pertengahan), maka akan tampak pelbagai persoalan yang harus dihadapi untuk mempertahankan kemerdekaan sebuah bangsa-negara baru yang tetap "digeluti" bekas penjajahnya. Dan setelah itu, ketika bekas penjajah itu dapat dikalahkan, ternyata tampil persoalan-persoalan baru yang justru lahir-berkembang oleh kesalahan-kesalahan kita sendiri; ambisi-ambisi personal dan kelompok justru tampil sebagai penghalang langkah untuk berjalan ke depan, agar cita-makna kemerdekaan-persatuan, secara berangsur dapat terwujud.

Kini kita sudah memasuki usia 74 tahun dari kemerdekaan sebagai bangsa-negara. Harus diakui bahwa selama itu belumlah usia yang sepenuhnya mendewasakan kita. Kita masih harus berproses untuk mendewasakan diri. Dan salah satu bahan pendewasaan itu adalah menengok-belajar dari masa lampau, sejarah kita. Tetapi generasi kini yang menjadi "pengelola" negeri merdeka ini, tidak cukup dengan hanya menengok-belajar dari kelampauannya, melainkan juga harus menjadi dewasa untuk merancang masa depan yang menjadi bagian dari cita- perjuangan dari kelampauan untuk merdeka. Kemerdekaan tidak pernah menjadi masa lampau, melainkan selalu menjadi bagian dari masa kini dan masa depan! Para pemimpin Perdana Menteri dalam periode Demokrasi Liberal itu, telah memberikan tanda-tanda sejarah yang sebagaimana terbaca dalam buku ini, yang dapat berguna bagi generasi pengelola republik merdeka ini, dan juga untuk generasi muda kini dan yang akan datang. Kesadaran yang kita peroleh dari gerak perdana menteri itu di kelampauan, dapat menjadi bagian bahan pendewasaan kita menghadapi arus cepatnya Revolusi Industri Keempat, yang tidak mungkin dielakkan tanpa kecerdasan dan keberanian dan kejujuran sebagaimana yang ditunjukkan oleh mereka yang ditulis biografinya dalam buku yang ada di tangan Anda ini. Selamat "selesai" membaca, mudah-mudahan Anda berhasil menangkap makna dari pembacaan Anda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulgani, Roeslan. (1956). *Mendajung dalam Taufan: Ichtisar dan Ichtiar Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Penerbit Endang.

Abdullah, Taufik. (1996). "Natsir. Seorang Guru Perfeksionis Filosofis" dalam *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

-----. (2009). *Indonesia: Towards Democracy*. Singapore: ISEAS.

-----. (2011). Pengantar, dalam Moh. Hatta. *Untuk Negeriku. Jilid I Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi. Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Agung, Ide Anak Agung Gde. (1983). *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan.

-----. (1985). *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Amien Rais (2004). *Hubungan antara Politik dan Dakwah. Berguru kepada M. Natsir*. Bandung: Mujahid Press.

Anderson, Benedict. (1966). The Language of Indonesian Politics. *Indonesia*, *1,* 89-116.

-----. (1994). Pendahuluan, dalam Sjahrir. *Perjuangan Kita*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur.

-----. (2018). *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Anonim, t.t., *Kembali kepangkuan Republik Indonesia: Menjongsong terbentuknja Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950*. Djawa Tengah: Djawatan Penerangan

Anonim, t.t., *Lampiran Hasil-hasil Konperensi Medja Bundar: Rantjangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat*, 2 November 1949.

Anwar, Rosihan. (2010). *Napak Tilas ke Belanda*. Jakarta: Kompas.

-----. (2010). *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Astuti, Indri. (2014). "Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, vol. 41, no. 2.

Atmakusumah A. (ed.) (1982). *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono IX*. Jakarta: Gramedia.

Azra, Azyumardi. (1985). "Sukiman: Potret Seni Politik Indah". Pandji Masyarakat, no. 477.

-----. (1999). "The transmission of al Manar Reformism to the Malay-Indonesian world: the cases of al-Iman and al-Munir." *Studia Islamika*. Vol. 6, no. 3.

Bemmelen, Sita van & Raben, Remco (2011). *Antara Daerah dan Negara Indonesia Tahun 1950an*. Jakarta: YOI & KITLV Jakarta.

Benda, H.J. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Islam Indonesia di Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Blumberger, J.T.H. (1931). *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*. Haarlem: Tjeenk Willink.

Boeke, H.J. (1953). Economics and economic Policy of Dual Societies As exemplified by Indonesia. Harleem: Tjeenk Willink.

Boland, B.J. (2013). *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Dordrecht: Springer Netherlands.

Bose, Sugata. (2006). *A Hundred of Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global Empire*. Cambridge: Cambridge University Press.

Burhanuddin. (1980). Sjahrir yang Saya Kenal, dalam Rosihan Anwar (Ed.). *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Gramedia.

Busyairi, Badruzzaman. (1989). *Boerhanoeddin Harahap: Pilar demokrasi*. Jakarta: Bulan Bintang untuk Panitia Buku Boerhanoeddin Harahap.

Campo, J. À. (1998). Business not as Usual: Dutch Shipping in Independent Indonesia, 1945–1958. International Journal of Maritime History, 10(2), 1-39.

Chaniago, J.R. (1981), "Diantara Hempasan dan Benturan: Kenang-kenangan dr. Abdul Halim 1942-1950" dalam *Penerbitan Sejarah Lisan Nomor 1*,. Jakarta: ANRI.

Cribb, Robert. (2015). The External Rice Trade of Indonesian Republic 1946-1947, dalam Alicia Schrikker dan Jeroen Touwen (Eds.). *Promises and Predicaments: Trade and Entrepreneurship in Colonial and Independent Indonesia in 19th and 20th Century*. Singapore: NUS Press.

Dahm, Bernard. (1987). *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.

Dick, Howard., et.al., (eds.). (2002). *The Emergence of a National Economy: An economic history of Indonesia, 1800–2000*. Crows Nest: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin; Honolulu: University of Hawai'i Press.

Dinkel, Jürgen., "Bandung 1955 Mengubah Pejuang Kebebasan Menjadi Negarawan" dalam Wildan Sena Utama, (2017), *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Djaja, Nadi & Nurdin, M. Rusjad. (1950). *Almanak Indonesia 1950/1369,* Bandung: Pustaka Djaja.

Djamily, Mizar. (1986). *Mengenal Kabinet RI selama 40 tahun Indonesia merdeka*. Jakarta: Kreasi Jaya Utama.

Djamin, Awaloeddin (ed.) (2001). *Ir. H. Djuanda: Negarawan, Administrator, Teknokrat Utama*. Jakarta: Kompas.

Dzulfikriddin, Muhammad. (2010). *Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia. Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka.

Efimova, Larisa. (2010). *Dari Moskow ke Madiun?: Stalin-PKI dan Hubungan Diplomatik Uni Soviet-Indonesia, 1947-1953*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.

Elson, R.E (2009). *Idea of Indonesia: a history*. New York: Cambridge University Press.

-----. (2009). *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Jakarta: Serambi.

Emmerson, Donald K. (2001). *Indonesia Beyond Soeharto, Negara, Ekonomi, Masyarakat dan Transisi*. Jakarta: Gramedia.

Fakih, Farabi. (2014). The Rise of the Managerial State in Indonesia: Institutional Transition during the Early Independence Period. 1950-1965.

-----. (2017). "Keraton dan Rakyat: Kejasama Menuju Kemerdekaan Indonesia", dalam *Gelora di Tanah Raja: Yogyakarta pada masa Revolusi 1945-1950*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

-----. (2017). Strategies of Rent Seeking during the Sukarno Period: Foreigners and Corruption, 1950-1965. Lembaran Sejarah, vol. 13, no. 1.

Fanggidaej, Franciska, (2006), *Memoar perempuan revolusioner*, Yogyakarta: Galangpress.

Federspiel, Howard. (2009). *Persatuan Islam. Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.

Feith, Hebert. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Jakarta: Equinox Pub.

-----. (2009). *The Wilopo Cabinet 1952-1953: A turning point in post-revolutionary Indonesia*, Jakarta: Equinox Publishing.

-----. (1960). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

-----. (1995). *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. judul asli: Dynamics of Guided Democracy. Jakarta: Sinar Harapan.

-----. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

-----. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta: Equinox Pub.

-----. (2009). *The Wilopo Cabinet, 1952-1953: a turning point in post-revolutionary Indonesia*. Equinox Publishing.

Fogg, Kevin. Indonesian Islamic Socialism and its South Asian Roots.

Formichi, Chiarra. (2012). *Islam and the Making of the Nation. Kartosuwirjo and Political Islam in Twentieth-Century Indonesia*. Leiden: Brill.

Forum Komunikasi Alumni GMNI Jawa Timur. (1994). *80 tahun Dr.H. Roeslan Abdulgani: 24 November 1994*, Surabaya: Forkom Alumni GMNI Jawa Timur.

Gie, Soe Hok. (1997). *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan: Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*. Yogyakarta: Bentang.

Glassburner, Bruce (ed). (2007). *The Economy of Indonesia: Selected Readings,* Kuala Lumpur: Equinox Edition.

Goebel, Michael. (2015). *Anti-Imperial Metropolis: Interwar Paris and The Seeds of Third World Nationalism.* Cambridge: Cambridge University Press.

Hakiem, L. (2008). *100 Tahun Mohammad Natsir. Berdamai dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Republika.

Hakiem, Lukman (ed.). (1993). Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan. Biografi DR Anwar Haryono. Jakarta: Media Dakwah.

Hamdani. (1980). Sutan Sjahrir di Masa Mudanya, dalam Rosihan Anwar (Ed.). *Mengenang Sjahrir.* Jakarta: Gramedia.

Hanifah, Abu. (1977). Revolusi Memakan Anak Sendiri: Tragedi Amir Sjarifudin. *Prisma, 8*, 86-100.

-----. (1978). *Bunga Rampai Soempah Pemoeda.* Jakarta: Balai Pustaka.

Harahap, Burhanuddin (1955). *Keterangan Pemerintah tentang Program Kabinet*. Jakarta: Kementerian Penerangan RI.

Harvey, Barbara Sillars (1989). *Pemberontakan Kahar Muzakar: Dari Tradisi ke DI/TII*, judul asli: Tradition, Islam and Rebellion: South Sulawesi 1950-196. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Hassan, Noorhaidi. (2007). "The Salafi Movement in Indonesia. Transnational Dynamics and Local Development. *Comparative Studies of Southeast Asia, Africa and the Middle East*. Vol. 27, no. 1.

Hatta, Moh. (1964). *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: Tintamas.

-----. (2000). Keterangan Pemerintah Tentang Politiknya Kepada Badan Pekerja KNIP, dalam Moh. Hatta. *Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi (Buku 2)*. Jakarta: LP3ES.

-----. (2000). Kita Terima Persetujuan Renville untuk Menyelesaikan Persengketaan, dalam Moh. Hatta. *Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi (Buku 2)*. Jakarta: LP3ES.

-----. (2000). Politik Keseimbangan Antara Kekuatan ke Luar dan ke Dalam, dalam Moh. Hatta. *Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi (Buku 2)*. Jakarta: LP3ES.

-----. (2000). Tujuan dan Politik Republik Indonesia, dalam Moh. Hatta. *Karya Lengkap Bung Hatta: Kemerdekaan dan Demokrasi (Buku 2)*. Jakarta: LP3ES.

-----. (2001). Gubernur De Graeff dan Gerakan Kemerdekaan Indonesia, dalam Moh. Hatta. *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial (Buku 3)*. Jakarta: LP3ES.

-----. (2001). *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial (Buku 3)*. Jakarta: LP3ES.

-----. (2001). Perkembangan PNI dan Terorisme Pemerintah di Indonesia, dalam Moh. Hatta. *Karya Lengkap Bung Hatta: Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial (Buku 3)*. Jakarta: LP3ES.

-----. (2011). *Untuk Negeriku. Jilid I Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi. Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

-----. (2011). *Untuk Negeriku. Jilid II Berjuang dan Dibuang*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

-----. (2011). *Untuk Negeriku. Jilid III Menuju Gerbang Kemerdekaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

-----. (1980). Kenang-Kenangan Masa Lampau dengan Sjahrir, dalam Rosihan Anwar (Ed.). *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Gramedia.

-----. (2011). *Untuk Negeriku. Jilid 2 Berjuang dan Dibuang*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Hefner, Robert. (1997). "Print Islam. Mass Media and Ideological Rivalries among Indonesian Muslims." *Indonesia*. no. 67.

Higgins, Benjamin (1992). *All the Difference: A Development Economist's Quest*. Montreal: McGill-Queen's.

-----. (1957). *Indonesia's Economic Stabilization and Development*. New York: Institute of Pacific Relations.

Husni, Dardiri. (1998). Jong Islamieten Bond. A Study of Muslim Youth Movement in Indonesia

during the Dutch Colonial Era 1924-1942. Masters thesis at McGill University.

Ingleson, John. (1983). *Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*. Jakarta: LP3ES.

-----. (1993). *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

-----. (2014). *Workers, Unions and Politics: Indonesia in the 1920s and 1930s*, Leiden: Brill.

Kahin, Audrey (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, judul asli: Rebellion to Integration, West Sumatra and the Indonesian Polity 1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

-----. (2012). *A Political Biography of Muhammad Natsir*. NUS Press: Singapura.

-----. (1985). *Regional dynamics of the Indonesian Revolution: unity from diversity*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Kahin, George McT. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

-----. (1952). *Nationalism and Revolution in Indoneisa*. Cornell University Press.

-----. (1980). "In Memoriam: Mohammad Hatta (1902-1980)". *Indonesia*, no. 30.

Kementerian Penerangan Republik Indonesia. (1950). Beberapa Tjatatan Detik dan Peristiwa: 17 Agustus 1945- 23 Djanuari 1950, Yogyakarta: Penerbit Darurat.

Kleden, Ignas. (2010). Sutan Sjahrir: Etos Politik dan Jiwa Klasik, dalam Rosihan Anwar. *Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kroef, Justus van der. (1955). "Indonesia's Economic Difficulties." *Far Eastern Survey*, vol. 24, no. 2.

Ku, C. (1991). The archipelagic states concept and regional stability in Southeast Asia. Case W. Res. J. Int'l L., 23,

Lapian, A.B, dkk. (1996), *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*. Jakarta: Depdikbud RI

Leclerc, Jacques. (1982). Amir Sjarifuddin 75 Tahun. *Prisma, 12*, 53-76.

-----. (2011). Aliran Komunis: Sejarah dan Penjara, dalam Jacques Leclerc. *Mencari Kiri: Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi Mereka*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

-----. (2011). Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi, dalam Jacques Leclerc. *Mencari Kiri: Kaum Revolusioner Indonesia dan Revolusi Mereka*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Legge, J.D. (1993). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Grafiti.

Leifer, Michael. (1989). *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Leirissa, R.Z. (1991). *PRRI Permesta. Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.

Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat (1950).

Lev, Daniel S., (2009). *The transition to guided democracy: Indonesian politics, 1957-1959*. Jakarta: Equinox Publishing.

Lindblad, J. Thomas. (2002). "The Importance of Indonesianisasi during the Transition from the 1930s to the 1960s", (makalah konferensi) *Economic Growth and Institutional Change in Indonesia in the 19th and 20th Centuries*, Amsterdam, 25-26 February 2002.

Lindblad, Thomas. (2008). *Bridges to New Business. The Economic Decolonization of Indonesia*. Leiden: Brill.

-----. *Economic Growth and Decolonization in Indonesia*.

Lohanda, Mona, dkk. (1986). *Sejarah Peralihan pemerintah RIS ke RI: Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia,* Jakarta: Depdikbud.

Lubis, Mochtar. (1986). *Hati Nurani Melawan Kezaliman: Surat-Surat Bung Hatta Kepada Presiden Soekarno*. Jakarta: Sinar Harapan.

Lukman Ramdhani Firmansyah (2013). "Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1955." *Jurnal Avatara*, vol. 1, no. 1.

Luth, Thohir. (1999). *M. Natsir. Dawah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani.

Madinier, R. (2015). *Islam and politics in Indonesia: The Masyumi party between democracy and integralism*. NUS Press.

Madinier, Remy. (2015). *Islam and Politics in Indonesia: the Masyumi Party Between Democracy and Integralism*, Singapore: NUS Press.

Mahendra, Yusril Ihza. (1994). "Modernisme Islam dan Demokrasi. Pandangan Politik M. Natsir. *Islamika*, no. 3.

Mansyur, Moh. Tholchah. (1969). *Pembahasan beberapa Aspek tentang Kekuasaan-kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Yogyakarta: Radya Indria.

McVey, Ruth (1972). "The Post-Revolutionary Transformation of the Indonesian Army." Indonesia, vol. 11.

Mišković, Nataša. (2014). Introduction, dalam Nataša Mišković, Harald-Fischer Tiné, dan Nadda Boškovska (Eds.). *The Non-Aligned Movement and the Cold War: Delhi-Bandung-Belgrade*. London & New York: Routledge.

Miyazawa. Kiichi dan Eldridge, Robert D. (2007). *Secret talks between Tokyo and Washington: the memoirs of Miyazawa Kiichi 1949-1954*, Lanham: Lexington Books.

Mrazek, Rudolf. (1996). *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.

Muchtarudin Ibrahim. (1985). *Dr. Sukiman Wirjosandjojo: Hasil Karya dan Pengabdianya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Invetarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional.

Mudjiono, Achmad (2017). "Kabinet Burhanuddin Harahap Tahun 1955-1956". Jurnal Avatara, vol. 5, no. 3.

Muhammad Yahya Selma (2009). "Perjalanan Panjang Pemilu di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, vol. 1, no. 1.

Mulyani, Nani, dkk. (1995). *50 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1965*. Jakarta: Citra Media Persada.

Nagazumi, Akira. (1989). *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Nalenan, R. (1981). *Arnold Mononutu: Potret Seorang Patriot*. Jakarta: Gunung Agung.

Nanulaita, I.O. (1983*). Ir.Haji Juanda Kartawijaya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Nasution, Abdul Haris. (1955). *Tjatatan2 sekitar politik militer Indonesia*. Djakarta: Pembimbing.

Nasution, Ahmad Harris. (1984). *Memenuhi Panggilan Tugas jilid 2: Masa Pancaroba Kedua*. Jakarta: Gunung Agung.

Natsir, Mohammad. (2008). *Capita Selecta. Vol. I-III.* Jakarta: Yayasan Bulan Bintang Abadi.

-----. (1950). *Islam sebagai Ideologi*. Jakarta: Penjiaran Ilmu.

-----. (1978). "InsyaAllah: Roem tetap Roem" dalam *Mohammad Roem. 70 Tahun Perjuangan Perunding*. Bulan Bintang: Jakarta.

-----. (1980). *Mencari Modus Vivendi antar Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.

Niel, Robert van (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. (judul asli: The Emergence of the Modern Indonesian Elite). Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Noer, Deliar. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.

Noer, Deliar. (1990). *Gerakan Islam Modern. 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

-----. (1990). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.

-----. (2002). *Mohammad Hatta. Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Djambatan.

-----. (2018). *Biografi Politik Mohammad Hatta. Jilid 1: Mohammad Hatta dalam Pemikirannya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

-----. (2018). *Biografi Politik Mohammad Hatta, Jilid II: Mohammad Hatta dan Persatuan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Onghokham. (2009). *Sukarno: Mitos dan Realitas*. In Onghokham. *Sukarno, Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. (2004). *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa, Buku 1: Periode 1945-1949*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Pauker, Guy J. (1961). "Indonesia's Eight-Year Development Plan", *Journal Pacific Affairs*, Vol. 34, No. 2, h. 115-130.

Petersson, Fredrik. (2014). Hub of the Anti-Imperialist Movement. *Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 16* (1), 49-71.

Poeze, Harry A.(1994). *Politiek-Politioneele Overzichten Van Nederlandsch-Indie: Deel IV 1935-941*, Dordrecht: Foris Publications.

-----. (2011). *Madiun 1948: PKI Bergerak*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor & KITLV-Indonesia, 2011.

-----. (2014). *Di negeri penjajah: orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*, Jakarta: KPG bekerja sama dengan KITLV.

Prayitno, Arrohman (eds.). (2004). *Ali Sadikin. Visi dan Perjuangan sebagai Guru Bangsa*. Jakarta: Pusat Kajian Kadeham Univ. Trisakti.

Pringgodigdo, A. K. (1994), *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

Pringgodigdo, A.G. t.t., Perubahan Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlementer. Yogyakarta: Jajasan Fonds Universitit negeri Gadjah Mada.

Purba, Siska Yema. (2013). *Amir Sjarifoeddin: Nasionalis yang Tersisih*. Yogyakarta: PolGov.

Purwanto, Bambang. (2004). "Kekerasan dan Kriminalitas di Kota pada Saat Transisi: Kotagede, Yogyakarta pada Akhir Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan", disampaikan dalam The 1st International Conference on Urban History, Surabaya 23-25 August 2004.

-----. *Krisis di Awal Kebangkitan: Pengguntingan Uang Pada Masa RIS, 1950,* dalam "Seminar Sejarah Nasional IV: Subtema II Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia", Yogyakarta, 1985 (Makalah).

Rahman, Suranta Abd. (2007). Diplomasi RI di Mesir dan Negara-Negara Arab Pada Tahun 1947. *Wacana*, *9* (2), 154-172.

Reid, Anthony. (1974). *Indonesian National Revolution 1945-1950*. Melbourne: Longman.

Rickleffs, M.C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

-----. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.

-----. (2008). *A History of modern Indonesia*. Houndsmills: Basingstoke.

Roadnight, Andrew. (2002). *United States Policy towards Indonesia in the Truman and Eisenhower Years*, Hampshire-New York: Palgrave Macmillan UK.

Rose, Marvis. (1991). *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*. Jakarta: Gramedia.

Rosidi, Ajip. (1986). Sjafruddin Prawiranegara: Lebih Takut kepada Allah SWT. Jakarta: Inti Idayu Press.

-----. (1990). M. Natsir. Sebuah Biografi. Jakarta: Girimukti Pasaka.

Rosihan Anwar. (2009). *Sejarah kecil "petite histoire" Indonesia (Volume 3)*. Jakarta: Buku Kompas.

Safwan, Mardanas; Kutoyo, Sutrisno; Tashadi. (1985). *Prof. Dr. Bahder Djohan: Karya dan pengabdiannya*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Salam, Solichin. (1990). *Sjahrir: Wajah Seorang Diplomat*. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam.

-----. (1990). *Wajah Nasional*. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam.

Salim, Emil. (2011). "Widjojo's Invisible Hand." *Economics and Finance in Indonesia*, vol. 59.

Sastra. (1980). Makna Sjahrir untuk Sastra dan Sastra untuk Sjahrir, dalam Rosihan Anwar (Ed.). *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: Gramedia.

Sastroamidjojo, Ali. (1974). *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*. Jakarta: PT. Kinta.

-----. (1975). *Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, Tahun 1927*. Jakarta: Yayasan Idayu.

-----. (1977). *Empat Mahasiswa di Negeri Belanda tahun 1927: Moh. Hatta-Nazir St. Pamuntjak AbdulMadjid Djojodiningrat-Ali Sastroamidjojo*. Jakarta: Idayu Press.

Sastrosatomo, Subadio. (1980). Sjahrir: Suatu Perspektif Manusia dan Sejarah, dalam Rosihan Anwar (Ed.). *Mengenang Sjahrir.* Jakarta: Gramedia.

Satyawati Suleiman (1979). "The Last Days of Batavia." *Indonesia*, no. 28.

Sekretariat DPR-GR. (1983). *Seperempat abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: tanpa tahun terbit.

Sekretariat Negara Indonesia. (1986). *30 tahun Indonesia merdeka*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Simanjuntak, P.N.H. (2003). *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.

Sjahrir, Sutan. (1982). *Sosialisme Indonesia-Pembangunan: Kumpulan Karangan.* Jakarta: Leppenas.

Sjamsuddin, Nazaruddin. (1985). *The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion*. Publisher: Singapore: Inst. of Southeast Asian Studies.

Sobagio I.N., dkk, (1979). *Wilopo 70 tahun*. Jakarta: Gunung Agung.

Soebagijo I.N. (1979). "Riwayat Hidup Wilopo", dalam *Wilopo 70 tahun*. Jakarta: Gunung Agung.

Soerojo, Soegiarso. (1988). *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*. Jakarta: S. Soerojo.

Stutje, Klaas. (2015). To Maintain Independent Course: Interwar Indonesian Nationalism and International Communism on a Dutch-European Stage. *Dutch Crossing: Journal of Law Countries, 39* (3), 204-220.

-----. (2016). *Behind the Banner of Unity: Nationalism and Anticolonialism among Indonesian Students in Europe, 1917-1931.* Amsterdam: Disertasi University of Amsterdam.

Subakir. (1950). *Skets Parlementer.* Djakarta: Pena

Sukma, Rizal. (2003). *Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity*. London: Routledge Curzon.

-----. (2006). *Islam in Indonesian foreign policy*. London. New York: Routledge.

Suleman, Zulfikri. (2010). *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas.

Sundhaussen, Ulf. (2002). *Politik Militer Indonesia 1945-1967. Menuju Dwi-Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.

Suprapto, Bibit (1985). Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suprapto, Bibit. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Ghalila Indonesia.

Suswanta. (2000). Keberanian untuk Takut. Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRI. Avyrouz: Yogyakarta.

Sutanto, Sergius. (2018). *Hatta: aku datang karena sejarah*. Bandung: Qanita.

Suyatno; Semedi, Pudjo; Suryoputro; AS Gunawan; Suswandari, (2010). *Pendidikan Muhammadiyah di Tengah Persaingan Nasional dan Global*. Jakarta: UHAMKA Press, 2010.

Swift, Ann. (2010). *The Road to Madiun: The Indonesian Communist Uprising of 1948*. Singapore: Equinox.

Tas, Sol. (1980). Kenangan Pada Sjahrir, dalam Rosihan Anwar (Ed.). *Mengenang Sjahrir.* Jakarta: Gramedia.

Tedjaksumana, Iskandar. (1984). "The Development of Labor Policy in Indonesia." University Microfilm.

Teik, Goh Cheng, "Why Indonesia's attempt at democracy in the 1950s failed?"

Tempo Seri Buku (2011). *Natsir. Politik Santun diantara Dua Rezim*.

Thee Kian Wie. (2005). *Pelaku Berkisah: ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*. Jakarta: Kompas.

Thee Kian Wie. (2010). The debate on economic policy in newly-independent Indonesia between Sjafruddin Prawiranegaera and Sumitro Djojohadikusumo." *Itinerario*, vol. 34, no. 1.

Tim Penyusun. (1979). *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Depdikbud.

Tjokroadisurjo, Iskaq. (1960). *Rasa keadilan berbitjara. Pembelaan Mr. Iskaq Tjokroadisurjo*. Jakarta: Dep. Pen/Prop DP PNI.

Turner, Barry. (2018). A.H. *Nasution and Indonesia's elites: "people's resistance" in the War of Independence and postwar politics*, Lanham, MD: Lexington Books.

Utama, Wildan Sena. (2017), *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme*, Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

-----. (2018). Mempropagandakan Kemerdekaan di Eropa: Perhimpunan Indonesia dan Internasionalisasi Gerakan Antikolonial di Paris. *Jurnal Sejarah 1* (2), 25-45.

Van Klinken, Gerry. (2010). *5 Penggerak Bangsa yang Terlupa: Nasionalisme Minoritas Kristen*. Yogyakarta: LKIS.

Van Niel, Robert. (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Vaughn, Sandra Chambers. Foreign Aid: Its Impact on 1950s Indonesian Political Development.

Vickers, Adrian. (2005). *A History of Modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press.

-----. (2012). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Insan Madani.

Wardaya, Baskara T. (ed.) (2017). Membangun Republik Bercakap Tentang Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Galangpress, SDUP, PUSDEMA dan APPTI.

Webster, D. (2010). *Fire and the full moon: Canada and Indonesia in A Decolonizing World*. Vancouver: UBC Press.

Winardi, Uji Nugroho, dkk. (2008). *Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 dan 1955 di Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Winardi, Uji Nugroho. (2011). "Militia politics: Civil rights and the debate on indigenous

conscription in Java, 1940-1942". *BA Thesis* Leiden University.

Winda Rizky Nur Lutfiana. (2017). "Usaha-usaha Penggagalan Pemilihan Umum Pertama tahun 1955." *Jurnal Avatara*, vol. 5, no. 1.

Woodward, Mark, Ali Amin, Inaya Rochmaniyah & Chris Lundy. (2011). *A New Cultural Path for Indonesia's PKS?*

Yamin, Muhammad. (1954). Pembentukkan dan Pembubaran Uni. Jakarta: Bulan Bintang.

Zed, Mestika. (1997). *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang terlupakan*, Jakarta: Grafiti.

ARSIP

ANRI, Arsip Sekretariat Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959, no. 2234.

SURAT KABAR

Algemeen Indisch Dagblad. 27 Oktober 1955.

Berita Masjumi. 16 Mei 1951.

De Nieuwsgier. 20 Agustus 1955.

De Telegraaf. 31 Agustus 1955.

De Preangerbode. 10 Juli 1953.

De Preangerbode. 23 Maret 1956.

Friese Koerier. 18 Februari 1956.

Het Nieuwsblad voor Sumatra. 5 Agustus 1955.

-----. 9 Juli 1953.

-----. 12 Juni 1952.

-----. 24 September 1955.

-----. 12 Agustus 1955.

Java Bode. 15 Mei 1952.

Java Post. 17 April 1950.

-----. 19 April 1950.

-----. 24 April 1950.

-----. 26 April 1950.

-----. 2 Mei 1950.

-----. 8 Mei 1950.

-----. 10 Mei 1950.

-----. 16 Mei 1950.

-----. 17 Mei 1950.

-----. 20 Mei 1950.

-----. 19 April 1950.

-----. 28 April 1950.

-----. 19 Mei 1950.

-----. 2 Djuni 1950.

-----. 5 Djuni 1950.

-----. 5 Djuli 1950.

-----. 19 Djuli 1950.

-----. 27 Djuli 1950.

-----. 29 Djuli 1950.

-----. 13 Agustus 1950.

-----. 4 Oktober 1950.

-----. 5 Oktober 1950.

-----. 7 Oktober 1950.

-----. 10 Oktober 1950.

Kedaulatan Rakjat. 6 Januari 1950.

-----. 7 Januari 1950.

-----. 9 Januari 1950.

-----. 20 Januari 1950.

-----. 19 Januari 1950.

-----. 20 Januari 1950.

-----. 22 Januari 1950.

-----. 17 Januari 1950.

-----. 17 Maret 1950.

-----. 18 Februari 1950.

-----. 20 Maret 1950.

-----. 22 Maret 1950.

-----. 17 Januari 1950.

-----. 1 Maret 1950.

-----. 28 Maret 1950.

-----. 25 Maret 1950.

-----. 31 Maret 1950.

-----. 9 Januari 1950.

-----. 14 Januari 1950.

-----. 17 Januari 1950.

-----. 6 Januari 1950.

-----. 22 Januari 1950.

-----. 9 Januari 1950.

-----. 20 Januari 1950.

-----. 14 Januari 1950.

-----. 27/29 Januari 1950.

-----. 12 Januari 1950.

-----. 29 Januari 1950.

-----. 7 Januari 1950.

-----. 28 Januari 1950.

-----. 30 Januari 1950.

-----. 21 Februari 1950.

-----. 2 Maret 1950.

-----. 3 Maret 1950.

-----. 20 Maret 1950.

-----. 25 Maret 1950.

-----. 24 November 1958.

-----. 2 Oktober 1958.

-----. 6 Oktober 1958.

-----. 25 November 1958.

-----. 30 Oktober 1958.

-----. 2 Desember 1958.

-----. 9 Desember 1958.

-----. 29 Desember 1958.

-----. 6 Januari 1959.

-----. 18 Februari 1959.

-----. 21 Februari 1959.

-----. 2 April 1959.

-----. 6 Maret 1959.

-----. 10 Maret 1959.

-----. 5 Mei 1959.

-----. 16 Mei 1959.

-----. 3 Djuni 1959.

-----. 4 Djuni 1959.

-----. 6 Djuli 1959.

-----. 8 Djuli 1959.

-----. 10 Djuli 1959.

-----. 12 Juli 1960

-----. 20 Desember 1960.

-----. 23 Juli 1962.

-----. 17 Januari 1963.

-----. 6 Mei 1963.

Leeuwarder Courant. 3 Desember 1955.

Merdeka. 23 November 1946.

Nieuwsgier. Ochtenblad voor Indonesie. 20 Juli 1953.

Soeloeh Ra'jat. 25 November 1946.

INDEKS

A

Abadi, Harian 279, 414

Abdul Halim 4, 171–172, 174, 179, 181, 184, 189–190, 195–197, 200, 202–204, 224–226, 338

Abdul Muis 99, 102–103, 177

Abdul Rivai 58

Abdulah Aidit 275

Abdullah Jusuf 323

Abdullah Sukur 22–23

Abdulmadjid 42, 74, 76–77, 90

Abdulrasjid 291–293

Abikusno Tjokrosujoso 339, 387

Abu Hanifah 44, 59, 68, 89, 156, 234

Aceh 7, 188, 217, 230–231, 235–237, 349–350, 366, 408, 415, 434, 440, 446, 464

Acheson 278

Achmad Wiranatakusuma, Mayor 365

ad interim 306, 339, 341, 369

Adam Malik 2, 184

Administrator 133, 204, 268, 288, 382–383, 404, 424, 447, 451, 454

Agresi Militer I 3, 83

Agresi Militer II 4, 183

Agus Salim, H. 43–45, 99, 102–103, 129, 135, 140, 151, 154, 211, 217–218, 221, 254, 260–262, 264, 283, 384

Ahen Erningpraja 321

Ahmad Hassan 210, 212, 216–219, 224, 234, 240

Ahmad Hussein 242

Ahmad Soebardjo 131, 134, 178

Ahmad Wahib 243

Al Azhar 243

Albert, J. 255

Algemeene Studieclub 118

Ali Budiardjo 182, 196, 435–436

Ali Sastroamidjojo 2, 6–8, 110, 112, 140, 151, 178, 237, 256, 259, 265, 277, 279, 327–329, 331, 335–357, 359–376, 382–383, 389–392, 397–402, 405, 407–410, 422, 433, 436, 464

Ali-Baba 352, 397

Alimin 90, 232, 320–321, 331

Ambtenaar 14, 330, 423, 428

Amelz 226

Amerika Serikat 5, 6, 27, 38, 80, 109, 128, 132, 143, 179, 183, 230, 237, 387, 390, 398, 423, 431, 433–434, 440, 456, 462

Amir Sjarifuddin 3, 28, 34, 37, 42, 47, 55–59, 61–70, 72–74, 77–79, 81–83, 85, 87–93, 126, 137, 139, 146, 148–149, 179, 264, 296, 298, 301, 335, 382, 422, 460–461, 466

AMS 14–15, 17, 19–20, 215–216, 218–219, 240, 245, 289–291, 294, 383–384, 427

Amsterdam 3, 20, 114, 254–255

Anak Agung Gde Agung 48, 145, 153, 156–157, 188, 395, 414

Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) 233

Angkatan Perang Sabil 385

Anwar Haryono 240, 244, 414

APRA 275

Arnold Mononutu 60

Aroedji Kartawinata 406

Asaat, M. 190, 347, 464

Asia 7, 30, 44–45, 47, 50, 65–66, 68, 107, 110–111, 113, 125–127, 135, 147, 152, 217, 255, 278, 328, 332, 372–373, 395

Asia Tenggara 30, 113, 135, 147, 217, 278, 372

Asian Games 201

Asian Relations Conference 44

Asian Socialist Conference 47

Asikin Widjajakoesoema, dr. 174

Asmara Hadi 64

Asrama Angkatan Baru Menteng 28

Asrama Fakultas Kedokteran 28, 33

Asrama Indonesia Merdeka 28

Asraruddin 348

Assaat 59, 173, 183–184, 188–189, 193, 199, 202, 224, 229, 236, 392, 413, 445

Assat, M. 298

Association pour l' étude des Civilisations Orientales 111

Atmosfer 333

Awaloeddin Djamin 423

Aziz Saleh, Dr., Letkol 320

B

B. Sahetapy Engel 225–226

Badan Nasionalisasi (BANAS) 434

Bagelen 257, 288

Bagus Hadikusumo 128–129, 132, 221

Bahder Djohan 102–103, 229, 309

Bali 48, 153, 254, 369–370, 437

BAMA 283

Bambang Sugeng 354, 407

Bambang Utojo, Kolonel 355

Banceuy 295

Banda Neira 13, 26, 109, 124–125

Bandung 6–8, 12, 14–17, 19–20, 25, 33, 60, 80, 114–115, 118, 120, 122, 162, 211–212, 215–219, 221–222, 240, 245, 292, 294, 309, 368, 373, 375, 395, 405–406, 424–427, 429, 447, 453

Bandung Conference 328

Bangka 4, 151, 153, 180, 183, 189, 192, 359, 430

Bank Sentral 270

Banyumas 189, 192, 329

Banyuwangi 46, 274

bapak rakyat 272
Barabai 257
Barisan Banteng 298
Barisan Pelopor 298
Barlian, Letkol 242, 367, 411, 442
Basel 334
Baswedan, A.R. 223, 240
Batavia 1, 4–5, 16, 19–20, 57, 59, 61, 101, 215, 217–218, 252–253, 255, 328–329, 331–332, 384, 426
Batur 329
Bebasa Daeng Lalo 319
Belanda 384–386, 397–398, 401, 404–407, 409–410, 424–428, 430–431, 434, 436, 443–445, 450, 452, 459–463
Belawan 255
Benedict Anderson 24, 74
Bengkulu 188, 295
Benjamin Higgins 422, 431, 435
Berita Indonesia, Harian 319
Bernhard Dahm 24
Bijzonder Federaal Overleg (BFO) 152–154, 157, 225
Biro Perantjang Negara 422, 430–431
Blok Barat 279, 284, 317, 464
Boedi Utomo 129
Boediarto 257
Boentaran, Dr. 348
Bogor 164, 255, 257, 274, 390, 449
Bondan 25, 122–123
Boom Korea 270
Boven Digoel 295
Boyolali 252–253
BP KNIP 34, 137, 140, 150, 172, 179, 199–200, 202, 387
BPUPKI 4, 129, 130–131
Brigade Sukarelawan 354
Brussel 334
BTI 77, 90, 322, 339, 389, 439
Budi Oetomo 253
Bukittinggi 100–102, 174, 242, 445
bumiputra 290, 329–331
Burhanuddin Harahap 382–383, 386–388, 391, 393–395, 397–398, 400, 405, 408, 424, 433, 445, 456, 464

C

Candi Umbul 332
Centrale Burgerlijk Ziekenhuis (CBZ) 202
Chairul Saleh 384, 439
Charles Tambu 176
Christoffels, A.C. Dr. 219
Chuo Sangiin 127
Cina 42, 66, 111, 161, 271, 464
Cipinang 25, 122, 259
Cirebon 8, 15, 17, 29–30, 32, 41, 46, 69, 74, 193
Cochran, Merle 143, 230, 279, 317
Colombo 371, 372
Constabulary Agreement 279
Corps Polisi Militer (CPM) 399

D

Dahlan Djambek 212, 412, 443, 465
Dahlan Ibrahim 362, 367
Dai Nipon 263, 298
Dalidjono, Mr. Moh. 350
Darul Islam 7, 223–224, 231, 234–235, 241, 275, 281, 348, 403, 446
Daud Buereueh, Teungku 349
Daulat Ra'jat 23, 115–117
Dawam Rahardjo 243
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid 333
De Indische courant 255
De Javansche Bank 270
De Jonge, Gubernur Jenderal 25, 62–64, 295
de Rozario, A.B. 362
de rumoerige uitdagende toon 342
Defisit 314, 398
Deklarasi Djuanda 8, 423, 450–451
Delegasi 153, 223, 405, 442, 462
Deli 255, 322, 443
Den Haag 4, 6, 100, 112–113, 152, 154–155, 299, 333, 335, 341, 405–406
Des Alwi 48, 156
Dewan Banteng 367
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 415
Dewan Nasional 369, 440
Dewan Partai 183, 263
Dewan Perantjang Nasional (Depernas) 451, 455
DI/TII 231, 275, 350, 408, 446
Digoel 295, 334
Divisi Siliwangi 146–147, 149, 231, 366
Djaelani, Mayor 366
Djamin Ginting 367
Djanger 265
Djawatan Kereta Api 429
Djody Gondokusumo 280, 339, 382, 398, 400–401
Djohan Effendi 243
Djohan Sjahroezah 28–29, 64, 74
Djuanda, Ir. 7, 8, 140, 154, 156, 212, 229, 238, 272, 309, 359, 398, 411–412, 422–457, 465
Djuhro Sumitradilaga, Mayor 366
D.N. Aidit 90, 232, 275, 320–321, 323, 397
dokter Jawa 250, 252–254, 259, 331
Dokter Pribumi 252
DPA 199, 265
DPR 163–164, 192, 197–200, 225, 265, 269, 275, 306, 310, 312–313, 318, 350, 357, 361, 364, 366, 368, 403, 408, 451
DPRS 197, 199, 265, 336, 352
DPV (Deli Planters Vereniging) 322–323
Dwi-tunggal 366

E

eerste klasse school 330
eksplisit 333
ELS (*Europesche Lagere School*) 14, 58, 101, 252, 290, 424
Emil Salim 436
Ende 5, 295
Eropa 1, 7, 22, 24–25, 49, 58, 66, 99, 101, 104–105, 109–110, 213, 240, 251–253, 255, 258–259, 279, 299, 328, 330, 332–334, 368, 370, 376, 425, 438, 445
Eropa Timur 368

F

Fahrudin, K.H. 258
Fakih Usman 320
Fakultas Kedokteran Universitas Amsterdam 254
Faqih Usman 185, 390
FDR 87–92, 139, 146, 185, 461
FEUI 436
Filipina 26, 127, 147, 278
Formatur 199, 226
Forum 442
Front Persatuan Nasional 321

G

Gamel Abdul Nasser 328
Gani, A.K. 64, 76–77, 182, 296
GAPI 67, 262, 297
Gatot Soebroto 365
Gedenkboek van het Indonesische Vereeniging 256
Gemeente 335
Geneva 281
Genoa 114, 332–334
Genua 255
George McTurner Kahin 213, 245
Gerilya 461–462
Gerindo 57, 64–70, 73–75, 296–298
Gerry van Klinken 19
Glassburner, Bruce 270, 343
Glodok 25, 122, 295
Godean 385
Gondowinoto 333
Grabag 328–329, 332
Gulden 335
Gunseikanbu Somubu 298–299
Gunting Syarifuddin 187
Gunung Krakatau 332
Gunung Merbabu 328

H

Hadikusumo, S. 128–129, 132, 221, 347, 350, 390
Hamdani 15, 17, 19, 25, 184, 385
Hamid Al-Gadri 226
HAMKA
Al Azhar 243, 244
Hanafiah, Mohammad 339
Hardi 393, 439, 447
Harjadi, F.S. 201
Harlem 58
Harsono Tjokroaminoto 298, 396
Hartojo 348
Hasyim Asy'ari, K.H. 263–264
Hatta, Moh. 1–6, 12–15, 17, 22–31, 33–35, 37, 39, 42, 45, 48–49, 56–57, 59, 61–63, 69–72, 74, 87–88, 90, 92, 98–165, 173, 176, 178, 180–181, 183–184, 189, 192, 194–195, 197, 199–201, 211, 213, 216, 221–226, 228–229, 231–232, 241–242, 256, 259, 261, 264–265, 267, 269, 276, 281, 295, 297, 299, 301–302, 309, 317, 319, 333–335, 337, 341, 354–356, 366, 368, 383, 392, 395–396, 408–411, 422–423, 429–430, 440–444, 461–462
Hazairin, Prof. Dr. Mr. 339, 348, 352
HBS 101, 211–212, 330–332, 425–426
Herbert Feith 133, 268–269, 279, 281, 284, 288, 306, 312, 319, 321, 324, 341, 344, 383, 404
Himpunan Usahawan Muslim Indonesia (HUSAMI) 414
Hindia Belanda 25, 33, 38, 75, 101–103, 105, 111, 121, 131, 135, 195, 202, 211, 213, 218, 231, 253, 258, 261, 332–333, 335, 344, 425–426, 428, 433–434, 450
Hindia Poetra 106, 255
Hindia Timur 105, 333
Hiroshima 29
HIS 174, 211, 214, 218, 289–291, 330, 383, 424, 426
Hoge Luwe 39
Houwink, Dr. 270
Husni Thamrin 60

I

Idenburg 68–69
Idham Chalid 359, 439, 447
Ikada 33, 127, 132, 136, 202–203
Iljas, Moh. 361
Independen 339
India 44–46, 50, 80, 106, 109, 111, 154, 188, 223, 240, 256, 276, 279, 299, 372, 375, 384
Indira Gandhi 165
indische art 254

Indische Vereeniging 105–106, 333

Indo-Belanda 329

Indonesia, 8, 16–20, 22, 33, 38, 42, 44, 46–47, 50, 60–61, 65, 69, 72, 80, 84, 87, 89, 92, 98–99, 104, 106, 110, 112–113, 116, 118, 122–123, 126, 128, 131–135, 146, 152, 155, 159, 164, 172–173, 175, 178, 180, 183, 186, 191, 193, 202, 211, 222, 225–226, 229, 233, 236, 250–251, 253, 259, 263, 265, 270, 275–276, 278, 280, 297–298, 301, 310, 319, 328, 331, 335, 338, 341, 346, 368, 370, 372–373, 382, 384, 392, 407, 411, 414–415, 423, 427–428, 434–435, 441–442, 450–452, 454, 456, 459, 461–462

Indonesia Merdeka 22, 28–29, 45, 49, 56, 65, 90, 92, 106, 110–113, 115–117, 131, 133–134, 165, 255, 276, 295, 333, 335, 409, 462

Indonesia Raya 20, 31, 60, 64, 126–128, 132, 154–155, 279, 296, 454

Indonesianisasi 270, 343, 346, 352, 438

Indonesisch Verbond van Studeerenden 333

Indonesische Studenten Vereeniging (ISV) 426

Indonesische Vereeniging 105–107, 255–256

Inferior 105, 330–331

inferiority complex 330

Inggris 1, 3, 15, 26, 35, 37–38, 42, 44, 47, 49–50, 58, 80, 84, 92, 109, 111, 135–136, 179, 276, 279, 344, 493

Inlander 105, 330–332

Inlandsche HBS *Vereniging* 331

Instituut Jurnalistiek & Pengetahuan Oemoem 296

IPKI 362, 367–368

Irian 8, 48, 158, 202, 230–231, 237–238, 269, 284, 310, 348, 364, 371, 395, 398, 405–406, 440, 443–444, 451–452, 463

Irian Barat 8, 48, 158, 202, 230–231, 237–238, 269, 284, 310, 364, 371, 395, 398, 405–406, 440, 443–444, 451–452, 463

Irlandia 256

Isa Ansyari 275, 289

Iskak Tjokroadisurjo, Dr. 339

Ismail Lengah, Kolonel 367

Itagaki, Prof. 175

Italia 26, 297, 332–334, 431

Iwa Koesoemasoemantri 333

J

Jakarta 3, 6, 25, 27–28, 30, 40, 45, 48, 61, 63–64, 69, 71, 74, 80, 101–102, 115, 118, 124, 127, 131, 133, 140, 142, 145, 159–161, 165, 173–174, 176, 179–180, 182–185, 188, 194, 198, 200, 202–203, 211, 221–223, 225, 230, 237, 241–243, 245, 274–275, 293, 295, 298, 304–305, 318–319, 322, 324, 335, 341, 347, 351, 355, 365–366, 373, 383–386, 389, 391–392, 394, 399, 409, 412–414, 416, 426–427, 429–431, 433, 435, 438, 440, 442–445, 449–450, 456, 459

Jamaluddin Al-Afghani 216

Jawa 16, 29, 33, 39, 42, 57, 62–63, 68, 73, 80, 88, 90, 104, 122, 125, 127–128, 134, 139, 144, 146–147, 150, 180, 185, 189, 191–193, 215–216, 224, 227, 230–231, 233–235, 242, 250–254, 257–259, 263–264, 272, 274, 281, 288, 294, 298, 311, 330, 332, 349, 357, 365–366, 384, 389, 391, 403–404, 408–409, 413, 416, 423, 430, 434, 439, 445, 459, 464

Jawa Barat 16, 62, 80, 134, 144, 147, 224, 231, 234–235, 272, 274, 298, 365, 394, 408, 423, 430, 434, 445, 459, 464

Jawa Hokokai 127–128

Jawa Pos 274

Jawa Raya 254

Jawa Tengah 88, 90, 122, 134, 139, 146, 189, 191–193, 230–231, 264, 281, 385, 404, 413, 459

Jawa Timur 29, 33, 39, 68, 134, 144, 189, 191–193, 225, 311, 404, 459

Jawaharlal Nehru 44, 111, 328

Jawatan 33, 179, 189, 192–193, 254, 261, 293, 301, 413, 429

Jepang 3, 13, 19, 26, 28, 30, 38, 66, 69, 71, 73, 84, 121, 125–126, 128, 131, 133–134, 175–176, 297, 299, 301, 328, 385, 429

Jerman 15, 26, 29, 66, 108, 112, 114, 281, 297, 334, 372, 431

Jetis Temanggung 329

Johan Arifin 413

Jombang 90, 263

Jong Ambon 253

Jong Indonesie 12, 16, 19, 20

Jong Islamieten Bond (JIB) 211, 215, 217

Jong Java 118, 217, 253–254, 256, 258–259, 294, 331, 384

Jong Pasundan 331

Josip Broz Tito 47

JSB (Jong Sumatranen Bond) 101–103

Jusuf Wibisono, Dr. 202, 239, 253, 271, 277, 280–281, 284, 387, 389–391, 400, 415

Jusuf, A.B.M. 319

K

Kahar Muzakkar, K.H. 222, 231

Kairo 43, 50, 101, 104, 217

Kalimantan 1, 41, 119, 134, 192–193, 195, 224, 231, 241, 257, 315, 349–350, 366, 434, 440, 452

Kalimantan Barat 192–193, 195, 224, 366, 440

Kalimantan Selatan 192, 231, 349, 366, 440

Kalimantan Timur 192–193, 195, 257, 366

Kampung Beton 250

Karachi 43

Karl Marx 22, 293

Kartini 220

Kartosemito 331–332

Kartosoewirjo, Sekarmadji Maridjan 349

Kartoyo 251

Kasimo, I.J. 140, 229, 406

Kasman Singodimedjo 132–133, 177, 217–218, 319, 384, 391, 408

Kawedanan 328

Kawilarang, A.E., Kolonel 201, 233, 319, 365

Kediri 88, 99, 298

Kemal 6, 219, 334

Kenpetai 298, 335

kepulauan nusantara 333

Kermat, Dr. 255

Ki Bagus Hadikusumo 128–129, 132

Ki Hadjar Dewantara 127, 129, 259, 265

KMB 46, 99, 100, 151, 154–156, 184, 231–232, 237, 299, 310, 364, 430, 434, 440, 444

KNIL 6, 84, 136, 157, 194, 201, 224, 230, 289, 318, 433

Koalisi 42, 47, 66, 72, 76, 227, 229, 231–232, 267–268, 271, 305, 307, 309, 312, 324, 336, 352, 357, 362, 368, 382, 391–393, 395, 404, 406, 408

Koiso 128

Kolera 255

Kolonial 16, 17, 21–22, 25–26, 28, 33–34, 42, 50, 56, 60–64, 67–68, 70, 72, 75, 84, 86, 98–99, 101–102, 105–107, 110–114, 119, 121–123, 125–126, 165, 173–174, 202, 215, 217–219, 245, 253, 255–256, 258–261, 269, 288–289, 295–297, 299, 301, 322, 330, 332, 334–335, 344, 346, 362, 371–372, 385, 393, 428, 459–462

Komando Jakarta Raya 366

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 2, 31, 34, 72, 136–137, 139–140, 150, 156, 172–173, 177–180, 182–183, 185–186, 197–200, 202, 222, 265, 298, 385–386

komoditas 27, 270–271, 302, 346, 398

Komunis 2, 5, 16, 25, 42, 46–47, 60, 67, 69–70, 77, 88–90, 112, 134, 146–147, 162, 180, 234, 241–242, 244, 259–260, 275, 278–279, 338, 357, 369, 389, 392, 410, 414, 444, 461

Konferensi Asia Afrika (KAA) 328

Konferensi Bandung 371

Kongres Ekonomi Nasional (KENSI) 438

Kongres Melawan Penindasan Kolonial dan Imperialisme 111

Kongres Rakyat Indonesia 262, 427

Koningsberger, J.C. Dr. 334

Konservatif 25, 210–212, 214, 216, 232, 241, 243, 295–296, 331, 333, 384, 428

Konstitusi 1, 46, 132, 159, 164, 187–188, 197–198, 226, 234, 272, 237, 372, 402, 449, 465

Kontroversi 141, 202, 233, 278, 283, 347, 365, 401

Kooperatif 64, 67, 115, 126, 256, 260, 296–297, 301, 315, 335

kotapraja Makasar 347

Kranji 299

Kristenisasi 211, 219–220, 241, 244

KSAD 320, 354–355, 365, 407, 442

KTN (Komisi Tiga Negara) 81, 89, 140, 142–143, 461

Kudus 281

Kuntjoro, Mr. 312

Kustami 255, 257–258

Kustiyah 329

Kyai Haji Wachid Hasyim 387

L

Lamin 319

Lamine Senghor 111

Landraad 14, 294

Legasi 370, 372

Leiden 4, 6, 20, 22, 58, 213, 333–334, 376

Leimena, J. 156, 229, 233, 395

Lembaga Administrasi Negara 423

Lev, Daniel S. 369, 447

Liem Bwan Tjie 203

Liem Koen Hian 65–66, 125

Liga Arab 43, 50

Liga Muslim Indonesia 320, 338

Linggardjati 265

Literasi 252

Loano 290

Lobo, I.R. 322

London 43, 365

Louis Beel 80

Lukman Hakim 154, 181–184, 188–189

Lukman Wiriadinata 311, 395, 399

Lukman, M.H. 320

M

Madinier, Remy 5, 264, 350

Madjlis Syuro 263

Madrasah Mualimin Muhammadiyah 263

Maeda 28, 131–132

Magelang 189, 291–292, 328–330, 332

Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) 221

Makassar 48, 122, 162, 192, 194, 201, 214, 399

Malang 27, 29, 33, 46, 70, 181, 225, 242, 335

Malaria 26, 123–124, 255

Maludin Simbolon, Kolonel 242, 407

Maluku 124, 134, 158–159, 193–194, 230, 233–234, 236, 314, 318, 364, 369, 439, 446

Maluku Utara 193, 364

Manado 256, 442, 444–445
Mangunsakoro 337–338
Maninjau 116, 214
Manipol-Usdek 451–452, 454
Manusama, J.A. 233
Maramis, A.A. 140, 256
Maria Duchâteau 21
Maria Ulfah Santoso 427, 429
Markhaban, Sjech 362
Martine, La 332
Martowardoyo 260–261
Maruto Darusman 77, 89–90, 92
Maruto Nitimihardjo 296
Mas Nirman 291
Masjkur, K.H. 154, 339
Maskoen 25, 120, 123
Masyhur 331
Masyumi 3–7, 47–48, 76, 80, 83, 87–88, 139–140, 156, 162, 181, 183–185, 197, 199, 202, 210–212, 217, 221, 223–224, 226–227, 231–232, 234–245, 250–251, 257, 259, 263–265, 267–268, 271–272, 275–276, 279–280, 284, 303, 305–307, 309, 312, 320–324, 337–339, 341–342, 349–351, 353, 357, 359–360, 364, 367–368, 382–387, 389–393, 395–396, 398, 400–404, 407, 409–412, 414–415, 423, 434, 437, 439–440, 444, 449, 454, 456, 462–465
Mavis Rose 100
MBAD 354
Medan 14, 18, 21, 58, 117, 124, 149, 237, 323, 349, 383, 399, 429
Mekah 217, 242, 355
Melby 237, 280
Merdeka, Harian 201, 318–319, 455
Merdeka, Mingguan 319
Mesir 43–44, 50, 111, 217, 240, 255, 299, 372
Messali Hadj 111–112
Metekohy, R.J. 233
Metropolitan 17, 331, 337
Mikoyan, A. 452
Mimbar Indonesia, Mingguan 319
Minahasa 192, 253, 347, 439
Mirabeau 59
Mochtar Loebis 454
Moderat 38, 43, 67, 118, 134, 147, 227, 260, 264, 276, 296–297, 343, 387
Modernis 102, 210, 213, 216, 220, 227, 240, 243–245, 260, 263–264, 284, 320, 380, 383–384, 415, 429
Moekarto Notowidigdo 306
Moeljatno 401
Moestika 261
Mohammad Idris Sutan Saripado 214
Mononutu, A.I.Z. 60, 156, 185, 256
Moscow 337
MSA (Mutual Security Act) 278
Muhammad Abduh 217
Muhammadiyah 128, 245, 258–260, 262–263, 320, 385, 424, 427
MULO 14, 101–102, 174, 211, 214–216, 218, 290–291, 383
Murba 147, 184–185, 199, 212, 273, 275, 321, 342, 369, 400, 449
Murwoto 25
Mushir Hosein Kidwei 384
musik keroncong 253
Muso 47, 67, 69, 88–90, 92–93, 146, 461
Mustopo, Dr., Kolonel 320
Musyawarah Nasional (MUNAS) 440
Mutatuli 332
Muwardi 298

N

Nagasaki 29
Nasionalisasi 41, 232, 270, 280–281, 353, 407, 431, 434, 443–444, 449
Nasrun, Moh. 268
Nasution, A.H. 6, 8, 320, 354, 391, 407
Nationaal Islamiche Padvinderij (Natipij) 215
National Security Council (NSC) 278
Natsir, Mohammad 5, 6, 17, 172, 180–181, 183, 185, 195, 198–202, 210–224, 226–246, 250–251, 259, 263, 265–269, 276–277, 279–281, 284, 303, 305, 309, 311–312, 314, 321, 337, 342, 371, 382–384, 386–387, 389–391, 395, 402, 405, 409–416, 422, 424, 431, 435, 444, 454, 456, 462–463, 465–466
NAZI 74, 84, 297
Nazir Datoek Pamuntjak 99, 101, 103, 106, 113, 333, 256
Negara Indonesia Serikat 41–42, 100, 139–140, 144, 152–154, 182
Negara Indonesia Timur (NIT) 225
Negara Islam Indonesia (NII) 349
New Delhi 43–44, 47, 50, 152
New York 6, 7, 42, 44, 406
NICA 3, 33, 135, 179, 182, 203, 429
Nieuwe Banen 256
NILLMIJ 335
Njoto 320
Non-Blok 371
non-aligned 371
Noto Soeroto 59, 333
NU 227, 250, 263, 284, 320, 352–353, 355, 357, 359, 368–369, 393, 401, 439, 449
Nurcholis Madjid 243
Nusa Tenggara 369, 438
NVV (*Nederlands Verbond van Vakverenigingen*) 283
Nyonya Wirjosandjojo 251–252, 258

O

Oba 364
Oei Jan Lee 333
Oetoesan Hindia 261
Oetoesan Indonesia 261
Oetoyo Ramelan, R. 405
Onafhandelijke Socialistische Partij (OPS) 61
Ong Eng Die, Dr 77, 339, 343, 346, 392, 399
Oposisi 7, 41, 46, 48, 90, 121, 146, 149, 158, 185, 194, 199, 202, 224, 227, 231–232, 236, 238, 261, 271, 307, 312, 321, 324, 334, 341–343, 348–353, 359, 365–368, 370, 373, 391, 395, 401, 409
Oranje 27, 126, 218, 332
Orde Baru 8, 162–164, 174, 210–212, 243–245, 403, 414–416, 422, 436
OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*) 290–291
Otto Iskandardinata 427

P

Padang 2, 14, 101–102, 116, 120, 191–193, 214–216, 242, 383, 389, 410, 412, 444
Paguyuban Pasundan 427–428
Pallar, L.N. 335
Pamong Praja 229, 236, 330
Pandhuis 252
Pandji Suroso, R. 229, 232, 339
Pan-Islamisme 217, 219
Panitia Nasionalisasi DJB 270
Panitia Pemilihan Indonesia 347, 351, 403
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 131, 177, 459
pantai Locarno 334
Paras 47, 74
PARII 262
Parindra 64, 66–67, 296–297, 307, 339, 355
Paris 110–111, 113–114, 309
Parkindo 229, 267, 307, 348, 360, 362, 395, 400, 449
Parsi 46, 73–74
Partai Buruh 77, 87, 90, 111, 199, 275, 277, 307, 334, 339, 348, 393, 395
Partai Katolik 229, 239, 341, 362, 395, 465
Partai Murba 147, 184, 342
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 243
Partai Sarikat Islam (PSI) 259
Partai Sosialis Indonesia (PSI) 13, 46
Partindo 6, 23–24, 56–57, 60–64, 72, 75, 117, 120–122, 261, 295–296
Passagierslijst 255
Patani 364
Patriae Scientiaeque (PSQ) 15
Patterson, W.R. 1, 33
PBB 3, 7, 42–45, 50, 80, 140–141, 151–152, 154, 179–181, 233, 270, 278, 303, 306, 335, 375, 398, 405–406, 435, 444, 462
PDB 344
Pearl Harbour 69
pegunungan Alpen 333
Pelabuhan Tanjung Priuk 332
Pellaupessy, A. 268
pemberontak-bandit 281
Pemuda Indonesia 12, 16, 18–20, 58, 114, 256, 294
pengusaha koper 352
Peperpu (Peraturan Penguasa Perang Pusat) 449
Perancis 15, 38, 47, 58–59, 66, 85, 93, 110–111, 114, 299, 334
Perang Dingin 147, 279, 328, 371, 375–376, 390
Perang Dunia I 104, 255
Perang Dunia II 1, 68, 128–129, 179, 276
Perang Korea 232, 234, 270, 314, 398
Perang Pasifik 26, 108, 125, 127, 429
PERBEPBSI 348
Perguruan Rakyat 60, 296, 298
Perhimpinan Pemuda Indonesia 294
Perhimpunan Indonesia 4–6, 22, 58, 99, 104, 107, 112, 134, 253–254, 256–257, 333–335
Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) 28, 60
Perjanjian Linggarjati 3, 37, 42, 44, 460–461
Perjanjian Renville 3, 81, 83, 88, 139, 141, 144, 146, 182, 185, 461
Perjanjian San Fransisco 276–278, 283, 337
Permi 63, 117, 122
Persatuan Bangsa Indonesia 197, 296, 331
Persatuan Islam (Persis) 210, 217–218, 221, 234
Persatuan Islam Indonesia 262
Persatuan Pegawai-pegawai Kepolisian Negara 369
Persatuan Perjuangan (PP) 39
Perti 263
Pes 255
Pesindo 62, 73, 84, 87–88, 91, 148
PETA 84, 135
Philipina 343
Piagam Djakarta 449
Piagam Palembang 242, 442
Piagam Yogya 354
PID *(Politieke Inlichtingen Dienst)* 122, 295
PIR 268, 279–280, 352–353, 392, 396
PIR Wong 352
PIR-Rin 352
PKI 7, 16–17, 47–48, 57, 64, 67–69, 74–75, 77, 87–92, 119, 145–146, 185,

199, 202, 216, 225, 227, 230–232, 236, 238, 241, 264, 274, 307, 313, 320–321, 323, 342, 348–349, 357, 359, 368–369, 389–392, 395–397, 400, 402–404, 407, 410–411, 414, 423–424, 434, 437, 439, 444, 449, 461

PKO 258

PKRI 307

PNI 3, 5–8, 12–13, 17–18, 23–25, 28–30, 34, 46–48, 56, 60–62, 64, 74–77, 83, 87, 114–117, 119–123, 139, 181, 183, 185, 197, 202, 210, 226–227, 231–232, 236, 238, 259–261, 265, 267–268, 272, 277, 280, 288, 295, 298–299, 300, 303, 305–307, 312, 321–324, 328, 335, 337–339, 343, 347–351, 353, 357, 359, 368–369, 382, 385, 387, 389–392, 395–396, 398–401, 404, 408, 410, 434, 437, 439, 449, 464

Port Said 332

PPKI 131–133, 135, 136

PPPH 260–261, 281

PPPKI 260

Prawirodihardjo, Raden 289, 290

Prawirosentiko 292

Prawoto Mangkusasmito 6, 48, 183, 217–218, 243, 304–306, 387, 391, 414

Presekusi 275

pribumi 2, 21, 62, 66, 213, 215, 252–253, 255, 258–259, 281, 322, 330, 344, 346, 352, 424, 425–426

Primordialisme 253

Pringgodigdo, A.G. 184–185

Pringgodigdo, A.K. 18, 126, 184–185, 319

Privilege 289, 332

priyayi 19, 65, 253, 329, 424

PRN 272, 275, 339, 396, 400–401

Program Pembangunan Nasional 361

Progresif 13, 19, 21, 33, 35, 59, 72–74, 80, 90, 241, 255, 274, 294–296, 322, 331, 333, 339

Provinciale Waterstaat/Dinas Perairan Provinsi 427

pro-West neutralist 276, 284

PRRI Permesta 412, 423

PSI 47–48, 156, 162, 181, 203, 221, 227, 229, 232, 238–239, 242, 259–260, 275, 307, 312, 321, 337, 342, 355, 359, 373, 383, 390–391, 395, 404, 409–411, 423, 434, 444, 454

PSII 77, 80, 117, 122, 185, 262, 307, 355, 362, 396, 401, 449

Pura Pakualaman 258

Purworejo 6, 179, 185, 257, 288–290, 385

Putera 18, 127, 233, 298, 422

Putuhena, Ir. 188

R

Raad van Indie/Dewan Hindia 33, 427

Raden Panji Iskaq Tjokrohadisurjo 333

Raden Wiwoho 262

Radikal 22, 25, 46–47, 57–58, 60–61, 64, 71, 73, 75, 77, 81, 93, 99, 104, 106, 112, 118, 123, 129, 146, 224, 232, 255–257, 260, 274, 281, 297, 337, 341, 343, 345, 387, 397, 411, 465

Radjiman Wediodiningrat, Dr 29, 129, 131, 257

Rajiun Harahap 333

Rasuna Said 322

Ratifikasi 277–278, 283, 337

Ratu Wilhemina 135

razia Agustus 270, 274–275, 281, 320

Rechtsschool 254

Recomba 192

Rencana Lima Tahun 239, 361, 422, 431

Republik Indonesia Serikat 4, 5, 81, 88, 100, 154, 173, 225, 335, 460, 462

Republik Maluku Selatan (RMS) 194

Resisten 73

Revolusi 3, 13–14, 33, 38, 58–59, 70, 73, 75, 81, 85–86, 88, 92–93, 107, 132–134, 146, 148, 159, 161, 172, 194–195, 200, 204, 212, 223, 236, 238, 280, 298, 309, 324, 344, 349, 391, 402, 413, 424, 429–430, 435, 437, 456, 467

RHS (*Rechthogeschool*) 293

Ricklefs, M.C. 35, 146, 260

Roberspierre 59

rode advocaat 335

Roem, Moh. 48, 83, 139, 141, 154, 156–157, 162, 180–181, 217–218, 223, 227, 243–244, 259, 277, 299, 306–307, 309, 311, 313, 323, 325, 337–338, 357, 359, 361, 366, 368, 384, 387, 391, 406, 409, 414, 454, 462

Roem-Roeijen 359

Roeslan Abdulgani 42, 365

Roosseno, Ir. 353

Rosihan Anwar 3, 46, 423, 453

Rotgen 258

Rudolph Mrazek 3, 21

Rumah Sakit Cipto Mangkunkusumo (RSCM) 202

Rumah Sakit Petronella (Bethesda) 179, 180, 223

Rusbandi 22

Rusia 61, 84, 146

Ruslan Muljohardjo 367

Rusli Abdul Wahid 362

Rustam Sutan Palindih 348

S

S. Parman, Letkol 320

Sabang 192, 255

Sabotase 223, 275

Sadjarwo 339

Sahardjo, Mr. 312

Said, Muhammad 323

Sakirman, Ir. 225–226

Sakri Soenarto 256

Saleh Umar 321

Salemba 202

Salomon Tas 21

Sampar 255

Samsi 17, 109, 134

San Fransisco 276–278, 283, 337, 390

Sangihe-Talaud 193, 311

Sanusi Hardjadinata 272

Sanusi Pane 65

Sanyo 71

Sardjono 74, 90, 322

Sarekat Rakyat Nasional Indonesia (SRNI) 118

Sarikat Islam 221, 259, 291, 331

Sarmidi Mangunsarkoro 184–185, 337, 385

Sartono, Mr. 5, 23, 61, 118, 134, 181, 265, 267, 277, 295–296, 298, 313

Sastroamidjojo, R.Ng. 329

Satiman 250–253, 259

Sayuti Melik 132

Schacht, Hjalmar 281

School Opziener 290

School tot Opleiding van Inlandsche Artsen 252

SDI 259

Sekolah Dokter Pribumi 252

Sekolah Pendidikan Ahli Ilmu Kedokteran Pribumi 252

Sekolah Tinggi Islam (STI) 222

Sekutu 1–2, 14, 27, 29–30, 33–35, 56, 70–72, 126, 131–136, 155, 177–179, 182, 276, 391, 410

Semaoen 256

Semarang 29, 69, 80, 122, 192–193, 291, 328, 413

semenanjung Korea 270

Seno Sastroamidjojo 331

Sentiment 227, 275, 364, 366

Setiadjid 77

Sewaka 268, 273, 279, 281

Shakespeare 92, 332

Shaw, Bernard 332

SI 102, 254, 259

Sidik Djojosukarto 5–6, 305–307, 337, 387

Sidik Kertapati 322, 324

Simatupang, T.B.,Mayor Jenderal 28, 84, 93, 149, 317, 353

Simbolon, M., Kolonel 242, 319, 354, 365–367, 407, 411–414, 439, 442, 444, 465

Sinergis 343

Singapura 33, 43, 114–115, 216

Sirajuddin Abbas 398

Sjafruddin Prawiranegara 140, 156, 180, 277, 343, 346, 383, 391, 411, 424

Sjahrir, Sutan 2, 4, 6, 11–12, 14, 22, 31–32, 40, 49, 172, 175, 203, 211, 213, 240, 384–385, 387, 422, 454

Sjahrizal Djoehana 20

Sjamsuddin Sutan Maknur 319

Sjamsuridjal 351

Sjech Markhaban 362

SOB 275, 307, 318, 369

SOBSI 87, 91, 231, 321–322, 444

Sociaal Democrasiche Arbeiders Partij (SDAP) 21, 114, 334

Sociaal Democratische Studenten Club 21

Soe Hok Gie 42, 69, 92

Soebandrio 48, 424, 453

Soedarpo Sastrosatomo 28

Soedarso, Ki 292–293

Soedirman, Jenderal 41, 84–85, 88, 91, 146, 152–153, 298, 461

Soediro 298

Soedjatmoko 28

Soedjono 74, 289

Soeharto 8, 163, 165, 414–415

Soekadi, dokter 74, 291

Soemitro Djojohadikoesoemo 307, 343

Soenarjo, Mr. 18, 353, 361

Soeprajogi, Letnan Kolonel 365

Soeripno 77, 88, 99, 90, 92

Soeroso 261

Soetan Goenoeng Moelia 58–59, 63

Sofjan Siradj, H. 348

Solidarity maker 133, 268, 288, 424

Solok 5, 214

Soumokil 159, 194

Soumoukil, R.S. 233

Southampton 255

Soviet 47, 84, 88–90, 92, 146, 161, 256, 274, 279, 332, 368, 387, 437, 452

Spectrum 264

Sri Lanka 332, 371, 372

Sri Sultan Hamengkubuwono IX 158, 195–196, 201, 229, 430

Staf Komando 162

Stakeholder 261

STOVIA 5, 176, 252–256, 259, 309, 331

Studenten Islam Studieclub (SIS) 384, 387, 393, 415

Studerenden Vereeniging Minahasa 253

Studie Club 259

Subadio Sastrosatomo 17, 28, 48, 74

Sudarnadi 348

Sudibjo 339, 348, 362

Sudiro 132, 272, 351

Sudisman 320

Sudjatmoko 373

Sudjono Hadinoto 268, 303

Suez 255, 332, 365, 375

Suhardi, Prof. Dr. 362

Sukabumi 26, 125, 225, 292–293, 295

Sukalid 348

Sukamiskin 63, 120, 295

Sukarjo Wiryopranoto 296

Sukarni 2, 131–132, 185, 384

Sukarno 2–3, 5–6, 8, 13–14, 17–19, 22, 24–25, 27–30, 33–35, 37, 39, 41–42, 48, 56–57, 59–64, 70–74, 76–79, 82, 87–89, 91–92, 99, 116–123, 126–139, 146, 151–153, 155–156, 158–159, 161–163, 165, 174–177, 179–180, 182–184, 189–190, 192, 194, 198–200, 202, 210–213, 216, 218–219, 222–223, 226, 228, 235, 237–240, 242, 246, 251, 260–261, 264–265, 267, 271–272, 276, 282, 284, 294–295, 297, 300, 304–306, 308, 318–319, 328, 335–338, 340–341, 354–355, 358–359, 361–364, 368–370, 375, 383, 386, 389–392, 395, 398, 401, 407–412, 414, 422–426, 428–429, 434, 439–443, 445–447, 450–451, 453–457, 461–466

Sukiman Wirjosandjojo 5, 107, 140, 221, 227, 235, 250, 255, 267, 333, 384–385, 387, 389, 391–392, 409, 422

Sulawesi 119, 134, 158, 192, 194, 202, 225, 231, 241–242, 272, 349, 389, 408, 434, 437, 439, 445–446, 464

Sulawesi Selatan 225, 231, 272, 349, 408, 446, 464

Sultan Hamid 48, 155–156, 158

Sumanang 223, 296, 314

Sumarto 348

Sumatera 3, 5, 14, 16, 27, 39, 41–42, 59–60, 63, 75, 80–81, 88, 101–103, 116, 119, 134–135, 139, 144, 149, 151–152, 158–159, 174, 180, 183, 188–189, 192–193, 195, 197, 214, 225, 230–231, 235–236, 241–242, 245, 253, 263, 301–302, 314–315, 323–324, 331, 337, 365–367, 383, 386, 389–391, 408–412, 416, 423, 434, 436, 439–440, 442–444, 456

Sumatera Barat 5, 14, 16, 101–102, 116, 180, 183, 214, 242, 263, 389, 416, 436, 439–440, 442–443, 456

Sumatera Selatan 144, 188, 192, 367

Sumatera Tengah 188, 193, 242, 367, 412, 444

Sumatera Timur 81, 158–159, 188, 192, 195, 197, 225, 301–302, 324, 337, 383, 390

Sumatera Utara 3, 149, 151, 188, 230–231, 235–236, 242, 323, 337, 365, 390, 408, 439

Sumikalimah 293

Sumitro Djojohadikoesoemo 281

Sumitro Plan 232, 281

Sumowidagdo 258

Sumpah Pemuda 19, 60, 154, 465

Sun Yat Sen 18, 59, 111

Sunario Sastrowardoyo 333

Sunario, R. 339

Sunarti 273

Sunda 7, 16, 20, 134, 146, 174, 254, 422, 424, 426–427, 450

Sungai Bengawan Solo 250

sungai Rhine 334

Suprapto 275

Surabaya 16, 26, 29, 57, 62, 69, 74–75, 80, 89, 121, 125, 163, 189, 201, 329, 399, 425, 433, 455

Surakarta 5, 33, 41, 146, 149–150, 250, 259

Surjaningprodjo 348

Suroso, R.P. 355

Surplus 270, 398

Suryakanta 332, 370

Suryopranoto 261–262

Susanto Tirtodiprodjo 184

Sutan Muchtar Abidin 339

Sutarto Hadisudibjo 373

Sutoko, Kolonel 319–320

Sutomo, Dr. 176, 296

Suwarni 18

Suwiryo 265, 277, 300

Swiss 49, 112–113, 283, 299, 333–334, 406, 461

Sjahrir 2–6, 11–50, 56–58, 62–63, 69–70, 72–76, 80–81, 83–85, 87, 90, 93, 114–115, 120, 122–124, 126, 131, 134, 136, 139, 149, 151, 154, 156, 162, 172–173, 175–183, 185, 200–201, 203, 211–213, 216, 222, 240, 261, 265, 295, 309, 341, 384–385, 387, 422–423, 429, 454, 460–461, 466

Syarifuddin Prawiranegara 153, 270, 387

T

Tabrani, Moh. 296

Takiikukai 174

Taman Siswa 218, 292–293, 307, 337

Tambunan, A.M. 226, 306, 319

Tan Ling Djie 74, 76, 90

Tan Malaka 2, 35, 39, 41, 75, 134, 146–147, 264, 273

Tan Po Goan 275

Tanah Merah 26, 295

Tanjung Balai 383

Tanjung Morawa 322, 324, 338, 389–390

Tanjung Priok 25, 33, 115, 423

Tapanuli 58, 188, 367, 383

Tasikmalaya 424, 429

Tauhid, Moch. 226

teater stambul 253

Technische Hogeschool Bandoeng 426

Teldelen Street 336

Tentara Masyarakat 85–86, 100

terowongan Simplon 333

Terusan Suez 332, 365

Teuku Mohammad Hasan 132

Thamrin, M.H. 246

THS (*Technischehoogeschool*) 291

Tidore 364

Tionghoa 7, 65–66, 125, 188, 259, 274–275, 289, 322–323, 352, 389, 397, 425–426, 438

Tiongkok 275–276, 321, 323, 368, 389

Titi Roelia 332

Tjahja Volksuniversiteit 16, 20

Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 64

Tjikwan, K.H. 353

Tjiptomangunkusumo 17, 19, 26, 104–105, 118, 125

Tjokroaminoto, H.O.S. 260, 298. 384, 415

TKR 84, 136

TNI 85, 87–88, 201–202, 233, 235, 241–242, 318, 348, 350, 354, 364, 391, 396, 401, 409, 412, 416, 423, 434, 456, 462, 464–465

Tobing, FL. 339

Tokyo 127–128, 203, 454

totok 332

Tour of Duty 364–365, 367

tradisionalis 58, 227, 235, 250, 264, 284

transnasional 240, 245, 328

Tri Koro Dharmo 253

Trimurti, S.K. 298, 301

Turki Usmani 217

Tumenggung Ario Danuningrat II 329

tweede klasse school 329

U

Ujung Pandang 369

Ulama 6, 98, 100, 211–212, 216–217, 220, 223, 236, 240–241, 263, 389–390, 406, 408, 410

Umbas, N.F. 362

Undang-Undang Anti-Korupsi 399

Uni Soviet 88, 387, 437, 452

unie-statuut 284, 345

Uni-Indonesia Belanda 405

Unitas Studiosorum Indonesiensis (USI) 28

United Nations Conference on Law of the Seas (UNCLOS) 451

United Nations Technical Assistance Administration (UNTAA) 435

urban 47, 253

Urip Sumohardjo 135

Usman 74, 334, 445

V

Van der Plas 33, 68, 135

Van Mook 38, 68, 76, 80–81, 83, 100, 135, 137, 139, 141, 144, 147, 427, 461

van Vollenhoven, Profesor Cornelis 106, 333

Vickers, Adrian 254

visualisasi 256

VOC 332

Volksraad 59, 102, 256, 296–297, 330–331, 427

vorstenlanden 257, 294

W

Wachid Hasjim 129, 133

Wahab Chasbullah 227, 284

Wahid Hasyim, K.H. 156

Wahid Muhari 385

Washington 6, 147, 278, 317, 336, 339, 370, 375–376

Wasile 364

Weda 364

Westendorp, Tuan 329, 332

Westerling 158, 224, 275

Widjojo Nitisastro 436

Wikana 28, 64, 67, 70, 73, 76–77, 90, 135

Wilopo 6, 64, 126, 156, 177, 268, 283, 287–299, 301–325, 336–338, 343, 347, 349–350, 354, 357, 359, 362, 371, 383, 387, 389, 391–392, 395, 402, 405, 422, 431, 433, 464

Winarno 367

Wirjodipuro 329

Wiyoso 251

Wongsonegoro, Mr. 59, 134, 154, 229, 338–339, 352–353, 392

Y

Yamin, Mohammad 20, 57, 59, 60–65, 129, 268, 270, 272–273, 280, 296–297, 339, 341, 399, 405, 439, 455

Yogyakarta 7, 16, 29, 33, 92, 151, 160–161, 173, 223, 227, 257–258, 291, 294, 384, 429

Yugoslavia 47, 437

Yunan Nasution 244, 414

Z

Zain Jambek 221

Zainal Abidin Syah 364

Zaini Dahlan 385

Zainul Arifin 339

zaken kabinet 6, 284, 305, 338

zaman bergerak 331

Zulkifli Lubis 354–355, 365, 407–408

Zurich 49, 461

PENULIS

FARABI FAKIH

Farabi Fakih adalah dosen sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Ia menyelesaikan studi S3 dalam bidang ilmu sejarah di Universitas Leiden, Belanda, pada tahun 2014 mengenai dekolonisasi negara Indonesia pada tahun 1950-1965. Penelitiannya fokus pada sejarah perkotaan, sejarah politik-ekonomi dan sejarah pengetahuan. Ia tertarik mengenai bagaimana ide dan lembaga saling mempengaruhi dalam membentuk kota, pemerintah dan negara dalam perkembangan sejarah Indonesia abad ke-20. Saat ini ia sedang melakukan penelitian mengenai dekolonisasi dan produksi pengetahuan dalam perusahaan-perusahaan Indonesia pada tahun 1950an dan 1960an.

UJI NUGROHO WINARDI

Uji Nugroho Winardi menamatkan pendidikan S1 di Jurusan Sejarah UGM dan melanjutkan studinya untuk memperoleh gelar M.A. di Universitas Leiden Belanda melalui program Encompass. Salah satu riset teranyar yang dipublikasikan bersama Tim Penulis adalah "Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 dan 1955 di Yogyakarta" (2018). Memiliki ketertarikan pada sejarah sosial-politik, saat ini, Uji Nugroho W tengah mendalami *Spatial History* dengan memanfaatkan kartografi untuk memahami masa lalu. Ia merupakan staff pengajar pada Departemen Sejarah UGM.

WILDAN SENA UTAMA

Wildan Sena Utama merupakan dosen Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Ia lulus S1 dari Jurusan Ilmu Sejarah UGM tahun 2011 dan melanjutkan studi dalam program Cosmopolis, Leiden University, dengan konsentrasi Colonial and Global History di tahun 2013. Setelah menyelesaikan program BA dalam Cosmopolis di tahun 2014, ia mendapatkan beasiswa LPDP untuk mendapatkan gelar S2 di dalam konsentrasi yang sama di Institute for History, Leiden University tahun 2015. Tesisnya mengenai Konferensi Asia-Afrika 1955 dibukukan dengan judul *Konferensi Asia-Afrika 1955: Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Antiimperialisme* (Marjin Kiri, 2017). Buku ini dinobatkan oleh Jakarta Globe di tahun 2018 sebagai salah satu dari "30 buku yang membantumu memahami Indonesia, raksasa Asia Tenggara". Wildan pernah menulis artikel dan review buku di berbagai jurnal internasional dan nasional antara lain: *Bijdragen tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *Asian Journal of Social Science*, *Lembaran Sejarah*, *Jurnal Sejarah*, *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, *Humaniora*, dan *Prisma*. Terbitan terbarunya adalah buku yang ditulis bersama Farabi Fakih, Uji Nugroho, dan M. Nazir Salim, berjudul *Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta* (2018). Tahun 2019 ini, ia akan melanjutkan studi doktoralnya pada Department of History, University of Bristol, Inggris, menulis tentang jaringan politik global intelektual dan aktivis Indonesia dalam gerakan solidaritas Asia-Afrika di masa Perang Dingin.

EDITOR

ANHAR GONGGONG

Anhar Gonggong adalah seorang sejarawan. Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, pada 14 Agustus 1943. Mendapatkan gelar Sarjana Muda dalam bidang Ilmu Sejarah Asia, Universitas Gadjah Mada, tahun 1967; gelar Sarjana di almamater yang sama tahun 1976; Mengikuti kuliah Orientasi tentang Sistem Politik di Negara-negara Berkembang pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Hukum, Universitas Leiden, Belanda, yang diselesaikannya tahun 1980; dan mendapatkan gelar doktor dari Ilmu-ilmu Sastra bidang Sejarah, Universitas Indonesia, tahun 1990.

Berbagai profesi dan jabatan telah disandangnya, antara lain, Staf Pengajar di Universitas Atmajaya, Jakarta, 1984-sekarang; Staf Pengajar pada Jurusan Sejarah/Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1991-sekarang; Widyaiswara/Tenaga Profesional Lemhannas, 1985-sekarang; Staf Pengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sentul, Bogor, 2005-sekarang; Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1996-1999; Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pranata Sosial, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2000-2001; Deputi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2001-2003. Beberapa karyanya antara lain, Biografi : H.O.S. Tjokroaminoto, Depdikbud, 1984, Amandemen, Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme, Solusi untuk Masa Depan, Media Pressindo, Yogyakatra, 2001, dan Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan Pergumulan antara Masyarakat Warisan dengan Masyarakat Merdeka-Ciptaan, Ombak, Yogyakarta, 2002.

SRI MARGANA

Sri Margana lahir di Klaten, Jawa Tengah, Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1969. Ia memperoleh gelar Sarjana dan Magister di Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1995 dan 2001 dan gelar doktor dari Leiden University, Belanda tahun 2007. Sejak tahun 1998 ia bekerja sebagai dosen di Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2001 ia mengikuti The Advanced Master Programme of CNWS, Universitas Leiden, Belanda dalam kerangka kerja proyek TANAP (Towards a New Age of Partnership). Ia memiliki minat di bidang sejarah sosial-politik Jawa pada masa prakolonial dan kolonial. Beberapa karyanya antara lain Kota-kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial, terbit tahun 2010; Ujung Timur Jawa, 1763-1913: Perebutan Hegemoni Blambangan, terbit tahun 2012; dan Keraton Surakarta dan Yogyakarta 1769–1874, terbit tahun 2004.